Rows
Collection
POTRET PILKADA
DKI JAKARTA 2017:
Fenomena AHOK

POTRET PILKADA DKI JAKARTA 2017:
Fenomena “AHOK”

Credit:
Cover oleh Dayat Banggai

POTRET PILKADA DKI JAKARTA 2017:

Fenomena “AHOK”

Rows Collection
2017

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan kumpulan opini perihal pilkada DKI Jakarta 2017 khususnya kandidat petahana saat itu (Ahok) yang sangat fenomenal di kancah perpolitikan Indonesia khususnya Jakarta.

Beragam opini yang bermunculan perihal beliau yang muncul di beberapa media cetak nasional dicoba ditampilkan disini seobjektif mungkin (baik yang pro dan kontra).

Singkat kata semoga buku ini bermanfaat.

Rows Collection

DAFTAR ISI

Ahok, Tionghoa, dan SARA

Ketika maju sebagai kandidat Wakil Gubernur Jakarta, Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama tak pernah berpikir bahwa ia adalah orang Cina. Sebab, sejak awal ia merasa seratus persen Indonesia. Perasaan itu sesungguhnya total mengkristal sejak reformasi 1998. Sebab, sejak kurun itu, warga Tionghoa dijunjung status baru: "*suku Tionghoa*", yang secara eksistensial merupakan bagian resmi dari keluarga besar Indonesia Raya. Dengan status ini suku Tionghoa memang secara otomatis punya kewajiban agar di mana pun dan kapan pun harus selalu Indonesia. Meski Indonesia sedang diguncang gempa dan disaput angin topan, misalnya.

Ahok tentu hanya sebagai contoh pembuka karena, sejak memasuki Orde Reformasi, orang-orang yang sesuku dengan Ahok tentu telah banyak berkontribusi dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Namun lantaran pada orde ini Indonesia berjalan dengan semangat tanpa sekat, kontribusi tersebut tidak lagi diekspos serta ditengarai sebagai karya suku Tionghoa. Sebagaimana kita tidak perlu menghitung bahwa yang ini kontribusi suku Bali, sementara yang itu kontribusi suku Sumatera, Jawa, atau Papua.

Orde Reformasi agaknya telah belajar dari pengalaman masa lalu, betapa sebuah upaya mengkalkulasi kontribusi suatu ras akhirnya malah melahirkan sentimen primordial. Dan sentimen ini apalagi yang dikontaminasi negativitas politik--akan melahirkan penekanan, pembatasan, dan penyembunyian kenyataan.

Pada masa Orde Baru, sikap seperti ini kerap dilakukan. Sebagai contoh adalah upaya pemerintah kala itu untuk menghapus kontribusi Sin Ming Hui. Sebuah organisasi yang pernah sepenuhnya bekerja untuk Indonesia, demi mengisi tahun-tahun awal Kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Hasil kerja perkumpulan warga Tionghoa peranakan ini oleh Orde Baru berusaha ditenggelamkan dari sejarah, bahkan dihilangkan dari ingatan bangsa. Berikut ini adalah sepetik cerita (noktah pengingat) tentang organisasi yang selama berpuluh tahun berusaha dilupakan peranannya itu.

Diruntuhkan

Sin Ming Hui atau Perkumpulan Terang Baru dideklarasikan pada 20 Januari 1946 di bilik kantor majalah Sinpo di Jalan Asemka, Jakarta Kota. Setelah berkembang, Sin Ming Hui menyewa rumah berkamar 100 milik Khouw Kim An di Molenvliet West (kini jalan Gajah Mada) sebagai kantornya. Mayor Khouw Kim An adalah anggota Dewan Rakyat (*Volksraad*) 1921-1931 yang meninggal dalam penjara Jepang pada Februari 1945. Dalam dunia pendidikan, Sin Ming Hui mendirikan SD, SMP, SMA, Sekolah Asisten Apoteker, sampai perguruan tinggi yang sekarang dikenal sebagai Universitas Taruma Negara. Di bidang kesehatan, Sin Ming Hui mendirikan beberapa poliklinik, juga rumah sakit yang kini dikenal sebagai Rumah Sakit Sumber Waras. Bahkan perkumpulan ini mempunyai seksi

bantuan hukum, pelayanan bagi rakyat jelata yang tak memiliki pengetahuan hukum.

Sin Ming Hui menghasilkan banyak nama yang punya kontribusi besar dalam kemajuan negara dan bangsa Indonesia. Di antaranya Meester Oei Tjoe Tat, yang akhirnya menjadi menteri. Yap Thiam Hien menjadi pengacara legendaris. Liem Tjing Hien menjadi ahli hukum ternama, yang kini jejaknya dilambungkan oleh istrinya, notaris Kartini Muljadi. Dr Loe Ping Kian menjadi aktivis bidang kesehatan. Tjan Tjoen Hok alias Harry Tjan Silalahi menjadi pengamat politik terkenal. Ouwyong Peng Koen alias P.K. Oyong menjadi tokoh pers, dan salah satu pendiri harian Kompas.

Nama Sin Ming Hui berubah menjadi Perkumpulan Tjandranaja, sesuai dengan Surat Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32/19 April 1962. Meski berganti nama, aktivitas organisasi ini berjalan sebagaimana biasanya. Namun, setelah peristiwa G30S 1965, semua kegiatan yang bersangkut-paut dengan Tionghoa dibekukan oleh Orde Baru. Gedung Tjandranaja disita dan ditelantarkan. Sampai akhirnya gedung indah, monumental, antik, serta bersejarah itu reyot dan terpaksa dibongkar habis.

Orde Baru menganggap pengaburan aktivitas dan penghapusan jejak gedung ini identik dengan terhapusnya peran warga Tionghoa. Padahal Sin Ming Hui berjuang sama sekali bukan untuk mengibarkan potensi suku Tionghoa, bukan untuk menumpuk jasa suku Tionghoa, dan tidak memiliki agenda lain di luar pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia.

Lintang-Pukang

Penghapusan kontribusi warga Tionghoa ini juga dilakukan di bidang kebudayaan dan kesenian. Di antaranya menimpa Yin Hua, perkumpulan seni yang pendiriannya diinspirasi oleh Sin Ming Hui. Kata Yin berarti Indonesia, Hua artinya Cina. Perkumpulan ini didirikan pada 1955 dan diketuai oleh Lee Man Fong. Sanggar Yin Hua terletak di kawasan Princenpark (kini Lokasari), Jakarta Kota. Dalam "deklarasi-nya, mereka bertekad mencipta karya-karya terbaik untuk Indonesia Raya, tentu dengan tidak menjunjung-junjung ketionghoaannya.

"*Kami berkarya seperti orang Bali berkreasi, seperti orang Batak berkarya, seperti orang Kalimantan bekerja. Semua untuk menyumbang keragaman budaya Indonesia yang sudah sepuluh tahun merdeka*," kata Yap Thay Hua, wakil ketuanya, kala peresmian perkumpulan itu, 57 tahun silam.

Pameran-pameran Yin Hua disambut antusias. Presiden Sukarno bersama sejumlah menteri adalah tamu utamanya. Dari sini kemudian dikenal sejumlah figur yang terus berkelindan dalam sejarah seni rupa Indonesia. Bahkan Lee Man Fong diangkat sebagai Pelukis Istana Presiden Sukarno, bersama Lim Wasim. Gerakan nasionalis Yin Hua ini diikuti oleh seniman Tionghoa di berbagai daerah, seperti Lim Kwie Bing, Lim Tjoe Ing, sampai Siauw Tik Kwie.

Tapi, seperti halnya Sin Ming Hui, setelah peristiwa G30S 1965, Yin Hua diteror sehingga bubar. Orde Baru mengeluarkan keputusan politik Instruksi Presiden No. 14/1967, yang melarang semua kegiatan beraroma Cina. Tekanan ini menyebabkan para seniman Tionghoa yang nonpolitik itu lintang-pukang. Lee Man Fong ngabur ke Singapura. Wen Peor lari ke Hong Kong. Lim Wasim menyamar jadi tukang roti. Siauw Tik Kwie, pencipta komik "*Sie Jin Kui*", menyepi seraya memperdalam filsafat Jawa Ki Ageng Suryomentaram dan berganti nama menjadi Oto Suatika. Sedangkan Siauw Swie Tjing rela dikabarkan mati, untuk kemudian menjelma menjadi Chris Suharso.

Sekali lagi, paparan di atas adalah sekadar noktah pengingat betapa pada masa lalu peranan Tionghoa (secara tidak perlu) berusaha ditenggelamkan dari sejarah. Kini suku Tionghoa sudah berumah di bawah langit Indonesia yang bersih dari mata-mata pengkalkulasi kontribusi, serta bebas dari teropong yang menelisik curiga: "*ada apa di balik peran yang dilakukan suku Tionghoa*". Dengan demikian, atas apa yang akan dihasilkan dalam pengabdian, siapa pun tidak perlu menyebut bahwa itu adalah jasa kalangan Tionghoa. Itu sebabnya, orang-orang seperti Ahok alias Zhong Wan Xie alias Basuki Tjahaja Purnama layak diberi kesempatan luas untuk melaksanakan pengabdiannya sebagai seratus persen orang Indonesia. Dalam bidang apa pun, dalam jabatan apa pun. Dengan begitu, ia terjauhkan dari isu SARA.

Agus Dermawan T, Kritikus Seni

KORAN TEMPO, 05 September 2012

Ahok Bukan "*Kapitein der Chinezen of Batavia*"

Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok -tanpa mengurangi rasa hormat- adalah "*angpau*" terbesar bagi ketionghoaan dan kemajemukan di negeri ini. Jabatan wakil gubernur di provinsi sekaligus ibu kota merupakan bukti kepercayaan dan cara pandang yang sangat maju dari kemajemukan urban masyarakat Jakarta. Ahok bukan prototipe "*pranawa*" (peranakan China-Jawa) yang selama ini dominan mengisi ketionghoaan di negeri ini. Ini karena Tionghoa di Jawa lebih dekat dengan pusat kekuasaan kolonial Belanda di Jawa, sehingga kiprahnya lebih menonjol.

Sebagai bukan Tionghoa Jawa tetapi Tionghoa Bangka Belitung atau Sumatera, Ahok menampilkan ketionghoaan yang lebih lugas, langsung, tanpa tedeng aling-aling, rasional dan kadang berintonasi meninggi. Ini berbeda dengan personifikasi Tionghoa Jawa yang njawani dan sikapnya yang lebih ngapurancang (mendekapkan kedua tangan di bagian depan perut) wujud sikap lebih mengalah dan nrimo. Ketionghoaan dengan begitu sangat beragam, tak ada definisi tunggal tentang Tionghoa Indonesia, masing-masing mengisinya dengan karakter dari budaya masyarakatnya di mana ia tinggal.

Runtuhnya Diskriminasi

Terpilihnya Ahok adalah puncak kegamangan ihwal diskriminasi Tionghoa selama ini, tapi akhirnya bisa dilewati dengan mulus. Jauh sebelum Ahok terpilih di Jakarta, ia terpilih lebih dahulu sebagai Bupati Belitung Timur. Kita harus berterima kasih pada masyarakat Belitung Timur yang telah memilihnya sehingga ada Tionghoa Ahok dipercaya sebagai puncak eksekutif di sana. Meski sentimen etnik bermunculan ketika seorang minoritas berupaya memimpin mayoritas yang berbeda, tetapi kepercayaan masyarakat Belitung Timur dulu menunjukkan bahwa masyarakat harus bebas memilih kandidat potensial, siapa pun dia dan apa pun latar belakangnya. Kemajuan masyarakat Belitung Timur untuk tidak tunduk pada kriteria primordial seperti seagama, seetnik, dan seterusnya menunjukkan bahwa saat ini mengusung primordialisme sudah bukan jaminan. Mereka yang dipercaya dan dituakan dalam bidang agama, yang dipercaya hidupnya suci dan alim ketika dipercaya memimpin sebuah partai politik justru mengingkari kepercayaan itu dengan korupsi.

Upaya masyarakat Belitung Timur lepas dari primordialisme ketika memilih Ahok, terulang di Jakarta ketika masyarakat metropolitan yang majemuk memilih Jokowi-Ahok. Padahal, sentimen ras dan agama sangat kuat menerpa Ahok, tetapi masyarakat Jakarta bisa juga menjauhi primordialisme. Logikanya demikian karena Jakarta lebih majemuk dan terbuka dibanding Belitung Timur. Semua ini menunjukkan bahwa Jakarta menjadi teladan nasional dalam meruntuhkan sekat diskriminasi, khususnya Tionghoa dalam berkiprah sebagai pemimpin bangsa. Selama ini

ketionghoaan sebatas dijatah, menjadi menteri yang ditunjuk oleh presiden. Tapi dengan terpilihnya Ahok secara langsung, pelajaran demokrasinya ialah masyarakat memilih Tionghoa dan bukan presiden, sehingga kesadaran antidiskriminasi masyarakat sangat tinggi.

Perubahan harus diraih melalui semua cara dan semua kalangan yang mampu mengusung perubahan itu. Selama ini perubahan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan selalu bersumber dari tokoh primordial sehingga mereka yang seagama, seetnik dan seterusnya yang lebih sering terpilih untuk memimpin. Dengan keluar dari patron primordial ini, seorang Ahok bukan dilihat Tionghoanya atau Kristennya, tetapi dilihat kemampuannya untuk ikut melakukan perubahan yang lebih baik bersama Jokowi. Tentu kita akan melihat prestasi Jokowi-Ahok beberapa tahun ke depan, bisa sukses bisa pula stagnan atau buruk. Pelajarannya masyakarat belajar bertanggung jawab atas pilihannya. Jika Ahok gagal masyarakat dewasa akan melihat kegagalan itu objektif dan bukan karena etnik atau agamanya. Di sini masyarakat berusaha memilah antara kinerja Ahok yang bisa diukur, dan fakta etnik atau agamanya di sisi lain sebagai urusan takdir dan privat yang tidak bisa dibawa-bawa.

Sentimen ras dalam soal panggilan "china", yang pernah dialami Ahok ternyata tidak mempan membuat Ahok tersinggung dan menggunakan kekuasaannya untuk merespons. Responsnya netral-netral saja, mendiamkan dan membuat soal "china" itu menjadi tidak berarti apa-apa. Sindrom "*china*" yang dialami Tionghoa sebetulnya hanya buang-buang waktu. Upaya berbagai pihak untuk "*jangan panggil aku china*" (JPAC) dalam berbagai media buku, sinetron, puisi, blog dan seterusnya kontraproduktif karena secara tidak langsung sudah mengakui panggilan itu merendahkan dan menghina. Padahal, politik bahasa rasial lewat panggilan atau sebutan "*china*", "*indon*", "*niger/negro*" dan seterusnya memang bertujuan agar mereka yang dipanggil itu tersinggung, marah dan merasa terhina sehingga diri dan mind set mereka mendapat pengakuan dan stigma sosial bahwa mereka itu memang seperti itu. Tujuannya agar mereka tetap berkubang dengan nasibnya yang buruk sehingga tidak mengancam keberadaan si pembuat politik bahasa rasial.

Menanti Ahok yang Lain

Dengan hadirnya Ahok di panggung Jakarta yang otomatis lebih tersorot secara nasional, membuat masa depan ketionghoaan dalam keindonesiaan diharapkan semakin baik. Ketionghoaan harus terus berupaya dicangkokkan ke dalam budaya masyarakatnya di mana ia tinggal. Ahok yang tinggal di Jakarta yang majemuk dan berbasis budaya Betawi sebagai tuan rumah, akan menciptakan pengaruh-memengaruhi dengan hadirnya ketinghoaan ala Jakarta yang majemuk atau yang berciri khas Betawi. Strategi budaya ini penting dan harus ditumbuhkan dan bukan dibiarkan tumbuh liar apa adanya. Dengan keterlibatan Ahok dalam pemilihan bupati, wakil gubernur dan mungkin akan ada Ahok-Ahok yang lain dalam pemilihan ketua partai politik, ketua koperasi, ketua BUMN, atau kandidat jenderal militer atau

polisi, sampai ketua RT/RW, akan mewarnai keindonesiaan dengan lebih baik. Jika itu tercapai maka Ahok bukan milik Tionghoa saja. Ahok bukan romantisme napak tilas ala Kapitein der Chinezen of Batavia Souw Beng Kong, kapitan China pertama di Batavia, di mana peran kapten atau mayor China pada zaman itu menjadi pemimpin komunitas China perantauan (hoakiao) agar Belanda lebih mudah mengatur keberadaan mereka.

Ahok juga bukan titipan Tiong Hoa Hwe Koan di masa lalu yang hanya Tionghoa minded, untuk kepentingan Tionghoa saja. Dengan membebaskan Ahok dari sindrom kapitein der chinezen, Ahok mempunyai tugas lebih luas dan tak dibatasi oleh dinding primordial terutama etnis atau agama. Ahok hanya berakar Tionghoa Kristen yang bertanggung jawab di provinsi majemuk multietnik, multiagama dan multi-multi yang lain, di mana semua harus diperjuangkan untuk menjadi lebih baik nasib dan keadaannya. Terpilihnya Ahok, seperti Nusantara di masa lalu yang membuka diri terhadap berbagai pengaruh budaya asing dari pedagang Persia, India, China sampai Barat. Jika kita bisa memelihara kemajuan ini dan mengubur sentimen primordial maka Indonesia akan dikembangkan dengan objektivitas problem dan profesionalisme kinerja dan prestasi pemimpin-pemerintahan, untuk mempercepat ketertinggalan dari bangsa lain. Selamat Imlek. Hayya.

Stevanus Subagijo, Peneliti pada Center for National Urgency Studies Jakarta

SINAR HARAPAN, 09 Februari 2013

Ahok dan Komunis

DALAM beberapa waktu terakhir ini, media Indonesia memberitakan kasus tentang kemarahan warga Bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara, terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahaja Purnama alias Ahok, karena menuduh warga tersebut sebagai komunis.

Di zaman Orde Baru, tuduhan komunis jelas bukan perkara main-main, karena itu bisa berarti kematian hak-hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya bagi si tertuduh. Karena itu, setelah kejatuhan rezim orba, seluruh elemen pro-demokrasi berusaha sekuat mungkin untuk tidak menggunakan kata komunis sebagai alat untuk memojokkan lawan-lawan politiknya. Pertama, karena faktor kesejarahannya yang berdarah dan brutal tersebut; dan kedua, karena memang telah terjadi pemutarbalikkan dan penjungkirbalikkan yang luar biasa terhadap sejarah gerakan dan pemikiran komunis itu sendiri.

Tentu saja tetap ada yang getol menggunakan kata komunis untuk menyerang atau menyingkirkan lawan politiknya. Siapa mereka? Tidak lain adalah tentara dan kalangan Islam Politik. Tapi, sejauh ini tuduhan-tuduhan komunis itu sudah dianggap sebagai lelucon belaka, sebuah cara berpolitik yang tak beradab. Mereka yang menuduh lawan politiknya sebagai komunis, pasti si penuduh dianggap sebagai politisi yang goblok dan tukang konspirasi.

Karena itu, saya heran mengapa Ahok berani sekali mengumbar kata-kata komunis dalam pertemuan-pertemuan resminya. Apalagi, pemahaman Ahok akan komunisme itu sepenuhnya salah. Ia mendefinisikan komunis bukan berdasarkan pada sebuah telaah teoritik yang mendalam, melainkan hasil dari logika utak atik gathuk-nya. Logika ngawur Ahok itu begini:

A: Tanah milik negara (legal).

B: Warga menduduki tanah negara (legal) tersebut secara illegal.

A+B: Karena warga yang digusur menuntut ganti rugi atas tanah negara yang didudukinya secara illegal tersebut, maka warga (oknum, dalam bahasa Ahok) tersebut adalah komunis.

Kalau pinjam bahasa gaulnya Ahok, saya mau bilang, ‘komunis nenekmu yang definisinya seperti itu.’

Darimana Ahok belajar atau membaca buku bahwa komunis itu adalah seperti yang disebutkannya itu? Kalau melihat usianya, yang kira-kira sekitar 40an tahun, maka bisa dipastikan pemahaman Ahok akan komunisme itu hasil didikan rezim orba. Ia mungkin masih hapal betul buku-buku Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) produk sejarawan ABRI atau sejarawan yang bersekutu dengan rezim orba. Dan karena Ahok sudah tak punya waktu lagi membaca secara serius (sesuai pengakuannya), maka pemahaman yang salah itu tetap melekat di kepalanya. Omongan Ahok yang keliru ini menjadi masalah karena ia adalah pejabat publik yang kini lagi digandrungi oleh banyak orang, sehingga walaupun omongan itu salah secara akademik maupun politik, bisa dianggap benar oleh publik.

Lalu apa makna komunis menurut Karl Marx dan Friedrich Engels? Saya menggunakan definisi kedua orang ini, karena mereka adalah pendiri sekaligus teoritikus utama gerakan komunisme. Engels mengatakan, komunisme adalah sebuah doktrin mengenai kondisi-kondisi pembebasan proletarian (kelas pekerja). Artinya, ini doktrin yang secara sengaja diperuntukkan buat kelas pekerja, bukan buat seluruh kelas. Dengan kata lain, tidak mungkin kelas kapitalis akan menggunakan doktrin komunis ini dalam upayanya melindungi dan memenangkan kepentingannya sebagai sebuah kelas. Kenapa demikian?

Di sini, kita mesti lihat bagaimana Marx dan Engels menganalisa corak produksi kapitalisme. Menurut keduanya, esensi kapitalisme itu adalah adanya dua kelas yang sangat dominan dalam masyarakat, yakni kelas yang memiliki (mengontrol dan menguasai) alat-alat produksi yang disebut sebagai kelas kapitalis; serta kelas yang hanya bisa hidup jika ia menjual tenaga kerja (alat produksi satu-satunya) kepada kelas kapitalis. Intinya, masyarakat kapitalis itu adalah masyarakat yang dicirikan oleh sistem kerja upahan. Tentu saja masyarakat kapitalis tidak hanya terdiri dari dua kelas ini. Yang dikatakan Marx dan Engels bahwa dua kelas inilah yang paling dominan untuk mengatakan bahwa inilah ciri dari corak produksi kapitalisme.

Dengan demikian, selama kedua kelas ini eksis maka kapitalisme tetap eksis. Tetapi, walaupun keduanya berhubungan satu sama lain, tetapi hubungannya yang paling mendasar bersifat konfliktual. Si kapitalis ingin terus menindas buruh, sementara si buruh ingin bebas dari penindasan tersebut. Nah, dalam konteks itulah maka komunisme memberikan panduan teoritik kepada kelas buruh untuk membebaskan dirinya dari penindasan kelas kapitalis. Tujuan dari perjuangan kelas buruh itu adalah terwujudnya masyarakat komunis, yakni masyarakat tanpa kelas, dimana tidak ada lagi kelas buruh dan kelas kapitalis. Karena ciri masyarakat berkelas adalah adanya kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, maka dalam komunisme kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi harus dihapuskan. Mengapa harus dihapuskan? Karena kepemilikan pribadi itulah sumber dari tegaknya masyarakat berkelas.

Ketika dalam perjuangan itu kelas pekerja berhasil menang, maka mereka harus membangun sebuah sistem kekuasaan yang bisa menjawab permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada zamannya masing-masing. Marx dan Engels tidak berpretensi membangun sebuah sistem pemikiran yang telah lengkap dan sempurna dari A – Z, yang tidak boleh diubah oleh para pengikutnya. Yang dikemukakan keduanya bahwa dalam masyarakat pasca-kapitalis ini, hal pertama yang harus dilakukan oleh negara adalah menyediakan hak-hak paling mendasar bagi seluruh warga negaranya, seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan gratis; dan tidak boleh ada lagi orang atau kelompok orang menjadi kaya karena menindas orang atau kelompok lainnya. Namun, karena masyarakat baru ini lahir dari reruntuhan masyarakat kapitalis, maka pada tahap ini insentif berbasis pasar tetap berlangsung, dimana 'setiap orang dihargai sesuai dengan hasil kerjanya/to each according their work.'

Sebagai contoh jika ada dua perempuan buruh, yang satu memiliki lima orang anak dan yang lain hanya dua orang anak, jika keduanya sama-sama bekerja

delapan jam sehari, maka pada setiap akhir bulan keduanya akan mendapatkan gaji yang sama. Jika perempuan buruh dua anak itu bekerja 9 jam, maka ia digaji satu jam lebih banyak dari perempuan buruh dengan 5 anak tadi. Tetapi, ketika kerja bukan hanya sekadar alat untuk hidup, tapi telah menjadi medium realisasi potensi kemanusiaannya secara bebas, sehingga konsekuensinya level produksi menjadi meningkat, maka adalah mungkin masyarakat diorganisir melampaui mekanisme penghargaan pasar, dimana penghargaan/reward tidak lagi berbasis pada kerjanya (berapa lama dan apa jenis kerjanya), tetapi sesuai dengan kebutuhannya (*from each according their needs*).

Kembali menggunakan contoh kedua perempuan buruh tersebut, maka pada tahap lanjut masyarakat komunis perempuan yang memiliki lima anak harus memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari perempuan buruh yang hanya memiliki dua orang anak, walaupun jam kerja keduanya sama. Bukankah ini diskriminasi? Benar, ini diskriminasi dalam pengertian yang positif, bahwa penghargaan harus diberikan kepada mereka yang kebutuhannya lebih besar. Bagaimana jika seorang perempuan dokter dengan satu anak, apakah penghargaannya harus lebih kecil dari perempuan sopir bis dengan lima orang anak? Jawabannya adalah ya.

Dari prinsip inilah kemudian muncul kesalahpahaman yang luar biasa, bahwa komunisme itu bersifat totaliter karena tidak menghargai pencapaian individual; berprinsip sama rata sama rasa, karena semua orang, tanpa peduli kemampuan personalnya diperlakukan sama, yang artinya juga adalah totaliter. Saya mau menjawab kesalahpahaman ini: pertama tudingan itu keliru karena setiap orang kebutuhan mendasarnya telah disediakan oleh negara secara gratis pada masa-masa awal pengorganisiran masyarakat pasca-kapitalis; kedua, tidak ada lagi orang menjadi kaya karena menindas orang lain, yang berarti orang bekerja sesuai dengan keputusan personal yang bebas, karena kebutuhan dasarnya sudah sepenuhnya tersedia. Ia mau jadi dokter bukan karena adanya iming-iming uang segudang yang bakal diperolehnya, tapi karena ia memang senang menjadi dokter. Ini berbeda dengan masyarakat kapitalis, dimana keputusan untuk bekerja itu bersifat terpaksa karena suplai tenaga kerja jauh melampui kebutuhan pasar tenaga kerja, atau karena mimpi akan uang sekoper, sehingga orang bersedia kerja apa saja yang penting bisa punya uang untuk makan, bayar kuliah, bayar kontrakan, dsb.

Ketiga, masyarakat komunis ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan keberadaannya sejak awal masyarakat pasca-kapitalis terbentuk. Tidak ada satu kalimat pun dari Marx-Engels bicara soal ini. Bagi keduanya, masyarakat komunis itu adalah sebuah proses historis, yang akan berkembang sesuai dengan kondisi-kondisi historis pada masanya, seperti tingkat perkembangan teknologi, tingkat perkembangan ekonomi, sosial dan budaya, perjuangan kelasnya, serta kebijakan pemerintah yang berkuasa. Tidak ada sim salabim, abracadabra di sini.

Coen Husain Pontoh, Mahasiswa Ilmu Politik di City University of New York

IndoPROGRESS, 04 Mei 2013

Ahok dan Benyamin S

Sungguh ironis, di Jakarta dalam periode yang panjang, para pejabatnya sering melupakan peran penting seniman. Bahkan dalam suasana ulang tahun Jakarta ke-487 lalu, ketika menguat penghormatan kepada keistimewaan seni budaya Betawi-Jakarta serta tokoh-tokoh yang mendedikasikan hidupnya untuk itu, justru hal yang memilukan terjadi. Benyamin S., sebagai seniman ikon nomor wahid dan manisfestasi tradisi budaya Betawi-Jakarta, mengalami penghinaan luar biasa dalam acara YKS produksi Trans TV. Anehnya, tidak terdengar suara protes dari pemerintah Jakarta. Mungkin Pemerintah Kota Jakarta masih belum mengubah wajahnya dari masa kompeni yang, disebut sejarawan Leonard Blusse, berwajah konsumtif. Sebab, pejabatnya lebih memperhatikan pedagang daripada seniman yang telah membuat sajak, lagu, lukisan, dan cerita yang membuat Batavia sohor di dunia dengan sebutan Koningin het van Oosten atau Ratu di Timur.

Setelah kemerdekaan, Asrul Sani termasuk yang jengkel melihat wajah abai pemerintah terhadap seniman. Saking jengkelnya, ia menulis "Surat Terbuka bagi Wali Kota Baru" di majalah Siasat, 3 Januari 1954. Ia menyatakan pemerintah Jakarta mempunyai "*wajah pejabat*". Asrul protes karena banyak seniman bekerja keras menampilkan Jakarta sebagai sumber ilham dan tempat tinggal, tapi Pemerintah Kota saat itu kurang menghargai seniman serta mendorong kehidupan kebudayaan.

Asrul kecewa, ketika pada 28 April 1949 Chairil Anwar melepaskan nyawa dan diantar ke pekuburan di Karet, pemimpin Jakarta Sastromuljono tidak memberikan perhatian. Padahal rombongan pengantar jenazah penyair terkemuka yang banyak meninggalkan nyanyian tentang Kota Jakarta itu lewat di depan rumahnya. Kekecewaan yang sama sebelumnya disampaikan Rosihan Anwar. Ia menyesalkan ketidaktahuan pemimpin Jakarta tentang posisi penting Chairil.

Perlu satu dasawarsa lebih Jakarta memiliki pemimpin sesuai dengan harapan Asrul dan Rosihan itu. Pada 1966, Ali Sadikin diangkat. Meskipun ia mengaku tak tahu banyak kesenian serta kenal seniman, tetapi baginya seniman penting untuk membangun kota yang beradab. Karena itulah, sejak 1968, ia memfasilitasi seniman dengan mendirikan Taman Ismail Marzuki (TIM), Akademi Jakarta (AJ), Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Sinematek, dan Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB). Ia pun dikenang sebagai gubernur yang bergaul erat dengan seniman, juga mendengarkan saran-saran mereka dalam pembangunan Jakarta. Kisah itu dapat dibaca dalam biografinya, Bang Ali demi Jakarta dan Empu Ali Sadikin 80 Tahun.

Buku yang terakhir itu terbit sebagai bagian dari acara penganugerahan gelar "*Empu Peradaban Kota*" kepada Bang Ali oleh IKJ pada 25 Januari 2006. Ajip Rosidi menyatakan gelar itu diberikan agar pemimpin Jakarta ingat pentingnya kesenian dalam membantu menjauhkan Jakarta dari wajah kota

yang tak beradab. Sebab, kesenian meningkatkan kepekaan, mendorong pemikiran kritis, berkontribusi merumuskan acuan-acuan kehidupan yang baik dan membaik.

Ada yang berlanjut ada yang berubah, Jakarta muncul dengan aneka wajah. Tetapi, soal perhatian terhadap seniman, Jakarta tampak masih enggan melepas wajah kota konsumtif yang dikatakan Blusse, wajah kota pejabat yang disebut Asrul, dan wajah kota tak beradab yang dinyatakan Ajip.

JJ Rizal, Sejarawan

KORAN TEMPO, 07 Juli 2014

Selamat Pagi Pak Ahok!

Sengaja saya menyapa Wakil Gubernur DKI Jakarta pagi ini. Basuki Tjahaja Purnama, atau biasa disapa Ahok, sebentar lagi beralih posisi naik satu peringkat menjadi orang nomor satu di Ibu Kota. Bagaimana Pak Ahok kabarnya pagi ini, lancar perjalanan dari rumah menuju ke kantor?

Jangan-jangan Anda juga sudah mulai terbiasa dengan kemacetan Jakarta. Terbiasa itu bisa diterjemahkan ke dalam beberapa hal yang dilakukan, yakni berangkat pagi-pagi dengan kendaraan pribadi, naik angkutan umum bus Transjakarta, menggunakan moda Bus Kota Terintegrasi Bus Transjakarta, Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta, atau Commuter Line. Langkah terakhir, tetap menggunakan kendaraan pribadi pada saat jam sibuk dan hanya bisa mengumpat dalam hati saat terjebak di kemacetan.

Sepekan terakhir, saya mencoba mengukur kecepatan laju kendaraan sepeda motor saya di Jalan Mampang Prapatan pada pukul 07.00 WIB. Ternyata dari Perempatan Warung Buncit ke Perempatan Mampang Prapatan, yang berjarak sekitar 5 kilometer, harus ditempuh dalam waktu rata-rata 2 jam. Sekali gas ditarik, sepeda motor maju 1-2 meter, kemudian berhenti 5-10 detik. Kalau beruntung, kendaraan bisa sepuluh meter merayap, kemudian berhenti lagi. Begitu seterusnya.

Pemandangan yang lebih bikin miris, masih banyak kendaraan roda dua, mobil, ataupun Metro Mini yang berani masuk jalur Transjakarta. Denda Rp 500 ribu bagi pelanggar busway seperti "*macan ompong*". Faktanya, memang sampai kini tak ada pelanggar yang terkena denda maksimal. Para pelanggar itu bisa menggeber kecepatan kendaraan karena memang jalur bus Transjakarta kosong. Artinya, jumlah bus Transjakarta tidak memenuhi ketentuan headway setiap 10 menit sekali.

Saat bus Transjakarta koridor VI rute Ragunan-Dukuh Atas lewat, penumpang terlihat berjejal di dalam. Masih mending jika kebetulan bisa naik unit bus yang baru, seperti bus hibah yang beberapa bulan lalu diserahkan. Tempat berdiri untuk penumpang lebih luas, AC lebih adem, dan tidak berdebu. Tapi apes jika naik bus Transjakarta lama: AC tak terasa lagi, tempat pegangan tangan sudah banyak yang hilang, bus berdebu, berisik, dan guncangannya membuat tangan harus berpegangan erat.

Saya yakin, ini juga terjadi di hampir setiap koridor busway. Padahal antusiasme warga naik bus Transjakarta sebenarnya sudah meningkat. Tapi, apa daya, jumlah bus Transjakarta tak mampu menampung semua penumpang. Pada akhirnya, banyak warga kembali memilih kendaraan pribadi.

Pak Ahok, pasti Anda mengenal atau setidaknya tahu Wali Kota Bogota Enrique Penalosa (1998-2001). Beliaulah yang menjadi pelopor Bus Rapid Transit, yang kemudian ditiru Jakarta sebagai busway. Enrique tak hanya membangun fisik sistem transportasi Bogota. Ia perlahan juga membangun budaya warganya. "Sebuah kota yang maju bukanlah tempat orang miskin

naik kendaraan pribadi, melainkan tempat orang kaya pun naik sarana transportasi umum."

Saya yakin Pak Ahok sependapat dengan Enrique. Gaya Anda memimpin Jakarta sudah pas: tegas, tanpa pandang bulu, dan setengah gila. Saya harap Anda segera mewujudkan ribuan bus Transjakarta yang nyaman, sistem jalan berbayar electronic road pricing, dan penertiban parkir serta pedagang kaki lima jalan terus. Setelah terwujud, jangan lupa kapan-kapan main ke rumah saya, Pak. Siapa tahu kemacetan telah berkurang.

Nur Haryanto, Wartawan Tempo

KORAN TEMPO, 25 Agustus 2014

Pengunduran Diri Ahok

Pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok, sebagai kader Partai Gerindra merupakan realitas politik yang menarik untuk disimak. Sikap Ahok yang konsisten mendukung pemilukada langsung yang dipandang lebih demokratis dibanding dengan pandangan partainya, dianggap menjadi faktor utama pengunduran diri Ahok. Konflik Ahok dengan Gerindra tidak bisa dihindarkan. Lantas pertanyaannya, apakah beda pandangan mengenai pemilukada antara Ahok dan Gerindra menjadi faktor utama pengunduran diri wagub DKI Jakarta sebagai kader Partai Gerindra?

Pengunduran diri dalam keanggotaan partai politik pada dasarnya merupakan sesuatu yang normal. Setiap partai politik dalam AD/ART-nya pasti mengatur mekanisme pengunduran diri seseorang dari keanggotaan organisasinya. Dengan kata lain, pengunduran diri seseorang dari partai politik merupakan hak yang sah. Atas dasar ini, sikap Ahok mundur dari partai yang telah mengusungnya menjadi wagub DKI Jakarta adalah hak politik yang bersangkutan. Namun, dalam peristiwa yang tengah berkembang antara Ahok dan Gerindra, terlalu sederhana tampaknya jika Ahok menjadikan isu perbedaan sikap dalam isu pemilukada sebagai alasan utama pengunduran dirinya.

Bisa jadi hal ini hanya merupakan faktor pemicu bukan faktor utama. Dalam hal perbedaan pandangan antara kepala daerah dan partainya, sepertinya bukan hanya terjadi pada kasus Ahok. Kita juga bisa melihat bupati/wali kota lain yang memiliki perbedaan pendapat dengan partainya mengenai isu pemilukada ini. Sebut saja Ridwan Kamil yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra serta Bima Arya Sugiarto yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Keduanya juga mendukung pemilukada secara langsung dan memiliki sikap yang berbeda dengan pandangan partainya. Atau jika lebih luas lagi untuk bisa melihat singgungan pendapat antara kepala daerah dan partainya, kita bisa melihat hubungan Trismaharini dengan PDIP di Surabaya.

Sehingga, perbedaan pendapat dalam satu partai merupakan isu yang biasa, dan berlebihan nampaknya jika ini bisa menjadi faktor utama pengunduran diri Ahok dari Gerindra. Masih cukup banyak faktor yang bisa turut menjelaskan pengunduran diri Ahok di luar isu perbedaan pandangan tersebut. Seperti faktor komunikasi politik Ahok yang sangat unik, atau bahkan ada motivasi politik lain yang muncul seiring dengan perkembangan dinamika politik nasional.

Perilaku Politik vs Etika Politik

Pengunduran diri Ahok juga bisa mengajak kita sedikit menengok benturan dua aspek dalam kajian ilmu politik yang sering kali tidak pernah sejalan; yakni perilaku politik dan etika politik. Membahas perilaku politik pada tataran yang normatif, sering kali dipandang oleh sebagian kalangan sebagai sesuatu yang naif.

Sebab katanya, politik memang tentang seni bagaimana mendapatkan kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Atas dasar inilah sering kali etika politik hanya menjadi bagian yang tersudutkan dalam pembahasan perilaku aktor politik. Namun, penulis berpandangan bahwa kerasnya pertarungan perebutan kekuasaan dengan segala cara, tidak akan pernah menutup kerinduan masyarakat akan dijunjungnya etika politik.

Sejatinya, kekuasaan politik yang sudah didapatkan tidak hanya membutuhkan legitimasi secara hukum, tapi juga dibutuhkan pembenaran normatif yang berlaku di dalam masyarakat. Namun, politik adalah pertarungan kekuatan. Sering kali realitas politik yang dipertontonkan tidak bisa dijelaskan dalam etika politik yang dianggap ideal.

Mundur sebagai Wagub DKI Jakarta?

Sikap Ahok yang tidak mundur dari wagub DKI Jakarta bisa dipahami secara konstitusional, sebab tidak ada aturan yang menegaskan ia harus mundur dari posisinya. Meskipun kader partai dan dicalonkan oleh partai, kepala daerah tidak bisa diganti dari jabatannya ketika dirinya keluar dari partai yang mengusungnya. Kendali partai terputus bersamaan dengan pelantikan kandidat yang diusung sebagai kepala daerah.

Namun pada saat yang bersamaan, penulis berpendapat bahwa hal ini merupakan cermin dari sistem politik kita yang masih mengabaikan etika politik, sehingga kepala daerah bisa dengan mudah meninggalkan partai politik yang telah mengusungnya ketika jabatan yang dituju sudah dicapai.

Lebih jauh lagi, dalam konteks ini penulis juga berpandangan bahwa ke depannya di satu sisi pelibatan publik yang luas dalam proses pemilukada langsung yang sudah sepuluh tahun diterapkan harus tetap dijaga. Pasalnya, ongkos pembelajaran politik yang sudah dikeluarkan bangsa ini tidak terbuang sia-sia.

Namun, jangan sampai pada saat yang bersamaan hal ini justru memperlemah peran dan fungsi partai politik dalam praktik berdemokrasi. Peran partai politik tetap harus diperhatikan secara serius ke depannya.

Muhammad Tri Andika, Kepala Jurusan Ilmu Politik Universitas Bakrie

Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies (IPS)

KORAN SINDO, 12 September 2014

Pemimpin

Apa lagi yang mau ditulis soal Ahok? Semuanya sudah terbuka. Caranya marah, caranya membela diri, intonasi suaranya, gesture tubuhnya saat bicara, semuanya telanjang. Apakah dia pemimpin ideal?

Pemimpin ideal itu tergantung masyarakat yang dipimpinnya. Gaya kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pas untuk Jakarta. Kekerasan yang jadi watak Jakarta memerlukan pemimpin yang bergaya preman. Kalau marah menggebrak dan tak segan mengajak orang berduel. Di mana ada pemimpin yang mengajak orang berduel?

Ahok berani keras dan mengecam perilaku pejabat yang korup karena ia tahu dirinya bersih. Ia berani menantang karena tahu lawan-lawannya bermasalah. Ada yang pernah dibui dalam kasus korupsi. Ada yang preman suka memalak hak orang. Belajar dari pengalaman gubernur sebelumnya, Jakarta hanya sukses dipimpin gubernur yang juga keras kepala. Ada Ali Sadikin. Dan sekarang Ahok memberi harapan.

Gaya kepemimpinan Ahok pasti tak cocok untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Masyarakat Yogya tak perlu dimarahi dengan menggebrak meja. Jika Sultan HB X kesal, dengan sorot mata tajam sudah membuat "yang disorot" sadar. Sultan tak mungkin mengajak berduel.

Di Bali pun, Ahok pasti tak cocok. Di sini Mangku Pastika, yang mantan jenderal polisi, diterima dengan baik. Berpuluh tahun ia di luar Bali dan tentu melihat ketimpangan lebih jernih, lalu ia datang membangun Bali tanpa ada beban disekat oleh faktor klan-penyakit pemimpin Bali. Pendekatannya kepada masyarakat tepat. Bertutur halus tidak menuding seperti Ahok.

Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya, pun punya gaya yang khas. Ia tak segan memungut sampah di jalanan dan bisa marah-marah ketika taman kotanya dirusak gara-gara ada perusahaan yang menggelar promo. Ia meledak seperti Ahok, namun ia bisa meratap seperti Mangku Pastika ketika kedatangan orang-orang malang yang perlu dibantu.

Negeri ini bergerak ke arah yang lebih baik seolah-olah alam ikut menyeleksi pemimpin dan menempatkannya di mana diperlukan. Ridwan Kamil, arsitek yang sudah populer itu, ditempatkan "alam" di Bandung untuk mengembalikan kejayaan Kota Kembang yang dulu asri. Kota Lautan Api yang menyimpan sejarah bangsa harus dikembalikan ke budaya Padjadjaran yang luhur. Ketika ada yang mengejek Kota Bandung di media sosial, Ridwan bisa marah dan melaporkan pemilik akun itu ke polisi. Namun kemarahan Ridwan tak sampai menantang si pemilik akun untuk berduel. Ridwan justru ingin berdialog. Ridwan bukan Ahok.

Ada Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, lemah lembut sebagaimana orang Jawa, tetapi tegas tak kepalang tanggung ketika melihat penyimpangan di jembatan timbang. Masih banyak contoh pemimpin yang ternyata pas dengan ritme budaya di mana dia memimpin.

Sayang sekali, kini tertutup pemimpin seperti itu kalau saja RUU Pilkada disahkan DPR pada 25 September nanti. Rakyat dicabut haknya untuk memilih pemimpin yang disediakan alam. Semua pemimpin yang disebutkan di atas, kecuali Sultan HB X, adalah "pemimpin pilihan alam". Ahok yang mendampingi Jokowi sulit terpilih kalau bukan rakyat yang memilihnya. Apalagi Mangku Pastika, tak mungkin menjadi Gubernur jika yang memilihnya anggota DPRD. Pastika diusung Demokrat, dan Bali mayoritas PDI Perjuangan.

Para wakil rakyat membawa demokrasi kita kembali ke Orde Baru, sedikit demi sedikit. Ya, rakyat "*keliru*" memilih wakilnya, tak mengira kalau wakilnya punya "program terpendam" seperti itu. Sepuluh tahun pemerintahan Presiden Yudhoyono yang dikenang hanya masa-masa akhirnya: hak rakyat untuk memilih pemimpin telah dirampas.

Putu Setia, Pendeta Hindu, Wartawan Senior Tempo

TEMPO.CO, 13 September 2014

Ahok (Lagi)

Ahok lagi. Lagi-lagi Ahok. Nama akrab Wakil – sebentar lagi, Gubernur DKI Jakarta ini menjadi headline koran ini (11/9), juga harian lain, dengan nada yang berbeda. Adalah Basuki T Purnama yang menjadi perhatian dengan pilihan keluar dari Partai Gerindra. Alasannya, dia merasa tak cocok lagi karena partai-partai yang berkoalisi dalam "*Koalisi Merah Putih*" yang mengupayakan agar pemilihan kepala daerah nantinya dilakukan oleh DPRD. Dewan perwakilan rakyat daerah yang menentukan, bukan pilihan langsung dari rakyat.

Banyak pertimbangan penilaian mana yang lebih cocok, pemilihan langsung atau oleh wakil setempat. Tergantung siapa yang bicara, di pihak yang mana. Demikian pula mengenai sikap Ahok ini. Banyak yang mengelu-elukan, banyak yang mengeluhkan. Banyak yang menganggap berani, ada juga yang menganggap tak kenal etika.

Dalam rubrik ini saya pernah menulis tentang Ahok – makanya kini ada judul, lagi. Dengan tindakan tegas ini Ahok menempatkan diri di depan. Dia bukan bayang-bayang popularitas Gubernur Jokowi, bukan sekadar ban serep, untuk pajangan. Melainkan seorang yang menentukan. Yang berinisiatif. Kalau selama ini dia dianggap sebelah mata, mendompleng keberhasilan Jokowi, boleh jadi sekarang masyarakat melihat bahwa "jurus-jurus asli". Dan terus terang, kali ini menemukan momentum yang pas. Soal dia keluar dari Gerindra – dia biasa keluar dari partai politik, adalah urusan intern. Namun, ketika tindakan ini terkait dengan pilkada langsung, dia mengusung dan berada dalam tema yang sedang disukai masyarakat.

Sekali lagi media sosial yang perkasa dan selalu ribut, menyambut dengan antusias. Sedemikian kencang perhatian pada Ahok sehingga muncul ungkapan sayang masyarakat Jawa Barat tak memiliki wagub seperti dia. Omongan yang biasa, yang memuji sini menyindir sana yang dalam percakapan selalu terjadi. Bahwa Ahok yang menjadi idiom, itulah kelebihannya. Dalam waktu relatif singkat mampu menempatkan diri sebagai "*calon*" pemimpin DKI-1.

Kejutan akibat tindakan Ahok masih akan terjadi. Bukan hanya ceplas-ceplosnya, melainkan tindakan yang di luar dugaan. Inilah yang dulu sering saya katakan "*Ahok lagi salah obat*", dan masih akan "*salah lagi*". Ahok bukannya tak menyadari hal ini. Dan juga mengakui. Bahwa dia masih akan melakukan hal yang tak terduga, semata-mata karena Ahok yakin apa yang dilakukan benar adanya. Dan selama ini kandungan kebenaran terjaga. Seperti dalam kasusnya sekarang ini, dia mengatakan, "*Yang kontrol saya rakyat. Saya tak mau jadi kepala daerah kalau saya harus tanggung jawab pada DPRD.*" Apa yang dikatakan benar adanya, meskipun tidak berarti DPRD tak berperan sama sekali.

Tapi, inilah gaya, dan kelebihan Ahok yang tak dimunculkan pejabat lain. Apalagi untuk kelas daerah ibu kota, yang selain lebih kejam dari ibu tiri,

juga jadi contoh untuk daerah lain. Sebagai gebrakan ini menarik. Adalah Gubernur Ali Sadikin yang pernah berkata, kira-kira "*Untuk menormalkan keadaan yang abnormal, diperlukan tindakan yang abnormal pula*. " Dan Jakarta memang tak normal dari segala sisi: cara parkir, jalan macet, banjir, rumah susun, pedagang kaki lima, dan apa saja. Dan inilah yang dilakukan Ahok. Yang jika dilakukan dengan benar, ketegasan, yang juga mencakup keadilan, terasakan oleh rakyat. Jika itu terjadi, proses permukiman, penormalan sungai, dan sejenisnya bisa berjalan. Sesuatu yang dulu tak mungkin karena gubernur atau wakilnya "*lera-lere*", tak tegas, serba menunda.

Sebagai orang yang merasa kenal Ahok, terlebih sebagai warga Ibu Kota, saya ingin bersapa lagi. Bahwa semua yang dilakukan benar-benar terus terbuka sehingga masyarakat bisa ikut menilai, ikut di belakangnya. Yang kedua, kalau selama ini benar dan yakin, tetap hati-hati. Tak bisa selalu benar, dan kalau tidak merasa benar, tak usah ngotot. Terakhir: jaga kesehatan dan keselamatan Bos, pekerjaan besar baru dimulai. Mari kita teruskan bersama.

Arswendo Atmowiloto, Budayawan

KORAN JAKARTA, 13 September 2014

Teguh Pegang Prinsip

"*Ahok tidak Punya Etika Politik*". Demikian judul headline surat kabar nasional, Kamis (11/9), yang mewartakan keluarnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sang wakil gubernur DKI Jakarta, dari Partai Gerindra. Partai tempatnya bernaung, dianggap Ahok, sudah tidak sejalan dengan visi-misinya dalam mengurus kepentingan rakyat.

Ahok juga menilai, Partai Gerindra tidak memperjuangkan kepentingan rakyat karena berniat mengubah pemilihan kepala daerah (pemilukada) secara langsung oleh rakyat menjadi pemilukada oleh DPRD. Pengunduran diri Ahok yang dilakukan tanpa komunikasi dengan partai itu, oleh beberapa pihak, di nilai kurang tepat dalam etika berpolitik. Penilaian seperti itu wajar diberikan kepada Ahok oleh beberapa pihak yang tidak begitu suka dengannya dan sebuah surat kabar nasional yang pemiliknya memang menjadi bagian Koalisi Merah Putih (KMP) gagasan Partai Gerindra.

Apa pun yang dibuat Ahok, karena berseberangan dengan pemilik media ataupun KMP, tentu akan dinilai negatif. Namun, bagi sebagian besar orang, langkah Ahok patut diapresiasi. Di era sekarang, sedikit sekali pejabat publik atau politisi yang berani bersikap karena mempertahankan prinsip dan idealisme yang baik dan benar. Meski dihujat oleh partainya, Ahok tidak bergeming. Ketika dicap sebagai politisi kutu loncat bila merasa tidak cocok, dengan tegas Ahok menjawab, "Mending jadi kutu loncat ketimbang jadi kutu busuk." Langkah Ahok belakangan diikuti Wali Kota Singkawang Awang Ishak yang menyatakan mundur dari Partai Amanat Nasional. Awang mundur karena keputusan partainya yang mendukung RUU mengenai pemilukada.

Mundurnya Awang menambah daftar kepala daerah yang mundur dari partai karena berseberangan dengan partainya. Ahok dan Awang memang bukan orang pertama yang berani bersikap. Beberapa waktu sebelumnya, Direktur Pertamina Karen Agustiawan juga mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya pun serupa dengan Ahok. Karen merasa sudah tidak sejalan dengan pimpinan dan mitra kerjanya dalam mengurus kepentingan rakyat.

Meski tidak secara vulgar menyatakan, Karen pernah mengaku saat diperiksa sebagai saksi oleh KPK dan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor bahwa ia diperas. Merujuk pada fakta persidangan kasus suap mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, Karen memang pernah mengaku diancam akan dilaporkan kepada menteri. Namun, berbeda dengan Karen, Awang, dan Ahok, salah satu pemimpin partai politik di negeri ini malah menolak mundur. Padahal, statusnya sudah menjadi tersangka oleh KPK. Karena tidak kunjung mundur, akhirnya ia dipecat oleh kawan-kawannya sendiri. Akan tetapi, sang pemimpin partai tidak terima pemecatan itu. Ia malah melawan dan mengadukan nasibnya ke Ketua Majelis Syariah.

Petinggi partai seperti itu jelas tidak punya malu dan etika. Ia tidak bisa disamakan dengan Ahok, Awang, atau pun Karen yang teguh memegang prinsip. Secara moral, seorang pejabat me mang sudah selayaknya mundur kalau terindikasi terlibat pelanggaran hukum. Apalagi jika sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau tidak mundur, paling tidak nonaktif agar proses hu kumnya bisa steril. Jadi, nantinya ke kuasaan yang ada tidak mengganggu proses hukum. Yang bersangkutan tidak memanfaatkan linkkekuasaannya untuk mengacaukan proses hukum.

Belum tradisi Harus diakui, mundur belum menjadi tradisi di kalangan pejabat. Banyak anggota DPR/DPRD, petinggi partai, dan pejabat publik lainnya yang tidak mundur kendati telah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan, sejumlah calon kepala daerah tidak merasa rikuh dilantik meski sudah berstatus tersangka. Celakanya, aturan yang ada di negeri ini selalu memberi kenyamanan bagi para pejabat. Mereka baru diberhentikan sementara setelah menjadi terdakwa. Adapun pemberhentian permanen baru dilakukan setelah si pejabat dinyatakan bersalah lewat vonis yang berekuatan hukum tetap.

Padahal, rakyat sangat malu memiliki pemimpin yang tidak berkarakter. Sangatlah penting bagi seorang pejabat dalam menjalankan kepemimpinannya benar-benar bersih dari sangkutan kasus hukum. Bukan hanya itu, para pejabat dan pemimpin haruslah dapat menjaga sikap dan perilakunya dari hal-hal tercela dan tidak patut dicontoh oleh rakyat.

Seyogianya kita bisa mengambil pelajaran dari kasus Ahok, Awang, atau pun Karen. Sebagai pemimpin haruslah selalu memegang teguh prinsip kejujuran dan berani menjunjung kebenaran, tidak korup dalam berpolitik. Mereka adalah sosok pemimpin yang idealis, yang selalu memegang teguh prinsipprinsip itu tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi. Semua yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan rakyat.

Mereka telah menjadi service provider bagi rakyat dan negara. Setidaknya, dua hal telah ditunjukkan oleh mereka. Pertama, mereka memegang teguh kebenaran dan berusaha terusmenerus memperjuangkannya, betapa pun pahitnya. Kedua, menerapkan kebajikan tanpa memperhitungkan kepentingan sendiri atau golongan.

Pejabat atau pemimpin seperti itu wajib diberi kesempatan untuk memimpin karena bisa memberikan harapan dan optimisme untuk mengubah kondisi bangsa. Keberadaan pemimpin yang baik dan selalu mengawal kepentingan rakyat menjadi strategis ketika suatu negara berada dalam era transisi demokrasi seperti saat ini. Mudah-mudahan pemimpin yang seperti itu senantiasa diberikan kesehatan dan keteguhan hati dalam menjalankan amanah rakyat.

Moh Ilham A Hamudy, Peneliti di Badan Litbang Kemendagri

REPUBLIKA, 13 September 2014

Rakyat Dukung Ahok

Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mundur dari Partai Gerindra patut diapresiasi karena tidak sejalan dengan partainya yang mendukung pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota oleh DPRD. Ahok berhasil memimpin Belitung Timur dan DKI Jakarta karena dipilih rakyat. Ahok yakin, apabila saat itu pilkada diselenggarakan melalui DPRD, dia tidak akan menjadi bupati atau wakil gubernur DKI. Suara hati memang tidak dapat berbohong. Pemimpin yang memikirkan rakyat akan menolak pilkada tidak langsung.

Sistem pilkada langsung merupakan wujud keberhasilan demokrasi Indonesia. Dunia internasional juga mengakui bahwa Indonesia sekarang menjadi negara unggul kehidupan demokrasinya. Menjadi sangat ironis tatkala partai-partai politik dalam Koalisi Merah Putih mengusulkan pilkada kembali sebelum reformasi. Ini bukan semata-mata kemunduran demokrasi. Pilkada lewat DPRD juga rentan menimbulkan korupsi terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa tujuan umum partai politik adalah mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya juga disebutkan tujuan khususnya meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Maka, sangat ironis ketika mayoritas partai politik legislatif justru bersama-sama melahirkan wacana meniadakan pilkada langsung.

Pilkada melalui DPRD jelas mencederai asas kedaulatan rakyat dan mereduksi partisipasi politik masyarakat. Rakyat kehilangan hak turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apabila RUU yang mengatur pilkada tidak langsung disahkan, fungsi partai akan terdegradasi. Dia sebagai sarana pendidikan politik masyarakat tidak akan berperan. Fungsinya dalam menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat akan selalu dipertanyakan karena bisa menjadi bias saat warga tidak lagi memilih pemimpinnya secara langsung.

Partai juga dapat mengalami stagnasi dalam proses perekrutan politik untuk pengisian jabatan karena hanya mereka yang memiliki kedekatan dan mampu memberi "keuntungan" partai diangkat. Yudi Latif (2011), dalam Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, menegaskan negara yang berkedaulatan rakyat mengandung cita-cita kerakyatan dan permusyawaratan.

Berdasarkan sila keempat, suatu keputusan politik harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, berorientasi jauh ke depan. Dia bukan karena kepentingan jangka pendek yang destruktif dan mempertimbangkan pendapat semua pihak. Atas berbagai dasar ini, benarkah wacana pilkada tidak langsung yang kini menuai protes rakyat dianggap lebih memenuhi prinsip sila keempat? Dalam

prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte golongan mayoritas ataupun minoritas elite. Masyarakat harus diberi akses dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk itu, demokrasi Pancasila menekankan pelaksanaan kedaulatan rakyat bahwa rakyatlah yang berkuasa secara mutlak, maka tugas perwakilan (DPR maupun DPRD) ialah memperhatikan dan menyalurkan harapan masyarakat.

Orientasi etis dalam sila keempat bahwa kerakyatan itu dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan mensyaratkan kearifan. Para wakil rakyat harus bijak agar bisa merasakan dan mengetahui aspirasi rakyat sehingga dapat mengambil keputusan benar untuk negara. Pertanyaannya, sudahkah wakil rakyat menunjukkan kearifaannya apabila wacana pilkada tidak langsung yang semakin panas pascapilpres ini ternyata sarat kepentingan dan sentimen politik tertentu?

Tidak Sendiri

Terkait penolakan pilkada oleh DPRD ini, banyak kepala daerah mundur dari partai karena tidak sejalan. Salah satunya Wakil Gubernur DKI Jakarta tadi. Sikap Ahok yang tidak mementingkan diri sendiri tak berarti kutu loncat. Ini karena bukan persoalan partai yang paling menguntungkan secara finansial baginya. Ahok mundur karena berpihak pada rakyat. Ini justru dapat menjadi bahan refleksi bagi Gerindra maupun politisi lain sebagai momentum untuk sadar dan segera kembali mendekatkan diri pada (kepentingan) rakyat. Kemunduran Ahok, cepat atau lambat, segera diikuti kader partai lainnya yang juga berjiwa berani dan tegas.

Ahok dan beberapa pemimpin daerah lain yang progresif dan mengutamakan rakyat merupakan produk pilkada secara langsung. Saat ini saja ratusan kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dengan tegas menolak pilkada tidak langsung.

Apalagi mereka itu notabene juga dipilih secara langsung rakyat. Mereka meyakini bahwa tidak ada korelasi antara tingginya angka korupsi dan sistem pilkada langsung. Sekarang hanya perlu penyempurnaan teknis pelaksanaan pilkada. UUD 1945 telah menjamin bahwa rakyat memiliki hak fundamental untuk menentukan pemimpin daerahnya sendiri.

Tak urung sikap Ahok ini justru semakin meningkatkan simpati masyarakat padanya. Dukungan pun terus mengalir, terutama melalui media sosial. Beberapa akun di jejaring sosial dibuat untuk menampung berbagai komentar dan simpati masyarakat. Penolakan RUU mengenai Pilkada Tidak Langsung juga ditunjukkan para aktivis 1998. Mereka menilai demokrasi yang telah diperjuangkan di masa Reformasi guna melawan rezim Orde Baru sudah dilupakan karena emosi politik sesaat. Perpecahan politik akibat pilpres kemarin menuntut tumbal yang terlalu besar.

Sangatlah bijak apabila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di akhir masa pemerintahannya, segera turun tangan menyelesaikan kegelisahan soal RUU Pilkada. SBY memiliki kekuatan membatalkan RUU Pilkada sehingga kembali pada UU lama. Jangan sampai RUU Pilkada baru menjadi motif bagi-bagi kekuasaan di daerah.

Pilkada melalui DPRD berarti hilangnya suara rakyat dan memberikan kekuasaan kepada sejumlah elite. Ini tidak hanya mencederai demokrasi rakyat, namun juga akan melahirkan penguasa-penguasa daerah dari kalangan elite partai yang sekali-kali tidak akan merasa berdosa apabila mengabaikan kepentingan rakyat.

Sikap rakyat yang sedia pasang badan dan berdiri di belakang Ahok menunjukkan bahwa keteladanan pemimpin seperti dia saat ini dibutuhkan bangsa. Ahok tidak sendiri. Keputusannya didukung rakyat. Rakyat menanti kemunculan "*Ahok-Ahok*" lain di berbagai daerah. Kalau toh tetap ada yang menyatakan bahwa sikap kepala daerah yang tidak sejalan dengan partai pengusungnya dianggap berkhianat, biarkan saja. Yang lebih penting, mereka tidak berkhianat pada rakyat, pemilihnya.

Hendra Kurniawan, Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

KORAN JAKARTA, 15 September 2014

Perlawanan Ahok

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengundurkan diri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Alasannya, ia tak sependapat dengan sikap politik Gerindra yang mendukung pilkada lewat DPRD. Bagi Ahok, Gerindra mengingkari kepercayaan masyarakat. Idealisme politik Ahok telah dicederai oleh partai politik.

Perlawanan Ahok menimbulkan "*kemarahan*" di jajaran pemimpin Gerindra. Ahok dibilang tak tahu terima kasih, bahkan Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, menuding Ahok tak beretika, tak berkontribusi untuk Gerindra, dan "*kutu loncat*". Meski dikecam oleh partainya, Ahok tak ciut nyali. Ahok justru menegaskan bahwa lebih baik jadi "kutu loncat" ketimbang jadi "kutu busuk". Ahok juga mengatakan tidak akan loncat ke partai lain. Ahok ingin berfokus mengurus Jakarta dan tak mau direcoki oleh tetek-bengek urusan partai.

Dalam iklim demokrasi, perlawanan Ahok terhadap jalan politik partai politik tidak salah. Sebab, perlawanan Ahok didasari pada kehendak rakyat dan konstitusi. Di sisi lain, para politikus Gerindra juga punya hak untuk menilai pengunduran diri Ahok tidak sesuai dengan etika politik dan mengkhianati Gerindra. Namun, dalam konteks permasalahan Ahok dengan Gerindra, haruslah dilihat kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan rakyat. Pilihan politik Ahok membuktikan bahwa ia mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip dan nilai Pancasila, di mana Pancasila menjadi dasar ideologi partai yang harus dijunjung tinggi.

Perlawanan Ahok merupakan implementasi penolakan oligarki di level partai politik. Ahok tidak rela jika daulat rakyat dirampas oleh segelintir elite politik dengan berkedok atas nama rakyat, demokrasi, dan penegak konstitusi. Perlawanan Ahok justru memperlihatkan kualitas dan integritas seorang politikus dan pemimpin yang memperoleh mandat rakyat.

Perlawanan Ahok secara substansial sudah tepat. Sikap Ahok sesuai dengan yang diucapkan oleh Manuel Luis Quezon Molina, Presiden Persemakmuran Filipina (1935-1944), "*Kesetiaanku kepada partai berakhir ketika kesetiaanku kepada negara dimulai.*" Ahok, yang berasal dari golongan minoritas, Tionghoa dan Kristen, menunjukkan figur pemimpin interpersonal yang menerjemahkan suasana batin rakyat dengan bahasa politik populis serta dengan pola pikir yang *out of the box*, namun konkret. Perlawanan Ahok justru menjadi batu uji para politikus Senayan dalam menyusun RUU Pilkada, apakah untuk kepentingan bangsa atau alat politik "*balas dendam*"?

Pengunduran diri Ahok sebagai politikus Gerindra adalah hak politik yang konstitusional. Posisi Ahok saat ini masih kuat. Sebab, tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan dan aturan yang mengatur recall. Meski demikian,

Gerinda dan Koalisi Merah Putih dipastikan akan "*menjegal*" setiap kebijakan dan program Ahok. Saya sarankan, Ahok lebih cermat dan cerdas menghadapi musuh-musuhnya. Dalam memimpin Jakarta, Ahok perlu merangkul semua kalangan, mengedepankan komunikasi dialog, dan bersikap terbuka dengan rakyat. Perlawanan Ahok jangan berhenti di sini, masih banyak "*kutu busuk*" dan penyimpangan terhadap demokrasi serta konstitusi yang harus dilawan.

Joko Riyanto, Alumnus Fakultas Hukum UNS Surakarta

KORAN TEMPO, 16 September 2014

Ahok, Kutu Loncat atau Kutu Kopret

KEPUTUSAN Ahok panggilan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama keluar dari Partai Gerindra lantaran tidak setuju dengan RUU pilkada yang dimotori partainya mendapat respons beragam. Sudah barang tentu dari pihak yang tidak setuju dengan RUU itu, Ahok dianggap sebagai "*pahlawan*" yang berani melawan arus kebijakan partainya sendiri demi rakyat banyak. Di dunia maya, Ahok diberi semangat "*lebih baik berkhianat kepada partai demi kepentingan rakyat banyak ketimbang berkhianat kepada rakyat demi kepentingan partai*". Respons yang paling seru berasal dari orang kedua di Partai Gerindra, Fadli Zon. Tak tanggung-tanggung, dia menyamakan Ahok dengan kutu loncat. Dan Ahok dengan gentlemen mengatakan bahwa dirinya memang kutu loncat.

Ahok merasa dirinya tidak tercemar atau dirugikan dengan labeling kutu loncat. Sebab, memang faktanya Ahok beberapa kali pindah partai. Sebelum bergabung dengan Gerindra, Ahok pernah berumah di Partai Golkar. Namun, bukan itu alasan yang substantif. Alasan paling mendasar adalah Ahok yakin dengan suara arus bawah yang masih menganggap bahwa pilihan langsung merupakan konsep demokrasi yang didukung rakyat. Jadi, wajar saja Ahok "*berani*" mengambil sikap tersebut. Sebagai politikus, Ahok sudah punya kalkulasi untung ruginya. Mengikuti arah angin berembus merupakan filosofi yang dianjurkan kepada politisi.

Dalam sistem multipartai seperti di Indonesia, taat buta (apa pun yang diperintahkan partai harus diikuti) sama dengan mati konyol. Banyak partai yang bisa menjadi alternatif tempat berlabuh ketika individu merasa bahwa arah perjuangan partai sudah keluar dari cita-cita, bahkan ideologi partai. Kepatuhan politikus bukan kepada partai, melainkan kepada rakyat. Ketika partai sudah sedemikian mengalami kontaminasi moral (banyak kadernya yang terlibat korupsi, mengajarkan balas dendam, bahkan menghukum rakyat yang tidak memilihnya dengan membuat kegemparan yang tidak perlu), justru lebih baik politikus keluar dari "*rumah*"-nya. Sebab, bila tidak segera keluar, dia akan menjadi korban pembusukan orientasi hingga menjadi insan politik yang tidak berdaya lagi memperjuangkan kebenaran. Dalam konteks itulah kemudian perilaku Ahok mendapat sanjungan dari banyak pihak.

Toh, kenyataannya, sebelum Ahok berpindah partai, banyak contoh figur yang pindah partai karena alasan sudah tidak cocok lagi dengan partainya ternyata justru berhasil menjadi model membangun partai. Sebut saja, misalnya, Jenderal (pur) Wiranto yang hengkang dari Partai Golkar kemudian mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Surya Paloh, juga dari Partai Golkar, mendirikan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Prabowo Subianto dari Golkar mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Andai Partai Golkar mempunyai sistem yang mampu mengakomodasi figur-figur tersebut, tentu fragmentasinya tidak sedemikian masif. Belum lagi kalau kita mau mendata di daerah, akan ditemukan

banyak kampiun politisi yang berpindah partai ternyata mampu membesarkan "*rumah politik*"-nya yang baru. Mampu mengalahkan penghuni lama (asli) yang sudah jauh lebih lama bersimbah keringat membesarkan partai.

Bersinerginya anggota baru dari luar dengan anggota lama dapat digambarkan seperti bergabungnya kaum muhajirin yang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah, kemudian disambut dengan tangan terbuka oleh kaum ansar yang sudah lebih dulu bermukim di sana. Tentu sinergi itu terjadi karena adanya kepemimpinan Rasulullah yang tegas, adil, serta mengayomi. Dalam bahasa nasihat Balarama (Baladewa) terhadap Duryudana, kemenangan dalam perang tidak ditentukan oleh kekuatan pasukan, tetapi ditentukan oleh panglima yang mengarahkan pasukan tersebut. Wiranto, Surya Paloh, serta Prabowo merupakan contoh betapa figur panglima menentukan eksistensi pasukannya. Partai-partai yang mereka pimpin dapat eksis (setidaknya lolos electoral threshold) salah satunya karena sentuhan "*tangan dingin*" masing-masing. Maka, bila Ahok termasuk politisi yang memiliki jiwa panglima, karir politiknya tidak akan pudar hanya karena berpindah partai. Partainya boleh ganti, tapi idealismenya memperjuangkan hak-hak rakyat harus terus berkobar.

Seorang teman berseloroh bahwa Ahok itu kutu loncat yang tergolong kutu kupret. Bah, apa pula ini? Dalam literatur disebutkan, kutu loncat adalah serangga yang merupakan anggota suku Psyllidae yang konon mempunyai 71 marga. Salah satunya adalah kutu kupret. Istilah itu sering dipakai Tukul "*Empat Mata*" Arwana untuk melecehkan atau mengolok-olok penonton – yang konotasinya negatif atau buruk. Padahal, kutu yang dikenal sebagai kutu malaysia itu, selain sangat cepat berkembang biak, ternyata mempunyai khasiat menyembuhkan penyakit diabetes dan tekanan darah tinggi, menjaga stamina tubuh, serta lainnya.

Mungkin Ahok termasuk kutu kupret yang perannya bagi partai asal dianggap pengkhianat, tetapi bagi rakyat dapat menjadi penyembuh. Lain waktu, bila Tukul Arwana mengundang Ahok dalam acaranya, Bukan Empat Mata, silakan panggil Ahok dengan sebutan Si Kutu Kupret. Semoga!

Redi Panuju, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim

JAWA POS, 17 September 2014

Selamat Datang Gubernur Ahok

POLITISASI produk hukum tidak pernah berhenti di negeri ini. Belum habis pro-kontra di sekitar rekayasa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, kini kita dihadapkan pula pada politisasi aturan di seputar pergantian jabatan Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Joko Widodo (Jokowi). Pangkal soal, sejumlah kekuatan politik di DPRD DKI Jakarta menilai Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa menggantikan Jokowi.

Alasan utama yang dikemukakan oleh kelompok yang mendukung pandangan bahwa Ahok tidak bisa menggantikan Jokowi adalah tidak adanya aturan hukum yang menentukan bila kepala daerah berhalangan tetap dalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI (UU No 29/2007). Karena ketiadaan aturan tersebut, didalilkan bahwa kondisi yang terjadi di Jakarta setelah ditinggalkan Jokowi adalah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu No 1/2014).

Penggunaan dalil

Dalam Pasal 173 ayat (1) Perppu No 1/2014 dinyatakan bahwa dalam hal gubernur, bupati, dan wali kota berhalangan tetap, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota tidak serta-merta menggantikan gubernur, bupati, dan wali kota. Bagi mereka yang mendalilkan bahwa Ahok tidak bisa menggantikan Jokowi, ketentuan Pasal 173 ayat (1) Perppu No 1/2014 tersebut berlaku secara absolut dalam proses pengisian jabatan Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Jokowi.

Dengan menggunakan dalil tersebut, mereka menggunakan dalil Pasal 174 (1) dan ayat (2) Perppu No 1/2014 bahwa apabila gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan kurang dari 18 bulan, presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul menteri (dalam negeri) sampai berakhir nya masa jabatan gubernur. Kemudian, dalam hal sisa masa jabatan gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan maka dilakukan pemilihan gubernur melalui DPRD provinsi.

Dengan menggunakan dasar hukum Pasal 173 dan 174 tersebut, kekuatan politik yang berdiri dalam cara pandang tersebut menghendaki pengisian jabatan gubernur lowong yang ditinggalkan Jokowi tidak otomatis jatuh kepada Wakil Gubernur Ahok. Apalagi, sebagaimana disebut di awal, UU No 29/2007 tidak mengatur pola pergantian kepala daerah yang berhalangan tetap baik disebabkan alasan berhenti mau pun diberhentikan. Padahal, Kementerian Dalam Negeri telah memberi sinyal agar DPRD DKI Jakarta segera melantik Ahok sebagai gubernur baru menggantikan Jokowi.

Alasan yang keliru

Apabila dilacak UU No 29/2007, ketentuan ini memang hanya mengatur ihwal pengisian kepala daerah secara sederhana, yaitu hanya mengatur perbedaan persentase penentuan pemenang kepala daerah. Dalam hal ini, Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No 29/2007 menyatakan bahwa pasangan calon yang memeroleh suara lebih dari 50% ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Selanjutnya, dalam hal tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, diadakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

Dengan pengaturan yang sangat terbatas tersebut dan sekalipun tidak mengatur ihwal pergantian kepala daerah yang tidak dapat menghabiskan masa tugasnya, adalah kekeliruan mendasar memberlakukan ketentuan Pasal 173 dan 174 Perppu No 1/2014. Dalam hal ini, pengisian jabatan Gubernur DKI Jakarta harus tunduk pada ketentuan Pasal 203 ayat (1) Perppu No 1/2014 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan gubernur, bupati, dan wali kota yang diangkat berdasarkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota menggantikan gubernur, bupati, dan wali kota sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Ketentuan ini sangat jelas, kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta harus diisi oleh wakil gubernur. Apalagi, UU No 29/2007 hanya mengatur secara terbatas proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, UU No 29/2007 sama sekali tidak mengatur ihwal pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No 29/2007, pengangkatan dan pemberhentian tunduk pada ketentuan dalam UU No 32/2004.

Dengan ketentuan ini, UU No 29/2007 dapat dikatakan pengecualian dari UU No 32/2004. Artinya, semua materi yang ada dalam UU No 29/2007 adalah bentuk pengecualian dari UU No 32/2004 dan semua yang tidak diatur dalam UU No 29/2007 tunduk kepada aturan dalam UU No 32/2004. Karena itu, tidak hanya ihwal wakil gubernur yang otomatis menjadi gubernur, jabatan wakil gubernur yang segera kosong karena Ahok menjadi gubernur juga harus diisi merujuk pada UU No 32/2004.

Berdasarkan penjelasan di atas, hanya langkah politisasi hukum saja yang mungkin menghalangi pengukuhan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Seharusnya, begitu Jokowi mengundurkan diri, secara hukum, Ahok hanya menunggu langkah formal menjadi gubernur. Sebagai sebuah negara hukum, mari menggunakan nalar hukum yang benar dan ucapkan selamat datang untuk Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

MEDIA INDONESIA, 13 November 2014

Menjegal Langkah Ahok

> *The people who treat politics and morality separately will never understand either of them* - Jean Jacques Rousseau, 1762

Langkah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menduduki singgasana yang ditinggalkan Jokow Widodo (Jokowi) masih terus ditunda-tunda. Padahal, Kementerian Dalam Negeri sudah meminta agar DPRD DKI menyegerakan proses tersebut. Anasir-anasir di DPRD DKI yang dimotori Wakil Ketua M. Taufik masih mempersoalkan aturan mana yang berlaku untuk Ahok, apakah otomatis menjadi pengganti Jokowi ataukah perlu dipilih Gubernur DKI yang baru melalui DPRD.

Terkait penggantian kepala daerah yang berhalangan tetap, awalnya yang dipakai adalah ketentuan pilkada dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008. Ketentuan dalam UU 32/2004 tersebut diganti dengan UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Belum lagi aturan tersebut berlaku, Presiden SBY mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang mencabut undang-undang tersebut. Otomatis, terkait dengan nasib Ahok, kini yang berlaku adalah Perppu 1/2014.

Pasal 203 ayat (1) Perppu 1/2014 menyatakan, "*Dalam hal terjadi kekosongan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya*." Jokowi-Ahok diangkat berdasarkan UU 32/2004 sehingga Ahok berhak menggantikan Jokowi hingga sisa masa jabatan berakhir pada tahun 2017.

Namun, tafsir sederhana tersebut belum dapat diterima M Taufik. Wakil Ketua DPRD tersebut punya tafsir lain, bahwa Jokowi-Ahok tidak diangkat dengan UU 32/2004, melainkan berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 10 UU 29/2007 menyatakan bahwa pemilihan dilakukan secara langsung dan Pasal 11 menyatakan calon harus mendapatkan suara lebih dari 50 persen untuk menang dalam satu putaran. Bila tidak, diadakan putaran kedua di antara dua calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Itulah sebabnya, Jokowi-Ahok harus menjalani putaran kedua melawan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara). Di tempat lain, berdasarkan UU 32/2004, yang telah diubah dengan UU 12/2008, kemenangan dalam putaran pertama cukup dengan 30 persen.

Karena berbeda dalam soal penentuan kemenangan putaran pertama itulah, M Taufik menyatakan bahwa Jokowi-Ahok diangkat berdasarkan UU 29/2007. Karena UU 29/2007 tidak mengatur tentang mekanisme pengisian gubernur yang kosong, M Taufik berlogika bahwa yang dipakai adalah ketentuan dalam Perppu 1/2014, yaitu Pasal 173 dan Pasal 174. Pasal 173 ayat (1) menyatakan, "*Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhalangan*

tetap, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota tidak serta merta menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota." Pasal 174 kurang kebih mengatur tentang pengisian jabatan kepala daerah yang lowong karena berhalangan tetap. Pada dasarnya terdapat dua ketentuan dalam Pasal 174, yaitu bila masa jabatan kurang dari 18 bulan akan ditunjuk penjabat (caretaker), sedangkan bila masa jabatan lebih dari 18 bulan akan diadakan pemilihan oleh DPRD. Caretaker bisa saja dijabat oleh wakil kepala daerah, tetapi karena tidak dipilih, wakil kepala daerah tersebut tidak dapat menjadi kepala daerah pengganti.

M Taufik rupanya memegang teguh ketentuan Pasal 173 dan Pasal 174 Perppu 1/2014 sehingga berkesimpulan bahwa harus dilakukan pemilihan oleh DPRD untuk mengisi kursi kosong yang ditinggalkan Jokowi. Dalam perspektif M Taufik, Ahok tidak berhak dilantik sebagai Gubernur DKI untuk menyelesaikan sisa masa jabatan yang ditinggalkan Jokowi yang kurang lebih tersisa tiga tahun.

Bila dibaca secara cermat norma Pasal 203 ayat (1) Perppu 1/2014, jelas di sana digunakan kata "*pengangkatan*". Soal pengangkatan kepala daerah terpilih sama sekali tidak diatur dalam UU 29/2007. UU 29/2007 hanya mengatur perintah untuk pilkada langsung dan suara minimal 50 persen plus satu untuk menang di putaran pertama. Hanya itu. Tidak ada yang lain. Soal mekanisme pengangkatan kepala daerah terpilih, termasuk dalam hal ini Gubernur DKI, diatur dalam UU 32/2004.

Sekali lagi, karena Jokowi-Ahok diangkat berdasarkan ketentuan UU 32/2004, maka ketika Jokowi mengundurkan diri karena menjadi presiden, otomatis Ahok yang menggantikan hingga masa jabatan Jokowi berakhir. Pasal ini terdapat dalam aturan peralihan, yaitu pasal yang umumnya tercantum dalam bagian-bagian akhir undang-undang sebagai jembatan antara kondisi yang diciptakan undang-undang baru dan kondisi sebelumnya pada saat undang-undang lama diberlakukan.

Satu Paket

Setelah Ahok dilantik sebagai gubernur, berdasarkan ketentuan Perppu 1/2014, ia dapat mengajukan maksimal dua wakil gubernur kepada presiden melalui mendagri. Setelah keluar SK dari mendagri terhadap calon tersebut, Ahok sendiri yang melantik mereka.

Pertanyaannya, mengapa berlaku dua ketentuan? Untuk pengisian jabatan Jokowi, masih berlaku ketentuan UU 32/2004, yaitu Ahok menggantikan hingga masa jabatan berakhir. Namun, untuk pengisian jabatan Ahok, tidak berlaku ketentuan UU 32/2004, yaitu pemilihan oleh DPRD dari dua calon yang diajukan parpol pendukung calon, melainkan langsung bisa diterapkan Perppu 1/2014. Jawabannya sederhana, karena pemilihan yang diatur dalam UU 32/2004 satu paket. Sedangkan Perppu 1/2014 hanya menyediakan pemilihan bagi kepala daerah, sementara wakil kepala daerah cukup diusulkan oleh kepala daerah terpilih.

Dengan pemilihan satu paket tersebut, wajar bila wakil menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap. Namun, untuk pemilihan yang tidak satu paket, wajar pula bila wakil tidak otomatis menggantikan karena wakil tidak dipilih. Bila wakil menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap maka akan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menghendaki kepala daerah dipilih secara demokratis.

Hingga titik ini, nasib Ahok sebenarnya sangat benderang. Terlepas ketidaksetujuan sebagian anggota DPRD dan sebagian warga DKI, demi hukum, Ahok harus dilantik sebagai Gubernur DKI menggantikan Jokowi. Sayangnya, nafsu menjegal Ahok sepertinya sangat besar hingga mengalahkan rasionalitas, kepatutan, dan ketaatan terhadap hukum.

Mereka yang memisahkan politik dan moralitas memang tak akan pernah mengerti keduanya…

Refly Harun, Pengajar dan Praktisi Hukum Tatanegara

DETIKNEWS, 10 November 2014

Menguji Konstitusi Kita

> ”*SEGALA warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*” (Pasal 27 Ayat [1] UUD 1945).

Basuki Tjahaja Purnama akhirnya dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (19/11/2014). Seperti banyak soal di negara ini, pelantikan ini mengundang pro dan kontra. Dari sisi aturan tak ada yang salah dengan pelantikan Basuki. Basuki menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI karena kehendak hukum. Hal itu otomatis, tak digantungkan kehendak pihak lain. Tidak DPRD DKI, tidak pula Presiden Jokowi. Presiden hanya memiliki kewajiban administrasi mengangkat dan melantik Basuki sebagai gubernur setelah pengunduran dirinya.

Pasal 203 Ayat (1) Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terang benderang menyatakan, ”*Dalam hal terjadi kekosongan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya*”. Jokowi-Basuki adalah pasangan gubernur-wakil gubernur yang terpilih dan diangkat berdasarkan UU No 32/2004 sehingga Basuki berhak menggantikan Jokowi hingga masa jabatan berakhir pada 2017.

UU No 32/2004 adalah satu-satunya UU yang mengatur pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, tak ada UU lain. Tidak juga UU No 29/ 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI yang sering dijadikan dalih untuk menyatakan Basuki tidak otomatis menggantikan Jokowi.

Memang, ada dua pasal dalam UU No 29/2007 yang juga digunakan dalam Pilkada DKI 2012 yang dimenangi Jokowi-Basuki: Pasal 10 dan 11. Pasal 10 mengatur norma pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur dengan sistem satu paket. Pasal 11 menentukan suara minimal 50 persen plus satu untuk menang dalam satu putaran, yang membedakan dengan daerah lain yang cukup dengan angka 30 persen plus satu. Namun, soal pengangkatan gubernur-wakil gubernur terpilih, UU No 29/2007 tak menyatakan apa-apa. Penggunaan kata ”diangkat” dalam Pasal 203 Ayat (1) Perppu No 1/2014 yang hanya merujuk UU No 32/2004, karena itu, benar adanya.

Andaipun UU DKI mengatur pula soal pengangkatan dan penggantian gubernur yang mengundurkan diri, normanya bisa dipastikan akan sama, yaitu wakil gubernur akan menggantikan hingga masa jabatan berakhir. Ketentuan seperti ini sesungguhnya norma universal yang berlaku di mana pun untuk pemilu pejabat publik dengan sistem satu paket. Justru aneh jika gubernur pengganti Jokowi dipilih DPRD DKI. Akan muncul ironi: wakil gubernur dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan gubernur ”cuma” dipilih DPRD.

Harusnya langsung

Rencana sebagian komponen DPRD DKI yang hendak mempermasalahkan keppres pengangkatan Basuki ke pengadilan tata usaha negara, menurut saya, sama sekali tak ada gunanya. Hanya buang energi dan sia-sia. Terbitnya keppres pengangkatan Basuki juga atas perintah UU. Justru keliru jika Presiden Jokowi tak mengeluarkan keppres pengangkatan Basuki. Presiden tidak pada posisi menentukan untuk mengangkat atau tidak mengangkat Basuki sebagai penggantinya di tampuk pemerintahan DKI.

Ketika Presiden SBY mengeluarkan keppres pemberhentian Jokowi sebagai gubernur DKI karena mengundurkan diri, harusnya dalam kesempatan sama pula dikeluarkan keppres pengangkatan Basuki sebagai gubernur pengganti. Namun, ini tak dilakukan, padahal saat itu perppu telah berlaku. Penyakit "*birokratisasi*" pengambilan sumpah pejabat publik yang dipilih langsung rakyat masih mendera bangsa ini.

Saat Jokowi sudah berada di takhta kepresidenan pun keppres pengangkatan Basuki tak segera keluar. Malah Kemendagri meminta DPRD DKI, yang mayoritas dikuasai penentang Basuki, menggelar sidang paripurna untuk mengumumkan dan mengusulkan pengangkatan Basuki sebagai pengganti Jokowi. Tak heran sidang paripurna sepi anggota. Padahal, Perppu No 1/2014 sama sekali tak mengatur mekanisme ini. Sedikit blunder dari Kemendagri ini membuat sebagian anasir DPRD DKI berimajinasi tentang tak otomatisnya Basuki menggantikan Jokowi.

Prinsip kesamaan

Bahwa Basuki Gubernur DKI mulai Rabu lalu hingga 2017 merupakan fakta hukum yang tak bisa disanggah karena punya dasar kuat. Terima saja kenyataan ini sebaik-baiknya. Jadikan Basuki ujian kita dalam bernegara dan berkonstitusi. Ketika pendiri negara merumuskan UUD 1945, sudah ada pasal yang memuat hak atas kesamaan di depan hukum dan pemerintahan (*equality before the law and government*).

"*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*" adalah sedikit dari hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 sebelum diamandemen. Dalam gelombang reformasi konstitusi 1999-2002, pasal ini termasuk sedikit norma yang tetap dipertahankan apa adanya.

Bahkan, Perubahan Kedua UUD 1945 (2000) memperkuat keberadaan pasal ini dengan ketentuan baru yang maknanya hampir serupa, yaitu Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Berikutnya Pasal 28D Ayat (3) yang berbunyi, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".

Dari perspektif konstitusi, terlepas dari tiga minoritas yang melekat, yaitu minoritas dari segi etnis, agama, asal daerah, Basuki memiliki hak sama dengan warga negara lain, baik dalam hukum maupun pemerintahan.

Kesempatan duduk dalam pemerintahan tak hanya diperuntukkan kalangan mayoritas, tetapi untuk semua warga negara.

Sejak 1945, pasal tentang kesempatan yang sama dalam pemerintahan sudah tercantum. Apakah, setelah sekian lama ketentuan itu tercantum dalam buku konstitusi kita, mau diingkari hanya karena fenomena seorang Basuki? Fenomena yang mungkin tak pernah kita bayangkan sebelumnya, ada seorang etnis Tionghoa memimpin Jakarta, dari agama minoritas pula serta dari daerah yang juga bukan mayoritas (Belitung Timur).

Sungguh Basuki adalah ujian bagi kita semua. Ujian bagi ketaatan kita akan konstitusi.

Refly Harun, Pengajar dan Praktisi Hukum Tata Negara

KOMPAS, 21 November 2014

Ahok dan Gus Dur

Pelantikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengingatkan kita akan sosok Kiai Abdurrahman Wahid. Ahok dan Gus Dur adalah fenomena dalam sejarah politik Indonesia, dengan sikap yang konsisten pada prinsip masing-masing. Gus Dur memiliki jejak rekam panjang sebagai budayawan, pengasuh pesantren, politikus, hingga dikenang sebagai negarawan.

Sedangkan Ahok, dengan titik berangkat yang berbeda, menjadi fenomena di tengah krisis pemimpin yang berani mengambil risiko. Ahok, sebagai orang Tionghoa dan pengusaha, membuktikan diri sebagai tantangan terhadap dinamika demokrasi pasca-reformasi, dengan berjuang di jalur politik. Jika direnungkan, peristiwa kelam Mei 1998 membawa kepedihan sekaligus hikmah. Ketika Ahok resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta, kenangan akan kekerasan terhadap orang Tionghoa menjadi optimisme bahwa bangsa ini sudah memberikan ruang setara bagi tiap warga, tanpa membedakan sekat etnis dan agama.

Ahok menjadi figur yang dibenci sekaligus dirindukan. Ia dimusuhi orang-orang yang memiliki kepentingan di tengah keruhnya kehidupan politik Ibu Kota. Namun Ahok juga memiliki pendukung, yakni mereka yang tidak lagi bersikap feodal, menghargai keragaman, berpikir toleran, dan menganggap setiap warga negara Indonesia berhak menjadi pemimpin. Ahok dijegal oleh sikap rasis, namun ia mampu meladeninya dengan berpegang pada konstitusi.

Pelbagai upaya menjegal Ahok telah dilakukan dengan serangan bertubi-tubi. Terakhir, sengketa Ahok dengan pimpinan FPI menjadi perbincangan ramai di media sosial maupun diskusi-diskusi ilmiah. Ahok juga diserang oleh beberapa anggota DPRD DKI Jakarta yang tidak menginginkan dirinya menjadi pemimpin Ibu Kota. Menanggapi serangan politik yang bertubi, ia memilih fokus membereskan masalah mendasar kota Jakarta: banjir, pengelolaan sungai, manajemen transportasi, dan masalah mendasar lainnya.

Apa yang menjadikan Gus Dur dan Ahok dalam napas perjuangan yang sama? Keduanya berpegang pada kaidah bahwa kepemimpinan harus bertujuan untuk kepentingan rakyat. Apa yang diperjuangkan Gus Dur semasa hidupnya adalah membela kelompok minoritas dari sergapan kesewenangan kaum mayoritas. Gus Dur pernah menyatakan bahwa suatu saat Ahok akan menjadi gubernur. "*Siapa bilang orang turunan Tionghoa belum bisa jadi gubernur? Jadi presiden, kamu aja bisa*," kata Gus Dur.

Gus Dur memberikan pujian kepada Ahok ketika ia membebaskan biaya kesehatan saat menjadi Bupati Kabupaten Belitung Timur. Gus Dur mendukung Ahok ketika berniat mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung pada pemilihan Gubernur Babel 2007. Gus Dur juga pernah membantu Ahok ketika ia mengajukan gugatan di Mahkamah Agung karena

merasa dicurangi pada proses pilkada. Pada waktu itu, Gus Dur sempat berniat mengirim 2.000 anggota Banser untuk membela Ahok.

Gus Dur telah selesai menuliskan riwayat dirinya, meski teks-teks dan ingatan tentang beliau akan terus dirayakan. Ahok, yang saat ini menjadi pemimpin DKI Jakarta, akan menemukan ujian konsistensi dan prinsip perjuangan yang sesungguhnya.

Munawir Aziz, Alumnus Pascasarjana UGM, Yogyakarta

KORAN TEMPO, 01 Desember 2014

Banjir Kata Gubernur Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok adalah gunung berapi aktif, yang setiap letusannya menyemburkan bebatuan kata-kata. Bahasanya keras dan tajam. Terakhir, berkaitan dengan banjir di Jakarta, ia memberondong Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan kalimat yang mengecam. "*Pemadaman listrik menyebabkan pompa kagak jalan. Ini gila. Ini sabotase*!" katanya. Tentu para pejabat PLN tergeragap, kemudian bergumam agar Ahok mengubah gaya bertuturnya dengan bahasa yang lebih sopan. Atas saran itu, mungkin Ahok akan menggelengkan kepala. Lantaran ia merasa bahwa kajian filsafat bahasa Wittgenstein jauh-jauh hari justru tidak menyalahkan apa yang ia ucapkan.

Sebagaimana Wittgenstein, Ahok memang memposisikan bahasa hanya sebagai terjemahan dari fakta, sehingga apa pun yang diucapkan, asal berangkat dari fakta, tidaklah bisa keliru. Ahok, lewat tutur bahasanya yang ternyata "*kasar*", sesungguhnya memang hanya menegaskan fakta yang pernah terjadi. Sedangkan dari dalam pengungkapan fakta itu barulah muncul obyek (sebagai unsur dari fakta), yang dalam konteks banjir kemarin adalah PLN. Dalam luapan ucapan Ahok, si obyek alias PLN bukanlah ihwal yang paling pokok.

Dengan pengetengahan fakta (dan pemunculan obyek) itu, apa yang dikemukakan Ahok sekonyong-konyong menjadi realitas baru. Dan realitas baru itu bisa menyampaikan "*maksud jelas*" apabila di dalamnya termuat *reference* (rujukan). Dalam konteks banjir dan Ahok kemarin, "*maksud jelas*" yang tersirat adalah "*perbaikan sistem*". Walhasil, apa yang dikemukakan Ahok dalam gaya bahasa apa pun memperoleh pembenaran ala Wittgenstein. Sebab, substansi isi ledakan bahasanya benar, dan muara dari maksud yang dia tuturkan juga benar.

Tapi, untuk publik Indonesia yang biasa bersantun ria, tutur kata dan gaya bahasa yang terlalu terang itu jadi masalah. Atas hal ini, kajian filsafat bahasa lain memberikan penjelasan. Noam A. Chomsky menganggap bahasa sebagai persoalan "*dari dalam*". Aspek ini diistilahkan sebagai *Language Acquisition Device* (LAD), yang dalam kosmologi bahasa Melayu disebut Alat Pemerolehan Bahasa (APB). Suatu sistem yang memungkinkan semua manusia (anak-anak) normal memperoleh bahasa pertamanya di luar kesadaran dan tanpa pengajaran formal (Muhammad Khoyin, 2013). Namun demikian, Chomsky yakin akal manusia akan menemukan bahasa yang sifatnya umum, karena komunikasi antarpersona dan antarkomunitas memaksa terjadinya hubungan bahasa yang saling mengisi. Bahkan hubungan antarsuku dan bangsa bisa saling mempengaruhi. Bahasa yang kaku akan jadi luwes. Yang kasar menjadi lebih halus, dan sebaliknya. Pendapat ini meyakini bahwa akal manusia adalah ruang besar tabula rasa (bersih dan terbuka) yang diam-diam mengambil, menerima, menyimpan, dan menafsirkan segala pengetahuan yang ditanggapi oleh pancaindra.

Sudah waktunya Pak Gubernur Ahok, atau Zhong Wan Xie, yang "dari dalam"nya mewarisi kekerasan dan kekasaran tutur, mengkaji ulang filsafat bahasanya. Agar pusaran politik dan birokrasi Indonesia yang (kadang) pokrol bambu tidak punya alasan untuk menggempurnya.

Agus Dermawan T, Pengamat Budaya dan Seni

KORAN TEMPO, 24 Februari 2015

Defending Our Money : A lesson from Ahok

Jakarta Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama sent a different version of the capital’s public budget to the Home Minister for approval. Ahok did not send the City Council (DPRD) version because expenses of Rp 12 trillion (US$930 million), which an official dubbed dana siluman (sneaky budget), were included in the budget without his consent, he said.

In the budget deliberation the governor alleged that the council inserted many programs without proper planning and comprehensive information, by cutting 10 to 15 percent from other well-planned programs. In retaliation the council raised its right of inquiry (hak angket), which theoretically can lead to impeachment. Actually, this is a common practice in the budgeting process at the national and local levels.

People and government units often receive goods and services that differ with their requests or are even useless. What makes the latest Jakarta case special is because Ahok is fighting openly while other mayors, regents and governors tend to solve such conflicts behind closed doors. A public budget is different from a household or corporation budget, particularly given the involvement of many parties in the budget process. Every citizen can be involved in the budget planning through participatory development deliberation or Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), organized at the village, subdistrict, regency or municipality, province and national level.

At the same time, the government bureaucracy organizes a similar process in all public service units and government institutions. The education ministry or education office at the local levels, for instance, organizes budget planning annually by collecting input from schools, teachers and lower education offices on what the government has to spend in the next budget year. Indonesia’s fiscal year runs from January to December and the budgeting process formally starts in January of the previous year.

However, the public budget is not only a document listing government expenses. It is an arena of political contestation among various interests in government and society to decide the budget’s top priorities. Since revenue is likely lower than spending, priorities need to be decided — which programs should be financed or delayed to the next year.

The contestation involves ordinary citizens, mass organizations, political parties, the national and local bureaucracies and politicians. In the end, the public budget is the outcome of political compromise at the city, regency, province and national level. The budgeting process is closely related to corruption and rent-seeking. The government can design a particular project to be funded but in the end it could easily enrich their business cronies and particular interests. The policy to formulate development priorities to be funded by the public budget can favor certain business groups. In return, businesses can contribute political funding to policy makers in government or legislative bodies. In other cases, businesspeople could run for office themselves and then allocate projects for their own interests.

Ahok's struggle to save the public budget is a real fight against corruption in the nation's capital. As an example, the council has allocated a huge amount of funds to buy uninterruptible power supplies (UPS) for schools and government offices. Jakarta's officials say they had never planned to buy UPS units as it was not considered the real need of schools and government offices.

If the City Council version of the public budget is accepted, the Jakarta government would not only have to buy UPS at a very expensive price, the units would be useless. The Governor thus suspects the budget allocation to buy UPS and other items are for marked up prices, higher than the normal market price. However, we need further investigation to identify all interests and all suspected useless facilities.

Ahok happens to be the first governor fighting openly against the council on the budget issue with the consequence of impeachment. Fortunately, the impeachment procedure for a governor is not easy; it requires presidential approval. Many provinces are late to submit their public budget to the Home Ministry; municipalities and regencies also often hand in their budgets late for the governors' approval. This reflects clear evidence of the contestation in the formulation of government budgets.

The Home Minister can issue a regulation to withhold salaries of governors, regents, mayors and also local councilors until the public budget is sent. Public servants and government expenses can be disbursed but the longer process to formulate the public budget will obviously delay government programs. Nevertheless, the conflict between Ahok and the council gives an important lesson to us. The conflict is expected because the budget is a site of power contestation. Today's conflict is all about how Governor Ahok defends public resources from the predatory interest of the City Council — if his allegations prove true.

On the contrary, we should suspect a smooth process of public budget deliberation. If there is no conflict between competing interests, citizens should worry about collusion between the executive and legislative branches in looting public resources. Jakarta has to bear the high costs of the current conflict, particularly the delay of development programs.

But letting predatory interests steal the public budget without resistance is tantamount to welcoming robbers into our home.

Ahok is teaching us a real lesson to defend our money and to fight corruption.

J Danang Widoyoko, The writer is with the Indonesian Corruption Watch NGO, currently researching corruption and the construction sector for his PhD at the Australian National University in Canberra

JAKARTA POST, 07 Maret 2015

Ahok dan Kepemimpinan Antikorupsi

Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI Jakarta masih terus "*memanas*". Mediasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kamis (5/3), untuk mengurai polemik Ahok dengan DPRD DKI, berakhir *deadlock*. Dugaan anggaran siluman Rp 12,1 triliun di APBD menjadi penyebab memanasnya hubungan Ahok dan DPRD DKI Jakarta. Ahok menemukan anggaran yang diduga siluman itu setelah draf APBD yang disahkan dikirimkan ke Kemendagri. Setelah disahkan pada 27 Januari 2015 lalu oleh DPRD DKI Jakarta, ternyata DPRD melakukan pembahasan kembali draf APBD yang disahkan itu sehingga bisa muncul anggaran siluman sejumlah tersebut.

Usulan anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun itu salah satunya bakal dialokasikan untuk pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) di sekolah dan kantor kelurahan serta kecamatan. Menurutnya, anggaran Rp 12,1 triliun itu lebih baik dialokasikan untuk program unggulan dibanding anggaran yang tidak prioritas. Usulan tersebut merupakan potongan dari anggaran program unggulan DKI lainnya. Atas pernyataan Ahok, DPRD kemudian mengajukan hak angket. Menurut Pasal 322 Ayat 3 UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto Pasal 106 Ayat 3 UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), disebutkan hak angket merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan pemerintah, yang penting dan strategis serta berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, yang diduga bertentangan dengan peraturan UU.

Landasan hukum hak angket antara lain UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terdapat pada Pasal 322, Pasal 331, sampai Pasal 335; UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 106, Pasal 115 sampai 119; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang Tatib, diletakkan di Pasal 9, dan Pasal 14 hingga 19; Peraturan DPRD Provinsi DKI Nomor 1/2014 dalam Pasal 11, dan Pasal 15-20.

Berdasarkan paripurna DPRD DKI Jakarta pada 26 Februari, 106 anggota DPRD secara bulat mendukung penuh pengajuan hak angket terhadap Ahok. Belakangan, satu per satu fraksi di DPRD mulai gamang apakah akan melanjutkan sikap tersebut atau memilih menariknya. Sebelumnya, mantan Bupati Belitung Timur itu dianggap melanggar UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan UU 17/2014 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD.

Ahok juga dinilai melanggar PP Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP Nomor 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; PP Nomor 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13/2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 37/2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015; dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 46/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

Apakah hak angket DPRD DKI, jika benar dilanjutkan, bisa memakzulkan Ahok? Perlu dicermati bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, bukan parlementer. Dalam sistem presidensial, legislatif memiliki kedudukan yang sama dengan eksekutif, sehingga tak bisa saling melengserkan satu sama lain. Dalam sistem pemerintahan presidensial, yang dapat memecat kepala daerah hanya presiden.

Substansi persoalan sebenarnya adalah potensi korupsi yang coba dihindari Ahok. Persoalan seperti ini biasa muncul di lingkaran kekuasaan, ketika eksekutif "*berselingkuh*" dengan legislatif atau parlemen dalam masalah rancangan anggaran belanja, baik itu di pusat maupun di daerah. Di sini rentan sekali terjadi penyelewengan dan mark-up anggaran.

Biasanya, eksekutif yang "*takut*" terhadap parlemen akan mengikuti apa saja yang dimaui parlemen tanpa koreksi. Eksekutif yang seperti ini biasanya takut untuk dimakzulkan. Ahok dalam konteks ini barangkali salah satu contoh pemimpin yang "*berbeda*".

Di tengah defisit pemimpin yang antikorupsi, Ahok seperti oase di padang yang kering kerontang. Ahok seperti menjalankan model kepemimpinan profetik yang layak diteladani para pemimpin daerah lainnya. Keshavan Nair dalam A Higher Standard of Leadership (1997), mengajukan model kepemimpinan profetik sebagai jalan keluar mengatasi merosotnya integritas pemimpin publik. Pemimpin profetik berbasis pada kekuatan kebenaran, keadilan, dan komitmen untuk melayani manusia (service for humanity). Pemimpin berwawasan profetik dibutuhkan sebagai ujung ekstrem dari kepemimpinan otoriter-koruptif yang menjunjung nilai-nilai asketisme, yakni hidup sederhana dan bermental pengorbanan diri (altruistik).

Pemerintahan yang bersih dari korupsi haruslah dimulai dari pemimpin yang bersih dan antikorupsi. Korupsi itu tidak lagi dipahami sebagai kejahatan konvensional biasa, bahkan disebut sebagai kejahatan luar biasa dan memiliki watak jahat menuju hiperkriminalitas. Mengutip Baudrillard dalam *The Perfect Crime* (1992), kejahatan menjadi hiper ketika ia melampaui realitas (hukum, moralitas, akal sehat, dan budaya), serta terdapat watak jahat yang berkembang sedemikian rupa menuju tingkatan yang sempurna.

Seperti dikatakan Lord Acton dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton pada 3 April 1887, korupsi berkaitan dengan kekuasaan. Karena itu, kekuasaan penting dipegang pemimpin antikorupsi yang berani mengambil risiko apa pun agar tidak terjadi korupsi.

Fajar Kurnianto, Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta; Tinggal di Depok

SINAR HARAPAN, 07 Maret 2015

Seandainya Ahok Muslim

Sayang beribu sayang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama (Ahok) bukan seorang muslim. Sepak terjangnya yang tegas, berani, dan pantang menyerah memperjuangkan kebenaran identik dengan nilai Islam yang seharusnya terpatri pada identitas politikus Islam.

Apa yang menjadi sumber keributan antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta persis pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Para anggota Dewan yang terhormat menuding mantan Bupati Belitung tersebut sengaja tidak mengirimkan Raperda APBD DKI 2015 yang menjadi usul bersama anggota DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI.

Keterlambatan tersebut dipicu oleh ulah DPRD yang menolak menggunakan sistem *e-budgeting* yang telah disiapkan Ahok untuk menguji akuntabilitas dan transparansi anggaran. Ahok ingin pengajuan rencana anggaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang kental akan aroma korupsi dan kolusi. Apalagi, Ahok menduga, dalam anggaran tahun lalu terdapat dana siluman sebesar Rp 12,7 triliun yang merupakan hasil inisiasi anggaran dari pihak DPRD. Dana tersebut ditengarai digunakan untuk pembelian *uninterruptible power supply* (UPS) untuk beberapa sekolah.

Atas penolakan tersebut, DPRD DKI Jakarta pun berang dan menghukumnya melalui hak angket. Bukannya takut, Ahok malah membalas dengan melaporkan keberadaan dana siluman tersebut kepada KPK. Dengan bahasa khasnya, Ahok menantang siapa yang bakal masuk ke penjara. Apakah dia, atau anggota Dewan. "*Makanya, silakan angket diteruskan. Nanti kita buktikan, saya masuk penjara atau tidak. Kita buktikan siapa yang bohong*," kata Ahok di depan para wartawan sesaat setelah mengadukan keberadaan dana siluman dalam APBD 2014.

Padahal apa yang menjadi sumber perseteruan tersebut merupakan gambaran nyata kualitas APBD di seluruh negeri ini. Jika kepala daerah berkomitmen mendapatkan APBD yang bersih dan akuntabel, langkah Ahok tersebut harus diikuti.

Sudah bukan rahasia umum lagi, APBD di negeri ini merupakan hasil perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif. Selama ini, pengesahan anggaran di daerah berjalan lancar karena Dewan dan eksekutif sama-sama diuntungkan dengan mark-up anggaran. Baik eksekutif maupun legislatif menerima jatah sehingga saling menjaga kerahasiaan pencurian uang rakyat.

Atas dasar keinginan mendapatkan anggaran yang benar-benar bersih dan akuntabel, Ahok melawan arus dan melawan kekuatan legislatif. Islam mengajarkan kebenaran adalah kebenaran. Insan yang jujur senantiasa memperjuangkan kebenaran, meskipun harus berlawanan dengan orang lain dan nyawa menjadi taruhan.

Dari seluruh kepala daerah di negeri ini, yang mayoritas beragama Islam, tak ada yang seberani Ahok melawan tirani DPRD. Mereka terlalu cinta pada

jabatan dan kemungkinan turut kecipratan hasil persekongkolan jahat tersebut. Ahok berani secara konfrontatif dan tidak ikut dalam arus kompromistis seperti gubernur lain, karena nothing to lose. Baginya, jabatan bukan segala-galanya. Dia tak gila jabatan. Dia tidak rakus, sehingga tak peduli dapat dimakzulkan oleh parlemen.

Dia mengamalkan wejangan Rasulullah SAW yang berbunyi, "Katakanlah kebenaran, walaupun pahit." Seandainya saja Ahok muslim, mungkin dialah orang yang paling tepat memimpin negeri korup yang mayoritas rakyatnya muslim ini.

Arfanda Siregar, Pengamat Gerakan dan Politik Islam

KORAN TEMPO, 10 Maret 2015

Dari Dana Siluman sampai Kartel

BIROKRASI negara masih sangat kotor. Reformasi birokrasi yang didengungkan sejak awal reformasi tak lebih dari pepesan kosong. Isu tentang dana siluman pada APBD DKI Jakarta dan masih eksisnya kartel-kartel yang merusak pasar kebutuhan pokok rakyat menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi belum menghasilkan apa pun. Birokrasi negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, masih dikendalikan pemburu rente. Mereka kini fokus mencari dan mencoba modus baru untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Pencarian modus baru terus dilakukan setelah para birokrat tersebut melihat agresivitas KPK dalam beberapa tahun belakangan ini. Salah satu modus yang populer belakangan ini adalah membangun kemitraan dengan pengusaha. Oknum birokrat memuluskan proses memenangkan tender proyek, sedangkan pengusaha berperan mencari barang dengan harga yang menguntungkan.

Biasanya, nilai proyek sudah digelembungkan dengan kesepakatan bagi hasil keuntungan. Itulah yang terjadi pada kasus dana siluman pada APBD DKI dan wajar bila Gubernur Basuki Tjahaja Purnama melaporkan ke KPK. Fenomena ini perlu digarisbawahi pemerintahan Jokowi-JK.

Pemerintah perlu mengkaji ulang desain reformasi birokrasi. Program remunerasi saja rupanya belum cukup. Soalnya, andai tren korupsi dijadikan salah satu indikator keberhasilan maka reformasi birokrasi belum menghasilkan sesuatu yang signifikan. Kualitas pengawasan justru perlu terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kemajuan teknologi memungkinkan pemerintah meningkatkan mutu pengawasan.

Tidak kalah pentingnya memperbaiki sistem perekrutan CPNS di pusat dan daerah. Kasus yang dilaporkan Ahok ke KPK tak jauh berbeda dari kasus proyek Hambalang yang terkuak pada paruh pertama 2012. Ada delapan kejanggalan dalam realisasi dan pembiayaan Hambalang. Namun, paling heboh adalah proses di DPR.

Sebagian anggota Komisi X yang membidangi olahraga mengaku tidak tahu apa-apa perihal peningkatan skala proyek itu, dari sekolah atlet senilai ''hanya'' Rp 125 miliar kemudian berubah menjadi pusat olahraga senilai Rp 1,2 triliun, dengan anggaran tahun jamak. Saat ini pun khalayak mungkin kehabisan katakata untuk mendeskripsikan modus korupsi berkait kasus dana siluman pada APBD DKI itu. Proyek siluman itu sudah terdeteksi pada APBD DKI 2014.

Wujudnya, pengadaan uninterruptible power supply (UPS) komputer dengan anggaran Rp 300 miliar. Padahal, permintaan UPS tidak pernah ada. Konon, hal itu terjadi karena oknum SKPD dipaksa mengisi proyek titipan DPRD. Dalam APBD 2014, Pemprov DKI belum sepenuhnya menerapkan sistem E-budgeting.

Kartel Beras

Dalam APBD DKI 2015, modus yang sama kembali diulangi. Bukan hanya merekayasa rencana belanja UPS melainkan juga menyusupkan beberapa proyek lain senilai Rp 12,1 triliun. Efektivitas penerapan Ebudgeting untuk APBD 2015 akan memudahkan Ahok menemukan proyek dan dana siluman itu. Selain kasus dana siluman di APBD, pemerintahan Jokowi-JK juga kembali diingatkan tentang masih eksisnya kartel-kartel yang mengendalikan permintaan dan penawaran aneka komoditas kebutuhan pokok rakyat.

Eksistensi kartel-kartel itu setidaknya sudah terbuktikan oleh lonjakan harga beras menjelang akhir Februari 2015. Sewaktu blusukan memantau stok beras di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (28/2), Jokowi menegaskan, "*Kalau ada yang mengganggu perekonomian, siapa pun dia, saya perintahkan tangkap*."

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel secara terbuka menyinyalir peran kartel beras di balik kenaikan harga. Kini, masyarakat menunggu aksi nyata Presiden dan Menteri Perdagangan. Untuk mengetahui identitas anggota kartel, cukup mempelajari riwayat para importir yang terdaftar di sejumlah kementerian.

Jokowi dan Rachmat Gobel harus bisa memaksa para birokrat menyajikan informasi sejujur-jujurnya. Itu saja. Tentang penyebab lonjakan harga beras, Perum Bulog membela diri dan cenderung menyalahkan pemerintah karena tidak merealisasikan pengadaan 462.000 ton raskin periode November-Desember 2014.

Per bulan realisasi pengadaan raskin mencapai 232.000 ton untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran. Bila kekosongan raskin menjadi penyebab kenaikan harga beras, kenapa Bulog tidak memberi peringatan dini kepada instansi terkait lainnya? Padahal Bulog punya analisis standar tentang sebab akibat bila pengadaan raskin melenceng dari jadwal.

Bulog seharusnya lebih berani mengingatkan instansi terkait untuk mencegah ekses. Stok 1,4 juta ton beras di gudang Bulog cukup untuk memenuhi permintaan pasar 5 bulan ke depan. Sayang, stok sebesar itu tak mampu melindungi rakyat. Lonjakan harga beras sudah terjadi dan rakyat menanggung akibatnya.

Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

SUARA MERDEKA, 10 Maret 2015

Membaca Akhir Kisruh RAPBD DKI

Semoga kisruh pembahasan RAPBD 2015 antara eksekutif dan legislatif Provinsi DKI Jakarta usai, dan ke depan tidak perlu terjadi lagi. Dalam hal tertentu kekisruhan tersebut menampakkan irasionalitas. Terjadi debat kusir, saling mengelak dan mengumpat memalukan dengan jargon cacian penghinaan terhadap kelompok etnis. Publik berharap, inilah kisruh pertama dan terakhir untuk Pemprov DKI.

Gubernur (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah instrumen pemerintah DKI Jakarta. Di sini tersirat ada musuh bersama. RAPBN dijadikan momentum saling sikat, menuding dan Perilaku mereka mencerminkan elite tidak berkelas, dan tidak santun. Mereka meninggalkan etiket dan moral yang semestinya dijunjung tinggi para penyelenggara negara. Mereka mengeluarkan unek-unek di depan media, bukan tentang substansi RAPBD 2015. Ada unsur kebencian, sisnisme, bahkan makian.

Kisruh karena ada yang menyimpang jauh dari garis tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Dengan kata lain ada pihak yang melanggar batasan peraturan formal. Publik tidak sekadar menonton, tetapi juga memperbincangkan. Tak ayal, kekisruhan ini menjadi trending topic perbincangan warga dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote/Ndao. Maka rakyat luas tergerak mencermati akhir kekisruhan. Sebenarnya, kekisruhan eksekutif versus legislatif DKI Jakarta yang berlarut mendekati satu bulan ini justru tindakan asocial. Beberapa saat, mereka sempat "*mengunci*" APBD 2015 hanya demi memuluskan/mempertahankan kepentingan pribadi atau golongan.

Tidak transparan bahkan sarat muatan korupsi mengawali kisruh antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan 106 anggota DPRD DKI dalam menyikapi hasil pembahasan RAPBD 2015. Ini karena ada temuan pemprov, ternyata anggota DPRD menyelipkan "*anggaran siluman*" 12, 1 triliun rupiah, angka yang amat besar. Gubernur merasa ditipu karena ketika eksekutif dan legislatif terlibat proses pembahasan APBD dengan sistem e-budgeting, eksekutif tidak pernah mengusulkan program tertentu seperti pengadaan *uninterrupted power supply* (UPS).

Anggaran siluman yang demikian besar membuat Ahok marah. Ada begal APBD. Penyelipan bermotif korup. Menurut Ahok, 12, 1 triliun bisa untuk membangun 60.000 rumah susun bagi ratusan ribu warga Jakarta yang memerlukan hunian layak. Dana sebesar itu juga bisa untuk merehabilitasi 46 persen sekolah di Jakarta.

Tetapi anggota DPRD mengelak temuan Pemprov DKI. Bahkan seluruh fraksi dengan 106 anggota bersepakat mengajukan hak angket untuk menyelidiki Gubernur beserta pejabat pemprov terkait, bukan pemakzulan. Pertanyaannya, apa yang mau disidik oleh panja hak angket jika proses pembahasan APBD 2015 dengan sistem e-budgeting dijalankan sempurna, apalagi APBD 2015 belum operasional?

Dipolitisasi

Jelaslah, anggota DPRD telah mempolitisasi pembahasan APBD agar bisa mengajukan hak angket karena tidak ada bukti kuat. Tidak ada kerugian Negara. Belakangan, sejumlah fraksi mundur dari hak angket seperti Nasdem dan PKB. Dapat diperkirakan, hak angket akhirnya gugur tidak efektif karena argumentasi teknis tentang substansi penganggaran yang berupaya melemahkan Gubernur, amat lemah. Justru hak angket menjadi kontra produktif. Dia bisa jadi bumerang kalau melihat tupoksi DPRD bukan menginput angka anggaran, tetapi hanya membahas dan menyetujui bersama (lihat UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 99). Langkah hukum tindak pidana korupsi ditangani Polri, Kejagung dan KPK. Bahkan tiga instansi ini antusias berebutan menyidik kisruh tersebut. Polri, Kejagung, KPK telah lama mengincar substansi korupsi anggota DPRD DKI ini.

Sejarah pemerintahan di Indonesia dalam pembahasan RAPBD pada tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan Senayan belum pernah berujung pada hak angket seperti mau digelar DPRD DKI. Padahal jika menyimak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 217 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Tata Tertib DPRD DKI 2014, kewenangan DPRD sebatas membahas dan menyetujui RAPBD. Ini termasuk rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD dimaksud. DPRD sama sekali tidak punya wewenang mengusulkan anggaran.

Maka, intervensi DPRD nyata mengabaikan amanat konstitusi dan tatib DPRD dalam pembahasan anggaran. Anggota dewan ikut memasukkan anggaran, jelas salah, karena bukan hak mereka. Intervensi legislatif tidak sulit dibaca sebagai ada "*deal*" ketika APBD sudah berbentuk uang. Mungkin oknum wakil rakyat ini "*deal*" dengan pengusaha/pihak ketiga, pada tahap pelelangan pekerjaan yang pos anggarannya sudah tersedia dalam APBD, jika usulan DPRD lolos atau tidak diketahui eksekutif. Kesalahan konstitusional ini wajar sekali memicu kemarahan Ahok. Dia sedini mungkin berupaya mencegah korupsi dengan melaporkan dana siluman dalam APBD 2015 kepada Mendagri dan KPK.

Sebagai catatan akhir, butir penting berikut staretgis dalam menghasilkan APBD 2015. Kemendagri sudah mengambil kebijakan menerima APBD versi Pemprov DKI dan akan dibahas 13 Maret. Selanjutnya, dikembalikan ke Pemprov DKI atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyesuaikan dan menyempurnakan sesuai catatan Kemendagri. Forum untuk pembahasan tersebut tidak perlu lagi melalui Paripurna DPRD.

Pembahasan tanpa melalui forum paripurna ibarat mobil yang melintas di jalan tol. Eksekutif dipastikan "*ngebut*" agar segera memiliki APBD untuk melayani warga dan memulai pembangunan infrastruktur seperti perbaikan sekolah, pencegahan banjir, dan kelancaran lalu lintas. Jika eksekutif dan

legislatif sepakat atas catatan Kemendagri, dijadikan Peraturan Daerah (Perda) APBD DKI Jakarta Tahun 2015.

Sebaliknya, jika legislatif tidak sepakat, maka Gubernur harus menyiapkan langkah legalistik lainnya demi percepatan sahnya APBD. Dia segera mengeluarkan Pergub, sehingga penyusunan RAPBD 2015 sepenuhnya berada di tangan eksekutif. Penyusunan tahapan ini memperoleh asistensi Kemendagri. Asistensi meliputi cara menghitung pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan. Demikian juga program dan kegiatan sesuai dengan APBD 2015.

Abraham Fanggidae, Mantan Pejabat Kementerian Sosial

KORAN JAKARTA, 11 Maret 2015

Anggaran Siluman dan Politik Buldoser Ahok

Perseteruan antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD terkait dugaan anggaran siluman di RAPBD DKI Jakarta telah berkembang menjadi masalah politik dan hukum. Silang sengkarut yang kemudian melahirkan konflik kelembagaan antara eksekutif versus legislatif pernah terjadi di banyak daerah. Di Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi NTT pada 2013, misalnya, bupati dan para pegawai negeri sipil bahkan sampai berdemo ke DPRD supaya RAPBD segera disahkan. Namun perseteruan Ahok versus DPRD ini sangat berbeda.

Hal ini karena inti masalahnya sebenarnya terletak pada adopsi e-budgeting oleh Ahok yang kemudian dapat membuka kotak pandora berisi anggaran-anggaran siluman yang biasanya merupakan titipan dari para oknum pemburu rente di DPRD kepada sejumlah SKPD di Pemerintah Provinsi Jakarta. Sebelum adanya sistem elektronik ini, para begal anggaran di legislatif dan pemerintah daerah sangat mudah untuk menyusupkan beragam item proyek dan kegiatan untuk mendapatkan komisi dari para pemenang tender yang sudah diatur.

Sudah jamak terjadi di pemerintah pusat maupun terlebih di daerah, adanya *unholy alliance* antara para pejabat publik, birokrat, makelar, dan supplier untuk menggangsir uang rakyat dengan beragam modus dan manifestasinya. Bagi para pejabat publik, korupsi anggaran ini adalah cara paling cepat untuk mengembalikan investasi politik maupun membayar utang kampanye mereka dalam pemilu. Meski yang berhasil dibuktikan secara hukum hanya sebagian kecil, praktek korupsi anggaran telah banyak mengantarkan para pejabat dan jejaring korupsinya masuk penjara.

Sejak dimulainya pilkada langsung pada 2005 hingga awal tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 318 dari 524 kepala dan wakil kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Dengan praktek politik yang semakin legislative heavy pada masa Reformasi ini, ribuan anggota dewan di pusat dan daerah telah menjadi pesakitan hukum karena kasus korupsi. Bahkan, di beberapa daerah, seperti di Sumatera Barat, Papua Barat, Bolaang Mongondow Timur, dan Kutai Kartanegara, pernah semua anggota DPRD yang menjabat pada periode tertentu tersangkut kasus korupsi secara bersamaan.

Meski demikian, muslihat patgulipat anggaran masih kerap terjadi. Beberapa waktu lalu, misalnya, publik dikagetkan dengan pembelian sendok dan piring untuk rumah dinas Wali Kota Makassar yang mencapai Rp 1,2 miliar, anggaran setengah miliar untuk pembuatan pidato Jokowi sewaktu menjadi Gubernur Jakarta, hingga sewa pawang hujan. Sebelum mengungkap anggaran siluman Rp 12,7 triliun di APBD versi DPRD Jakarta, Ahok pernah mengemukakan adanya usulan anggaran Rp 8,8 triliun untuk sosialisasi SK gubernur.

Sebagai politikus generasi baru yang memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas, reaksi Ahok yang sangat frontal terhadap DPRD Jakarta selain menunjukkan karakter kepemimpinannya yang tidak kompromistis sebenarnya juga sangat terukur. Hitungan politik Ahok lebih canggih dibandingkan sejumlah pemain politik utama di DPRD, yang pengalaman bertandingnya masih seperti pemain politik antarkampung.

Ahok telah melewati sejumlah medan politik berat di Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, DPR, hingga masuk ke DKI Jakarta. Ahok paham sekali betapa tidak kredibelnya DPRD di mata rakyat. Apalagi sejumlah pimpinan DPRD Jakarta telah rusak reputasinya karena kasus korupsi di masa lalu, keterkaitannya dengan premanisme, maupun perilaku tidak terpuji lainnya. Lebih dari itu, Ahok merupakan pemimpin yang *nothing to lose* saat ini dalam memperjuangkan hal-hal yang prinsipiil.

Namun bergulirnya hak angket bukanlah tekanan politik biasa. Dengan melompati hak interpelasi, DPRD Jakarta memandang perlu adanya akselerasi untuk memproses Ahok secara politik, yang ujungnya tentu ada yang mengharapkan sampai ke pemakzulan. Hak angket dan langkah hukum DPRD lainnya juga akan menyulitkan Ahok untuk beberapa waktu ke depan.

Pertama, pengesahan APBD di Kemendagri bisa berlarut-larut, sehingga rakyat Jakarta akan menjadi korban. Mereka akan mudah diprovokasi untuk menyalahkan Ahok sebagai biang keroknya. *Kedua*, merespons Ahok yang melaporkan kasus terkait anggaran ke KPK, DPRD juga merencanakan langkah-langkah hukum untuk mengadukan Ahok ke polisi. Jika polisi memprosesnya, Ahok dan jajarannya juga akan tersita waktu dan pikirannya.

Ketiga, dalam kondisi gerakan pemberantasan korupsi yang sedang masuk angin karena kriminalisasi, bisa jadi laporan Ahok tidak akan segera ditindaklanjuti karena internal KPK sedang bergejolak dan memiliki tunggakan perkara yang banyak. Jika tidak segera ada tindakan dari KPK, tentu komplotan begal anggaran akan merasa di atas angin sehingga bisa lebih leluasa menghajar Ahok yang tidak berpartai. Keempat, karena oknum DPRD pasti bekerja sama dengan oknum pemerintah provinsi, sangat mungkin mereka akan bersiasat untuk cari selamat dengan melawan Ahok dari dalam.

Dalam kondisi menang secara moral politik dan dukungan publik, langkah-langkah Ahok sepertinya akan mengarah pada zero-sum game. Baginya, hak angket merupakan kesempatan untuk menjalankan politik buldoser guna menghancurkan sindikat anggaran, baik di legislatif maupun eksekutif.

Lewat *e-budgeting*, Ahok juga membuldoser praktek-praktek manual penggangsiran anggaran yang nantinya dapat menjadi contoh bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki proses penyusunan dan penggunaan anggaran.

Karena itu, dukungan luas bagi Ahok sebenarnya bukan semata-mata untuk dirinya, tapi pada upayanya memodernisasi anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Saatnya beralih dari *save Ahok* ke *save e-budgeting* karena, apa pun hasil akhirnya, Ahok tetaplah menjadi pahlawan meski risikonya harus dimakzulkan atau sampai masuk penjara.

Nico Harjanto, Direktur Eksekutif Populi Center; Dosen Program Pascasarjana Universitas Paramadina;

DETIKNEWS, 12 Maret 2015

Drama Kepentingan Minus Hak Rakyat

Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) versus para politisi di DPRD tampaknya kian meruncing kendati sudah diupayakan adanya mediasi termasuk oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Sebagian fraksi (yakni Nasdem, PKB dan PAN) di parlemen Jakarta memang sudah mencabut tanda tangan dukungan untuk gunakan hak angket, namun saling melaporkan kasus pidana terus saja terjadi. Belum lagi diproses laporan Ahok ke KPK tentang dugaan dana siluman para anggota DPRD, muncul lagi inisiatif (LBH Pendidikan) untuk melaporkan seorang anggota DPRD karena dianggap telah memaki putra Belitung itu.

Tapi, pihak DPRD pun ingin berbalas dengan sepakat untuk melaporkan Ahok ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan penghinaan, fitnah dan pencemaran nama baik terhadap lembaga legislatif dan para politisinya. Itu belum termasuk permintaan kepada BPK untuk segera mengaudit Ahok Center yang diduga memperoleh dana CSR (gratifikasi?) dari para perusahaan pengembang di Jakarta, serta rencana IMM yang menganggap Ahok telah menghina Muhammadiyah.

Sampai kapan berakhir perseteruan itu akan berlangsung? Tak ada yang bisa memastikan. Namun yang niscaya sekarang ini, pihak korbannya adalah rakyat Jakarta yang seharusnya akan memperoleh sentuhan dari anggaran pembangunan tahun 2015, namun karena RAPBD-nya belum juga disetujui maka nasib mereka belum menentu; termasuk di dalamnya para pegawai yang kesejahteraannya terganggu.

Sistem Penganggaran

Memang sulit untuk menyelesaikan konflik jika kedua belah pihak sudah saling melukai dengan kepentingan yang masingmasing terganggu. Ahok sendiri sejak awal memiliki resistensi baik dari kalangan politisi Koalisi Merah Putih (KMP), utamanya setelah secara terbuka mengumumkan dirinya keluar dari Partai Gerindra, di mana kemudian berupaya dihadang oleh kekuatan sebagian elemen masyarakat (kelompok Islam yang tergabung dalam FPI) untuk tidak dilantik jadi Gubernur menggantikan Jokowi.

Tetapi tampaknya Ahok bukan saja tak gentar menghadapi gertakan politik karena berada di jalur konstitusi dan aturan yang berlaku, melainkan juga secara vulgar telah melakukan demoralisasi terhadap para politisi yang posisi politiknya dalam proses-proses pembuatan APBD berseberangan dengan desain kebijakannya. Maka keluarlah kata-kata yang dianggap kasar "*dana siluman*" itu yang membuat kemarahan kolektif. Tentu saja wajar kalau ditanggapi emosional dan marah, soalnya (1) penggunaan istilah yang sudah langsung menohok, seolah-olah para politisi benarbenar penjahat, dan (2) kepentingan para politisi itu untuk memperoleh cipratan dana APBD sudah sulit diwujudkan.

Dalam sistem penganggaran kita, peran DPRD memang tak bisa dihindari karena diberikan kewenangan untuk memutuskannya, dan putusannya

bersifat mengikat. Maka, wajar kalau tersinggung dan mempersoalkan RABPD Ahok yang tak mengakomodasi putusan paripurna DPRD. Namun demikian, perlu dicatat juga bahwa kewenangan parlemen sebenarnya lebih pada arah kebijakan anggaran (dan inilah yang disebut dengan hak bujet), bukan sampai pada item cost-nya karena yang disebut terakhir sudah merupakan urusan teknis pihak eksekutif. Barangkali karena terlalu detail sampai pada memasukkan anggaran-anggaran yang itulah yang kemudian membuat Ahok tak mau menerimanya.

Kalau ini benar, maka sikap Ahok bisa dibenarkan, karena itu bisa dianggap sebagai bagian dari upaya manipulasi anggaran yang memperoleh kesepakatan kolektif secara formal. Tepatnya, Ahok bersikap kritis dan tak patuh pada putusan politik DPRD itu dan tetap konsisten menggunakan standar kepatutan dalam komponen atau posting anggaran untuk pembangunan di Jakarta. Dalam konteks ini, baikpihak DPRD maupun Ahok tentu masing-masing menganggap diri benar. Namun sebaliknya, bukan mustahil kedua pihak bisa saja sama-sama keliru. Mengapa? Pertama, terkait konsep kebutuhan prioritas atau layak tidaknya suatu komponen anggaran yang diusulkan. Harusnya indikatornya jelas dan disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak dan juga masyarakat.

Hal ini seyogianya jadi materi perdebatan serius dalam proses pembahasan RABPD antara Pemda DKI dengan di DPRD, dan semua harusnya tuntas dalam proses-proses pembahasan anggaran itu. Dalam proses-proses pembahasan anggaran, tentu saja selalu terbuka kompromi untuk mengakomodasi satu sama lain.

Acuan komprominya tak boleh diada-adakan, harus berangkat dari konsep skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat/rakyat dan atau untuk perbaikan pembangunan di Jakarta. Ini semua tak bisa dilepaskan dengan target kerja tahunan dan atau periodik dari pihak eksekutif yang di-break down ke dalam item program dan pembiayaannya. Dan jika konsep ini diimplementasikan secara fair, niscaya tak akan pernah muncul istilah dana siluman.

Kedua, dalam setiap penyusunan anggaran, pemda sebenarnya tak boleh hanya dianggap sebagai "milik" dua pihak saja, yakni pemda dan DPRD. Dalam anggaran negara/daerah melekat hak publik, karena rakyatlah yang jadi penyumbang terbesarnya. Konsekuensinya, pemanfaatan atau pengalokasiannya pun tak boleh seenaknya hanya diarahkan oleh para elite yang terlibat dalam administrasi dan arena politik.

Soalnya, jika hanya dilakukan para elite itu, di mana proses-proses itulah tampaknya yang terjadi dalam proses penyusunan RAPBD di DKI Jakarta (dan kecenderungannya juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia), maka kecuali sebagai pelanggaran atas hak rakyat, juga selalu terbuka peluang terjadinya kompromi elitis berdasarkan kepentingan subyektif masing-masing.

Keterlibatan publik dalam proses penganggaran pada dasarnya merupakan bagian dari transparansi yang jadi syarat mutlak untuk bisa dianggap sebagai pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sekaligus bisa mengarah pada pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Mekanisme dilakukan melalui uji publik, di mana praktiknya dengan melibatkan kelompok LSM dan atau lembaga profesional untuk memastikan bahwa anggaran yang diajukan oleh pemerintah atau DPRD sesuai dengan kebutuhan rakyat sebagai sumber anggaran dan sekaligus subjek yang harus memperoleh sentuhan untuk diperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Problemnya memang, pemda maupun DPRD kerap menganggap diri sebagai "*yang berhak dan tahu atau pintar*" sementara masyarakat di luarnya diposisikan" *tak berhak, tak tahu atau pun bahkan bodoh*" sehingga tak perlu dilibatkan. Atau, pihak pemda dan DPRD merasa mau melangkah cepat-cepat saja, sementara kalau libatkan publik akan lambat. Intinya, masyarakat selalu dikhawatiri atau bahkan dicurigai sehingga tak perlu dilibatkan dalam proses-proses penganggaran.

Padahal, di balik sikap skeptis itu sebenarnya terkandung sikap arogan atau juga niat jahat dalam rangka mengambil porsi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dalam anggaran negara/daerah yang ditetapkan secara elitis itu. Nanti, setelah terjadi kasus seperti antara Ahok versus DPRD seperti sekarang ini, baru kemudian publik tahu, dan Ahok pun minta dukungan rakyat banyak untuk berada di belakangnya. Ini artinya, pengabaian terhadap rakyatlah yang menjadikan konflik politik antara eksekutif dengan legislatif lokal di Jakarta sekarang ini.

Komunikasi Politik

Publik bangsa ini memang niscaya tak meragukan integritas Ahok dalam memimpin dan membangun Jakarta. Namun mengacu pada Pat Williams dan Jim Denney dalam buku *Leadership Excellence* (2012), seorang pemimpin tak bisa hanya bermodalkan integritas, melainkan juga kemampuan membangun komunikasi yang elegan terutama dengan para politisi mitranya.

"*Great leaders are great communicators* (pemimpin besar adalah komunikator yang hebat)", tegas kedua ahli dari Negara Paman Sam itu. Perdebatan saling meyakinkan di dalam lembaga parlemen antara kedua pihak merupakan bagian proses komunikasi politik yang akan sangat menentukan, di mana rakyat secara luas juga dapat mengikuti sehingga mengetahui apa substansi yang jadi objek yang dibahas.

Komunikasi politik memang merupakan seni dan di dalamnya juga terkandung nilai etika dengan derajat kehati-hatian. Maka, Ahok juga tidak bisa hanya menggunakan alasan mau bergerak cepat sehingga mengabaikan mekanisme formal seperti pengabaian pada proses dan putusan paripurna di DPRD DKI Jakarta itu.

Tepatnya, pejabat publik harus tunduk pada mekanisme formal, termasuk dengan pelibatan publik itu namun tetap teguh mempertahankan prinsip untuk suatu agenda kerakyatan dan perbaikan. Para anggota DPRD juga agaknya terlalu mengedepankan kemarahan politiknya untuk segera melengserkan Ahok hanya karena kesalahpahaman terkait administrasi politik anggaran, padahal kemungkinan di balik itu karena ada agenda terselubung untuk memperoleh bagian dari proyek dalam APBD.

Para politisi itu harusnya sadar bahwa di tengah gairah Ahok yang menggebu-gebu untuk bangun Jakarta, di mana rakyat berada di belakangnya, kecurigaan terhadap para politisi yang mengganggu sangat tinggi.

Laode Ida, Dosen Jurusan Sosiologi UNJ, Wakil Ketua DPD RI 2004-2014

KORAN SINDO, 13 Maret 2015

Dari Tepi Jalan ke Pemakaman

Tiap kota di dunia, apalagi ibu kota, punya sejarah. Untuk memudahkan, ada empat era sejarah politik Ibu Kota kita: era kolonialisme sampai 1945, era kemerdekaan (1945-1967), era Bang Ali (1967-1977), dan era stagnasi (1977-2012).

Pada era kolonialisme, Batavia mungkin mengalami "zaman normal" yang stabil, damai, dan klasik. Perencanaan tata kota bagus, jumlah penduduk sedikit, dan nyaris tidak bergejolak. Pada era kemerdekaan, Jakarta simbol terpenting saat bangsa sendiri mulai memimpin. Pembangunan Jakarta terasa pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 setelah Bung Karno memilih membangun ketimbang berpolitik melulu. Lewat Demokrasi Terpimpin yang bertangan besi itu Jakarta merekah. Hasilnya kota satelit Kebayoran Baru, Tugu Monas, Masjid Istiqlal, Jalan Sudirman, Kompleks Olahraga Bung Karno, dan lain-lain.

Beruntung gagasan-gagasan seorang Bung Karno, yang insinyur perkotaan itu, dipahami Ali Sadikin, yang militer Angkatan Laut. Bung Karno memilih Bang Ali semata-mata karena kepemimpinan dia, bukan keahlian dia. Pada zaman Bang Ali, gubernur terbaik Jakarta, warga hidup dalam situasi yang relatif rukun damai. Lebih penting lagi, kita yang seumur-umur tinggal di Jakarta pasti sempat merasakan memiliki sense of belonging atas Ibu Kota kita ini. "*Bapak Ibu Kota*" kita adalah MH Thamrin, anak Betawi dari kalangan berada, tak sungkan menyingsingkan lengan baju membantu warga. Dalam sebuah sidang Volksraad, ia bilang, "*Hargailah kebiasaan dan kepentingan semua golongan masyarakat. Jangan sampai terjadi perlakuan tidak adil, jangan sampai timbul sakit hati masyarakat*."

Tiga ikon Jakarta adalah Babe Thamrin, Bung Karno, dan Bang Ali. Dan, nama yang terakhir inilah yang kepemimpinannya sempat menyihir dan membuat kita kagum. Sebenarnya apa yang dilakukan Bang Ali cuma satu, yakni bekerja. Bekerja bagi Bang Ali adalah turun ke bawah tanpa kenal lelah membangun komunikasi dengan warga, terutama dari kalangan bawah.

Ia tak sungkan menempeleng sopir bus atau truk yang ugal-ugalan. Saya waktu masih SD melihat Bang Ali masuk selokan mampat melipat celana mengangkat sampah dengan kedua tangannya.

Ia tak berhenti mengikuti updates Jakarta selama 24 jam/7 hari. Caranya antara lain membaca puluhan berita koran dan majalah yang sudah di-stabilo oleh staf, yang oleh Bang Ali ditargetkan habis dibaca dalam perjalanan naik mobil dari rumah ke kantor. Dengan membangun komunikasi, Bang Ali berhasil membangun karisma. Berkat karisma dia, warga tergerak ikut peduli dengan lingkungan masing-masing.

Sense of belonging kita diikat oleh sebuah semangat yang kerap didengung-dengungkan Bang Ali bahwa Ibu Kota kita adalah sebuah "desa besar" (*the big village*). Desa besar itulah yang menjaga erat kerekatan antara suku, agama, ras, dan antargolongan.

Kita boleh modern, tetapi tetap bangga dengan kedesaan itu yang disimbolisasi oleh berbagai kebijakan pro rakyat miskin. Siapa yang tak kenal proyek perbaikan kampung MHT (MH Thamrin)?

Betul Bang Ali kalau bicara cenderung kasar. Ia juga dikritik karena mengizinkan perjudian dan kehidupan malam yang serba dekaden.

Tetapi, bukankah memimpin Jakarta kadang kala juga harus menggunakan cara-cara kasar? Dan, bukankah sebagian hasil dari perjudian dan kehidupan malam itu disalurkan untuk kesejahteraan warga?

Mungkin kepemimpinan Bang Ali diuntungkan oleh stabilitas politik Orde Baru. Tentu berbeda dengan apa yang dialami Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang memimpin pada era demokrasi liberal yang berisik ini.

Pada era sebelum duet Jokowi-Basuki, warga kurang lagi punya sense of belonging. Semua masa bodoh, semua hidup sendiri-sendiri. Jakarta tidak layak lagi dijuluki "desa besar", ia berubah menjadi metropolitan serba modern. Kita tidak akan punya "Bang Ali" lagi, tetapi ada Basuki.

Seperti Bang Ali, Basuki kurang pandai bicara. Seperti Bang Ali, kita percaya Basuki tidak korupsi. Seperti Bang Ali, Basuki juga didukung warga Jakarta. Oleh sebab itulah Bang Ali atau Basuki tak perlu takut kepada siapa pun.

Basuki telah berhasil menjalin komunikasi dengan warga. Kita yakin sebagian besar warga tergerak mendukung Basuki dalam menghadapi tekanan sejumlah partai yang tergabung di DPRD DKI.

Benar, Basuki adalah manusia biasa yang dominan dan mudah marah. Tetapi, sudah bukan saatnya lagi kita tersihir oleh budaya politik santun dengan topeng-topeng melapisi wajah.

Kita jangan lagi berkebiasaan "memungut pemimpin di tepi jalan dan mengantarkannya ke pemakaman". Seperti Bang Ali, Basuki juga peluang emas bagi kita untuk kembali menyelamatkan Jakarta!

Budiarto Shambazy, Wartawan Senior Kompas

KOMPAS, 14 Maret 2015

Makian yang Santun

Belakangan ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi buah bibir. Perseteruannya dengan para anggota DPRD DKI Jakarta yang terhormat kembali berlanjut. Kali ini pemicunya adalah "anggaran siluman" yang hendak disahkan oleh para wakil rakyat tersebut. Dalam pertemuan antara Ahok dan para anggota DPRD DKI yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu, terjadi perdebatan panas yang memicu terlontarnya kata-kata kasar dari salah satu anggota DPRD terhadap Ahok. Dia dimaki, "**na ***ing!"

Makian memang ungkapan perasaan tidak senang yang dimaksudkan agar pihak yang dimaki merasa terhina dan tersinggung, atau sekadar pelampiasan rasa jengkel dan suasana hati buruk seseorang. Makian "haram jadah" yang kadang kita lontarkan, misalnya, sesungguhnya adalah umpatan kasar yang diadaptasi dari istilah Hindi, harem-zada. Istilah itu bermakna "anak harem" yang sejajar dengan son of a bitch atau bastard dalam bahasa Inggris. Kita tahu harem adalah sarang asmara tempat para penguasa Timur zaman dulu memelihara wanita-wanita jelita pemuas hasrat sang penguasa. Sedangkan "***ing" bagi sebagian orang adalah binatang najis dan kotor.

Namun, adakah makian yang santun?

Dalam esainya yang penuh humor, *The Art of Verbal Abuse* (*Arte de Injurar*), Jorge Luis Borges, sastrawan ternama asal Argentina, menguraikan bagaimana "*seni*" mencela lawan bicara. Pengarang yang tenar dengan cerpen-cerpennya yang meramu fakta dan fiksi itu membahas bagaimana "*menjatuhkan*" lawan bicara dengan kalimat-kalimat yang elegan tapi menohok, yang kelihatannya serupa memuji, tapi justru memukul telak musuh secara indah dan cerdas.

Jika kita bandingkan apa yang dinyatakan oleh Borges dalam esainya itu dengan apa yang dilakukan oleh para anggota DPRD yang terhormat, tentulah jauh panggang dari api. Umpatan kotor yang rasial dan tidak imajinatif tentu tak bisa dibandingkan dengan keterampilan mencela secara cerdas. Lagi pula, saya sungguh tidak yakin para anggota parlemen yang "*sibuk*" itu sempat membaca buku selain buku tabungan. Apatah lagi membaca esai Borges di atas yang saya kutip dari kumpulan tulisan Borges, Selected Non-Fictions (Penguin, 2000).

Selama ini, Ahok yang berwatak lugas dan suka bicara blakblakan, kalau perlu sambil marah-marah, kerap dianggap tidak santun. Namun memang begitulah cara dia berkomunikasi. Menurut saya, di tengah kemunafikan dan akal bulus yang merajalela dalam perpolitikan kita, justru cara berkomunikasi yang lugas, tanpa tedeng aling-aling, hantam kromo, kadang keras tapi jujur dan menohok macam gaya Ahok ini justru lebih efektif. Mengutip George Orwell, "*In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.*"

Yang jadi masalah justru cara berkomunikasi para anggota DPRD yang terhormat itu. Sebelumnya, mereka termasuk yang bersuara nyaring mencela Ahok sebagai pejabat yang cara bicaranya "*tidak santun*". Namun, dari kasus umpatan itu, terbukti justru merekalah yang barbar.

Saya berharap Ahok maju terus tanpa gentar membongkar kebobrokan para begal anggaran bertopeng anggota parlemen tanpa menghiraukan teror verbal mereka. Apa yang terjadi ini bisa digambarkan dengan pelesetan peribahasa: kafilah (anggota Dewan) menggonggong, (yang dimaki) anjing tetap berlalu.

Anton Kurnia, Cerpenis; Esais

KORAN TEMPO, 17 Maret 2015

APBD Jakarta dan Perburuan Rente Partai Politik

Dalam sebulan terakhir ini, suhu politik di ibu kota Jakarta tengah memanas. Apa lagi penyebabnya jika bukan perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Perseteruan mereka dipicu proses penyusunan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Ahok melihat terdapat dana siluman mencapai Rp 12,1 triliun yang disusupkan DPRD dalam APBD tersebut.

Mantan Bupati Belitung itu menuding telah terjadi persekongkolan di DPRD, untuk mengubah anggaran yang telah disepakati bersama dalam rapat paripurna. Ahok pun menolak mengirimkan APBD tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pihak DPRD menilai Ahok menabrak prosedur penyusunan dan pengesahan APBD, karena tidak mengirimkan APBD hasil rapat paripurna kepada Kemendagri. Elite-elite politik di DPRD kemudian menumpahkan kekecewaan politik mereka terhadap Ahok dengan menggulirkan penggunaan hak angket. Rapat mediasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD di kantor Kemendagri beberapa hari lalu pun berakhir buntu tanpa jalan keluar.

Hak angket merupakan hak yang dimiliki anggota dewan, baik DPR maupun DPRD, untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas kepada masyarakat, yang diduga bertentangan dengan undang-undang. Reaksi politik yang ditunjukkan DPRD dengan menggulirkan penggunaan hak angket, mengundang kecurigaan publik. Ini terlihat dari kemunculan gerakan petisi #?GueAhok? dan ?#?SaveAhok?.

Sikap reaktif DPRD tersebut boleh jadi karena memang benar ada dana siluman di APBD hasil "tangan-tangan kreatif" di DPRD, sebagaimana diungkapkan Ahok. Bukan tidak mungkin, dana siluman muncul di APBD sebagai buah kolusi elite-elite politik di DPRD dengan dinas di Provinsi DKI Jakarta.

Rente

Bila dilihat dari perspektif lebih luas, perseteruan antara Ahok dan DPRD terkait keberadaan dana siluman di APBD sangat terkait erat dengan perburuan rente partai politik. Tidak dapat dimungkiri, kebutuhan partai politik terhadap dana besar, agar mesin politik dapat berfungsi secara maksimal, telah mendorong elite-elite politik berlaku koruptif.

Partai politik membutuhkan sumber pendanaan besar, agar mesin politik dapat berfungsi maksimal dalam mendulang suara pemilih pada pemilihan umum. Dengan uang, partai politik atau kandidat dapat membayar jasa konsultan, memasang iklan di media massa, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk memenangi pemilihan.

Secara umum, ada dua modus utama perburuan rente partai politik. *Pertama*, melalui lembaga legislatif (DPR/DPRD). Dalam lingkup legislative,

perburuan rente dilakukan dengan menguasai komisi-komisi strategis dan badan anggaran, menggerogoti anggaran negara/daerah, transaksi dalam pemilihan pejabat publik, dan transaksi dalam proses legislasi.

Kedua, melalui lembaga eksekutif. Dalam lingkup legislatif, perburuan rente dilakukan dengan menempatkan kader-kader mereka di kementerian, badan usaha milik negara, dan institusi pemerintahan yang memiliki akses dana besar. Perburuan rente juga dilakukan dengan menyewakan partai politik, sebagai kendaraan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah kepada kandidat tertentu dengan harga fantastis. Kontrol publik yang sangat terbatas, serta ketiadaan transparansi dan akuntabilitas dari partai politik, semakin menguatkan persekongkolan para elite politik.

Robert Klitgaard pernah memberikan rumus mengenai korupsi, berdasarkan penelitian di beberapa negara Asia. Rumus itu adalah C=D+M-A (C: corruption, D: discretion, M: monopoly, dan A: accountability). Rumus mengenai akar semang korupsi ini relevan untuk menggambarkan berbagai bentuk korupsi, termasuk perburuan rente dilakukan oleh elite politik.

Rumus Klitgaard menggambarkan korupsi terbentuk akibat kuatnya kewenangan dan monopoli atas kebijakan. Pada saat bersamaan, akuntabilitas sangat lemah. (Klitgaard, 2002: 29)

Maraknya korupsi, yang melibatkan elite-elite politik dan pejabat publik, merupakan salah satu ironi besar demokrasi kita hari ini. Mereka mendapat legitimasi kekuasaan dari rakyat. Namun setelah berkuasa, mereka justru mengisap sumber-sumber keuangan negara yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Merujuk elaborasi di atas, dapat disimpulkan perilaku korup para elite partai politik saat ini didorong tiga hal: (1) Praktik demokrasi berbiaya tinggi dalam sistem politik Indonesia; (2) Kekuasaan terlampau besar partai politik dalam menentukan kebijakan dan anggaran, tanpa disertai pengawasan dan kesadaran pertanggungjawaban publik, serta (3) Ketidaktegasan sanksi politik dan pidana bagi partai politik melakukan pengumpulan dana secara ilegal.

Ke depan, diperlukan langkah-langkah reformasi keuangan partai politik. Tiga langkah reformasi keuangan partai politik mencakup reformasi sumber keuangan partai politik, reformasi pengelolaan keuangan partai politik, dan reformasi pengeluaran keuangan partai politik.

Bawono Kumoro, Peneliti Politik di The Habibie Center

SINAR HARAPAN, 18 Maret 2015

Membongkar Ilusi Di Balik Popularitas Ahok

BAGI banyak kalangan, Ahok seakan tengah menjadi idola dalam kancah politik kita. Betapa tidak, gayanya yang terus terang, frontal, dan menolak segala *ewuh pakewuh* menjijikkan, yang menjadi topeng bagi segala perilaku tipu daya politik, memberikan kesan bahwa Ahok adalah figur yang otentik dan menyegarkan. Belum lagi manuver terkini dia yang membangun demarkasi dengan DPRD, yang ditenggarai Ahok telah melakukan manipulasi penganggaran keuangan daerah. Manuver Ahok ini memunculkan dukungan terhadap dirinya dari masyarakat yang sudah terlalu muak dengan perilaku korupsi elit politik sekarang.

Tentu mudah bagi kita, dan bahkan juga saya, untuk bersimpati dengan apa yang dilakukan Ahok. Ketidakmampuan kita semua untuk menyikapi secara efektif politik yang korup, membuat dukungan terhadap Ahok seakan menjadi perlu. Kepemimpinan politik yang 'lain daripada yang lain' seakan menjadi jawaban segera kita dalam menghadapi kondisi politik saat ini. Namun, kita perlu belajar lebih jauh dari pengalaman kita sendiri. Masih segar dalam ingatan bagaimana banyak dari kita mendukung Jokowi. Narasi umum dukungan tersebut sedikit banyak adalah sama: bahwa Jokowi berbeda dari elit-elit yang ada pada umumnya. Apa yang terjadi setelah ia didapuk di kursi kepemimpinan? Kekecewaan demi kekecewaaan mendera dan ketidakberdayaan kembali menghantui kita. Antusiasme politik yang sempat membuncah harus kembali direpresi atas nama riil politik.

Sebagaimana setiap pembelajaran, tidak semua kesalahan bersifat buruk dalam dirinya sendiri. Ada hal-hal yang dapat direfleksikan sekaligus dievaluasi. Spontanitas dukungan terhadap agenda anti korupsi di balik perseteruan Ahok vs DPRD, setidaknya menunjukkan masih ada semangat untuk mendorong perubahan di antara kita. Yang dibutuhkan adalah melakukan pembacaan secara serius tanpa harus terjatuh dalam sentimen yang memunculkan ilusi dukung-mendukung figur seperti Ahok.

Penelusuran kita perihal ilusi yang muncul sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari pertarungan politik, kuasa serta kepentingan di tingkatan Jakarta. Sebagai seseorang yang secara sosial berasal dari kelas kapitalis lokal, Ahok memiliki kepentingan utama untuk menciptakan tata-kelola pemerintahan daerah yang mampu mendukung mobilitas kapital di Jakarta. Akan tetapi upaya ini harus bertemu dengan realitas politik yang masih didominasi oleh kekuatan lokal yang berkepentingan untuk merampok sumber daya publik di Jakarta. Benturan inilah yang kemudian menjadi dasar dari konflik kepentingan antara Ahok dengan kekuatan politik yang lama bercokol di Jakarta. Disinilah kemudian terjadi konflik Ahok vs DPRD yang mengilusi, karena gambaran representasi dalam konflik kepentingan yang seakan-akan jelas: Ahok yang pro-perubahan melawan DPRD yang korup.

Akan tetapi kita perlu lebih jeli dalam melihat konflik yang memunculkan ilusi ini. Konflik yang muncul bukan melulu melawan DPRD yang korup,

akan tetapi lebih kepada respon Ahok akan kegagalannya dalam mendisiplinkan birokrasi pemerintahannya sendiri. Kasus korupsi UPS misalnya, yang menjadi penyebab terjadinya konflik terbuka antara Ahok vs DPRD, justru pihak birokrat pemerintahannya Ahok yang menjadi koruptor utama UPS tersebut. Ditangkapnya Alex Usman, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, adalah bukti bahwa birokrasi yang sebenarnya menjadi hambatan bagi operasi kepentingan Ahok (Rakyat Merdeka Online, 2015). Bahkan birokrasi yang korup ini memiliki kapasitas untuk memengaruhi proses politik dalam DPRD. Dalam kasus Alex Usman misalnya, ia memiliki putri yang bernama Aditya Sartika yang merupakan anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI periode 2014-2019.

Hambatan dari birokrasi inilah yang menyebabkan mengapa Ahok dapat secara vulgar memunculkan ketidaksukaannya pada praktek birokrasi yang lama. Ia tidak segan-segan untuk mengekspresikan secara kasar, bahkan mengancam untuk memecat sambil berteriak-teriak, birokrat-birokrat yang dianggapnya tidak becus dalam tugasnya. Selain itu, Ahok banyak meluncurkan inisiatif *e-goverrnance* di Jakarta, yang pada dasarnya adalah upaya dirinya untuk memotong otoritas birokrasi yang terlalu besar cengkeramannya dalam administrasi pemerintahan. Walau begitu, semua upaya tersebut masih belum cukup untuk menciptakan birokrasi yang dibutuhkan Ahok.

Kefrustasian Ahok dalam mendisiplinkan birokrasinya sendiri menciptakan kondisi bagi diperlukannya dukungan publik luas terhadap tindakannya. Melalui jargon serta retorika tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, Ahok mengajak publik Jakarta agar ikut mengawasi proses birokrasi yang ada. Proses ini yang kemudian menciptakan dan mendongkrak popularitas Ahok. Ia tidak hanya dianggap sebagai figur jujur yang hendak menciptakan tata-kelola pemerintahan, tetapi juga digadang-gadang sebagai seseorang yang berani dalam melawan kekuasaan korup di Jakarta. Popularitas ini semakin meluas ketika media secara luas memberitakan sepak terjang Ahok dalam memperlakukan birokrasinya sendiri.

Lalu dimana letak ilusinya? Ruang dukungan yang tersedia adalah ruang yang sama sekali terbatas. Kuasa akan transparansi dan akuntabilitas yang diberikan kepada publik didefinisikan secara terbatas sebagai pengawas tanpa punya kuasa atas apa yang diawasi. Dalam hal ini, publik mendukung layaknya penonton sepakbola ketika mendukung tim kesayangannya bermain. Disinilah kemudian antuasiasme politik publik yang muncul di balik gagasan akuntabilitas serta transparansi tersebut akan mudah diarahkan menjadi dukungan politik yang sifatnya sempit. Dengan kata lain, akan mudah bagi publik untuk dicucur hidungnya agar mengikuti kepentingan elit tertentu.

Untuk tetap bertahan dalam ilusi ini adalah sesuatu yang berbahaya bagi kita sendiri. Kita sebagai publik tidak berarti memiliki kepentingan yang sama

dengan Ahok. Memberikan dukungan serta mengamini secara membabi-buta agenda-agenda Ahok tanpa diiringi tuntutan kebijakan tertentu terhadap pemerintahan Jakarta sekarang, akan memudahkan antusiasme publik yang muncul untuk dikendalikan di bawah kepentingan elit tertentu. Kondisi yang memungkinkan untuk munculnya manipulasi kepentingan publik oleh elit politik kota.

Lantas bagaimana kita dapat mempertahankan antusiasme yang ada tanpa harus terjebak dalam kendali kekuatan elit? Jawaban dari pertanyaan ini bahwa antusiasme yang membuncah ini perlu untuk dikaitkan dengan penguatan kapasitas politik dalam rangka mengendalikan secara programatik kebijakan yang sesuai dengan kepentingan publik Jakarta secara luas. Tuntutan programatik inilah yang menjadi acuan dari semua sikap politik publik dalam kaitannya dengan kontestasi elit. Disinilah menjadi penting untuk mulai membicarakan proses penganggaran yang partisipatif; warga bukan sekedar mengawasi layaknya penonton tapi juga memiliki kuasa untuk membangun agendanya sendiri dalam anggaran pemerintahan yang tersedia. Dengan kata lain, anggaran untuk memenuhi kepentingan sosial masyarakatnya.

Dengan pengendalian atas anggaran, warga dapat memastikan secara nyata bahwa pemerintahan serta aparat kekuasaan disekitarnya dapat transparan sekaligus akuntabel terhadap rakyatnya. Hal ini penting mengingat secara kebijakan pembangunan perkotaan sendiri, Ahok tidak kalah bermasalahnya. Ia mengatakan bahwa pengadaan barang haruslah transparan, namun ia tidak pernah mengatakan hal yang sama perihal pengadaan lahan untuk ruang hidup di Jakarta. Lahan di Jakarta masihlah menjadi penguasaan orang-orang berduit. Tidak heran jika masih banyak orang-orang miskin Jakarta yang memiliki hak hidup di kota tetapi harus mengalami kebijakan penggusuran. Jika memang pemerintahan yang hendak berlaku di Jakarta adalah pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya (akuntabel), bukankah kebijakan seperti penggusuran atas nama pembangunan terhadap rakyat miskin, yang juga merupakan bagian dari masyarakat Jakarta, dapat dihindari?

Mungkin terdapat argumen moral di sini. Namun harus dipahami bahwa apa yang terjadi serta ilusi yang mengiringinya adalah manifestasi dari pertarungan ekonomi-politik kekuatan yang ada. Selama publik belum membangun agenda politiknya sendiri, yang otonom dari kepentingan Ahok maupun kepentingan kekuatan politik lama yang bercokol di Jakarta, maka dapat dipastikan ia akan selalu mudah terseret-seret dalam atraksi sirkus dukung-mendukung yang sudah terjadi selama ini. Disinilah pengorganisiran politik atas kepentingan publik menjadi tak terhindarkan.

Muhammad Ridha, Mahasiswa Pasca Sarjana di Murdoch University, Australia; Anggota Partai Rakyat Pekerja (PRP)

INDOPROGRESS, 20 Maret 2015

Cahaya Basuki

Di ujung lorong panjang dan gelap yang bernama Ibu Kota, tampak secercah cahaya yang menjanjikan. Cahaya itu boleh saja dinamai cahaya basuki, yakni cahaya kesejahteraan, keselamatan, ataupun kebahagiaan.

Ada pepatah Jawa terkenal yang bunyinya "*jer basuki mawa beya*". Artinya, untuk menggapai kebahagiaan harus bersedia berkorban. Sayang sekali, belakangan ini korban untuk membangun Jakarta dengan benar bukan korban biasa seperti tenaga, pikiran, biaya, dan sejenisnya, melainkan korban dalam bentuk lain yang amat tak diharapkan warga. Korban pertama tampaknya adalah proses demokrasi yang rusak sebagai akibat dari penggunaan hak-hak Dewan bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan bagi menjatuhkan lawan politik. Korban kedua, sebagai akibat lanjutan, adalah terkatung-katungnya program pembangunan DKI Jakarta karena tersendatnya persetujuan APBD.

Yang paling memprihatinkan adalah korban berikutnya berupa hilangnya akal sehat, moralitas, dan etika sebagian penyelenggara negara yang dipilih sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan nasib rakyat. Dalam rangka menyerang lawan politiknya, kata- kata kasar yang sempat muncrat dari mulut orang-orang terhormat, sebagian bernuansa SARA (suku, agama, ras, antargolongan) dan sebagian lain sangat rendah dan tak pantas terlontarkan di ruang publik.

Meski demikian, dalam proses perang anggaran itu, cahaya hikmah yang mewujud adalah kemungkinan terbongkarnya kasus penggelapan besar-besaran uang rakyat dalam bentuk apa yang disebut sebagai anggaran siluman. Anggaran beratus miliar yang diduga diselundupkan orang- orang terhormat. Kalau semua ini nanti terbukti, ratusan miliar-bahkan mungkin triliunan-rupiah uang rakyat akan terselamatkan. Kesejahteraan rakyat akan terbantukan dan rongrongan mereka yang berniat busuk akan terhenti, mudah-mudahan untuk seterusnya.

Bukan gubernur biasa

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal dengan nama Ahok, memang bukan gubernur biasa. Kata-katanya keras dan tak selalu terdengar nyaman di telinga pendengarnya. Orangnya langsung tanpa tedeng aling-aling, keras kepala dalam kejujurannya, berani mengambil risiko dan mengorbankan dirinya demi keyakinannya, menjauhi kompromi yang bertujuan hanya menyelamatkan jabatannya.

Setelah Gubernur Ali Sadikin yang berjasa sebagai pionir pembangunan Ibu Kota, barangkali baru sekarang kita mendapatkan kepala daerah Jakarta yang tekadnya kuat, nyalinya besar, dan kerjanya transparan. Barangkali hanya ada satu kepala daerah lain saat ini yang mendekati karakter Basuki, yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Dalam sistem demokrasi hibrida kita saat ini, menarik melihat gerak dan kinerja seorang kepala daerah yang independen dan tidak berpartai. Apakah dia akan sintas (survive) dan

berprestasi, atau sekadar sintas sampai akhir masa jabatan, atau akan jatuh sebelum waktunya?

Mengurus Jakarta tanpa diganggu sudah cukup pelik, apalagi kalau diganggu terus oleh politisi yang punya wewenang besar atau kelompok kepentingan yang intimidatif. Bang Ali almarhum pernah bilang, mengurus, maaf, beraknya orang Jakarta saja sudah sangat memusingkan kepala. Belum lagi mengurus keperluan sekolah mereka, kesehatan, transportasi umum, sampah, banjir, keamanan, dan sebagainya, di salah satu kota berpenduduk terbesar di dunia ini.

Problema Jakarta juga disebabkan oleh beberapa gubernur DKI setelah Ali Sadikin yang boleh dikata gagal menunjukkan prestasi meyakinkan selama bertahun-tahun. Permasalahan Jakarta akhirnya jadi menumpuk, menggumpal, dan karena itu tidak mudah diurai. Oleh sebab itu, warga Jakarta seharusnya bersyukur mempunyai seorang gubernur yang mau bekerja dan berani menabrak tembok besar penghalang dengan niat mendahulukan kepentingan warga melawan kepentingan kelompok kecil tetapi kuat, yang tujuannya hanya untuk menguntungkan diri sendiri.

Modal lain Basuki adalah kepercayaan warga Jakarta kepadanya. Hasil penelitian sebuah lembaga survei baru-baru ini menunjukkan warga Jakarta lebih percaya kepada Basuki daripada kepada wakil-wakilnya yang duduk di DPRD. Dengan modal kepercayaan itu, sebenarnya Basuki berpeluang untuk menggerakkan warga untuk mendukung program-program Pemerintah DKI.

Basuki memang belum tampak memanfaatkan dukungan dan kepercayaan ini untuk menggerakkan masyarakat Jakarta, umpamanya bagi menjaga kebersihan lingkungan atau menegakkan disiplin di jalan-jalan. Barangkali fokusnya pada prioritas penting lain yang belum tertangani membuatnya belum sempat memikirkan hal ini.

Jangan biarkan meredup

Basuki bukannya bebas dari kekurangan. Antusiasmenya yang berlebihan terkadang membuatnya meledak-ledak. Kalau tak terkendali, bukan saja bisa mengganggu kesehatannya, melainkan juga sudah sempat memberikan citra negatif di sebagian kalangan sebagai pemimpin yang emosional dan arogan.

Namun, Basuki sebenarnya masih menyimpan keuntungan lain, yakni kedekatannya dengan mantan atasannya yang sekarang telah menjadi orang nomor satu di negeri ini. Seharusnya hal ini sangat bermanfaat karena berbagai masalah di Ibu Kota juga disebabkan gagalnya koordinasi dan kerja sama dengan daerah sekitar Jakarta di Jabodetabek. Masalah Jakarta tidak akan tuntas terselesaikan jika tak didukung kemauan politik untuk kerja sama antarkawasan itu.

Di sini presiden bisa berperan banyak untuk membantu Gubernur DKI dengan menggunakan wewenangnya. Apakah dan kapan uluran tangan nyata presiden akan terjadi dan efektif, kita hanya bisa menunggu di waktu-

waktu mendatang. Sementara ini, presiden baru kita yang popularitasnya merosot hanya belum sampai lima bulan menjabat tampaknya sudah terlalu penuh piringnya dengan masalah buatan sendiri sehingga diragukan bahwa dia akan dapat membagi energinya untuk sungguh-sungguh memikirkan masalah Jakarta dalam waktu dekat ini.

Basuki yang baru menjabat empat bulan sebagai gubernur dan hanya punya sisa waktu dua setengah tahun sampai Oktober 2017 memang tak punya banyak waktu untuk membuktikan apakah dia pantas diberi mandat untuk periode berikutnya. Bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang ini akan merupakan ujian berat baginya dan bagi semua warga Jakarta. Mengapa warga Jakarta juga akan menghadapi ujian? Sebab, kalau Basuki gagal karena terganggu atau tak terganggu akan menghadapkan warga Jakarta dengan tantangan pelik guna menghindari terpilihnya lagi seorang kepala daerah baru tipe lama dengan karakter tak jelas, integritas yang meragukan, kompromistis, tipe politisi tulen, atau petualang hedonis.

Kalau itu yang terjadi, kita semua ikut bertanggung jawab. Baik buruknya seorang pemimpin juga ditentukan oleh sikap, aksi, dan karakter yang dipimpin. Tidak mendukung pemimpin yang baik adalah sebuah kesalahan. Lebih fatal lagi kalau yang dipimpin membiarkan pemimpin buruk berjalan tanpa kendali atau membiarkan sekelompok pengganggu membuat pemimpin yang baik menjadi tidak efektif.

Basuki Tjahaja Purnama, kita semua mempertaruhkan hari depan Jakarta di tanganmu. Jangan kau biarkan cahaya basuki menjadi redup.

Abdillah Toha, Pemerhati Politik

KOMPAS, 24 Maret 2015

Kejutan Ahok

Tekad Ahok untuk menghilangkan dana siluman dari RAPBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 telah mendapatkan perlawanan yang sengit dari DPRD Provinsi DKI Jakarta, berupa penggunaan Hak Angket dan tidak mengesahkan Raperda tentang APBD tahun 2015.

Keduanya memang merupakan hak dan fungsi dari DPRD. Jadi dari sisi mekanisme ketatanegaraan di daerah, tindakan DPRD ini adalah hal yang legal. Yang luar biasa, adalah tekad Ahok untuk menghilangkan atau mengurangi korupsi dengan mencegahnya ditingkat perencanaan dan penganggaran.

Kejutan Ahok ini akan membuahkan prestasi tersendiri, setidaknya Jakarta akan tercatat sebagai pemerintah daerah yang pertama kali menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum pelaksanaan APBD. Dari perkembangan yang terjadi, nampaknya penggunaan Pergub dalam APBD Provinsi Jakarta tahun 2015 tidak akan dapat dihindari, mengingat berbagai mediasi, bahkan sampai Wapres JK menengahi pun tidak didapat kemufakatan, atau kompromi sekalipun. Kedua belah pihak, pimpinan DPRD maupun Gubernur bersikukuh pada pendiriannya.

Peraturan Kepala Daerah, dalam hal ini Pergub sebagai legitimasi APBD sebenarnya sudah diatur secara tegas di dalam berbagai peraturan perundangan, antara lain pada Pasal 46, PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diperkuat lagi dengan Pasal 313, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai ketentuan perundangan ini dirancang sebagai 'katup pengaman', manakala terjadi kebuntuan seperti Jakarta saat ini, karena pada hakekatnya proses penetapan anggaran merupakan proses politik.

Konsekuensi lain dari keterlambatan pengesahan anggaran ini sebenarnya tidak hanya terbitnya Pergub, melainkan juga tidak dibayarkannya hak keuangan anggota DPRD selama 6 bulan, sebagaimana diatur di dalam pasal 312, ayat 2, UU No 23 Tahun 2014 tersebut. Tentu pengenaan sanksi ini harus didahului dengan proses penyidikan untuk menentukan siapa yang membuat keterlambatan pengesahan. Apabila keterlambatan akibat dari polah eksekutif maka hak keuangan masih bisa dibayarkan, namun apabila keterlambatan akibat dari keengganan atau keterlambatan DPRD membahas RAPBD maka hak keuangan anggota dewan tidak dibayarkan.

Akibat Fiskal dan Pembangunan

Dengan tidak disahkannya RAPBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015, maka anggaran penerimaan dan pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2015 akan menggunakan pagu setingi-tingginya sama dengan pagu APBD tahun 2014. Dari data yang didapat, pagu APBD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 72,9 triliun, sedangkan RAPBD tahun 2015 direncanakan sebesar Rp 73,08 triliun. Dari sisi jumlah terdapat perbedaan sekitar Rp 180 miliar. Selisih pagu ini tidaklah besar, hanya 0,2%,

namun dari sisi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan hal ini akan berdampak sangat besar.

Sangatlah lumrah apabila program pembangunan atau belanja modal pada tahun 2015 tidak sama dengan tahun 2014. Misalnya saja, pada tahun 2014 Program Tata Air melaksanakan normalisasi Kali A, sementara pada tahun 2015 kali A tersebut sudah tidak memerlukan dana lagi. Lantas dana tersebut akan dikemanakan?

Ketentuan revisi anggaran terhadap APBD dengan legitimasi Pergub belum ada. Kondisi seperti ini akan merepotkan berbagai ketentuan administratif, baik pelaksanaan program maupun pertanggung jawaban dan pada gilirannya akuntabilitas program. Selain itu juga berbagai rencana yang sudah tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan terhambat pencapaiannya.

Dengan demikian, kejutan Ahok ini telah menyadarkan kita semua, setidaknya ada celah peraturan perundangan yang belum lengkap manakala terbit Peraturan Kepala Daerah sebagai legitimasi APBD. Apabila Pergub tentang APBD Provinsi DKI Jakarta jadi diterbitkan, maka Kementerian Dalam Negeri beserta unsur pusat lainnya harus segera kerja cepat, cerdas dan tangkas menyiapkan berbagai peraturan untuk memfasilitasi kejutan Ahok ini. Mulai dari tata cara pengesahan, tata cara revisi baik rencana pembangunan maupun anggaran sampai dengan tata cara pertanggung jawaban dan akuntabilitas.

Marilah kita bekerja untuk memperbaiki negeri ini.

Deddy S Bratakusumah, Praktisi Pemerintahan

DETIKNEWS, 25 Maret 2015

Etika dan Etiket dalam Argumentasi

Di KompasTV, Ahok yang temperamental itu, saking emosinya, mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, jelasnya “ta*k” dan “bangsa*”. Presenter sudah memperingatkan bahwa ini adalah acara live, tetapi Ahok sudah mata gelap dan lepas kendali (namanya juga manusia, bisa salah) sehingga akhirnya KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) mengeluarkan “kartu kuning” (pinjam istilah sepak bola) buat KompasTV. Wajar banget, Ahok pun sudah menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Tapi, jangan lupa, beberapa waktu sebelumnya, dalam sidang pengesahan APBD DKI yang dead lock itu, dalam keadaan sama-sama emosi, seorang anggota DPRD juga mengeluarkan kata-kata “anji**” dan “Ci*a” yang ditunjukkan kepada Ahok. Tidak dibreidel oleh KPI karena sempat ditutup dengan bunyi “tit..tit..” sebelum ditayangkan (siaran tunda). Katakata rasis adalah yang nomor satu tidak sopannya. Jauh di atas kata-kata kebun binatang. Tapi di lingkungan kebun binatang pun ada kelas-kelasnya.

“Anji**” lebih tinggi kelasnya dari pada “bangsa*” yang arti sesungguhnya adalah tumbila atau kutu busuk yang sering sembunyi di kursi-kursi rotan bioskop Megaria dan Menteng di zaman saya masih pacaran, yang membikin paha para penonton gatal-gatal dan merahmerah (kalau mau nonton harus berbekal kertas koran untuk melapisi kursi rotan).

Di era Cinema XXI sekarang ini, dunia perbangsatan sudah lama punah karena kursi-kursi sudah terbuat dari kulit dan udara dalam ruangan sejuk, sedangkan kursi dibersihkan setiap hari. Tapi kata “anji**” pun di telinga sebagian orang tergolong biasa-biasa saja. Jenderal Hugeng (alm) yang dikenal sebagai jenderal polisi yang paling jujur dan paling santun—dan seorang vokalis pula—mengakui dalam buku memoarnya bahwa sebagai orang Pekalongan, ia menyapa teman sekampungnya kalau sudah lama tidak bertemu dengan kata-kata “asu” yang artinya adalah “anji**” juga.

Di Surabaya, antar-arek-arek biasa mereka saling menyapa dengan ucapan yang paling akrab buat mereka, yaitu “jancu*”, yang artinya adalah hubungan intim, jauh lebih kasar daripada menyebutkan isi toilet doang, Jadi sumpah-serapah itu, walaupun bisa bikin telinga orang merah-kuning-hijau seperti lampu lalu lintas, tidak berlaku umum. Hanya berlaku di kalangan tertentu. Di tempat lain, suatu sumpah serapah bisa dianggap biasa saja. Jadi tidak universal. Sama tidak universalnya dengan cara makan. Di istana Kerajaan Tiongkok, jamuan makan disiapkan dengan mangkuk dan sumpit.

Para bangsawan, dengan baju-baju kehormatannya, memunguti nasi, bakmi, atau mata ikan dari sup kepala ikan dengan sumpitnya, dan menyeruput kuah supnya langsung dari mangkuk seperti orang minum kopi sambil berbunyi keras-keras ... sruuut...sruut...!! Nah, kalau ada orang Prancis di situ, langsung isi perutnya mau keluar semua. Sebaliknya orang Prancis biasa makan dengan seperangkat alat makan yang berlapis- lapis dan harus digunakan berurutan sesuai dengan aturan, yang bisa makan waktu 3 jam sekali makan. Kalau ada orang Tionghoa di situ, bisa jadi si Tionghoa sudah ketiduran sebelum jamuan makan selesai. Sopan santun yang tidak universal ini dalam ilmu filsafat

disebut etiket. Setiap tempat, waktu, kelompok, suku, budaya bisa punya etiket sendiri.

Tapi yang jauh lebih penting adalah etika, yaitu nilai-nilai yang lebih dalam, lebih luhur, dan berlaku universal, seperti keharusan menghormati orang tua, larangan untuk membunuh orang tak berdosa, menjunjung tinggi keadilan, dsb, termasuk tentu saja antikorupsi. Nilai universal antikorupsi inilah sebenarnya yang sedang dibela Ahok dalam perdebatan tentang APBD DKI.

Dalam sebuah wawancara dengan wartawan TV yang mencegatnya setelah dia keluar dari suatu pertemuan, Ahok pernah bercerita tentang anggota DPRD yang punya Lamborgini. Buat Ahok, tidak masuk akal seorang anggota, walaupun dia wakil ketua DPRD Jakarta, untuk bisa mempunyai mobil Lamborgini. Argumentasi Ahok kira-kira seperti ini: (1) mobil Lamborgini adalah mobil yang sangat mahal, (2) gaji seorang anggota DPRD DKI tidak cukup banyak buat membeli Lamborgini; jadi (3) seorang anggota DPRD DKI tidak akan mungkin punya Lamborgini.

Nah, ketika ternyata ada anggota DPRD DKI yang mempunyai Lamborgini, Ahok menyimpulkan, pasti ada yang salah di sini. Maka mau tidak mau logika selanjutnya langsung nyambungke korupsi. Logika yang saling sambung-menyambung inilah yang disebut argumentasi. Argumentasi adalah gabungan beberapa “premis”, yaitu pernyataan-pernyataan yang sudah teruji kebenarannya, yang saling mendukung dan menghasilkan kesimpulan yang sama benarnya, yang akan menjadi premis baru.

Ilmu pengetahuan pada dasarnya dibangun atas dasar sambung-menyambung rangkaian premis itu. Karena itulah dalil-dalil ilmu pengetahuan sulit digugurkan. Karena itulah argumentasi Ahok, khususnya tentang dana Rp12 T yang dicoba disisipkan di APBD, sulit sekali untuk bisa dipatahkan. Semuanya tersusun dalam argumentasi (dalam bahasa filsafat: silogisme) yang memenuhi hukum-hukum logika yang memang (menurut pengamatan saya pribadi) merupakan salah satu kekuatan Ahok.

Di sisi lain, kekuatan logika ini memang rentan untuk digugurkan, antara lain melalui pendekatan di luar logika, termasuk pendekatan kekuasaan, pengerahan massa, perkoncoan, gratifikasi, pelintiran pernyataan, doktrin, kepercayaan, gratifikasi, takhayul, dan masih banyak lagi. Tapi yang paling sulit adalah bahwa logika itu bisa dikecoh dengan logika juga. Misalnya, perhatikan baik-baik argumentasi atau silogisme ini: (1) anjing bernapas, (2) Ahok bernapas, jadi (3) Ahok adalah anjing. Waduh ... bagaimana ini? Itulah yang dalam ilmu logika disebut sesat pikir. Pikiran kita tersesat karena melanggar salah satu hukum silogisme. Untuk mengujinya gampang saja. Ganti saja kata “Ahok” dengan “Sarlito”. Kalau kesimpulan Anda adalah Sarlito itu anjing, Anda sedang membaca tulisan seekor anjing.

Sarlito Wirawan Sarwono, Guru Besar Fakultas Psikologi UI

KORAN SINDO, 29 Maret 2015

Metakomunikasi Eksekutif-Legislatif

KONFLIK yang terjadi antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta sudah melenceng bukan pada inti pesan komunikasi, melainkan lebih pada cara mereka berkomunikasi. Jargon we cannot not communicate (kita tak bisa tidak berkomunikasi) telah menyeret kedua pihak pada suasana saling membenci dan saling menghujat dengan kata-kata kasar. Kasus itu memunculkan kajian baru: pentingnya cara berkomunikasi di samping isi pesan komunikasi.

Banyak di antara kita yang mengatakan telah berkomunikasi. Meski demikian, tak sedikit dari kita yang sebenarnya tidak berkomunikasi, dalam arti inti pesan yang disampaikan dipahami penerima pesan. Seseorang bisa jadi berkomunikasi lebih menitikberatkan pada aspek hubungan dan bukan pada substansi isinya. Dalam hal ini kita sebenarnya tidak melakukan komunikasi. Perilaku layaknya berkomunikasi terjadi lebih karena faktor hubungan, bukan pada substansi isinya.

Metakomunikasi

Komunikasi yang berkembang antara Ahok dan DPRD DKI menekankan kepada kita betapa penting metakomunikasi. Metakomunikasi diartikan sebagai berkomunikasi tentang komunikasi (Tubbs dan Moss, 2001). Dengan kata lain, metakomunikasi tidak hanya berfokus pada isi pesan, tetapi juga pada cara berkomunikasinya. Setiap pernyataan yang ditujukan pada cara orang berkomunikasi adalah contoh metakomunikasi. Sekadar contoh misalnya, perseteruan Ahok dengan DPRD DKI tidak berfokus pada substansi isi apa yang dipermasalahkan Ahok dan apa yang dipermasalahkan DPRD. Keduanya justru banyak terlibat dalam perdebatan cara berkomunikasi masing-masing. Bahkan, masyarakat umum juga terjebak hanya mau membicarakan cara berkomunikasi, bukan pada substansi isi.

Pada awalnya Ahok mempermasalahkan dana siluman Rp 12 triliun terkait APBD DKI 2015. Namun, persoalan Ahok dengan DPRD berkembang ke arah lain. Keduanya sama-sama ngotot bahwa perilakunya paling benar. Yang patut disayangkan adalah keluarnya kata-kata kasar berkaitan dengan ”*toilet*” dan ”*kebun binatang*”. Ini jelas di luar substansi isi pesan.

Ahok bisa jadi benar, namun mengeluarkan kata-kata kasar tentu tidak pada tempatnya. Tak terkecuali DPRD, kenapa harus sewot dan dianggap menurunkan wibawa anggota dewan di mata eksekutif daerah saat disorot masalah? Di sinilah pesan komunikasi sudah mengalami pemutarbalikan fakta. Tepatnya telah mengalami metakomunikasi.

Problem

Jika ada seseorang mengatakan ”*orang itu penjilat benar sama atasan*”, kemudian dijawab orang lain ”*omongmu yang lebih sopan dong, itu sangat kasar dan saya tidak suka*”, orang yang menanggapi pesan di luar inti yang

dikatakan tersebut adalah (cara) komunikasi itu sendiri. Ini adalah problem metakomunikasi.

Pesan akan menjadi sulit untuk sampai kepada orang lain jika ada metakomunikasi seperti itu. Pertama, adanya prasangka. Seseorang, jika sudah mempunyai syak wasangka, akan membangun ruangan dalam pikirannya bahwa orang lain itu tidak benar. Pekerjaannya apa lagi kalau bukan curiga terhadap apa yang dilakukan orang lain. Seseorang bisa saja selalu menyerang orang lain ketika melihat celah kecil untuk melontarkan ketidaksukaannya. Syak wasangka juga berpotensi penyulut kebencian. Bahkan, kata-kata yang diucapkan ibarat kabar-kabar kebencian yang sengaja disulut. Lihat saja bagaimana masyarakat kita sekarang masih terbawa arus perseteruan perbedaan aspirasi calon dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014. Pilpresnya memang sudah selesai, tetapi para pendukungnya tetap terpecah.

Anehnya, komunikasi yang dilakukan hanya soal cara berkomunikasi yang disebut dengan metakomunikasi. Bukan pada substansi isi, melainkan lebih pada cara berkomunikasinya. Bangsa ini tidak akan pernah bisa bangkit jika syak wasangka terus dipelihara dan itu bisa disebabkan kesalahan dalam metakomunikasi.

Kedua, jika hubungan kedua pihak sudah dilatarbelakangi konflik yang disebabkan pola hubungan dan bukan isi pesan, metakomunikasi menguat. Sillars dan Weisburg (1987) pernah mengungkapkan, jika dua orang berkomunikasi namun tanpa punya kemampuan memahami isi pesan (baca: gagalnya metakomunikasi), apalagi ada konflik, tujuan komunikasi akan sulit tercapai. Bisa jadi kedua pihak sebenarnya ingin menyelesaikan konflik yang terjadi. Tetapi, tidak ada kesepakatan mengenai akar konflik yang sebenarnya. Di sinilah konflik yang melatarbelakangi seseorang dalam berkomunikasi akan menggagalkan tujuan komunikasi yang sebenarnya, meskipun caranya benar.

Bisa saja Ahok benar bahwa ada dana siluman Rp 12 triliun terkait APBD DKI 2015. Meski demikian, kesalahan dalam memahami metakomunikasi justru akan menjadi pintu masuk musuh-musuhnya untuk menyerang. Bisa jadi Ahok tidak akan peduli. Meskipun tujuannya baik, cara berkomunikasi tetaplah menjadi faktor penentu berhasil tidaknya tujuan berkomunikasi.

Jika ada semboyan "*lebih memilih mana pemimpin santun tapi korupsi atau pemimpin kasar tapi tidak korupsi*", pertanyaan itu tidak perlu dijawab karena sudah mencerminkan siapa pendukung kedua pihak. Jawaban yang lebih bijak tentu pemimpin santun, tapi tidak korupsi. Jadi, metakomunikasi dalam hal ini tetaplah penting dilakukan.

Manfaat

Metakomunikasi (berkomunikasi tentang komunikasi) punya potensi besar bagi keberhasilan tujuan berkomunikasi. Memahami metakomunikasi juga bisa memperbaiki hubungan antara dua orang yang berbeda pendapat.

Masalahnya, metakomunikasi akan sulit tercapai jika sudah ada syak wasangka atau ada bibit konflik di antara dua orang yang berkomunikasi.

Isi pesan penting dikemukakan, tetapi cara berkomunikasi bagaimanapun juga ikut menjadi penentu keberhasilan proses komunikasi. Eksekutif dan legislatif atau konflik dalam tubuh parpol kita tidak harus berfokus pada isi pesan, tetapi bagaimana cara mengomunikasikannya. Tak terkecuali juga, jangan sibuk melakukan cara berkomunikasi yang cenderung arogan, namun melupakan isi pesannya. Anehnya, elite politik kita (parpol, eksekutif, dan legislatif) tidak mau memahami metakomunikasi karena hanya mementingkan menang dan menang. Jadilah rakyat ini semakin bingung dibuatnya.

Nurudin, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang

JAWA POS, 31 Maret 2015

Maaf, Saya Mengumpat

MASIH ingat dengan rapat mediasi 5 Maret 2015 yang diadakan Kemendagri untuk menengahi kisruh antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta? Selain masih berlarut-larutnya masalah itu sampai sekarang, masih ada penggalan cerita di akhir mediasi. Rapat berakhir buntu. Beberapa oknum yang diduga anggota DPRD DKI melontarkan umpatan "*Gubernur goblok*..!", "*Ahok dan SKPD anjing*..!", "*Anjing*! *Bangsat*!" Sangat memalukan.

Terbaru, muncul kasus yang menyenggol sastrawan Saut Situmorang. Saut ditangkap polisi karena mengeluarkan kata-kata kasar di Facebook, "*Jangan mau berdamai dengan bajingan*". Saat itu Saut mengomentari sebuah tautan tentang polemik buku 33 Sastrawan Paling Berpengaruh. Terlepas dari kasus-kasus tersebut, siapa yang benar, siapa yang salah, menarik bagi kita membahas umpatan-umpatan tersebut.

Sejarah Umpatan Anjing, Bangsat, dan Bajingan

Kemarahan sewaktu-waktu bisa hinggap pada diri seseorang. Ketika marah dan tidak dapat mengontrol kemarahan, orang berpeluang besar untuk mengumpat. Mengumpat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring berarti mengeluarkan umpat(an); memburuk-burukkan orang; mengeluarkan kata-kata keji (kotor) karena marah (jengkel, kecewa, dsb); mencerca; mencela keras; mengutuk orang karena merasa diperlakukan kurang baik; memaki-maki. Di antara sekian banyak umpatan, rupanya umpatan anjing, bangsat, tahi, dan bajingan sedang naik daun.

Menurut Hendri F. Esnaeni, anjing kerap dianggap sebagai binatang piaraan yang patuh, setia, dan disayang. Kebiasaan memelihara anjing sudah berlangsung lama, termasuk di Nusantara. Di Aceh, Meurah Silu, pendiri Kerajaan Samudera Pasai, memiliki anjing kesayangan bernama Pasai. Pasai kemudian dipakai untuk melengkapi nama kerajaan, yang semula hanya Samudera menjadi Samudera Pasai.

Anjing sebagai umpatan bermula ketika Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC) menyamakan Raja Mataram Sultan Agung dengan "*seekor anjing yang telah mengotori Masjid Jepara*". Begitu pula terhadap kaum pribumi, orang Belanda menyamakannya dengan anjing. Di tempat-tempat keramaian yang hanya untuk kalangan Belanda, Eropa, dan Jepang, biasa tertulis *Verboden voor Inlanders en Honden* (Pribumi dan Anjing Dilarang Masuk). Para politikus dan rakyat Belanda pun mengecap Soekarno sebagai "*anjing piaraan Jepang*". Kaum pergerakan mendamprat orang-orang yang bekerja sama dengan Belanda sebagai anjing Belanda.

Anjing sebagai umpatan mengalami perluasan pemakaian. Di beberapa tembok rumah-rumah kosong, biasanya ada tulisan Dilarang kencing di sini kecuali anjing. Di tanah-tanah kosong ada plang bertulisan Dilarang buang sampah di sini kecuali anjing.

Bangsat dalam KBBI berarti kutu busuk atau kepinding; orang yang bertabiat jahat (terutama suka mencuri mencopet dsb). Dalam bahasa Jawa, bangsat disebut tinggi, yakni kutu busuk yang bisa ditemukan di kursi anyaman atau tempat tidur. Bangsat meminum darah manusia dan hewan berdarah panas lainnya. Meski demikian, dalam kehidupan sehari-hari, istilah bangsat ini mengalami pergeseran makna sebagai sebuah umpatan kekecewaan.

Bajingan dalam KBBI berarti penjahat, pencopet, kurang ajar (kata makian). Mengutip Merdeka.com, umpatan bajingan awalnya merujuk pada pengendara gerobak sapi. Konon, pada 1940-an, istilah bajingan tersebut kali pertama muncul di daerah Banyumas. Pada saat itu sarana transportasi sulit ditemukan. Sarana transportasi alternatif yang paling banyak adalah gerobak sapi. Masalahnya, kedatangan bajingan itu bisa dibilang suka-suka. Terkadang pagi, siang, sore, bahkan terkadang malam hari. Yah, mungkin sapinya lelah.

Masyarakat yang tidak bertemu dengan bajingan, mau tidak mau, ya jalan kaki. Seiring dengan waktu, banyak warga yang tanpa sengaja melontarkan kalimat-kalimat ketidakpuasan terhadap bajingan. Sejak itulah istilah bajingan ngetren sebagai umpatan karena keterlambatan seseorang, misalnya "Bajingan, ditunggu-tunggu tidak datang?" Sekarang umpatan itu pun berkembang luas dan umum.

Kalau iseng-iseng kita pikir, sebenarnya apa salah anjing? Apa salah bangsat? Apa salah bajingan? Kasihan nama mereka tercemar. Untung, mereka tidak pernah mengajukan tuntutan pencemaran nama baik. Tidak terhitung lagi orang yang dapat terjerat. Lha, hampir tiap hari orang menggunakannya sebagai umpatan.

Penyebab Ketidaksantunan

Luncuran umpatan saat bertutur dianggap sebagai bentuk ketidaksantunan. Pranowo mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan tuturan menjadi tidak santun. Penyebab ketidaksantunan itu antara lain: menyampaikan kritik secara langsung (menohok mitra tutur) dengan kata atau frasa yang kasar, didorong rasa emosi, penutur protektif terhadap pendapatnya, sengaja ingin memojokkan mitra tutur, dan menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur.

Sekarang ini yang dikhawatirkan, umpatan yang dituturkan pejabat negara maupun figur publik di media massa maupun media sosial akan ditiru anak-anak. Kita, yang katanya memegang adat ketimuran, diharapkan memperhatikan kesantunan dalam tuturan. Lebih penting dari itu, anak –selain diajari santun bertutur– perlu diajari santun berperilaku.

Etika bertutur harus didukung dengan perilaku. Ada orang yang etika tuturannya santun, tetapi perilakunya sebaliknya. Orang seperti itulah yang memancing Ahok mengumpat untuk kali kesekian. Ahok menjuluki orang-orang seperti itu dengan "tahi". Menurut dia, kata yang paling cocok dan halus untuk orang-orang yang ngembat uang rakyat ya tahi .

Ada juga orang yang mengumpat orang lain, tetapi tidak sadar sebenarnya dialah yang lebih pantas mendapat umpatan itu. Mengumpat orang lain anjing, padahal dirinya yang lebih pantas mendapat umpatan anjing. Mengumpat orang lain bangsat, padahal dirinya sendiri bangsat. Mengumpat orang lain bajingan, padahal dirinya yang lebih pantas disebut bajingan. Kok saya jadi ikutan mengumpat. Maaf.

Hendaklah kita pandai-pandai menjaga lidah, termasuk tidak mengumpat. Jangan sampai orang berprasangka buruk karena lidah kita ringan mengumpat. Jangankan mengumpat sesama, mengumpat nyamuk saja Rasulullah melarang.

Dalam hadis riwayat Ahmad, Al Bukhari dalam "Al-Adab Al-Mufrad", Al-Bazzar, At-Thabrani, dan Al-Baihaqi dalam "Su'bul Iman"; dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah mendengar seorang lelaki mengumpat nyamuk. Lalu beliau bersabda, "Jangan kauumpat nyamuk (itu). Karena sesungguhnya ia membangunkan seorang nabi dari para nabi untuk melakukan salat fajar!"

Bapak dan ibu terhormat yang memegang amanah rakyat biasanya santun bertutur. Semoga santun pula perilakunya. Kalau bahasanya santun, tetapi ternyata korupsi, itu sih memaksa rakyat berbuat dosa untuk berkata, "Dasar pejabat perilaku bangsat!" Aduh, maaf saya mengumpat lagi.

Ali Kusno, Cerpenis dan Pengkaji Bahasa di Kantor Bahasa KalTim

JAWA POS, 02 April 2015

Basuki dan Otonomi Indonesia

Ibu kota RI adalah barometer Indonesia. Dapat dikatakan pula, wajah suksesnya pemerintahan daerah di Indonesia dapat dilihat dari wajah suksesnya pemerintahan daerah di Ibu Kota. Namun, kita mengetahui bahwa akhirnya APBD 2015 DKI Jakarta ditentukan dalam bentuk peraturan gubernur, bukan peraturan daerah sebagai hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dapat tantangan keras dari DPRD DKI, partner kerjanya dalam pemerintahan DKI Jakarta, dalam menyusun APBD. Akhirnya pemerintah pusat lewat Kementerian Dalam Negeri turun tangan.

Penyelesaian melalui instrumen formal negara tersebut apakah mencukupi dalam menyelaraskan hubungan kedua elemen penting di DKI Jakarta? Ini pertanyaan yang cukup serius, menjadi tantangan otonomi Jakarta sekaligus tantangan jalannya otonomi Indonesia. Pada April, momen otonomi daerah diperingati kembali. Tentu bangsa Indonesia berharap banyak agar permasalahan di Ibu Kota dapat diselesaikan dengan baik.

Medan magnet

Bhenyamin Hoessein, guru besar emeritus Fakultas Ilmu Administrasi UI, penyusun UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, pernah mengilustrasikan bahwa hubungan pusat dan daerah seperti layaknya hubungan antara dua magnet. Dikatakan demikian karena di dalam hubungan tersebut jika ruang antara kedua magnet terlalu besar, dapat terjadi putus hubungan. Sementara jika hubungan antara keduanya yang terlalu dekat, tentu magnet dengan daya yang lebih kecil akan tidak berkutik: ia akan mengikuti magnet dengan daya yang besar.

Hubungan tersebut berbeda dengan hubungan antara unit pusat dan instansi vertikalnya di daerah, yang dikatakan seperti hubungan elektrikal tersambung oleh kabel (*electric field*). Hubungan elektrik amat bergantung pada sumber listriknya. Jika sumber listriknya besar, jaringan yang ada ikut besar. Jika sumber listriknya dimatikan, jaringan yang tersambung juga ikut padam.

Hubungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta adalah hubungan magnetik yang amat dekat karena DKI berkedudukan sebagai ibu kota, di mana pemerintah pusat berkantor di Ibu Kota. Hubungan tersebut berbeda dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah lain, terlebih dengan daerah pinggiran yang berbatasan dengan negara lain. Hubungan dengan daerah-daerah di luar DKI Jakarta adalah hubungan magnetik yang semakin jauh.

Ruang informal-eksternal

Sebagai konsekuensi hubungan magnetik, segala persoalan pemerintahan di DKI amat cepat dirasakan oleh pemegang kendali pemerintahan nasional. Pemerintah DKI Jakarta sesungguhnya amat dikendalikan oleh pemerintah nasional, terlebih Joko Widodo sebelum menjadi kepala pemerintahan RI

adalah Gubernur DKI Jakarta, di mana wakilnya adalah Basuki, gubernur sekarang. Maka, struktur informal- eksternal di luar koridor yang digariskan dalam standar prosedur operasional hubungan pusat-daerah dalam hubungan seperti ini dapat bersifat dominan. Struktur formal seolah tidak berdaya, berbeda dengan hubungan magnetik yang jauh. Hubungan yang teramat jauh dalam ruang yang besar bahkan membuka gerak sentrifugalistik negara-bangsa. Tidak heran kenapa gerak sentrifugal selalu terjadi pada daerah-daerah yang paling jauh dari Jakarta.

Tidak sekadar di meja Menteri Dalam Negeri, kasus penyelesaian APBD DKI Jakarta oleh Kementerian Dalam Negeri menuntut adanya ruang informal-eksternal. Jika kita berorientasi pada penyelesaian masalah, "perdamaian" antara Basuki dan DPRD DKI Jakarta harus didukung oleh elemen-elemen yang lebih besar. Pihak DPRD DKI Jakarta dengan elemen-elemen yang memang masuk dalam hubungan magnetik memiliki backing yang besar. Kementerian Dalam Negeri dapat saja mendapat tantangan keras. Gejalanya saja sudah terlihat sejak pelantikan Basuki. Pada awalnya, DPRD protes dan sempat menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Pelantikan Basuki berjalan karena Presiden turun tangan mengatasi masalah tersebut. Jalannya pemerintahan DKI Jakarta ternyata ditentukan oleh dokumen rencana keuangan APBD, dan APBD melibatkan DPRD. Dari situ tampak DPRD belum sepenuhnya legawa dengan kepemimpinan Basuki. Dapat disimpulkan, ruang besar magnet tersebut diisi oleh berbagai elemen yang "merasa" lebih besar daripada magnet pemerintahan nasional.

Belum selesainya APBD DKI ini kembali akan dimanfaatkan oleh sejumlah pihak yang berkepentingan. Semua elemen tersebut "tidak sadar" berada dalam instrumen-instrumen negara- bangsa dalam meraih tujuan yang diinginkan bangsa Indonesia karena terjebak kepentingan sesaat. Sudah saatnya bangsa Indonesia disadarkan. Kasus ini jadi barometer bangsa Indonesia. Sepantasnya, tidak sekadar prosedur formal untuk menyelesaikan ketidakefektifan hubungan antara Basuki dan DPRD DKI Jakarta.

Dukungan Megawati, Amien Rais, dan Prabowo dalam kasus ini mau tidak mau diperlukan. Jika tidak, kasus ini dipastikan akan laten dan berulang kelak di kemudian hari. Memalukan bangsa Indonesia jika pemerintahan DKI Jakarta berjalan tersendat-sendat dalam manajemen kesehariannya. Dampaknya terhadap roda perekonomian pun niscaya dapat terasa.

Tersendatnya Jakarta akan mengganggu pemerintahan nasional karena berada tepat di pusat kepala layaknya seorang manusia. Pemerintahan nasional dapat lumpuh, terlebih Jakarta mendapat tantangan keras soal banjir dan kemacetan. Semoga soal ini dapat disikapi dengan arif oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Irfan Ridwan Maksum, Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi; Ketua Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

KOMPAS, 08 April 2015

Aldo, Ahok, dan Jakarta

Kekerasan terhadap Aldo Fellix Januardy, pengabdi bantuan hukum atau pengacara publik dari LBH Jakarta, ter-jadi di Bukit Duri Jakarta Timur ketika otoritas setempat ingin meng-gusur pemu-ki-man penduduk. Selasa menje-lang siang (12/01/15) kabar itu melesat ke ponsel saya, tak lama kemu-dian kronologi kejadian pun masuk ke grup aplikasi bicara yang saya ikuti. Grup ini adalah kumpulan pemikir dan intelektual progresif yang mayoritas berisi anak-anak muda jebolan UI, baik yang masih ada di Indonesia maupun yang sedang menempuh pendidikan lanjutan di belahan dunia lain, plus beberapa senior dan dedengkot seperti Andrinof Chaniago, Fahmi Idris, Prof. Muluk Hamidy, Fahri Hamzah, Budiman Soejatmiko, dll.

Nah, salah satu anak muda anggotanya adalah Aldo Fellix Januardy, yang dari foto-foto bukti yang beliau kirim, terlihat cukup babak belur dan berdarah pasca kejadian bentrok tersebut. Salah satu anggota lainya adalah saya sendiri, yang tidak terlalu terikat secara intelektual dengan kampus kebanggan Indonesia itu (UI) karena pendidikan strata satu yang saya tempuh berlangsung di Bandung, walau beberapa tahun belakangan saya ikut serta menjadi pegiat beberapa komunitas di sana .

Selain itu, keterlibatan saya di grup ini juga disebabkan oleh aktifitas menulis saya yang konon menurut mereka cukup produktif. Sebagian dari tulisan saya akhirnya ikut mampir di portal yang mereka kelola, selain dimuat di berbagai media cetak nasional dan daerah. Setelah cukup lama dilibatkan dalam berbagai diskusi, online maupun langsung, saya pun menjadi cukup kenal dengan Aldo Fellix.

Beliau adalah anak muda yang sangat energik. Darah pejuang dan pengabdian nampaknya mengalir deras di tubuhnya. Pantang mendengar cerita pelanggaran HAM dan ketidakadilan. Aldo adalah alumni Hukum UI. Semasa berkuliah, ia aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Prestasinya di bidang tersebut mengantarkan ia terpilih menjadi Wakil Ketua dan kemudian Ketua (ad interim) BEM FHUI tahun 2012.

Pada tahun 2013, ia kembali terpilih menjadi perwakilan mahasiswa UI di Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia bertugas untuk menyampaikan aspirasi dari 49.000 mahasiswa terkait arah kebijakan universitas pada forum tertinggi tersebut. Karena terpilih sebagai satu-satunya perwakilan mahasiswa, MWA UI akhirnya memberi ia kesempatan untuk duduk bersama dengan beragam tokoh masyarakat seperti Jusuf Kalla, Said Aqil Siradj, dan Achir Yani S. Hamid selama satu tahun masa bakti.

Setelah lulus dari FHUI, ia mengabdi sebagai pengacara pro-bono di LBH Jakarta. Di tengah pengabdiannya, ia berhasil meraih penghargaan sebagai penerima beasiswa untuk aktivis NGO berprestasi dari Yayasan Wakaf Paramadina dan berkesempatan untuk melanjutkan studi S2 pada program Master of Diplomacy and Strategic International Policies di Paramadina Graduate School of Diplomacy.

Kembali kepada kronologis kejadian yang di rilis oleh Aldo kepada kawan-kawan, memang mulai terasa bahwa pemerintahan DKI Jakarta di bawah Ahok sudah mulai berpaling dari cara-cara yang humanis dalam menyelesaikan masalah. Kronologinya menurut Aldo, sekitar pukul 06.32, puluhan aparat gabungan Satpol PP dan Polsek Tebet, didampingi Camat, datang ke Bukit Duri.

Kemudian pukul 07.00, diskusi berlangsung alot antara warga, Satpol PP, Polsek, dan Camat yang sedari awal bersikukuh ingin menggusur war-ga. Warga membela diri de-ngan menyatakan bahwa ma-sih ada audiensi DPRD dan gugatan PTUN. Pada pukul 7.15, Aldo selaku PP LBH mencoba memediasi diskusi yang berlangsung dan membela posisi warga. Ketika itu, seperti kasus-kasus publik lainnya yang beliau tangani, Aldo mengingatkan bahwa polisi, satpol PP, dan camat harus menghargai proses hukum

Namun ternyata pihak yang diingatkan tidak bisa menerima pernyataan tersebut. Lalu aldopun langsung dikeroyok oleh 5 orang aparat satpol PP dan Polri. Menurut pengakuan Aldo, Bapak Mahludin, Camat Tebet dan bapak Nurdin, Kapolsek Tebet, juga ikut memukul dan mendorong. Akhirnya Aldo mengalami luka-luka di bagian kepala, kacamata yang beliau kenakan lensanya pecah di sisi kiri. Kemudian beliau ditarik jauh dari lokasi diskusi dan diancam akan ditangkap jika bicara.

Seberapun saya heran membaca dan mendengar cerita yang menimpa Aldo, bahkan sempat berfikir "*hari gini masih ada aja cara-cara yang demikian*", saya tetap harus realistis bahwa kejadian ini benar-benar terjadi, bukan andai-andai. Jakarta hari ini memang mulai terasa agak kurang bersahabat, terutama bagi pihak-pihak yang berdiri tidak segaris dengan penguasa ibu kota tersebut. Dibalik ketegasan dan cerita anti korupsi yang di-gaung-gaungkan gubernurnya, *good governance* dan *clean government* yang be-liau kampanyekan, atau cerita pelayanan prima DKI Jakarta yang beliau idam-idamkan, disisi lain banyak tersimpan kontroversi dan negasi yang cukup mengherankan. Apa-lagi jika dikaitkan dengan cara-cara beliau menghadap beberapa organisasi ke-agama-an Islam.

Saya dan kawan-kawan lainya yang mengutuk banyak hal kontrobversial dari beliau berfikiran sama soal ini. Mungkin apa yang kami fikirkan tak jauh berbeda dengan yang dialami dan difi-kir-kan Prabowo menjelang Pilkada Jakarta 2012 lalu dan setelah Pilpres 2014 lalu, yakni sesosok yang dipuji lalu dinaikan, kemudian berubah haluan dengan alasan-alasan yang sengaja dibuat-buat.

Tentu tidak perlu mengumbar begitu banyak teori kepemimpinan untuk mengukurnya, karena itu hanya akan menyingkat waktu. Biarkan perjalanan kekuasaan di ibu kota akan membuktikan bahwa semua citra yang dibangun dengan uang puluhan miliar rupiah, hanya akan berputar-putar lalu berhenti di ruang publik, tidak akan pernah masuk ke hati rakyat, jika pada akhirnya kekuasaan itu digunakan untuk menelan hajat hidup rakyat banyak. Dan pada ujungnya, kekuasaan yang jumawa dan arogan akan tumbang ditelan

waktu, dicibir oleh generasi selan-jutnya, dan diolok-olok oleh comedian di layar kaca.

Dan ketika saya begitu lancar bercerita tentang seorang Aldo kepada kawan-kawan kantor saya, seorang kawan lain akhirnya mengalihkan pertanyaan. "*Bapak telah menceritakan sebanyak yang bapak bisa tentang kawan bapak, bung Aldo, lantas apa yang bapak ketahui tentang Ahok*?" ucapnya bersemangat. Saya-pun reflek menjawab, "*saya tidak kenal Ahok, siapa itu Ahok*?", saya berbalik bertanya. Gubernur DKI Jakarta, balasnya. Oh Gubernur, saya pikir tukang pukulnya tuan tanah, jawab saya reflek dan kami pun tertawa sedih.

Ronny P Sasmita, Analis Ekonomi Politik Internasional Financeroll Indonesia

HALUAN, 18 Januari 2016

Sekali Lagi Basuki...

Dibolehkannya calon independen atau calon perseorangan mengikuti pemilihan kepala daerah diawali oleh Lalu Ranggalawe. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, ini bermaksud mengikuti Pilgub NTB. Namun, partai dia, Partai Bintang Reformasi (PBR), menolak mencalonkan Ranggalawe. Dia tak terima perlakuan itu, lalu ke Jakarta mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. MK akhirnya menerima pengajuan uji materi ini. Landmark decision itu dikeluarkan melalui keputusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 yang membolehkan calon perseorangan ikut pilkada. Kutipan Putusan MK memuat naskah "*Pendirian Mahkamah*" 24 butir yang memperkuat dalil bahwa Ranggalawe boleh ikut pilkada. Dari 24 butir itu, 11 butir menyebut "UU Pemerintahan Aceh" sebagai rujukan.

Mengapa Aceh? Pasalnya, pemilihan gubernur (pilgub) di Aceh dimenangi calon perseorangan Irwandi Yusuf. Pilgub di Aceh "*proyek percontohan*" sukses yang patut ditiru provinsi-provinsi lainnya. Ibaratnya, UU Pemerintahan Aceh adalah asam di gunung, sedangkan uji materi Ranggalawe garam di laut, mereka bersua di kuali MK di Ibu Kota. Namun, sejak keputusan MK tersebut, cuma segelintir dari ratusan calon perseorangan yang mengikuti pilkada di berbagai tingkatan. Jumlah yang mencalonkan dan juga yang akhirnya menang, hanya dalam hitungan jari saja.

Pilkada DKI

Februari tahun depan, Pilkada DKI Jakarta akan digelar. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, menurut berbagai survei, saat ini merupakan calon kuat. Mungkin lawan Basuki yang paling serius akan datang dari Partai Gerindra, partai yang mencalonkan Basuki sebagai cagub mendampingi Joko Widodo (PDI-P) pada tahun 2012. Gerindra sudah menjaring delapan cagub yang dalam beberapa bulan ke depan akan dikerucutkan menjadi tiga, kemudian satu cagub yang dianggap terbaik.

Gerindra berada di peringkat kedua merebut 92 dari 264 pilkada 9 Desember 2015, sebuah prestasi fenomenal. Konsistensi Gerindra di Koalisi Merah Putih bisa menjadi keuntungan komparatif. Lebih penting lagi, Gerindra berpengalaman menyiapkan sekaligus memenangi kursi Jokowi-Basuki di Jakarta. Dalam perjalanan, setelah Basuki keluar dari Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu tak henti-hentinya menyuarakan kritik vokal lewat DPRD-DKI.

Basuki sendiri memiliki keleluasaan untuk mencalonkan diri sebagai calon perseorangan atau melalui partai. Dan, partai yang paling mungkin mengusung Basuki sampai saat ini adalah PDI-P. Untuk memudahkan, Basuki bisa saja secara resmi menjadi anggota PDI-P. Jika ini terjadi, PDI-P akan jadi partai ketiga yang bagi Basuki setelah Partai Golkar dan Partai Gerindra.

Apakah pendukung Basuki, terutama Teman Ahok yang telah mengumpulkan sekitar 630.000 fotokopi KTP agar memenuhi syarat dia sebagai calon perseorangan, akan keberatan? Tampaknya belum tentu demikian. Sekali lagi, Basuki memiliki keleluasaan memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Paling penting, Basuki sampai saat ini masih menjadi kandidat terpopuler.

Di mata sebagian warga, Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki terbukti jadi lebih baik. Penyebabnya, *pertama*, Basuki selalu berbicara jujur dan, *kedua*, mengerjakan apa yang mesti dikerjakan oleh seorang Gubernur Ibu Kota. Gaya memimpin seperti itulah yang kita saksikan saat Basuki berbicara kepada media melalui *door-stop interview* hampir setiap hari saat tiba di teras Kantor Gubernur. Mungkin cara berbicara Basuki yang terkesan kasar menjadi persoalan bagi sebagian kalangan. Namun, belakangan ini kesan itu makin pudar.

Juga telah terbukti hal-hal yang bersifat primordial yang melekat pada Basuki tidak lagi relevan bagi para pemilih di Ibu Kota. Sudah sia-sia bagi para pesaing Basuki untuk memanipulasi primordialisme dalam kampanye pilgub kelak. Terakhir, warga Jakarta rupanya masih percaya pada "fenomena Jokowi-Ahok" pada Pilgub DKI 2012.

Budiarto Shambazy, Wartawan Senior Kompas

KOMPAS, 30 Januari 2016

Fenomena Ahok dan Runtuhnya Kesombongan Partai Politik

Jika tak ada perubahan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari jalur non partai alias independen. Ini bukan karena tak ada partai yang mendukung. Pekan lalu, Partai Nasional Demokrat (NasDem) sudah menyatakan dukungannnya untuk Ahok maju di Pilgub DKI. Bukan tak mungkin partai-partai lain, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) juga bakal menyusul.

Toh hingga Senin, 15 Februari 2016 kemarin Ahok masih kekeuh, ingin maju Pilgub DKI lewat jalur independen. Ahok memiliki modal yang cukup untuk maju dari jalur non partai politik. Relawan yang tergabung dalam TemanAhok hingga Senin kemarin mengaku sudah mengumpulkan 703.640 fotokopi KTP dukungan. Angka dukungan yang didapat Ahok sudah melampaui syarat untuk maju Pilgub DKI dari jalur independen yakni: 532 ribu fotokopi KTP.

Ahok juga memiliki 'modal' popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang dipublikasikan pada 25 Januari 2016 lalu mencatat elektabilitas Ahok mencapai 45 persen. Angka ini masih yang tertinggi dibanding elektabilitas nama-nama kandidat lain sebagai bakal cagub DKI.

Di bawah Ahok, ada Ridwan Kamil dengan elektabilitas 15,75 persen dan disusul Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebesar 7,75 persen sebagai Cagub DKI. Selain ketiga nama itu masih ada nama tokoh lainnya seperti mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault dengan elektabilitas 4,25 persen.

Menarik mengamati fenomena Ahok menjelang Pilkada DKI 2017 ini. Seperti diketahui pada September 2014 lalu, Ahok mundur dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sejak itu dia tak punya ikatan dengan partai politik mana pun. Langkah Ahok lepas dari ikatan partai politik cukup berani. Padahal sebagai Gubernur DKI yang menggantikan Joko Widodo (Jokowi), dia perlu sokongan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar program Pemerintah Provinsi bisa berjalan dengan baik.

Akibat tak 'mesra' dengan parlemen, Ahok sempat beberapa kali terlibat perseteruan dengan politikus anggota DPRD DKI. Kasus yang paling menonjol adalah perseteruan akibat dugaan adanya dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta tahun 2013. Adanya dana siluman tersebut diduga melibatkan oknum anggota DPRD dan pegawai Pemprov DKI. Ahok dan sejumlah anggota DPRD pun terlibat saling tuding. Perseteruan ini sempat membuat pengesahan APBD DKI tahun 2015 tertunda.

Selain di DPRD, Ahok mestinya butuh partai politik sebagai kendaraan untuk maju Pilgub DKI. Mesin-mesin partai politik diperlukan untuk mendongkrak perolehan suara Ahok. Namun Ahok tak bergeming dan tetap

pada pendiriannya yakni berada di luar partai politik. Dia yakin asal bekerja dengan benar untuk membenahi Jakarta, dukungan untuk maju menjadi bakal calon gubernur DKI 2017-2022 akan datang dengan sendirinya.

Terbukti, hasil survei CSIS menunjukan bahwa tanpa bantuan partai politik, popularitas dan elektabilitas Ahok sangat tinggi. Bahkan Ahok diprediksi bakal memenangkan Pilkada DKI siapa pun lawannya, termasuk yang diusung oleh partai politik. Di Jakarta, partai politik seperti dibuat tak berdaya karena mereka tidak punya kader berkualitas untuk dicalonkan melawan Ahok. Ahok berhasil membalik paradigma lama. Di era sebelumnya menjelang Pilkada para politikus selalu sibuk melobi partai politik agar dia didukung sebagai calon gubernur, wali kota maupun bupati.

Tak jarang si kandidat menyetor sejumlah uang sebagai 'mahar' agar partai politik mau mengusung dia. Partai politik beralasan, 'mahar' tersebut digunakan sebagai ongkos politik dan biaya kampanye. Namun kini di DKI berlaku sebaliknya, partai politik seperti berebut ingin mengusung Ahok, baik yang tulus maupun berharap citra partainya terdongkrak. Fenomena Ahok ini sekaligus menjadi kritik terhadap partai politik agar tak lagi jemawa alias sombong dan mengabaikan proses pengkaderan.

Partai politik tak lagi bisa terlena dengan hanya menyiapkan kader 'instan' seperti terjadi di Pemilu 2004, 2009 dan 2014 lalu. Kala itu partai politik berlomba memasang tokoh publik, semisal artis atau pengusaha sebagai vote getter untuk menggenjot perolehan suara. Kesuksesan memasang kader 'instan' ini rupanya merembet, tak hanya di ajang pemilihan umum melainkan juga ke pemilihan kepala daerah. Fakta ini jelas membahayakan kehidupan bernegara. Selamanya partai politik hanya akan mengandalkan figur artis, bukan kemampuan politik seorang kader.

Partai tak lagi peduli dengan kualitas dan ideologi kader, yang penting dia bisa memberi modal uang, dan sumbangan suara. Meski sudah disadari dampak buruknya, toh kebiasaan ini tetap berlangsung sampai sekarang. Begitu muncul calon kepala daerah seperti Ahok, partai politik pun kelabakan. Kini Ahok seperti 'menjewer' partai politik. Tak ada lagi kader 'instan'. Masyarakat sudah mulai cerdas untuk memilih calon pemimpin yang benar-benar memiliki kinerja bagus. Sudah saatnya partai kembali menjalankan fungsi pengkaderan, menyiapkan dan menyeleksi calon wakilnya yang akan duduk di jabatan politik.

Keberhasilan partai melakukan pengkaderan akan menghasilkan pemimpin handal, kehidupan politik yang demokratis serta hubungan sosial yang harmonis. Ketika proses pengkaderan berjalan dengan baik, partai politik tentu tak akan kesulitan mencari lawan sepadan untuk Ahok. Potensi menang pilgub dari calon independen juga lebih besar karena partai politik memiliki basis konstituen jelas dan militan. Fenomena Ahok seolah ingin membuktikan bahwa jika ingin dipilih oleh rakyat maka bekerjalah dengan baik.

Erwin Dariyanto, Jurnalis di detikcom. DETIKNEWS, 17 Februari 2016

Siapa Bisa Melawan Ahok?

UDARA politik DKI Jakarta menjelang pilkada 2017 mulai memanas. Partai-partai politik tengah menjajaki kemungkinan siapa yang bakal didukung sebagai kandidat. Sementara sang petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang selama ini telah menggalang kekuatan dari ranah independen melalui Teman Ahok, sudah sangat percaya diri. Magnet politiknya memang tengah moncer. Beberapa partai politik, bahkan PDIP, mendekat untuk mendukung. Tetapi, Ahok tampaknya merasa siap maju tanpa partai.

Apakah dia harus menerima pinangan partai-partai? Bisa ya, bisa pula tidak. Untuk semua itu, ada kalkulasinya. Apabila menerima, Ahok tidak saja akan membuyarkan ikhtiar Teman Ahok selama ini, yang telah berupaya memenuhi persyaratan melalui dukungan kartu tanda penduduk (KTP). Dia juga harus bersiap-siap berkompromi dengan partai-partai.

Apabila memilih maju melalui jalur partai, itu menunjukkan bahwa Ahok ingin bekerja sama lebih baik dengan elite-elite strategis di DPRD DKI Jakarta ke depan. Bila dia kembali terpilih. Dengan atau tanpa partai pengusung, jelaslah Ahok sudah punya kartu untuk maju sebagai kandidat gubernur di provinsi paling strategis itu. Berbagai survei yang ada selama ini masih menunjukkan bahwa Ahok yang paling kuat. Pertanyaannya memang, siapakah gerangan yang mampu mengimbangi popularitas Ahok sehingga pilgub DKI tahun depan menjadi lebih imbang?

Beberapa nama memang sudah muncul atau setidaknya ramai diperbincangkan. Mulai Yusril Ihza Mahendra, Adhyaksa Dault, Ahmad Dhani, Tri Rismaharini, hingga Ridwan Kamil. Kendati nama terakhir kemarin (29/2) resmi menyatakan tidak maju dalam pilgub DKI. Mereka juga tokoh-tokoh yang populer. Tapi, persoalannya, apakah bisa dalam waktu setahun melewati derajat popularitas Ahok? Sebagai incumbent, pria kelahiran Belitung itu hampir tiap hari tampil sebagai aktor dalam rangkaian drama pembangunan DKI yang disorot media.

Hari-hari ini Ahok juga kembali menjadi bintang utama dalam penggusuran lokalisasi Kalijodo. Sebelumnya, dia juga menjadi sorotan utama dalam drama-drama penggusuran lain. Juga, dalam semua drama itu, dia tetap menjadi protagonis. Kesadaran keaktoran dalam serangkaian drama pembangunan DKI itulah kelebihan Ahok. Dia mencicil peningkatan popularitas dirinya sebagai gubernur pemberani dan suka terobosan. Ahok tetap eksis di tengah lingkaran kemelut isu korupsi yang mengaitkan dirinya, terutama dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Kasus itu, bagaimanapun, mengancam popularitasnya.

Kalau tidak mampu merespons dengan cermat dan hati-hati, bisa saja dia terjungkal dari kekuasaan. Akankah dia lolos dari kasus itu dan tetap bisa melenggang sebagai kandidat? Hal tersebut tidak semata-mata terletak pada faktor Ahok.

Melihat nama-nama yang beredar sebagai potensi lawan tanding Ahok, setidaknya ada dua kategori. Yakni, dari dalam dan luar DKI. Yang berasal dari DKI memiliki latar belakang bervariasi, terutama politisi dan artis.

Dari segi pengalaman dan senioritas, Yusril tidak dapat dianggap enteng. Dia memimpin partai dan punya pengalaman mumpuni di pemerintahan. Tapi, Yusril dituntut harus bergerak cepat dalam menerapkan strategi jitu untuk menumbangkan Ahok. Demikian halnya dengan kandidat lain seperti Adhyaksa Dault, bahkan Ahmad Dhani.

Dalam pilgub DKI sebelumnya, secara kepemimpinan, sang petahana, Fauzi Bowo alias Foke, terkesan sekali sebagai antitesis Jokowi. Tapi, sosok seperti Tri Rismaharini (wali kota Surabaya) atau Ganjar Pranowo (gubernur Jateng), misalnya, memiliki posisi yang nyaris sama dengan Ahok di Jakarta saat ini. Mereka telah menjadi penanda politik di daerah masing-masing sehingga belum tentu bisa berspekulasi menandingi Ahok. Selain itu, kendalanya, apakah keluarga, warga kota asal, dan partai politik rela melepas nama-nama tersebut?

Adakah pula partai di DKI yang mampu meyakinkan mereka untuk didukung sebagai kandidat? Setiap kasus pilkada spesifik. Kasus-kasus sebelumnya bisa jadi tidak dapat dijadikan model bagi kesuksesan hijrahnya tokoh lokal untuk menjadi penguasa Jakarta.

Di sisi lain, pemilih DKI lazimnya didominasi pemilih yang cenderung akan memilih kandidat gubernur yang dipandang lebih bisa memimpin dan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan DKI yang pelik. Tetapi, sesungguhnya rasionalitas pemilih juga cepat terbentur pada sosok yang populis. Merujuk kemenangan Jokowi pada pilkada DKI sebelum ini, faktor populisme politik tak terelakkan. Dari sisi itu, sebagai incumbent, Ahok tampak sadar dan berupaya menjaga populisme kepolitikannya.

Dari perspektif populisme politik itulah, siapa lawan Ahok yang bisa mengimbangi, bahkan mengalahkannya, ialah yang mampu membangun imaji populisme politik dalam tempo yang cepat kepada publik DKI.

Sosok itulah yang dipersepsikan bisa lebih baik daripada Ahok. Atau setidaknya menutup celah-celah kelemahan Ahok sebagai pemimpin DKI selama ini. Siapa dia? Proses politik akan terus berlangsung. Kekuatan-kekuatan politik masih akan menjajaki berbagai kemungkinan dalam memilih sosok yang didukung. Ataukah memang, ujung-ujungnya, mereka akan beramai-ramai pula kembali mendukung Ahok?

M Alfan Alfian, Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

JAWA POS, 01 Maret 2016

Tarian Tango Basuki Tjahaja Purnama

Tango, tarian eksotik berpasangan, adalah tarian rakyat yang berasal dari salah satu negara di Amerika Latin. Dansa rakyat yang kini populer di seantero dunia tersebut mengombinasikan kelincahan, kegesitan, serta kegemulaian penarinya. Oleh sebab itu, tarian tersebut dianggap sempurna kalau dua orang yang berpasangan itu tidak hanya saling mengenal, tetapi juga mempunyai senyawa intimitas sehingga tarian itu tidak hanya membuat terpesona, tetapi juga mampu menyihir penonton karena kejujuran ekspresi kegairahan eksotis para penarinya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Basuki, akhir-akhir ini, dan mungkin beberapa hari yang akan datang, sibuk mencari partai politik yang bersedia menyediakan kadernya sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada Serentak Februari 2017. Dinamika politik lokal di Jakarta dewasa ini menghadapkan Basuki pada dua pilihan. Pertama, ”*menari tango*” bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) atau, kedua, berdansa dengan kumpulan ”*Teman Ahok*”. Pilihan tersebut tidak hanya harus diperhitungkan dengan cermat, melainkan juga memerlukan intuisi tajam agar tidak meleset, yang ujung-ujungnya mengecewakan pendukung dan konstituennya.

Pilihan pertama sebenarnya cukup baik, selain karena Basuki mempunyai hubungan pribadi yang lumayan erat dengan Megawati Soekarnoputri, Djarot Saiful Hidayat yang mungkin akan diajukan sebagai kandidat wakil gubernur DKI Jakarta, juga bukan orang asing bagi Basuki. Keduanya sudah bersama-sama memimpin Jakarta. Namun, tampaknya jalan tidak semulus itu mengingat beberapa kader PDI-P telah memanaskan hubungan Basuki dengan PDI-P dengan melancarkan ungkapan Basuki harus diuji loyalitasnya, Basuki jangan coba-coba mengatur PDI-P, dan ungkapan sejenis yang tidak mendekatkan, tetapi justru merenggangkan hubungan keduanya.

Sementara itu, bagi Basuki, yang mungkin sedang menimbang-nimbang parpol apa yang akan menjadi pengusungnya, mendengarkan narasi semacam itu harus berpikir dua kali. Apalagi, kalau untuk memperoleh kandidat wakil gubernur dari parpol harus sowan dan sungkem serta memohon-mohon; dia khawatir hanya akan selalu didikte dan dianggap sekadar petugas partai. Ujung-ujungnya membanjirnya tagihan politik yang hanya akan menyandera dirinya. Terlebih kalau mengaca pengalaman ironis Presiden Joko Widodo, parpol pengusung tidak jarang dengan garang menjadi pementung atau pemukul. Karena itu, opsi ini kecil kemungkinannya menjadi pilihan Basuki.

Pilihan kedua, bersandar kepada ”*Teman Ahok*”. Opsi ini bagi Basuki lebih leluasa dalam mewujudkan impiannya. Selain itu, perkumpulan ini juga keberatan Basuki diusung parpol. Tanpa dukungan parpol, elektabilitas Basuki amat sulit dikejar para pesaingnya. Hasil survei Populi Center pada Februari 2016, elektabilitas Basuki hampir 50 persen, jauh melampaui

kandidat lainnya, seperti Ridwan Kamil, Yusril Ihza Mahendra, Nachrowi Ramli, dan Adhyaksa Dault. Basuki lebih mujur karena para calon pesaing yang lebih adekuat kompetensinya, seperti Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung), Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya), dan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), membatalkan diri sebagai kompetitornya.

Meski demikian, sebaiknya pendekatan terhadap parpol, khususnya PDI-P, tetap harus dilakukan agar mereka bersedia menjadi pendukung, bukan pengusung, sebagaimana dilakukan Partai Nasdem, Hanura, dan mungkin akan diikuti parpol lain. Dukungan tersebut sangat penting dalam mengelola kelancaran pemerintahan.

Kandidat gubernur DKI Jakarta lainnya tidak perlu surut melihat elektabilitas Basuki. Mengalahkan Basuki tidak terlalu sulit, syaratnya mampu membuktikan dan meyakinkan kepada masyarakat Ibu Kota dengan memberikan bukti nyata hasil kerja kerasnya, transparan, serta akuntabel yang dapat diukur dan dirasakan. Bukan retorika dan citra. Keunggulan Basuki membangun citra berbanding terbalik dengan para politisi pada umumnya. Basuki terbangun citranya akibat keberhasilan membuat kebijakan yang konkret dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga hasilnya mulai dirasakan baik oleh masyarakat.

Padahal, apa yang dicapai Basuki, bagi pemerintahan masa lalu, adalah kemustahilan. Misalnya, menggerakkan mesin birokrasi Provinsi DKI Jakarta, menegakkan peraturan, berani mulai melaksanakan tahap pembangunan MRT (transportasi massal cepat), sungguh-sungguh mengatasi problem banjir, dan membenahi jalur hijau atau bantaran sungai yang ditempati penduduk liar.

Karena itu, meski kadang menuai protes, tingkat preferensi masyarakat DKI terhadap Basuki tetap tinggi. Intinya, Basuki berhasil mengelola Pemerintahan DKI Jakarta pararel dengan kualitas jiwa dan komitmennya membangun Jakarta. Kalau para pesaing hanya membangun citra dengan jurus tunggal blusukan tanpa disertai bukti nyata, hanya akan membuat masyarakat terpingkal-pingkal sampai keluar air mata saking gelinya.

Mencermati dinamika politik DKI Jakarta menjelang Pilkada Serentak 2017, Basuki tidak mempunyai pasangan tari tango yang ideal yang chemistry-nya cocok untuk mengelola pemerintahan DKI Jakarta. Mungkin sudah takdir politik, Basuki harus menari sendirian agar lebih leluasa dan lebih terlihat gagah dalam mewujudkan impian rakyat Jakarta. Ia akan melakukan Tari Topeng Klana asal Cirebon, joget yang diilhami oleh adegan raja yang suka mengelana, mempunyai cita-cita tinggi, serta memanifestasikan kegagahan dan kejujuran dalam mengemban tugasnya. Semoga!

J Kristiadi, Peneliti Senior CSIS

KOMPAS, 08 Maret 2016

Ahok

Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta baru tahun depan, tetapi kegaduhan sudah terasa sekarang ini. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak bisa menunggu lebih lama lagi sikap PDI-P. Sebaliknya PDI-P pun tidak suka didesak-desak Ahok. Akhirnya, Gubernur DKI Jakarta ini memilih maju lewat jalur independen dengan dukungan Teman Ahok. Karena gagal bersanding dengan kader PDI-P, Ahok pun pisah dengan Djarot Saiful Hidayat (wakil gubernur yang juga petinggi PDI-P). Ahok memilih Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta. Pilihan ini bukan tanpa risiko. Meskipun terburuk, sebutlah sampai gagal nyalon pada Pilkada 2017, Ahok tampaknya sudah menyadarinya.

Pilihan Ahok lewat jalur independen sebetulnya bukan karena ia tidak laku di partai politik. Saat memilih jalur independen, parpol seperti Nasdem pun mendukungnya. Sebenarnya banyak parpol yang mau meminangnya. Namun, tunggu waktu karena parpol memiliki proses dan aturan masing-masing. Sebaliknya, Ahok juga berkalkulasi. Ia berpacu dengan waktu. Menunggu sikap parpol yang berlama-lama juga bukan tanpa risiko. Jika pada menit-menit terakhir parpol tak jadi mengusungnya, juga sama runyamnya.

Selama ini, Ahok memang paling unggul dalam beberapa survei. Namun, Ahok pula yang paling kontroversial. Wataknya keras. Bicaranya ceplas-ceplos, sering tak terkontrol, suka marah-marah. Reaksi keras pun bermunculan, bahkan isu SARA. Sampai-sampai muncul semacam gerakan "*menolak Ahok*" atau "*asal bukan Ahok*". Namun, Ahok sepertinya tak peduli. Sebaliknya, komitmennya bekerja untuk rakyat sulit dibantah. Suatu hari ia menggusur rumah-rumah di pinggir kali, tetapi ia sudah menyiapkan rumah susun untuk tempat tinggal korban penggusuran. Dan, lain hari nyaris tak terdengar Jakarta tenggelam. Ahok menjanjikan, banjir datang, tetapi airnya cepat pergi. Suatu kali ia menggusur Kalijodo, tetapi mulut lawan-lawan politiknya terkunci kehabisan kata-kata. Sebab, Ahok menggusur lokalisasi prostitusi yang sudah puluhan tahun beroperasi.

Barangkali buat Ahok, bekerja membenahi Jakarta lebih penting ketimbang berlagak santun, padahal kerjanya nol besar. Ahok memang tampil beda. Padahal pada era demokrasi langsung, para politisi dan pemimpin adalah "*sosok baik nan santun*". Itulah politik pencitraan. Popularitas figur, baik dan positif, hampir linier dengan elektabilitas.

Ahok mungkin anomali dari pencitraan era sekarang. Buatnya kalau terpilih disyukuri, tidak terpilih pun diterima saja. Maka, bicaranya tetap saja kasar dan suka marah-marah. Rupanya, banyak anak-anak muda yang suka gaya "*koboi*" Ahok. Namun, banyak orang tua yang kupingnya panas. Apa pun juga merendahkan nada bicara dan menghindari kata-kata sarkastis dan kotor menjadi nasihat yang patut dipertimbangkan. Menurut Marc Bloch (1962), di Eropa sejak abad ke-11, aturan tingkah laku kesopanan dan sifat-

sifat yang lebih dipersantun memang untuk menggambarkan kualitas kebangsawanan.

Jika mengikuti pikiran Ahok, barangkali di dunia yang disesaki perilaku hipokrit sekarang ini, basa-basi dan muka manis tidak perlu lagi. Straight to the point saja! Karena itu, ada yang menilai Ahok termasuk pemimpin orisinal, autentik, apa adanya; bukan hasil polesan politik pencitraan. Dengan sendirinya justru terbentuk citra Ahok sebagai pemimpin keras, tegas, dan berani. Ia membangun pencitraan sendiri, menegasi pencitraan selama ini.

M Subhan SD, Wartawan Senior Kompas

KOMPAS, 10 Maret 2016

Independen

AKHIRNYA Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berbulat tekad maju sebagai calon gubernur lewat jalur independen. Ia pun sudah menunjuk calon wakil gubernur, yakni Heru Budi Hartono yang kini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI. Ahok memuji Heru sebagai pegawai negeri sipil yang bersih.

Berita dan ulasan tentang Ahok yang nekat ini mengalahkan berbagai isu. Kasus Labora Sitorus yang digerebek ratusan polisi dengan kendaraan barakuda, yang ternyata juga gagal menangkapnya, kalah oleh "*Ahok yang independen*". Gerhana matahari total yang langka itu pun beritanya hanya bertahan beberapa jam, dan malah candaan gerhana menyerempet ke politik, seolah-olah politik sudah jadi candaan yang sah di negeri ini. Lalu, apa lagi yang ditulis soal Ahok? Semua sisi sudah dikupas habis. Maka, inilah cerita tentang seorang bakal calon bupati yang mendapat dukungan besar dari rakyat tapi gagal menjadi calon.

Ia seorang pegawai negeri sipil, istilah yang dipakai masyarakat "kader bukan partai". Karena antusiasnya masyarakat menginginkan dia menjadi bupati, maka digadanglah dia untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Partai mana yang mengusung? Tidak ada. Maka, jalan yang terbuka hanya jalur independen. Para relawan pun mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP). Spanduk dan baliho bertebaran di jalan-jalan. Tiba-tiba pimpinan cabang partai besar mendekati bakal calon bupati independen ini dan menawarinya untuk diusung partai. Bahkan siap memasangkan "*kader partai*" sebagai calon wakil bupati, pertanda serius. Pengumpulan KTP pun berhenti. Hanya bikin capek, toh partai besar sudah mendukungnya.

Pilkada semakin dekat. Partai sebelah sudah punya calon yang pasti, tinggal mendaftar. Tapi sang mantan calon independen belum mendapat rekomendasi, yang ternyata harus diteken ketua umum partai di Jakarta. Pimpinan cabang partai yakin rekomendasi akan turun, tapi "*semuanya tergantung Ibu Ketua Umum*". (Kalau menyebut Ibu Ketua Umum, sudah ketebak partai apa ini, biarlah).

Apa yang terjadi? Dua hari menjelang berakhirnya pendaftaran peserta pilkada, rekomendasi dari ketua umum partai ternyata jatuh kepada pasangan lain yang disebut "*murni kader partai*". Sempat heboh sesaat.

Namun jawaban pimpinan cabang partai enteng saja: "*Keputusan memang hanya ada di tangan Ibu Ketua Umum*." Kalaupun ada kata-kata tambahan, seperti ini: "*Politik itu dinamis, apa pun bisa terjadi*" atau "Kita harus amankan keputusan partai" atau ini lagi "*Mekanisme pengajuan dari bawah sudah benar, tapi keputusan memang dari Jakarta*". Begitulah nasib "*kader bukan partai*" yang sial, meskipun "masyarakat akar rumput" sudah mendukungnya. Kembali menjadi calon lewat jalur independen tak mungkin lagi, selain kekurangan KTP dukungan, juga tak memenuhi syarat karena tahapan verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum sudah lewat.

Sudah pasti orang sehebat Ahok tahu kisah seperti ini, setidaknya bisa mencium baunya. Ahok meminta PDI Perjuangan tegas apakah tetap akan mendukung Djarot Saiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur Jakarta pada pilkada 2017, yang berarti juga mendukung dirinya. Jawaban tak kunjung datang, dan Ahok pun tak mau "dijatuhkan" menjelang pendaftaran.

Sederhana sekali sesungguhnya, Ahok hanya membutuhkan kepastian dengan maju sebagai calon independen. Warga Jakarta pun membutuhkan kepastian apakah Ahok betul-betul maju. Adapun soal deparpolisasi dan "*hal-hal yang bikin gaduh*", itu hanya bumbu pilkada. Maklum, Jakarta milik Indonesia.

Putu Setia, Wartawan Senior Tempo

KORAN TEMPO, 11 Maret 2016

Humanisme Politik Ahok

BASUKI Tjahaja Purnama (Ahok) tengah mencuri perhatian publik. Di tengah keruh tak keruan pemandangan politik dan melorotnya peran sejumlah partai politik, Ahok hadir dengan energi politik tertentu. Energi politik menciptakan medan magnet tersendiri sampai-sampai mengguncang elektabilitas partai. Daya tawar Ahok pun kian melejit di bursa menuju Gubernur DKI pada 2017 mendatang. Lantas, amunisi politik apa yang dipakai Ahok sehingga ia begitu fenomenal secara politik untuk konteks Ibu Kota?

'Musuh' Politik

Ahok menjadi begitu fenomenal karena ia berani menghadirkan 'musuh' secara politik. Menegaskan disposisi tertentu di tengah kekaburan, secara politis dapat berarti menciptakan 'musuh'. Bagi Ahok, pilihan itu berisiko karena apa yang sekarang dianggap 'musuh' secara politik dapat menjadi 'sahabat' bagi sekawanan elite yang ingin menikmati kemurahan politik.

Untuk sejumlah parasit politik, korupsi, dengan segala variannya dapat menjadi 'sahabat' yang selalu mendatangkan 'berkah'. Maka, mekanisme kerja konspiratif, pragmatis-berumur pendek, serta manipulatif ialah beberapa jurus dari mekanisme 'persahabatan' politik. Ahok menjadikan itu semua sebagai 'musuh' dalam visi politiknya. Berpolitik berarti menciptakan perdebatan antagonistis.

Komitmen disposisi politik Ahok tak banyak unsur tawar-menawarnya. Itulah sebabnya, ia menghadapi banyak resistensi dari pihak yang ingin melestarikan pragmatisme politik. Tampaknya, Ahok menyadari hal itu sehingga ia tak pernah surut selangkah pun. Hal itu tentu tak mungkin terjadi jika Ahok tak memiliki sejumlah kekuatan yang menggumpal dalam spirit politiknya.

Pada hemat saya, visi politik Ahok berakar pada cara pandang terhadap manusia dan segala segi kemanusiaan (humanisme). Tentu, humanisme bukan dalam pengertian ilmiah diskursif, melainkan sebuah filosofi keberpihakan spontan pada kemanusiaan dengan sejumlah nilai yang menyertainya. Kemanusiaan itulah yang harus selalu diperjuangkan.

Bagi Ahok, kemanusiaan yang penuh hanya mungkin terwujud dalam wadah sosial-politik yang adil dan makmur. Politik adalah operasionalisasi kesejahteraan manusia secara politis. Sejumlah persoalan yang berpotensi mengurung kemanusiaan mesti segera ditangani. Itulah yang membuat Ahok berani untuk menabrak sejumlah mekanisme birokrasi yang bisa menghambat humanisasi dan sivilisasi melalui gebrakan-gebrakan politiknya.

Menghadapi sejumlah ironi sosial-politik Ibu Kota memerlukan amunisi dan energi politik yang besar pula. Hal itu mesti datang dari seorang pemimpin yang memiliki komitmen kuat pada kemanusiaan dan keberanian untuk melawan arus konspirasi politik. Opsi pada kemanusiaan mendorong Ahok untuk berani menghadapi risiko apa saja.

Semua mekanisme dan tata kelola politik yang kontraproduktif dengan upaya perwujudan kemanusiaan secara penuh, satu per satu dilabraknya dengan langkah dan kebijakan terukur dan transparan. Integritas politik Ahok justru terukur dalam keberanian dan komitmennya pada kebijakan-kebijakan politik yang prorakyat.

Politik Ahok itu fenomenal serentak kontroversial justru karena keberaniannya menjadi semacam 'martir' politik. Untuk politisi kebanyakan, keberaniannya boleh jadi sebuah langkah 'bunuh diri'.

Kita masih ingat bagaimana Ahok secara berani dan terang-terangan keluar dari keanggotaan Partai Gerindra atas alasan tertentu yang menurutnya bisa merusak masa depan politiknya, juga ada keraguan besar terhadap masa depan politik Ahok, ketika ia secara berani melontarkan kritik pedas terhadap DPRD DKI beberapa waktu lalu.

Ahok berani melabrak aturan yang mengurung perwujudan kemanusiaan. Saya kira itulah yang membuat elektabilitasnya terus melambung. Dukungan independen dan relawan 'Teman Ahok' terus mengalir. Sebuah penegasan atas daya tawar politiknya yang kian tak terbendung walau ia sendiri menyadari sejumlah perlawanan berat dari beberapa calon lain.

Kekuatan politik Ahok juga terlihat dari independensi sikap politik. Ia tak mudah terkooptasi oleh kepentingan pragmatis-sektarian, juga tidak mudah terjebak dalam arus politik kumuh. Ia selalu punya sikap dan pendirian sendiri menghadapi arus umum yang berlawanan dengan kepentingan bersama. Independensi perihal komitmen politik membuatnya tetap berdiri tegak di tengah badai korupsi dan konspirasi politik. Ahok tak mudah terjebak dalam arus kawanan parasit politik. Hal itu berpijak pada karakter ketokohan Ahok yang tak mudah terseret arus bersama.

Kekuatan mental dan karakter diri ini menegaskan satu sifat penting perihal kepemimpinan publik. Itulah ketegasan atau keberanian. Integritas dan segala komitmen ikutannya tak mungkin terlahir dari sosok pengecut atau hanya sekadar mencari titik keseimbangan semu. Stabilitas politik dimaknainya dalam sebuah keberanian untuk menciptakan perlawanan terhadap berbagai kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu serentak mencaplok kemakmuran bersama. Kejujuran saja tidak cukup. Ia perlu ditopang volume keberanian dan ketegasan sikap. Hal-hal itu tidak selalu lahir dari partai politik. Ahok sekaligus ingin memberi koreksi terhadap peran partai politik.

Daya tarik partai?

Dalam perjalanan sejarah bangsa ini, peran partai politik tidak menorehkan catatan menggembirakan sebagai agen pembaruan dan perubahan. Revolusi politik dan sejumlah pembaruan politik justru lahir dari organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok akademisi-cendekiawan, mahasiswa, dan lain-lain. Sosiolog Ignas Kleden malah menyebut inteligensia untuk menunjuk kaum terpelajar dan terdidik yang berperan sebagai ujung tombak perubahan

dan pembaruan dalam masyarakat (Harian Kompas, 19/2/2016). Reformasi atau bahkan revolusi politik 1998, misalnya justru dipelopori aliansi mahasiswa, bukan dari partai politik. Partai belum berhasil menjadi agen perubahan sosial dan politik.

Sejauh ini, sejumlah partai masih sibuk menyelesaikan pertengkaran internal antarelite yang terlibat dalam 'perang posisi'. Partai tak lebih dari kendaraan politik untuk meraup kekuasaan. Praktik-praktik kepartaian masih sarat aroma kepentingan jangka pendek. Tak jarang kita mendengar praktik jual-beli partai atau mahar politik jelang pemilu. Bersamaan itu, peran edukasi dan kaderisasi kian terjungkal. Partai lebih sibuk pada cara-cara kerja pragmatis.

Di tengah kondisi partai demikian, Ahok memakai pendekatannya sendiri. Ia bahkan berani mencalonkan diri dalam Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen pascaketidakjelasan sikap politik PDIP untuk memberikan dukungan kepada Ahok. Sebuah terobosan penuh risiko bagi masa depan politiknya, tetapi sekaligus 'ancaman' dan ujian bagi elektabilitas partai ke depan. Dengan ini, Ahok mau mengatakan partai itu tidak selalu harus 'disembah' jelang pemilu. Ahok ingin mengoreksi mekanisme pragmatis yang selama ini mewarnai komunikasi partai politik. Eksistensi partai bakal terancam jika mengabaikan peran politis untuk menyiapkan calon andal.

Buat Ahok, apa yang disebut integritas, keberanian dan komitmen pada kemanusiaan dapat menjadi amunisi politik tak terkalahkan. Saya boleh menyebut semua itu sebagai 'personalisasi' makna 'yang politik' (*the political*) yang bakal menjadi kekuatan baru demokrasi ke depan guna melawan arus konspirasi dan pragmatisme. Kekuatan figur independen Ahok bakal menguji kebenaran itu.

RD Silvian M Mongko, Pengamat Politik

MEDIA INDONESIA, 11 Maret 2016

Ahok dan Tuduhan Deparpolisasi

KEPUTUSAN Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 melalui jalur independen atau perseorangan telah menimbulkan berbagai komentar pro dan kontra. Bagi mereka yang mendukungnya, keputusan Ahok itu suatu langkah awal yang berani untuk bertarung di medan politik Jakarta yang penuh dengan intrik-intrik politik yang kadang tidak sehat.

Bagi mereka yang 'menerima dengan setengah hati', khususnya dari kalangan partai politik, langkah Ahok dipandang sebagai upaya deparpolisasi, tanpa menjelaskan apa itu deparpolisasi. Mengapa Ahok memilih jalur independen? Benarkah Ahok melakukan deparpolisasi? Apa positif negatifnya kepala daerah dari jalur independen?

Kita sering mendengar alasan Ahok memilih jalur independen, atau dalam bahasa hukum terkait pilkada disebut jalur perseorangan. Pertama, Ahok ingin menguji keseriusan anak-anak muda berlatar belakang berbagai suku dan agama yang menamakan dirinya Teman Ahok dalam mengumpulkan dukungan warga Jakarta melalui kegiatan #KTP untuk Ahok. Tantangan yang diajukan Ahok pada mereka ialah, jika Teman Ahok bisa mengumpulkan 1 juta fotokopi KTP yang sah, Ahok bersedia menjadi calon independen. Padahal, menjadi calon independen di Pilkada 2017 hanya membutuhkan 525 ribu fotokopi KTP atau 6,5% dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di DKI Jakarta. Jika Teman Ahok mampu mendapatkan 1 juta fotokopi KTP dengan sebaran yang merata di seluruh 5 wilayah Jakarta, itu merupakan modal awal yang baik buat Ahok.

Kedua, Ahok ingin mengurangi efek negatif dari penggunaan partai politik sebagai kendaraan untuk maju kembali pada Pilkada DKI Jakarta, antara lain mahar politik yang biasanya tinggi. Memang ada parpol yang sejak awal mendukung Ahok tanpa prasyarat, yakni Partai NasDem. Partai lain pun ada juga yang mendukung, seperti Hanura dan PDIP. Namun, karena proses pencalonan kepala daerah melalui parpol memang cukup lama dan rumit, Ahok lebih memilih menjadi calon independen. Apalagi, fotokopi KTP yang dikumpulkan Teman Ahok sudah mencapai sekitar 770 ribu.

Ahok banyak dicerca karena ia pernah menyatakan kalau dia maju melalui jalur partai, biaya politik untuk mendapatkan dukungan partai bisa mencapai Rp1 miliar! Walau ada kepala daerah yang membantah mahar itu, seperti yang diucapkan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan adanya kenyataan bahwa pada pilkada 2012 Jokowi-Ahok didukung PDIP dan Gerindra dengan spirit gotong-royong, isu mahar politik itu tetap ada walau sulit dibuktikan.

Ketiga, Ahok senang bahwa rakyat, khususnya anak-anak muda yang terdidik dan melek politik, tidak lagi alergi atau bahkan cuek alias tidak peduli pada jalannya politik di DKI Jakarta. Justru anak-anak muda ini aktif membantu Ahok mengumpulkan fotokopi KTP dengan biaya yang mereka

peroleh dari kreativitas dalam membuat dan menjual merchandise (produk suvenir) bergambar dan bertuliskan nama Ahok sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta.

Bukan deparpolisasi

Istilah deparpolisasi terkait dengan pencalonan Ahok pertama kali dimunculkan Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, yang juga Ketua DPRD DKI. Prasetio menilai adanya upaya deparpolisasi yang sedang berkembang di Indonesia. Padahal, keputusan Ahok untuk maju melalui jalur perseorangan atau independen bukanlah deparpolisasi.

Bila kita simak lebih dalam, terminologi deparpolisasi muncul pada era awal Orde Baru yang ingin mengikis habis pengaruh dan aktivitas partai-partai politik dalam sistem politik Indonesia saat itu. Dari segi bahasa, Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan arti deparpolisasi sebagai pengurangan jumlah partai. Era Orde Baru rezim Soeharto yang didominasi militer membuat dan memberlakukan kebijakan politik untuk mengikis habis pengaruh dan peran partai politik di Indonesia.

Langkah pertama deparpolisasi ialah adanya propaganda penguasa Orde Baru bahwa partai politik merupakan biang keladi dari kebobrokan politik di Indonesia, sejak era Demokrasi Liberal (Demokrasi Parlementer) sampai Demokrasi Terpimpin era Orde Lama.

Kedua, pemerintah melalui gagasan perwira intelijen Brigjen TNI Ali Moertopo menerapkan kebijakan pengurangan jumlah partai dari sembilan partai plus satu Golongan Karya (disebut sebagai golongan fungsional nonpartai) dua partai (PDI dan PPP) plus satu Golkar. Fusi partai politik yang dipaksakan itu telah berhasil memaksa seluruh partai Islam bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan semua partai nasionalis dan kristiani (PNI, Murba, IPKI, Parkindo, Partai Katolik) bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Tiga kekuatan politik itu diberi nomor peserta pemilu yang memiliki arti simbolis nomor 1 PPP, nomor 2 Golkar, dan nomor 3 PDI. Dengan demikian, ketika sistem politik berputar bagaikan baling-baling pesawat, yang tampak hanyalah Golkar.

Ketiga, pemerintah membuat aturan politik yang disebut deparpolisasi dan depolitisasi, yakni suatu kebijakan yang tidak membolehkan partai-partai politik membangun organisasi cabang dan ranting partai di bawah kecamatan (kelurahan dan desa/kampung).

Jika kita mengacu ke depolitisasi dan deparpolisasi itu, apa yang dilakukan Ahok bukanlah deparpolisasi. Sebetulnya, jika partai-partai politik memiliki kecerdasan politik dalam melakukan manuver menjelang pilkada, mereka tidak perlu takut pada calon independen/perseorangan.

Partai-partai politik dapat melakukan rekrutmen politik para bakal calon kepala daerah dan sosialisasi politik lebih awal sehingga tidak dikalahkan jalur perseorangan ini.

Munculnya calon perseorangan antara lain disebabkan citra partai politik yang buruk di mata masyarakat akibat tingkah laku korup anggota partai yang duduk di badan-badan legislatif dan eksekutif pusat dan daerah.

Partai juga dipandang tidak melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan publik. Sebaliknya, dalam pembuatan undang-undang dan peraturan daerah, partai-partai politik lebih mendahulukan kepentingan kelompok (partai atau gabungan partai) dan mereka yang pada saat pilkada atau pemilu (legislatif dan presiden) memberikan bantuan dana kampanye.

Indonesia, yang menganut sistem multipartai, seharusnya dapat mengurangi fenomena merebaknya kandidat independen pada pilkada karena berbagai kepentingan masyarakat dapat tertampung dari ideologi dan program kerja partai yang beragam itu. Kenyataannya, partai, di dalam mendukung kandidat kepala daerah (dan presiden), lebih didasari kepentingan pragmatis dan bukan bersifat ideologis serta program dari para kandidat. Dasarnya selalu elektabilitas pasangan calon dan bukan apa yang menjadi program kerja. Karena itu, jangan salahkan masyarakat jika dalam kasus-kasus tertentu, seperti di DKI Jakarta, mereka kali ini mencoba untuk mendukung kandidat independen.

Kasus Ahok hanyalah satu dari sedikit daerah yang memiliki calon independen. Secara kebetulan, Ahok didukung masyarakat karena akuntabilitas politiknya sebagai wakil gubernur dan kemudian gubernur DKI Jakarta yang dinilai amat baik. Dia maju juga bukan karena dia berasal dari kelompok masyarakat yang dominan baik dari segi suku maupun agama, bukan juga karena memiliki harta yang besar, melainkan karena kepercayaan publik. Tak mengherankan jika dalam menangkal propaganda politik atas dasar agama, mereka yang mendukung Ahok sudah mulai melakukan pre-emptive strike (serangan sebelum diserang) melalui tag-line #saya muslim tapi saya dukung Ahok.

Bakal calon independen sesungguhnya tidak selamanya baik, apalagi jika bakal calon independen itu lebih mendasari dirinya karena pernah memiliki kekuasaan yang melimpah. Misalnya, ia pernah menjadi pejabat sipil atau militer, berasal dari suku dan agama besar di daerahnya, memiliki kekayaan yang melimpah yang dapat digunakan untuk kampanye politik, dan juga memiliki konsultan politik serta jaringan yang dapat melakukan segala cara untuk memenangkannya menjadi kepala daerah.

Soko guru demokrasi

Suka atau tidak suka, partai politik harus tetap menjadi soko guru demokrasi. Demokrasi tidak akan berjalan baik tanpa partai politik. Namun, partai politik harus kita bantu agar menjadi partai yang modern dan aktivitas politiknya diperuntukkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan pengurus partai dan kelompok. Semua partai politik harus berbenah diri dan melakukan introspeksi diri mengenai apa yang salah yang mereka lakukan selama ini.

Fenomena Ahok merupakan tamparan dan cambukan bagi partai untuk semakin berbenah diri agar keberadaan mereka dalam sistem politik Indonesia menjadi suatu keniscayaan. Ahok, secara kebetulan, merupakan sosok pemimpin daerah yang jujur, berani mengambil risiko politik atas kebijakan yang diambilnya, dan bergerak cepat demi kepentingan rakyat Jakarta dan Indonesia.

Bayangkan jika calon perseorangan itu orang yang hanya mencari kekuasaan dan uang untuk diri dan kelompoknya yang melihat jalur independen ialah cara termudah untuk menjadi penguasa daerah. Jika itu terjadi, bukan demokrasi untuk kepentingan rakyat yang akan terjadi, melainkan kepala daerah yang menjadi predator. Artinya, melalui kekuasaan politik dan uang, ia akan menjadi penguasa yang otoriter dan korup. Seperti kata Larry Diamond, bila penguasanya sudah menjadi predator, masyarakatnya juga akan menjadi masyarakat predator (*predatory society*).

Ikrar Nusa Bhakti, Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI

MEDIA INDONESIA, 14 Maret 2016

Ahok dan Demokrasi

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju Pilkada DKI 2017 lewat jalur perseorangan terus menjadi sorotan dan menjadi "*trending topic*." Ahok mengibaratkan pilihannya seperti Presiden Soekarno yang diculik kaum muda ke Rengasdengklok, Karawang, Jabar.

Semula Bung Karno tidak ingin merdeka 17 Agustus 1945. Dia menunggu Jepang. Tapi anak-anak muda memaksanya memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus. Demikian juga anak muda "*Teman Ahok*," mendesak Ahok agar memilih jalur independen. Menurut Ahok, maju lewat PDIP membuka kesempatan lebih besar mempertahankan kursi DKI-1.

PDIP memenuhi syarat mengusung cagub sendiri di DKI. Mesin partai juga bisa digunakan untuk pemenangan. Ahok mengibaratkan maju lewat PDIP seperti naik mobil mewah. Sedangkan jalur independen bagaikan naik bus. Teman Ahok mengingatkan, kalau naik mobil bagus memang enak, tapi Ahok sendirian. Naik bus bersama masyarakat.

Ahok menambahkan, jika hanya mengejar jabatan, sudah lama masuk partai politik. Tidak heran, pilihan Ahok lewat jalur independen dianggap sebagai deparpolisasi. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ketika mengumpulkan para elite PDI-P Senin (7/3) malam, memerintahkan PDI-P DKI Jakarta memperkuat konsolidasi dan melawan deparpolisasi. Namun penilaian deparpolisasi itu sesunguhnya tidak terlalu tepat. Ada hukum positif yang dibuat parpol mengizinkan jalur perseorangan. Buktinya, pada pilkada serentak tahun 2015, ada 35% pasangan calon perseorangan. Malahan 14,4% mereka mengalahkan kandidat yang diusung parpol.

Memang dalam sistem demokrasi perwakilan seperti di sini, parpol tidak bisa diabaikan. Bahkan ada jaminan konstitusional dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*." Kemudian dalam Pasal 6A ayat (2) "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*."

Hanya, harus diakui, ada kejenuhan masyarakat terhadap parpol terutama perilaku mereka. Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, langkah Ahok seperti ingin memberi pelajaran kepada parpol agar tidak gengsi. Sebab banyak parpol merasa harus didatangi, bukan sebaliknya. Buktinya cagub DKI lain seperti Yusril Ihza Mahendra dan Adhyaksa Dault kini mempertimbangkan untuk mengikuti jejak Ahok memilih jalur independen. Ahok juga menegaskan, langkahnya bukan deparpolisasi. Dia tidak keberatan didukung Nasdem.

Ketika bersama Jokowi maju sebagai pasangan cagub dan wagub DKI 2012, mereka didukung PDIP dan Gerindra. Ahok diaggap sebagai kartu mati karena Tionghoa dan Kristen. Maklum etnis dan agama yang menempel pada Ahok dalam peta perpolitikan negeri ini, dianggap sebagai kartu mati

atau kendala. Meski menghadapi kampanye hitam, terkait etnis dan agama, syukurlah sebagian besar masyarakat Jakarta yang heterogen akhirnya memilih pasangan itu.

Meski hanya menjadi orang nomor dua, Ahok bukanlah bayang-bayang Jokowi. Dia memprakarsai transparansi semua agenda rapat dan kegiatan agar bisa dilihat publik di Youtube. Salah satu videonya, saat sedang 'mengajar' karyawan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI di Ruang Rapat Bappeda DKI, yang diunggah pada 8 November 2012, pada 29 November pagi, jumlah viewers-nya hingga 1,3 juta. Pamor Ahok pun melonjak drastis.

Setelah Jokowi menjadi presiden, bekas bupati Belitung Timur ini sejak 1 Juni 2014 menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI. Dia pada 24 September 2014 dilantik menjadi Gubernur DKI. Pelantikannya menjadi berita besar. Majalah Time membuat judul "*Indonesia Reaches Racial Milestone With Chinese Governor of Jakarta*" (Indonesia meraih batu loncatan dalam ras, dengan memilih Gubernur Jakarta dari etnis Tionghoa).

Meski ada ormas mencoba menolak pelantikan, juga karena sentimen agama, tak ada yang bisa menghalangi pelantikannya. Apalagi, demokrasi Indonesia bukanlah teokrasi atau berdasar agama, tapi berbasis pada pilihan rakyat. Siapa pun yang mendapat mandat langsung rakyat untuk menjadi pemimpin, tak akan bisa digagalkan. Ahok tak mau mengkhianati suara rakyat yang memilihnya.

Terkait parpol, Ahok memang kerap membuat langkah berani. Sosok kelahiran 29 Juni 1966 di Manggar, Belitung Timur itu berani mundur dari Gerindra. Padahal ketika masih jadi anggota DPR dari Golkar (2009-2014), Gerindra merayunya untuk mendampingi Jokowi dalam Pilgub DKI 2012. Setelah diantar ke kursi wagub, Ahok justru mundur dari Gerindra. Dia tak setuju kebijakan partai yang hendak mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD. Ahok berani melawan hegemoni parpol. Dia hanya loyal pada pemilihnya, bukan ke parpol pengusung.

Kepentingan Luas

Langkah Ahok sejak Wagub DKI menjadi bukti sosok yang bekerja untuk orang banyak dan kepentingan luas. Simak saja, baru genap 100 hari memimpin Jakarta per 26 Februari 2015 lalu, dia kembali berhadapan dengan para anggota DPRD DKI yang mengajukan hak angket untuk memakzulkan. Sebab Ahok menemukan ada dana siluman 12,1 triliun rupiah dalam draf APBD 2015. Salah satu yang membuat dia geleng-geleng kepala adalah proyek pengadaan buku Trilogi Ahok sebesar 30 miliar rupiah dalam RAPBD 2015. Tapi terbukti, pemakzulan akhirnya gagal.

Ahok juga terus mencoba mencari akar masalah banjir di Jakarta. Dia berani menggusur warga Kampung Pulo bahkan Kalijodo, dengan menyediakan rusun. Meski terus dicap kafir oleh kalangan tertentu, dialah gubernur pertama DKI yang memberangkatkan 40 penjaga mesjid Jakarta untuk umrah. Ahoklah yang membangun mesjid megah di Balai Kota. Dia pula

gubernur nonmuslim yang mengorbankan puluhan sapi tiap Idul Adha. Itu semua menjadi bukti, Ahok sama sekali tak tersandera etnis atau agamanya. Malah dia bisa melampaui semua ini seperti terbukti gajinya disihkan untuk sedekah, infaq dan zakat bagi orang miskin.

Di negara demokrasi, sebenarnya pertimbangan untuk menjadi pemimpin tak boleh lagi mengacu pada faktor primodial seperti ras dan agama. Ahok mungkin mirip Faruk Choudhury, wali kota Bristol yang muslim ketika terpilih pada 2013. Ahok mungkin juga mirip Lutfur Rahman, Wali kota muslim di Tower Hamlets, sebuah kota kecil London, Inggris. Ahok mungkin masih di bawah presiden ke-11 India yang beragama Islam, Abdul Kalam, yang menjabat 2002-2007. India mayoritas Hindu.

Jadi untuk negara yang sangat majemuk seperti Indonesia, ke depan jelas diperlukan pemimpin dengan kapabilitas, kompetensi dan menyejahterakan semua lapisan masyarakat. Jangan lagi pertimbangan berdasar primordialisme. Ahok sudah membuktikan lewat kebijakan dan aksi nyata untuk menjadikan Jakarta lebih baik. Warganya lebih sejahtera.

Meski ucapan Ahok kerap dinilai kasar dan arogan, namun terjadinya krisis kepercayaan kepada para pemimpin parpol yang kebanyakan korup, santun tapi munafik (antara ucapan dan tindakan bertolak belakang), membuat "*style*" atau gaya Ahok yang ceplas ceplos dan apa adanya, lebih disukai. Ahok juga "*nothing to lose*" terkait jabatan gubernur. Banyak warga DKI takut Ahok tak terpilih lagi pada Pilkada 2017, sehingga muncul relawan *Teman Ahok*. Mereka sukarela bekerja demi memenangkan Ahok.

Kita boleh berbeda pilihan politik, tapi jangan sampai mengorbankan martabat dan memecahbelah persatuan.

Poo Tjian Sie, Lulusan Beijing Language and Culture University

KORAN JAKARTA, 15 Maret 2016

Menanti Sang Penantang

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta baru akan digelar April 2017 dalam pilkada serentak kedua. Namun, gaungnya sudah terasa. Maklum, ini pilkada di ibu kota negara.

Sebagai petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah menyatakan akan maju lewat perseorangan, berpasangan dengan Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI. Sejak tahun lalu, komunitas Teman Ahok sudah bekerja keras mengumpulkan KTP para pemilih DKI agar Ahok bisa maju lewat jalur perseorangan. Mereka sadar bahwa Ahok bukan orang partai sehingga rentan tak mendapatkan dukungan partai. Sejauh ini satu-satunya dukungan partai yang telah diperolehnya hanya dari Nasdem yang hanya memiliki lima kursi di DPRD DKI Jakarta. Komitmen tersebut bahkan, diwujudkan dengan membentuk Muda-Mudi Ahok untuk membantu Teman Ahok.

Keputusan cepat Ahok untuk maju lewat perseorangan bisa dipahami karena syarat pencalonan perseorangan memang tidak mudah. Untuk DKI Jakarta, setidaknya dibutuhkan 532.210 KTP atau 7,5 persen dari jumlah pemilih. Sampai sejauh ini data yang tertera di situs temanahok.com sudah 784.977 KTP. Artinya sudah melampaui batas minimum persyaratan. Namun, pengumpulan masih dilanjutkan karena targetnya satu juta KTP.

Tak ada yang salah dengan pilihan Ahok untuk maju lewat perseorangan karena itu merupakan hak pribadi yang tak perlu digugat karena sesuai UU Pilkada. Pada Pilgub DKI Jakarta 2012 juga ada dua pasangan perseorangan, yakni Faisal Basri-Biem Benyamin dan Hendardji Supandji-Ahmad Riza Patria. Hanya saja, harus diakui bahwa ada sedikit komunikasi yang kurang baik antara Ahok dan PDI Perjuangan (PDI-P). Permintaan Ahok untuk memperoleh jawaban cepat dari PDI-P tentang dukungan pencalonannya dinilai telah mengganggu mekanisme yang ada dalam partai dan dianggap sebagai upaya untuk mendekonstruksi mekanisme yang berlangsung di internal PDI-P.

Petahana

Seperti halnya di banyak daerah, petahana jelas merupakan kompetitor terberat bagi sang penantang. Hal ini bisa dipahami karena ia memiliki popularitas, SDM, dan jaringan yang lebih baik daripada para penantangnya. Kinerjanya selama lima tahun merupakan modal besar yang bisa dijual kepada rakyat. Namun, bukan berarti telah pasti menang. Jika merujuk pada hasil pilkada serentak 9 Desember 2015, mayoritas petahana memang lebih unggul. Dari 82,5 persen petahana yang ikut pilkada serentak tersebut, 63,2 persen di antaranya menang.

Sebagai kepala daerah, Ahok termasuk paling kontroversial. Karakternya yang meledak-ledak dan tak jarang dengan "bahasa pasar" merupakan fenomena yang tak biasa di kalangan pemimpin pemerintahan. Bagi sebagian orang, karakter Ahok tersebut dipandang sebagai kelemahan utamanya.

Sebab, ia bukan saja dinilai telah melabrak tata krama dan kesantunan pemimpin pemerintahan, melainkan juga tata nilai masyarakat Indonesia. Kepala daerah dianggap bukan sekadar pemimpin pemerintahan, melainkan juga teladan (*role model*) bagi rakyat yang dipimpinnya.

Bertentangan dengan hal tersebut, sebagian publik lainnya bersikap permisif. Terutama bagi kalangan muda. Menurut mereka, hal itu bukan isu krusial karena dilakukan untuk membenahi kebobrokan birokrasi dan ketidaktertiban kota. Dengan ketegasan dan karakternya itu, Ahok justru dinilai bukan pemimpin hipokrit yang retorikanya indah, tapi rasanya pahit. Di mata mereka, Ahok justru berhasil melakukan sejumlah terobosan, seperti penertiban pasar-pasar tradisional dan pedagang kaki lima (PKL), masalah angkutan jalan raya, khususnya transjakarta dan kopaja, pembersihan Ciliwung dan Waduk Ria-Rio, penyegelan Mal Tebet Green yang tak berizin, dan penggusuran lokasi prostitusi Kalijodo.

Keberhasilan lain yang juga dinilai fenomenal adalah dalam mengatasi masalah efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi. Umum diketahui bahwa korupsi, penyelewengan anggaran, dan pelayanan publik yang buruk telah menjadi noda hitam birokrasi dan pemerintahan. Dalam hal ini, Ahok dinilai berhasil menurunkannya dengan memperkenalkan e-budgeting dan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran. Nyanyiannya tentang dana siluman dan masalah UPS (*uninterruptible power supply*) yang diduga juga melibatkan oknum-oknum di DPRD tak urung telah menimbulkan perseteruan dan ketidakharmonisan hubungan antara Ahok dan DPRD. Sementara, di dalam pemerintahannya, banyak pejabat yang juga tak nyaman dengan kebijakan Ahok, khususnya, karena sikapnya yang sering bongkar pasang pejabat untuk mencari orang yang sesuai dengan visi, misi, dan cara kerjanya. Wali Kota Jakarta Selatan, misalnya, pernah dipecatnya karena dianggap tidak tegas.

Terlepas dari pro-kontra atas karakternya, Ahok jelas merupakan '"*musuh bersama*" bagi penantangnya, khususnya dari partai. Apalagi karena sikap Ahok yang dipandang kurang menghargai eksistensi fungsi dan peran partai. Sebagaimana diketahui, tak lama setelah menjadi gubernur, Ahok memutuskan keluar dari Gerindra, partai yang mengusungnya. Ia juga dinilai tak mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan mitranya di DPRD. Bahwa sampai hari ini belum satu partai pun yang mengumumkan pasangan calonnya (kecuali Nasdem), untuk satu hal bisa dimaknai sebagai kehati-hatian mereka dalam mempertimbangkan pasangan cagub-cawagub yang bisa mengungguli Ahok dan sesuai harapan pemilih DKI yang rasional. Terlepas dari "*karakter negatif*"-nya, para penantangnya harus bisa meyakinkan publik tentang konsep dan program konkret dalam membangun DKI Jakarta yang lebih baik daripada Ahok.

Selain itu, pasangan tersebut juga harus merupakan pasangan yang memiliki ketokohan kuat. Setidaknya ada tiga kriteria yang perlu diperhatikan partai dalam mengusung/mendukung calonnya. *Pertama*, sosok itu harus memiliki integritas yang kuat, yakni bersih, lugas, dan berani. Dalam era keterbukaan

dan kebebasan, yang dibutuhkan bukan sekadar pemimpin yang jujur, melainkan juga yang apa adanya, melayani, dan punya nyali besar. Apalagi di ibu kota negara yang disinyalir banyak mafianya. Namun, ini tak berarti harus kasar dan tak memedulikan sopan santun. *Kedua*, sosok itu harus memiliki rekam jejak yang baik sebagai referensi. Lebih utama yang pernah menjadi kepala daerah. Pengalaman karier Joko Widodo (Jokowi), misalnya, merupakan contoh nyata. *Ketiga*, selain dukungan partai, sosok tersebut merupakan tokoh yang merakyat dan bukan sosok yang tinggal di menara gading. Kemampuan pemimpin dalam menyerap aspirasi dan memahami kebutuhan rakyatnya merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat legitimasi dan karisma kepemimpinannya.

Penantang Ahok

Sejauh ini ada banyak nama yang meramaikan bursa cagub DKI, tetapi kebanyakan bukan kader partai besar yang berpotensi mengusung calonnya. Dengan 28 kursi di DPRD DKI, hanya PDI-P yang bisa mengusung cagub-cawagubnya secara sendiri. Partai lain harus berkoalisi karena syarat minimal pengajuan cagub-cawagub DKI Jakarta 22 kursi (20 persen). Namun, seperti halnya partai lain, PDI-P juga belum menentukan calonnya. Selain karena mekanisme partai, bagi partai salah satu masalah utamanya adalah soal tawar-menawar "*mahar politik*". Bagi publik, soal ini ibarat makhluk gaib yang hanya bisa diyakini adanya, tetapi sulit dibuktikan wujudnya, sebab tak satu partai pun mau mengakuinya.

Melihat sifat koalisi partai dalam pilpres maupun pilkada selama ini yang lebih bersifat pragmatis ketimbang ideologis, tak mudah memetakan secara pasti peta koalisi partai dalam Pilgub DKI. Bukan tak mungkin ada pula partai yang mengikuti jejak Nasdem mendukung Ahok. Namun, jika dilihat dari jumlah kursinya, boleh jadi setidaknya akan ada tiga pasangan calon penantang Ahok. *Pertama*, sebagai pemilik kursi terbesar (28 kursi), PDI-P boleh jadi akan maju sendiri dengan mengusung pasangan kadernya atau dengan memilih pendamping dari kalangan profesional/nonpartai. Bagi PDI-P, ini bukan hal aneh. Salah satunya adalah pasangan Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana yang memenangi Pemilihan Wali Kota Surabaya dalam pilkada serentak 2015.

Kedua, sebagai partai kedua terbesar, bisa jadi Gerindra juga akan mengajukan cagubnya. Namun, dengan 15 kursi di DPRD, ia harus berkoalisi dengan setidaknya satu partai menengah. *Ketiga*, seperti Pilgub DKI 2012, sebagai partai terbesar ketiga (11 kursi), tak tertutup kemungkinan PKS juga berpotensi mengusung cagubnya dengan syarat harus berpasangan dengan setidaknya dua partai lain. Akan tetapi, karena jumlah kursinya yang hanya berselisih satu kursi (11 kursi) dengan tiga partai lainnya (Demokrat, PPP, dan Hanura yang masing-masing 10 kursi), bukan tak mungkin PKS hanya akan menempatkan calonnya sebagai DKI 2.

Meski suku/etnis tak lagi menjadi unsur pokok, tidak berarti tidak penting. Isu representasi dalam politik masih menjadi salah satu pertimbangan

signifikan dalam pilkada. Ini bukan sekadar masalah kebinekaan, melainkan tentang strategi untuk memenangi kontestasi. Sebab, tidak semua pemilih DKI merupakan pemilih rasional. Sebagai gambaran, menurut Sensus Penduduk 2010, empat suku/etnis terbesar di DKI adalah Jawa (35,16 persen), Betawi (27,65 persen), Sunda (15,27 persen), dan Tionghoa (5,53 persen). Sebagian kekalahan Fauzi Bowo dan Nachrawi Ramli karena keduanya menafikan hal itu atau sama-sama Betawi.

Ahok sudah melempar tantangannya. Namun, sampai sejauh ini, kecuali Nasdem, tak satu partai pun yang telah mengumumkan calonnya. Bagi publik, lebih cepat lebih baik karena mereka akan lebih bisa mengenal calonnya. Tidak seperti orang membeli kucing dalam karung. Yang jelas, kehadiran calon perseorangan merupakan hal positif yang dapat mencegah partai untuk tidak mem-fait accompli rakyat dengan calon yang tak diinginkan. Sebab, tujuan pilkada langsung adalah untuk menghasilkan pemimpin terbaik, bukan semata-mata sekadar pergantian penguasa.

R Siti Zuhro, Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

KOMPAS, 15 Maret 2016

"Cina Baik-baik" vs "Cina Sok Jago": Pancingan Rasisme Sang Jenderal

HAJATAN pilkada DKI Jakarta belum lagi dimulai, tetapi kampanye hitam, provokasi, dan fitnah sudah mulai gencar ditebarkan. Misalnya sebuah berita dari PosMetro[1], yang dengan cepat tersebar ke mana-mana. Berita yang dimuat PosMetro itu sebenarnya hanyalah tentang status Facebook seseorang yang bernama Suryo Prabowo. Atau lengkapnya Letjen TNI (Pur.) Johannes Suryo Prabowo, mantan wakil kepala staf angkatan darat (Wakasad) dan mantan kepala staf umum (Kasum) TNI.

Dalam status Facebooknya, Suryo Prabowo menulis demikian, "Man-teman … Terutama #TemanAhok … Kalau sayang dgn teman2 atau sahabat dari etnis Tionghoa, tolong diingatkan agar jangan ada etnis Tionghoa yg "sok jago" ketika berkuasa atau dekat dengan penguasa. Kesian kan Tionghoa lainnya yg baik2 dan/atau yg miskin, kalo ada yg mau mbantai atau menjarah, mereka kan gak bisa kabur ke luar negeri Tolong jaga Bhinneka Tunggal Ika dan sama-sama membangun HARMONI DALAM KEBERAGAMAN. JSP #SaveNKRI"[2]

Status Surya Praboow ini sungguh mengganggu saya. Ia mengesankan dirinya bersikap netral, padahal sejatinya ia sedang melakukan insinuasi. Saya memutuskan untuk meletakkan status Facebook milik Suryo Prabowo ini ke dalam satu perspektif. Ini mengingat bahwa penulisnya adalah seseorang yang punya kehidupan publik sebagai mantan petinggi militer dan seorang politisi. Dia adalah lulusan Akabri terbaik angkatan 1976.

Dalam status tersebut ada juga gambar yang lumayan menyeramkan. Ada mayat terbakar. Ada toko yang dibakar. Di sana kemudian ia memajang tulisan seperti ini.

"Siapa bilang sejarah kekejaman thd etnis Cina tidak berulang?
Sepanjang penyebabnya berulang
Sejarah kelam pasti berulang
Sepanjang ada China sok jago, pasti …
China yang baik-baik jadi korban

Thn 1740-1743: 10.000 etnis China dibantai
Thn 1959 ribuan etnis China exodus ke RRC
Thn 1966 ribuan etnis China kembali ke RRC
Thn 1998 ribuan etnis China kabur ke LN"
Status ini bertanggal 15 Maret, 2016.

Keesokan harinya, 16 Maret 2016, Suryo Prabowo kembali ke luar dengan status yang sama. Dia mengingatkan Ahok dan Teman Ahok, sembari menegaskan dirinya pencinta NKRI dan sahabat semua suku, termasuk Tionghoa (sekarang dia pakai istilah ini).[3]

Pada status ini dia mengakui bahwa peran orang etnis Cina adalah sebagai saudagar. Dia bahkan mengatakan, jumlah orang pribumi yang menjadi

karyawan perusahan-perusahan milik orang Tionghoa lebih besar daripada jumlah PNS. “Jadi menurutku wajar bila saya tidak mau kalau warga TIONGHOA yg baik-baik jadi korban kelakuan orang-orang yg tidak bertanggung-jawab yg memprovokasi terjadi amuk massa.”

Selanjutnya Jenderal ini mengatakan, “Oleh sebab itu beberapa saat lalu saya mengingatkan (BUKAN MEMPROVOKASI) kepada … entah itu #TemanAhok #KawanAhok atau siapapun PENCINTA #Ahok supaya menghentikan kampanye yg berbau SARA, dan menghentikan kampanye yg dgn arogan MENANTANG sistem POLITIK dgn mengadu anggota partai vs kelompok independen pendukung #Ahok. Kampanye kalian seperti itu justru MEMPROVOKASI terjadinya KONFLIK HORISONTAL antar kedua pihak yg pro dan kontra #Ahok.”

Tidak lupa pula dia memosisikan Indonesia sebagai negara yang terancam. Inilah yang dia bayangkan akan terjadi:

“Bila ditahun 2017 nanti Ahok terpilih jadi Gubernur DKI Jakarta. Sangat mungkin pendukungnya eforia, dan bisa jadi Ahok makin “sok jago”. Bagaimana tidak ? Lha wong baru jadi gubernur karena dapat “muntahan” dari pak Jokowi yang jadi presiden saja, dia sudah sok jago seperti sekarang.

Situasi seperti itu bisa membuat “pribumi” dan kelompok muslim marah. Lalu terjadi akumulasi kemarahan akibat invasi buruh dari Negara China, dan keberpihakan pemerintah terhadap “modal” dari Negara China yang akan memicu terjadinya AMUK MASSA terhadap etnis Tionghoa di Jakarta, dan kota-kota besar lainnya. Sehingga menimbulkan kerugian dan korban jiwa yg masif tidak hanya dari etnis Tionghoa saja.

Ujung-ujungnya nanti yang disalahkan dan dituduh melakukan PELANGGARAN HAM adalah TNI/Polri karena dinilai melakukan PEMBIARAN.

Kondisi seperti itu tentu bisa dijadikan alasan bagi ” dunia”, terutama AS cs dan negara China, untuk melakukan operasi militer di wilayah NKRI dengan judul “Humanitarian Intervention”.

Telunjuk Suryo Prabowo dengan sangat telanjang menuding Ahok dan relawan pendukungnya. Tapi sesungguhnya dia juga tahu persis bahwa empat jari lainnya menunjuk pada dirinya. Dia mengklaim dirinya sebagai sahabat semua suku, termasuk Tionghoa (yang dia tulis dengan huruf kapital), namun dia tahu persis bahwa dia sedang mengaduk perasaan kebencian terhadap etnis Cina.

Suryo Prabowo dengan jelas membuat pembilahan tentang dua Cina (dia menambahkan huruf ‘h’). Yang satu adalah, yang menurutnya, ‘Cina baik-baik’ dan miskin yang akan menjadi korban kerusuhan karena tidak bisa lari ke mana-mana kalau diserang. Yang lain adalah ‘Cina yang tidak baik’, yaitu Ahok dan relawannya yang arogan dan sok jago.

Pembilahan ala Suryo Prabowo ini mau tidak mau mengingatkan saya pada kategori yang sama yang ditangkap oleh intelektual Afrika keturunan India, Mahmood Mamdani, ketika menelisik masalah terorisme pasca serangan 11 September 2001. Mamdani melihat usaha untuk membingkai konflik ini bukan dengan memisahkan antara ‘teroris’ dengan ‘masyarakat sipil’, namun dengan membikin penggolongan antara ‘Good Muslims’ dan ‘Bad Muslims.’ Jika pemilahan yang diambil adalah antara ‘teroris’ dengan ‘masyarakat sipil’ maka akan jelas tampak bahwa masyarakat sipil lah yang menjadi korban terorisme, tidak peduli apa agamanya, etnisnya, warna kulitnya, dan lain sebagainya.

Sedangkan pembilahan antara ‘*good Muslims*’ dan ‘*bad Muslims*’ itu mengharuskan suatu penyelesaian dengan ‘perang saudara’ antara keduanya. Negara-negara Barat mengharuskan dirinya untuk membantu pihak ‘good Muslims.’ Tentu saja, pembilahan ‘good and bad Muslims’ ini didefinisikan menurut kekuasaan tafsir negara-negara Barat itu sendiri.

Persis inilah yang dilakukan Suryo Prabowo. Dan saya kira banyak orang yang sepaham dengan dia baik dalam dinas militer maupun sipil. Pemikiran ini pulalah yang menjadi arus utama (mainstream) pada jaman Orde Baru. Ideal Suryo Prabowo ini adalah sama persis seperti idealnya Soeharto. Tidak terlalu mengherankan juga karena orang seperti Suryo Prabowo ini dididik oleh rezimnya Soeharto.

“*Cina yang baik*” adalah Cina yang hanya berdagang, yang punya toko, yang membikin perusahan, yang menjadi distribusi barang dan jasa. Orang akan menjadi Cina yang baik sepanjang dia tetap berada pada koridor itu. Dan dia akan menjadi Cina yang teramat baik kalau dia menjadi ‘kroni.’ Kosa kata ini seperti lenyap ditelan bumi. Walaupun sebenarnya masih ada dan tetap subur. Kroni artinya adalah Cina yang berdagang dengan perlindungan kekuasaan dari orang kuat (biasanya militer dan pribumi) yang menjadi konco-nya.

Sedangkan ‘Cina yang buruk’ adalah Cina yang masuk ke dalam dunia politik. Sebenarnya tidak saja politik, tetapi juga dunia yang menyentuh kehidupan publik. Yap Thiam Hien adalah Cina yang buruk karena menjadi pembela lawan-lawan politik militer Orde Baru. Demikian pula dengan Arief Budiman atau adiknya Soe Hok Gie. Sebaliknya, Liem Bian Kie, sekalipun masuk ke dunia politik bisa menjadi Cina yang baik karena bisa diajak cincai-cincai membangun Golkar. Akhirnya dia pun menjadi Yusuf Wanandi. Demikian pula dengan Harry Tjan Silalahi (Tjan Tjoen Hok). Namun toh, diakhir kekuasaan Soeharto, mereka berdua ini menjadi ‘Cina yang buruk’ lagi karena berani menentang kekuasaan Soeharto yang pernah dibantunya.

Dalam kerangka inilah Ahok diletakkan. Ahok tidak saja Cina yang buruk. Dilihat dari kacamata Suryo Prabowo, dia adalah Cina yang amat buruk karena dia ‘sok jago.’ Ini adalah kata lain dari ‘mentang-mentang’ karena mendapat kekuasaan.

Cara berpikir seperti ini sesungguhnya sangat rasialis. Orang Cina tidak boleh memiliki kekuasaan politik. Karena mereka itu 'pendatang' (sekalipun sudah hidup di bumi Nusantara ini selama sekian puluh atau bahkan ratusan tahun), mereka itu 'minoritas' (sekalipun pengaruhnya dalam bidang pemikiran terbentang luas dan sangat mayoritas), dan mereka itu 'orang lain.' Orang Cina harusnya tetap berdagang saja. Dan, tentu saja, akan lebih baik kalau menjadi kroni.

Namun harus diingat bahwa pola berpikir seperti ini tidak hanya milik kaum seperti Suryo Prabowo saja. Banyak juga orang Cina punya pikiran yang sama. Mereka kuatir kalau ada orang Cina yang berpolitik maka konsekuensinya akan menimpa orang Cina yang lain, yang tidak tahu apa-apa. Jaya Suprana, misalnya, pernah menulis surat tentang kekhawatirannya pada Ahok. Menurut Suprana, ucapan dan tingkah Ahok yang kontroversial akan membahayakan kepentingan orang Cina pada umumnya.

Jangan ditanya landasan sosiologis atau historis dari cara berpikir seperti ini. Rasisme tidak memiliki landasan apapun kecuali prasangka dan kebencian. Diatasnya adalah adalah nafsu untuk berkuasa. Rasisme adalah kehendak berkuasa – atau menunjukkan kekuasaan – atas dasar prasangka dan kebencian.

Bukankah semua kerusuhan anti-Cina itu terjadi sebagai pelampiasan kebencian akan status ekonomi orang Cina? Disinilah sebenarnya inti dari insinuasi rasial Suryo Prabowo terhadap Ahok dan kaum relawannya TemanAhok itu. 'Cina yang baik' itu harus terus menerus berada dalam ghetto ekonomi karena dengan demikian Cina mudah dikontrol. Sepanjang orang Cina hanya mengurusi dagangnya, menumpuk harta dan menjadi kaya raya, maka kerusuhan rasial yang bertindihan dengan kesenjangan ekonomi itu dengan mudah disulut. Persoalannya adalah siapakah yang menyulut? Sementara banyak kerusuhan sosial ini pelakunya adalah gerombolan massa, maka penyulut itu biasanya adalah apa yang disebut oleh para ahli kerusuhan sosial sebagai 'riots entrepreneurs.' Siapakah yang punya kemampuan itu? Jelas, mereka yang punya kontrol terhadap kekuasaan politik.

Orang yang berpikir dalam aras ini tidak akan bisa mengerti bahwa jalan terbaik untuk mencegah terjadinya kerusuhan anti-Cina adalah dengan memberikan hak-hak kewarganegaraan yang sama kepada orang Cina. Termasuk didalamnya untuk berpolitik dan mengabdikan hidup untuk kepentingan publik. Ketika orang Cina diberi hak kewarganegaraan yang sama maka ketika itu juga dia menjadi bagian dari masyarakat sipil. Dia tidak lagi terisolasi dalam ghetto ekonominya.

Dan lebih sulit lagi legitimasi untuk menyulut kerusuhan rasial. Bukankah ketika Orde Baru yang rasis itu jatuh dan orang Cina mendapat kesempatan untuk memangku jabatan publik (Ahok salah satunya!), hampir tidak ada lagi kerusuhan rasial terhadap etnis Cina? Itu terjadi karena sudah sangat

berkurang proses ‘pencina-cinaan’ orang Cina, sebuah proses yang menjadikan Cina hanya sebagai simbol keserakahan ekonomi.

Dengan menjadi politisi, orang Cina mengemban tanggung jawab tidak lagi sebagai orang Cina yang serakah, tetapi juga sebagai bupati, walikota, gubernur, menteri, anggota parlemen, dan lain sebagainya. Dia akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan jabatan publik yang diembannya. Perlakuan yang diterima pun sama seperti warga negara lainnya. Walikota etnis Cina yang korupsi, misalnya, akan diperlakukan sebagai walikota yang korup. Dia adalah koruptor. Titik. Bukan karena dia berasal dari etnis Cina.

Apa yang dilakukan Suryo Prabowo ini adalah apa yang umum dikenal sebagai ‘race baiting.’ Dia dengan sadar menuduh pihak lain, dalam hal ini Ahok dan TemanAhok, sebagai pihak yang memakai isu SARA dalam kampanye. Sementara, Suryo Prabowo sendiri berusaha tampak netral, seolah-olah bersahabat dengan siapa saja, mengagungkan Bhineka Tunggal Ika, tidak bias. Namun persis pada saat bersamaan dia juga mengingatkan khalayak bahwa orang atau golongan yang dia sasar adalah etnis Cina. Dia melakuan ‘pencinaan’ terhadap Ahok dan TemanAhok. Suryo Prabowo bahkan maju lebih jauh dengan mengklaim bahwa mereka ini bukan dari jenis ‘Cina yang baik’ Race baiting adalah rasisme. Pengucapnya adalah rasis. Sesederhana itu.

[1] http://www.posmetro.info/2016/03/ingatkan-ahok-suryo-prabowo-kalau.html

[2]https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207471977815845&set=a.10206870547300458.1073741826.1180308793&type=3&theater

[3]https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207482099748887&set=a.10206870547300458.1073741826.1180308793&type=3&theater

Made Supriatma, Peneliti Masalah-Masalah Politik Militer; Jurnalis Lepas

INDOPROGRESS, 17 Maret 2016

Denuklirisasi dan DeAhokisasi

HARI-HARI ini, lima tahun lalu, Jepang dikejutkan dengan gempa 8,5 skala Richter yang diikuti tsunami yang menyapu pantai timur Jepang bagian utara. Tsunami juga menyebabkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima mengalami kecelakaan parah setingkat kecelakaan Chernobyl di Ukraina, bekas Uni Soviet, April 1986. Pascakecelakaan itu, publik Jepang menolak keras diteruskannya kebijakan nuklirnya yang sudah berjalan sekitar 50 tahun lamanya. Hampir setiap hari ada demonstrasi antinuklir.

Bahkan, hingga setahun pascakecelakaan itu, tiap Jumat sore ada demonstrasi di kantor pusat Tokyo Electric Power Plant (TEPCO), PLN-nya Tokyo yang memiliki PLTN Fukushima. Kebetulan lokasinya tidak jauh dari kantor-kantor pemerintahan, termasuk kantor Perdana Menteri sehingga para pedemo kerap berbaris rapi meneriakkan yel-yel dan membawa spanduk antinuklir di sekitaran kantor Perdana Menteri melewati kantor-kantor pemerintahan lainnya hingga ke kantor TEPCO. Melihat publik yang mungkin belum puas karena belum ditetapkannya kebijakan zero nuclear, politisi mengambil inisiatif untuk mengangkat isu denuklirisasi ini dalam pemilihan Gubernur Tokyo, Februari 2014.

Tidak tanggung-tanggung, dua mantan Perdana Menteri bergabung dalam satu tim. Perdana Menteri 1993 hingga 1994, Morihiro Hosokawa, dicalonkan menjadi Gubernur Tokyo dengan dukungan penuh Perdana Menteri 2001 hingga 2006, Junichiro Koizumi, dalam tim suksesnya. Posisi Gubernur Tokyo dianggap strategis dari sisi denuklirisasi mengingat Pemerintah Metropolitan Tokyo ialah salah satu pemegang saham utama di TEPCO. Pesaingnya, Yoichi Masuzoe, mantan Menteri Kesehatan, menganggap isu energi nuklir bukanlah hal krusial dalam pemilihan Gubernur Tokyo.

Soalnya, energi nuklir bukan hanya masalah orang Tokyo saja, melainkan juga menyangkut kepentingan nasional yang lebih luas. Akhir cerita, Hosokawa tidak terpilih menjadi Gubernur Tokyo. Dia tidak berhasil membawa isu denuklirisasi untuk membuatnya terpilih sebagai Gubernur Tokyo. Gaung penolakan masyarakat yang meluas terhadap kebijakan nuklir Jepang pasca-Fukushima ternyata tidak serta-merta membuat publik Jepang memilih calon gubernur yang membawa isu denuklirisasi. Publik Jepang berpikir sederhana saja.

Jika selama kurang lebih 50 tahun ini Jepang tergantung dengan PLTN, kemudian dihilangkan secara tiba-tiba oleh kebijakan politisi, bagaimana mereka nanti mendapatkan listrik yang murah dan tidak pernah biarpet? Meski pasca-Fukushima nuklir menjadi momok kebanyakan masyarakat Jepang, mereka tetap realistis. Yang penting listrik tetap murah, tidak pernah mati, dan ekonomi berbasis industrinya tidak terganggu.

Demikianlah jalan berpikir masyarakat selalu sama di mana-mana, sederhana saja, tapi bukan berarti menganggap remeh. Hal yang sama sepertinya akan terjadi di pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2017

mendatang. Sepintas, petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berada di ujung tanduk setelah memutuskan diusung secara independen di pilgub mendatang. Sebelumnya, Ahok telah dikenal kontroversial karena sikapnya yang tidak seperti politisi kebanyakan. Bicaranya ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling, dan tidak takut untuk ribut dengan siapa pun jika menyangkut amanah yang diembannya.

Ahok tercatat pernah bersitegang dengan DPRD DKI yang oknum-oknumnya diduga bermain dalam pembahasan Raperda. Pernah juga dengan oknum-oknum birokrat dari tingkat daerah hingga pusat yang dianggapnya menghalangi terlaksananya sumpah jabatan secara amanah. Tak terkecuali, kalangan partai politik di mana para anggota DPRD tadi berasal.

Pencalonannya lewat jalur independen berusaha dihalang-halangi lawan-lawan politiknya. Paling tidak dengan mendemotivasi kelompok relawan yang bekerja keras mengumpulkan syarat KPUD untuk pengajuan calon gubernur independen. Mulai dari hal yang sifatnya teknis seperti pengumpulan berkas dan proses verifikasi oleh KPUD hingga hal yang sifatnya filosofis dalam tata negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Pencalonan Ahok lewat jalur independen dianggap mengecilkan arti partai politik (parpol) yang dikhawatirkan akan mengganggu tata kelola pemerintahan daerah yang semestinya terdiri dari pemda dan DPRD.

Padahal pencalonan secara independen telah diatur oleh undang-undang sebagai proses politik yang sah. Muncul kemudian istilah deparpolisasi. Padahal, pintu parpol untuk mendukung Ahok dalam pilgub mendatang masih terbuka lebar meskipun untuk mengusungnya sudah tertutup. Mengusung berarti mendaftarkan sebagai bakal calon gubernur ke KPUD. Lawan-lawan Ahok lupa bahwa masyarakat tidak bodoh. Sebagaimana di Tokyo, masyarakat Jakarta berpikir sederhana saja.

Apakah selama ini masyarakat menghubungi wakil rakyat atau parpol-parpol saat terjadi banjir? Apakah selama ini masyarakat menyampaikan protes pada parpol saat bus Trans-Jakarta tidak kunjung diganti yang baru? Demikian pula apakah selama ini masyarakat mengadukan oknum di kelurahan dan kecamatan saat mereka dimintai pungli?

Jadi, kalau masyarakat Tokyo saja melawan rasa takutnya pada radiasi nuklir akibat kecelakaan Fukushima dengan bersikap realistis memilih calon gubernur yang pronuklir, apakah kira-kira saat ada calon gubernur yang dalam waktu relatif singkat telah memperlihatkan kinerja nyata dalam mengatasi banjir, transportasi publik, dan reformasi birokrasi, masyarakat Jakarta membiarkannya tidak terpilih lagi dengan berbagai alasan? Sepertinya masyarakat Jakarta tidak kalah cerdas dengan masyarakat Tokyo dalam hal ini.

Muhammad Kunta Biddinika, Doctoral Student Takahashi Laboratory Department of Environmental Science and Technology Tokyo Institute of Technology

MEDIA INDONESIA, 17 Maret 2016

Pembelajaran Politik dari Perubahan di Dunia Bisnis

Fenomena unik menghiasi dunia bisnis saat ini. Uber yang sama sekali tidak memiliki aset berupa taksi adalah perusahaan taksi terbesar di dunia. Bahkan, nilai perusahaan yang baru berdiri kurang dari delapan tahun ini sebesar 68,6 miliar dollar AS, lebih besar dibandingkan nilai perusahaan dari raksasa otomotif Amerika, yaitu Ford, General Motors, dan Chrysler.

AirBnB saat ini sudah menjadi perusahaan penyedia akomodasi terbesar di dunia walaupun tidak memiliki aset berupa hotel dan properti. Alibaba yang didirikan oleh Jack Ma pada tahun 1999 saat ini adalah toko ritel terbesar di dunia walaupun juga tidak memiliki aset berupa toko. Kapitalisasi pasarnya sudah melebihi toko buku online terbesar di dunia, Amazon, yang juga tidak punya aset fisik berupa toko buku.

Di ranah nasional fenomena serupa juga terjadi. Go-Jek sudah bukan lagi hanya perusahaan "ojek" terbesar di Indonesia, melainkan sudah merambah ke jasa logistik (GoBox), pengiriman makanan (GoFood) bahkan sampai ke jasa pijat (GoMassage). Padahal, mereka juga tidak memiliki aset berupa kendaraan. Traveloka adalah perusahaan penyedia layanan tiket pesawat dan hotel terbesar di Indonesia, mengalahkan para pemain tradisional travel agent seperti seperti Anta Group, Panorama, dan Bayu Buana. Bukalapak yang sama sekali tidak punya lapak adalah pasar daring (online marketspace) terkemuka di Indonesia yang menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen.

Perubahan yang dramatis ini tentu menggoyang kemapanan para pemain tradisional di industri masing-masing. Sumber keunggulan bersaing (*competitive advantage*) tradisional kelihatan menjadi usang dengan munculnya pemain-pemain baru yang berbasis tehnologi. Disruptive innovation ini mengubah tatanan bisnis (*business landscape*) dan bahkan menjadikan bisnis semakin sulit dan rumit untuk diramalkan.

Yang bakal memenangkan persaingan ke depannya adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan "*dunia baru*" yang semakin abstrak. Dalam sejarahnya, perusahaan-perusahaan raksasa tradisional memang cenderung kaku dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Nokia dan Kodak adalah contoh raksasa yang tumbang oleh perubahan.

Apakah fenomena dalam dunia bisnis ini akan menular ke dunia politik? Kalau dalam bisnis para pelaku memperebutkan sumber keunggulan bersaing (*competitive advantage*), dalam politik yang diperebutkan adalah sumber keunggulan politik (*political advantage*). Secara tradisional, satu-satunya sumber keunggulan politik adalah melalui partai politik.

Fenomena Teman Ahok

Fenomena Teman Ahok bisa menjadi contoh yang menarik sebagai sumber keunggulan politik yang baru. Di satu sisi pemilihan kata "Teman" menunjukkan egaliterisme dan kesetaraan, bukan kata sukarelawan atau

pendukung. Sampai saat ini, Teman Ahok sudah mampu mengumpulkan lebih dari 700.000 KTP dukungan untuk Ahok walaupun secara organisasi Teman Ahok jelas bukan partai politik yang memiliki massa tradisional dan modal politik yang jelas. Dukungan inilah yang membuat Ahok memilih untuk mengajukan diri sebagai calon Gubernur DKI pada tahun 2017 melalui jalur perseorangan.

Yang menarik untuk dicermati adalah reaksi dari partai politik yang tentu saja sangat berkepentingan dengan pemilihan Gubernur DKI. Kesuksesan dalam pemilihan Gubernur DKI tahun 2017 bisa menjadi barometer dan modal dasar menghadapi pemilu nasional tahun 2019.

Sebagai partai kecil yang hanya memiliki 4 kursi di DPRD DKI, Nasdem melakukan *strategic response* yang sangat jitu, yaitu memutuskan untuk bergabung dan mendukung pencalonan Ahok melalui jalur perseorangan. Nasdem bahkan mendirikan Muda Mudi Ahok untuk mengamankan pengumpulan dukungan langsung dari masyarakat untuk mencapai target 1 juta KTP. Dengan mendukung Ahok, secara otomatis citra "*bersih*" dan "*bekerja untuk rakyat*" yang selama ini melekat pada diri Ahok langsung dimiliki oleh Partai Nasdem.

Sebagai partai kecil, Nasdem menyadari bahwa tidak memiliki peluang untuk mengusung calon sendiri. Dari ranah manajemen stratejik, langkah Partai Nasdem ini sangat cerdik. Ibaratnya dengan kekuatan kecil yang dimiliki, Partai Nasdem mampu "*mengeksploitasi peluang*" yang tersedia. Menang atau kalah tidak menjadi persoalan bagi Partai Nasdem, tetapi citra positif sudah dikantongi di awal. Ini adalah modal dasar yang luar biasa dalam mengamankan posisi partai di 2019.

Reaksi strategis yang berbeda dijalankan oleh PDI Perjuangan. Dari sisi sumber daya, PDI Perjuangan memang memiliki posisi yang lebih strategis dibandingkan dengan Partai Nasdem. Dengan jumlah kursi 28 buah, PDI Perjuangan bisa mengusung calon sendiri. Di dalam tubuh PDI Perjuangan sendiri ada mekanisme partai yang mesti dijalani sebelum memutuskan untuk mendukung Ahok. PDI Perjuangan tentu tidak bersedia "disetir" Ahok untuk hanya mendukung, tetapi mereka lebih memilih untuk mengusung pasangan Ahok dan Djarot. Keterdesakan dan ketidakpastian yang menjadi ciri khas perubahan kelihatannya menjadikan Ahok lebih memilih jalur perseorangan dibandingkan menunggu untuk menjadi "petugas partai" yang ditempatkan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang juga belum pasti.

Di sisi lain, Partai Gerindra juga menghadapi dilema yang cukup besar. Partai Gerindra sudah merasa dikhianati dan ditinggalkan oleh Ahok. Tentu tidak elok kalau Partai Gerindra kemudian memutuskan untuk mendukung Ahok. Sebaliknya secara kalkulasi politik, peluang Ahok untuk memenangkan Pilkada DKI tahun 2017 sangat besar. Calon-calon yang selama ini digadang-gadang oleh Partai Gerindra tidak ada yang mampu bersaing melawan Ahok dari sisi elektabilitas.

Kondisi yang serupa dihadapi oleh partai-partai Islam, seperti PPP, PAN, dan PKS. Gembar-gembor mereka bahwa sebaiknya DKI Jakarta sebagai barometer Indonesia dipimpin oleh seorang muslim menyulitkan mereka untuk mendukung Ahok. Persoalannya adalah mereka juga tidak memiliki calon yang mampu bersaing melawan Ahok.

Partai Golkar dan Demokrat yang belum menunjukkan sikap yang jelas. Kelihatannya konflik internal Partai Golkar masih lebih menyita perhatian dan energi mereka. Sementara Demokrat memang terkenal lambat dalam mengambil keputusan. Ibaratnya apa pun keputusannya, mereka sudah ketinggalan kereta.

Di sisi lain fenomena sukarelawan dalam sejarah perkembangan politik Indonesia adalah fenomena yang menarik. Sebelum era Joko Widodo, sukarelawan identik dengan mahasiswa. Contoh tumbangnya Orde Lama dan Orde Baru juga dimotori oleh sukarelawan yang notabene adalah gerakan mahasiswa. Relawan ini seolah-olah hanya muncul dalam peristiwa-peristiwa besar sejarah republik ini.

Pasca reformasi gerakan sukarelawan tidak hanya didominasi oleh mahasiswa, tetapi oleh kaum muda yang secara karakteristik memang memiliki kecenderungan suka untuk mendobrak kemapanan. Salah satu kiprah awal yang teramati tentang fenomena sukarelawan pasca reformasi adalah terbentuknya satgas yang mendukung ketika posisi politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terancam. Saat itu peranan sukarelawan langsung kempis ketika Gus Dur benar-benar lengser.

Peranan sukarelawan yang paling fenomenal adalah ketika pemilihan presiden tahun 2014. Walaupun sangat berperan dalam memenangkan Jokowi melalui "*Salam Dua Jari*", saat itu gerakan sukarelawan masih didominasi oleh gerakan moral. Yang mengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden tetap partai politik. Fenomena Teman Ahok adalah fenomena yang berbeda. Dalam hal ini peran Teman Ahok bahkan seolah-olah "bersaing" langsung dengan partai politik dalam mengusung calon Gubernur DKI 2017.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah fenomena dalam bisnis yang menular ke dunia politis itu sebuah bubble atau memang dunia sudah berubah. Sejarah yang akan menjawabnya. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 bisa dilihat sebagai ajang pembuktian hipotesis atas meningkatnya peran sukarelawan dalam kancah perpolitikan Indonesia. Jika ternyata sukses, ini bisa menjadi ancaman besar sekaligus peluang bagi partai politik dan calon perseorangan. Pelajaran lanjutan dari dunia bisnis yang perlu dicermati oleh Ahok ataupun partai-partai politik dalam mengambil respons strategis menghadapi fenomena ini.

Dua pelajaran

Pelajaran pertama, salah satu pemegang saham terbesar dari Alibaba adalah Yahoo. Sementara pemegang saham Uber di antaranya Baidu dari Tiongkok

dan Google Venture. Investasi para raksasa inilah yang mendukung pertumbuhan perusahaan yang memang haus modal. Dalam ranah politik kita bisa mengambil pelajaran bahwa Ahok perlu tetap menjalin komunikasi yang erat dan harmonis dengan partai politik. Ini bukan hanya semata untuk mengamankan posisinya dalam pemilu, melainkan untuk memperlancar kerja sama dengan parlemen ketika terpilih nantinya. Pemerintahan daerah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan dari parlemen.

Pelajaran kedua adalah perusahaan seperti Google dan Microsoft tidak hanyut dan tenggelam dengan muncul pemain-pemain baru yang fenomenal. Mereka bahkan aktif mendanai dan mengakuisisi para inovator yang diyakini memiliki prospek bisnis yang luar biasa. Bisa dibayangkan bahwa mereka akan cepat menjadi usang apabila mereka tidak peduli dengan kemunculan para pendobrak kemapanan ini. Fenomena ini perlu dicermati oleh PDI Perjuangan sebagai "raksasa" di Jakarta. Pilihan strategis bagi PDI Perjuangan adalah mendukung Ahok apabila mereka memang tidak memiliki calon lain yang sepadan untuk disaingkan dan memiliki peluang untuk menang. Memang PDI Perjuangan memiliki pengalaman yang mirip ketika menghadapi pilkada DKI tahun 2012. Tawaran kursi wakil Gubernur DKI sudah ditangan apabila PDI Perjuangan bersedia mendukung Fauzi Bowo (Foke) sebagai Gubernur.

Saat itu tingkat elektabilitas Foke mencapai 45 persen dan jauh di atas tingkat elektabilitas awal Jokowi ketika baru pertama kali memutuskan untuk maju sebagai calon gubernur, yaitu hanya 7 persen. Sejarah membuktikan bahwa "langkah kuda" PDI Perjuangan dengan menggandeng Gerindra dalam mengusung pasangan Jokowi-Ahok mampu mengalahkan Foke yang didukung oleh semua partai lainnya. Bahkan, hanya dalam dua tahun kemudian, Jokowi berhasil memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2014. Tetapi perlu dicatat bahwa peta persaingan sudah berubah drastis. Pilihan strategis yang sama belum tentu membawa hasil yang serupa.

Memang tahun ini adalah tahun monyet yang melambangkan kegesitan. Yang akan menikmati kemenangan adalah yang gesit dan cerdas. Tetapi perlu diingat bahwa pilkada akan berlangsung di tahun 2017 ketika tahun monyet sudah berganti menjadi tahun ayam. Pembelajaran dari dunia bisnis perlu dicermati para aktor politik. Jangan sampai warga Jakarta kehilangan pemimpin yang hebat hanya gara-gara egoisme dan salah dalam mengambil langkah.

Harris Turino, Doctor in Strategic Management

KOMPAS, 18 Maret 2016

Tak Pilih Ahok, Memilih Ahok

Akhir pekan lalu, seusai memberi kuliah di Pascasarjana UGM kelas Jakarta, saya turun dengan satu lift bersama beberapa mahasiswa untuk pulang dari kampus yang terletak di Jalan Saharjo, Manggarai itu. Di dalam lift terjadi pembicaraan. ”*Eh, jadi kamu pilih siapa pada Pilgub DKI besok*?” tanya seorang mahasiswa kepada seorang mahasiswi. ”*Aku tak pilih Ahok*,” jawab mahasiswi yang ditanya itu. Karena jawaban ”*Aku tak pilih Ahok*” itu diucapkan dalam bahasa Jawa maka berarti mahasiswi itu akan memilih Ahok. Dalam bahasa Jawa kata ”tak” itu berarti akan. Seumpama sang mahasiswi tak mau memilih Ahok, tentu jawabannya (dalam bahasa Jawa), ”*Aku gak tak pilih Ahok*”. Mahasiswi itu pun menjelaskan alasannya dengan penuh semangat. Katanya, Ahok tegas dan berani melawan korupsi. Seorang mahasiswa lain menimpali.

”Kalau saya akan pilih Yusril, dia juga antikorupsi dan banyak pengalaman,” katanya dengan tegas. Yang ini dinyatakan dengan bahasa Indonesia yang jelas sehingga artinya pun jelas: dia akan memilih Yusril. ”*Yusril itu oye*, ” tegasnya. ”*Loh, Ahok bukan hanya oye tapi juga ayo*,” bantah si mahasiswi. Tiba-tiba seorang mahasiswa menyeletuk. ”*Kalau Pak Mahfud akan memilih siapa*?” tanyanya.

Saya agak kaget, mahasiswa-mahasiswa di lift itu pun melihat saya. Ada yang tampak heran karena ada mahasiswa menanyakan itu kepada dosen yang baru saja memberi kuliah Politik Hukum selama 2,5 jam. ”*Saya tidak akan memilih Ahok. Tidak akan*,” jawab saya. Mahasiswa-mahasiswa itu berebutan memberondong saya.

”*Mengapa? Apakah Bapak akan memilih Yusril? Apakah Bapak tidak setuju calon independen? Apakah karena akan terjadi deparpolisasi? Ataukah Bapak akan memilih Ahmad Dhani?” demikian berondongan mereka*. ”Saya tidak akan memilih Ahok. Saya juga tidak akan memilih Yusril, Dhani, Adhyaksa, Uno, atau siapa pun karena saya orang Yogya. Saya tak punya hak pilih di Jakarta. Saya ber-KTP Yogya,” kata saya.

Di antara mereka ada yang tersenyum-senyum, tetapi ada juga yang seperti agak kaget mendengar saya ber-KTP Yogya, padahal sudah lebih dari 15 tahun bertugas di Jakarta. Lift berhenti di lobi kampus, kami pun keluar menuju kendaraan masing-masing untuk pulang. Celotehan-celotehan yang hanya berlangsung beberapa saat itu cukuplah membawa saya merenung banyak hal.

Ternyata Pilgub DKI Jakarta bukan hanya ramai di koran, televisi, dan media sosial, tetapi riuh juga di jalanan, perkuliahan, warung makan, dan tempat-tempat lain. Banyak juga yang peduli pada soal deparpolisasi versus calon independen. Rasanya tidaklah perlu kita memperdebatkan, apakah munculnya calon independen harus berarti deparpolisasi.

Sebagai bagian dari sistem, keduanya harus dibiarkan berjalan tanpa dipertentangkan karena keduanya sama-sama konstitusional. Parpol adalah

bagian dari sokoguru demokrasi yang diniscayakan oleh konstitusi kita. UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyebut adanya parpol secara eksplisit, seperti yang dimuat di dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3). Oleh karena itu, tidak boleh ada deparpolisasi.

Parpol adalah instrumen utama demokrasi yang keberadaannya harus disehatkan dan dikuatkan. Deparpolisasi yang berdempetan dengan kebencian terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena dianggap sebagai sarang korupsi, tidak boleh diterus-teruskan. Teriakan-teriakan seperti yang muncul dalam berbagai dialog interaktif dan perang opini, "*bubarkan parpol, bubarkan DPR*" harus dihentikan.

Adalah lebih baik ada parpol dan DPR yang buruk daripada tidak ada parpol dan DPR. Itu dalilnya. Tidaklah terbayangkan akan seperti apa negara ini jika tidak ada parpol dan DPR, sebab bukan hanya kesewenang-wenangan yang akan merajalela, melainkan juga korupsi dan kolusi yang lebih menggurita. Maka itu, sudah tepatlah kita menganut prinsip demokrasi dengan instrumen, antara lain, harus ada parpol dan DPR menurut konstitusi kita. Sudahlah pasti, dalam keadaan seperti sekarang ini parpol dan DPR harus membenahi diri agar tidak dibenci oleh masyarakat.

Memang bukan rahasia, parpol dan DPR banyak melahirkan koruptor sehingga ada yang mengatakan dengan kasar bahwa parpol dan DPR itu tempat peternakan koruptor. Banyak yang hafal di luar kepala, nama parpol dan kadernya di DPR yang dipenjarakan sebagai koruptor. Semua parpol yang memiliki kursi atau berhasil mengirim wakil di DPR, sekarang ini telah memiliki wakil koruptor juga di penjara atau di rumah tahanan KPK. Meski begitu, tetap saja tidak boleh ada deparpolisasi. Pilihan konstitusional dan rasionalnya adalah menyehatkan parpol, bukan mengerdilkan, apalagi membunuhnya.

Munculnya calon independen adalah ihwal lain yang tak bisa dikaitkan dengan deparpolisasi. Pembukaan peluang bagi calon independen untuk berkontes dalam pilkada merupakan pintu masuk yang dibuka secara konstitusional bagi tokoh-tokoh perseorangan yang bagus, namun tidak bisa mendapat tiket dari partai. Hal seperti itu banyak sekali terjadi, tokoh yang baik dan diinginkan oleh rakyat ternyata tidak mendapat dukungan parpol.

Maka itu melalui Putusan No. 5/PUU-V/2007, MK membuka pintu hukum bagi masyarakat untuk mengajukan calon perseorangan yang tidak diusung oleh parpol, yang kemudian disebut sebagai calon independen. Ketentuan ini kemudian diadopsi di dalam UU Pilkada kita. Itu bukan deparpolisasi, tetapi perluasan kanal demokrasi.

Moh Mahfud MD, Ketua MK-RI 2008-2013

KORAN SINDO, 19 Maret 2016

Relawan dan Partai

Sekali lagi tentang kata deparpolisasi. Secara harfiah kata benda ini artinya 'pengurangan jumlah partai politik'. Tetapi, ia secara relatif tentu bisa juga ditafsirkan sebagai pengurangan pengaruh partai.

Agar kita paham, deparpolisasi pernah dilakukan ketika Orde Baru memaksakan fusi partai tahun 1973. Partai-partai yang ketika itu jumlahnya lebih dari 10 dipaksa bergabung berdasarkan pengelompokan/gabungan partai-partai nasionalis dan satu lagi berdasarkan agama Islam.

Maka sistem politik kita sering disebut dengan dua partai, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Golkar acap kali enggan disebut sebagai partai, lebih nyaman disebut sebagai golongan.

Kalaupun mau mencium jejak deparpolisasi, itu telah terjadi ketika Presiden Soekarno memberlakukan Dekrit 5 Juli 1959. Salah satu turunannya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 1959 yang melarang PNS golongan F ke atas untuk menjadi anggota partai.

Setelah Orde Baru berkuasa, seluruh perpres produk Dekrit 5 Juli 1959 ditinjau kembali. Apa lacur, deparpolisasi Orde Baru justru semakin menjadi-jadi melalui Peraturan Pemerintah No 6/1970. Kalau Perpres No 2/1950 melarang PNS untuk golongan-golongan tertentu, Peraturan Pemerintah No 6/1970 melarang tujuh jenis jabatan yang bersih dari parpol. Jenis jabatan itu di antaranya anggota ABRI, PNS hankam, hakim, jaksa, dan jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dengan kata lain, presiden pertama dan kedua republik ini sedikit banyak bersikap risi dengan "*parpolisasi*". Sikap risi itulah yang kita basmi bersama-sama melalui Reformasi 1998 yang menegakkan kembali kepartaian sebagai tujuan berbangsa dan bernegara.

Ruang publik telah terbagi rata antara partai dan kita rakyat yang tidak tertarik bergabung dengan partai. Toh, pada kenyataannya kita rakyat yang tak berpartai tetap memilih politisi pada setiap pilpres, pileg, ataupun pilkada. Fakta ini memperlihatkan bahwa politik bukan cuma monopoli partai. Partai dan politisi justru memperoleh legitimasi dari kita rakyat yang belum tentu ikut partai. Sayangnya, saat ini partai dan sebagian dari kita rakyat, yakni relawan, seolah seperti minyak dengan air. Partai bak balok es yang keras membeku, relawan ibarat minyak oli bekas yang tercecer ke mana-mana.

Partai entitas politik yang menyatukan para anggotanya dengan "*ideologi*". Khusus di negeri ini, ideologi itu rupanya, suka atau tidak, sudah sarat dengan kepentingan yang pragmatis dan transaksional.

Relawan tidak memiliki ideologi, hanya kepentingan yang bersifat sesaat. Sama dengan partai, kepentingan relawan kurang lebih juga bersifat pragmatis dan transaksional. Setelah merumuskan ideologi, partai menetapkan AD/ART yang mengikat. Mereka juga buka "cabang" ke

semua provinsi, lengkap dengan kepengurusan dari tingkat pusat hingga anak ranting.

Berhubung tidak punya ideologi, relawan mungkin tak perlu membuat AD/ART, membuka cabang atau membentuk pengurus yang sah dan didukung. Mungkin sekarang ini ada 1-2 kelompok relawan yang mengupayakannya, siapa tahu kelak pada tahun 2019 bisa ”naik kelas” menjadi partai. Bagi partai, ideologi, AD/RT, dan cabang masih belum cukup. Mereka wajib mengadakan berbagai pertemuan (kongres, muktamar, musyawarah, dan lainnya) dari tingkat paling rendah sampai pusat. Pengurus harus disegarkan secara rutin demi menjaga kelangsungan kaderisasi.

Relawan tentu tidak sekaku itu, cuma bisa ”ngumpul-ngumpul” jika dibutuhkan. Tapi yang berjuang untuk kemerdekaan bukan cuma partai, relawan juga ikut menyingsingkan lengan baju. Relawan kadang bersikap *self righteous* jika jagonya menang. Pengurus partai terbiasa menunggu instruksi alias tidak boleh mendahului sikap dan pernyataan resmi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP). Kalau lagi bete dengan pemimpin partai, kita bisa melancarkan demonstrasi mendatangi kantor mereka. Kalau bete sama pemimpin relawan yang menjadi pejabat publik, kita bingung mau ngapain?

Di negara-negara Barat, independensi merupakan alternatif ideologi ketiga terhadap sistem dua partai seperti Partai Independen di Inggris atau capres seperti Ross Perot di Amerika Serikat. Di negeri ini, independensi menyeruak antara lain karena kekecewaan terhadap partai. Apalagi ada sebagian kalangan menganggap relawan berperan sentral dalam memenangi Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014. Padahal, suara rakyatlah yang paling menentukan.

Independensi politik oleh relawan, juga partisipasi ”massa mengambang” seperti kita rakyat, akan semakin dinamis di masa mendatang akibat hiruk-pikuk pencalonan Pilgub DKI belakangan ini. Partai-partai hendaknya melihat fenomena ini sebagai pelajaran baru dalam demokrasi kita yang baru seumur jagung ini.

Relawan bukanlah ancaman atau lawan yang harus diversuskan. Relawan adalah kawan seiring-sejalan dalam proses memilih pemimpin-pemimpin, termasuk dari kalangan perseorangan, yang bertujuan memajukan serta menyejahterakan bangsa dan negara.

Budiarto Shambazy, Wartawan Senior Kompas

KOMPAS, 19 Maret 2016

Ahokisasi

SALAH satu *trending topic* sepekan terakhir di mediaa termasuk media sosial, adalah keputusan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju dalam pilkada DKI tahun 2017 lewat jalur independen. Gubernur DKI itu mengaku memilih yang gratisan untuk maju pilgub dengan dukungan 'Kawan Ahok' yang sudah menghimpun lebih 759 ribu fotokopi KTP dukungan dan akan dengan mudah menembus 1 juta. Sudah jauh melebihi syarat bagi calon yang maju tanpa lewat partai. Sudah menjadi rahasia umum untuk maju lewat jalur partai sangatlah mahal. Ada mahar politik dan biaya kampanye. Untuk ongkos saksi di TPS saja diperkirakan Rp 200 miliar belum yang lainnya. Darimana kelak uang itu dikembalikan? Belum lagi ikatan dari partai politik yang tentu akan menjadi beban tersendiri kalau sudah menjadi gubernur atau bupati/wali kota. Menentukan wakilnya pun tidak bebas. Fenomena ini kemudian ramai diperbincangkan sebagai upaya deparpolisasi. Sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai Ahokisasi.

Yakni keberanian untuk '*meninggalkan parpol*' dalam pilkada. Dan itu dimungkinkan oleh Undang Undang Pilkada setelah Mahkamah Konstitusi 'merevisi'nya. Sejarah politik di negeri ini juga sudah melahirkan kepala daerah yang terpilih lewat jalur independen. Sesuatu yang beberapa tahun lalu tampak mustahil. Di Jawa Tengah, pasangan Abdul Hafidz-Bayu Adriyanto memenangkan pilkada Kabupaten Rembang. Di daerah lain tercatat tidak kurang 15 kepala daerah yang terpilih tanpa melalui parpol. Maka ini adalah fenomena baru yang perlu dicermati dalam perpolitikan dan perkembangan demokrasi di tanah air. Ada beberapa hal yang bisa dicatat. Pertama deparpolisasi terjadi akhir akhir ini dalam wujud sikap masyarakat yang tidak terlalu percaya lagi kepada partai politik. Elit parpol cenderung kurang aspiratif dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri.

Kedua, elit parpol seringkali terlalu pragmatis dan lebih suka memilih orang yang bermodal besar untuk dicalonkan tanpa melihat integritas dan kompetensinya. Atau orang yang sekadar populer misalnya dari kalangan artis. Dalam konteks ini mereka seperti menghalalkan politik uang dan akhirnya berujung pada penyuburan praktek KKN.

Ketiga, kekritisan masyarakat semakin terlihat. Kalau lewat parpol dianggap sudah buntu mereka berani menyalurkan aspirasi lewat jalur lain untuk memperoleh pemimpin seperti yang diharapkan. Tidak korup, jujur dan benar-benar memihak kepada rakyat. Dari sana yang paling berkepentingan untuk melakukan introspeksi adalah partai politik.

Sikap Ahok yang berani meninggalkan parpol bisa jadi merupakan cerminan protes masyarakat sehingga dukungan murni yang mengalir akan sangat sulit dibendung. Partai politik selama ini kurang cekatan dan transparan dalam melakukan perekrutan calon pemimpin. Prosedur terlalu panjang justru menampakkan ketidakcerdasan. Bahkan ada yang masih melakukan tes psikologi dan potensi dasar. Padahal *track record* adalah segalanya.

Pemimpin tidak bisa dicetak dan dilahirkan di bangku pendidikan namun di lapangan dan oleh serangkaian pengalaman. Pemimpin juga tidak bisa instan namun telah melampaui berbagai ujian. Integritas, komitmen dan kapasitas bisa dilihat kalau kita jeli. Dan itulah seharusnya yang dilakukan partai politik. Jangan sampai mereka justru kalah pintar dari rakyat sehingga ditinggalkan. Sekarang elit politik sibuk berupaya melakukan revisi UU Pilkada untuk memperberat syarat calon perseorangan. Semakin banyak diganjal, maka semangat perlawanan itu justru akan memancar.

Kita masih ingat bagaimana Tri Rismaharini berusaha digagalkan pencalonannya pada pilkada Surabaya tahun lalu namun akhirnya tetap melaju. Parpol seharusnya sudah menerima pelajaran penting dari sana. Menanggapi upaya menaikkan syarat dukungan calon independen, Ahok dengan tenang mengatakan tidak masalah karena itu hanya akan membuat 'Kawan Ahok' bekerja lebih keras. Keyakinannya juga didasarkan pada hasil beberapa survei yang menyebutkan kepuasan warga ibu kota terhadap gubernurnya meningkat hingga 53 persen. – Keterpilihan Ahok pun masih jauh meninggalkan nama-nama yang disebut akan maju sebagai cagub DKI seperti Adyaksa Dault, Sandiaga Uno dan Haji Lulung. Jadi? Tetaplah adagium lama mengatakan *vox populi vox dei*, suara rakyat suara Tuhan. Maka parpol harus bisa "*mendeteksi*" kemana suara rakyat akan diberikan.

Ahokisasi adalah pelajaran demokrasi yang hakiki. Walaupun dari kelompok minoritas dari segi etnis dan agama, tetaplah diberikan kepercayaan karena ukurannya bukan di sana. Justru itulah tanda kemajuan demokrasi yang sebenarnya. Ini tidaklah sama dengan deparpolisasi karena sebenarnya kita juga membutuhkan parpol yang kuat dan calon independen sebenarnya tidaklah ideal dalam sistem ketatanegaraan kita. Maka anggaplah ini seperti 'goro-goro' dalam dunia pewayangan, untuk mendewasakan parpol kita.

Sasongko Tedjo, Wartawan Suara Merdeka

SUARA MERDEKA, 21 Maret 2016

Demografi Pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta

SETAHUN menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, berbagai prediksi dan bakal calon gubernur mulai bermunculan. Tentu menarik menganalisis potensi tiap-tiap bakal calon gubernur DKI Jakarta. Namun, tulisan ini tidak akan membahas para bakal calon gubernur, tapi menguraikan peta calon pemilih dan isu dalam pilkada mendatang di DKI Jakarta. Para bakal calon gubernur tentu perlu memperhatikan karakteristik penduduk dan pemilih guna merancang strategi yang tepat untuk menggalang dukungan dan suara.

Analisis demografi dapat memberikan gambaran tentang perilaku pemilih dan determinan dari keputusan mereka. Setiap pemilih pada kelompok umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan asal daerah tertentu memiliki perilaku dan kecenderungan preferensi yang berbeda. Namun, beberapa penelitian di negara lain menunjukkan usia dan tingkat pendidikan pemilih merupakan faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam meraih pemilih.

Karakteristik Demografi Pemilih

Dalam buku Proyeksi Penduduk Indonesia yang dipublikasikan Bappenas (2013), jumlah penduduk DKI Jakarta 2017 diproyeksikan mencapai lebih dari 10,37 juta jiwa. Jumlah terbesar berada dalam kelompok umur 25 tahun-34 tahun. Kelompok umur itu disebut sebagai young adult (dewasa muda) dan akan menjadi salah satu penentu kemenangan calon gubernur di pilkada DKI Jakarta mendatang. Angka ketergantungan (dependency ratio) DKI Jakarta berada di bawah angka 40.

Hal itu menunjukkan DKI Jakarta saat ini sedang berada dalam periode bonus demografi. Penduduk usia produktif mencapai lebih dari 71% dengan jumlah manula sekitar 4%. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan relatif berimbang, dengan jumlah laki-laki sedikit lebih banyak.

Hampir 8 juta penduduk diperkirakan menjadi calon pemilih di pilkada DKI Jakarta. Sekitar 70% calon pemilih berstatus sudah/pernah menikah.

Lebih dari 65% calon pemilih di DKI Jakarta berpendidikan SLTA ke atas dan hanya sekitar 16% yang berpendidikan SD ke bawah. Ini menunjukkan para calon pemilih di pilkada DKI Jakarta memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan menentukan pilihan berdasarkan kapasitas calon. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat pendidikan penduduk terbaik di Indonesia.

Menarik juga dicermati bahwa 44% penduduk DKI Jakarta ialah pendatang dan tidak lahir di Jakarta. Dalam demografi, penduduk yang memiliki tempat kelahiran berbeda dengan tempat tinggal saat ini disebut sebagai life time migrant. Pendatang terbesar berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan persentase mencapai sekitar 17% dari seluruh calon pemilih di Jakarta. Meskipun tidak ada penelitian khusus, fenomena itu dapat diduga menjadi salah satu sumber kemenangan Jokowi-Ahok dalam Pilgub 2012.

Sebanyak 12% pemilih merupakan migran yang berasal dari Jabar dan Banten dan hampir 5% berasal dari Jatim.

Untuk migran yang berasal dari luar Pulau Jawa, diketahui bahwa migran dari Sumatra Utara memiliki proporsi pemilih cukup besar di DKI Jakarta (sekitar 3%), diikuti pemilih yang merupakan kelahiran Sumatra Barat (mendekati 2%). Migran dari Sumatra Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat memiliki proporsi pemilih di DKI Jakarta terbesar setelah Sumatra Barat. Namun, karena penduduk Jakarta relatif terbuka dan telah terjadi pembauran budaya, asal daerah pemilih bisa saja tidak memiliki hubungan langsung dengan asal daerah calon gubernur. Pemilih yang rasional dengan pendidikan tinggi tetap mempertimbangkan kapasitas kepemimpinan calon gubernur sebagai pertimbangan utama.

Lebih dari 50% calon pemilih aktif menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir (Susenas 2015). Ternyata hampir 95% di antaranya mengakses internet melalui telepon seluler. Penggunaan smartphone telah memudahkan masyarakat dalam membuka akses internet dan mengikuti perkembangan yang ada. Sekitar 62% calon pemilih berstatus bekerja dan 38% lainnya berstatus tidak bekerja (ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, pensiunan, dan sebagainya). Hampir setengah dari calon pemilih yang bekerja merupakan buruh atau pegawai. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor perdagangan, hotel, restoran, dan jasa-jasa (sekitar 38%).

Pemilih Pemula di Jakarta

Menarik untuk dicermati bahwa sekitar 13% dari calon pemilih ialah calon pemilih pemula (*first time voter*) yang akan memiliki hak suara untuk pertama kalinya dalam pilkada 2017. Sekitar 60% pemilih pemula tinggal dengan orangtua mereka. Ini berarti bahwa sebagian besar pemilih pemula berinteraksi secara intensif dengan orangtua mereka.

Lebih dari 90% pemilih pemula di DKI Jakarta berstatus belum menikah.

Namun, kita juga harus memperhatikan meskipun sebagian besar pemilih pemula tinggal dengan orangtua, pilihan mereka dapat berbeda dengan orangtua mereka. Mereka cenderung dididik secara demokratis dan diberi kebebasan memilih oleh orangtua. Terkadang justru peer pressure (dari teman sebaya) yang akan memengaruhi keputusan pemilih pemula.

Dengan menggunakan cohort analysis, kita dapat menganalisis perilaku umum para calon pemilih pemula di DKI Jakarta. Meskipun sebagian pemilih pemula pilkada DKI tidak 'benar-benar pemula' karena sebagian sudah menggunakan hak pilih pada Pemilu 2014, mereka 'pemula' dalam pilkada. Pemilih pemula pilkada DKI 2017 di sini diasumsikan lahir antara 1996 dan 2000. Mereka yang lahir dalam periode waktu berdekatan cenderung memiliki perilaku dan cara pengambilan keputusan yang relatif mirip (Harmadi, 2013). Cara berpikir dan pengambilan keputusan mereka sangat dipengaruhi kondisi Indonesia yang sudah demokratis, memiliki jumlah saudara kandung yang sedikit, berpendidikan baik, dan hidup di era

digital yang sarat teknologi informasi. Kita dapat menyebut generasi ini sebagai *connected kids*.

Kehidupan demokratis dan pendidikan yang baik yang ditunjang kemampuan akses ke media sosial membuat para pemilih pemula itu cenderung paham dan mengikuti situasi politik yang berkembang saat ini. Apalagi, DKI Jakarta sebagai ibu kota dan pusat segala aktivitas memiliki kuantitas, kualitas, dan akses informasi yang sangat baik.

Pemilih pemula di DKI Jakarta juga sangat berkualitas dan mampu memahami kualitas para calon pemimpin. Pemilih pemula itu secara cerdas akan mengambil keputusan rasional dengan menilai kapasitas para calon gubernur. Popularitas saja tidak akan cukup menarik para pemilih pemula untuk memberikan suara. Namun, tantangan terbesar ialah masih rendahnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan, baik pemilu maupun pilkada. Oleh karena itu, para calon gubernur DKI Jakarta juga harus mampu menarik sebanyak-banyaknya kelompok pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pilkada DKI Jakarta kali ini.

Isu Kampanye

Isu kampanye dapat menentukan kemenangan calon gubernur. Dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi, isu kampanye menjadi penting. Mereka tidak lagi sekadar ingin mendengar pendidikan dan kesehatan, misalnya, akan menjadi program prioritas. Setiap calon gubernur tentu akan mengatakan hal yang sama. Namun, perbedaannya ada pada bagaimana setiap calon gubernur menyampaikan ide terobosan dalam implementasi program.

Besarnya pemilih yang berasal dari kelompok usia produktif memberikan sinyal bagi para calon gubernur DKI mendatang bahwa mereka harus mampu mengusung isu-isu yang terkait penduduk usia produktif, seperti isu ekonomi, transportasi, lapangan kerja, dan upah minimum.

Ambil saja contoh isu kemacetan dan transportasi umum menjadi sangat penting karena hal ini berpengaruh besar terhadap produktivitas para penduduk usia produktif. Isu lainnya seperti perumahan juga penting untuk dibahas karena harga tanah di DKI Jakarta sedemikian tingginya dan terus meningkat. Sebagian migran dari luar Jakarta datang karena tertarik tingginya upah. Namun, yang terjadi sesungguhnya *money illusion*.

Meskipun upah tinggi, biaya hidup juga sangat tinggi. Akhirnya sebagian dari mereka akan memilih tempat tinggal yang ilegal di pusat kota untuk menekan biaya hidup, baik perumahan maupun transportasi, yang mendorong bertambahnya permukiman kumuh. Oleh karena itu, isu perumahan menjadi penting. Isu lainnya ialah kriminalitas dan aktivitas ilegal yang menjadi ciri kota besar di negara berkembang.

Dengan memahami karakteristik demografi pemilih, para bakal calon gubernur dapat memilih isu kampanye yang tepat dengan visi yang jelas.

Satu hal yang mungkin belum terbayang oleh kita ialah visi Jakarta di masa depan. Akan seperti apakah Jakarta yang diimpikan para calon gubernur tersebut? Sudah menjadi tugas mereka untuk berbagi mimpi dengan para calon pemilih. Mimpi yang dibangun dalam keadaan sadar, realistis, dan mampu diwujudkan secara nyata bersama para pemilih.

Sonny Harry B Harmadi, Kepala Lembaga Demografi FEB UI

MEDIA INDONESIA, 28 Maret 2016

Ahok : Another new hope?

All eyes are now on Jakarta Governor Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama after he challenged the City Council's draft budget, which was full of questionable allocations, and reported alleged irregularities to the Corruption Eradication Commission (KPK).

People have come up with various social media hashtags and movements supporting Ahok have emerged.

According to pollster Lingkar Survei Indonesia, from its survey on the city budget dispute, 40 percent of the lower middle class, 51 percent of the middle class and 72 percent of the upper middle class trust Ahok to run a clean government.

This reminds us of the early days of President Joko "Jokowi" Widodo's presidency, when he was percieved as a hero of the people.

Time magazine used the term "new hope" to describe Jokowi's presidential win — but does Ahok represent another new hope for Indonesia?

Ahok's popularity is driven by something different than Jokowi's. The media used to portray Jokowi as a humble, populist leader.

Yet Ahok swears a lot, stands proud with no party affiliation and bluntly states the facts that everyone knows but no one dares to say out loud.

He refers to the corrupt as the perpetrators and often says many are against him not because they think he is wrong, but because he is ethnic Chinese and Christian.

Ahok invalidates many theories of political communication. He lacks wisdom and has little diplomacy, yet many support him.

The logic behind Ahok's popularity lies in one issue that apparently matters most to people nowadays: a leader is valued on the firmness of his commitment to fighting corruption.

Jokowi lost his charm because he failed to show firmness in stopping the police undermining the KPK.

In contrast, despite many legal efforts to get rid of him, Ahok appears to be standing tall to fight corruption. When we talk about people's opinions, who are we referring to?

According to political communication scientist Vincent Price, three words often associated with "people" are crowd, public and mass.

A crowd is moved by the unity of an emotional experience and tends to be reactive rather than deliberative. In a crowd, individuals very easily lose themselves and only act according to collective desire.

Meanwhile, in public, individuals gather not only in the name of empathy, but also in terms of the ability to think and argue.

A group of people are called “public” when they face a common problem and express diverse views regarding that problem, but are willing to engage in discussions to find solutions.

The danger shadowing modern civilizations is when the public changes into the mass.

Abundant information and analysis from various sources — which are not always credible — can make people skeptical.

At this point, individuals become no more than part of the mass, a group of anonymous people with minimum efforts to communicate.

In Jokowi’s case, people can be seen as more of a crowd. Jokowi’s best qualities are humility and modesty, but we now know that these are not enough.

In Ahok’s case, people are more deliberate in professing their support. The budget saga gives people perspective on why they need to be on Ahok’s side.

Clear data regarding the draft budget gives a sense of transparency to the Jakarta administration.

It is also a sign that people pay attention to credible sources instead of giving support without reason.

The message is clear: it is not about supporting Ahok as an individual, but more about how people are empowered to defend their right to their own money.

Whether Ahok makes it as the leader of the nation remains to be seen The best thing to do now is to make sure the people stay together as a public, not as a crowd or mass.

It will prevent them from being too emotional. It will also empower them to become watchdogs of government, institutions and the media.

Hate speech and smear campaigns should be abolished.

The public does not always have to be in agreement.

Differences of opinion with a desire to solve problems together becomes a prerequisite of the public’s existence. It is the only way our democracy will mature.

Andina Dwifatma, A lecturer in the School of Communication, Atma Jaya Catholic University, Jakarta; She co-founded a longform journalism website, panajournal.com

JAKARTA POST, 28 Maret 2015

Generasi Y dan Calon Perseorangan

Tidak ada yang aneh dari generasi Y atau generasi milenial,generasi yang lahir antara 1980 dan 1999, berusia 17-36 tahun (Kompas, 14/3).

Walaupun kontestasi Pilkada DKI-1 masih setahun lagi, Juli 2017, dinamika perseteruan partai politik, politikus, dan calon perseorangan mulai ramai. Media cetak dan media elektronik lewat berbagai cara menjadi sarana ampuh guna menyikapi gejala tersebut. Generasi ini sangat akrab dengan aneka jenis gadget dan aplikasi yang berhamburan. Dalam konteks ini kita menyoroti bagaimana keakraban pengguna media massa dan media sosial, khususnya dari generasi Y, melibatkan diri dalam pilkada daerah skala nasional tersebut. Dari perspektif usia terlihat bahwa segelintir WNI yang ikut serta dalam perpacuan merebut takhta DKI-1 umumnya perpaduan generasi *baby boomer* dan generasi X yang lahir dari 1947 sampai 1965. Ibarat anak –keponakan memilih calon pemimpin dari generasi yang digantikannya.

Sementara waktu ini kita tanyakan dari segelintir calon DKI-1, berapa besar perhatiannya soal penurunan 5–11 sentimeter air muka daratan DKI setiap tahun (Kompas, 18/3). Apakah lima tahun lagi Balai Kota DKI masih layak dihuni dan dijadikan kantor. Atau, lima tahun lagi DKI dan kawasan Ring-1 Ibu Kota selalu tergenang. Masih berapa banyak yang berpikir ke arah itu atau hanya ikut lomba menduduki kursi empuk DKI-1 tanpa hiraukan kemaslahatan bagi warga merangkap konstituennya. Pertanyaan ini lebih ditujukan kepada segelintir WNI yang merasa layak menduduki dan memperebutkan singgasana DKI-1. Semuanya ditentukan oleh seberapa banyak kita bisa kumpulkan suara warga DKI untuk sang calon.

Santun dan Jeruji

Coba kita lihat berapa banyak yang santun, sopan, dan pintar, bahkan rajin beribadah ke rumah ibadah tetapi menjadi tamu atau penghuni jeruji besi di KPK. Atau sudah biasakah orang menggunakan rompi oranye KPK dengan rambut klimis bak seorang selebritas yang sedang digelandang. Apakah itu seorang mantan bupati, wali kota, lurah, gubernur, menteri, atau anggota parlemen, tinggal dapat dihitung dengan jari. Mantan bupati penggemar narkoba (dari Ogan Ilir) atau Ahok petahana dari Jakarta hanya satu contoh untuk menelusuri bibit, bobot,dan bebet seorang pemimpin daerah, bermutu atau tidak. Karena itu, layaklah calon perseorangan, independen, atau apa pun istilahnya harus diperketat persyaratannya. Padahal, UU No 8 Tahun 2015 sudah mengatur tentang persentase seorang calon perseorangan sebab para mantan dan calon perseorangan, kalau ikut, umumnya kalah dari pesaing usungan partai politik.

Survey Politik Indonesia menyatakan, 35 persen kontestan independen atau perseorangan menang di jalur pilkada, itu pun kurang sepertiga hanya 40 persen peserta pilkada. Lainnya dimenangi oleh partai politik, jadi partai politik tetap menjuarai. Di sisi lain, kita lihat aspek positif berapa banyak dari jutaan lebih PNS bersikap sederhana dan bisa hidup dengan benar dan wajar. Bahagialah anggota parlemen sekarang berpeluang untuk jadi

pemimpin di daerah masing-masing yang pernah diwakili sebagai konstituen. Berkesempatan jadi independen atau perseorangan di luar partai politik yang ada merupakan satu kesempatan dalam karier politik.

Hanya saja, sangat kita sayangkan berapa banyak yang masuk dalam generasi emas dan bersinar bagi masa depan bangsa karena di sisi lain lahir pula plutokratisme di mana yang kaya yang berkuasa sekelompok kecil masyarakat yang dengan gelimangan harta dan berada di puncak piramida harta dan kuasa. Mereka adalah kelompok satu persen yang kuasanya lebih dari 99 persen yang ada. Mungkin mereka sebagian dari 6.000 warga negara Indonesia yang mempunyai deposito di luar negeri. Kelompok ini bisa muncul dalam berbagai bentuk di masyarakat. Mereka tidak hanya mengubah budaya dan tata cara korporasi, tetapi juga manajemen publik sampai ke panggung politik. Misalnya, dengan cara maju perseorangan di samping lembaga politik yang ada, tempat mereka pernah dibesarkan. Disebut sebagai orang kaya atau masuk dalam kelompok miliarder baru sudah biasa, sudah harus berpacu jadi orang kaya dan superkaya (*high net worth individual*/HNWI).

Komponen Masa depan

Generasi Y yang diidentikkan warga milenia merupakan komponen dari masa depan bangsa. Mereka adalah pendobrak generasi sebelumnya dengan kinerja yang lebih efisien dan pengubah wajah korporasi saat ini. Tak ada hukum besi yang menyatakan calon independen atau perseorangan tak boleh diusung atau dicalonkan parpol lagi, semua bisa berubah tergantung dimensi waktu, tempat, dan kepentingan. Yang harus ditakutkan dengan calon independen, sejauh itu sesuai UU Pilkada, MK dan atau KPU mengizinkan, biarkan saja.

Sebagai satu warga DKI yang tidak berminat merebut singgasana DKI-1 (2017), maka pilihan ke model perseorangan dengan jalur nirpartai merupakan alternatif yang legal sebab dengan berprinsip pada calon gubernur yang paling sedikit janjinya, maka dialah yang paling rendah potensi bohongnya. Karena itu, setengah abadhidup dalam kebesaran partai politik, ini merupakan sarana alternatif.Tak semua orang partai politik jelek. Sebagian kecil di antaranya pasti baik.

Sebagian warga masih perlu partai politik karena keberadaanya sebuah keniscayaan, soal rakyat dipaksa memilih itu lain soalnya. Namun, partai politik perlu berubah dan ber-evolusi dengan perubahan demografis. Semua perlu berubah. Jika calon independen ini ternyata busuknya tidak kurang dari yang sudah-sudah, rakyat akan sadar dan mundur teratur, dan calon perseorangan pun surut sesuai zaman. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan oleh klausul calon perseorangan. Karena bukan yang kaya yang berkuasa, tetapi justru yang muda yang berkarya demi masa depan bangsa dan negara.

Beni Sindhunata, Pendiri INBRA

KOMPAS, 31 Maret 2016

Fenomena Relawan Ahok Dalam Perspektif Komunikasi Antarbudaya

Latar Belakang

Tahun 2017 mendatang merupakan salah satu tahun politik di Indonesia, karena pada tahun 2017 akan dilaksanakan kembali pilkada serentak di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota, salah satu Provinsi yang akan mengadakan pilkada serentak di tahun 2017 adalah Provinsi DKI Jakarta. Berbagai bakal calon pun bermunculan, mulai dari Incumbent Basuki Tjahaja Purnama atau lebih disapa Ahok, Pengusaha terkenal Sandiaga Uno, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Daud, Ustad Yusuf Mansyur, bahkan musisi terkenal Ahmad Dhani pun ikut meramaikan bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta.

Beberapa bulan terakhir ini, energi publik seolah tersedot oleh aksi anak-anak muda yang berhimpun diri dalam "koalisi" bernama "Teman Ahok". Dunia politik pun dibuat geger dengan memperdebatkan satu nama, Ahok. Teman Ahok memang menjadi sesuatu yang patut untuk diperbincangkan menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Bagaimana tidak jika "komunitas" yang hanya diinisiasi oleh 5 orang anak muda mampu menyedot perhatian publik, tidak hanya di Jakarta akan tetapi di seluruh daerah di Indonesia. Teman ahok sendiri merupakan sebuah perkumpulan relawan yang didirikan sekelompok anak muda yang bertujuan membantu dan "menemani" Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja purnama (Ahok) dalam mewujudkan, jakarta baru yang lebih bersih, maju dan manusiawi. Teman Ahok berfokus mengumpulkan KTP warga DKI Jakarta dalam rangka mendukung Ahok menjadi calon gubernur independen DKI Jakarta 2017. Ini dilakukan untuk mendukung ahok terus konsisten, hanya merasa berhutang pada rakyat, bukan pada partai politik (www.temanahok.co.

Sebelumnya, Ahok mundur dari Partai Gerindra, dikarenakan beberapa hal, seperti yang dimuat oleh liputan6.com, ahok mengundurkan diri dari Partai Gerindra karena merasa kecewa dengan partainya yang mendukung usulan kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Ahok, dukungan itu berbeda jauh dari visi misi Gerindra ketika partai itu menariknya dari Partai Golkar. Ahok menilai sikap Gerindra sudah tak lagi sesuai dengan konstitusi semula yang mengutamakan kepentingan rakyat. Karena apabila kepala daerah dipilih oleh DPRD, mereka hanya akan mementingkan anggota dewan dan mengesampingkan urusan rakyat. Ahok sendiri sejak awal berprinsip hanya taat pada konstitusi bukan konstituen.

Menjelang pilgub 2017 mendatang, Ahok pun menjadi salah satu kandidat terkuat untuk kembali memimpin DKI Jakarta, seperti survey yang dilakukan oleh CSIS, tingkat popularitas sebagai calon gubernur, Ahok unggul dengan perolehan dukungan 94 persen. Pada posisi kedua ada Tantowi Yahya (81 persen), Ridwan Kamil (71,25 persen), dan Abraham Lunggana (64,5 persen). Dari sisi "top of mind" pilihan warga Jakarta, Ahok juga menempati urutan teratas, 45 persen. Sedangkan Ridwan Kamil (15,7

persen), Tri Rismaharini (7,75 persen), Adhyaksa Dault (4,25 persen). Delapan nama lain hanya meraih dukungan di bawah empat persen. Saat kandidat dikerucutkan menjadi 12 nama, Ahok tetap saja unggul 43,25 persen. Di bawahnya terdapat Ridwan Kamil dan Risma, serta Adhyaksa. Begitu juga saat CSIS melakukan simulasi lima nama dengan dukungan terbesar. Basuki meraih 48,5 persen, Ridwan Kamil 22 persen, dan Risma 12 persen. Saat Ahok dikonteskan dengan Adhyaksa dan Sandiaga Uno, posisi mantan Bupati Belitung Timur itu di atas angin. Ia mendapat 62 persen suara, sedangkan Adhyaksa hanya 14 persen, dan Sandiaga hanya 1,75 persen. (www.tempo.co)

KemunculanTeman Ahok merupakan suatu inisiasi untuk mengusung kembali Ahok untuk menjadi calon gubernur. Untuk mewujudkan ahok menjadi gubernur lewat jalur perseorangan atau jalur independen, maka Teman Ahok harus mengumpulkan KTP sesuai syarat minimum yang telah ditetapkan oleh KPU. Untuk DKI Jakarta sendiri, syarat minimum yang dibutuhkan untuk maju lewat jalur perseorangan adalah 532.000 KTP. Sampai saat ini seperti yang dipublikasi melalui situs http://www.temanahok.com, jumlah KTP yang sudah dikumpulkan oleh Teman Ahok sebanyak 493.765. Dengan melihat progress yang berjalan, maka bukan tidak mungkin jika Ahok kembali akan dicalonkan menjadi calon gubernur DKI Jakarta lewat jalur perseorangan.

Fenomena Teman Ahok Dalam Perspektif Komunikasi Antarbudaya

Kemunculan Teman Ahok dalam suasana menjelang Pilgub DKI 2017 menjadi fenomena tersendiri, ditengah keberhasilan mengumpulkan begitu banyak KTP untuk mendukung Ahok agar bisa maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017, ternyata tak lepas dari masalah. Berbagai macam komentar dari yang positif hingga komentar negatif terkait munculnya Gerakan Teman Ahok. Salah satunya adalah yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon yang mengatakan para relawan tidak dibayar itu adalah kebohongan. Apa yang dilakukan oleh Fadli Zon adalah bentuk stereotype kepada Teman Ahok. Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang dimaksudkan sebagai sarana memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung ternyata tidak lepas dari upaya konflik, dan Stereotype yang berlebihan bisa jadi akan berujung pada konflik.

Stereotype menunjuk pada suatu keyakinan yang terlalu digeneralisasikan, terlalu disederhanakan, atau terlalu dilebih-lebihkan mengenai suatu kategori atau kelompok tertentu (Samovar et.al, 2009). Stereotype cenderung subjektif, stereotype bisa cenderung kearah negatif dan bisa juga cenderung kearah positif. Stereotype bisa bersifat destruktif jika cenderung negatif dan sangat diyakini. Stereotype jika sudah dipercayai, akan sangat sulit dihilangkan. Bahkan orang cenderung mengingat informasi yang mendukung stereotype tersebut, tapi melupakan informasi yang menentangnya.

Dalam kasus Teman Ahok sendiri, banyaknya stereotype negatif yang muncul dikarenakan adanya informasi yang tidak berimbang yang didapatkan oleh pihak yang mengeluarkan pendapat negatif, yang belum tentu ketepatan dari informasi yang dikeluarkan itu sepenuhnya benar, atau bahkan sama sekali tidak menggambarkan kebenaran. Stereotype yang ditujukan kepada Teman Ahok pun sudah merambah keranah Prejudice (Prasangka), Prejudice sendiri adalah Sikap kaku terhadap suatu kelompok orang, berdasarkan keyakinan atau pra-penilaian (prakonsepsi) yang salah" (Samovar, dkk., 1981) Pra penilaian menjadi tidak mudah diubah walau telah ada pengetahuan baru tentang itu. Dalam hal ini, walaupun Teman Ahok sudah melakukan klarifikasi mengenai soal apakah mereka merupakan "Relawan Bayaran" atau tidak, nampak hal tersebut susah untuk menghapus pandangan sekelompok orang yang sudah memiliki pandangan negatif. Prejudice terhadap Teman Ahok pun mulai termanifestasikan dalam bentuk antilokusi, bahkan sudah sampai pada tahapan diskriminasi. Antilokusi adalah tahap dimana seseorang mulai memberitahukan kepada orang lain mengenai sikap, perasaan, pendapat, dan stereotype pada kelompok tertentu. Kita mendapatkan stereotype melalui berbagai cara, termasuk dari media: berita, film, dsb, apalagi di era teknologi sekarang, seseorang bisa saja menyebarkan stereotype terhadap masyarakat.

Setelah berbagai macam bentuk stereotype dan prejudice, perilaku yang akan muncul adalah Diskriminasi. Diskriminasi dapat muncul berdasarkan berbagai jenis identitas: ras, etnis, agama, dll. Bentuk diskriminasi bervariasi, mulai dari perilaku nonverbal yang halus–seperti jarangnya ada kontak mata atau peminggiran dari percakapan, penghinaan verbal dan penyisihan dari pekerjaan dan kesempatan-kesempatan ekonomis, hingga kekerasan fisik dan penyisihan yang dilakukan secara sistematis. Hal ini pun yang pernah dialami oleh Teman Ahok, Fanpage Facebook Teman Ahok pernah diretas dan berganti nama menjadi "maaf" "Haram Kumpulkan KTP untuk Orang Kafir", Humas Teman Ahok Amalia Ayuningtyas yg berjilbab difitnah seolah pura pura berjilbab untuk mendukung Ahok, dan mengambil hati umat Muslim, dan masih banyak lagi.

Ada beberapa teknik untuk mengurangi stereotype dan prejudice, diantaranya Memutuskan siklus prasangka: belajar tidak membenci karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dengan cara mencegah orang tua dan orang dewasa lainnya untuk melatih anak menjadi fanatik. Berinteraksi langsung dengan kelompok berbeda, pandangan bahwa peningkatan kontak antara anggota dari berbagai kelompok sosial dapat efektif mengurangi prasangka diantara mereka.. Kategorisasi ulang batas antara "kita" dan "mereka" hasil dari kategorisasi ulang ini, orang yang sebelumnya dipandang sebagai anggota out-group sekarang dapat dipandang sebagai bagian dari in-group. Intervensi kognitif, memotivasi orang lain untuk tidak berprasangka, pelatihan (belajar untuk mengatakan "tidak" pada stereotype).

Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara dengan penduduk yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, memang rawan untuk terjadi konflik antar kelompok. Stereotype dan Prejudice bisa jadi pemantik api konflik jika hal ini tidak diantisipasi dengan baik. Dalam komunikasi antarbudaya, stereotype pada umumnya akan menghambat keefektifan komunikasi, bahkan pada gilirannya akan menghambat integrasi manusia yang sudah pasti dilakukan lewat komunikasi verbal ataupun komunikasi bermedia massa. Dengan demikian keberadaan stereotype-stereotype antar kelompok maupun antar etnis, maka dapat pula menghambat integrasi nasional.

10 April 2016

muhiswarramadhan.wordpress.com

Daftar Referensi

Baron, Robert dan Donn Bryne. 2003. Psikologi Sosial:Edisi Kesepuluh Jilid I. Terjemahan Ratna Djuwita, dkk. 2004. Jakarta : Erlangga.

Samovar,et.al. 1981. Understanding Intercultural Communication. Belmont California : Wodsworth Publishing Company.

Sumber Internet

http://news.liputan6.com/read/2103100/ini-alasan-ahok-ingin-keluar-dari-gerindra

http://www.idntimes.com/rizal/dukung-ahok-maju-pilkada-teman-ahok-dapat-tekanan-dari-berbagai-pihak

http://www.temanahok.com

http://chirpstory.com/li/307601

https://m.tempo.co/read/news/2016/01/25/078739075/survei-csis-basuki-ahok-tak-punya lawan-sebanding

Menelisik Sumber Ketidakwarasan Negara

Perdebatan kasus Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta, yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis dapat dijadikan langkah awal menelisik sumber ketidakwarasan negara dalam mengelola kekuasaan. Penelusuran melalui sejarah filsafat politik terhadap fenomena tersebut ditemukan dalam dialog Plato dengan teman diskusinya, *Glaukon*, dalam dialog tentang Republik, Buku VI-X, terutama Bab VIII, sekitar abad ke-4 sebelum Masehi (penerjemah dan editor Chris Emlyn-Jones dan William Preddy, Harvard University Press, 2013).

Kerumitan Plato dalam menjelaskan audit forensik psiko-politik gerak hasrat kuasa dipaparkan dengan baik sekali oleh Ito Prajna-Nugroho di majalah Basis, (Nomor 01-02, tahun ke-65, 2016, halaman 22-28). Intinya, menurut Plato, siklus kekuasaan mulai dari yang paling ideal, aristokrasi, sampai dengan kediktatoran yang lalim, tirani, dan akan kembali ke tatanan semula, adalah pertautan antara gerak jiwa yang menghidupkan struktur kekuasaan tersebut. Kesimpulannya, kualitas moral dan hasrat manusia yang hidup dalam rezim tersebut menentukan tatanan dan mutu tertib politiknya.

Dalam perspektif makropolitik, pendapat umum hampir dapat dipastikan sepakat bahwa pengelolaan negara dewasa ini mencerminkan gerak hasrat jiwa yang tidak sesuai dengan kemuliaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi telah merusak, mengorup, dan nyaris membangkrutkan negara. Secara metafor, kasus Rumah Sakit Sumber Waras sedang melakukan audit psiko-politik terhadap kualitas moral dan gerak kesakitan dari hasrat para pemegang kekuasaan negara di negeri ini. Panggung politik menampilkan pertarungan para hulubalang negara yang mengungkapkan tarik-menarik antara hasrat jiwa yang didorong oleh jiwa rasionalitas dan kebijakan (*logistikon*) serta keberanian dan kehormatan (*thumos*), berhadapan dengan hasrat jiwa yang didorong oleh epithumia (rendah, urusan di bawah perut). Pada setiap kubu pada dasarnya melekat ketiga jenis hasrat tersebut.

Namun, melalui pemberitaan media massa terbangun persepsi bahwa kubu yang satu, berbekal hasrat logistikon dan thumos serta berpijak kepada data, fakta, dan logika, dengan gagah berani membela diri secara ofensif. Sementara itu terhadap kubu lain terbangun persepsi sebagai kelompok yang didominasi oleh hasrat epithumia.

Persepsi publik mendapatkan validasinya karena menurut survei yang dilakukan Charta Politika, Maret 2016, dan beberapa survei dari lembaga sejenis, bahwa tingkat kesukaan publik terhadap Basuki di atas 80 persen, sementara elektabilitasnya hampir 45 persen. Sosok lain dalam bursa Pilkada DKI Jakarta berada di bawah 10 persen. Oleh karena itu, gerak jiwa yang diekspresikan oleh Basuki memberikan kesan bijak, harga diri tinggi, serta sangat percaya diri.

Sementara itu, sosok Harry Azhar Azis, Ketua BPK, menanggung beban moral sangat berat karena tuntutan bagi pegawai BPK sangat tinggi sebagaimana diekspresikan dalam moto: Tri Dharma Arthasantosha. Lambang Garuda dan cakra emas bermakna keluhuran dan keagungan BPK sebagai lembaga tinggi negara. Adapun warna putih dan kelopak teratai adalah simbol kesucian, kebersihan, dan kejujuran yang harus menjiwai setiap pegawai BPK.

Oleh karena itu, tuntutan bagi pimpinan BPK adalah sosok ”setengah manusia, setengah malaikat”. Tuntutan tingkat kesucian dan martabat yang sedemikian tinggi itu membuat masyarakat secara kategoris mengharuskan sosok tersebut seperti itu sangat harus menjaga martabat agar pantas dihormati publik.

Ibaratnya, wibawa yang terpancar dari tokoh tersebut membuat orang merasa berdosa, bahkan kalau hanya menduga yang bersangkutan melakukan sesuatu yang kurang terpuji. Oleh karena itu, kalau tokoh yang dibayangkan mempunyai marwah dan martabat selangit, misalnya, lupa menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, akan menjadi bulan-bulanan publik. Respons publik dapat menjadi liar, contohnya ketika muncul berita yang bersangkutan masuk dalam daftar Panama Papers yang menghebohkan, media massa dengan mudah merontokkan martabatnya.

Oleh karena itu, tokoh semacam itu diharapkan pula cermat merespons media. Ketergesaan akan membuka kotak pandora yang dikhawatirkan akan mengungkapkan hal-hal yang selama ini kurang nyaman diketahui publik. Misalnya, pembelaan terhadap perusahaan dengan cepat direspons oleh media dengan menampilkan namanya dan alamat kantor lembaga negara di mana yang bersangkutan bertugas. Konflik kepentingan terkuak, padahal kualitas hasrat yang bersangkutan mungkin tidak sesuram yang dipersepsikan oleh publik. Kemungkinan pemahaman publik juga bias karena yang bersangkutan tokoh partai politik, institusi yang mempunyai perilaku buruk di mata publik.

Tentu saja gerak jiwa dari kedua sosok tersebut masih sangat dinamis. Masyarakat juga ingin tahu kualitas tokoh mana yang gerak jiwanya lebih kuat unsur logistikon dan thumos-nya daripada hasrat epithumia-nya. Oleh karena itu, bangsa ini tidak boleh membiarkan hasrat liar penguasa tanpa kendali karena akan mengakibatkan runtuhnya bangunan struktur dan tatanan politik kekuasaan yang hendak dibangun. Pendidikan hasrat menjadi agenda yang sangat mendesak bagi calon pemegang kekuasaan agar tidak terjebak ke dalam kubangan hasrat kuasa yang merusak tatanan peradaban politik.

J Kristiadi, Peneliti Senior CSIS

KOMPAS, 19 April 2016

Teman Ahok: Abnormalitas yang Perlu

Fenomena "*Teman Ahok*" sebagai gerakan relawan yang mengusung pasangan cagub Ahok-Heru membuat politik kembali marak. Apa artinya?

SATUHARAPAN.COM – "Sebuah organisasi memerlukan 2 persen inspirasi dan dan 98 persen keringat," begitu kata-kata Ernest Douwes Dekker, yang dikenal sebagai Dr. Danudirdja Setiabudi, kepada Soekarno dan Roeslan Abdoelgani pada suatu hari di bulan Mei 1947 ("*Pak Tua Penggerutu*," Majalah TEMPO, Edisi Khusus Kemerdekaan, 20 – 26 Agustus 2012, hlm. 92-93).

Terkenal sebagai "*Si Bangsat*" penulis petualang dan pembangkang terhadap kekuasaan kolonial, Ernest Douwes Dekker juga dikenal sebagai mentor para tokoh kemerdekaan, khususnya Soekarno. Ernest Douwes Dekker menjadi sahabat serta guru yang tetap teguh mendampingi ketika keyakinan dan kehidupan Soekarno berada di titik terendah, ketika bahkan para sahabatnya yang terdekat meninggalkannya satu demi satu.

Sebagai orang berdarah campuran Belanda, Prancis, Jerman, dan Jawa, Ernest Douwes Dekker menjadi nafas penuh inspirasi dalam revolusi kemerdekaan Indonesia yang mendobrak berbagai kemandegan dan kebuntuan politik di tingkat nasional, internasional, dan personal. Mungkin sisi dobrak-mendobrak ini menjadi kekuatan terbesar Ernest Douwes Dekker, sekaligus sumber kontroversi dirinya yang tak kalah besar.

Menerobos Kebekuan Tatanan

Mungkin yang disebut tatanan, entah itu tatanan keluarga, tatanan kota, tatanan jiwa, tatanan politik, senantiasa membutuhkan sosok pembangkang dan pendobrak yang meski kontroversial tetapi justru menyehatkan bagi tatanan yang selalu punya kecenderungan menutup/memutlakkan diri (Jan PatoÄ ka, Heretical Essays, 136). Ernest Douwes Dekker menyadari hal ini. Ia menyadari bahaya kompromi-kompromi elit politik yang dapat melumpuhkan gerak kemerdekaan Indonesia yang ketika itu masih dalam tahap belajar mengepakkan sayapnya.

Ia juga menyadari bahaya ego pribadi masing-masing tokoh pergerakan yang dapat menyeret politik nasional ke dalam konflik pribadi. Maka lagi-lagi, sebagaimana telah ia lakukan sejak muda belia, Ernest Douwes Dekker mendobrak. Ia mendobrak lewat sikap dan kata-katanya yang sering membuat telinga panas, termasuk telinga Presiden Soekarno ketika itu.

Di tingkat politik nasional kata-kata Ernest Douwes Dekker, bahwa sebuah organisasi hanya butuh 2 persen inspirasi dan sisanya kerja keras, mungkin ditujukan untuk Soekarno sendiri sebagai sosok pemimpin kharismatik penuh inspirasi. Lewat pengalaman dan pengetahuannya, Ernest Douwes Dekker sepertinya menyadari bahwa apa yang disebut tatanan politik memiliki fondasi (dasar) yang lebih sering rapuh daripada kukuh. Berbagai cara pandang, pemikiran, nilai moral, kebiasaan, dan norma-norma sering

begitu mudah membeku memaksa orang tunduk dalam ritmenya yang telah menjadi normalitas.

Maka tindakan-tindakan politik senantiasa memerlukan upaya pembaruan, pembongkaran, re-definisi sistem simbol, dan pendasaran ulang, suatu kerja keras yang penuh keringat. Penuh keringat sebab meretas praktik kebiasaan politik yang telah membadan menjadi normalitas (kewajaran) bagaikan memposisikan diri sebagai 'orang gila' yang abnormal. Posisi abnormal itu dengan sendirinya melelahkan dan butuh banyak keberanian serta pengorbanan. Sebab berdiri di posisi pembangkang yang abnormal itu dengan sendirinya akan mengundang banyak musuh. Posisi abnormal politik bagaikan meniupkan ruh arkhaik ke dalam politik yang membuat posisi netral menjadi sulit dipertahankan, yaitu: kembali hidupnya distingsi kawan – lawan (Claude Lefort, *Democracy and Political Theory*, 17).

Perlunya Abnormalitas Politik

56 tahun setelah Douwes Dekker meninggal, dalam dinamika politik dan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi, kita telah mengalami sendiri hembusan ruh arkhaik politik tersebut.

Pemilihan presiden di tahun 2014 lalu misalnya seperti memperjelas politik sebagai 'momen eksistensial' yang menghidupkan kembali distingsi kawan – lawan dalam demokrasi. Bukan hanya itu, terpilihnya seorang Joko Widodo sebagai orang nomor satu di Indonesia pada dirinya merupakan momen terobosan yang sedikit banyak abnormal. Abnormal sebab status politik dan keberadaan dirinya menerobos normalitas politik yang didominasi oleh elit partai dan oligarki kekuasaan yang telah lama bercokol.

Kini hal yang kurang lebih serupa terjadi melalui sosok Basuki 'Ahok' Tjahaya Purnama, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta yang selalu bicara bla-blakkan tanpa tedeng aling-aling, kerap kontroversial, punya banyak musuh (meski tidak mencari musuh), namun tetap menjadi tumpuan harapan rakyat Jakarta yang dipimpinnya.

Status dan sikap politik Ahok dalam pencalonannya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta sedikit banyak juga abnormal sifatnya. Meski keberadaan calon perorangan (independen) untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah dilindungi dan dijamin oleh Konstitusi, namun pada praktiknya mereka yang maju sebagai calon perorangan di luar mekanisme kepartaian berdiri berhadap-hadapan dengan status-quo kekuasaan. Bukan hanya itu, untuk kasus Ahok, sikap politiknya seperti menggoyang kenyamanan oligarki partai-partai politik yang telah begitu mengakar ke dalam kebiasaan (dan kewajaran) politik Indonesia. Apalagi warga, yang sepertinya telah lelah dengan oligarki partai politik dalam demokrasi, justru menjadi bersemangat untuk berpartisipasi kembali dalam politik melalui sosok Ahok.

Keberadaan Teman Ahok yang aktif berpolitik menggalang dukungan warga mirip dengan relawan Jokowi ketika menjelang pemilihan presiden lalu.

Keberadaan kantong-kantong partisipasi politik warga itu secara langsung menampakkan dua hal penting, yaitu: 1) bahwa demokrasi bisa terus-menerus memperkuat diri dan melakukan re-organisasi diri di tengah segala kepungan kepentingan oligarki kekuasaan, dan 2) kegagalan partai-partai politik dalam merespon dinamika politik warga. Fenomena tindakan warga yang berjalan sendiri di luar segala mekanisme dan prosedur demokrasi formal ini pun merupakan terobosan abnormal dalam politik.

Pierre Rosanvallon, seorang ahli filsafat politik Prancis yang sekarang mengampu Sejarah Pemikiran Politik Modern dan Kontemporer di Collége de France, menyebutnya sebagai *society of distrust*, yaitu masyarakat demokratis yang tidak lagi mudah percaya pada elit politik dan kelembagaan demokrasi (Pierre Rosanvallon, *Counter-Democracy*, 3-5).

Seperti disebutkan oleh Rosanvallon, dalam masyarakat jejaring yang di dalamnya pengetahuan tidak lagi menjadi milik khas kaum tertentu, skema pengetahuan dan skema politik representatif terbukti tidak lagi cukup-diri. Ketidakcukupan (*insufficiency*) politik demokrasi representatif dalam memenuhi janji-janjinya telah menciptakan jalur demokrasi yang bergerak di luar norma kewajaran namun autentik dan mampu mempertahankan otonominya (Pierre Rosanvallon, *Counter-Democracy*, 274).

Dalam konteks sosok Ahok, acungan jempol perlu diberikan kepadanya karena telah berani meretas jalan 'abnormal' demokrasi kita, yang mungkin melalui cara itu kita dapat terus berdemokrasi secara sehat. Apalagi selama ini warga sepertinya semakin lelah dengan proses politik formal yang sesak dengan konflik kepentingan. Tambahan pula, semua orang sepertinya telah mengetahui betapa mahalnya biaya politik di Indonesia. Hal ini membuat setiap warga yang hendak berpartisipasi dalam politik harus: 1) entah habis-habisan mengeluarkan uang sendiri, atau 2) berkompromi dengan oligarki kekuasaan dan ekonomi yang sering tidak terlihat namun menentukan proses politik.

Kembalinya 'Yang Politik'

Sosok seperti Basuki Tjahaya Purnama telah menginspirasi warga. Teman Ahok adalah satu dari sekian banyak manifestasinya. Pola partisipasi politik seperti ini pada dirinya layak dihargai sebagai terobosan betapa pun abnormalnya. Melalui partisipasi politik langsung warga seperti itu, rasionalitas politik segera terlihat berbeda dengan rasionalitas ekonomi. Kita segera bisa melihat bahwa ternyata politik bukanlah perkara dagang, jual-beli, mahar persembahan, dan untung-rugi layaknya aktivitas ekonomi di pasar.

Politik ternyata menjadi aktivitas eksistensial yang bukan hanya berbeda dari ekonomi pasar, melainkan juga memberi dasar dan makna hakiki bagi kehidupan banyak orang. Dasar kehidupan bersama yang perlu terus-menerus diperkuat, dibongkar, direkatkan kembali, inilah yang oleh Oliver Marchart disebut sebagai politik pasca-fondasional. Artinya, sebuah ruang politik yang fondasinya tidak pernah stabil dan baku, melainkan terus-

menerus diperbarui dan dimaknai ulang (Oliver Marchart, Post-Foundational Political Thought, 8-9).

Bukankah para tokoh revolusi kemerdekaan juga menghadapi situasi yang kurang lebih sama: membongkar dan meruntuhkan fondasi lama selagi membangun merekatkan fondasi baru pada saat yang bersamaan? Orang seperti Ernest Douwes Dekker, ia adalah seorang pembangkang, seorang pendobrak yang meruntuhkan tetapi juga membangun di saat yang sama. Mungkin saat ini, kita akan banyak membutuhkan sosok-sosok pendobrak seperti Ernest Douwes Dekker demi keberlangsungan Republik Indonesia kita di masa depan.

Ito Prajna-Nugroho, (http://terapanfilsafat.com)

22 April 2016

Harap Cemas kepada Ahok

Dulu, ketika penulis masih usia anak-anak, pola bermain dan berbahasa kami memiliki ruang. Ruang ini dibangun di atas nilai-nilai luhur. Anak-anak dengan mudah menjadikan ruang itu sebagai pola bermain dan berbahasa.

Cara bertutur antaranggota keluarga sangat berpengaruh terhadap mereka. Karena terbiasa bertutur dengan benar dan baik di dalam keluarga, lingkungan jadi ruang besar pengejawantahan nilai keluarga di luar ruangan. Di sekolah, jalan, warung, pasar, sungai, di pos-pos RT dan RW, serta di banyak tempat bertemu para anggota masyarakat, lebih-lebih di rumah-rumah ibadah, kita akan temukan pola berbahasa dalam pergaulan berjalan dengan baik dan benar.

Penggunaan cara berbahasa yang benar dan baik, berkontribusi terhadap terjaganya harmoni sosial. Angka kriminalitas rendah, angka perceraian bisa ditekan, angka pertengkaran juga tidak tinggi. Anak-anak sekarang gemar tawuran karena belajar dari cara berbahasa dan bertutur yang tidak benar. Mereka saling serang secara verbal. Saling caci, saling maki, saling hina, dan saling menyakiti.

Ujung-ujungnya bertengkar. Nyawa anak-anak kita melayang sering hanya karena kata-kata kotor. Kita tak bisa berkilah, tidak apa-apa mereka berkata kotor asal pemberani. Alasan yang sangat tidak bisa dibenarkan. Tak apa-apa "ngomong" kotor asal antikorupsi. Alamak! Dulu, para guru yang berdiri di depan kelas, kehadirannya terasa ada di mana-mana. Sikap anak didik di luar sekolah, mudah terpantau karena jaring pengikat sosial masih kuat. Apa sebab? Salah satunya karena cara bertutur antar anggota masyarakat masih terjaga dengan baik.

Para pemimpin pada setiap tingkatan mengambil peran sangat signifikan. Pak Harto (Soeharto, presiden RI ke-2), dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dikenal sebagai penutur bahasa yang santun. Nyaris selalu tersenyum. Sangat irit kata-kata. Mendelegasikan urusan penjelasan kebijakan pemerintah kepada orang yang bertugas untuk itu. Kalau dicek di berbagai keterangan, baik di televisi, koran, majalah atau radio, kita akan kesulitan mendapati Pak Harto marah-marah apalagi mengumpat.

Bung Karno, meski dikenal orator berkelas internasional, rada flamboyan, menguasai banyak bahasa asing, namun saat bertutur, jauh dari kasar apalagi kotor. Karena caranya berbahasa baik dan menyenangkan, pidato Bung Karno selalu menyentuh dinding terdalam kesadaran bangsanya. Kalau tidak karena itu, Bung Karno diragukan tak akan berhasil mempersatukan bangsa yang "Bhinneka Tunggal Ika". Bahasa pula yang mengantarkan kita bersatu pada masa-masa awal perjuangan mendirikan negeri tercinta. Maka lahirlah Soempah Pemoeda. Sumpah tentang bagaimana berbahasa dengan baik.

BJ Habibie berbicara berapi-api penuh semangat, pintar dan bijak memilih kata-kata. Meski yang dijelaskan soal-soal teknis kedirgantaraan yang rumit,

tetapi karena pembawaan serta cara berbahasa yang santun, Pak Habibie mampu menghipnotis siapa saja lawan bicaranya. Tanyakan kepada anak-anak, terutama pada masanya, mereka semua ingin jadi seperti Habibie. Pembuat burung besi kebanggaan bangsa Indonesia.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah contoh lainnya. Selain karena ilmunya yang mumpuni, beliau dikenal sebagai budayawan, ulama, diplomat, penyair, penulis, dan aktivis LSM. Kendati dikenal suka blakblakan dalam berbicara, Gus Dur tetap mampu bertutur dengan manis, bahkan penuh humor. Selain karena jenaka, cara Gus Dur menyampaikan pesan-pesan moral selalu menyenangkan dan menyentuh. Intinya adalah bagaimana menyentuh hati setiap anak manusia.

Megawati lain lagi. Dikenal teguh pendirian bahkan sedikit kaku dan dingin untuk hal-hal yang baginya prinsip. Tetapi ketika berbicara di hadapan kadernya, terutama di kandang banteng, suaranya menggelegar. Tapi jangan harap kita temukan beliau berbicara kasar, apalagi kotor. Tanyakan orang terdekat di lingkaran terdalamnya, Ibu Mega selalu berkata-kata santun. Kalau tidak suka dan tidak setuju atas suatu hal, ia akan diam. Bukan mengumpat! Itulah beberapa nama dan teladan bagi kita tentang cara bertutur dengan baik dan benar.

Apakah mereka manusia sempurna? Tentu saja tidak, Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, dan Bu Mega adalah manusia biasa. Punya kelebihan dan juga kekurangan. Tetapi cara mereka memimpin bangsanya untuk merdeka, membangun, keluar dari krisis, selamat dari demokrasi totaliter menuju reformasi, adalah berkah teladan yang baik. Mereka adalah prototype, blueprint, danframe yang sangat mungkin dijadikan pola berbahasa bagi anak bangsanya.

Karena kuatnya pengaruh tokoh-tokoh ini di sebagian besar masyarakat, figuritas mereka telah menjelma nilai dan norma. Sungguh elok jika para pemimpin saat ini, pada semua tingkatan, untuk tidak melupakan para guru bangsa dalam cara bertutur dan berbahasa. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sudah memulai. Perspektif baru dalam memimpin. Ia menggunakan banyak cara untuk menjadi pemimpin yang baik dan benar. Karena ketegasan dan keberaniannya, banyak pihak di lingkungan kerjanya terhenyak.

Beberapa orang menjadi korban kebijakannya dalam memimpin. Beberapa orang digeser, beberapa lainnya dicopot. Banyak yang berharap kepadanya. Salahkah ini? Masih bisa didiskusikan.

Yang tidak bisa dibenarkan adalah caranya berbicara, bertutur, dan berbahasa. Cenderung kasar dan kotor. Kecenderungan negatif inilah yang tak pernah kita temukan di beberapa dasawarsa lalu, ketika Penulis masih anak-anak. Tentu semua orang khawatir cara bertutur dan berbahasa Ahok menular dan ditiru oleh anak-anak kita.

Sungguh demi Tuhan! Kita takut anak-anak kita belajar memaki kita, ayah bundanya, kakak adiknya, om dan tantenya, guru-guru di sekolah dan

tempat les, orang di jalan, mal, warung, di kendaraan umum hingga rumah ibadah. Terlebih, Tuhan sudah menurunkan kitab-kitab suci. Kitab yang berisi tentang firman-firman-Nya yang adiluhung, agung dan penuh kesantunan.

Kalau dalam diri manusia terkandung nilai-nilai ilahiah, sudah sepantasnya kita bertutur dan berbahasa sebagaimana Tuhan berbahasa. Sebagaimana para nabi berbahasa. Sebagaimana para santo bertutur. Hidup dan kehidupan akan jauh lebih mudah dan damai dengan bahasa yang santun.

Jannus TH Siahaan, Analis Kemasyarakatan

KORAN SINDO, 22 April 2016

Musim Politik Basuki

Kita memasuki musim politik yang "*tidak biasa*" sehubungan dengan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang baru akan berlangsung Februari 2017. Musim politik menjadi tidak biasa karena situasi dan kondisi politik nasional beberapa bulan terakhir sudah mulai panas sekalipun Pilgub DKI masih lama. Sikon (situasi dan kondisi) menjadi panas karena Gubernur DKI merupakan jabatan vital dan strategis, terutama sebagai administrator ibu kota negara yang layak dipandang sebagai "*Indonesia kecil*" ini. Ada fenomena baru: jika sukses memimpin ibu kota, sang gubernur sudah "*naik kelas*" untuk memimpin sebagai Presiden Indonesia.

Suka atau tidak, itulah yang dijalani Presiden Joko Widodo yang melompat dari Jalan Merdeka Selatan ke Jalan Merdeka Utara. Terlebih lagi Jokowi memenangi Pilgub DKI 2012 berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sekarang Gubernur DKI. Jadi, ada anggapan upaya Basuki terpilih kembali menjadi Gubernur DKI sebagai batu loncatan untuk menuju ke panggung nasional. Basuki sekurang-kurangnya diasumsikan akan mendampingi Jokowi sebagai wapres tahun 2019. Tidak ada yang keliru dengan ambisi memasuki panggung nasional. Dalam politik berlaku pepatah "*gantungkanlah cita-citamu setinggi langit biru*".

Dan, kita melihat pula sejumlah bacagub/bacawagub lain yang tentu saja mematok target yang serupa. Sebagai informasi, kini telah beredar lebih dari 30 nama yang sudah mendaftarkan diri sebagai bacagub/bacawagub ke sejumlah partai. Masih ada waktu beberapa bulan bagi partai untuk menyesuaikan diri dalam penjaringan bakal calon gubernur/bakal calon wakil gubernur (bacagub/bacawagub). Politik tak mudah diduga akhir ceritanya, yang bahagia jadi kecewa atau sebaliknya. Bukan mustahil PDI-P, misalnya, akan mendukung duet Basuki-Djarot Saiful Hidayat pada saat-saat terakhir atas perintah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Juga bisa terjadi lagi, Gerindra kembali membujuk Basuki "*pulang ke rumah*".

Musim politik yang tidak biasa ini menjadi panas karena kita warga Jakarta berkesempatan menyaksikan puluhan nama bacagub/bacawagub yang beredar di media massa ataupun media sosial. Banyak di antaranya nama-nama beken, seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pengusaha muda Sandiaga Uno, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, musisi Ahmad Dhani, dan seterusnya. Pilgub belum terjadi, tetapi prosesnya telah menjadi sebuah political catwalk yang ingar bingar. Setiap bacagub/bacawagub unjuk diri dengan pernyataan, tampilan, taglines, dan program yang layak jual. Yusril, misalnya, memperkenalkan program pemprov akan membeli sampah dari warga Jakarta. Teguh Santosa menyajikan tagline siap 24 jam bekerja untuk melayani warga.

Akan lebih banyak manfaatnya bagi kita warga Jakarta mendengar, melihat, dan mempelajari program-program mereka. Akan lebih banyak mudaratnya

bagi kita warga Jakarta dicekoki fitnah-fitnah SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang murahan.

Melihat Pilgub DKI 2012, fitnah-fitnah SARA sudah tidak laku lagi. Warga ibu kota Jakarta sudah lama rasional dan akan memilih pemimpin yang bekerja melayani kepentingan mereka sehari-hari. Musim politik yang tidak biasa ini menjadi panas karena melibatkan pula pemerintah pusat, KPK, dan BPK yang berkaitan dengan reklamasi Teluk Jakarta dan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Entah sudah berapa puluh orang, termasuk Basuki, yang telah dipanggil menjadi saksi KPK. Namun, kini kita warga Jakarta menjadi paham bahwa reklamasi yang diputuskan sejak era Orde Baru itu ada positif dan negatifnya. Kita juga menjadi tahu bahwa di lahan RS Sumber Waras itu akan dibangun rumah sakit kanker berkapasitas 1.000 tempat tidur.

Musim politik yang kali ini tidak biasa menjadi panas karena sosok Basuki sebagai petahana. Oleh sebab itu, adalah wajar Basuki berada dalam posisi defensif diserang para bacagub/bacawagub. Sama seperti sejumlah pemimpin daerah yang terbilang sukses, Basuki masuk dalam kategori pemimpin yang otentik. Pemimpin yang otentik itu bersikap dan berkata apa adanya, kurang sempurna karena bukan malaikat, dan sukar berubah. Bagi sebagian warga, Basuki dipandang sebagai "*figur pemecah belah*" (a dividing figure). Namun, sekurang-kurangnya jika merujuk pada pengumpulan dukungan lewat KTP yang diorganisasi oleh kelompok relawan Teman Ahok, tak sedikit pula warga Jakarta yang ingin Basuki terpilih kembali. Begitulah musim politik yang tidak biasa yang sedang kita masuki ini. Inilah "musim politik Basuki" yang akan kita jalani sampai akhir masa jabatan Oktober 2017 atau terus berlanjut setelah itu?

Budiarto Shambazy, Wartawan Senior KOMPAS

KOMPAS, 30 April 2016

Menjadikan Pilkada Menarik dan Bermutu

Sejumlah anggota DPR bersikeras mengegolkan keinginan untuk memperberat syarat dukungan bagi calon perseorangan. Meskipun dalam draf revisi UU Pilkada yang diusulkan pemerintah tidak mengubah syarat calon perseorangan, sejumlah anggota DPR ngotot mengusulkannya dalam pembahasan yang ditargetkan selesai akhir April ini. DPR ingin menaikkan syarat dukungan dari 6,5-10 persen menjadi 10-15 persen dari jumlah daftar pemilih tetap.

Di tengah sempitnya waktu, syarat pencalonan, baik untuk calon yang diusung parpol maupun yang maju lewat jalur perseorangan, jadi prioritas. Berbeda secara diametral dengan keinginan terhadap syarat dukungan bagi calon perseorangan, untuk calon dari parpol kalangan DPR ingin meringankan syarat itu dari 20 persen kursi di DPRD setempat atau 25 persen suara pada pemilu untuk DPRD jadi 15 persen kursi atau 20 persen suara.

Merugikan Bangsa

Apakah langkah parpol-parpol ini akan berdampak baik bagi mereka? Sekilas terlihat langkah mereka akan menguntungkan parpol. Calon perseorangan akan membentur hambatan yang tinggi untuk sampai ke arena kontestasi. Hal ini akan menghindarkan calon yang diusung parpol dari keharusan berhadapan dengan calon perseorangan, terutama calon yang kuat. Calon perseorangan yang kuat tampak amat menggentarkan, seperti pencalonan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan maju lewat jalur perseorangan pada pilkada di DKI Jakarta.

Kalau upaya menghambat Ahok menjadi alasan di balik kehendak memperberat persyaratan bagi calon perseorangan, ini suatu langkah kerdil. Langkah yang didasari kepentingan sempit-sesaat. Kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara dan bangsa, diabaikan.

Selain itu, mencermati pengalaman di pilkada serentak 2015, pasangan calon perseorangan mayoritas bukan dari kalangan yang murni non-parpol. Politisi PPP dan Partai Golkar, misalnya, di Pilkada 2015 menghadapi masalah: partai mereka berkonflik sehingga tak mampu mengusung calon. Banyak di antara mereka maju ke arena pilkada lewat jalur perseorangan. Artinya, pintu calon perseorangan sejatinya merupakan *exit strategy* bagi orang parpol yang tidak bisa maju lewat jalur perseorangan.

Dengan demikian, mempersulit pintu calon perseorangan sama saja mempersulit orang parpol sendiri. Parpol yang berupaya mempersulit pintu calon perseorangan sama saja berupaya menutup pintu kemungkinan bagi kader-kadernya yang ingin maju pilkada, tetapi terhambat karena masalah internal parpol.

Bagi rakyat, memperberat syarat dukungan bagi calon perseorangan adalah merugikan karena akan mempersempit pintu bagi masuknya alternatif calon.

Rakyat tidak memiliki alternatif calon yang memadai atau representatif bagi mereka.

Bagi negara dan bangsa, keinginan ini merugikan karena menghilangkan kemungkinan diperolehnya alternatif pemimpin yang bisa membawa negara pada kemajuan. Politisi Senayan harus mempertimbangkan hal ini, tidak semata-mata berhitung perebutan kekuasaan.

Keadilan yang tak adil

Alasan dari kehendak menaikkan syarat dukungan ini adalah untuk terwujudnya keadilan. Mereka membandingkan syarat dukungan bagi calon perseorangan dengan syarat partai politik/gabungan partai untuk mengusung calon, yakni 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara pada pemilu terakhir di daerah itu. Mereka berkilah, perbedaan angka persyaratan adalah tidak adil.

Politisi Senayan salah dalam menilai hal itu. Keadilan itu tidak dilihat dari kesamaan angka persentasenya, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek lain. Bagi calon yang diusung partai politik, angka 20 persen kursi atau 25 persen suara itu adalah angka yang sudah dimiliki parpol/gabungan parpol. Tak perlu ada upaya mendapatkannya dari bawah, dari rakyat.

Sementara bagi calon perseorangan, angka 6,5-10 persen dukungan tersebut adalah angka yang harus diperjuangkan dari rakyat langsung, yang dibuktikan dengan diperolehnya fotokopi KTP pemilih. Angka itu adalah angka yang belum di tangan.

Jika berbicara masalah keadilan dalam hal syarat dukungan ini, mesti dilihat dari tingkat kesulitannya, upaya-upaya untuk meraih itu. Parpol yang telah meraih angka syarat minimal tak perlu bekerja apa pun untuk memenuhinya. Pasangan calon tinggal melenggang. Parpol yang belum memenuhi syarat minimal tinggal melirik "kiri-kanan". Adakah parpol lain yang berminat bekerja sama dalam mengusung calon yang sama. Sementara bagi calon perseorangan, angka batas minimal dukungan itu benar-benar harus diperoleh dari rakyat satu per satu. Diperlukan perjuangan dan kerja keras untuk sampai pada batas minimal.

Dengan demikian, adalah bijaksana jika gagasan menaikkan syarat dukungan calon perseorangan dipikirkan ulang. Alih-alih memperberat syarat dukungan dari satu jalur pencalonan, DPR lebih baik memikirkan bagaimana meringankan syarat pencalonan, baik bagi calon perseorangan maupun bagi calon dari parpol.

Toto Sugiarto, Ketua Departemen Riset dan Consulting PARA Syndicate

KOMPAS, 30 April 2016

Politik Generasi Y

Grafik penduduk Indonesia pada rentang tahun 2010-2020 ditandai dengan pertumbuhan generasi muda yang cukup signifikan. Komparasi penduduk usia muda kini sudah mencapai 64 juta atau 28 persen dari populasi Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk usia lanjut yang menunjukkan gejala penurunan (BKKBN, 2013).

Adanya kenaikan jumlah penduduk usia muda tersebut merupakan bagian dari fenomena bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2025-2030. Besarnya jumlah penduduk usia muda tersebut sangat berpotensi menuntun ke melimpahnya jumlah tenaga kerja di Indonesia. Namun, bagaimana dengan urusan politik?

Besarnya jumlah penduduk usia muda tersebut juga menandai adanya transformasi berpolitik dari generasi baby boom menuju generasi Y. Generasi baby boom merupakan generasi yang terlahir setelah perang dunia dan hidup pada era dunia bipolar mulai tahun 1945 hingga 1979. Karena itu, cara pandang politik yang ditangkap generasi baby boom ini adalah melihat politik sebagai media mengamankan materi dan kedudukan. Mereka terbiasa melihat mana kawan dan lawan secara gamblang. Hal itulah yang berimplikasi pada konteks politik kekinian bahwa politik didominasi kepentingan dan melebarnya jurang antara publik maupun elite.

Platform Politik Bebas

Menurut Strauss (2000), politik generasi Y ditandai dengan keterikatan pada digitalisasi media. Mereka terbiasa menghadapi orang dengan beranekaragam dan bermacam latar belakang. Namun, dibandingkan dengan generasi baby boom, kesadaran politik yang ditampilkan generasi Y hanya berlaku di permukaan, tidak sampai mendalam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh media yang begitu masif telah memengaruhi secara signifikan arah perilaku politik generasi Y.

Peta politik Indonesia hari ini diwarnai dengan dua kecenderungan penting, yakni menurunnya kekuasaan oligarkis di tingkatan elite dan juga semakin meningkatnya kekuatan populis yang digalang di akar rumput melalui internet sehingga mampu menjadi alat penekan politik penting. Generasi Y yang semula bersifat apolitis kemudian berkembang menjadi generasi politis dikarenakan adanya ”panggilan” untuk membenahi kondisi negara.

Daripada membentuk partai politik, generasi Y lebih menyukai platform politik yang bebas, tanpa sekat, inklusif, dan juga independen secara afiliasi politik. Karena itu, pendefinisian bahasa politik yang disampaikan generasi Y lebih egaliter dan dinamis dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Pada intinya, politik yang digambarkan generasi Y ini ingin menampilkan tampilan demokrasi substantif, yakni politik yang melayani, politik yang lebih banyak mendengar, dan juga politik yang lebih melindungi. Berbagai hal itulah yang bisa terlihat dari berbagai macam jargon yang ditampilkan berbagai kelompok anak muda terjun dalam aksi politik jalanan.

Tanda-tanda semakin menguatnya politik generasi Y bisa dilihat dalam pemerintahan SBY jilid kedua. Indikasi yang paling utama adalah semakin intensifnya media sosial sebagai media pergerakan. Hal tersebut juga menandai adanya wajah baru dalam parlemen jalanan di Indonesia yang tidak mesti harus turun ke jalan dan rapatkan barisan, tetapi cukup dengan menyebar pesan politik melalui internet, kemudian membentuk adanya gerakan.

Hal menarik dari membaca politik generasi Y periode awal (2009-2013) adalah pembentukan ”musuh bersama” (common enemy) sebagai bentuk ikatan solidaritas kolektif, yakni dengan menempatkan korupsi dan partai politik sebagai musuh. Keduanya kemudian diolah menjadi berbagai macam pesan politik yang ditangkap kelas menengah sebagai penyebab negara tidak berjalan pada semestinya.

Kampanye ampuh tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap stigmatisasi populis versus elitis yang menyimbolkan rivalitas Prabowo dan Jokowi pada Pemilu 2014 lalu yang kemudian dimunculkan sebagai musuh bersama. Berbagai macam wacana dimunculkan, seperti halnya lahirnya otoritarianisme baru, pemimpin alternatif, maupun juga harapan baru. Meskipun dalam kancah politik Indonesia, generasi Y ini masih dikatakan sebagai generasi anak bawang karena mereka hidup dan besar dalam era transisi menuju demokrasi. Artinya mereka mengalami diskontinuitas sejarah dalam membaca secara riil sejarah politik Indonesia.

Militan dan Atraktif

Meski demikian, politik yang ditampilkan generasi Y ini merupakan generasi politik militan dan atraktif. Politik tidak lagi ditampilkan secara kaku, tetapi dinamis dan atraktif. Hal itulah yang menjadi alasan volunterisme politik menjadi alat baru dalam kampanye politik Indonesia kekinian.

Bagi generasi Y, sosok Jokowi merupakan personifikasi hidup dari nilai, norma, dan juga prinsip demokrasi substantif yang ingin dijabarkan dan disampaikan. Pasca Jokowi, generasi Y juga mulai mencari personifikasi hidup lainnya yang menggambarkan gambaran ideal politik itu harus dijalankan.

Sekarang ini di era kedua generasi Y (2014-kini) sudah muncul berbagai macam gerakan generasi Y lainnya yang muncul di berbagai macam kota, seperti halnya ”*Vote Cerdas BDG*”, ”*Orang Baik, Bersih 2014*”, dan lain sebagainya.

Berbagai macam gerakan tersebut disebut sebagai connective action (Sinarmata, 2015). Adapun connective action sendiri merupakan tindak lanjut dari proses keterikatan panjang antara generasi Y dengan upaya memperbaiki demokrasi kekinian. Ke depan, generasi Y ini lambat laun akan menjadi pemain politik penting di Indonesia, baik sebagai aktor politik aktif maupun aktor politik pasif.

Wasisto Raharjo Jati, Peneliti di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI

KOMPAS, 28 Mei 2016

”Reality Show”

Jujur saja, sampai hari ini nyaris tak ada berita politik yang lebih seksi dibandingkan dengan berita tentang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Fenomena ”*Ahokmania*” mungkin telah menyaingi ”*Jokowimania*” beberapa tahun lalu.

Padahal, pemilihan gubernur (pilgub) DKI baru akan berlangsung tahun depan. Namun, hebohnya sudah terasa sejak beberapa bulan terakhir dan sampai saat ini. Ketegangan itu, termasuk pengumpulan fotokopi KTP oleh Teman Ahok untuk memenuhi persyaratan mengikuti pilkada dari jalur perseorangan, diperkirakan akan makin meningkat sampai pelaksanaan pilgub pada Februari 2017.

Sepak terjang Basuki di media massa selalu cepat diperbarui dan bertalu-talu selama 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Jangan tanya bagaimana di media sosial, Anda pasti tidak ketinggalan mengikuti isu demi isu secara saksama.

Kita sudah lama memasuki era reality show. Istilah ini merujuk pada program televisi yang menyajikan kehidupan sehari-hari tokoh publik atau selebritas terkenal.

Kini, Basuki jadi pemeran utama *reality show* yang mungkin berjudul Ahokmania. Para pemeran pembantunya berderet, antara lain para bakal calon gubernur, sejumlah ketua umum partai politik, politisi kunci di DPRD DKI, Komisi Pemberantasan Korupsi, perusahaan-perusahaan pengembang, dan Teman Ahok.

Jika *reality show* ini berlangsung sekali sepekan, skenario atau plotnya berjibun sehingga sutradara enak menggantinya dengan cepat. Pekan ini, ceritanya soal dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras, pekan depan misteri reklamasi, pekan berikutnya rumor penggusuran Masjid Luar Batang, dan seterusnya.

Reality show ini penuh konflik, suspense, dan kadang juga fitnah yang memecah. Oleh sebab itulah, ia menciptakan keterbelahan antara ”*Ahok lovers*” atau ”*Ahokers*” melawan para ”*haters*”.

Suka atau tidak, memang muncul anggapan bahwa Basuki masuk dalam kategori figur yang cenderung memecah belah dukungan secara tajam. Ibaratnya, ia mudah berteman, tetapi gampang pula membuat musuh.

Dalam pemahaman Ahokers, Basuki hanya ingin bekerja sebaik-baiknya untuk warga Ibu Kota. Sebaliknya, para haters juga tak keliru ketika melihat dengan attitude problem yang diperlihatkan Basuki, terutama lewat mulutnya.

Dan, sebenarnya Ahokers ataupun haters meributkan hal-hal yang membuat pusing tujuh keliling publik awam. Tak banyak warga Jakarta yang paham diskresi atau kontribusi tambahan yang berkaitan dengan reklamasi pantai utara Jakarta.

Warga lebih memperhatikan ternyata pada musim hujan kali ini Jakarta yang tidak lagi kebanjiran. Setidaknya, genangan air di sejumlah tempat hilang dalam beberapa jam saja dibandingkan pada masa lalu yang bisa berhari-hari.

Tak ada lagi wartawan televisi yang nyemplung ke dalam banjir sambil melaporkan kondisi kekinian dengan embel-embel ”Breaking News”. Juga jarang terlihat pula perahu-perahu karet yang masuk ke permukiman miskin untuk mengungsikan warga yang sakit atau uzur.

Dan, jujur saja, ke mana pun Anda pergi, Ibu Kota relatif telah bersih. Ini semua berkat kerja keras pasukan oranye dan juga berkat ketua RW/RT yang memanfaatkan aplikasi Qlue untuk melaporkan kondisi lingkungan masing-masing.

Terlalu banyak untuk disebutkan satu per satu prestasi Basuki, juga Jokowi sebagai gubernur, yang telah dinikmati oleh warga Jakarta. Oleh sebab itu, sejumlah survei memperlihatkan, sampai saat ini Basuki memiliki kemungkinan terpilih kembali memimpin Ibu Kota untuk periode 2017-2022.

Ini semua menguak sebuah fakta positif tentang demokrasi kita yang terhitung baru lahir tahun 1998. Ternyata demokrasi kita tak lagi sekadar prosedural dan terkonsolidasi, tetapi juga mulai berkualitas.

Kualitas yang dimaksud adalah prestasi sejumlah pemimpin, dalam hal ini kepala daerah, dalam membenahi kabupaten/kota dan provinsi masing-masing. Dan, ternyata, respons publik semakin hari semakin apresiatif terhadap para pemimpin masing-masing.

Publik tidak lagi seperti obat nyamuk yang lebih banyak bengong saja mengikuti kemauan pemimpin mereka seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Publik secara perlahan-lahan menikmati kualitas demokrasi tersebut dengan kesadaran akan hak-haknya dan, tentu saja, kewajiban-kewajibannya sebagai warga yang baik.

Tidak ada lagi fenomena publik yang too dumb to be governed karena para pemimpin tidak lagi *too dumb to govern*. Oleh sebab itu, nikmati saja *reality show* sekali sepekan yang berjudul Ahokmania itu.

Budiarto Shambazy, Wartawan Senior KOMPAS

KOMPAS, 11 Juni 2016

Bising Komunikasi Jelang Pilkada DKI

Suhu politik di DKI sedang memasuki turbulensi disebabkan masih gamangnya partai politik melirik siapa calon penantang petahana yang pantas diusung. Hal itu menyebabkan isu apa pun tentang petahana menjadi seksi, menjadi trending topic media sosial, yang seolah bisa mengalahkan isu terorisme, korupsi, dan amburadulnya kerja para politisi. Arus komunikasi politik di DKI pun serta-merta jauh lebih bising seirama isu reklamasi.

Aroma politik menyusup ke bilikbilik kekuasaan yang tengah menunggu penentuan, tentang siapa saja nama yang akan bersiap masuk dalam arena pertandingan pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta. Para komunikator profesional dan politisi, aktivis, jurnalis peliput siaran politik, serta- merta mengejar isu ini sebagai bagian untuk menata komentar politik yang menempatkan mereka untuk berdiri di antara banyak kepentingan politik yang dipersiapkan untuk menyambut Pilkada 2017 mendatang.

Serta-merta pertarungan argumentasi antara yang pro dan kontra bermunculan di media (terutama media sosial). Sambil berdiskusi dengan mahasiswa saya yang juga seorang penggiat media, dia mengatakan, "*Sepertinya apa yang terjadi di DKI sedikit banyak punya analogi dengan apa yang dikatakan Chomsky ya bu* ?" Analogi yang dimaksud bisa menjadi perumpamaan itu adalah apa yang menjadi bagian dari yang pernah dikaji Noam Chomsky dalam bukunya *Manufacturing Consent* tentang keterlibatan negara adikuasa dengan dalih menegakkan demokrasi. Kelompok pendukung dianggap sebagai teman sementara yang tidak dilabeli sebagai *axis of evil* .

Mesin Komunikasi

Akhir-akhir ini rasanya kita cukup prihatin pada persuasi yang sublimasi seperti yang pernah ditemukan oleh Vance Packard melalui karya Hidden Persuaders. Betapa Packard menyingkap tabir kekuatan yang begitu potensial dari media untuk mengendalikan rakyat dan memasuki pikiran orang yang sedang istirahat dan tidak sadar, sehingga tidak terkendalikan oleh kemauan maupun pemahaman yang terbuka dari individu yang bersangkutan.

Saat ini pembelahan itu sangat kentara. Siapa pun orang yang ada pada posisi mengkritik Ahok maka kelompok haters Ahok akan memujanya. Sementara mereka ini bagi komunitas lovers tentu saja akan dinilai sebagai *axis of evil*. Dan dua-duanya tentu saja berjuang mencari pembenaran lewat media yang disebut Packard, terutama media sosial, siapa pun yang memiliki alur dan akses yang lebih besar terhadap media, maka kelompok itulah pemenangnya.

Meski kemenangan itu sekedar "semu", mindset publik juga dipengaruhi melalui penyesatan informasi. Karena itu dengan kritis Van Dijk selalu mengingatkan: "Akses dan kekuasaan yang besar bisa mengarahkan wacana ke arah mana saja, informasi bisa menjadi misinformasi dan disinformasi".

Dunia media seperti ditangkap dengan kesadaran yang rendah, pragmatisme awak media disambut manis oleh pragmatisme pembaca dan pendengar.

Padahal, sifat komunikasi bermedia dan terutama media sosial, efeknya jelas lebih dimungkinkan dari informasi yang disebarkan. Tetapi karena pragmatisme dan kecerdasan tidak paralel, maka jadilah semua informasi itu dimakan mentah-mentah. Alhasil, kebingungan informasi dan penyesatan fakta itu justru terlahir dari pengguna media itu sendiri. Situasi diperparah dengan banyaknya pemain media yang terjebak dalam koalisi, menjadi persis seperti koalisi partai politik.

Industri media juga lebih dominan ditentukan oleh mekanisme pasar, meski kebal dari kontrol penguasa, tetapi tetap kebanyakan tidak cerdik memosisikan diri ke dalam keberpihakan yang semestinya pada kepentingan publik. Sehingga elite politik dan penguasa atau calon-calon penguasa baru berlomba-lomba bertingkah laku politik ala dinamika yang diinginkan media.

Begitu menyesuaikan diri dengan format industri media (apalagi sejak booming media sosial), mereka memanfaatkan media itu sebagai sarana branding politik yang seolah mampu menempatkan mereka menjadi sasaran empati publik, alih-alih malah menyesatkan informasi publik. Jadi, karena media begitu disetir oleh mekanisme pasar, para aktor dan pendukungnya pun beramai-ramai membuka diri bagi masuknya isu-isu yang mempunyai nilai berita dari industri media.

Parahnya bahkan ada media yang menentukan pilihan berita berdasarkan *trending topic* di media sosial. Pilihan menonton dan pembaca media pun tidak lagi didasarkan pada rasionalitas pilihan atas berita, melainkan ditelan mentah-mentah dan dengan serta-merta mengungkapkan kembali respons atas pemberitaan itu dengan tanpa jeda.

Sehingga hal ini tentu saja sangat membantu para lovers atau pendukung tokoh politik tertentu untuk melakukan adaptasi ke publik melalui media terutama media sosial, sejenis "*reifikasi* " sifatnya. Bisa juga sebagai selling point bagi publik yang masih dianggap sebagai penentang.

Sehingga tidak heran kebijakan dirancang untuk menarik dan mengelola atensi media dan membuat media membantu menunjukkan identitas yang diinginkan kepada publik, adaptabilitas semacam ini tentu saja disambut berbeda bagi para penentang. Bagi para penentang, tentu saja yang tersajikan ke publik itu akan disambut dengan upaya mendiskreditkan posisi hegemoni tokoh yang bersangkutan.

Apa pun masalahnya, peringatan Chomsky akan perumpamaan campur tangan negara adikuasa dalam ritme media di jelang Pilkada DKI sepatutnya menjadi pertimbangan para calon penguasa yang "*berambisi*" untuk mengambil alih kepemimpinan di DKI. Pilkada yang akan digelar juga harus menjawab *concern* keinginan pemilih di DKI, yang tentu saja sudah sangat rasional dibandingkan dengan tipologi pemilih di daerah pemilihan lain di tanah air ini.

Partai-partai yang memenuhi persyaratan untuk mengusung bakal calon pun harus cerdik menempatkan diri di media dan media sosial. Seperti yang diingatkan oleh Lees-Marshment dalam tulisannya tentang "*Market Oriented Party*" (MOP). Bahwa seperti halnya media maka partai politik pun perlu beradaptasi dengan selera pasar dan kebijakan adaptifnya, terutama untuk menentukan calon yang akan diusungnya bisa menjadi selling point dalam rangka memenangkan perhatian media dan media sosial, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pemilih.

Meski kita masih meramalkan bahwa bising komunikasi politik itu tak akan usai, dia akan menjadi jeda atau tidak. Itu akan sangat ditentukan dengan seberapa besar kapabilitas calon yang akan menantang petahana. Jadi bukan sekadar popularitas, melainkan lebih pada hitungan elektabilitas.

Lely Arrianie, Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu;

KORAN SINDO, 18 Juni 2016

Dua Jalan bagi Ahok

Seperti yang diikrarkan, Teman Ahok, organisasi informal yang mengumpulkan dukungan bagi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, atau yang akrab dipanggil Ahok, sudah mengumpulkan lebih dari satu juta tanda tangan warga DKI. Tanda tangan dengan melampirkan fotokopi KTP tersebut dimaksudkan sebagai syarat dukungan bagi Ahok untuk maju sebagai calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.

Selebrasi lebih satu juta dukungan warga tersebut sudah dilakukan. Ahok sendiri juga hadir dalam keceriaan tersebut. Namun, di sisi lain, dua partai sudah jelas mendekat, Partai Nasdem dan Parta Hati Nurani Rakyat (Hanura). Satu kapal lebih besar, Partai Golkar, juga hampir pasti merapat.

Dengan dukungan trio Nasdem, Hanura, Golkar, cukup bagi Ahok untuk mendapatkan jatah satu nominasi dari persyaratan 20 persen kursi atau 25 persen suara dari pemilu anggota DPRD terakhir, yaitu Pemilu 2014. Jalan melalui partai politik adalah jalan kepastian. Sementara jalan melalui jalur perseorangan menjadi jalan terjal. Onak dan duri pasti banyak. Bukan tidak mungkin langkah terjegal, bahkan terjagal.

Di sinilah dilema muncul: apakah Ahok akan mencari jalan berkepastian melalui dukungan parpol. Ataukah tetap istiqomah dengan dukungan warga secara perseorangan. Di atas kertas, dengan satu juta fotokopi KTP lebih, harusnya Ahok lolos di tahap pencalonan karena cuma dibutuhkan 500 ribuan dukungan untuk calon perseorangan. Namun, sekali lagi, jalur perseorangan masih belum berkepastian. Ahok bisa terjegal, Basuki bisa terjagal.

Verifikasi Faktual

Sebabnya, revisi undang-undang pilkada terbaru (Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015) memperkenalkan instrumen verifikasi faktual. Dukungan terhadap Ahok yang berjumlah satu juta fotokopi KTP akan diverifikasi secara keseluruhan bila semuanya didaftarkan. Bila sebelumnya verifikasi cukup dengan sistem sampel, sekarang tidak lagi. Jika dalam proses verifikasi faktual tidak ditemukan warga yang memberi dukungan, sang calon harus menghadirkan orang dimaksud di PPS (panitia pemungutan suara). Bila tidak dihadirkan, suara dari yang bersangkutan dianggap gugur.

Verifikasi faktual memunculkan dua pertanyaan sekaligus. Pertama, soal kemampuan penyelenggara pemilu untuk melakukan verifikasi faktual. Kedua, soal transparansi proses. Mengenai soal pertama, bisa dibayangkan betapa repotnya KPU DKI untuk melakukan verifikasi semua dukungan tersebut. Mereka harus mengecek satu demi satu pendukung. Bila yang disertakan satu juta fotokopi KTP, satu juta alamat mereka harus cari.

Bila penyelenggara 'malas' bisa saja mereka menyatakan tidak menemukan pendukung yang dicari. Lantas, sang calon yang harus menghadirkan warga tersebut di PPS. Bila KPU DKI 'bermalas-malasan' makin sulit bagi calon

untuk menghadirkan pendukung. Sudah bukan rahasia lagi, banyak penduduk DKI yang antara KTP dan domisili aktualnya berbeda. Tidak mudah menghadirkan mereka dalam rimba beton Jakarta.

Mengenai soal yang kedua, verifikasi faktual tidak diumumkan. Hasilnya langsung dibawa ke PPS. Calon yang bersangkutan tidak memiliki kesempatan untuk komplain atau mengganti bila pendukung tidak diketemukan. Calon hanya menunggu palu keputusan: apakah memenuhi atau tidak untuk maju sebagai calon perseorangan. Hal ini berbeda dengan sistem sampel sebelumnya di mana calon bisa mengganti bila sampel pendukung yang disertakan tidak ditemukan.

Melanggar Prinsip Pemilu

Dalam konteks seperti ini, pembentuk undang-undang, yang notabene adalah partai politik, benar-benar telah bertindak tidak adil bagi calon perseorangan. Mereka mengabaikan prinsip berpemilu yang seharusnya dijunjung tinggi. Prinsip tersebut, yang tidak lain hak konstitusional, memberikan kesempatan selebar-lebarnya bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Salah satu caranya dengan menjadi kandidat baik melalui partai poltik maupun jalur perseorangan. Dua jalur tersebut harus dibuka selebar-lebarnya bagi warga negara yang berkehendak ikut dalam kontestasi pilkada. Hak untuk menjadi calon (*the right to be a candidate*) adalah hak konstitusional. Putusan MK tahun 2004 sudah mengabarkan hal tersebut.

Bila bagi kandidat pintu harus dibuka lebar, sebaliknya aturan harus dibuat ketat. Terlebih terkait dengan penegakan aturan-aturan pemilu (*electoral law enforcement*). Aturan pemilu harus mampu menjamin kompetisi yang jujur dan adil di antara calon. Pemenang pilkada tidak saja mereka yang merenggut suara terbanyak, melainkan bagaimana suara itu diperoleh, apakah secara genuine atau melalui cara-cara curang.

Mereka yang curang, misalnya melakukan praktik *money politics* kepada pemilih (*vote buying*) atau suap kepada penyelenggara, tidak boleh memiliki standing untuk terus berkompetisi, apalagi ditahbiskan sebagai pemenang. Pemilu konstitusional, yaitu luber dan jurdil (langsung umum bebas rahasia jujur dan adil) harus hadir. Sayangnya, prinsip berpemilu tersebut sering tidak mau dipahami pembentuk undang-undang. Yang mereka pikirkan bagaimana menjegal pesaing politik sejak awal. Bahkan, bila perlu, sejak suatu undang-undang pemilu dirumuskan.

Verifikasi faktual adalah contoh nyata dari hal tersebut. Aturan ini sudah pasti membuat banyak calon perseorangan yang 'ngeper' untuk maju. Aturan verifikasi faktual minus transparansi telah menyebabkan nominasi antara calon dari parpol dan perseorangan jadi tidak berimbang. Ancaman untuk tidak lolos bagi calon perseorangan makin membesar.

Pada titik ini, persoalan tidak sekadar ada pada seorang Ahok, yang harus memilih apakah maju dari parpol atau calon perseorangan, melainkan lebih

pada calon-calon perseorangan lainnya yang tidak punya daya tawar kuat. Ketentuan ini karenanya berpotensi melanggar prinsip konstitusional tentang pemilu yang jujur dan adil, dengan penekanan kata "adil".

Ketentuan ini juga menyebabkan pilkada makin mahal dan tidak efisien. Harusnya tenaga penyelenggara tidak perlu dikuras untuk melakukan verifikasi faktual, mendatangi setiap alamat pendukung calon perseorangan. Terpilih atau tidaknya seseorang dalam pemilu bukan dari banyaknya dukungan, melainkan dari banyaknya suara yang didapat.

Memilih Jalan

Kendati menggenggam dua jenis dukungan, Ahok tetap harus memilih salah satunya. Regulasi KPU tidak memungkinkan memanfaatkan dua jalur sekaligus antara jalur perseorangan dan jalur partai. Andaikan Ahok memilih jalur perseorangan, kesulitan sudah bisa dibayangkan. Skenario terpahit yang harus dihadapi, dukungan dinilai tidak memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi faktual. Namun, bila Ahok maju sebagai calon parpol, selain bakal melukai mereka yang telah 'berdarah-darah' mengumpulkan dukungan, tidak ada jaminan parpol tidak mencabut dukungan di saat-saat akhir pengajuan calon. Sementara pintu calon perseorangan sudah tertutup.

Ahok jelas dalam dilema. Maju melalui jalur perseorangan bukan tujuan, tetapi hanyalah alat atau sarana, kendati bagi sebagian orang merupakan ideologi. Jalur perseorangan jelas bukan untuk menggantikan peran parpol. Namun, bila parpol belum bisa dipegang seratus persen, terus maju dalam jalur perseorangan, apa pun risikonya, adalah pilihan yang mungkin lebih baik untuk saat ini. Selamat menimbang, Pak Ahok.

Refly Harun, Akademisi dan Praktisi Hukum Tatanegara;

DETIKNEWS, 20 Juni 2016

Teman Ahok dan Amerikanisasi Politik Indonesia

"*Teman Ahok*" bisa dikatakan adalah sebuah fenomena baru di kancah perpolitikan tanah air. Kemunculan sebuah "*gerakan relawan*" yang mendukung seorang kandidat pemilu secara eksplisit belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dibandingkan dan dikaji lebih dalam, sebenarnya gerakan Teman Ahok bukanlah sesuatu yang baru di ilmu politik khususnya jika kita menghubungkannya dengan Politik Amerika Serikat (AS). Apakah sebuah kebetulan atau tidak, gerakan yang tercatat Minggu (19/6/2016) telah berhasil mengumpulkan 1 juta KTP ini memiliki kemiripan dengan Political Action Committee (PAC).

Apakah PAC itu?

Di dunia perpolitikan negeri Paman Sam, PAC yang memiliki sejarah panjang ini secara sederhana didefinisikan sebagai sebuah komite politik yang bebas dibentuk siapapun, mulai dari pebisnis, serikat buruh, perusahaan lobi atau kandidat yang akan bertarung. Kalau di Indonesia, dapat dikategorikan sebagai tim sukses kampanye. Tujuan pembentukan PAC umumnya ada dua yaitu memenangkan kandidat yang didukung dan mendukung isu-isu politik tertentu. PAC dapat menggalang dana dari pihak manapun dan kemudian memberikannya kepada kandidat yang didukung.

Selain PAC, ada juga komite politik lain yang paling menonjol dan mendominasi pemilu presiden AS tahun ini yaitu Super PAC. Ada dua hal krusial yang membedakan PAC dan Super PAC . Pertama adalah jumlah dana yang dapat digalang dan dialirkan. PAC dibatasi hanya bisa menggalang dan memberikan kepada kandidat masing-masing maksimum 5000 dolar Amerika Serikat. Di tengah semakin mahalnya ongkos politik, Super PAC menjadi senjata ampuh capres AS yang bertanding. Alasannya karena tidak ada batasan jumlah dana yang dapat digalang dan kemudian diberikan.

Di pilpres 2016, salah satu Super PAC Capres Demokrat Hillary Clinton yang bernama "Priorities USA Action" kebanjiran dukungan fulus dari pengusaha maupun tokoh-tokoh ternama di negeri adidaya itu. Perbedaan kedua adalah perihal independensi dengan kandidat yang didukung. PAC dapat memberi langsung ke rekening kandidat dan berkoordinasi langsung dengan tim kampanye untuk membahas strategi politik. Sebaliknya, Super PAC bersifat independen dan dilarang memberikan kontribusi langsung dalam bentuk apapun ke kandidat. Super PAC dapat menyatakan dukungan secara terbuka ke kandidat yang didukung. Fulus yang terkumpul dipakai biasanya untuk memasang iklan politik di televisi, radio, dan surat kabar guna mempromosikan kandidat dan menyerang lawan politik.

Abu-abu

Namun independensi ini semakin lama semakin abu-abu. Kolom editorial New York Times yang dirilis beberapa waktu lalu menuliskan bahwa Super PAC perlahan mulai mengambilalih fungsi kampanye seperti pengangkatan

tim sukses, pemasangan iklan politik, penyelenggaraan kampanye akbar, dll. Sebelumnya, fungsi ini dijalankan oleh tim kampanye bentukan kandidat.

Jadi apakah Teman Ahok dikategorikan sebagai PAC atau Super PAC?

Secara harafiah gerakan relawan ini tidak termasuk kategori manapun karena PAC maupun Super PAC tidak mengumpulkan KTP atau di AS disebut signatures untuk meloloskan kandidat yang didukung. Satu hal juga, Teman Ahok tidaklah melakukan penggalangan dana dalam rangka mendukung kampanye Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Seperti yang mereka nyatakan, gerakan relawan ini hanya menggalang dana dalam bentuk penjualan merchandise, tidak lebih untuk mendukung biaya operasional mereka. Namun jika kita melakukan komparasi, satu hal yang tidak terbantahkan adalah Teman Ahok secara terbuka menyatakan dukungan ke kandidat tertentu seperti fungsi kampanye politik yang dilakukan oleh PAC maupun Super PAC.

Teman Ahok secara aktif mempromosikan Basuki baik secara lapangan maupun siber melalui social media mereka yang sangat aktif. Tidak ketinggalan, poin krusial lain yang mirip adalah masalah independensi Teman Ahok yang masih menjadi isu kontroversial walau kedua belah pihak telah menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada "koordinasi" antara Graha Pejaten dan Balaikota. Layaknya seperti Super PAC, terlihat ada warna abu-abu mengenai hubungan antara gerakan relawan dan Gubernur DKI sendiri.

Sebenarnya keabu-abuan ini disebabkan karena fenomena ini adalah sesuatu yang baru di tanah air. Di Amerika, PAC dan Super PAC yang sudah beraktivitas sebelum tahap kampanye resmi, memiliki regulasi yang jelas. Selain itu, electoral campaign finance atau peraturan penggalangan dana kampanye juga terbukukan dengan baik prosedurnya.

Sementara itu, di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur bagaimanakah tahapan pra-kampanye sebelum pendaftaran calon mengenai apa yang boleh dan tidak boleh terutama dalam hal penggalangan dana. Jadi jika ditanya kembali, apakah Teman Ahok adalah PAC, Super PAC atau tim sukses kampanye Ahok? Jawabannya adalah abu-abu. Kegiatan yang dilakukan sangatlah menyerupai tim sukses, namun karena belum adanya peraturan yang jelas, maka bisa dikatakan Teman Ahok adalah PAC maupun Super PAC yang masih malu-malu dan berhati-hati menjalankan aktivitasnya.

Layak Disambut

Jika dipikirkan lebih dalam, kemunculan PAC atau Super PAC ala Indonesia ini sebenarnya layak disambut. Adanya sebuah gerakan relawan yang bersifat politik adalah fenomena sehat di demokrasi Indonesia yang masih muda ini. Gerakan ataupun komite politik ini bisa menjadi alternatif ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi politik. Alangkah baiknya gerakan pra-kampanye seperti ini dapat diatur dalam sebuah regulasi resmi terutama perihal penggalangan dana.

Di tengah semakin meningkatnya ongkos politik tanah air, sumbangan yang diberikan masyarakat dalam bentuk pembelian merchandise merupakan bentuk partisipasi politik yang sangatlah positif.

Apakah kelak ingin meniru PAC yang dapat mengalirkan langsung dana ke kandidat atau Super PAC yang bersifat independen, biarlah pihak berwenang yang menentukan.

Poin terakhir yang juga tidak kalah krusial adalah hubungan Teman Ahok dan partai politik yang sedang menjadi isu panas.

Di Amerika, kemunculan PAC dan Super PAC tidak memicu terjadinya perdebatan mengenai deparpolisasi. Yang ada, partai dan komite politik ini saling bahu-membahu untuk mengejar target kemenangan yang diincar. Umumnya PAC maupun Super PAC akan berkonsentrasi dalam memperkenalkan kandidat ke masyarakat dan pemasangan iklan politik untuk "menghajar" lawan politik yang dihadapi. Partai Demokrat maupun Partai Republik sendiri memiliki keterbatasan dalam hal perekrutan tenaga kampanye dan jumlah dana yang dapat diterima. Kehadiran komite politik ini sangatlah membantu partai untuk menjalankan kampanye politik yang memerlukan energi dan biaya yang besar.

Dalam rilis Minggu sore, (19/6/2016), Teman Ahok dalam salah satu poinnya menyatakan " siap bekerjasama dengan seluruh pihak dengan satu syarat, yaitu memiliki tujuan yang sama. Dengan relawan-relawan lain, dengan partai-partai politik, selama semuanya mendukung Ahok tanpa syarat dan hutang politik. "*Teman Ahok bukan relawan anti partai politik. Gerakan seperti Teman Ahok justru untuk memperlihatkan aspirasi warga kepada parpol, dan kami bersyukur hari ini sudah ada beberapa Parpol yang menjawab aspirasi tersebut*," tulis rilis tersebut.

Apakah Super PAC ala Indonesia bernama Teman Ahok ini akan lebih jelas fungsinya dan membentuk "*grand coalition*" dengan partai politik seperti di AS? Waktulah yang akan menjawabnya.

Sebagai penutup, penulis ingin mengakhiri dengan menyentil sedikit bahwa partai politik memang dipenuhi segudang cerita negatif. Namun jika kita hanya melihat sisi negatif partai maka tidak akan pernah ada founding fathers. Bangsa ini bahkan mungkin tidak akan pernah dilahirkan sebagai Indonesia jika pada 4 Juli 1927 Bung Karno tidak mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) yg menempuh perjuangan politik merebut kemerdekaan.

Ericssen, Pemerhati Politik Amerika, Politik Indonesia, dan Politik Elektoral

KOMPAS, 21 Juni 2016

Satu-satunya Cara Mengalahkan Ahok

Mari berandai-andai. Jika Anda akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti, strategi apa yang akan Anda ambil untuk mengalahkan petahana? Kira-kira, apa yang membuat warga Jakarta enggan untuk memilih Ahok?

Mari kita tengok sebentar survei terbaru yang dirilis Manilka Research and Consulting, Minggu (19/6/2016). Survei yang dilakukan Juni 2016 itu mendapatkan, elektabilitas Ahok berada di urutan teratas, 49,3 persen, mengungguli 17 nama lainnya.

Di bawah Ahok ada Ridwan Kamil di posisi kedua dengan elektabilitas 9,3 persen. Selanjutnya ada Yusril Ihza Mahendra 6,8 persen, Yusuf Mansur 6,5 persen, dan Tri Rismaharini 6 persen. Selengkapnya tentang hasil survei baca: Survei: Elektabilitas Ahok Belum Tersaingi.

Dengan elektabilitas yang kukuh, apa yang bisa dipertarungkan di panggung pilkada? Anda mau beradu program? Mari simak survei kepuasan masyarakat Jakarta atas kinerja Ahok.

Dalam survei yang dilakukan Manilka didapati, tingginya elektabilitas Ahok karena publik mengaku puas dengan kinerja pemprov DKI Jakarta. Tingkat kepuasannya mencapai 67,5 persen. Tiga sektor kepuasan publik adalah di bidang pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir.

Angka kepuasan itu lebih rendah dibanding hasil survei Charta Politika yang dilakukan sekitar medio Maret 2016. Charta Politika mendapatkan, angka kepuasan publik mencapai 82,8 persen. Rinciannya, sebanyak 21,8 persen menyatakan sangat puas dan 61 persen mengaku cukup puas. Baca: Charta Politika: 82,8 Persen Warga Jakarta Puas akan Kinerja Ahok.

Dari dua survei itu tentu tidak bisa serta merta ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepuasan publik menurun. Dua survei yang dilakukan dua lembaga berbeda mestiya memiliki sejumlah catatan berbeda. Lain halnya jika survei dilakukan oleh lembaga yang sama dengan maksud mencari hasil longitudinalnya dalam periode tertentu.

Kembali pada pertanyaan semula, apa yang harus dilakukan berhadapan dengan petahana yang elektabilitasnya begitu kukuh? Hanya ada satu cara: menggerus kredibilitasnya. Pilkada masih tahun depan. Masih ada waktu yang sangat cukup untuk mengikis kredibilitas Ahok.

Setidaknya ada tiga isu yang selama ini kerap dimainkan dalam pertarungan pilkada untuk menggerus kredibilitas lawan. Ketiga hal itu menyangkut program kerja, kelemahan personal, dan hal-hal menyangkut masalah hukum.

Program Kerja

Pertama, persoalkanlah kinerja petahana dan kampanyekanlah harapan. Mengkritik kinerja petahana biasanya adalah amunisi paling mudah untuk meraih dukungan publik. Setelah itu, kandidat baru akan menjual harapan

bahwa mereka akan melakukan kinerja yang lebih baik. Jokowi dan Basuki berhasil menggunakan strategi ini pada Pilkada DKI Jakarta 2012. Dengan mengusung semboyan "Jakarta Baru", keduanya menjual harapan akan Jakarta yang lebih baik. Pasangan ini menohok kinerja Fauzi Bowo soal macet, banjir, dan birokrasi pemerintahan yang bertele-tele. Strategi ini mengena dengan baik. Ada rasa frustrasi pada sebagian warga Jakarta akan semrawutnya kehidupan di kota ini. Sosok Jokowi yang dipandang sukses saat memimpin Solo menjadi ruang harapan baru akan Jakarta yang lebih baik.

Di era Basuki saat ini, kinerja apa yang bisa dipersoalkan dan mengubah pilihan voters?

Macet? Makin ke sini kita mahfum mengatasi macet bukan persoalan sehari dua hari. Problem utama adalah buruknya sistem transportasi yang membuat masyarakat Jakarta lebih senang menggunakan kendaraan pribadi ketimbang kendaraan umum. Di eranya, Ahok menambah ratusan bus Transjakarta. Rute-rute baru juga ditambah. Ahok mengatakan, rute Transjakarta harus ada di setiap rute transportasi umum yang ada saat ini.

Untuk mengatasi macet, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Mass Rapit Transportation (MRT) dan Light Rapit Transportation juga tengah dibangun.

Banjir? Normalisasi sungai berjalan. Yang paling dramatis, dengan segala protes atas kebijakannya, Ahok berhasil melakukan penataan atas Kampung Pulo di Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang bertahun-tahun menjadi langganan banjir. Tak ada lagi cerita tentang banjir di tempat itu. Seiring dengan itu, pasukan oranye bentukan Pemprov DKI Jakarta juga menunjukkan kinerja yang menuai apresiasi. Sungai-sungai dibersihkan. Mereka sigap menanggapi laporan warga.

Penggusuran? Ahok menerapkan model baru melanjutkan apa yang dilakukan Jokowi yaitu merelokasi warga ke rumah susun. Kawasan yang digusur kemudian terlihat ditata menjadi lebih baik. Di tempat baru, sejumlah fasilitas diberikan cuma-cuma. Kebijakan ini, suka tidak suka, meski ada yang mengkritik keras, jauh lebih baik ketimbang era Sutiyoso yang menggusur tanpa memberi solusi tempat baru bagi warga tergusur.

Soal program, sejauh ini pun belum ada pertarungan wacana mengenai rencana membangun Jakarta yang lebih baik. Perjalanan masih panjang. Para calon masih disibukkan mencari kendaraan politik untuk maju dalam pilkada.

Personal

Kedua, menohok sisi personal lawan yang dianggap sebagai kelemahan atau kekurangan. Ini juga jurus klasik yang selalu diterapkan dalam setiap pilkada. Strategi jenis ini harus pintar-pintar dimainkan. Bisa berhasil, bisa juga malah gagal total. Takaran kampanyenya harus pas, jangan sampai

berlebihan agar menghasilkan efek yang maksimal. Isu yang biasanya dimainkan adalah soal rekam jejak, kelemahan personal, tak jarang melebar ke isu SARA.

Pengalaman di Jakarta, isu SARA tak laku jadi bahan dagangan. Di Pilkada DKI Jakarta 2012, Rhoma Irama di-bully habis-habisan di media sosial ketika menyerukan memilih pemimpin seagama. Masih di tahun yang sama, Nahcrowi Ramli juga menuai kritik keras saat melontarkan kalimat "*haiyaaa Ahook*" dalam debat calon wakil gubernur yang disiarkan sejumlah stasiun televisi. Simpati publik atas pasangan Foke-Nachrowi merosot setelah insiden itu.

Soal sasaran personal, Ahok memiliki sejumlah catatan yang kerap dijadikan "gorengan" untuk menyerang dirinya. Mempersoalkan identitas Ahok sebagai non-Muslim dan Tionghoa jelas tidak laku di Jakarta. Yang masih kerap dimainkan untuk menurunkan kredibilitasnya adalah karakternya yang meledak-meledak, temperamental, kata-katanya yang dinilai tidak santun.

Bisa jadi sebagian warga Jakarta gerah dengan karakter ini. Tapi, banyak juga yang tidak mempersoalkannya. Terbukti, elektabilitas Ahok tinggi. Bagi sebagian orang, "*kegalakan*" Ahok adalah bagian dari perjuangannya membereskan aneka persoalan di Jakarta. "*Kegalakan*" atau malah "*ketidaksantunan*" bisa jadi juga dianggap mereprensentasikan kekesalan mereka atas praktik politik dan birokrasi yang ruwet di Jakarta selama ini.

Setidaknya, sejauh ini kita melihat "keburukan" personal Ahok dalam rupa SARA dan karakter personalnya tidak mempan menjadi peluru jitu menghancurkan kredibilitasnya.

Penyimpangan Hukum

Masih adakah peluru lain yang bisa dimainkan? Ada. Yang ketiga adalah mencari celah persoalan hukum. Ahok selama ini mem-branding dirinya sebagai politisi jujur dan bersih. Jauh dari korupsi. Ia transparan mengungkap asal muasal hartanya. Rasanya, ia satu-satunya politisi di Indonesia yang berani dan siap melakukan pembuktian terbalik soal asal-usul kekayaannya.

Ia juga memposisikan diri sebagai politisi yang melawan dengan keras politik transaksional yang acap terjadi dalam tubuh partai politik. Ia tak gentar keluar dari Gerindra dan bebas merdeka sebagai politisi independen. Ingat, Ahok adalah peraih penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award 2013 untuk kategori pimpinan daerah. Ia dinilai sebagai figur yang bersih dan transparan sejak menjadi anggota DPRD Belitung, Bupati Belitung, anggota DPR RI, dan saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ketika publik muak dengan sepak terjang partai politik dan praktik korupsi para politisi, Ahok menghadirkan diri sebagai sosok politisi harapan publik. Tak heran jika 1 juta KTP dukungan untuk maju melalui jalur independen berhasil diraihnya.

Branding sebagai politisi bersih adalah kekuataannya yang paling paripurna. Persis di titik itulah ia diuji kini. Kasus reklamasi, pembelian lahan RS Sumber Waras, dan tuduhan aliran dana pegembang ke "Teman Ahok" adalah ujian itu. Ahok lovers pasti geram. Sementara, haters bersukacita. Kampanye negatif adalah hal yang lumrah dalam demokrasi. Jika dimaknai secara benar, kampanye negatif justru menyehatkan. Ia mempersoalkan apa yang selayaknya perlu dibenahi.

Yang harus diwaspadai adalah kampanye hitam. Jika kampanye negatif mengangkat persoalan-persoalan nyata, kampanye hitam berisi fitnah dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Keduanya punya tujuan sama: menggerus kredibilitas lawan.

Apakah sejumlah tudingan yang kini terarah pada Ahok merupakan kampanye hitam atau negatif? Ahok dan tim dituntut menari dengan cantik dalam gendang yang sedang ditabuh lawan. Yang harus diwaspadai Ahok tentu bukan dirinya, tapi juga kawan-kawan di timnya yang selama ini mendukungnya. Bisa jadi celah yang terbuka ada di sana.

Di tengah pertarungan politik, kadang yang memprihatinkan justru bukan para politisinya, tapi lovers dan haters-nya yang acapkali kehilangan rasionalitas mereka.

Pemimpin yang berdiri di atas singgasana puja-puji akan kehilangan kontrol yang sehat dari publik sebagai pemilik demokrasi. Sebaliknya, lawan politik yang semata-mata hanya ingin menjatuhkan dengan menghalalkan segala cara adalah racun yang mematikan bagi akal sehat kita.

Sementara, mereka yang berada di luar pertikaian, kerap membenci politik karena kebenaran obyektif tidak pernah menjadi tujuan para politisi. Para politisi hanya sibuk mencari kebenaran versi mereka demi kemenangan mereka semata. Di luar para politisi yang tengah bertarung, masyarakat Jakarta punya hati nurani untuk melihat kebenaran sedang berdiri di mana.

Heru Margianto, Wartawan Kompas.com;

KOMPAS, 22 Juni 2016

Jalan Politik Ahok

TEKAD Teman Ahok mengumpulkan 1 juta KTP untuk memuluskan pencalonan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI 2017 dari jalur independen akhirnya terpenuhi. Kalau saja Habiburokhman, Ketua DPP Bidang Advokasi Partai Gerindra, ialah politikus bermutu, hari ini kita menyaksikan pemenuhan janjinya untuk terjun bebas dari Monas, atau setidaknya meminta maaf karena telah berbohong.

Keberhasilan itu tidak terlepas dari pencitraan Ahok sebagai pemimpin berkarakter. Meski sarat kontroversi, Ahok memang magnet politik. Sikapnya tegas tanpa kompromi dan terkesan garang. Ia haram bersantun ria sekadar menutup kepalsuan. Tanpa ragu Ahok mengenalkan kultur politik baru; tampil apa adanya, blakblakan dan berikrar total membela rakyat, bertaruh nyawa sekalipun.

Keteguhan sikap politiknya berbuah manis. Sulit untuk tidak menyimpulkan Ahok berhasil memimpin DKI. Pasar Tanah Abang yang kumuh dan lusuh kini menjadi rapi dan asri. Kalijodo yang sekian lama menyimpan angker dirobohkannya. Bahaya banjir yang sekian lama membelenggu Ibu Kota secara perlahan diatasi. Andai kata ia kelak terpilih kembali, Jakarta akan menjadi lebih maju, aman, dan beradab.

Kemandirian Masyarakat Sipil

Terkumpulnya 1 juta KTP tersebut sudah melampaui yang dibutuhkan, yakni 523 ribu KTP atau 7,5% dari jumlah pemilih DKI, yakni 6.983.692 suara. Terkumpulnya 1 juta KTP merupakan prestasi luar biasa. Bisa saja menjadi dukungan terbesar dalam sejarah calon independen di negeri ini.

Prestasi itu merupakan indikasi tumbuhnya kemandirian warga dalam mendewasakan demokrasi. Sejauh ini demokrasi telah disandera parpol. Pencalonan presiden, gubernur, dan bupati/wali kota didominasi parpol. Jabatan-jabatan penting seperti menteri dan lembaga-lembaga tinggi negara juga penuh sesak oleh kader-kader parpol.

Dominasi parpol berimplikasi luas bagi terjadinya berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan negara. Kepala daerah yang diusung parpol berkewajiban untuk 'setor' setelah terpilih. Mereka tidak leluasa menjalankan tugas karena intervensi parpol. Inilah penyebab banyak kepala daerah yang terperangkap korupsi. Alhasil, dambaan rakyat akan pelayanan publik yang mudah, murah, dan berkualitas tak kunjung terwujud.

Kenyataan ini yang dilawan Ahok di DKI. Karena terlalu rewel, Partai Gerindra ditendangnya. Kegemaran PDI Perjuangan untuk mendikte dilecehkannya. Baginya, parpol bukan mitra yang baik dalam membangun daerah. Lebih jauh, Ahok ingin membuka mata publik bahwa kehadiran parpol justru membuatnya sulit untuk secara total membenahi DKI.

Perlawanannya terhadap parpol semakin mantap ketika ia melirik jalur independen dalam Pilkada DKI 2017. Gayung bersambut, tekad tersebut

disambut antusias warga DKI yang tergabung dalam Teman Ahok. Setahun terakhir, mereka bergerak cepat, bekerja keras, dan berkorban waktu, tenaga serta dana untuk mengumpulkan KTP warga.

Dalam kaitan ini, kerja keras Teman Ahok telah membuka mata kita bahwa masyarakat sipil terus berkembang di negeri ini. Larry Diamond dalam *Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation* (1994) menegaskan masyarakat sipil ialah warga yang terorganisasi dan mampu berkiprah secara sukarela (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), keswadayaan (*self-supporting*), dan kemandirian. Nilai-nilai tersebut mutlak diperlukan agar masyarakat sipil bisa menjadi kekuatan mandiri, terbebas dari ketergantungan terhadap negara atau badan lainnya. Dalam kasus DKI, Teman Ahok sebagai representasi masyarakat sipil berhasil mengimbangi, bahkan mencegah terjadinya dominasi parpol yang sejauh ini terbukti menyandera demokrasi.

Pilihan Ahok

Jalan Ahok menuju DKI 1 masih panjang, jauh dari selesai. Dalam pidato perayaan terkumpulnya 1 juta KTP, Ahok mengatakan lebih baik tidak menjadi gubernur ketimbang mengecewakan Teman Ahok. Bagi Ahok, nama baik lebih mulia ketimbang kekuasaan. Sangat terang-benderang di sini betapa tingginya apresiasi Ahok terhadap ketulusan dan kerja keras warga DKI dalam memberikan dukungan terhadapnya. Ahok memang tidak bisa jauh-jauh dari rakyat yang setiap saat membelanya dari kegenitan parpol yang tiada henti menyerang, mencerca, dan mengusik kedudukannya.

Persoalannya, calon independen bukan jalan mudah. Terkumpulnya 1 juta KTP sama sekali tak menjamin mulusnya pencalonan Ahok.

Pertama, kewajiban melakukan verifikasi faktual yang teramat rumit. KPU melakukan verifikasi terhadap bukti dukungan independen. Jika KPU belum sukses melakukannya, bakal calon harus menghadirkan pemilik KTP ke PPS. Ini tentu masalah serius. Warga DKI tidak mudah dihadirkan karena rata-rata sibuk. Padahal waktu yang diberikan KPU hanya tiga hari.

Kedua, memilih jalur independen mengandung risiko serius bagi penyelenggaraan pemerintahan di kemudian hari. Tanpa dukungan parpol, kekuasaan tak akan mampu bekerja secara efektif. Memilih jalur independen berarti meneruskan konflik Ahok versus parpol. Bisa dipastikan pembangunan dan pelayanan publik tak akan berjalan optimal.

Ketiga, memilih jalur independen di tengah meluasnya dukungan parpol bisa ditafsirkan sebagai arogansi. Padahal sejak dini NasDem dan Hanura telah mendukungnya tanpa syarat. Partai Golkar di bawah pimpinan Setya Novanto dengan segera merapat. PDI Perjuangan harus melakukan 'pertobatan politik' dengan terus menerus merayu agar Ahok kembali berpasangan dengan kadernya, Djarot Saiful Hidayat.

Jalan politik mana yang ditempuh, semua berpulang pada Ahok. Jalur parpol tentu lebih realistis. Pilihan tersebut bukan berarti mengkhianati

Teman Ahok. Kekhawatiran parpol akan menjerat Ahok dengan berbagai ketentuan menjadi tak relevan. Toh Ahok telah melakukan perlawanan total dan menang terhadap tantangan 106 anggota DPRD DKI. Semua ini tentu tidak terlepas dari dukungan Teman Ahok.

Di atas segalanya, *Teman Ahok* harus menunjukkan kebesaran hati bahwa seluruh dukungannya bersifat sukarela. Teman Ahok boleh memberikan saran, tapi tidak boleh mendikte, apalagi menekannya. Dukungan parpol dan Teman Ahok ialah jalan lapang bagi mantan bupati Belitung ini untuk kembali memimpin DKI.

Romanus Ndau Lendong, Kader Partai Golkar

MEDIA INDONESIA, 24 Juni 2016

Ahok dan "*Hollands Denken*"

"*Ulang tahun Jakarta 22 Juni 1527 ditemukan di tengah semangat besar pembebasan sejarah Indonesia dari sudut pandang kolonial.* "Jauhi penyakit Hollands denken," begitu pesan Walikota Sudiro pada awal 1956 ketika menugaskan guru besar sejarah di UI, Prof. Dr. Sukanto, mencari hari lahir Jakarta.

Mengapa pesan Walikota Sudiro itu perlu diungkit lagi?

Gampangnya karena ulang tahun Jakarta sudah dekat. Lebih jauh karena Gubernur Ahok dalam soal kawasan sejarah Pasar Ikan dan Luar Batang akhirnya berkonsultasi dengan pakar arkeologi.

Tetapi, sayangnya—selain sudah telat karena situs sejarah benteng Zeeburg dalam penggusuran Pasar Ikan yang lalu ikut digusur—Gubernur Ahok menggunakan hasil konsultasi itu untuk menyerang dan melegitimasi niatnya menggusur Luar Batang: "Pada era kolonial kawasan Luar Batang dijadikan gudang penyimpanan, jika ada gudang mana mungkin ada warga bermukim di sana."

Celakanya pernyataan Gubernur Ahok itu keliru. Sebab menurut F. de Haan dalam Oud Batavia kampung Luar Batang oleh Kompeni dijadikan pemukiman yang menampung para nelayan dari Jawa Timur dan Cirebon yang disebut wetanger, orang-orang dari timur.

Kekeliruan ini memalukan sekaligus memberitahukan bahwa Gubernur Ahok menderita hongeroedem (busung lapar) sejarah. Gubernur tidak tahu sejarah paling elementer kotanya bahwa Luar Batang adalah kawasan yang menyatu dengan sejarah Sunda Kelapa, kota bandar yang jauh sebelum Belanda tiba sudah ada dan diacu sebagai cikal-bakal Jakarta.

Sebab itu pernyataan Gubernur Ahok mengandung kuman berbahaya yang bisa membangkitkan lagi penyakit sejarah paling mematikan, yaitu sejarah Indonesia sama dengan sejarah orang Belanda, tak terkecuali sejarah Jakarta.

Sejarah Jakarta hanya dimulai saat orang Belanda tiba dan membangun Batavia. Sebelum itu tidak ada sejarah Jakarta. Para sejarawan menyebutnya Neerlandosentris.

Cara pandang kolonial

Cara pandang sejarah yang berorientasi kolonial. Inilah yang disebut Sudiro sebagai penyakit Hollands denken, yaitu ungkapan tersohor pasca-kemerdekaan yang digunakan Sukarno untuk menunjuk kepada "pandangan yang cupet, cetek, sempit, dangkal dan bodoh".

Ungkapan Hollands denken sering digandengkan dengan kleinburgelijk atau pandangan dunia seseorang yang bagai katak dalam tempurung. Pola pikir kleinburgelijk disampaikan secara sistematis melalui sekolah rendah dan menengah.

Dalam konteks sejarah, misalnya, yang diajarkan di kelas hanya sejarah Belanda, seperti pelajaran vaderlandsche geschiedenis dan geschiedenis van Netherlandch-Indie yang berisi sejarah peradaban Belanda, para pahlawannya dan bagaimana datang ke Nusantara seraya membangun koloni.

Sejarah itu kemudian ditransformasikan ke ruang-ruang publik melalui penamaan jalan dan taman di Batavia juga kota lainnya.

Tak aneh begitu Indonesia merdeka semangat mengganti sejarah gaya kolonial yang Neerlandosentris kepada yang berorientasi nasional atau Indonesiasentris menggema menyusul nama-nama jalan yang sebelumnya telah diubah.

Tokoh-tokoh sejarah Indonesia ditampilkan untuk mengganti nama-nama pahlawan kolonial yang dijadikan nama-nama jalan di Batavia. Nama jalan Jan Pieterzoon Coen menjadi jalan Sultan Agung yang adalah musuh bebuyutannya.

Pahlawan Belanda dalam perang Aceh yang diabadikan sebagai nama jalan van Heutzs diganti jalan Teuku Umar dan Cut Mutiah.

Pahlawan Diponegoro yang mengobar perang paling menguras kas negara Belanda dijadikan pengganti nama jalan Orange Boulevard.

Akhirnya nama Batavia yang digunakan Sekutu setelah Jepang kalah secara resmi oleh pemerintah RI pada 1950 dipulihkan menjadi Jakarta lagi, seraya ditetapkan sebagai nama resmi.

Jakarta kota baru

Jakarta bukan kelanjutan Batavia. Jakarta kota baru. “Bahkan Jakarta harus jadi mercusuar daripada perjuangan melawan kolonialisme seluruh umat manusia,” kata Sukarno. Sebab itu Batavia tidak cukup sekadar diganti namanya, tetapi juga dicarikan ulang tahunnya yang menunjukkan sejarah perlawanan terhadap kolonialisme. Selain itu, hari ulang tahun Jakarta pun harus mencerminkan bahwa sebelum orang-orang Eropa datang Jakarta telah menjadi poros kekuatan pribumi. Otomatis suara sejarah kota bandar Kalapa, Sunda Kalapa dan Jayakarta pun menaik.

Para sejarawan dan arkeolog mempublikasikan aneka sumber sejarah dan membukakan wawasan baru sejarah serta peradaban besar pra Batavia. Sekitar 85 tahun sebelum orang Belanda tiba, telah menjelajah Tome Pires dari Portugis ke pantai utara Jawa pada 1513. Pires melaporkan Kalapa adalah salah satu pelabuhan terpenting Kerajaan Sunda.

Kalapa giat dalam aktivitas perdagangan ekspor impor internasional. Sebab itu ramai dikunjungi orang-orang India, Cina, Arab, dan kawasan Nusantara, terutama Maluku karena urusan rempah. Kalapa dikelola dengan sistem ekonomi uang oleh suatu pemerintahan lokal yang dipimpin syabandar.

Informasi dari Pires itu dikuatkan sumber Sunda kuno, Bujangga Manik, Carita Parahiyangan dan Sanghyang Siksakandang ing Karesian dari tahun 1518.

Terlebih menarik pada 1539 ada lagi laporan Joae de Barros dari Portugis yang menyatakan bahwa di Kerajaan Sunda yang memayungi pelabuhan Kalapa bermukim 50.000 orang.

Mengingat Kalapa adalah pelabuhan terpenting dan terbesar, maka sejarawan RZ Leirissa dan arkeolog Uka Tjandrasasmita memperkirakan dihuni oleh 15.000 orang.

Perkiraan ini bisa diterima sebab ketika orang Belanda pertama kali tiba di Sunda Kalapa yang sudah bernama Jayakarta pada 1596, mereka disambut syabandar dan dilihatlah di kota pelabuhan itu ada 3.000 rumah.

Ulang tahun Jakarta

Sejarah besar itulah yang ingin didengungkan dan merupakan tugas Gubernur Jakarta setiap ulang tahun Jakarta dirayakan.

Adalah benar bahwa tanggal dan bulan ulang tahun yang ditemukan oleh Prof. Dr. Sukanto itu keliru serta dikritik oleh Prof. Dr. Hussein Djajadiningrat sehingga terjadi polemik hebat, meskipun sayangnya kedua pendapat mereka juga kacau, tetapi—seperti kata Adof Heuken dalam Historical Sites of Jakarta—bagaimanapun Sudiro sebagai pemimpin Jakarta sudah menang.

Sebab akhirnya Sudiro mendapatkan hari ulang tahun pesanannya yang jauh dari penyakit Hollands denken. Otomatis ia punya legitimasi historis mendesak Sukarno segera meresmikan Jakarta sebagai ibukota Indonesia.

“Tunggu apa lagi Bung, Jakarta sudah punya syarat lengkap,” tantang Sudiro pada 1959 menjelang ulang tahun Jakarta di tengah ramai polemik pindah ibukota.

Kalau Jakarta adalah wajah muka Indonesia, maka Jakarta punya lanskap daratan yang dibentengi gunung-gunung di selatan lantas membujur ke utara dengan keluasan laut yang ditaburi pulau-pulau sebagai wilayah dominan.

Ini gambaran wajah muka Indonesia sebagai archipelagic state atau negara laut utama. Dari laut, pantai, muara dan teluknya Jakarta itu pula bangkit sejarah besar Sunda Kelapa yang tidak mungkin lagi bisa diabaikan apalagi dilupakan.

Sukarno tidak menjawab. Tak selang lama, dekat Sudiro selesai menjabat, Sukarno menyerahkan secarik kertas kepadanya. Isinya tulisan tangan versi bahasa Indonesia pesan Sukarno di gerbang akhir Museum Sejarah Perjuangan Nasional Mexico pada akhir Mei 1959:

“Kita tidak meninggalkan sejarah oleh karena sejarah berjalan terus dengan penghidupan kita.Tanah tumpah darah merupakan suatu kelanjutan dari masa lalu dan kita adalah kelanjutan anak bangsa yang bekerja untuk

kebesarannya. Dari zaman lampau kita menerima kekuatan yang dibutuhkan untuk zaman sekarang, dari zaman lampau kita kita menerima niat dan dorongan buat hari depan, marilah kita menyadari tanggung jawab yang mengikuti dari masa lalu itu, agar kita semakin patut menerima kehormatan."

Setahun kemudian, 1961, dalam pidato ulang tahun Jakarta ke-434 di Lapangan Ikada, Sukarno mengakhiri semua polemik yang dilakukan mulai dari politisi sampai ahli kebatinan tentang pemindahan ibukota.

Ia menunaikan permintaan Sudiro menyatakan perlu dibuat undang-undang yang mengukuhkan Jakarta sebagai ibukota dan meningkatkan statusnya dari kota praja menjadi provinsi yang dipimpin seorang gubernur.

Sukarno pun berpesan:

> *"Kau Gubernur Jakarta kenalilah sejarah Sunda Kelapa, Jayakarta sehingga bisa kau ambil buah faedahnya untuk kita bangun kota kemenangan sempurna. Itulah arti Jayakarta. Kota yang bermanfaat bagi semua. Seperti pohon kelapa pada Sunda Kelapa berguna bagi semua. Jangan kau contoh Batavia kota yang hanya megah bagi kaum uangnya, tidak bagi rakyat banyak, bahkan mereka dicurigai. Kota kemenangan sempurna megah dalam segala arti, sampai di dalam rumah-rumah kecil daripada marhaen di kota Jakarta harus ada kemegahan."*

JJ Rizal, Sejarawan dan Pekerja di Komunitas Bambu; Penerbit khusus Buku-Buku Sejarah

KOMPAS, 24 Juni 2016

Pemimpin Pemarah

Secara umum label kemarahan pada seorang pemimpin lebih dikonotasikan secara negatif daripada positif. Sebagai contoh kasus adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang lebih sering dilabel sebagai pemimpin pemarah yang negatif.

Seorang konglomerat Indonesia yang hebat pernah berkata kepada saya: pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa marah, lewat sebuah kemarahan yang "pada tempatnya".

Dalam praksis manajemen dan kepemimpinan, kemarahan sesungguhnya sebuah kompetensi yang sangat diperlukan oleh seorang pemimpin. Memang ada yang mengatakan, ketegasan lebih diperlukan, bukan kemarahan. Soal ini sesungguhnya lebih terkait dengan cara atau ekspresi kemarahan. Namun, secara esensial, seorang pemimpin perlu memiliki "kompetensi kemarahan" yang memadai.

Mendobrak "status quo"

Terkait konteks tulisan ini, saya ingin mencuplik tulisan Profesor Sarlito Wirawan Sarwono (30 Maret 2014) yang mengungkapkan tentang "*kemarahan Ahok*". Apa yang salah dengan (kemarahan) Ahok? Dia memang pemarah, tetapi yang dimarahi adalah masyarakat yang mengancam petugas dengan golok. Yang dimarahi, bahkan dipecat, adalah kepala dinas yang terbukti korupsi dan mbalelo sehingga merugikan rakyat. Bahkan hasil analisisnya terhadap kemarahan Ahok bermuara pada kesimpulan tegas bahwa Gubernur itu marah hanya pada dua kondisi: 1) terjadi korupsi, 2) terjadi ketidakadilan.

Sementara Malcolm X pernah mengatakan, ".*Namun, ketika mereka marah, mereka tengah membuat perubahan*". Dari beberapa uraian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu tugas terpenting pemimpin adalah membuat perubahan, dan perubahan itu adalah mendobrak status quo. Dan, untuk konteks kepemimpinan nasional, status quo tersebut setidaknya ada dua hal: korupsi dan ketidakadilan.

Itu sebabnya jika muncul pemimpin yang suka marah terhadap status quo tersebut, para pembela status quo akan balik "marah-marah" kepada pemimpin itu meski jenis kemarahannya tentu berbeda. Jadi, kompetensi kemarahan itu perlu dimiliki seorang pemimpin, baik dalam kondisi organisasi normal maupun terlebih lagi kondisi status quo ekstrem seperti kita. Secara kontekstual bisa ditegaskan bahwa kepemimpinan nasional kita adalah kepemimpinan status quo. Kepemimpinan nasional kita adalah kepemimpinan yang tak memiliki "kompetensi kemarahan" memadai untuk mendobrak status quo tersebut.

Sampai di sini persoalannya menjadi gamblang bahwa pemimpin yang baik, bahkan hebat, justru memerlukan kompetensi kemarahan yang memadai. Ada tiga aspek kompetensi kemarahan yang perlu dipahami.

Pertama, spirit kemarahan! Spirit atau landasan kemarahan harus jelas, yakni mendobrak status quo dimaksud; dari kondisinya yang paling sederhana sampai paling kompleks. Seperti telah diuraikan sebelumnya, kondisi status quo (korupsi dan ketidakadilan) bangsa kita termasuk dalam kategori kondisi yang kompleks. Artinya, kita bahkan memerlukan pemimpin dengan kompetensi kemarahan yang bagus untuk menerobos semua itu. Jadi, landasan kemarahan kepemimpinan bukanlah kemarahan tanpa sebab atau karena tabiat temperamental belaka.

Kedua, sifat kemarahan! Kemarahan sebagai kompetensi juga memiliki "sifat kemarahan"-dan dalam hal ini ada dua sifat: (1) genuine (murni, ikhlas); (2) obyektif. Sifat pertama, pemimpin marah karena dia memang ingin melakukan kebaikan dan perbaikan, perubahan positif; bukan karena ingin menunjukkan atau pamer kekuasaan belaka. Itu sebabnya kompetensi kemarahan seorang pemimpin merupakan antitesis dari pemimpin yang hipokrit atau munafik, yang sepintas kelihatan sabar, kalem, tetapi sesungguhnya dia ingin menutupi kebenaran, populis, atau sifat hipokrit lainnya.

Sifat kedua (obyektif), pemimpin marah untuk tujuan yang jelas, perubahan yang lebih baik bagi organisasi, serta sebatas koridor tugas dan kewajiban. Kemarahan pemimpin bukan berlandaskan subyektivitas sang pemimpin, misalnya karena tak suka atau sentimen. Tapi, kemarahan yang "pada tempatnya".

Ketiga, tujuan kemarahan! Kompetensi kemarahan dari aspek tujuan ini sangat penting karena kemarahan itu dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan. Dalam praksis manajemen dan kepemimpinan disebut anger is a decisive tool-kemarahan yang menghasilkan keputusan efektif; kemarahan yang berorientasi pada hasil. Keputusan efektif itu tentu memecahkan persoalan, memberikan jalan keluar, dan yang terpenting: menghasilkan perubahan!

Kemarahan subyektif

Kompetensi kemarahan seorang Ahok sampai batas tertentu juga dimiliki dan dilakukan oleh para pemimpin potensial lainnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga pernah marah dengan hebat ketika menangkap basah petugas di sebuah jembatan timbang di Batang sedang menerima uang sogokan dari seorang kernet truk. Atau Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang mencak-mencak karena Taman Bungkul kebanggaannya hancur lebur akibat ulah satu perusahaan yang bagi-bagi es krim. Hal sama juga dilakukan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil karena Balai Kota Bandung dipadati massa yang memicu kemacetan hebat di mana-mana akibat ulah perusahaan yang sama membagi-bagi es krim gratis. Kemarahan Ahok, Ganjar, Risma dan Ridwan, sampai batas tertentu, bersinggungan dengan korupsi dan nuansa ketidakadilan.

Presiden Joko Widodo sendiri juga tak segan menunjukkan "kompetensi kemarahan"-nya, menyangkut berbagai status quo bangsa dan negara kita.

Bahkan kemarahan itu bukan hanya tertuju kepada jajaran pembantunya, melainkan juga kepada beberapa negara lain yang selama ini memperlakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tidak adil.

Pemimpin pemarah-dalam konteks kompetensi kemarahan seperti dimaksudkan-justru diperlukan oleh kepemimpinan nasional negeri ini. Negeri ini sudah terlalu lama menikmati status quo ketidakadilan dan korupsi sehingga kehilangan kompetensi kemarahan yang diperlukan. Bangsa ini justru tak memerlukan kemarahan-kemarahan reaktif-subyektif dari mereka (termasuk politisi pecundang) yang dilandasi dendam dan sakit hati, serta yang paling ironis: kemarahan subyektif yang ditujukan kepada para "pemimpin yang sedang marah pada status quo".

Ungkapan fenomenal George F Will (Desember 1981), sesudah pengumuman darurat di Polandia, semakin menegaskan kebutuhan kita akan "pemimpin pemarah". Katanya, "*Amarah kita meluap justru disebabkan oleh ketiadaan amarah orang-orang. Kita memerlukan sebuah kemarahan sejati yang bisa mendorong kita untuk bertindak positif*".

Ungkapan George F Will itu, terkait konteks tulisan ini, bermuara pada "kompetensi kemarahan" yang diperlukan para pemimpin bangsa ini. Kemarahan yang bisa memprovokasi orang lain dan organisasi untuk mendobrak status quo (korupsi, ketidakadilan, atau lainnya) yang selama ini secara pasti menghancurkan bangsa kita.

Herry Tjahjono, Terapis Budaya Perusahaan

KOMPAS, 27 Juni 2016

Teman Ahok & Ilusi Kebangkitan Masyarakat Sipil

Sepak terjang Teman Ahok dan keberhasilannya mengumpulkan 1 juta KTP untuk mendukung pencalonan Ahok sebagai calon independen dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 memunculkan kembali euforia soal peran anak muda dalam politik Indonesia. Fenomenalnya sepak terjang Teman Ahok pun kemudian memunculkan berbagai glorifikasi terhadap Teman Ahok. Ada yang menyebutnya sebagai gerakan politik, gerakan relawan, partisipasi politik anak muda, atau bahkan sebagai bentuk penolakan generasi Y terhadap oligarki parpol.

Ada juga yang menyebutnya sebagai anomali politik dan upaya deparpolisasi partai di Indonesia. Klaim sebagai gerakan relawan (*civic voluntarism*) juga beberapa kali disampaikan oleh para pengurus Teman Ahok, yang kemudian juga diafirmasi oleh beberapa kalangan sebagai kekuatan masyarakat sipil.

Kebangkitan Masyarakat Sipil?

Jika ditelisik ke belakang, wacana mengenai kebangkitan sipil mulai banyak disuarakan sejak beberapa tahun lalu. Momen Pilgub DKI 2012 yang berlanjut dengan Pilpres 2014 diyakini sebagai momentum kebangkitan masyarakat sipil. Saat itu kekuatan masyarakat sipil muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari koalisi organisasi masyarakat sipil sampai pada relawan politik— yang juga dianggap menjadi fenomena baru dalam politik Indonesia.

Aktivisme politik masyarakat sipil saat itu juga terlihat sangat beragam: ada yang tetap menjalankan fungsinya sebagai watchdog yang menjaga integritas pemilu, ada yang memosisikan diri sebagai kelompok oposisi terhadap kandidat tertentu, ada juga yang memilih bersikap netral, dan ada juga yang justru melibatkan diri sebagai pendukung atau bahkan tim pemenangan kandidat.

Menurut Agus Sudibyo, aktivisme semacam ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan pola lama di mana masyarakat sipil umumnya mengambil jarak dari pertarungan politik memperebutkan kursi, dan lebih memosisikan diri sebagai "*pendamping*" masyarakat (2014).

Boleh jadi, konteks politik saat itu menjadi salah satu alasan yang menjelaskan mengapa aktivisme politik masyarakat sipil menguat dan bahkan menjadi partisan. Laporan riset Puskapol pada Desember 2014 menyebutkan bahwa polarisasi dua kandidat dalam pilpres mendorong masyarakat sipil mengekspresikan pilihan politik secara terbuka dan lebih "*politis*".

Kemenangan Jokowi dalam Pilgub 2012 dan Pilpres 2014 juga tak lepas dari peran aktif masyarakat sipil. Mereka mewujud sebagai kekuatan politik riil yang tidak hanya memosisikan dirinya di luar dan berhadapan secara vis a vis dengan kekuatan besar oligarki parpol, tetapi juga menjadi basis

pendukung, pemilih dan sekaligus menjadi juru kampanye (*spoke person*) bagi pasangan Jokowi.

Sekilas, keyakinan tentang bangkitnya masyarakat sipil tidak terbantahkan. Sefsani & Ziegenhain (2015) menyebutnya sebagai faktor penentu kemenangan. Pujian yang agak bombastis bahkan menyebut masyarakat sipil sebagai *the political celebrity of the election* (bintang pemilu) dan *savior of Indonesia's democracy* (penyelamat demokrasi).

Singkat kata, keberhasilan masyarakat sipil sebagai mesin yang menumbuhkan semangat voluntarisme politik, aktivisme individual, monitoring publik, dan aksi kolektif yang memengaruhi proses pemilu merupakan wujud kebangkitan masyarakat sipil. Fenomena Teman Ahok pada akhirnya memperkuat kembali keyakinan soal kebangkitan masyarakat sipil sebagai pivotal player dalam politik pemilu di Indonesia.

Glorifikasi

Glorifikasi terhadap masyarakat sipil bukan hal baru dalam diskursus akademik. Mereka sering dipuja-puji sebagai mesin pendorong demokratisasi, dan diasumsikan memiliki kon-tribusi positif terhadap demokratisasi. Masyarakat sipil bahkan diyakini merupakan prasyarat bagi tercapainya konsolidasi demokrasi (Putnam 1993, Gellner 1994, Fukuyama 1996, Diamond 1999).

Putnam misalnya meyakini masyarakat sipil yang aktif sebagai obat mujarab (panacea) untuk berbagai penyakit dalam demokrasi, terutama untuk mengatasi apatisme, ketidakpuasan, dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Glorifikasi ini belakangan banyak digugat. Omar Encarnacion (2003) dalam bukunya, *The Myth of Civil Society*, mengkritisi pandangan tentang "*kesempurnaan*" masyarakat sipil sebagai agen demokrasi sebagai keyakinan bersifat problematis bahkan nyaris mendekati mitos.

Sebaliknya, keberadaan masyarakat sipil yang aktif justru bisa menjadi penghambat demokratisasi, terutama jika demokrasinya masih dikarakterisasi dengan inefisiensi dan lemahnya institusi-institusi politik. Dalam konteks Indonesia, glorifikasi masyarakat sipil juga menyisakan banyak persoalan serius.

Politik "partisan" masyarakat sipil dalam pemilu ternyata membawa dampak pada melemahnya fungsi pembangunan demokrasi yang semestinya melekat dalam dirinya. Narasi mengenai keterlibatan masyarakat sipil yang awalnya bicara soal penolakan terhadap cengkeraman oligarki parpol serta upaya menyelamatkan demokrasi Indonesia pada akhirnya justru terdegradasi menjadi real partisan: menjadi buzzer dan pembela mati-matian politisi yang didukungnya. Bahkan, tak jarang pembungkaman kritik terhadap pemerintah justru dilakukan oleh sesama kelompok masyarakat sipil sendiri. Dalam banyak kasus di mana kebebasan bersuara semakin ditekan dan pelanggaran HAM terus terjadi, sikap masyarakat sipil terbelah dan cenderung berstandar ganda.

Isu reklamasi dan penggusuran daerah kumuh di Jakarta misalnya menjadi contoh sempurna yang memperlihatkan keterbelahan dan standar ganda sikap masyarakat sipil. Agaknya, sikap partisan saat pemilu menjadi harga mati untuk terus mendukung figur pilihannya ketika dihadapkan pada situasi di mana kelompok nonpendukung masih saja gencar memosisikan dirinya sebagai pengkritik utama pemerintah.

Dalam kasus Teman Ahok, glorifikasi terhadap mereka juga sama problematiknya. Terlepas dari berbagai apresiasi terhadap keberhasilan mereka, atau bahkan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada mereka belakangan ini, tulisan ini ingin mengingatkan pembaca agar kita tidak terjebak pada glorifikasi yang bisa jadi ternyata hanya ilusi. Karena, aktivisme masyarakat sipil yang sesungguhnya semestinya didasarkan pada dukungan terhadap gagasan (ideas), bukan figuritas (persona). Bagaimanapun Ahok adalah politisi. Rekam jejaknya sebagai politisi jauh lebih mudah ditelusuri dan menjadi bukti daripada imaji yang dibangun dan dipoles lewat proses branding dan marketing yang boleh jadi juga mengandung ilusi.

Praktik *trial and error* dalam berdemokrasi selama 17 tahun terakhir semestinya cukup memberi kita pelajaran bahwa percaya pada Mesias politik tidak akan membawa kita sampai pada cita-cita demokrasi.

Hurriyah, Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI

KORAN SINDO, 29 Juni 2016

Relawan Politik

Lima hari berturut-turut, 16-20 Mei 2016, Kompas menurunkan laporan tentang fenomena relawan dan kerelawanan dari berbagai aspek. Mulai dari relawan kemanusiaan, relawan perjuangan sebagaimana terjadi pada masa kemerdekaan, relawan pemberdayaan masyarakat, hingga relawan politik.

Bangkitnya kerelawanan dalam banyak aspek itu kini dianggap sebagai harapan bagi kebangkitan dan tingginya partisipasi bangsa Indonesia untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Namun, tulisan ini hanya akan fokus pada relawan politik atau gerakan sosial partisan (GSP).

Relawan politik tampaknya memiliki sejarah sendiri. Pada masa kemerdekaan, relawan politik adalah ketika seseorang ikut dalam suatu perjuangan kemerdekaan. Sementara pada perubahan-perubahan berikutnya, relawan politik lebih diartikan sebagai mereka yang ikut secara sukarela dalam suatu perubahan drastis politik dan penggulingan rezim otoriter seperti 1966 dan 1998. Pengertian itu disebabkan konteks ketika peristiwa itu terjadi, yaitu pemerintahan yang otoritarian. Tanpa ada penggulingan atau penggantian rezim secara total, perubahan akan sulit dilakukan.

Di era demokrasi sekarang ini, relawan politik memiliki arti berbeda. Bukan pergantian rezim dalam arti sistem, melainkan lebih pada agenda perubahan dan aktor yang diharapkan mampu membawa perubahan tersebut melalui proses normal demokrasi. Pengertian ini setidaknya diambil dari bangkitnya gerakan relawan politik pada relawan Jokowi-Ahok pada Pilkada Jakarta 2012 dan relawan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Penulis sendiri melakukan riset pada dua event itu dan menyebutnya sebagai gerakan sosial partisan (Kompas, 25/5/2016). Setelah dua momen itu, sejauh ini hanya relawan Teman Ahok yang muncul menjelang Pilkada Jakarta 2017.

Dalam riset penulis, fenomena GSP di dua peristiwa, Pilkada Jakarta 2012 dan Pilpres 2014, adalah relawan yang membawa agenda atau aspirasi publik untuk perbaikan kualitas demokrasi dan pelayanan publik dengan segala dimensinya: lebih transparan, akuntabel, anti korupsi, dan perbaikan pelayanan publik. Dengan mengacu pada agenda itulah, kemudian relawan mencari atau menemukan calon pemimpin yang memiliki rekam jejak sesuai agenda tersebut dan tentu saja memiliki potensi elektoral yang baik dan mumpuni secara politik. Pemimpin tersebut tidak selalu memiliki hubungan langsung kepemimpinan dengan kelompok relawan itu sendiri.

Tidak berhenti di situ, langkah berikutnya, relawan kemudian "memaksa" partai yang paling dekat dengan kecenderungan calon tersebut untuk mengusungnya sesuai persyaratan UU Pemilu dan UU Pilkada. Relawan Teman Ahok tampaknya berjalan lebih jauh dengan meninggalkan negosiasi dengan partai politik secara cukup untuk bertindak memenuhi persyaratan calon independen sehingga ditafsirkan oleh sejumlah kalangan sebagai anti partai politik dan merusak tatanan demokrasi multipartai. Lebih dari itu, kini relawan Teman Ahok juga dipersoalkan eksistensinya, apakah ia kelanjutan fenomena kerelawanan di

atas yang membawa misi agenda perubahan atau hanya duplikasi dari kehidupan politik pada umumnya yang dinastik dan oligarkis.

Relawan politik atau GSP jelas berbeda dengan tim sukses dalam berbagai pemilu atau pilkada, baik untuk seorang calon maupun parpol. Tim sukses biasanya dibiayai oleh calon atau partai atau donor tertentu untuk meraih jabatan tertentu dan membawa misi dari calon atau parpol tersebut, tidak peduli sesuai atau tidak dengan aspirasi publik.

Adapun GSP lebih mengedepankan agenda perubahan dan perbaikan, khususnya pelayanan publik, anti korupsi, serta proses politik yang murah dengan menghindari "dagang sapi" karena bertumpu pada kerelawanan. Dalam hal ini, tampakya, relawan Teman Ahok kehilangan argumentasi tentang mengapa memilih Ahok sebagai calon, sebaliknya lebih terfokus pada ketokohan Ahok itu sendiri dengan melupakan agenda apa saja yang dicanangkannya.

Populisme?

Penulis berbeda pendapat dengan sejumlah peneliti yang menyebut fenomena GSP sebagai populisme. Sebaliknya, justru fenomena tersebut sebagai pertanda pemilih makin rasional karena mereka tidak lagi bergantung pada latar belakang primordial, agama, etnis, kelompok, dan bahkan sejarah keterlibatannya di dalam parpol. Proses ini memberikan pendidikan politik kepada para pemilih dan juga parpol untuk lebih berorientasi pada program atau harapan perubahan dari agenda yang ditawarkan untuk keuntungan mereka sendiri.

Kunci dari rasionalitas pemilih tersebut adalah kepercayaan, aspek penting yang sedang hilang dari rakyat/pemilih terhadap para politisi ataupun partai politik. Disebabkan adanya ketakpercayaan rakyat terhadap para politisi dan parpol, mereka akhirnya lebih menghargai inisiatif para relawan politik atau GSP ketimbang parpol. Namun, reaksi parpol tertentu terhadap munculnya relawan Teman Ahok justru memperkuat ketakpercayaan itu sendiri. Hal itu disebabkan parpol bukan mempersoalkan kelemahan Ahok dalam pelayanan publik dan anti korupsi sebagai gubernur, melainkan lebih menonjolkan hal-hal yang kontroversial yang menampakkan kepentingan elite ketimbang pelayanan publik kepada rakyat banyak.

Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa tak ada korupsi pada kasus Sumber Waras merupakan pukulan telak bagi tuduhan-tuduhan kontroversial itu. Persaingan dan perebutan, dan sebaliknya negosiasi dan kompromi, sebenarnya sesuatu yang biasa dalam politik. Pengalaman dua peristiwa keterlibatan relawan politik di atas memang memberi pengalaman pahit kepada parpol tertentu, yang memiliki calon yang diusung bersama-sama dengan relawan, karena harus berbagi kekuasaan dengan mereka di dalam kekuasaan dan birokrasi setelah kemenangan. Ini belum termasuk independensi sang calon dari kepentingan-kepentingan, khusus dari parpol pengusung.

GSP sendiri secara ideal, juga dalam praktiknya, tidak hanya berhenti mengantarkan kandidatnya untuk menduduki jabatan, melainkan ikut mengawal tercapainya agenda yang telah dicanangkan. Fase berikutnya, setelah menang,

adalah bertarung memberi arah bagi perubahan di setiap bagian di dalam kekuasaan, birokrasi, dan kebijakan politik. Termasuk di dalamnya pengisian posisi-posisi jabatan tertentu yang menentukan arah kebijakan itu sendiri.

Masuknya para relawan ke dalam berbagai jabatan pemerintahan dan politik sebagaimana terjadi pasca Pilkada Jakarta 2012 ataupun Pilpres 2014 tidak selalu negatif sebagai semata bagi-bagi jabatan, melainkan bagian dari misi agenda tersebut, sejauh mereka menaati cara-cara dan prosedur yang berlaku secara sah dan sesuai kompetensi. Bahkan, hal itu bisa menunjukkan adanya perbaikan rekrutmen politik dalam jabatan-jabatan strategis tertentu dengan standar kompetensi dan rekam jejaknya.

Oposisi

Namun, secara kebetulan kedua pengalaman GSP itu berhasil memenangkan sang kandidat. Pertanyaannya, bagaimana jika kalah? Dalam tradisi kepemimpinan populis, kekalahan dalam pemilu tidak akan menyurutkan mereka untuk terus memobilisasi massa pendukungnya guna merebut kekuasaan. Mereka juga akan terus mengganggu kekuasaan yang sah dan mapan.

Karena belum pernah terjadi, belum bisa diprediksi bagaimana jika calon yang diusung GSP itu kalah. Namun, hal itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu karakter kepemimpinan calon dan hubungan antara calon dan anggota GSP. Jokowi, misalnya, ketika jadi calon gubernur Jakarta 2012 adalah wali kota Surakarta dan tidak memiliki keterkaitan yang mendalam dan psikologis dengan rakyat Jakarta. Karena itu, sangat mustahil jika Jokowi, juga Ahok, akan menjadi pemimpin yang terus-menerus memobilisasi massa pendukungnya untuk mengganggu lawan yang-seandainya-menang.

Hal yang sama bisa dilihat pada Pilpres 2014. Seandainya pasangan Jokowi-JK kalah, hampir mustahil menjadikan Jokowi akan terus-menerus memobilisasi pendukung dan memainkan psikologi massa untuk merawat kesetiaan dan mengganggu penguasa yang menang karena sejak awal memang tidak memiliki preferensi hal terebut. Dengan kata lain, jika pun ada peluang oposisi dari fenomena GSP ini bukanlah kepemimpinan oposisi populis, tetapi oposisi rasional. Ada baiknya, GSP, jika ada, termasuk relawan *Teman Ahok*-lepas dari harus tetap pada optimisme-harus menyiapkan diri dengan skenario kedua jika kalah. Oposisi yang kuat, rasional, serta berkesinambungan kini sama dibutuhkan dengan kekuasaan yang transparan, akuntabel, dan anti korupsi.

Dalam tradisi demokrasi yang mapan, di samping merupakan kontrol terhadap kekuasaan yang sedang berjalan, sesungguhnya oposisi juga menyiapkan diri untuk berkuasa sewaktu-waktu dapat memenangi pemilu, dengan struktur dan kompetensi personel yang memadai. Dengan demikian, relawan politik atau GSP seyogianya tidak hanya menyiapkan perubahan ketika menang, juga menyiapkan diri sebagai oposisi yang berkelanjutan dan kompeten ketika kalah.

Ahmad Suaedy, Wakil Ketua Lakpesdam PBNU

KOMPAS, 04 Juli 2016

Mengkloning Ahok-Risma

> *"Ibu, kalau orang Jakarta tidak mau memilih Ahok, kirim saja ke sini, kami siap memilihnya…"*

DARI sisi kepentingan personal, saya tidak punya hak pilih dan tak terkait apa pun dengan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Maka sebenarnya boleh saja saya tidak peduli, namun ternyata hati dan tangan ini terasa gatal, tak bisa untuk tidak peduli. Tiap hari membaca dan mendengar pemberitaan tentang hiruk pikuk Pilgub DKI, suka tidak suka akhirnya menyita perhatian saya sebagai anak bangsa.

Tanpa bermaksud membela siapa pun, menghakimi siapa pun atau kelompok mana pun, tulisan ini hanyalah ungkapan suara hati sebagai rakyat yang merasa heran. Ketika sebagian besar masyarakat Jakarta menjagokan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku petahana, semakin kuat pulalah gelombang tekanan dari berbagai pihak untuk menghentikan langkahnya.

Suatu hari saya datang ke sebuah daerah di Sumatera — yang jelas bukan Bangka Belitung daerah asal Ahok –, sopir taksi yang mengantar dengan bersemangat bertanya apakah saya orang Jakarta? Saya jawab saja sekenanya, "Iya". Dan, dengan berapi- api dia bilang, "*Ibu, kalau orang Jakarta tidak mau memilih Ahok, kirim saja ke sini, kami siap memilihnya*…" Itu tentu logika sederhana dari representasi rakyat yang merindukan pemimpin seperti Ahok.

Tak hanya sekali itu saya mendengar ungkapan yang sama dari beberapa orang meskipun dengan bahasa yang berbeda. Ternyata, di tataran elite politik dan penentu kebijakan, suasananya lebih hiruk pikuk. Bukan ramai mendukung, melainkan sibuk mencarikan musuh untuk Basuki Tjahaja, sampai pada kesibukan mencari celah menghentikan langkahnya.

Mulai dari pernyataan bahwa tidak ada partai yang bersedia mengusung, sampai gerakan "pokokya bukan Ahok". Keriuhan tarik ulur kepentingan sampai pada inventarisasi sejumlah nama kepala daerah yang dinilai sukses secara politik, dicintai rakyat, berhasil membangun daerah, dan mempunyai "*nilai jual*" tinggi.

Mereka diseret masuk ke pusaran arus Pilgub DKI. Manajemen konflik dijalankan. Ahok "dibentur- benturkan" dengan tokoh-tokoh "yang dianggap baik dan berhasil", misalnya dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Seolah-olah terekomendasikan bahwa untuk mengalahkan Ahok, harus "*dicarikan lawan yang seimbang*".

Elite politik lupa, ketika mereka sibuk mencarikan lawan tanding, dan yang muncul adalah tokohtokoh baik, berhasil memimpin wilayah, dicintai rakyat, dan mampu membawa perubahan, mereka secara tidak sadar mengakui bahwa kelas Ahok setara dengan para tokoh tersebut. Mungkin mereka tidak menyadari, atau sebenarnya paham, namun kepentingan politiklah yang membuat tidak sadar.

Pilihan Rasional

Logikanya, kalau Ahok dianggap setara dengan para tokoh yang diusung untuk jadi tandingan, hal itu berarti ”*salah satu dari mereka harus dimatikan*”. Dan, boleh jadi ini bukan logika politik para elite, bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik ketika banyak pemimpin yang baik, berhasil, dan dicintai rakyat seperti Risma, Ridwan Kamil, dan Ahok.

Dalam logika berpikir umum, sebuah pilihan tentu didasari oleh pikiran rasional. Ukuran rasionalitas adalah norma umum yang berlaku tentang baik buruk, benar salah, indah tidak indah, atau etis tidak etis. Ukuran-ukuran ini, secara universal disepakai oleh sebagian besar masyarakat. Secara sederhana, meminjam istilah Weber, tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan.

Tindakan ini, dalam ranah Sosiologi dikembangkan oleh Coleman (1989) yang menyatakan bahwa pilihan rasional merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu, dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan rasionalnya.

Kalaulah pilihan rasional rakyat adalah pemimpin- pemimpin seperti Ahok, Risma, atau Ridwan Kamil, mengapa justru hal itu dianggap tidak rasional dengan cara menciptakan konflik di antara tokoh yang dipilih itu? Rasionalitas rakyat sungguh sederhana, mereka hanya ingin negara yang sudah 71 tahun merdeka ini menjadi lebih baik dalam segala bidang.

Masyarakat sudah mulai pandai memilih mana pemimpin yang membawa kemaslahatan dan mana yang tidak. Jangan sampai kecerdasan itu dibodohkan dengan klaim stereotipe bahwa ”masyarakat belum siap berdemokrasi”. Masyarakat sudah siap berdemokrasi dengan pilihan-pilihan rasionalnya. Justru yang tampak tidak siap adalah elite politik, dengan pilihan yang semuanya berasionalisasi politis.

Sebenarnya, pilihan rasional antara rakyat dan penggawa negara akan sejalan manakala muara pilihan politik itu rasional, demi kemaslahatan rakyat, bukan pilihan yang hanya dipolitisasi untuk tujuan sekelompok orang atau golongan. Betapa indah apabila justru berlangsung ”kloning” agar muncul banyak Ahok dan Risma yang lain di bumi Indonesia sebagai aliran-aliran atrinak sungai yang akan bertemu dalam satu muara kemaslahatan umat.

Tri Marhaeni P Astuti, Guru Besar Antropologi Unnes Semarang;

SUARA MERDEKA, 23 Agustus 2016

Pemimpin Pemalu

Malu adalah salah satu bentuk emosi manusia yang punya arti beragam. Malu bisa berhubungan dengan emosi, perasaan pada diri manusia akibat sebuah perilaku yang dilakukan sebelumnya tetapi ingin ditutupinya.

Penyandang rasa malu secara alamiah cenderung ingin menyembunyikan dirinya dari orang lain dan sekitarnya. Sebab, ia merasa tak nyaman jika perbuatannya diketahui orang lain (Wikipedia).

Beberapa penulis seperti Michael Lewis (*Shame: Exposed Self*, 1995) dan Stephen Pattison (*Shame: Theory, Therapy, Theology*, 2000) secara relatif menjelaskansoal malu dalam kaitan dengan perasaan yang dialami Hawa seusai melanggar perintah Tuhan untuk tak memakan buah kuldi di Taman Eden. Buah kuldi sebagai buah tentang pengetahuan baik dan jahat. Kisah itu juga akhirnya menuturkan tentang rasa malu Hawa tatkala sadar dirinya telanjang seusai melakukan perbuatan dosa, yaitu melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah kuldi. Namun, sesuai konteks hidup keseharian, rasa malu—meski bersifat sebagai emosi—sesungguhnya berhubungan dengan apa yang disebut sebagai kompetensi. Singkat kata, kompetensi malu ini sesungguhnya salah satu kompetensi lunak (*soft competency*) yang paling diperlukan manusia, khususnya para pemimpin.

Benalu kehidupan

Dalam kaitan dengan kompetensi malu, sesuai konteks tulisan ini, ada tiga golongan pemimpin. Pertama, pemimpin yang ”tidak punya malu”. Pemimpin seperti ini memiliki pengetahuan tentang malu akan sesuatu hal, tapi ia tak peduli dan tetap melakukan hal yang memalukan itu.

Berbeda dengan Hawa yang jadi sadar dan merasa malu lalu menutupi aurat dan tubuhnya. Pemimpin yang tidak punya malu sadar dan paham bahwa ”*ketelanjangan*”-nya itu memalukan, tetapi ia tak peduli dan tetap saja memamerkan auratnya.

Pedoman moral pemimpin yang tak punya malu sudah rusak. Pemimpin yang tak punya malu, meski sudah tahu berbuat salah, melanggar, tak wajar—dan seterusnya—tetap tak peduli dan biasanya malah menantang balik siapa pun yang mengingatkannya atau mengkritiknya. Pemimpin tak punya malu juga memakai ”asas manfaat” dalam menjalani hidup dan pekerjaannya. Tapi, bukan dirinya yang memberikan manfaat bagi orang lain, hidup dan pekerjaan, melainkan sebaliknya: hidup, pekerjaan, orang lainlah yang wajib memberikan manfaat kepadanya (oportunistik).

Bahasa kasarnya, pemimpin tak punya malu adalah benalu kehidupan. Contohnya, pemimpin yang berteriak soal hukuman mati bagi koruptor, tapi pada saat yang sama dia sendiri melakukan korupsi dengan menerima suap. Atau anggota Dewan yang selalu berteriak membela rakyat tapi terima suap untuk kasus yang bersinggungan dengan kepentingan rakyat. Juga para kepala daerah serta koruptor lainnya yangcengengesan melambaikan tangan

di TV. Beberapa contoh itu hanya sebagian kecil dari pemimpin yang tak punya malu. Mereka tidak kompeten dari aspek rasa malu.

Kedua, pemimpin yang ”*tidak tahu malu*”. Orang semacam ini memang tak punya pengetahuan akan sesuatu yang mesti dibuat malu. Maka ia tidak sadar bahwa yang (telah) dilakukannya itu sesungguhnya memalukan. Namun, orang atau pemimpin semacam ini pedoman moralnya belum rusak meski tak berfungsi dengan baik. Mereka tidak memakai asas manfaat, tapi ”asas transaksional”. Bagi mereka yang penting adalah menjalankan pekerjaannya, terlepas hasil kerjanya itu bermanfaat atau tidak pada orang lain dan kehidupan.

Kita tentu masih ingat ketika pertama kali ada sebagian anggota Dewan yang tak mengerti apa arti hak angket, hak interpelasi, bahkan ada yang tak mengerti apa tugas dan kewajiban sebagai anggota Dewan. Tentu untuk kapasitas anggota Dewan, hal-hal semacam itu memalukan, tetapi mereka tak punya pengetahuan dan pemahaman bahwa hal itu memalukan.

Ketiga, pemimpin yang ”pemalu”. Pemimpin seperti ini sungguh paham, punya pengetahuan bahwa sesuatu hal memalukan. Selain pengetahuan, sekaligus pedoman moralnya seperti Hawa, yang sadar dan merasa malu telah melanggar perintah Tuhan, lalu menutup aurat dan terus-menerus memperbaiki dirinya. Pedoman moralnya baik dan berfungsi. Pemimpin ini memakai ”asas altruistik” dalam menjalankan kepemimpinannya.

Pemimpin otentik

Mereka lawan sempurna dari manusia tak punya malu. Pemimpin pemalu, ambang batas rasa malunya sangat rendah sehingga ia dengan sangat mudah merasa malu, jengah, sungkan jika tak bisa memberikan manfaat bagi orang lain, pekerjaan, masyarakat, bangsanya. Bahkan, ketika tidak berprestasi, mereka merasa malu. Karena itu, pemimpin pemalu ini disebut manusia otentik. Ia unik, merasa malu jika tak bermanfaat. Namun, sebaliknya, ia ”tak malu” melakukan sesuatu yang tidak umum, aneh—misalnya marah-marah dengan hebat—demi sebuah kebenaran atau manfaat bagi rakyat, orang banyak. Wali kota Surabaya yang tak malu untuk meluapkan kemarahannya yang hebat, mencak-mencak, ketika memergoki bawahannya tak beres mengelola e-KTP, adalah salah satu contohnya. Demikian pula Basuki Tjahaja Purnama yang sering tak malu dengan kemarahannya yang kasar jika berhadapan dengan ketidakberesan.

Mereka juga bukan sekadar kerja demi melaksanakan kewajiban seperti halnya golongan manusia ”tidak tahu malu”, tetapi mereka bekerja untuk mencari tujuan yang lebih tinggi. Karena itu, kebutuhan hidup mereka yang tertinggi adalah memberikan makna bagi hidup dan kehidupan di sekitarnya.

Akhirnya perlu disampaikan, jika sebuah bangsa dipenuhi oleh golongan pemimpin ”*tidak punya malu*”, celakalah bangsa itu. Jika dipenuhi oleh golongan pemimpin ”*tidak tahu malu*”, biasanya bangsa itu hanya akan jadi bangsa yang moderate, biasa-biasa saja.

Biasanya para pemimpin golongan tak punya malu dan tak tahu malu akan pantang mundur meski gagal atau berbuat sesuatu yang memalukan. Hanya golongan pemimpin pemalu yang bersedia mundur secara dewasa dan sportif jika gagal atau melakukan sesuatu yang memalukan. Dan, bangsa yang dipimpin pemimpin pemalu punya potensi terbesar untuk menjadi bangsa besar.

Kompetensi malu tampaknya layak kita perhitungkan dalam melakukan berbagai proses pemilihan pemimpin bangsa ini, baik itu pilkada sesaat lagi, fit and proper test para pejabat, para pemimpin dimensi legislatif, yudikatif, pun para pemimpin eksekutif berbagai level sampai presiden sekalipun. Sebagai sebuah kompetensi kepemimpinan, malu bisa diukur. Mulai dari pengetahuan (*knowledge*) tentang konsep malu dalam kaitannya dengan kepemimpinan, lalu eksekusi atau pelaksanaannya sampai menjadi keterampilan (*skill*), dan akhirnya membentuk sikap (*attitude*) ”malu” dalam sebuah kepemimpinan.

Herry Tjahjono, Terapis Budaya Perusahaan, Jakarta

KOMPAS, 17 Oktober 2016

Etika Bermedia dan Kontroversi Politik

Apa yang berkembang di media sosial belakangan ini mungkin dapat disebut sebagai kecenderungan proses berkomunikasi dalam kategori anti komunikasi. Penyampaian pesan, diskusi, dan silang pendapat tentang isu-isu politik di media sosial tersebut telah sedemikian rupa mengabaikan hal-hal yang fundamental dalam komunikasi: penghormatan kepada orang lain, empati kepada lawan bicara, dan antisipasi atas dampak-dampak ujaran atau pernyataan. Pada prinsipnya, praktik berkomunikasi di ruang publik mensyaratkan kemampuan pengendalian diri, kedewasaan dalam bersikap, serta tanggung jawab atas setiap ucapan yang hendak atau sedang disampaikan.

Namun, yang terjadi di media sosial dewasa ini adalah tren yang sebaliknya. Begitu mudah orang menumpahkan amarah atau opini negatif tanpa memikirkan perasaan orang lain. Begitu mudah orang memojokkan dan menghakimi orang lain, tanpa berpikir pentingnya memastikan kebenaran informasi atau analisis tentang orang tersebut. Dan, begitu sering orang terlambat menyadari bahwa apa yang diungkapkannya di media sosial telah tersebar ke mana-mana, menimbulkan kegaduhan publik, dan merugikan pihak tertentu.

Media sosial menampilkan negativitasnya di sini. Kurangnya kedewasaan dan sikap bertanggung jawab sebagian pengguna membuat proses komunikasi di media sosial jadi pemicu munculnya perseteruan atau konflik yang tak produktif. Ruang media yang seharusnya menjadi sarana pembelajaran dan pencerahan bersama, justru jadi tempat memamerkan sikap tak acuh, amarah, dan kebencian.

Tentu saja hal ini sangat disayangkan karena sesungguhnya media sosial memiliki potensi deliberasi dan demokratisasi sangat besar. Media sosial memungkinkan semua orang jadi subyek, pelaku, dan sumber komunikasi, dan tidak sekadar menjadi pembaca atau pemirsa seperti yang terjadi dalam proses komunikasi di media massa. Media sosial mampu mengatasi paradoks komunikasi di media massa di mana mayoritas orang menjadi massa yang pasif dan tidak terlibat dalam proses komunikasi.

Tren yang menggejala

Namun, yang lebih memprihatinkan, negativitas media sosial itu sepertinya justru diamplifikasi dan diperkuat oleh media massa, khususnya media daring dan media televisi. Kekusutan komunikasi politik, kontroversi, dan debat kusir di media sosial dalam banyak kasus dilanjutkan di ruang pemberitaan atau bincang-bincang media (*talkshow*).

Pola penyajian informasi yang cenderung spontan, serba cepat, dan instan di media sosial tidak diimbangi sesuatu yang berbeda, tetapi justru dijadikan mode jurnalistik yang baru oleh media massa konvensional. Akibatnya, saat ini cukup mudah menemukan berita politik yang tidak berimbang, satu sisi, mengabaikan verifikasi sumber kunci atau menggunakan judul yang

menghakimi. Pada awalnya ini hanya menjadi tren di media jurnalistik daring, tapi pada perkembangannya juga mulai menggejala di semua jenis media.

Pada sisi lain, acara bincang-bincang di televisi umumnya disiarkan secara langsung. Ciri siaran langsung media televisi adalah *unpredictability* dan *irreversibility*: ketidakmungkinan memastikan ujaran dan tindakan para narasumber dan ketidakmungkinan menghapuskan ujaran dan tindakan yang telanjur terjadi. Katakanlah ada debat yang berlangsung panas dan menjurus kasar antarnarasumber, di mana kata-kata makian atau pernyataan bernada SARA tak terhindarkan, juga akan tersiarkan secara langsung, tanpa bisa disunting terlebih dahulu.

Secara etis, apakah adegan seperti itu layak ditayangkan kepada khalayak luas di segala umur? Di sini kita berbicara tentang kedudukan media sebagai institusi sosial yang bukan hanya harus mempertimbangkan kepantasan dan kepatutan ruang publik, melainkan juga secara moral bertanggung jawab mencerahkan masyarakat.

Memang, konflik adalah oase yang tak pernah kering dalam pemberitaan media. Konflik dan kontroversi selalu memikat untuk diberitakan dan punya daya magnetik di hadapan masyarakat. Namun, perlu dipersoalkan motif media terhadap konflik atau kontroversi. Apakah motif komodifikasi berdasarkan pertimbangan oplah, rating, hit, ataukah motif sosial membantu masyarakat memahami persoalan, mengambil pelajaran berharga, dan mencari jalan penyelesaian?

Apakah media ingin membantu menyelesaikan kontroversi pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tentang Al Maidah atau sekadar ingin memberitakannya karena sedang menyedot perhatian masyarakat? Kuatnya motif komodifikasi dapat membuat media tidak memedulikan penyelesaian konflik dan tanpa sadar justru mengintensifkan konflik. Serial pemberitaan media yang bombastis atau provokatif menyebabkan kontroversi tidak berkesudahan, mengaburkan substansi persoalan, dan membuat semua pihak abai terhadap hal lain yang tidak kalah penting terkait Pilkada DKI.

Persoalan berikutnya, bagaimana konflik dan kontroversi diberitakan media? Kode Etik Jurnalistik menegaskan, media harus memberitakan secara berimbang, dari dua sisi, tidak beritikad buruk, memenuhi asas praduga tak bersalah, dan tak menghakimi obyek pemberitaan. Sebagaimana telah diutarakan, etika jurnalistik ini dalam praktiknya semakin lazim diabaikan. Begitu banal pengabaian ini hingga beberapa pihak berpikir untuk merevisi Kode Etik Jurnalistik tersebut karena dianggap kurang relevan dan tidak efektif lagi.

Krisis etika berkomunikasi

Sampai di sini, terlihat jelas sesungguhnya kita sedang menghadapi krisis etika media atau etika berkomunikasi. Pada level media massa, wujudnya pengabaian Kode Etik Jurnalistik atau Etika Penyiaran hingga taraf banal

dan masif. Begitu serius pengabaian itu hingga sebagian awak media mungkin tidak lagi menganggap berita yang tidak berimbang atau menghakimi sebagai bentuk kesalahan.

Pada level media sosial, krisis itu berwujud tak adanya standar etika yang jadi acuan bersama. Kerancuan status media sosial sebagai ruang publik sekaligus ruang privat, sebagai mode komunikasi interpersonal sekaligus komunikasi kelompok dan komunikasi massa menimbulkan kebingungan standar etika mana yang harus digunakan.

Sungguhpun demikian, semua pihak pasti sepakat proses berkomunikasi pada level mana pun tak mungkin berjalan tanpa etika. Tanpa dilandasi etika, praktik bermedia akan mengarah pada kekacauan. Pada akhirnya, masyarakat yang menanggung kerugian paling besar. Media yang semestinya membantu masyarakat memahami persoalan sosial- politik secara jernih dan obyektif, justru jadi ajang persitegangan dan perseteruan tak berujung.

Literasi media jelas diperlukan. Namun, sasaran utamanya bukan generasi muda atau anak-anak sekolah, melainkan justru para "praktisi" media sendiri. Kepada merekalah pertama-tama perlu diingatkan kembali pentingnya kemampuan pengendalian diri, kepekaan terhadap dampak-dampak komunikasi, serta kedewasaan dalam menghadapi perbedaan pendapat di ruang publik. Proses berkomunikasi, sekali lagi, menuntut kemauan semua yang terlibat untuk menjaga kepatutan dan kepantasan, menghormati orang lain sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri, serta untuk menenggang perasaan banyak orang yang menyaksikan proses komunikasi tersebut. Mari kita kembalikan esensi komunikasi sebagai sarana untuk berbagi!

Agus Sudibyo, Kepala Program Studi Komunikasi Massa

Akademi Televisi Indonesia (ATVI) Jakarta

KOMPAS, 18 Oktober 2016

Tokoh Halus, Tokoh Urakan

Binar lampu Jakarta tampak sangat benderang. Silaunya meredupkan lampu-lampu di daerah lain. Pilkada DKI Jakarta saja, gaungnya mirip-mirip Pilpres tahun 2014. Padahal, pada pilkada serentak tahun 2017, ada 7 provinsi dan 94 kabupaten/kota yang menggelar pesta demokrasi itu. Namun, begitulah Jakarta. Selalu menjadi magnet luar biasa. Secara geopolitik, Jakarta memang inti pusaran: ibu kota negara, pusat pemerintahan, pusat ekonomi. Pendek kata, Jakarta adalah pusat kekuasaan. Maka, saat pasangan calon gubernur-wakil gubernur Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (nomor urut 1), Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (2), dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (3) berdiri satu panggung, Selasa (25/10) malam, terasa sekali ingar-bingarnya. Mereka adalah aktor-aktor utama dalam panggung Pilkada DKI Jakarta 2017.

Semua pasangan, terutama "dalang" di balik ketiganya, sudah pasti pasang kuda-kuda. Di balik Agus-Sylvi ada Partai Demokrat, PAN, PKB, PPP (28 kursi di DPRD). Di balik Basuki-Djarot ada PDI-P, Nasdem, Hanura, Golkar (52 kursi). Di balik Anies-Sandiaga ada Gerindra dan PKS (26 kursi). Namun, pada era pemilihan langsung, mesin partai tak menjamin 100 persen. Dan, Jumat (28/10) lusa, kampanye pun dimulai. Tampaknya kegaduhan politik Jakarta siap-siap semakin mendidih, setidaknya dalam empat bulan ke depan. Sebab, pada era media sosial sekarang ini, kebebasan sering kali menafikkan etika, kesantunan, toleransi, kohesi; justru melumrahkan asal bunyi (asbun) dan caci-maki. Terutama sejak Pilpres 2014, pesta demok- rasi lokal ini kerap membuat masyarakat terbelah. Kegaduhan Pilkada DKI tak lepas dari sosok Basuki alias Ahok, yang kini disaingi Anies dan Agus. Ibarat drama, setiap pemilih bisa melihat tokoh protagonis atau tokoh antagonis.

Soal tokoh, penyair "*Si Burung Merak*" Rendra pernah menulis artikel tentang "*gerakan mahasiswa dan ludruk*" di Harian Kompas, 19 Agustus 1970. Mengawali tulisannya, Rendra mengutip buku antropolog James Peacock (1968) tentang ludruk, seni tradisional kocak khas Jawa Timur (Surabaya). Menurut Peacock, ludruk adalah sejenis kekasaran di dalam kesenian Jawa yang memang diberikan tempat di dalam masyarakat. Kekasaran termasuk cara kebudayaan memperbarui dirinya. Kekasaran atau kurang ajar disebut sebagai unsur urakan.

Di dalam kebudayaan Jawa yang halus, unsur urakan juga mendapat tempat penting. Bahkan, pembaru-pembaru yang mengonsolidasikan tenaga dalam masyarakat di dalam sejarah Indonesia adalah orang-orang urakan: Ken Arok, Gajah Mada, Joko Tingkir, Soekarno, Ali Sadikin. Orang-orang urakan itu bersikap kurang ajar pada tradisi. Namun, bukan asal membangkang melainkan pembangkangan otentik, yaitu untuk kepentingan kemajuan bagi pribadi-pribadi di masyarakat. Apabila mereka memiliki kepribadian yang kuat, akan dengan mudah memancarkan karisma.

Jadi, di dalam cerita ataupun sejarah, ternyata bukan saja tokoh-tokoh halus yang memancarkan karisma, seperti Yudistira, Rama, Hatta, Sultan Hamengku Buwono IX, Ki Hajar Dewantara, tetapi juga tokoh-tokoh urakan semisal Semar, Petruk, Bima, Ki Ageng Suryomentaram, Ali Sadikin.

Jadi, pada Pilkada Jakarta (juga daerah lainnya), tokoh seperti apa pilihan Anda? Pilkada adalah pesta demokrasi. Tentu saja hati nurani akan membimbing menuju kemaslahatan rakyat.

M Subhan SD, Wartawan Senior Kompas

KOMPAS, 27 Oktober 2016

Panggung Kampanye Pilkada

Tirai penutup panggung kampanye pilkada telah dibuka. Momen 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 bak musim semi politik citra. Semua pasangan kandidat di 101 pilkada serentak akan menggunakan beragam cara memersuasi pemilih. Kampanye, publisitas, propaganda, dan *public relations* politik dipadupadankan menjadi satu paket strategi pemenangan pada basis pemilih. Di panggung kampanye, para kandidat menjadi aktor yang ditonton khalayak. Semua pesan verbal lisan dan tulisannya, gestur, konteks, dan dramatisasi gagasannya menjadi menu harian opini publik yang diperbincangkan di media massa dan media sosial.

Lorong Kebisingan

Di fase kampanye para kandidat ibarat memasuki lorong kebisingan. Setiap saat "dikuliti" dari semua sisi. Oleh karenanya dibutuhkan daya tahan dan kecerdasan komunikasi sekaligus agar mendapatkan "tempat dalam kognisi khalayak. Setelah memasuki lorong kebisingan tersebut, para kandidat tak bisa memutar haluan atau menepi di tempat sunyi.

Jalan harus disusuri dengan memahami beragam karakteristik suara yang terdengar di sekitarnya. Mulai dari suara yang lirih bersedih, manja merajuk hingga agresif menyerang dan menyudutkan diri, pengharapan, bahkan kehormatan sang kandidat. Persis drama di panggung hiburan, alur selalu menuntut aspek dramatis.

Multilakon dan memunculkan banyak efek kejut. Bedanya panggung hiburan seusai pertunjukkan tak ada beban jangka panjang, sementara panggung politik pilkada berdampak lima tahun ke depan dan berhubungan erat dengan kepentingan publik. Oleh karenanya dibutuhkan keseriusan dari pada kandidat, khalayak, dan media untuk memosisikan panggung kampanye ini tak lagi sebatas prosedural, melainkan lebih memaknainya secara substansial.

Roger dan Storey dalam *Communication Campaign* (1987) mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Dengan demikian, hakikat dari kampanye itu adalah komunikasi, artinya tindakan untuk membangun kesepahaman (*understanding*).

Dalam konteks pilkada, tentu saja pesan kandidat berupaya penetratif ke lapis pemilih mulai dari khalayak umum (*general public*), publik beperhatian (attentive public), dan kelompok elite (*the leadership public*). Pada saat memilih, mereka yang menjadi khalayak atau komunikan terbelah ke basis kelompok pemilih tradisional dan rasional dengan ragam dimensi serta karakteristik yang melekat pada mereka masing-masing.

Dari sudut waktu, kampanye dibatasi tidak sebebas publisitas politik. Sifat gagasannya bisa diperdebatkan khalayak dan tujuannya biasa dirancang secara tegas, spesifik serta variatif. Modus penerimaan kampanye bersifat

sukarela, sementara modus tindakannya dibatasi etika dan aturan yang ditetapkan UU maupun peraturan KPU. Kampanye dengan demikian bukanlah tindakan serampangan dan ugal-ugalan, tetapi komunikasi terencana yang wajib dikelola secara cerdas. Paling tidak, ada tiga hal yang harus dikelola secara serius.

Pertama, positioning yang dalam tulisan Heibing dan Cooper (1997) didefinisikan sebagai upaya membangun persepsi tentang kandidat di pasar sasaran relatif. Oleh karenanya dibutuhkan nilai keberbedaan si kandidat di tengah keberadaan kandidat lain. Faktor yang harus diperhatikan kandidat adalah *past-record*, yakni memori kolektif atas sosok kandidat di masa lalu. Faktor lain adalah harus cerdas mengelola apa yang Worcester dan Baines (2006) sebut sebagai *consistent image* di mana citra politik diteguhkan secara nyata lewat kerja politik, isu politik, dan image kepemimpinan.

Kedua, *branding* sebagai upaya strategis mengembangkan identitas agar menarik perhatian dan minat masyarakat untuk lebih mengenal pasangan kandidat. Faktorfaktor yang harus menjadi perhatian antara lain soal atribut, yakni bagaimana pasangan kandidat bisa mengusung keunggulan, keistimewaan, kualitas atau kekuatan masingmasing.

Faktor benefit menyangkut keistimewaan, keunggulan, dan kekuatan yang harus diterjemahkan ke dalam keuntungan-keuntungan emosional dan fungsional dari pemilih. Apa yang bisa diharapkan pemilih dari kandidat inilah yang akan menjadi branding kuat kandidat. Selain itu ada faktor *values* (nilai yang menjadi kelebihan kandidat), *culture* (representasi budaya tertentu), personality atau kepribadian tertentu yang menarik minat pemilih, serta kecerdasan memahami user, yakni siapa sebenarnya "konsumen" kampanyenya.

Ketiga, *segmenting*, yakni upaya mengidentifikasi kelompok- kelompok yang ada di masyarakat agar bisa memahami sifat dan karakteristik beragam kelompok tersebut untuk mempermudah ekspansi politik sesuai target. Pemilih itu berfragmentasi, tetapi mereka memiliki titik simpul sendiri-sendiri. Jika bisa dipetakan dan dikelola dengan baik, hal itu dapat menjadi insentif elektoral bagi kandidat.

Tren Kemenangan

Kampanye di era demokrasi terbuka seperti sekarang seharusnya memberi ruang lebih terang- benderang bagi penguatan politik warga. Kandidat tidak terjebak semata pada kepentingan sesaatnya, yakni meraih kekuasaan, tetapi membawa publik pada geliat kebersamaan. Tren kemenangan di banyak praktik elektoral belakangan menunjukkan gejala unggulnya politik populis yang berporos pada nilai kekitaan kandidat dengan pemilih.

Kampanye yang unggul tak cukup hanya bermodalkan retorika dan karisma, terlebih di daerah-daerah yang akses informasinya berlimpah seperti Jakarta. Kandidat dituntut lebih piawai meyakinkan zona penerimaan pemilih bahwa mereka adalah bagian dari penyelesaian masalah dengan sejumlah

programnya. Bukan sebaliknya, pemilih melihat para kandidat sebagai bagian dari masalah. Kandidat harus membangun kepercayaan publik bahwa mereka berkomitmen melakukan perubahan. Tahap berikutnya adalah menggerakkan kerja berjejaring dalam semangat kekitaan yang kuat.

Tak cukup lagi hanya mengandalkan mesin partai, guyuran uang, dan konstruksi citra di media massa. Kandidat butuh terhubung langsung dengan basis pemilih di akar rumput. Kampanye harus transformasional atau menggerakkan warga sehingga agenda kandidat menjadi agenda para pemilih juga.

Arogansi, supremasi, dan elitisme yang melekat pada citra kandidat akan merugikan dan memberi peluang pada pasangan kandidat lain untuk mengambilnya. Kampanye modern tak lagi semata-mata bersifat simbolis-instrumental seperti mementingkan atribut nomor urut, warna, pilihan baju dan lain-lain meskipun hal tersebut juga lumrah digunakan.

Kampanye harus lebih maju pada hal-hal yang substansial seperti program dan orientasi penyelesaian masalah yang ditawarkan. Selain itu pola komunikasi juga harus berubah dari model linear atau searah ke model resiprokal atau dua arah. Berkampanyelah dengan menggerakkan bukan memuakkan!

Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute;

KORAN SINDO, 28 Oktober 2016

Menimbang Cagub-Cawagub DKI

Warga Jakarta pantas merasa beruntung memiliki calon gubernur (cagub)-calon wakil gubernur (cawagub) yang masih muda, energik dan cerdas. Semuanya berkualitas dan memiliki komitmen untuk membuat Jakarta, ibu kota negara, bebas dari banjir, macet, kumuh dan memberikan layanan birokrasi yang baik. Dalam pandangan masyarakat, antara sesama calon terjalin komunikasi yang baik. Hal itu sangat dimungkinkan karena semuanya figur basis pendidikannya bagus serta berpengalaman sebagai aktivis sosial.

Mereka bukan anak kandung ideologis yang senang berkonflik. Mereka menaiki jenjang karier sosial dan politik bukan hasil karbitan, tetapi karena ditopang oleh kekuatan pribadinya dan semangat untuk berprestasi mengabdi pada bangsa.

Saya kira, siapapun pemenangnya mereka adalah putra terbaik bangsa yang mesti didukung untuk memajukan Jakarta. Masyarakat tentu lebih senang melihat cagub-cawagub yang rukun saling canda, dibanding melihat para elite politik terkesan tidak rukun dan tidak kompak. Yang cukup mengganggu dan membuat justru lelah masyarakat adalah munculnya serangkaian demonstrasi tertuju pada Ahok garagara penyebutan Surah Al-Maidah.

Di luar proses hukum yang tengah ditangani oleh polisi, saya cukup khawatir jika demo dan kemarahan umat itu tidak terkendali sehingga berpotensi menciptakan keresahan dan kerusuhan sosial. Jika ancaman itu benar terjadi tentu sangat merugikan bangsa yang tengah merangkak membangun di tengah kelesuan ekonomi global saat ini. Sekali konflik vertikal dan horisontal meledak, akan sulit diredam. Ongkos sosial politiknya amat mahal. Kondisi Timur Tengah merupakan contoh nyata. Peradaban yang dibangun ratusan tahun hancur hanya dalam hitungan bulan dan tahun oleh perang saudara.

Tak terbayang, berapa lama dibutuhkan waktu untuk membangun kembali. Itu pun kalau bisa. Dalam situasi demikian, peran aktif tokoh-tokoh pers, televisi, ulama, cendekiawan sangat diharapkan ikut serta menciptakan kedamaian dan edukasi sosial. Bahwa berbeda pendapat dan demonstrasi itu hal yang lumrah saja di alam demokrasi, asal terkendali dan tidak destruktif. Di sini tugas polisi memang cukup berat.

Polisi tengah diuji untuk menegakkan hukum dan menjaga tertib sosial. Sebaiknya pers ikut menyejukkan suasana, jangan malah jualan sensasi dan memanaskan situasi. Masyarakat pun perlu bersikap kritis terhadap berbagai berita yang datang setiap saat. Banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan antara berita valid dan hoax.

Sedemikian bebasnya orang melemparkan hoax yang hanya akan menambah sampah di dunia maya. Ironisnya, masyarakat ada yang doyan sekali dengan hoax demi sensasional. Dalam sebuah kompetisi pilkada, sekalipun masing-

masing kontestan menyatakan siap menang dan siap kalah, tapi pasti semuanya menargetkan untuk menang.

Terlebih mereka yang sudah mengeluarkan biaya besar, pasti harapan untuk menang juga besar. Kompetisi menjadi lebih seru dan bisa memanas ketika unsur emosi dan ideologi primordialisme, yakni etnis dan agama ikut terlibat. Orang mendukung calon tidak saja berdasarkan pertimbangan rasional, tetapi juga ideologis emosional.

Di sini tugas polisi, KPU, Bawaslu dan peran serta ulama serta cendekiawan tengah diuji. Bisakah mengawal pilkada dengan damai dan berkualitas? Saya percaya bahwa semua cagub-cawagub mendambakan terselenggaranya pilkada yang damai dan berkualitas.

Sebelum pilkada berlangsung, para calon itu secara moral sudah menjadi pemenang. Terlebih lagi jika mereka tampil secara cerdas, santun dan elegan, maka semuanya akan dikenang sebagai politisinegarawan yang telah melakukan edukasi politik pada rakyat, terlepas siapa yang nantinya akan jadi pemenang.

Satu catatan kecil namun amat penting adalah, parpol dan pemerintah selama ini kurang memberikan apresiasi pada panitia penyelenggara yang juga selaku wasit. Coba perhatikan acara pertandingan sepak bola atau tenis berkelas internasional, wasit akan mendapat apresiasi terlebih dahulu sebelum penghargaan terhadap pemenangnya.

Wasit itu disegani oleh pemain dan penonton. Di sini wasit sering jadi sasaran amuk suporter yang jagonya kalah. Dan dilupakan oleh pemenangnya. Begitu pun dalam pilkada dan pemilu. KPU dan Bawaslu berjasa besar untuk mengantarkan pemenangnya. Ironisnya, setelah menang malah terjadi beberapa anggota KPU masuk penjara. Sungguh ironis, menyakitkan.

Komaruddin Hidayat, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah

KORAN SINDO, 28 Oktober 2016

Bung Jokowi, Selesaikan Skandal Ahok!

Saya tulis pendapat saya ini sebagai masukan kepada Bung Jokowi. Saya yakin kasus penistaan Ahok terhadap Alquran menuntut penyelesaian secepatnya, langsung di bawah pengarahan dan pengawasan Presiden. Lihatlah rangkaian demo yang makin marak di berbagai daerah. Rentetan demo itu bersifat spontan. Intinya: permintaan maaf dari Ahok diterima, tapi proses hukum yang adil, jujur, dan transparan harus segera dilakukan.

Saya, sebagai seorang Muslim, sangat-sangat tersinggung dan terhina dengan ucapan Ahok bahwa ayat 51 surah al-Maidah digunakan untuk membohongi masyarakat. Untuk memilih atau tidak memilih seseorang. Ucapan itu menyiratkan rasa benci Ahok pada Alquran, kitab suci umat Islam seluruh dunia, sejak 14 abad silam.

Alquran memberi tahu kaum beriman bahwa ungkapan kebencian terkadang muncul jelas dari mulut-mulut pembenci Islam. Namun yang tersembunyi di dada mereka jauh lebih besar (QS Ali Imran: 118). Umat Islam Indonesia karena rasa tasamuh-nya (toleransinya) demikian besar, sering kali dianggap bodoh, mudah dibodohi, dan punya daya tahan istimewa menghadapi berbagai macam penghinaan. Penghinaan politik, penghinaan sosial, dan penghinaan ekonomi.

Umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, cukup marah dengan berbagai keputusan Menkumham sekarang, yang cenderung memecah-belah berbagai kekuatan politik anak-anak bangsa. Tentu pemerintah bodoh karena usaha pecah-belah itu dalam jangka panjang akan jadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Akan tetapi, lihatlah berbagai kekuatan politik itu menelan kemarahan mereka. Semarah apa pun mereka tidak bergerak. Mereka tetap bersabar.

Ketika masyarakat merasakan kehidupan yang makin sulit, pengangguran makin meluas, dan angka kemiskinan bertambah, rakyat tetap sabar. Mereka cukup geram, tapi tidak bergerak secara massal. Mereka tetap sabar sambil berharap semoga esok bisa lebih bagus dari hari ini.

Ketika kekuatan asing dan aseng menggenggam seluruh sektor ekonomi nasional, lagi-lagi umat Islam dan anak bangsa lainnya tetap bersabar. Lihatlah seluruh sektor ekonomi penting telah berada di tangan asing dan aseng.

Sejak dari properti, perbankan, pertambangan, pertanian, kehutanan, sampai perkebunan, dan lain-lain, sudah tidak lagi di tangan anak-anak bangsa. Penguasaan tanah di berbagai kota besar juga berada di tangan agen-agen kepentingan asing dan aseng. Tujuh puluh delapan persen tanah di DKI Jakarta sudah dimiliki oleh para benalu bangsa.

Marahkah rakyat Indonesia? Tentu! Tetapi, mereka telan kemarahan itu dengan kesabaran yang tidak ada duanya di dunia. Lagi-lagi, rakyat hanya berkeluh-kesah, tapi tidak bergerak.

Ketika hukum dilaksanakan secara tebang-pilih atau diskriminatif, rakyat marah, tetapi tetap tidak bergerak. Ketika korupsi berskala raksasa jelas-jelas dilindungi, sejak dari skandal BLBI, Bank Century, deforestasi (penghancuran hutan), sampai yang terbaru skandal Sumber Waras dan reklamasi Teluk Jakarta, rakyat hanya berkeluh-kesah, geram, marah, nyaris putus asa. Tetapi, mereka tidak bergerak. Sabar dan tetap sabar.

Nah, Bung Jokowi, kasus Ahok merupakan skandal dari jenis yang sangat berbeda. Berbagai skandal yang saya sebutkan di atas, cuma skandal berdimensi dunia, walaupun sangat menohok rasa keadilan rakyat.

Bung Jokowi, kasus Ahok mengguncangkan Indonesia karena Ahok sudah menyodok kesucian langit. Ahok sudah benar-benar kelewatan. Saya sependapat dengan KH Hasyim Muzadi, siapa pun yang berani menista Allah, Rasul-Nya, dan Alquran tidak ada yang bisa selamat. Mengapa? Karena umat Islam di mana saja berada, tidak pernah bisa menerima penistaan terhadap Allah, Rasul-Nya, dan Kitab Suci-Nya.

Mohon dimengerti pula, usaha apa pun yang dilakukan untuk membelokkan fokus perhatian lewat berbagai cara agar skandal Ahok pelan-pelan menghilang, pasti akan sia-sia. Yang terjadi justru semakin ditunda penyelesaian hukum skandal Ahok, semakin tinggi risiko yang kita hadapi.

Setelah peristiwa skandal Ahok di Kepulauan Seribu, ia ngomong kacau lagi tentang Pancasila. Katanya, Indonesia yang berdasar Pancasila menjadi utuh hanya apabila minoritas sudah menjadi presiden. Tentu banyak rakyat yang marah pada celotehan ini, tetapi segeram apa pun rakyat tetap tidak turun ke jalan.

Semoga Bung Jokowi cukup arif untuk memahami bahwa skandal Ahok di Kepulauan Seribu itu telah menjadi bom waktu, yang daya ledak sosial-politiknya dapat mengguncangkan sendi-sendi stabilitas nasional dan persatuan bangsa.

Akankah kita unggulkan seorang Ahok di atas kepentingan 250 juta bangsa Indonesia? Jasa besar apa yang pernah ditorehkan oleh Ahok untuk bangsa Indonesia?

Bung Jokowi, kami semua tahu bahwa Kapolri dan seluruh jajaran Polri berada dalam kendali Anda. Terus terang kasihan Kapolri harus memikul tanggung jawab untuk penyelesaian hukum kasus skandal Ahok, dan menjadi sasaran kritik masyarakat sampai sekarang.

Lucunya, Anda belum berkata sepatah kata pun sampai sekarang tentang skandal Ahok. Sungguh aneh. Ada apa gerangan?

Bola penyelesaian skandal Ahok yang sangat berbahaya itu ada di tangan Anda. Hentikanlah permainan image building (pencitraan) Anda. Di sebuah kesempatan, Anda bicara, biarlah KPK mengurusi korupsi gede, sementara Anda yang kecil-kecil.

Pungli sepuluh ribu rupiah pun akan Anda kejar. Saya yakin decak kagum masyarakat yang dulu Anda nikmati, sekarang sudah berubah total. Rakyat kita sudah cukup cerdas, membedakan mana emas, mana loyang.

Saya doakan Bung Jokowi bisa mengambil langkah cepat, bijak, dan tepat. We are racing against time, kita berlomba dengan waktu.

Skandal Ahok penting mbahnya penting untuk segera diselesaikan secara hukum. Jangan berputar dan berkeliling membeli waktu dengan harapan skandal Ahok dapat meredup, dan akhirnya selesai dengan sendirinya. Sesuatu yang mustahil. Bung Jokowi, saya hanya mengingatkan.

M Amien Rais, Mantan Ketua MPR RI

REPUBLIKA, 28 Oktober 2016

Teologi Politik Jelang Pilkada

"Muhammadiyah menyadari bahwa politik sarat dengan kontroversi dan kepentingan perebutan kekuasaan. Oleh sebab itu, kita berharap kontestasi itu berlangsung demokratis, elegan, bermartabat, dan berkeadaban."

Haedar Nashir, 13 Oktober 2016

Amanat Ketua Umum PP Muhammadiyah kepada warga Muhammadiyah khususnya dan bangsa Indonesia menyambut pilkada yang mulai panas perlu mendapatkan perhatian agar bangsa ini tetap bermartabat.

Sebab, kita merasakan detik- detik menjelang pilkada serentak, Februari 2017, suhu politik semakin memanas. Tensi antarkelompok kepentingan demikian keras, baik di media sosial ataupun di lapangan nyata.

Ancaman politik kebencian

Beberapa daerah yang hendak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada), seperti Jakarta dan Yogyakarta, tentu berharap tak menumbuhkan politik kebencian yang didasarkan pada kandidat karena faktor agama dan etnis. Hal ini perlu diantisipasi karena demokrasi kita tidak didasarkan pada kebencian etnis atau agama, apalagi partai. Demokrasi kita adalah inklusif atas agama, etnis, dan partai apa pun namanya, kecuali Partai Komunis Indonesia.

Survei Wahid Foundation menemukan sejumlah data yang dinilai cukup mengkhawatirkan. Dari 1.520 responden, 59,9 persen memiliki kelompok yang dibenci. Kelompok yang dibenci meliputi mereka yang berlatar belakang agama non-Muslim, kelompok Tionghoa, komunis, dan lainnya. Dari 59,9 persen itu, 92,2 persen tidak setuju jika anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia. Sebanyak 82,4 persennya bahkan tidak rela anggota kelompok yang dibenci itu menjadi tetangga mereka.

Ini sungguh sebuah temuan yang mengkhawatirkan mengingat Indonesia merupakan negara yang beragam. Kebencian tentu tidak sesuai dengan ajaran teologi agama-agama.

Kebencian atas kelompok lain yang tertera dalam survei Wahid Foundation di atas bisa dikatakan sebagai bagian dari ancaman teologi kebencian. Politik kebencian merupakan salah satu turunan dari pemahaman teologi yang tak bersedia menerima adanya perbedaan. Teologi yang dihadirkan adalah kehendak keharusan adanya keseragaman dari semua penganut agama. Jika ada perbedaan, yang berbeda harus mengikuti yang mayoritas atau yang memaksa kaum minoritas mengikutinya.

Politik yang dilandaskan pada teologi semacam ini akan melahirkan kebencian kepada pihak lainnya sehingga tidak bersedia dengan lapang dada, hati yang jernih, serta pikiran sehat menerima bahwa perbedaan merupakan karunia ilahi yang harus disyukuri dan menjadi ciri khas keagamaan.

Keharusan adanya kesamaan teologi yang berlebihan akhirnya menciptakan kebencian pada pihak lain yang berbeda. Siapa saja yang berbeda dianggap musuh, lawan, dan harus ditaklukkan. Teologi politik kebencian pun pada akhirnya menghadirkan semangat penaklukan atas orang yang berbeda.

Teologi politik kebencian, karena itu, merupakan teologi yang dikemas dalam perspektif teologi jangka pendek, pendek akal, dan kepicikan. Teologi semacam ini jika terus berkembang akan mengarah pada munculnya teologi kematian, bukan teologi kehidupan dan kemuliaan. Hal ini akhirnya akan sangat berdampak pada munculnya kekerasan berbasiskan teologi (keagamaan) karena menganggap yang berbeda adalah musuh yang harus dimusnahkan dari muka bumi.

Mendialogkan perbedaan

Kasus yang beberapa kali terjadi di Indonesia, yang melibatkan antaragama, sebenarnya menunjukkan adanya teologi politik kebencian. Apalagi situasi politik jelang pilkada di DKI Jakarta, yang berkembang di media sosial, sungguh jadi bagian dari teologi politik kebencian yang senantiasa ditabuh ketika pergolakan politik hendak digelar di Indonesia. Dengan demikian, sebenarnya politik kita belum bisa dilepaskan dari teologi politik yang agak kurang santun.

Berbeda pandangan harusnya bisa dijelaskan dengan santun. Kesalahan seseorang juga bisa dimaafkan jika menyangkut pemahaman.

Kita tentu harus adil dengan hukum. Jika menyangkut persoalan pidana dan kriminal, jika terbukti, pelakunya harus diberi sanksi atau hukuman. Namun, bukan dengan cara mengancam, apalagi hendak membunuh yang salah. Hal seperti itu perlu dijelaskan sehingga peristiwa tak jadi kapitalisasi kebencian yang akan terus berulang di kemudian hari.

Apa yang terjadi di DKI Jakarta, buat saya, adalah salah satu bentuk dari kebencian yang muncul ke permukaan dari sekelompok orang beragama yang ada di Indonesia, kemudian dikapitalisasi dengan mempergunakan teologi politik kebencian atas nama seluruh umat. Sekalipun sebenarnya lebih banyak karena faktor perbedaan pilihan politik saat pilkada.

Bagaimana jika hal serupa terus terjadi di belahan bumi Indonesia? Bukankah negeri ini akan jadi negeri penuh "*kebencian atas adanya praktik keagamaan*" yang beragam? Sungguh mengherankan dan mengerikan sebab negeri ini merupakan negeri dengan beragam perbedaan kultur ataupun agama.

Oleh sebab itu, kita harus memperbanyak dialog agar menghindari adanya pemaksaan-pemaksaan dalam hal keagamaan (teologi). Kita tidak bisa memaksakan perspektif teologi kita kepada pihak lain yang berbeda. Biarlah perbedaan teologi itu jadi kekayaan spiritual yang harus kita hadapi. Biarkan perbedaan teologi itu jadi warna dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Kita tak perlu risau, apalagi takut dengan perbedaan teologi sebab kita berbeda bukan untuk dipersamakan semuanya.

Hal yang harus dikembangkan adalah memahami bahwa perbedaan teologi itu dapat membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Perbedaan teologi itu khazanah yang telah termaktub dalam kitab suci agama-agama. Kita tak perlu memaksakan pandangan teologi kita kepada pihak lain agar sama dengan kita. Kita tak pula harus mengancam pihak lain yang berbeda teologinya.

Biarkan perbedaan teologi terus berlangsung dalam khazanah saling memahami, menghormati, dan saling menjaga perasaan. Bukankah Tuhan juga menegaskan: tidak ada pemaksaan dalam hal agama (teologi)? Lantas, mengapa kita seakan lebih berkuasa daripada Tuhan? Dialog teologis, karena itu, perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan perbedaan teologi agar saling memahami, menghargai, menghormati serta membiarkan perbedaan itu tetap terjaga; bukan memusuhi dan menebarkan teologi politik kebencian.

Menghentikan kebencian

Kebencian yang menghadirkan kekerasan bukanlah ajaran agama-agama. Kebencian dan kekerasan dikutuk oleh semua agama yang mencintai kemanusiaan. Kebencian dan kekerasan hanya akan menciptakan kehancuran. Agar kita terhindarkan dari kehancuran peradaban dunia di Indonesia, agaknya sinergi antarkelompok agama mayoritas (Islam dan Kristen) di Indonesia perlu dikuatkan kembali untuk menumbuhkan pemahaman yang menghadirkan penghargaan, penghormatan, dan menebarkan kasih sayang kepada sesama umat Tuhan.

Dengan menghadirkan pemahaman seperti itu, pada akhirnya teologi politik kebencian yang menjadi kekhawatiran bersama akan tereduksi dari Bumi Pertiwi. Kita tak ingin kekerasan yang terjadi di negara-negara lain kemudian menjadi bagian nyata dari kehidupan negara kita dengan penduduk mayoritas Muslim ini. Syaratnya hanyalah kita mampu menghindarkan lahirnya teologi politik kebencian tersebut secara bersama.

Amanat Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, (13/10), ketika menyikapi perkembangan politik di Indonesia, Jakarta khususnya, memberikan penjelasan bahwa agar umat Islam tidak saling melakukan penghakiman dan tidak melakukan provokasi atas yang lain. Namun, haruslah tetap berjalan pada koridor hukum, menjaga keamanan, dan tetap berkhidmat dalam pembangunan bangsa serta menciptakan peradaban yang mulia untuk Indonesia yang lebih baik.

Zuly Qodir, Sosiolog;

Direktur Sekolah Politik Ahmad Syafii Maarif, Pascasarjana UMY

KOMPAS, 29 Oktober 2016

Balai Kota DKI Jakarta Setelah Ahok Cuti

Di hari terakhir Ahok masuk kerja sebelum menjalani masa cuti wajibnya sebagai calon petahana gubernur DKI Jakarta, warga semakin banyak mendatangi Balai Kota untuk bertemu dan mengadu kepada Ahok (Berita Satu TV). Untuk pertama kalinya sejak Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, di hari pertama dia cuti, Jumat pagi (28/10/2016), suasana di pendopo Balai Kota DKI Jakarta lain daripada biasanya: sunyi-senyap, tidak ada satu pun warga yang tampak di sana. Padahal, selama ini, di pendopo Balai Kota itu, sejak Ahok menjadi gubernur, setiap pagi di hari kerja, selalu dipenuhi warga Jakarta yang mengantri untuk bertemu langsung dengannya, muka dengan muka, untuk berbagai keperluan, mulai dari yang serius, mengadu kepada Ahok tentang aneka masalah yang dihadapinya, sampai dengan yang hanya ingin foto bersama, atau untuk menyampaikan undangan pernikahannya atau kerabatnya. Setiap hari, saat datang ke Balai Kota, sebelum masuk ke ruang kerjanya, Ahok selalu dengan sabar dan serius mendengar satu per satu apa yang diadukan warga kepadanya. Setiap pengaduan itu jika memang layak dibantu, segera ditindaklanjuti untuk diselesaikan secepat-cepatnya. Untuk keperluan itu beberapa staf sudah selalu siap siaga untuk menindaklanjutinya sesuai dengan arahan Ahok. (Kompas.com)

Masalah serius yang diadukan warga kepada Ahok, misalnya, yang pernah diadukan seorang warga dari rumah susun Tipar, Cakung, Jakarta, yang bernama Tuminah. Ia datang ke Balai Kota pada 6 September 2016, dan mengadu langsung kepada Ahok bahwa anaknya yang bernama Niki Pradana diserang orang dengan senjata tajam, lalu ketika hendak melarikan diri, dia ditabrak mobil, anak itu menderita luka parah, dia dilarikan ke Rumah Sakit Ananda, Bekasi. Tuminah tidak mampu membayar biaya perawatan anaknya di rumah sakit swasta itu, ia meminta bantuan Ahok. Saat itu juga Ahok memerintahkan stafnya agar segera mendatangi rumah sakit itu untuk membayar biaya perawatannya, dan memindahkan Niki ke RSUD DKI Jakarta. Saat staf Ahok ke rumah sakit itu, pihak rumah sakit menyatakan Niki tidak perlu dipindahkan, karena sudah melewati masa kritisnya, dan beberapa hari lagi sudah boleh pulang. Semua biaya perawatannya pun dibayar Ahok. Sedangkan masalah lain yang lebih ringan sampai dengan yang aneh-aneh, misalnya ada warga yang mengadu baru saja putus cinta dan minta nasihat Ahok; ada PNS yang mengadu karena suaminya selingkuh; ada seorang perempuan yang minta uang melahirkan, lalu setelah melahirkan, ia kembali lagi dengan membawa anaknya ke Balai Kota, menemui Ahok, kali ini untuk minta uang susu; ada warga yang minta uang tiket kereta api untuk pulang kampung, dan sebagainya.

Menurut salah satu staf Ahok, Kamillus, menghadapi pengaduan-pengaduan itu, biasanya Ahok akan menyuruh staf lainnya untuk melakukan survei hari itu juga terhadap beberapa aduan yang butuh disurvei. Setelah yakin warga butuh bantuan, Ahok akan membantu. Tetapi, bantuan itu hampir selalu tidak dalam bentuk menyerahkan langsung uang tunai kepada yang

bersangkutan, melainkan langsung dibayarkan kepada pihak yang berhak menerimannya. "*Ada yang mau pulang ke kampung enggak bisa beli tiket, kami belikan tiket. Kami kasih dalam bentuk tiket, bukan kasih duit. Uangnya pakai uang operasional, Bapak. Dia enggak pakai sendiri, dia pakai buat bantu orang*," kata Kamillus.

Demikian pula dengan setiap warga yang hanya ingin foto bersama dengannya, Ahok selalu melayani mereka satu per satu dengan sabar, untuk undangan pernikahan warga yang disampaikan kepadanya, yang kebetulan umumnya dari warga kurang mampu, Ahok selalu menyediakan waktunya untuk sedapat mungkin memenuhi undangan-undangan itu.

Selama Ahok menjalankan cuti wajibnya sampai dengan selesai (28 Oktober 2016 – 11 Februari 2017, tampaknya suasana di pendopo Balai Kota itu akan selalu sepi dari warga sebagaimana yang terjadi pada hari pertama Ahok cuti itu. Karena bagi sebagian warga DKI Jakarta itu, Ahok tak tergantikan, meskipun sudah ada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono alias Soni sebagai pelaksana tugas (plt) Gubernur DKI Jakarta. Terbukti dari suasana di Jumat pagi itu, tidak ada satu pun warga yang datang ke pendopo Balai Kota untuk mengadu kepada plt. Gubernur DKI itu.

Sumarsono sempat heran ketika tiba di Balai Kota, melihat tidak ada satu pun warga yang ada di sana, "*Kok, tidak ada warga, ya*?" tanyanya kepada petugas di sana, padahal ia juga membuka kesempatan kepada warga untuk mengadu kepadanya seperti yang dilakukan Ahok. Suasana

pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 28 Oktober 2016, di hari pertama Ahok cuti (Kompas.com) menurut petugas yang biasa bertugas di sana, hanya ada beberapa warga yang datang, tetapi mereka hanya menitip berkas pengaduannya, lalu pulang. Mereka tahu Sumarsono juga membuka kesempatan warga mengadu kepadanya seperti yang dilakukan Ahok, tetapi tetap saja yang mereka mau adalah Ahok, oleh karena itu tidak ada satu pun warga yang menunggu Sumarsono untuk mengadu kepadanya. Mereka sudah mempunyai rasa chemestry dengan Gubernur Ahok. Hubungan chemestry antara warga/rakyat dengan pimpinannya seperti chemistry rakyat DKI Jakarta dengan Gubernur Ahok memang tidak akan pernah bisa ditiru, dibuat-buat, apalagi dipaksa-paksakan, karena semua itu berlangsung secara alamiah, spontan.

Seorang pimpinan yang baik dan bijaksana, yang sungguh-sungguh berbakti kepada rakyatnya, tanpa pamrih apapun, pasti dengan sendirinya akan membuat rakyat merasa tenteram, merasa dilindungi, diayomi, dan diperhatikan. Sem Simanjutak, warga Jakarta Utara, yang tidak tahu kalau Ahok sudah cuti, saat datang di Balai Kota di Jumat pagi itu, mengaku kecewa berat ketika tahu Ahok tidak berada di sana karena cuti. Padahal, maksud kedatangannya itu adalah untuk menyampaikan undangan pernikahan keponakannya untuk Ahok. Sem berkisah, ia pernah mengadu kepada Ahok karena ijazah anak tetangganya ditahan pihak sekolah sampai

dua tahun karena belum menyelesaikan kewajiban keuangannya kepada pihak sekolah. Ia lalu menemani tetangganya itu mengadu kepada Ahok di Balai Kota. Pengaduan itu langsung ditanggapi Ahok, 2-3 hari kemudian ijazah anak tetangganya itu sudah ditebus, dan bisa diambil.

Asal muasal kebiasaan Ahok setiap pagi menerima pengaduan warga itu berasal dari rasa cinta dan keperdulian sejati darinya sebagai seorang pimpinan yang mengayomi. Sebagaimana yang pernah diungkapkan Ahok, asal muasal dia setiap pagi menerima langsung pengaduan warga kepadanya di pendopo Balai Kota itu adalah ketika ada saja warga yang mengatakan kurang puas jika hanya mengadu melalui SMS, yang memang disediakan Ahok untuk itu. Lalu, Ahok bilang, kalau belum puas, tunggu saja dia di Balai Kota. Tunggu dia di sana, sebelum masuk ke ruang kerja, nanti bisa bertemu langsung dia di situ, adukan saja langsung masalahnya, nanti diselesaikan.

Ternyata ucapannya itu benar-benar direspon warga dengan melakukan apa yang disarankannya itu, dari situlah kebiasaan itu berlangsung terus, sampai dengan saat Ahok terpaksa menjalani masa cutinya sebagai calon petahana gubernur DKI Jakarta itu. Ahok sendiri juga langsung merasa lebih senang jika bisa bertemu langsung dengan warga saat mereka mengadu kepadanya itu, daripada hanya melalui SMS, karena dengan bertemu langsung itu dia bisa tahu detail pokok masalahnya. Lagi pula kata Ahok: “Kalau lihat muka orang kan, bisa ketahuan bohong enggak-nya. Dari matanya ketahuan, laporan dia benar atau enggak-nya."

Sebagai manusia biasa, mungkin saja terkadang ada rasa jenuh Ahok menjalani rutinitas seperti itu, tetapi ketika hal itu ditanyakan kepadanya, Ahok spontan menjawab: "*Namanya juga jadi pejabat, pelayan. Ya begitu, mau gimana lagi*."

Kecintaan Ahok dengan pekerjaannya sebagai gubernur “pelayan rakyat” itu bukan sekadar slogan, tetapi benar-benar sudah dibuktikan oleh Ahok selama dua tahun lebih masa baktinya itu, itulah sebab pula dia merasa keberatan ketika dipaksakan untuk cuti dengan alasan harus memenuhi ketentuan formal Undang-Undang Pilkada 2016, yang menetapkan calon petahana kepala daerah wajib cuti selama masa kampanye pilkada (berkampanye atau tidak, harus cuti), apalagi masa cuti itu terlalu lama: sampai empat bulan! Oleh karena itulah Ahok pun mengajukan uji materi terhadap Pasal 70 Ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mengatur ketentuan tersebut, ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ahok mengharapkan MK mengabulkan permohonannya itu dengan mengubah ketentuan tersebut menjadi cuti hanya wajib jika calon petahana kepala daerah hendak menjalani kampanye. Jika tidak kampanye, ia boleh menjalankan tugas jabatannya sebagai kepala daerah seperti biasa.

Ahok sangat ingin tetap bekerja, terutama saat pembahasan RAPBD DKI 2017 yang rawan dengan pencoleng-pencolengnya. Ia juga telah menyatakan tekadnya bahwa jika MK mengabulkan permohonan uji materinya itu, maka

ia akan kembali bekerja seperti biasa. Menteri Dalam negeri Tjahjo Kumolo juga sudah menyatakan bahwa jika MK mengabulkan permohonan uji materi Ahok, dan berlaku surut, maka ia akan mencabut surat keputusannya (SK) tentang plt kepala daerah itu. Dengan demikian pengangkatan plt Gubernur DKI Jakarta dibatalkan, dan Ahok kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta definitif. Apalagi sesungguhnya pengangkatan plt kepala daerah berdasarkan SK Mendagri itu rawan bermasalah secara hukum, karena di dalam SK itu disebutkan bahwa plt kepala daerah diberi kewenangan membuat keputusan strategis, termasuk penentuan APBD. Padahal Pasal 14 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan jelas menentukan: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Daniel HT, Kompasianer dari FakFak, Papua Barat

KOMPASIANA, 29 Oktober 2016

Sentimen Primordial dan Politik "*Ressentiment*"

Genderang pilkada serentak sebagai kontestasi dan pesta demokrasi sudah berkumandang. Namun, bayang-bayang ancaman terhadap perhelatan nasional yang beradab berubah menjadi petaka juga tampak sangat kasatmata. Simtom tersebut antara lain dengan mudah dapat ditemukan dalam ujaran-ujaran kebencian absolut bernuansa primordialistik di media sosial (medsos) terhadap pasangan kandidat gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (BTP dan Djarot).

Bahkan, saking semangatnya, salah satu media elektronik mendapat peringatan dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) karena dinilai kurang memperhatikan ketentuan tentang penghormatan dan prinsip-prinsip jurnalistik terhadap nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan.

Fenomena itu menemukan validitasnya dalam survei Wahid Foundation yang dikutip Zuly Qodir (Kompas, 29 Oktober 2016), hampir 60 persen responden membenci kelompok tertentu berlatar agama non-Muslim, garis Tionghoa, komunis, dan lain-lain. Lebih dari 80 persen juga tidak bersedia bertetangga dengan kelompok yang dibenci. Oleh sebab itu, tidak mengherankan pimpinan kepolisian menginstruksikan siaga I untuk mengantisipasi ekses dinamika politik yang disulut kebencian primordialistik yang membara. Artinya, ketertiban dan keamanan publik mendapat ancaman serius sehingga perlu mengerahkan puluhan Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brigade Mobil (Brimob) di wilayah yang dianggap strategis. Negara ingin menjamin ketertiban umum dari ancaman anarki sosial dan kerusuhan.

Gejala kebencian primordialistik, terutama kelompok yang merasa inferior dan termarjinalkan menjadi permenungan Nietzsche tentang filosofi dan psikologi asal-usul serta silsilah dendam kesumat atau biasa disebut *ressentiment* (Setyo Wibowo, majalah Basis, nomor 03-04 tahun ke-65, 2016). Untuk mempermudah menjelaskan gagasannya, ia mempergunakan metafora elang, sebagai binatang perkasa yang kodratnya pemangsa dan domba yang ditakdirkan sebagai makhluk yang lemah, serba kalah, merasa tersingkirkan, dizalimi, tak berdaya, iri, dengki, hina, dan frustrasi. Pokoknya gerombolan domba merasa sebagai pecundang, sementara elang adalah pemenang.

Gerombolan domba yang secara kodrati tidak berdaya menghadapi kedigdayaan elang, mereka menciptakan ideologi tentang kebenaran. Inti filosofi nilai-nilai tersebut adalah kepasrahan, tidak melakukan perlawanan, mengalah dengan harapan serta keyakinan Tuhan yang akan membalas dan menghadiahi surga. Dengan meyakini nilai-nilai tersebut, mereka merasa sudah setara bahkan merasa menang. Oleh karena itu, petinggi gerombolan pecundang selalu membakar pengikutnya dengan mengemas kebenaran semu dan janji masuk surga. Akibatnya, dalam perburuan nilai-nilai kebenaran subyektifnya, mereka justru menghalalkan cara, bahkan melakukan revolusi yang meluluhlantakkan tatanan dunia agar masuk surga.

Dalam tataran mondial, contoh kelompok tersebut antara lain kelompok yang menamakan diri sebagai Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Namun, gagasan Nietzsche tidak seluruhnya valid dalam konteks Indonesia, terlebih jika dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta. Bayang-bayang kebencian absolut yang beredar dalam medsos oleh beberapa kalangan tertentu tidak otentik sebagaimana dikembangkan Nietzsche karena lebih merupakan limbah dari pertarungan politik kekuasaan di tingkat lokal.

Ideologi kebencian bukan karakter bangsa Indonesia yang plural, melainkan mampu hidup damai dan harmoni. Banyak kalangan menduga, para penyebar kebencian sekadar alat politik yang digunakan oleh lawan politik BTP-Djarot karena titik lemah pasangan tersebut adalah kodrat BTP yang tidak pernah ia pilih sendiri sebagai keturunan Tionghoa. Tiba-tiba, sejak lahir ia Tionghoa.

Dalil Nietzsche semakin tidak valid karena sejak 2005 sampai dengan 2016 frekuensi pilkada sudah sekitar 1.400 kali, mungkin sudah puluhan, bahkan ratusan, kandidat kepala daerah diajukan partai politik tanpa memedulikan sentimen primordial, termasuk partai-partai Islam mengusung kandidat non-Muslim.

Heterogenitas bangsa dengan garis primordial yang silang-menyilang menjadi aset spiritual bangsa karena tidak memungkinkan bangunan kekuasaan hanya dihimpun melalui garis primordial tunggal. Inklusivitas dalam politik menjadi keniscayaan untuk membangun kekuatan politik yang signifikan di Indonesia. Watak tersebut amat kuat karena mempunyai akar peradaban dan histori yang menghasilkan konsensus untuk meleburkan bangsa-bangsa se-Nusantara menjadi satu bangsa Indonesia sebagaimana dikumandangkan dalam Sumpah Pemuda. Ia merupakan monumen spiritualitas bangsa yang merupakan produk tekad semua komponen anak bangsa saling merasakan rasa kebangsaan. Peristiwa yang menggetarkan semangat persatuan merupakan modal sosial peradaban bangsa untuk mewujudkan tujuan bernegara, kebahagiaan bagi rakyat Indonesia.

Sejarah mengajarkan fanatisme kebencian primordial bukan monopoli kelompok miskin atau kurang pendidikan, tetapi juga golongan menengah, tetapi diduga mengidap sindrom delusi. Maka, solusinya negara harus mempunyai komitmen permanen terhadap politik pendidikan membangun watak generasi muda Indonesia. Harapan juga ditujukan kepada ketiga pasangan calon meskipun dalam derajat berbeda mempunyai rekam jejak dan asal-usul spirit kebangsaan, berkewajiban juga mengeliminasi para pendukung yang menggalang kekuatan dengan menyebarkan kebencian primordial.

J Kristiadi, Peneliti Senior CSIS

KOMPAS, 01 November 2016

Pelajaran Kearifan dari Kasus Ahok

Islam merupakan agama paling toleran dan cinta damai karena visi pembumian Islam adalah mewujudkan rahmat (kasih sayang) bagi semua di alam raya (*rahmatan li al-alamin*). Kendati demikian, Islam sering difitnah sebagai agama teror dan terorisme. Padahal, teror bisa dilakukan siapa saja, termasuk oleh negara terhadap rakyatnya atau teror negara terhadap negara lain. Karena itu, Islam menolak dan melarang umatnya melakukan kekerasan dan terorisme atas nama apa pun, lebih-lebih atas nama agama.

Selain itu, Islam dan umat Islam di seantero dunia, tidak terkecuali di Indonesia, juga sering diperlakukan secara tidak adil. Sudah tidak terhitung jumlahnya, berapa kali Nabi Muhammad SAW dihina, dinistai, dan dicaci maki. Alquran dirobek dan dibakar oleh mereka yang membenci Islam. Umat Islam masih sabar dan bisa menahan diri.

Bahkan, boleh jadi masih bisa memaafkan karena ketika Nabi SAW dilempari batu oleh penduduk Thaif saat hendak berdakwah, beliau tidak marah, tidak emosi, dan tidak pula membalas dendam. Ketika ditawari malaikat Jibril untuk "membumi hanguskan" Thaif dengan melongsorkan Gunung Thaif, Nabi SAW menolak, bahkan mendoakan: "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka memang tidak memahami (Islam)".

Kasus dugaan penistaan kitab suci agama Islam yang dilakukan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) secara moral keagamaan sesungguhnya sudah selesai dengan permohonan maaf dari Ahok. Namun, masalah hukumnya memang tidak bisa diselesaikan dengan hanya minta maaf. Proses hokum penista agama (Islam) tetap harus diproses demi tegaknya keadilan hukum.

Dalam konteks ini, aparat penegak hukum, kepolisian, wabil khusus Presiden Jokowi, harus bersikap arif, bijak, dan adil. Yang menyulut "*kemarahan dan kegeraman*" publik, khususnya umat Islam, adalah lambannya penanganan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok. Suara dan aspirasi umat Islam seolah diabaikan, tidak direspons positif, bahkan cenderung dianggap seperti "*anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu*".

Publik bertanya, ada apa sesungguhnya dengan Ahok dan di belakang Ahok? Apakah Ahok itu kebal hukum? Apakah demi membela seorang Ahok, semua kepentingan negara dan republik ini harus dikorbankan? Mengapa hingga detik ini Presiden RI sama sekali tidak merespons kasus Ahok?

Kekuasaan dan Keadilan

Kasus Ahok ini merupakan ujian berat penegakan keadilan hukum di Indonesia. Rakyat, khususnya umat Islam, sudah sangat sabar menunggu aparat penegak hukum bersikap objektif, fair,jujur, dan adil menangani dan memproses kasus hukumnya. Publik banyak bertanya, apakah Ahok dan Jokowi sedang "main mata" dan "saling sandera" terkait masalah hukum? Kasus Ahok ini bisa menjadi seperti "bola liar" yang berpotensi

menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan kehidupan masyarakat dan bangsa. Jika kasus ini tidak ditangani secara objektif, jujur, adil, dan transparan, tidak tertutup kemungkinan ”bola liar” ini menjadi ”bom waktu” yang mengancam masa depanpersatuan, kesatuan, dan keharmonisan bangsa. Sesungguhnya kasus Ahok itu tidaklah sulit untuk diselesaikan selama pemimpin bangsa dan aparat penegak hukum bersungguh-sungguh menunjukkan political will dan law inforcement yang jujur, adil, dan transparan.

Sudah banyak laporan masyarakat yang dialamatkan kepada Kepolisian RI, mengapa tidak segera ditindak lanjuti? Diyakini bahwa jika Ahok segera dipanggil oleh Bareskrim untuk dimintai keterangan sebagaiterlapor, lalu diproses hukumnya, dan dinyatakan sebagai tersangka karena melanggar undang-undang tentang penistaan agama, dapat dipastikan ”luka umat Islam” yang belum mendapatkan keadilan sedikit terobati.

Jika kasus ini terus dibiarkan dengan mengulur-ulur waktu, pengalihan isu, dan pencitraan palsu, dikhawatirkan ”bom waktu” itu akan meledak. Ledakan kemarahan publik atas ketidakadilan dalam penegakan hukum itu boleh jadi dampak dan ongkos sosialnya jauh lebih dahsyat daripada peristiwa Mei 1998? Apakah demi seorang Ahok, Presiden akan membiarkan negeri ini mundur ke belakang dan menjadi ”pemantik Indonesia Spring ”, sebagaimana Arab Spring yang mengerikan dan meluluhlantakkan sendi-sendi pembangunan peradaban? Menurut Ibn Taimiyah, negara dan kehidupan bangsa itu akan aman, damai, dan penuh toleransi jika kebenaran dan keadilan (hukum) ditegakkan.

Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat melalui proses demokrasi itu sejatinya merupakan mandat untuk menegakkan keadilan. Jika mandat rakyat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan diabaikan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan aparat penegak hukum), dampak dari pengabaian dan ketidak hadiran negara dalam penegakan kebenaran dan keadilan hukum itu akan sangat mengancam ketertiban dan keamanan negara dan bangsa.

Sebab itu, kekuasaan (negara) harus hadir dan tampil terdepan dalam penegakan kebenaran dan keadilan hukum. Pemimpin negeri ini harus bersinergi membangun dan menegakkan kebenaran dan keadilan hukum tanpa tebang pilih dan tanpa pandang bulu. Sila kelima Pancasila dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, tidak ada manusia kebal hukum di negeri ini, lebihlebih pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan masyarakat, tetapi malah menghina dan menista bukan hanya ulama, tetapi juga kitab suci umat Islam. Menghina dan menista kitab suci sesungguhnya identik dengan menghina dan menista Allah dan Rasul-Nya.

Pelajaran Kearifan

Diakui bahwa kasus Ahok ini sarat pelajaran kearifan yang penting dijadikan sebagai bahan refleksi bersama. *Pertama*, kekuasaan yang diberi mandat oleh

rakyat harus berani menegakkan kebenaran dan keadilan hukum terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum di negeri ini.

Jangan ada dusta di antara pemimpin dan penegak hukum. Supremasi hukum harus benar-benar ditegakkan, tidak dipermainkan, apalagi ”diperjual belikan dan diintervensi” pihak asing dan aseng. Jika keadilan tidak ditegakkan terhadap kasus Ahok ini, berarti lonceng kematian keadilan hukum sudah dibunyikan.

Kedua, kemaslahatan (kepentingan) bangsa dan negara harus diutamakan daripada ”membela” dan ”melindungi” seseorang yang diduga bersalah dan melanggar hukum. Suara dan aspirasi keadilan hukum dari masyarakat harus didengar dan direspons secara positif karena negara ini didirikan antara lain untuk menegakkan keadilan demi terwujudnya ketertiban, keamanan, kedamaian, kesatuan, dan persatuan bangsa.

Ketiga, penegakan keadilan hukum secara objektif, jujur, adil, dan transparan adalah jalan perdamaian dan keadaban. Yakinlah, umat Islam Indonesia sudah memaafkan Ahok secara moral, tapi mereka hanya menuntut agar kasusnya diproses secara hukum dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya, tidak pandang bulu dan tebang pilih. Karena, kasus Ahok ini bukan hanya melukai hati umat Islam, khususnya para ulama, tapi juga telah menista kitab suci, Allah, dan Rasul-Nya.

Keempat, hikmah dari kasus Ahok juga ”menyadarkan” umat Islam untuk membaca dan terus membaca Alquran. Kesadaran back to Alquran itu hendaknya menjadi momentum strategis dan titik balik untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, pemaknaan, dan pengamalan nilai-nilai Alquran oleh umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kelima, kasus Ahok juga menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi pejabat publik dan pemimpin negeri ini, betapa pentingnya menjaga ucapan, perkataan, kebijakan, dan komunikasi publik yang santun dan berkeadaban. Bangsa ini ditakdirkan Allah SWT sangat majemuk (plural) sehingga kesantunan dan keadaban pemimpin dalam bertutur kata dan mengambil kebijakan haruslah senantiasa mempertimbangkan kearifan publik dan nasional.

Tanpa kesantunan, keadaban, dan kearifan, pemimpin tidak akan pernah menjadi pelayan bagi rakyat yang dipimpinnya, tapi hanya akan sibuk pencitraan, pengembalian ”*modal finansial*” pencalonannya, pembagian ”*kue-kue kekuasaan*” kepada pendukung dan mitra koalisinya, bahkan boleh jadi sibuk mengabdi untuk kepentingan ”*cukong-cukong*” pemodal yang mendanai kampanyenya.

Muhbib Abdul Wahab, Dosen Pascasarjana FTIK UIN Syarief Hidayatullah dan UMJ

KORAN SINDO, 02 November 2016

Pelajaran dari Kasus Ahok

Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) benar-benar menguras energi. Silang pendapat terhadap pernyataan Ahok tentang surah Al Maidah ayat 51 begitu luar biasa. Pro dan kontra tidak hanya melibatkan warga DKI Jakarta. Mereka yang tinggal jauh dari ibu kota juga terlibat dalam perdebatan. Puncaknya, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, orang bergerak ke Jakarta untuk melakukan aksi damai pada Jumat, 4 November.

Solidaritas umat dari segenap penjuru tanah air seakan memuncak. Dari berbagai daerah, mereka berbondong-bondong datang ke ibu kota. Mereka menyuarakan tuntutan yang sama, yakni tuntaskan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok. Selain gelombang massa yang datang ke Jakarta, masih banyak demonstrasi serupa di daerah. Gelombang demonstrasi damai menunjukkan bahwa efek pernyataan Ahok telah menjadi isu nasional, lintas etnis dan agama.

Sebagian orang mungkin memahami bahwa aksi demo itu digerakkan elite politik. Pandangan tersebut bisa dimaklumi karena faktanya di Jakarta sedang berlangsung tahapan pemilihan gubernur (pilgub). Tetapi, jika dikonstruksi dari awal, jelas aksi demonstrasi damai itu murni dipicu pernyataan Ahok yang dianggap telah menistakan agama. Apalagi, aksi demonstrasi merupakan salah satu bentuk pernyataan aspirasi yang dijamin konstitusi.

Didorong keinginan untuk membela kemuliaan kitab suci, mereka yang tidak berkepentingan dengan pilgub DKI secara sukarela datang ke ibu kota negeri. Peserta aksi damai menganggap calon gubernur petahana itu tidak layak membawa perdebatan penafsiran ayat Alquran dalam konteks pilgub DKI. Kelompok umat yang tersinggung pun melaporkan Ahok ke kepolisian atas tuduhan penistaan agama.

Kasus yang menimpa Ahok penting menjadi pelajaran bagi siapa pun. Tidak sepantasnya seseorang membawa agama dalam pentas persaingan politik. Sebab, politik merupakan urusan duniawi (profan). Sedangkan agama tergolong wilayah suci (sakral). Meminjam istilah cendekiawan muslim Nurcholish Madjid (Cak Nur), semua pihak harus melakukan sekularisasi. Pada konteks ini, sekularisasi dimaknai Cak Nur secara sosiologis. Menurut Cak Nur, sekularisasi bermakna membedakan, bukan memisahkan, urusan politik dan agama. Pemahaman tersebut penting agar tidak terjadi pemaksaan penafsiran ajaran agama untuk agenda politik.

Pelajaran lain dari kontroversi Ahok adalah pentingnya menghargai kebinekaan. Dengan pernyataan kontroversialnya, Ahok tampak tidak menempatkan diri sebagai pejabat publik yang pluralis. Padahal, negeri tercinta ini secara nature dan culture berbineka. Pernyataan itu merujuk pada realitas kemajemukan etnis, budaya, agama, dan paham keagamaan di Nusantara. Meski faktanya berbineka, sampai kapan pun negeri ini harus tunggal ika (semboyan Bhinneka Tunggal Ika).

Sebagai pejabat publik, tidak sepantasnya Ahok mengumbar pernyataan dengan menuduh umat telah dibodohi ulama. Dalam rekaman yang beredar luas di media, Ahok menyinggung pandangan sebagian ulama mengenai larangan memilih pemimpin non-Islam. Sebagai pewaris ajaran Nabi, sejatinya tidak ada yang salah dengan penafsiran sebagian ulama. Para ulama justru ingin menunjukkan kehati-hatian dalam memilih pemimpin. Sebab, persoalan kepemimpinan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kini umat sudah sangat dewasa dalam memilih pemimpin. Pilihan umat sering kali juga berbeda dengan fatwa elite agama dan keputusan partai. Perbedaan ideologi, politik, agama, dan etnis dalam banyak kasus pemilihan kepala daerah sudah tidak menjadi pertimbangan. Yang terpenting, calon pemimpin memiliki rekam jejak baik dan berintegritas. Pada konteks ini, seharusnya Ahok tidak usah galau. Syaratnya, Ahok bisa menampilkan diri sebagai pemimpin yang santun sehingga layak dipilih.

Jika umat tidak memilih Ahok, janganlah itu dipahami karena dia seorang Tionghoa atau non-Islam. Orang tidak memilih Ahok sangat mungkin karena keangkuhannya dan gaya bicaranya. Apalagi, yang dibicarakan soal agama yang sensitif. Siapa pun orangnya harus berhati-hati jika berbicara soal agama. Agama selalu melibatkan pengalaman pribadi dan emosi. Orang yang tidak menjalankan ajaran agama secara baik pun bisa marah jika agamanya dinistakan.

Fakta itulah yang terjadi dengan aksi membela Islam di Jakarta dan sejumlah daerah. Meski berasal dari kelompok berbeda, mereka disatukan kepentingan yang sama: ingin memuliakan kitab sucinya. Kini yang penting ditunggu adalah respons pemerintah. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) tidak boleh memandang aksi solidaritas umat sebagai peristiwa biasa. Aksi membela Islam yang dipicu dugaan kasus penistaan agama oleh Ahok merupakan fenomena luar biasa.

Jika pemerintah lamban merespons tuntutan umat, sangat mungkin akan terjadi gelombang aksi serupa yang lebih besar. Pada konteks inilah aparat penegak hukum harus bekerja profesional untuk menuntaskan kasus Ahok. Semua elemen bangsa tentu tidak ingin terjadi gerakan perlawanan rakyat pada pemerintah. Apalagi jika gerakan itu dibumbui isu perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Biyanto, Dosen UIN Sunan Ampel; Wakil Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim

JAWA POS, 07 November 2016

Ahok, Penistaan dan Pemaafan

Gonjang-ganjing akibat ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belumlah reda. Seperti yang terlihat dalam aksi unjuk rasa di berbagai belahan kota Indonesia, umat Islam menunjukkan sikap dan keprihatinannya. Di Jakarta yang merupakan episentrum dari denyut nadi politik nasional, luapan massa itu begitu menyeruak dan menggema, khususnya dalam aksi demo 4 November. Mereka merasa terpanggil untuk menyatakan sikap dan ketersinggungannya. Di sisi lain, publik khawatir, cemas dan waspada karena gelombang demonstrasi begitu masif dan membahana. Beruntung, tidak ada insiden yang dikhawatirkan banyak orang tersebut. Demonstrasi berjalan relatif damai, meski sempat disusul oleh letupan vandalisme dan kekerasan.

Khususnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Suka atau tidak, dilihat dari materinya, ucapan Ahok di Pulau Seribu memang kontroversial dan potensial untuk memecah harmonitas sosial. Ia merujuk kepada Alquran (surah al-Maidah, 51) untuk menyimpulkan larangan memilih pemimpin nonmuslim. Dalam ucapannya, Ahok menyampaikan, ayat tersebut dipakai untuk mengelabui (menipu) masyarakat. Sontak, kalimat tersebut menyulut emosi dan mengingatkan adanya pasal tentang penistaan agama.

Legalitas dan High Context

Rezim kebebasan beragama di Indonesia adalah rezim kebebasan terikat (gebonden vrijheid). Artinya, keyakinan untuk menghayati, meyakini dan meresapi kerohanian sebagai perasaan keagamaan internal-personal, sepenuhnya dijamin undang-undang. Karena hal itu merupakan aspek internal kebebasan, hak yang tidak dapat dicabut. Namun, menyatakan atau berbuat sesuatu yang bersinggungan dengan konteks keagamaan atau bersumberkan dari nilai keagamaan di dalam keterkaitannya dengan relasi sosial, tidaklah berpangkal pada kebebasan mutlak.

Oleh karena itu, meski pernah dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Undang-Undang (UU) Nomor 5/1969 atau yang dikenal dengan UU Nomor 1/PNPS/1965 masih dinyatakan berlaku, di mana Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 tersebut berbunyi: "*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu*".

Personifikasi Ahok sekarang ini bukanlah manusia biasa. Selain yang bersangkutan adalah gubernur petahana, Ahok juga calon gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Proses pencalonannya pun berlangsung sedemikian rupa dramatis, dengan tarik ulur politik yang atraktif, sekaligus akrobatik. Kontestasi dan kompetisinya pun sangat menantang dan sarat

dengan teka teki silang. Maka, tidak dimungkiri, konteks kasus ini adalah konteks yang tinggi.

Adalah hak Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyatakan pendapat dan pernyataan keagamaannya, sepertijuga hak publik untuk mengkritisi pernyataan Ahok dengan aneka cara, termasuk dengan aksi unjuk rasa masif 4 November lalu. Tetapi cepat atau lambat namun pasti, sekarang persoalannya semakin meruncing dan melebar. Tidak mustahil akan merembet dan lari ke mana-mana. Maka sudah saatnya dipikirkan bahwa menjadi hak publik juga untuk merasakan ketenteraman dan kedamaian dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbineka. Mungkin saat ini saatnya semua pihak duduk bersama kembali: andaikan penistaan itu secara formal maupun materiil terbukti atau tidak terbukti, yang jelas perasaan keagamaan masyarakat Islam sudah terluka.

Aksi dan unjuk rasa adalah aspirasi dan bukti nyatanya. Apalagi sampai demonstrasi berakhir, Presiden Jokowi belum menunjukkan inovasi dan kepiawaiannya untuk meredakan situasi dan merangkul semua anak negeri. Walau demikian, tidaklah semua terlambat. Semua pihak ada baiknya untuk berkepala dingin dan lapang dada: Ahok dengan elegan dapat bersafari untuk bersilaturahim dengan ulama serta menyatakan penyesalannya dengan (kembali) meminta maaf, sementara ulama dapat menerimanya dengan tangan terbuka.

Seraya (semuanya) menekankanperlunya sikap kehati-hatian ekstra dalam hal berdimensi dan berpotensi konflik horizontal. Publik masih tetap berharap Presiden Jokowi dapat benar-benar dan nyata sebagai pemimpin. Bukan hanya sebagai presiden. MUI sudah melakukan kanalisasi aspirasi. Umat sudah menyampaikan bisikan nurani.

Di atas semua, rakyat ingin harmoni agar negara yang dihuni oleh banyak penduduk muslim ini dapat terus menjalankan agenda demokrasi. Sesuatu yang langka di banyak negeri. Dunia sudah mengapresiasi. Demokrasi yang tidak terdistorsi. Demokrasi yang berdimensi nilai ilahi. Kita tetap meyakini, interaksi simbolik yang positif antarelite dapat meredam situasi dan menabalkan harapan untuk kebersamaan.

JM Muslimin, Dosen Sosiologi Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

KORAN SINDO, 11 November 2016

Demokrasi Kita

Gubernur DKI non-aktif Basuki Tjahaja Purnama akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penistaan agama akibat pidatonya di Kepulauan Seribu. Suka atau tidak, hasil gelar perkara 15 November lalu semestinya dihormati dan dikawal sampai kasus ini selesai 100 persen di meja hijau. Dengan demikian, tidak ada dalih lagi untuk mengerahkan massa seperti yang terjadi pada aksi damai 4 November silam. Sementara beredar kabar akan terjadi lagi demonstrasi besar alias Aksi Bela Islam ke-3, pada 25 November atau 2 Desember mendatang.

Sekiranya benar sudah dirancang akan berlangsung lagi, demonstrasi seperti itu tak perlu kolosal. Cukup seperti unjuk rasa yang nyaris terjadi setiap hari di sekitar Monas yang melibatkan pendemo dalam jumlah terbatas.

Kepolisian telah bekerja secara profesional, begitu juga tentunya pengadilan kelak ketika Basuki diajukan ke meja hijau. Kita negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum, bukan mobokrasi yang mengandalkan pengerahan massa pemaksa kehendak. Terbukti pula Basuki tidak pernah, juga tidak akan, dilindungi Presiden Joko Widodo ataupun oleh aparat keamanan. Bahwa Presiden Jokowi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendukung Basuki sebagai cagub yang didukung PDI-P juga, itu tentu benar.

Kita akan menyelenggarakan 101 pilkada serentak pada 15 Februari 2017, termasuk DKI. Kampanye sudah dimulai dan pengerahan massa, baik sengaja maupun tidak, telah terjadi hari-hari ini di hampir semua lokasi di Ibu Kota. Betul, pilkada di daerah mana pun, ya, sama saja. Namun, pilgub Jakarta menjadi istimewa karena statusnya sebagai ibu kota negara yang vital, strategis, dan menjadi barometer republik ini. Ada tiga cagub/cawagub yang berkompetisi, termasuk duet Basuki-Djarot Saiful Hidayat.

Duet lainnya Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Mereka mempertarungkan gagasan dan program melalui kampanye yang mengandalkan kerumunan massal tanpa harus diganggu oleh perkara penistaan agama atau isu-isu SARA lainnya. Juga jangan sampai kampanye Pilgub DKI menjadi gerakan "asal bukan" oleh kerumunan massal. Telah berkali-kali terjadi penolakan kerumunan massal terhadap kedatangan duet Basuki-Djarot untuk berkampanye di sejumlah tempat, sebuah kemunduran demokrasi kita yang dilakukan para pemaksa kehendak.

Kita selayaknya wajib menjaga "rekor nasional" tidak pernah terjadi kerusuhan saat kampanye pemilu, kecuali kerusuhan kecil di Lapangan Banteng dalam kampanye Pemilu 1982. Seperti terbukti pada kerusuhan Lapangan Banteng, selalu ada penunggang. Makanya Presiden Jokowi juga menyebut penunggang atau aktor di belakangan kerusuhan kecil yang terjadi setelah aksi damai 4 November selesai. Polisi telah mengamankan beberapa tersangka yang diduga membuat rusuh.

Ketika saya berada di antara pendemo aksi damai 4 November, tidak begitu terasa ada suasana mencekam. Meskipun teriakan, tulisan spanduk/poster, dan orasi terasa lantang, toh para pendemo Aksi Bela Islam ke-2 itu berperilaku tertib. Oleh sebab itu, sayang aksi damai mereka dinodai kerusuhan kecil tersebut. Andai saja kerusuhan tidak pecah, semua orang akan mengacungkan jempol untuk aksi damai itu. Akibat kerusuhan kecil itu, akhirnya kita semua ikut tegang, repot, dan curiga. Kita menjadi bangsa terbelah, terutama ketika mengikuti pro dan kontra tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada kerusuhan kecil itu di media sosial.

Tentu saja Presiden Jokowi yang paling repot. Ia segera menggalang konsolidasi internal dengan mengunjungi berbagai kesatuan TNI-Polri dan ormas-ormas Islam setelah demo 4 November. Presiden menggalang konsolidasi selaku panglima tertinggi dan sebagai Kepala Negara yang siap silaturahim dengan berbagai ormas ataupun tokoh nasional, ketimbang doing nothing. Kepemimpinan seorang presiden diuji bukan pada saat kondisi politik stabil, tetapi juga saat krisis.

Memang tak mudah menggalang konsolidasi di negara dengan sekitar 17.000 pulau dengan populasi beraneka etnis dan agama, dari Sabang sampai Merauke. Mustahil seorang presiden yang menjabat selama lima tahun mampu memuaskan keinginan semua golongan yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak sendiri.

Presiden Soekarno mati-matian menggalang keindonesiaan dengan cara mengunjungi sebanyak-banyaknya rakyat di beberapa provinsi selama 10 tahun sejak Proklamasi. Presiden Soeharto pun menggalang konsensus nasional baru pasca-1965 selama era krisis tiga tahun sampai menjadi Kepala Negara yang sah tahun 1968. Betapa pun, kita butuh kepemimpinan nasional yang tegas dan berani di kala menghadapi krisis sekecil apa pun. Secara konstitusional, konsolidasi yang dilakukan Presiden Jokowi dapat dipertanggungjawabkan.

Sekali lagi, apa yang terjadi pada malam setelah isya 4 November lalu adalah krisis yang segera ditangani Presiden Jokowi. Sempat terdengar spekulasi kerusuhan kecil itu direkayasa untuk memicu kerusuhan lebih besar yang dapat memicu instabilitas politik, dengan harapan semua kesalahan ditimpakan kepada Presiden Jokowi. Ternyata sasaran itu tidak tercapai. Ini kegagalan yang kembali berulang karena kerap terjadi sejak era Reformasi, ketika setiap presiden dihadang berbagai upaya untuk didongkel baik konstitusional maupun tidak-termasuk pemakzulan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid.

Semestinya demokrasi kita setelah era Reformasi melangkah ke depan alias tak lagi jalan di tempat. Apa boleh buat, demokrasi kita masih berbasis "demo" yang memancing mobokrasi, yang diintai mata-mata gelap yang bernafsu memicu kerusuhan massal sembari berjudi mengambil untung.

Budiarto Shambazy. KOMPAS, 19 November 2016

Labirin Demokrasi Populis

GELOMBANG populisme politik tengah menggejala di abad kita. Puncaknya, ketika sosok kontroversial Donald Trump secara mengejutkan justru terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. Populisme politik telah dipandang sebagai bukan sekadar penyakit kambuhan, melainkan juga ancaman serius bagi demokrasi. Dalam kadarnya yang rendah, populisme mengusik upaya peningkatan kualitas demokrasi. Apabila kadarnya tinggi, ia jelas-jelas merusak hakikat demokrasi.

Sosok terpilih dalam demokrasi elektoral, dalam konteks ini, merupakan para pembajak demokrasi untuk tujuan-tujuan kekuasaannya. Populisme politik terkait dengan bagaimana sang kandidat dalam kontestasi demokrasi elektoral memainkan isu-isu kerakyatan (populis), bahkan secara ekstrem isu-isunya 'menyerempet bahaya' (*vivere pericoloso*), yakni dengan mengeksplorasi secara demonstratif aneka sentimen primordial.

Dalam kasus Donald Trump, dapat dilihat kembali bagaimana ia melontarkan isu-isu yang melawan tidak sekadar kemapanan, tetapi juga kelaziman-kelaziman substansial dalam arus utama demokrasi. Visi egalitarianisme Trump tekor oleh pandangan-pandangannya yang cenderung diskriminatif dalam isu-isu tertentu. Kajian mengenai populisme politik tengah naik daun belakangan kendati yang banyak dijadikan contoh kasus justru bukan di Amerika Serikat, melainkan beberapa negara di Eropa, Amerika Latin, dan Asia.

Setidaknya ada dua tinjauan dalam hal ini. Pertama, populisme ditinjau dalam konteks cara berkomunikasi yang dilakukan kandidat dalam meraup dukungan seluas mungkin massa publik. Tinjauan ini lebih melihat sisi bagaimana sang aktor memanfaatkan ragam isu dan gaya yang bertujuan untuk meraih simpati pemilih. Ia harus mencapai level 'hero', atau dikesankan sebagai 'juru selamat' (mesias) terhadap banyak masalah yang, tak terselesaikan oleh pendahulu.

Ia antitesis dari pemimpin sebelumnya.

Yang paling penting dari tinjauan ini ialah keberadaan dan peran media massa, apakah yang berjenis konvensional ataukah sosial media. Sang sosok populis berupaya untuk menciptakan realitas baru, kendatipun sesungguhnya semu, karena sekadar memainkan simbol-simbol dan isu-isu yang mampu mengaduk-aduk emosi potensial pendukungnya. Ia secara sadar dituntut mampu memegang kendali simulakra tersebut. Dalam pendekatan pemasaran politik modern, kahadiran sosok populis semacam ini didesain sedetail mungkin sehingga yang tampak seolah-olah, sangat alamiah dan 'tak ada kepalsuan'.

Tinjauan kedua, meletakkan fenomena populisme secara ideologis. Ia lebih mendasar ketimbang sekadar cara berkomunikasi atau manipulasi komunikasi politik semata-mata. Tinjauan ini kerap tidak membedakan apakah entitas politik populis itu berhaluan kiri atau kanan. Dalam kasus-

kasus populisme politik di negara-negara Eropa, mereka bisa hadir dari spektrum politik yang berbeda-beda, apakah ekstrem kiri atau kanan. Mereka mengedepankan dalih-dalih ideologis dan memandang bahwa apa yang diyakininya sebagai suatu kebenaran politik yang harus mereka perjuangkan kendatipun harus melabrak prinsip-prinsip utama demokrasi dalam suatu masyarakat terbuka. Jadi, pada hakikatnya populisme ideologis sangat cenderung antidemokrasi.

Neo-fascist

Demokrasi populis, dalam pengertian mengemukanya isu-isu populisme politik dalam kontestasi demokrasi, sesungguhnya merupakan konsekuensi logis semata. Demokrasi, bagaimanapun, menyisakan ruang bagi anomalinya, justru ketika prinsip 'one man, one vote, one value' sebagai penjelmaan dari prinsip egalitarianisme politik terpraktikkan dalam kontestasi elektoral.

Dalam konteks ini, bahkan sosok seperti Hitler pun dapat terpilih dalam suatu mekanisme kontestasi demokrasi. Sosok-sosok populis yang setelah terpilih dalam kontestasi demokrasi yang ternyata banyak menindas rakyatnya sendiri, juga telah banyak ilustrasinya. Para ilmuwan politik sepakat bahwa demokrasi masih menyisakan ruang bagi hadirnya sosok neo-fascist. Fenomena ini dipandang sebagai kelemahan yang melakat. Manakala daya kritis masyarakat kalah dengan perekayasaan populisme politik yang membungkus rapi sosok yang neo-fascist, yang akan terpilih tak lain sosok semacam itu.

Meski demikian, populisme juga tidak mesti menampilkan ilustrasi sosok neo-fascist yang ciri-cirinya telah terasakan sejak awal kehadirannya. Populisme bisa melontarkan sosok yang sejatinya jujur, bersahaja, egaliter, kendatipun belum berpengalaman luas dalam kepemimpinan nasional, tiba-tiba terpilih sebagai pemimpin justru karena popularitasnya yang optimal. Namun, yang bisa berbahaya ialah apabila terjadi pembalikan karakter dari yang sejatinya jujur, bersahaja, egaliter seperti itu, menjadi cepat tersinggung, mudah panik, dan cenderung neo-fascist.

Labirin

Dalam konteks inilah, populisme politik itu seperti labirin yang bisa menjebak siapa pun yang mencoba memanfaatkannya terlampau dalam. Ia akan menjauhkan dari tinjauan dan penyikapan yang objektif terhadap masalah-masalah yang sesungguhnya sederhana dan tidak pelik. Masalahnya akan pelik manakala objektivitas tertutupi oleh kekaburan-kekaburan akibat pertimbangan-pertimbangan subjektif yang sesungguhnya lebih banyak bersifat spekulatif.

Pendekatan deliberatif, dengan membuka diri bagi berbagai kelompok untuk dialog secara imparsial, biasanya cenderung dilakukan secara terlambat ketika masalah krusial semakin pelik. Pola-pola populisme politik kerap kali justru tidak efektif dalam penyelesaian aneka konflik realpolitik. Pemimpin

populis, bagaimanapun, akan banyak dihadapkan pada ujian-ujian kepemimpinan yang justru meminta jawaban dari jiwa kepemimpinannya yang sejati. Karena itu, kata kunci pentingnya ialah objektivikasi, justru agar pemimpin populis tak terperosok terlampau dalam labirin yang diciptakannya sendiri. Apabila hal itu tidak terjadi, yang segara dapat terpotret ialah kemerosotan dalam kepemimpinan sekaligus demokrasi. Hal-hal semacam ini bisa menjadi bahan refleksi bagi fenomena kepemimpinan politik di Indonesia dewasa ini.

Di ranah kontestasi politik tingkat nasional maupun terutama lokal, fenomena populisme politik tampaknya tak terelakkan lagi. Nyaris semua kontestan berlomba-lomba memosisikan diri sebagai sosok-sosok populis, terlepas apakah mereka menyadari manfaat dan mudaratnya bagi masa depan kualitas kepemimpinan politik dan demokrasi. Kemenangan Trump setidaknya membuka pintu bagi kita untuk merefleksikan masalah semacam itu.

M Alfan Alfian, Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional

MEDIA INDONESIA, 19 November 2016

Kawal

Romo Imam mengaku sudah jarang menonton televisi. Ternyata yang ia maksudkan menonton siaran berita televisi, karena menonton bola masih suka. "*Saya betul-betul bosan mendengar ahok-ahok melulu. Apa tak ada berita lain*," alasannya. Saya paham. Ada 101 pilkada yang dilangsungkan Februari nanti, namun berita yang ada selalu sekitar pilkada Jakarta dengan bintangnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Itu yang disebut Romo dengan "*ahok-ahok melulu*".

"*Sekarang status Ahok tersangka sesuai tuntutan massa. Sudah terbukti ada penistaan agama dan organisasi massa yang menuntut Ahok diproses hukum, sudah memuji kepolisian. Mereka kini mengawal proses itu*," kata saya dengan tenang.

Romo menatap saya dengan penuh curiga. "*Mengawal? Ormas-ormas itu mengawal proses hukum? Benar mengawal?*" Romo memberondong saya dengan pertanyaan. Saya jadi terpaku tak bisa berkomentar. Romo menyebutkan: "*Presiden itu mendapat kawalan dari pasukan pengaman presiden. Tak mungkin ada orang yang tak punya kepentingan apa-apa nyelonong dekat presiden. Kalau presiden menerima tamu, pengawal menjaga di luar ruangan. Pengawal ini tak peduli apa yang dibicarakan presiden dengan tamunya dan tak ingin tahu apa hasil pembicaraan. Apalagi ikut nimbrung. Itu namanya mengawal*."

Saya masih diam. "*Paham apa yang saya maksud*?" tanya Romo. Kali ini pun saya cuma mengangguk tanpa kata, kelihatan beliau agak kesal, entah kenapa. Romo nyerocos: "*Pengawal itu tak punya target apa-apa selain keselamatan presiden dari intervensi pihak luar. Saya agak meragukan kalau ormas yang mengawal kasus Ahok ini benar-benar mengawal sebagaimana lazimnya. Saya kira mereka punya target tentang proses yang disidik kepolisian. Misalnya Ahok ditahan, diadili, kemudian dipenjara. Kalau hasilnya beda dengan apa yang ditargetkan, saya kira mereka akan bereaksi. Jadi itu bukan pengawalan, tetapi pemaksaan*."

Waduh, ini soal serius. Saya harus hati-hati karena kasus Ahok ini masalah penistaan agama. Saya termasuk yang menyayangkan Ahok, kenapa dia ringan saja menyebut-nyebut agama yang bukan dipeluknya. Soal ada penistaan saya tak bisa komentar, itu bukan ranah agama saya, apalagi ada pro dan kontra. Yang jelas saya setuju ada poses hukum dan proses itu menempatkan Ahok sebagai tersangka. Hormat saya kepada polisi dan hormat saya juga kepada para ormas yang mendukung langkah polisi. Semua pihak kini diajak bersama-sama mengawal kasus itu.

"*Bagaimana kalau penyidik tak menemukan bukti kuat adanya penistaan agama, lalu jaksa menolak membawa kasus ini ke pengadilan*?" tanya Romo lagi. Tapi ia tak menunggu reaksi saya dan menambahkan: *"Atau jaksa berhasil membawa kasus ini ke pengadilan, bagaimana kalau hakim membebaskan Ahok? Atau pengadilan negeri menghukum Ahok, namun setelah banding hakim tinggi membebaskannya. Atau hakim banding ikut menghukum Ahok, tapi dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Selama proses hukum itu, misalnya lagi, Ahok menang dalam*

pilkada. Apakah dijamin tak ada ribut-ribut, tak ada protes? Kalau betul sebagai pengawal, seharusnya apa pun hasil proses hukum harus dihormati. Kalau tidak dihormati itu namanya pemaksaan, justru pengawal itu yang intervensi."

Tiba-tiba Romo tertawa. "*Saya cuma memberi contoh yang ekstrem, jangan terlalu serius ditanggapi*," kata dia. "*Saya percaya para ulama itu orang-orang bijak. Sepanjang proses hukum berjalan dengan benar, apa pun hasilnya beliau pasti menghormatinya. Semoga damai negeri ini*."

Saya tersenyum dan mengamini dalam hati.

Putu Setia, Pengarang; Wartawan Senior TEMPO

TEMPO.CO, 19 November 2016

Efek SARA dalam Pilkada DKI Jakarta

PENETAPAN Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka dalam kasus penodaan agama menjadi babak baru dalam pertarungan pilkada DKI Jakarta. Banyak pengamat yang memprediksi elektabilitas Ahok bakal tersungkur. Bahkan ada lembaga survei yang merilis temuannya bahwa dukungan kepada Ahok-Djarot melorot menjadi 10,6% pascapenetapan status tersangka. Benarkah demikian? Untuk menjawab pertanyaan krusial ini, diperlukan survei sistematik yang memotret efek status Ahok sebagai tersangka terhadap pilihan warga. Kita tak cukup mendasarkan diri pada <>common sense para pengamat dan tim sukses. Sebagian komentator di media mudah sekali memberikan 'analisis' dan 'prediksi' seolah-olah elektabilitas Ahok dengan serta merta bakal hancur.

Sebaliknya, tim sukses Ahok-Djarot dengan ringan menyatakan bahwa penetapan status tersangka justru memicu efek melodramatik karena menempatkan Ahok sebagai pihak yang teraniaya sehingga malah menaikkan tingkat keterpilihannya. Kedua belah kubu sama-sama mendasarkan pada harapan atau perasaan, bukan fakta.

Politik survei

Survei yang dilakukan dengan metodologi dan kaidah yang benar menjadi jawaban. Pada umumnya survei-survei yang dilakukan di DKI Jakarta menghadapi problem response rate. Sebagian besar warga yang tinggal di kawasan elite, berpendidikan, dan berpendapatan tinggi enggan diwawancarai. Sebagian lembaga survei mengganti mereka yang tidak bersedia diwawancarai dengan responden yang berbeda jauh karakteristik sosial ekonominya.

Masalah non-response ini menjadi salah satu penyebab kegagalan banyak lembaga survei pada Pilkada DKI Jakarta pada 2012. Kalangan menengah ke atas pada saat itu cenderung memilih pasangan Jokowi-Ahok. Padahal, representasi warga dari kalangan tersebut tidak terwakili dalam sampel. Selain itu, etnik Tionghoa, nonmuslim, dan kelompok usia muda biasanya juga sulit diwawancarai. Akibatnya, banyak lembaga survei yang salah prediksi! Demikian halnya dengan Pilkada DKI Jakarta saat ini. Survei dengan sampel yang tidak representatif sulit diharapkan dapat memotret preferensi pemilih. Survei bukan sensus, tapi ia mengandalkan sampel yang terbatas untuk memprediksi perilaku dan sikap sebuah populasi.

Jika <>non-response tersebut terjadi sistematik pada kalangan strata ekonomi, etnik, kelompok usia, dan agama tertentu, survei bisa gagal memprediksi perilaku subpopulasi.

Jika kita perhatikan, validasi sampel beberapa lembaga survei yang dirilis ke publik menunjukkan pola yang seragam: over-representative di kalangan pemilih dengan pendapatan dan pendidikan menengah ke bawah, berusia separuh baya atau tua, etnik Betawi, dan beragama Islam.

Sebaliknya, sampel dari strata menengah ke atas, kaum muda, etnik Tionghoa, dan warga nonmuslim umumnya *under-representative*. Sayangnya, ketika dirilis, sebagian lembaga tidak melakukan pembobotan dengan usia, suku, dan agama. Padahal, karakteristik demografi dan sosial ekonomi seperti ini cenderung memiliki preferensi ke pasangan tertentu. Jika ini tidak diantisipasi, kesalahan prediksi lembaga-lembaga survei pada Pilkada DKI Jakarta 2012 bisa kembali terulang.

Redaksi pertanyaan (wording) juga berimplikasi serius terhadap hasil survei. Jika wording yang digunakan tidak netral, tentu akan bias. Sayangnya, banyak media yang tidak kritis terhadap hasil survei yang rilis. Media lebih tertarik pada aspek pacuan elektabilitas (horse race). Beberapa lembaga yang merilis survei hanya menampilkan hasil, tapi tidak menampilkan wording yang digunakan. Media juga menelan mentah-mentah tanpa mempertanyakan penggunaan instrumen surveinya. Parahnya lagi, ada beberapa lembaga yang tidak merilis secara lengkap metodologi dan validasi sampelnya. Jangankan <>wording, urutan pertanyaan (order) juga menentukan hasil. Misalnya, ada lembaga survei yang menempatkan pertanyaan elektabilitas calon setelah sebelumnya mem-framing atau mem-probing responden dengan informasi-informasi bias bahwa Ahok tersangka kasus penistaan agama, tersangkut korupsi Sumber Waras, reklamasi, penggusuran, dan lain-lain.

Pada titik ini, survei berubah fungsi menjadi alat penggiring opini. Survei politik berubah menjadi 'politik survei'. Jangan salahkan orang jika kemudian menuding ada skenario mempermulus kandidat yang diusung dengan menjatuhkan citra lawannya.

Efek primordial

Dalam perilaku pemilih, preferensi pemilih dipengaruhi banyak faktor di antaranya kepuasan terhadap kinerja petahana; kesamaan suku, agama, dan antargolongan (SARA); dan lain-lain. Pada tingkat nasional, efek SARA terhadap pilihan warga sangat minimal dalam pemilu legislatif ataupun presiden (Mujani, Liddle, dan Ambardi, 2012). Hal ini terjadi karena komposisi etnik dan agama tidak seimbang secara nasional. Pemilih muslim dan Jawa terlalu dominan, sedangkan suku-suku lainnya tidak membentuk identitas kolektif yang bersifat tunggal.

Lain cerita di pilkada. Di wilayah-wilayah dengan komposisi etnik dan agama yang lebih heterogen, SARA terbukti memiliki efek elektoral yang signifikan. Terlebih lagi di daerah yang secara sosiologis terbelah seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, efek primordial ini terbukti efektif dalam memengaruhi pilihan. Memang secara sosial masyarakat hidup damai, tapi pada saat pilkada potensi SARA ini dibangkitkan oleh calon ataupun tim sukses yang memilih jalan pintas dengan mengeksploitasi isu-isu seperti ini demi kepentingan jangka pendek.

Di Jakarta, mayoritas pemilih beragama Islam (sekitar 85%). Artinya, tidak mungkin calon gubernur menang tanpa mendapatkan dukungan pemilih

muslim. Namun, komposisi etnik warga Jakarta lebih heterogen. Sebagai mayoritas, pemilih Jawa hanya mencapai 37%, disusul Betawi (28%), dan Sunda (15%) serta puluhan etnik yang proporsinya kecil-kecil.

Pada pilkada di DKI Jakarta 2007 dan 2012, agama tidak menjadi prediktor dalam menentukan pilihan, tapi variabel etnik selalu punya dampak elektoral. Namun, koefisien dari efek etnik ini lebih kecil dari variabel kinerja petahana. Seberapa positif kinerja petahana di mata publik ini selalu konsisten dan kuat menjelaskan elektabilitas calon. Dengan kata lain, warga Jakarta pada pilkada-pilkada sebelumnya lebih mengedepankan basis rasional dalam menentukan pilihan. Faktor sosial-ekonomi yang baik membuat efek SARA tak punya dampak besar pada pilkada sebelumnya. Sensus BPS mengatakan mayoritas warga Jakarta berpendidikan SMA ke atas (52,7%), bahkan penduduk yang mengenyam bangku universitas mencapai 13,5%, jauh dari rata-rata nasional. Tingkat pendapatan mereka juga juga jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain.

Namun, peta politik hari ini menunjukkan pergeseran berarti. Dari rilis survei-survei yang kredibel, kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Ahok sebagai petahana terbilang tinggi (kisaran 70%-75%) meski pada saat ia tersangkut kasus penodaan agama sekalipun. Warga juga mengapresiasi kinerja petahana dalam mengatasi banjir. Kinerja gubernur dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sarana serta prasarana lainnya juga positif. Meski masih belum puas dalam mengatasi kemacetan, warga melihat usaha konkret pemerintah provinsi dalam membangun sarana transportasi massal.

Namun, tingginya *approval rating* tersebut tidak berbanding lurus dengan elektabilitas Ahok. Variabel etnik dan agama kini jadi *significant predictor* dalam menjelaskan perilaku pemilih Jakarta. Variabel ini bersifat independen dari faktor-faktor lainnya, termasuk terlepas dari apakah mereka puas atau tidak puas terhadap kinerja Ahok. Faktor primordial ini juga independen, terlepas apakah mereka berpendidikan tinggi atau tidak. Hal ini menjadi bukti bahwa 'kepala' dan 'hati' warga terbelah. Mereka mengakui kinerja petahana baik, tapi hati mereka sulit menerima Ahok.

Terlebih lagi, terpelesetnya Ahok dalam insiden Al-Maidah membuat isu primordial yang sebelumnya mengendap menjadi muncul ke permukaan. Belum lagi efek mobilisasi dan pemberitaan media yang memunculkan tekanan kuat sehingga efek primordial yang dulu pengaruhnya kecil sekarang membesar. Pernyataan Ahok tersebut memang secara politik dan elektoral salah, terbukti dengan tren penurunan elektabilitasnya yang bersamaan dengan kasus Al-Maidah.

Menariknya, penurunan elektabilitas Ahok diikuti oleh membesarnya proporsi pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters). Resistensi yang kuat terhadap Ahok, sebagaimana terlihat dalam aksi besar-besaran pada 4/11 serta penetapan Ahok sebagai tersangka, bisa membuat sebagian yang awalnya mendukung Ahok memilih untuk menyembunyikan pilihannya. Satu hal yang perlu dicatat, Ahok ditetapkan sebagai tersangka

bukan dalam kasus korupsi. Kasus yang melilit Ahok juga sarat kontroversi dan interpretasi. Meski saat ini tren penurunan elektabilitas Ahok masih terjadi, masih ada waktu bagi Ahok untuk *rebound*.

Dampak negatif dari polemik ini ialah isu-isu teknokratik dan rasional tenggelam oleh riuh rendah primordialisme. Kritik konstruktif dari akademisi dan para aktivis dalam kasus reklamasi dan penggusuran tak lagi mendapat atensi karena orang sibuk bertengkar soal layak tidaknya Ahok disebut sebagai penoda agama atau tidak.

Warga Jakarta kehilangan kesempatan berharga untuk menguji dan meminta pertanggungjawaban Ahok sebagai petahana, dan menuntut tawaran program dari pasangan Anies-Sandi dan Agus-Silvy. Kasus ini juga sudah mengarah pada situasi yang membahayakan kebinekaan kita. Sudah saatnya kita menggeser dari perdebatan primordial yang tak produktif ke ajang pertarungan gagasan menjadikan Jakarta sebagai role model ke depan.

Burhanuddin Mutahdi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia

MEDIA INDONESIA, 21 November 2016

Demokrasi Manusia di Pilkada

DALAM teori birokrasi rasional Weberian, birokrasi tidak memandang pengguna layanan publik sebagai manusia, tetapi sebagai kasus. Tak peduli warganya miskin-kaya, melek-buta huruf, pejabat-rakyat biasa, semuanya sama di mata birokrasi. Padahal, tiap status tadi jelas mencerminkan kemampuan berbeda dalam mengakses informasi dan layanan. Ada warga miskin yang apatis dengan bantuan raskin, bukan karena gengsi, tapi karena tak punya informasi cukup terkait layanan tersebut. Empati dan kemanusiaan luput dijadikan pertimbangan oleh Weber agar birokrasi bisa menunjukkan keadilannya.

Dalam politik kurang lebih sama. Nilai sensitivitas sosial, afirmatif, kadang dicuaikan saking bakunya prosedur. Di pilkada, rakyat digiring menuju kotak suara untuk mencoblos si A, bukan karena kesadaran konstruktifnya, tapi karena instrumen politik yang memerintah dia. Yang luput disadari, tiap rakyat pemilih datang dari lanskap sosial berbeda. Ada yang punya limpahan akses informasi, ada yang minim. Ada yang berpendidikan tinggi, ada pula berpendidikan rendah, dst. Masing-masing tentu punya kemampuan berbeda untuk mengakses informasi soal dan atau mempertimbangkan calon pemimpinnya.

Dipelihara

Ketimpangan tersebut sengaja dipelihara oleh struktur kekuasaan agar calon tertentu diuntungkan. Menurut David Reybrouck, seorang penulis kelahiran Bruges, Belgia, dalam *Why Election Are Bad for Democracy* (2016), pola tersebut mungkin tidak mematikan demokrasi seketika, namun yang jelas mengulur kematian demokrasi. Ia juga menegaskan, pemilu (pilkada) bukan soal voting saja, tetapi juga sensibilitas sosial terkait pentingnya akses dan partisipasi warga pemilih. Karenanya, jika ada calon pemimpin yang mempersetankan hak prinsipil demokrasi rakyat demi kursi kekuasaan lima tahun di pilkada, ia sama saja ikut menahan laju demokrasi.

Pilkada serentak gelombang kedua akan dilaksanakan 15 Februari 2017, diikuti 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Idealnya, ini saatnya calon pemimpin dikuliti dari segi prestasi, integritas, dan kapabilitas. Namun, tak semua masyarakat memiliki preferensi cukup terhadap pemimpinnya. Akibatnya akan mudah sekali mereka dibodohi, kemungkinan memilih calon si A karena dibayar uang Rp 50 ribu atau karena polesan populis sesaatnya seperti rajin muncul dalam hajatan sosial warga supaya dianggap rendah hati.

Berapa persen sih warga yang melek berita, medsos, sehingga bisa mengumpulkan informasi tentang calon pemimpinnya. Kalaupun misalnya banyak, belum jadi jaminan mereka bisa bersikap sebagai pemilih cerdas atau kritis, sebab "*tim-tim sukses*" dengan akun palsu di medsos sudah memborong propaganda liar yang kadang terlihat sok bela-belain "*jagoannya*" dengan kata-kata tak etis, kasar. Diperparah dengan kontestasi yang minim gagasan.

Misalnya, calon pemimpin harus memaparkan secara detail apa program yang akan ia jual ke rakyat. Apa target yang dicapainya dalam setahun kepemimpinan dan bagaimana strategi untuk mencapainya. Lalu, apakah rencana capaian definitif itu masuk akal, atau sebaliknya, meminjam judul lagu MLTR, out of the blue?, dan lain sebagainya.

Persaingan politik minim gagasan tanpa disadari mendorong calon pemimpin berpikir konatif, seperti memobilisasi pilihan rakyat dengan embel-embel SARA. Untuk masyarakat yang belum terbuka, pola sempit tersebut cukup ampuh menjinakkan pemilih karena menghunjam wilayah paling sensitif. Hanya sosok atau individu kritis yang searif mungkin memilah dan mampu membuang isu-isu sampah tersebut dari ruang demokrasi.

Kritik perlu

Kritik dan kontrol itu sangat berfaedah dalam demokrasi. Jika tidak, Presiden Jokowi misalnya tak perlu rutin mengundang wartawan ke istana untuk berdiskusi banyak soal program dan realisasi targetnya. Demokrasi itu mendengarkan! Dengar saja… toh kritik itu cara paling praktis untuk mengontrol perubahan.

Di Purwakarta, Bupati Dedy Mulyadi selalu menjadi sumber berita karena terobosannya. Terakhir ia baru saja memangkas birokrasi dalam hal penyederhanaan aturan pembuatan KTP. Sekarang warga tidak butuh surat pengantar dari RT/RW lagi untuk mengurus KTP, tetapi langsung mengurusnya di dispenduk. Mungkin bagi sebagian pemimpin, ini sederhana, tapi implikasinya bagi pelayanan publik sarat faedah.

Di Kabupaten Batang, ada bupati muda, Yoyok Sudibyo, yang dijuluki guru transparansi karena di daerahnya selalu diadakan festival anggaran, di mana tiap dinas/instansi memaparkan secara terbuka anggaran pembangunannya disertai realisasi, yang bisa diakses oleh seluruh warga. Kini ia diprotes warganya, sampai-sampai mengancam menduduki rumah jabatannya. Pasalnya, Yoyok tak mau lagi maju untuk bupati periode kedua, sehingga rakyat marah. Selama kepemimpinannya, Yoyok bukannya sepi dari kritik warga, apalagi ia sama sekali tak punya pengalaman birokrasi. Namun, kritik itulah yang memecutnya untuk sensitif terhadap kepentingan rakyat.

Rakyat harus cerdas memilih pemimpinnya. Tak memakai emosi, apalagi pragmatis. Selama ini demokrasi lebih berbasis ”*kasus*” ketimbang ”manusia”. Demokrasi kita hanya menghitung barisan rakyat yang hadir di kotak suara, tetapi gagal mendalami sisi manusianya dengan memberikan ruang dan memaksa parpol, LSM, perguruan tinggi, tokoh agama untuk mengadvokasi rakyat pemilih agar memilih pemimpin yang tepat.

Umbu TW Pariangu, Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT

JAWA POS, 21 November 2016

Dilarang Kapok Menjadi Indonesia

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi lambang negara—berbeda-beda, tapi tetap satu—bukan retorika para pendiri negara, melainkan menukik lebih dalam ke akar sejarah Nusantara. Adalah Empu Tantular, sekitar 700 tahun yang lalu, menggguratkan sesanti ”*Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa*, beraneka ragam itu satu, tiada kebenaran ganda”, dalam karyanya, Sutasoma. Kalimat tersebut menjadi mantra ampuh bangsa Indonesia dalam upaya memintal ikatan tali keragaman dalam persatuan dan kesatuan menjadi bangsa. Proses menjadi nasion, menurut Bung Hatta, karena rakyat Indonesia mempunyai keinsafan dan merasakan persamaan nasib, tujuan, serta kebersamaan yang tertanam di hati dan otak.

Kesadaran bangsa Indonesia sebagai masyarakat multikultur mempunyai basis dan modal sosial yang kokoh. Hal itu dapat dibuktikan dalam proses membentuk negara. Para pendiri bangsa tidak mengikatkan lebih dulu kepada doktrin atau ideologi tertentu, tetapi terlebih dahulu menggali nilai-nilai luhur bangsa yang dapat menjadi basis ideologi bersama. Pengelolaan kekuasaan berlandaskan cita-cita bersama sekaligus menyadari sepenuhnya realitas heterogenitas bangsa. Hal itu berbeda, misalnya dengan negara-negara yang memaksakan ideologi atau doktrin tertentu serta mengabaikan nilai-nilai bangsa itu sendiri dalam membentuk struktur politik.

Berbekal semangat tersebut, perjuangan bangsa Indonesia merawat ke-bhinneka tunggal ika-an sudah sampai pada tataran kemampuan mewujudkan entitas politik tanpa menyeragamkan kultur, menjadi inklusif tanpa terperosok dalam perilaku asimilasionis. Meskipun menjunjung tinggi kemajemukan, tetapi sekaligus menghargai dan memuliakan identitas bersama sebagai suatu bangsa Indonesia.

Namun, sayangnya setidak-tidaknya sejak Pilpres 2014, terlebih dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, simtom-simtom pembelahan bangsa mulai menguat, terutama dipicu ujaran kebencian bernuansa sentimen primordial yang diartikulasikan melalui media sosial (medsos). Wacana publik bukan hanya menjadi tidak juntrung, bahkan berpotensi merusak tatanan kehidupan yang beradab. Medsos menjadi ajang festival *orgi bigotri* (bigotry) yang mengumbar kebencian primordialistik. Ingar bingar kebencian akan membunuh rasa persaudaraan serta akan menggiring demokrasi tersesat ke rute anarki sosial.

Gelombang umpatan kesumat tersebut kalau dibiarkan akan mengakibatkan praktik berdemokrasi menggerogoti keindonesiaan. Karena arena politik bukan lagi menjadi ranah kompetisi yang sehat, melainkan menjadi ajang saling menaklukkan. Politik penaklukan mempunyai potensi sangat besar memorakporandakan upaya meningkatkan sensitivitas ”rasa-merasa” dalam membangsa menjadi Indonesia yang bineka, tetapi eka. Sensitivitas saling rasa-merasa sebagai bangsa dapat tenggelam oleh gelora kebencian bernuansa sentimen primordial. Sensitivitas saling merasakan sebagai bangsa Indonesia semakin menipis.

Padahal masyarakat multikultural merupakan berkah serta dapat menghasilkan kekuatan yang dahsyat untuk mewujudkan Indonesia menjadi bangsa yang besar apabila dilakukan secara kreatif dan konstruktif. Sebab, keragaman merupakan kombinasi tiga perspektif yang saling melengkapi: identitas (keterlekatan) kultural manusia, hasrat untuk mengenal keanekaragaman budaya sesama warga, serta kemajemukan internal tiap kebudayaan. Semua dimensi tersebut merupakan senjata ampuh mewujudkan kehidupan bersama yang beradab.

Mengingat magnitudo sebaran keragaman bangsa sangat besar, lebih kurang seribu suku; puluhan ribu bahasa lokal; serta berbagai agama dan kepercayaan warisan kebudayaan yang berasal dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam; agenda menjadi Indonesia harus menjadi komitmen seluruh elemen bangsa. Oleh sebab itu, tekad pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melakukan revolusi mental dalam membangun karakter bangsa harus dilakukan secara besar-besaran dan disertai paradigma yang jelas, agenda yang terjadwal, program yang cermat dan rinci, serta pengawasan yang ketat. Tidak boleh hanya berhenti pada titik retorika atau sekadar dijadikan proyek menghabiskan anggaran belanja negara.

Agenda raksasa ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh negara sendirian. Masyarakat sipil, kalangan ulama, masyarakat kelas menengah, pelaku usaha, pokoknya seluruh komponen bangsa harus terlibat dalam gerakan kebangsaan. Kekuatan bersama ini harus membangkitkan rasa-merasa menjadi Indonesia dengan menciptakan iklim yang sehat dan jeli memanfaatkan momentum, misalnya peringatan-peringatan hari besar nasional, dan lain-lain, sebaiknya dimanfaatkan untuk menggelorakan gerakan ini. Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden, sebagai tokoh sentral dan simbol negara, perlu rajin bersilaturahim dengan berbagai kalangan masyarakat, ulama, pemimpin, serta tokoh masyarakat di pusat dan daerah.

Dengan gerakan besar-besaran, diharapkan secara pelan-pelan masyarakat mulai merasakan pertama-tama ”aku” adalah bangsa Indonesia yang ditakdirkan lahir sebagai suku atau ras tertentu serta memeluk agama tertentu pula. Selain itu, kompetisi politik dilakukan dengan semangat saling rasa-merasakan sebagai warga negara Indonesia yang bertekad bersatu padu mewujudkan kebahagiaan.

Menjadi bangsa Indonesia bukan kebetulan, melainkan upaya keras para pendiri negara yang menyadari Indonesia adalah bangsa yang beragam, tetapi harus bersatu dalam mewujudkan cita-cita bersama. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa Indonesia dilarang keras kapok menjadikan Indonesia yang beragam, tetapi tetap bersatu padu menuju kebahagiaan bersama.

J Kristiadi, Peneliti Senior CSIS

KOMPAS, 22 November 2016

Siapa Bilang Agama Tak Perlu Dibela?

Mobil itu mengerem mendadak, lima meter di sebelah kiri saya. Saya tratapan kaget. Kagetnya sekilo, malunya sekuintal. Malu, karena merasa tidak beradab, tidak terpelajar, dan lebih-lebih lagi karena kami membawa visualisasi identitas kami sebagai muslim.

Siang itu saya bersama anak-istri sedang berjalan-jalan di daerah Fremantle. Tiba di satu lampu merah, kami berhenti sebentar. Sebentar saja, sebab meski lampu penyeberangan pejalan kali belum menyala hijau, toh tak ada kendaraan berjalan ke arah kami. Saya pun mengajak pasukan untuk cuek saja nyelonong, sebagaimana biasa saya lakukan. Toh orang-orang bule lokal di Perth pun melakukannya, begitu pikir saya.

Hingga tiba-tiba mobil itu mendadak muncul entah dari mana, dan mengerem tiba-tiba. Meski pengemudinya memasang wajah datar penuh permakluman dan tidak membunyikan klakson panjang tanda amarah, tetap saja belasan pasang mata menatap kami. Mereka tampak sebal campur jijik. Dasar imigran. Dasar Asia. Dasar muslim.

Tentu saja umpatan-umpatan itu cuma imajinasi buruk saya sendiri. Tapi ya bagaimana lagi. Toh istri saya berjilbab. Sementara sudah pasti mereka paham bahwa perempuan berjilbab pastilah muslim.

Sejak hari itu saya kapok. Terutama jika sedang bersama istri, ibu, atau siapa pun teman atau saudara yang berjilbab alias membawa identitas keislaman, nggak lagi-lagi deh saya melanggar peraturan sekecil apa pun di tanah ini. Ini perkara *branding*. Ini perkara membela Islam. Jangan ketawa dulu, ini serius.

Sejak 2013 hingga insyaallah tahun depan, kami sekeluarga tinggal sementara di Perth, Australia Barat. Selama di sini pula kami merasakan langsung bagaimana situasi psikologis menjadi minoritas. Populasi umat muslim di negara bagian Australia Barat cuma 1,7%, dan kami menjadi bagian darinya. Memang benar, ini negara aman. Secara umum tak ada diskriminasi secara telanjang kepada minoritas. Namun suasana tegang dan sangat tidak nyaman selalu kami rasakan tiap kali muncul kejadian-kejadian buruk yang melibatkan umat Islam di belahan dunia mana pun.

Mau yang mana, silakan sebut saja. Mulai 911, Sydney Siege, Bom Bali I dan II, aksi-aksi brutal Taliban di Afghanistan, dan entah mana lagi. Semua memunculkan efek negatif hingga ke umat muslim Australia.

Efek negatif itu bermacam-macam. Mulai dari diumpati di jalan, dilempari tomat, ditarik-paksa jilbabnya, diancam siraman air keras, hingga diteror dengan bom. Benar, Ramadan lalu, di Masjid Thornlie sekitar 20 km dari tempat tinggal saya, beberapa mobil dirusak, dan tulisan-tulisan bernada kebencian kepada Islam dicoretkan. Peristiwa itu melengkapi kisah sebelumnya, ketika sebongkah kepala babi ditaruh di toilet musala University of Western Australia.

Itu baru aksi-aksi yang dilakukan orang tak dikenal. Belum lagi suasana dalam kehidupan sosial. Saya ingat, betapa sangat tidak mengenakkannya tatapan teman-teman saya sesama sopir pada suatu pagi, ketika malam sebelumnya tersebar berita tentara Taliban membantai 132 anak sekolah di Peshawar. Demikianlah situasi kami di sini. Saya tahu, itu tandanya marwah agama harus dibela. Dengan cara apa?

Logika linier gampangan akan mengatakan bahwa yang namanya pembelaan harus ditempuh dengan hantaman balasan. Entah dengan melakukan tindakan setimpal kepada "lawan" yang telah menghina kita, entah dengan jalur hukum, atau bisa juga dengan sikap-sikap defensif lainnya. Tapi "*hukum pasar*" yang berlaku di zaman ini membuktikan bahwa pembelaan dengan cara demikian lebih sering kontraproduktif. Cara-cara begitu justru kerap gagal memenuhi tujuan semula.

Maka, jangan salahkan saya jika saya terpesona kepada para lelaki berkaus hijau yang foto mereka melintas di dinding Facebook saya. Bapak-bapak itu adalah anggota Relawan Pembersih Masjid (RPM) At-Taqwa, Samarinda. Mereka sedang membantu membereskan dan memperbaiki Gereja Oikumene, pada bekas ledakan bom molotov yang menghajar gereja itu, sekaligus memakan korban mengenaskan seorang balita mungil bernama Intan Olivia.

Setelah meniupkan segenap doa kemuliaan bagi bapak-bapak baik hati tersebut, ingin rasanya saya mengirimkan selembar panji kepada mereka, dengan tulisan besar-besar: Front Pembela Islam. Ya, benar. Bagi saya, bapak-bapak di Samarinda itu jauh lebih layak menyandang predikat sebagai pembela Islam.

Kita tahu, Islam telah dinista oleh seorang tak waras yang membawa simbol Islam dan melakukan tindakan yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Menyerang tempat ibadah, dan membunuh seorang anak kecil tak berdosa. Ini jelas penistaan. Malangnya, entah sindrom apa yang sedang mewabah di tengah kita. Memang sih, ada banyak muslim menunjukkan duka mendalam atas jatuhnya korban seorang balita tiada berdosa. Namun, menyambut ekspresi kesedihan massal demikian, tak sedikit orang yang selama ini mencitrakan diri sebagai para aktivis Islam malah justru menampilkan sikap-sikap defensif.

"Ini cuma pengalihan isu!"; "Ucapan duka kalian itu sok toleran saja! Di mana kalian waktu muslim Rohingya dibantai?"; "Jangan ajari kami toleransi! Kalau kami tidak toleran, sudah sejak lama kalian kami usir dari negeri ini!"

Saya tahu pasti, mereka cuma segelintir saja. Namun sebagaimana hukum rimba di belantara media, yang galaklah yang menguasai panggung.

Hingga kemudian bapak-bapak berkaos hijau itu muncul. Dan saya jadi tahu, setelah Haji Bambang yang beraksi di Kuta Legian pada momen tragis Bom Bali I, bapak-bapak RPM At-Taqwa adalah prototype pembela Islam

sejati di era Milenium. Langkah bapak-bapak berkaos hijau itu adalah contoh asyik bagi siapa saja. Tak cuma muslim. Tragedi beruntun yang terjadi di Burma hari-hari ini, pun saya kira bisa menjadi ajang pembuktian diri bagi teman-teman Buddhis di Indonesia.

Saya tahu, problem di sana tidak sesimpel kelihatannya. Ada problem perbatasan, ada mungkin isu ketidakloyalan kepada negara, dan sebagainya. Namun naif pula jika melihatnya steril dari wilayah agama. Sebab toh Ashin Wirathu, bhiksu kondang di negeri itu, jelas-jelas menyebarkan ujaran-ujaran kebencian kepada minoritas muslim. Sampai-sampai Majalah Time pernah membuat liputan khusus tentang dirinya, memajang wajahnya di sampul depan, dan memberinya judul besar-besar: The Face of Buddhist Terror.

Maka inilah saatnya segenap umat Buddhis di banyak belahan dunia lainnya, termasuk di Indonesia, membela marwah keyakinannya. Dengan apa? Dengan pernyataan-pernyataan yang menegaskan bahwa mereka tak sama dengan Ashin Wirathu. Dengan bersikap sebagaimana bapak-bapak Masjid At-Taqwa membantu menata lagi Gereja Oikumene Samarinda. Dengan berbuat layaknya Haji Bambang di Kuta Legian yang mengevakuasi mayat-mayat korban kelakuan "saudara seiman"nya.

Dalam cara yang jauh lebih remeh, ya minimal seperti kami di Australia yang berusaha sebisa-bisanya tampil sebagai masyarakat beradab dan terhormat. Sebab kita membawa identitas kita, sehingga apa pun yang kita lakukan di satu tempat, akan membawa dampak positif maupun negatif bagi saudara-saudara kita seiman di belahan bumi lainnya.

Iqbal Aji Daryono, Praktisi Media Sosial

DETIKNEWS, 22 November 2016

Survei Pilkada DKI: Memperebutkan Pemilih Bimbang

Suara para pemilih yang belum menentukan pilihan (*undecided voters*) dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 berpotensi diperebutkan kandidat gubernur dan wakil gubernur. Relatif kecilnya selisih elektabilitas para kandidat terekam di tengah loyalitas setiap pemilih terhadap pasangan calon dan menguatnya identitas sosial berbasis primordialitas.

Berdasarkan hasil Survei Pra Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan Litbang Kompas 7-15 Desember 2016, angka pemilih yang belum menentukan pilihan atau masih bimbang (*undecided voters*) sebesar 10,4 persen. Secara proporsi, angka tersebut kecil ketimbang responden yang sudah menentukan pilihan calon kepala daerah Jakarta, yaitu 89,6 persen. Meski demikian, proporsi kecil ini menarik ditelisik mengingat rentang elektabilitas dan popularitas antarcalon tidak terpaut jauh. Hingga saat ini, tidak ada satu pun pasangan calon memiliki tingkat elektabilitas yang memadai (di atas 50 persen) sebagai syarat memenangi Pilkada DKI Jakarta.

Dari hasil survei tersebut terungkap profil undecided voters pada Pilkada DKI kali ini. Dari segi usia, undecided voters terbesar berada pada rentang usia 35-50 tahun, yaitu sebesar 38,6 persen. Dari aspek pendidikan, mereka terkonsentrasi pada berpendidikan SMA (59 persen).

Secara sosial, proporsi terbesar undecided voters di Jakarta berasal dari suku Jawa dan beragama Islam (39,8 persen responden). Sementara dari aspek tempat tinggal, dua dari tiga undecided voters berasal dari perkampungan.

Untuk responden pemilih partai-partai pengusung Agus-Sylvi tercatat 9,4 persen belum menentukan pilihan. Sementara responden pemilih partai pengusung Basuki-Djarot ada 5,9 persen belum menunjukkan calon gubernur pilihan, dan dari pemilih partai pengusung Anies-Sandi ada 6,4 persen responden belum menentukan pilihan.

Hasil survei mengungkapkan tiga motif utama yang mendasari sikap politik para *undecided voters* ini. Motif tersebut mencerminkan potensi mereka untuk memilih salah satu kandidat pada saat pilkada nanti.

Motif pertama adalah pesimisme terhadap para kandidat yang bertarung dalam Pilkada Jakarta sekarang. Para responden yang pesimistis ini pada dasarnya menyatakan tidak peduli dengan pilkada ini dan menilai, ketiga pasangan calon kali ini semuanya pembohong. Sebanyak 34,1 persen responden mengungkapkan keraguan mereka terhadap tiga pasang calon sebagai landasan keengganan mereka untuk menyatakan secara tegas pilihan calon kepala daerah.

Motif kedua adalah memanfaatkan waktu untuk mencerna atau internalisasi program dan janji-janji kampanye yang diucapkan oleh para calon. Seperempat bagian responden mengungkapkan belum memilih calon mereka karena masih memerlukan waktu untuk menyamakan aspirasi mereka

dengan visi-misi para calon gubernur dan wakil gubernur tersebut. Karena itu, mereka baru akan menentukan pilihan setelah masa kampanye usai.

Adapun *motif ketiga* adalah semata merahasiakan pilihan sampai hari pilkada. Responden yang menjawab akan menentukan pilihan mereka mendekati hari pencoblosan sebanyak 41,5 persen.

Politik aliran

Selain fenomena undecided voters, survei kepemimpinan DKI Jakarta juga merekam naiknya kembali pilihan politik berdasarkan basis primordial agama atau sering disebut "politik aliran". Responden pemilih partai berbasis massa Islam cenderung memilih kepala daerah yang seakidah meskipun aspirasinya berbeda dengan dukungan yang diberikan oleh partai pilihan mereka. Sebaliknya, fenomena demikian tidak terlihat pada responden pemilih partai berbasis massa nasionalis. Pilihan responden lebih dinamis sehingga terlihat lebih cair dalam konstelasi dukungan terhadap ketiga calon kepala daerah. Faktor agama bukan menjadi penentu utama dalam menentukan calon gubernur pilihan mereka.

Jika partai-partai pengusung dipetakan terhadap tiga pasang calon kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, akan menghasilkan dua motif utama, yaitu partai nasionalis plus Islam (partai berbasis massa Islam) dan partai nasionalis murni. Partai kelompok pertama direpresentasikan melalui kandidat pertama, yaitu Agus-Sylvi (Partai Demokrat, PKB, PPP, dan PAN) dan kandidat ketiga Anies-Sandi (Gerindra, PKS). Sementara partai kelompok kedua direpresentasikan melalui kandidat Basuki-Djarot (PDI-P, Golkar, Nasdem, dan Hanura). Dari konfigurasi tersebut, survei ini mengungkapkan tingkat konsistensi responden memilih calon gubernur berdasarkan pilihan partai. Responden yang tergabung dalam partai koalisi pengusung Agus-Sylvi terlihat paling konsisten dalam memilih calon gubernur, yaitu 61,3 persen.

Konsistensi ini tetap kuat ketika pilihan partai politik responden diurai secara individual. Responden pemilih PPP, PKB, dan PAN yang memilih pasangan Agus-Sylvi cenderung tinggi, yaitu berada dalam rentang 45 persen hingga 63 persen. Sementara pemilih Partai Demokrat-motor penggerak koalisi-yang mendukung Agus-Sylvi sebesar 63,7 persen.

Untuk partai koalisi pengusung Basuki-Djarot sedikit lebih cair karena tidak semua responden memilih secara konsisten sesuai dengan dukungan dari partai pilihan mereka. Konsistensi pemilih koalisi partai ini mencapai 56 persen. Artinya, proporsi responden yang memiliki perbedaan aspirasi dengan garis politik partai relatif sama besarnya.

Loyalitas partai

Jika pilihan responden diurai per partai politik akan terlihat spektrum dukungan yang bervariasi. Responden yang paling konsisten (loyal) dalam koalisi ini adalah pemilih PDI-P dan Nasdem. Sebanyak 61,8 persen

responden pemilih PDI-P adalah pemilih Basuki-Djarot. Sementara pemilih Nasdem yang memilih pasangan petahana ini 77,8 persen.

Sebaliknya, responden yang paling cair dalam koalisi ini adalah pemilih Golkar dan Hanura. Tiga dari sepuluh responden pemilih Golkar menyatakan akan memilih Basuki-Djarot. Bagian terbesar dari sisa suara pemilih Golkar ini akan mendukung pasangan Agus-Sylvi (56,1 persen). Sementara pemilih Hanura yang akan memilih Basuki-Djarot sebesar 27,3 persen. Kandidat lain yang berpotensi dipilih oleh pemilih Hanura yang lain adalah Agus-Sylvi (36,4 persen).

Untuk koalisi kandidat Anies-Sandi konsistensinya relatif lebih kecil, yaitu 41,6 persen. Meski demikian, khusus konsistensi pemilih PKS dalam memilih calon gubernur yang menggambarkan kesamaan agama terbilang tinggi sehingga selain memilih Anies-Sandi, responden yang berbeda aspirasi dengan dukungan PKS lebih cenderung untuk memilih Agus-Sylvi.

Pemilih Gerindra terlihat sangat cair dalam memilih calon gubernur mereka. Meskipun 36,1 persen menyatakan memilih pasangan Anies-Sandi, proporsi ini lebih kecil ketimbang sisa suara yang akan memilih calon lain. Sebanyak 43,1 persen responden pemilih Gerindra akan memilih Agus-Sylvi.

Sultani, Litbang KOMPAS

KOMPAS, 22 Desember 2016

Fatwa MUI, Hukum Positif, dan Hukum Aspiratif

Catatan Kamisan saya kali ini kembali didedikasikan untuk merespons isu hukum yang sedang aktual di Tanah Air. Dalam beberapa waktu terakhir, politik hukum kita diwarnai dengan diskusi soal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di antara banyak fatwa yang sudah diterbitkan, dua Fatwa MUI yang lebih menyita perhatian akhir-akhir ini adalah terkait "Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama" tanggal 11 Oktober 2016 tentang videonya di Kepulauan Seribu; dan "Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim" tanggal 14 Desember 2016.

Catatan ini dibuat berdasar kajian hukum tata negara, yang hingga kini masih terus saya pelajari. Agar jelas, perlu ditegaskan, bahwa catatan ini tidak bermaksud untuk memberikan penilaian benar ataupun salah terkait isi fatwa itu sendiri. Karena, untuk menilai isi fatwa itu, tentulah para alim ulama lebih punya kompetensi dan ilmu untuk melakukannya. Sekaligus, saya meminta maaf jika tulisan kali ini dirasa sangat teknis dan mendasar dari sisi ilmu hukum, suatu hal yang saya sengaja, dan memang tidak terhindarkan.

Sebagai pendapat hukum tata negara, mungkin saja kajian ini menguntungkan salah satu kelompok. Yang pasti saya menuliskannya dengan bekal pengetahuan yang saya miliki, dan tidak bermaksud kajian ini menjadi instrumen partisan ataupun alat politik bagi beberapa pihak yang sedang memperdebatkan keberadaan Fatwa MUI tersebut.

Salah satu isu yang mengemuka dengan Fatwa MUI adalah kaitannya dengan hukum positif. Saya memahami hukum positif sebagai hukum yang berlaku saat ini. Maka, hukum positif Indonesia artinya adalah hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Hukum positif di sini mencakup aturan perundangan yang berlaku umum (regelling), ataupun keputusan yang berlaku khusus (beschikking), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparatur negara dan dunia peradilan.

Meski saya berbeda pandangan, ada yang menganggap bahwa makna hukum positif juga mencakup aturan yang pernah berlaku—dan sekarang tidak lagi. Yang pasti, hukum positif bukanlah aturan hukum yang belum berlaku, atau diinginkan berlaku pada masa yang akan datang.

Dalam bahasa Latin hukum positif disebut sebagai ius constitutum yang membedakannya dengan hukum yang dicita-citakan, hukum yang belum berlaku, hukum yang masih diangankan berlaku, atau disebut ius constituendum. Untuk membedakannya dengan hukum positif, saya menyebut hukum yang masih dicita-citakan tersebut sebagai hukum aspiratif.

Sebagai hukum yang berlaku di suatu negara, yang pelaksanaannya dikawal oleh aparatur negara dan dunia peradilan, maka tidak sembarang lembaga dapat menghasilkan hukum positif. Singkatnya, hukum positif hanya dapat dihasilkan oleh organ negara yang memang diberikan kewenangan untuk itu.

Tentang pembentukan peraturan perundangan, hukum positif yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 7 UU tersebut mengatur jenis dan hirarki peraturan perundangan adalah: UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Udang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi atau Kabupaten/Kota. Di luar itu, peraturan perundangan yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh organ negara (contohnya: MPR hingga Bank Indonesia). UU itu juga mengakui regulasi yang diterbitkan oleh anggota kabinet seperti Peraturan Menteri.

Sedangkan untuk badan, lembaga, dan komisi negara lainnya, hanya diakui berwenang membuat hukum positif jika keberadaannya "dibentuk dengan undang-undang, atau Pemerintah atas perintah undang-undang" (Pasal 8 Ayat (1) UU No 12/2011). Atau dengan pemaknaan terbalik alias *a contrario*, maka badan, lembaga dan komisi negara yang tidak dibentuk dengan undang-undang, ataupun dibentuk pemerintah bukan atas perintah undang-undang, tidak punya kewenangan untuk menetapkan hukum positif.

Lalu bagaimana dengan Fatwa MUI? Ada dua hal yang harus dijawab sebelum menentukan apakah Fatwa MUI itu merupakan hukum positif atau bukan. Pertama, bagaimanakah status kelembagaan MUI sendiri? Lalu, kedua, apakah MUI adalah lembaga yang bisa menghasilkan hukum positif?

Pertanyaan pertama lebih sulit untuk dijawab: Apakah status hukum dari MUI? Dibentuk pada tahun 1975, dalam diri MUI ada berbagai sifat badan hukum, seperti ciri lembaga negara, organisasi masyarakat, bahkan ada pula yang berpandangan berciri lembaga swadaya masyarakat. Misalnya, Profesor Tim Lindsey, Direktur CILIS (Center for Indonesian Law, Islam and Society) pada Melbourne University Law School berpendapat bahwa MUI adalah LSM yang juga mempunyai bersifat organ publik negara atau Quasi-Autonomous Non-Governmental Organization (QuANGO).

Sifat MUI sebagai lembaga negara paling kuat terasa pada kewenangannya menerbitkan sertifikasi halal serta menerima dana sertifikasi halal, peran mana akan beralih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, ciri organ negara itu gugur salah satunya karena uang publik yang dikumpulkan tersebut tidak diizinkan diperiksa oleh komisi audit negara, utamanya BPK dan BPKP.

Apapun bentuk badan hukum MUI, pertanyaan kedua lebih mudah untuk dijawab. MUI bukanlah badan, lembaga, komisi negara yang "dibentuk dengan undang-undang, atau Pemerintah atas perintah undang-undang" sebagaimana diatur dalam UU 12/2011.

Memang, MUI disebutkan dalam beberapa Pasal UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, namun itu bukan berarti MUI dibentuk ataupun diperintahkan pembentukannya dengan undang-undang. Karena itu, MUI tidak berwenang mengeluarkan produk yang bisa menjadi hukum positif di Tanah Air.

Konsekuensinya, Fatwa MUI bukanlah hukum positif di Indonesia. Fatwa MUI hanya bisa menjadi hukum positif jika substansinya ditetapkan oleh organ negara yang berwenang untuk menjadi peraturan perundangan sebagaimana diatur jenis dan hirarki dalam UU No 12 Tahun 2011 di atas.

Selama belum ditetapkan sebagai hukum positif, maka Fatwa MUI adalah hukum aspiratif dalam konteks hukum nasional. Karena bukan sebagai hukum positif itu pula, maka secara teori, Fatwa MUI tidak dapat menjadi objek uji materi perundangan di hadapan meja hijau Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, misalnya, kedudukan Fatwa MUI adalah sama dengan pendapat ahli lainnya.

Posisi MUI dengan fatwanya adalah sama dengan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama yang diundang Bareskrim Polri dalam gelar perkara kala itu. Tegasnya, Fatwa MUI dalam gelar perkara itu adalah salah satu pendapat, dari banyak pendapat yang didengarkan oleh Polri, dan bukan hukum positif yang kedudukannya mengikat untuk dilaksanakan aparat penegak hukum. Lebih jauh, karena Fatwa MUI itu hanya pendapat, maka posisinya di hadapan majelis hakim persidangan kasus Ahok adalah salah satu alat bukti surat, yang sama dengan alat bukti lainnya, sekali lagi, bukan hukum positif yang sifatnya mengikat majelis.

Karena bukan hukum positif dan tidak mengikat itu, maka sifat Fatwa MUI tidaklah mempunyai kekuatan hukum memaksa sebagaimana hukum positif pada umumnya. Lebih jauh, apabila dikaitkan dengan hukum pidana, maka Fatwa MUI tidak bisa menjadi instrumen hukum yang menjadi dasar dilakukannya upaya hukum memaksa (seperti sweeping) ataupun menjadi dasar dijatuhkannya sanksi pidana.

Apalagi berdasarkan Pasal 15 UU No 12 Tahun 2011, peraturan perundangan yang dapat mengatur sanksi pidana dibatasi hanya pada dua jenis peraturan, yaitu Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Jadi, jika materi Fatwa MUI itu tidak diadopsi ke dalam bentuk UU ataupun Perda, maka isi fatwa itu merupakan pendapat, yang tidak mengikat secara hukum, tidak dapat diterapkan secara memaksa, apalagi menjadi satu-satunya dasar dijatuhkannya sanksi pidana, misalnya dalam kasus penodaan agama.

Namun, saya tetap ingin memberikan satu catatan, terkait posisi Fatwa MUI sebagai sumber hukum, meskipun sekali lagi bukan hukum positif. Teori dasar pengantar ilmu hukum, selalu memasukkan pendapat (doktrin), termasuk dalam hal ini fatwa para alim ulama di MUI, sebagai salah satu sumber hukum di samping sumber hukum lain seperti peraturan perundangan, putusan peradilan, maupun perjanjian internasional.

Namun, sekali lagi, posisi Fatwa MUI sebagai salah satu sumber hukum, bukan berarti Fatwa MUI adalah hukum positif. Sebagai sumber hukum, kedudukan Fatwa MUI barulah hukum aspiratif yang dapat menjelma menjadi hukum positif jika diundangkan dalam aturan perundangan ataupun diputuskan dalam putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap, dan akhirnya menjadi yurisprudensi.

Satu poin terakhir, sebelum saya mengakhir Catatan Kamisan ini, karena Fatwa MUI bukan hukum positif, dan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa, maka penegakannya tidak boleh menggunakan aparatur negara seperti kepolisian, serta tidak diperkenankan dengan cara-cara yang memaksa seperti sweeping di pusat perbelanjaan dan sejenisnya.

Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, posisi Fatwa MUI adalah sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan moral bagi kelompok yang mempunyai aspirasi untuk melaksanakannya, tetapi tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat atasnya, karena Fatwa MUI bukan hukum positif negara.

Keep on fighting for the better Indonesia.

Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM; Visiting Professor pada Melbourne Law School dan Faculty of Arts, University of Melbourne

KOMPAS.COM, 22 Desember 2016

Pendidikan Politik Pilkada

Pertengahan Februari 2017, bangsa kita akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak di 101 daerah: tujuh provinsi dan sisanya kabupaten dan kota. Ini adalah perhelatan kedua setelah pilkada serentak pertama pada Desember 2015.

Peristiwa politik besar dan terencana seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak semestinya dapat berfungsi sebagai alat pendidikan politik yang efektif bagi bangsa. Ia bisa efektif karena sifatnya yang masif dan dapat merangsang perhatian penuh dari semua lapisan masyarakat. Ia dapat merangsang perhatian penuh masyarakat karena dalam pilkada, hal-hal penting menyangkut kehidupan masyarakat daerah sering dipertaruhkan.

Kekuasaan paling terlihat sebagai soal yang dipertaruhkan. Kadang pertaruhannya antarkelompok elite, antarkelompok masyarakat, atau antarkelompok elite berhadapan dengan kelompok masyarakat. Melalui kekuasaan sumber daya daerah didistribusikan, untuk pembangunan, atau semata untuk melanggengkan pemegang kuasa.

Karena terkait dengan distribusi sumber daya, pilkada jelas menarik perhatian banyak orang. Setiap orang berkeinginan mendapatkan akses kepada sumber daya karena terkait dengan kualitas hidup. Maka apabila pilkada dapat menjadi sarana pendidikan politik, niscaya ia akan lebih efektif. Bukan saja ia dapat menjadi pembelajaran langsung (mengalami), melainkan juga terkait dengan nasib setiap orang.

Selain itu, proses pilkada berlangsung lama, berbilang bulan, bahkan tahun. Menurut undang-undang memang proses resmi pilkada, terutama kampanye, hanya dalam kisaran tiga bulan. Itu pun dapat dikatakan cukup lama. Di luar jadwal kampanye resmi, proses pilkada sebenarnya sudah berlangsung bahkan sebelum pendaftaran calon dimulai. Tentu sayang sekali kalau peristiwa politik yang berlangsung lama dan memakai energi banyak orang ini tidak memiliki makna positif dari segi pendidikan politik.

Namun, berjalan tidaknya pilkada sebagai pendidikan politik bergantung pada bagaimana ia dilaksanakan dan apa yang menjadi isi dalam pelaksanaannya. Apabila ia hanya terjebak pada politik adu kuat perebutan kekuasaan dan sumber daya, aspek pendidikan politik pilkada akan kalah dengan menonjolnya sisi negatif dan pragmatis politik saja.

Pendidikan politik

Konsep dan rincian dari pendidikan politik (political education) hingga kini masih menjadi perdebatan. Belum ada kesepakatan yang bulat. Namun, sebagian besar ahli sepakat dengan tujuan-tujuan umum yang bisa dicapai melalui pendidikan politik (Rothe, 1999). Menurut Rothe, pendidikan politik bertujuan mengembangkan dan memperkuat kesadaran akan nilai-nilai demokrasi. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kehidupan bersama dan bernegara seperti kedaulatan rakyat, musyawarah, aturan main, dan penegakan hukum serta pengawasan.

Pendidikan politik juga bertujuan membangun pemahaman dan kemauan menjalankan tugas mendasar dari politik, yaitu menyelesaikan masalah dan perbedaan secara damai. Pendidikan politik juga bermaksud mempertontonkan kepada khalayak bahwa keputusan yang diambil atas masalah-masalah tersebut—termasuk di dalamnya masalah yang bersifat kontroversial—bersifat mengikat dan menuntut kepatuhan semua pihak.

Tujuan penting lain dari pendidikan politik adalah memperkuat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap masalah-masalah atau isu-isu penting yang terkait dengan kehidupan sehari-hari ataupun masa depan bersama. Tercakup di sini antara lain soal masa depan demokrasi dan ancamannya, hubungan antara ekonomi dan lingkungan, apakah kehidupan masyarakat itu harus didasarkan pada konsumerisme atau tidak, apa saja pengaruh global terhadap kehidupan sehari-hari, dan sebagainya.

Yang tak kalah penting, pendidikan politik dapat membuat orang melihat dan mempelajari keterampilan penting dalam politik. Mencari dan mengolah serta menyebarkan informasi menjadi keterampilan yang wajib dimiliki setiap orang pada era abad ke-21 sekarang ini. Juga kemampuan berhubungan dengan dan memperlakukan berbagai media, baik media reguler maupun media sosial, adalah kebutuhan yang niscaya. Pendidikan politik harus memberikan atau mencontohkan berbagai keterampilan tersebut agar masyarakat dapat maju bersama dalam kehidupan politik sehari-hari dan berbangsa.

Jadi, pendidikan politik semestinya berdampak pada penguatan pemahaman dan keterikatan masyarakat pada nilai-nilai dasar positif yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, ia juga memberikan kesempatan kepada masyarakat dan semua pihak untuk melihat, mengalami, dan memahami berbagai pengambilan keputusan politik, siapa saja yang melakukannya, apa saja kepentingan yang mendasarinya, dan apakah proses dan keputusan tersebut memiliki keabsahan untuk dilaksanakan dan dipatuhi.

Apabila pilkada kita harapkan sebagai salah satu sarana dan momentum pendidikan politik, proses dan isi pilkada harus mencerminkan terakomodasinya berbagai tujuan penting pendidikan politik tersebut. Masalahnya adalah tidak mudah menjadikan peristiwa politik sebagai pendidikan politik, apalagi dengan tujuan ideal seperti diuraikan tersebut.

Realitas pilkada

Adalah naif, misalnya, untuk berharap bahwa peserta pilkada bertujuan memberikan pendidikan politik melalui keikutsertaannya. Yang logis, tujuan utama peserta pilkada adalah merebut atau mempertahankan kekuasaan. Kadang, atau mungkin sering kali, berbagai jalan akan dianggap sah atau disahkan untuk mencapai tujuan kekuasaan tersebut. Terlalu mewah untuk berharap lebih dari mereka.

Peserta pilkada bolehlah disebut sebagai aktor utama pilkada. Merekalah yang terus menjadi sorotan alias pusat perhatian. Dalam kompetisi pilkada,

biasanya mereka membujuk masyarakat dengan menonjolkan dua hal: adu program dan adu rekam jejak atau pengalaman.

Maka masyarakat disodori berbagai tema program, seperti sekolah gratis, pengobatan/kesehatan gratis, pembangunan jalan, pemeliharaan budaya, pengentasan rakyat miskin, pengurangan pengangguran, pemeliharaan keamanan, dan janji untuk selalu melayani. Masalahnya, hampir dapat kita pastikan semua kandidat biasanya menyampaikan hal yang lebih kurang sama. Tentu saja ada pengecualian di sejumlah tempat dan itu tidak banyak.

Ini wajar saja karena biasanya para kandidat yang muncul tidak memiliki perbedaan ideologi dan atau platform kebijakan yang jelas. Karena tidak ada kontras dari segi ideologi dan program, perdebatan substantif sulit muncul. Padahal pendidikan politik justru biasanya akan terjadi apabila perdebatan substantif ini ada.

Dari segi rekam jejak demikian pula adanya. Kebanyakan kandidat berlatar belakang birokrat, pengusaha, politisi, atau militer/polisi. Yang paling banyak dieksplorasi biasanya jika seorang kandidat adalah petahana yang cukup sukses. Ini akan memudahkan seorang kandidat berkata bahwa dia sudah memberi bukti, bukan sekadar janji. Apabila tidak, biasanya belum banyak yang secara kreatif menunjukkan apa hubungan latar belakangnya dengan posisi kepala daerah yang sedang diperebutkan.

Memang, biasanya ada debat kandidat. Namun, hampir dapat dipastikan debat kandidat kepala daerah umumnya tak lebih dari sekadar lomba pidato. Masih jarang kita temui perdebatan substantif tentang kebijakan dan atau personalitas para kandidat dalam proses debat kandidat resmi yang diadakan penyelenggara pilkada. Lagi-lagi, kita harus mengatakan ada sejumlah pengecualian yang jumlahnya tak banyak soal ini.

Melakukan kampanye negatif sebenarnya bisa menjadi pilihan yang bisa berdimensi pendidikan politik. Kampanye negatif adalah upaya untuk menjelaskan kepada publik bahwa kandidat lain memiliki kekurangan, baik dari segi kebijakan maupun kepemimpinan di daerah yang bersangkutan. Ini hal yang baik karena akan memberikan informasi yang lebih lengkap kepada publik. Namun, umumnya kandidat, kecuali di beberapa tempat seperti Jakarta, jarang melakukan ini. Salah satu penyebabnya mungkin khawatir terpeleset menjadi kampanye hitam alias fitnah.

Dengan demikian, tidak terlalu banyak yang bisa kita harapkan dari segi pendidikan politik kalau hanya bertumpu pada kandidat. Orientasi utama mereka bukan pada pendidikan politik, melainkan bagaimana agar kekuasaan dapat dipertahankan atau diraih. Meletakkan pilkada dan pendidikan politik dalam satu kalimat seolah bersifat oxymoron (menyandingkan dua hal yang secara alamiah bertentangan).

Maka, harapan akan pilkada sebagai pendidikan politik harus terpulang kepada masyarakat dan penyelenggara pilkada. Kapasitas dan netralitas penyelenggara pemilu menentukan dalam hal ini. Catatan negatifnya, kita

masih sering mendengar penyelenggara pilkada yang dihukum, terutama secara etik, akibat tidak menjalankan tugasnya sesuai garis yang sudah ditetapkan.

Bagi masyarakat, sesungguhnya apa pun proses dan isinya, pilkada mestinya dapat menjadi sarana pendidikan politik. Namun, ini terpulang kepada tingkat kedewasaan masyarakat kita. Kalau masyarakatnya terlalu pragmatis, misalnya lebih mengharapkan pemberian uang dari kandidat untuk menghargai suara mereka, maka pilkada sebagai pendidikan politik juga tidak akan banyak berjalan. Kalau melihat indikator pendidikan masyarakat kita yang mayoritas (lebih dari 50 persen) masih berpendidikan rendah (SLTP ke bawah), peran aktif masyarakat ini lebih banyak masih berupa harapan daripada kenyataan.

Akhirnya, harapan yang masih ada tinggal di pundak para aktivis yang tercerahkan, para jurnalis yang independen, dan organisasi masyarakat sipil yang peduli.

Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC;

KOMPAS, 23 November 2016

Demokrasi Kerumunan

Apa yang kita bisa tarik sebagai pelajaran dalam perkembangan demokrasi kita dari peristiwa politik yang telah berlangsung belakangan ini, terutama demonstrasi masif di Jakarta pada 4 November dan pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 9 September lalu? Tentu saja mengenai kematangan dalam berdemokrasi. Suka atau tidak suka dengan Donald Trump yang telah terpilih, pesaingnya, Hillary Clinton, segera mengakui kekalahan dan memberi ucapan selamat kepadanya. Namun para pendukung Hillary masih tidak percaya akan hasil penghitungan suara tersebut. Yang juga tidak percaya adalah pengagum dan pendukung Hillary di sini.

Banyak orang di Tanah Air yang terkecoh dalam menilai apa yang terjadi serta memprediksi perkembangan dan situasi yang ada akibat data yang terbatas dan sikap terburu-buru dalam menyampaikan pendapat, termasuk di media massa. Kebiasaan berpikir di permukaan inilah yang tampaknya menyebabkan banyak reaksi yang keliru terhadap perkembangan demokrasi di sini serta di AS, yang selama ini menjadi model demokrasi yang maju.

Tidak aneh jika perdebatan di media sosial pun berkembang semakin tidak sehat dengan tambahan komentar soal prospek AS. Bahkan, sejumlah rekan yang berpendidikan tinggi, tanpa data, dengan cepat menyimpulkan AS akan menjadi negara diktator dengan berbagai praktek pelanggaran HAM. Semua itu komentar yang menyesatkan karena gagal menilai perkembangan demokrasi di masing-masing negara. Mereka lupa melihat AS sebagai negara dengan demokrasi yang sudah terkonsolidasi, kondisi yang berbeda dengan di Indonesia.

Seperti dikatakan Juan J. Linz dan Alfred Stephan (1996), sebuah demokrasi terkonsolidasi jika demokrasi memang sudah merupakan "*the only game in town*". Maknanya, semua masalah kenegaraan dapat diselesaikan secara beradab dengan mekanisme yang sudah mapan melalui perangkat-perangkat demokrasi tanpa pengerahan massa dan kekerasan. Di sana, para agen demokrasi, antara lain anggota parlemen, tidak berdemo di jalan, apalagi menggerakkan massa dan berlomba menyampaikan orasi di depan Istana. Juga, pers tidak berperilaku sebagai aktivis politik.

Sebaliknya, dalam sebuah demokrasi yang terkonsolidasi, semua masalah politik sudah harus dapat diselesaikan melalui berbagai dengar pendapat dan sidang-sidang di parlemen. Di DPR, semua kekurangan pemerintah harus dapat secara tuntas diungkap dan diselesaikan karena anggotanya telah dilengkapi dengan hak-hak dan kewenangan.

Kondisi demokrasi yang sudah terkonsolidasi selalu menjauhkan diri dari upaya pengumpulan massa dan unjuk rasa fisik, yang sering dijadikan parameter keberhasilan kerja politikus, terutama demagog. Kalau praktek tersebut terus ditunjukkan, termasuk dengan ancaman menggelar demonstrasi masif pada 25 November atau 2 Desember, kualitas demokrasi kita masih dalam tahap "demokrasi kerumunan". Terminologi itu mengikuti

analisis mengenai "*masyarakat kerumunan*" yang sering diangkat sosiolog Imam Prasodjo. Jika praktek ini yang terus diperlihatkan elite politik, kalangan terpelajar, dan pemimpin agama dalam menciptakan tekanan publik yang besar terhadap aparat penegak hukum agar segera menjatuhkan sanksi hukuman yang sesuai dengan harapan mereka terhadap tersangka kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, perkembangan demokrasi kita setelah 16 tahun reformasi politik dicanangkan tidak akan naik kelas.

Kegandrungan terhadap gelar kekuatan massa dan fisik akan membuat arah perkembangan dan kualitas demokrasi kita sekelas dengan Pakistan, Mesir, Turki, Filipina, Korea Selatan, serta Thailand, yang rawan kerusuhan massa dan kudeta politik. Transisi demokrasi yang telah berlangsung pun akan berakhir. Dalam situasi ini, aparat keamanan dan militer akan selalu dibutuhkan dan memperoleh legitimasi politik untuk mengambil alih keadaan dan mengembalikan stabilitas politik.

Tidaklah berlebihan jika kita harus mengatakan bahwa masyarakat kita kini masih merupakan "masyarakat kerumunan yang terbelah" dan amat rapuh. AS juga pernah terbelah akibat kompetisi dalam pemilihan presiden yang ketat antara Bush dan Al Gore. Namun keadaan itu dapat segera terkoreksi karena praktek demokrasi yang sudah terkonsolidasi. Sekarang juga AS tampak terbelah akibat Trump yang kontroversial selama kampanye. Namun hal itu akan segera pulih karena Trump akan dipaksa mengubah sikapnya menjadi selayaknya presiden sebagaimana dituntut seluruh rakyat AS. Situasi ini berbeda dengan masyarakat Indonesia, yang tampak semakin terpecah-belah merespons kemenangan Trump.

Demokrasi yang terkonsolidasi membutuhkan kepedulian atas informasi yang akurat dan kecerdasan dalam bersikap. Tanpa ini, massa hanya merupakan kerumunan yang rawan digerakkan untuk menciptakan situasi anarkistis yang diharapkan elite politik dan demagog dengan kepentingan pragmatis mereka. Apakah Indonesia masih ada dan sampai kapan ia masih bisa bertahan? Jawabannya tentu berpulang pada bangsa ini. Apakah mereka masih memiliki keinginan bersama (volonte generale, Renan 1882), yang merupakan alasan atau dasar untuk menjadi sebuah negara bangsa yang majemuk, seperti dicita-citakan para pendirinya?

Poltak Partogi Nainggolan, Pengamat Politik dan Keamanan

TEMPO.CO, 23 November 2016

Toleransi bukan Basa-basi

TOLERANSI ialah bukti kematangan jiwa seseorang. Sikap semacam ini memerlukan kemampuan besar memahami orang lain sekaligus mencerminkan kebesaran jiwanya dalam menerima perbedaan. Semua umat beragama memiliki keteguhan iman dan percaya bahwa agamanyalah yang benar. Di sisi lain, keteguhan itu tidak mengabaikan keberadaan agama lain beserta umatnya. Dalam Islam, misalnya, ada ayat yang menyebutkan, 'Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku' (Al Kafirun: 6). Di situlah sebenarnya toleransi dan keterbukaan Islam terhadap pemeluk agama lain.

Semangat inilah yang menurut Khaled Abou El Fadl menentukan peradaban luhur manusia di masa depan setelah mengambil hikmah dari sejarah Islam yang sebenarnya sarat dengan ikhtiar perdamaian--lebih banyak suasana damai daripada perang. 'Semua kebaikan sejarah itu sekarang berada di pundak para pemikir muslim kontemporer untuk diteruskan', tulisnya dalam *Boston Review* edisi 1 Desember 2001--tiga bulan setelah peristiwa September 11.

Sikap ekstrem dan tidak toleran ada di setiap agama. Kemajuan sains dan teknologi yang kemudian mengikis peran agama juga mulai muncul. Bagi sebagian ateis baru, agama justru menjadi penghalang perdamaian. Banyak perang disebabkan agama atau mengatasnamakan agama. Samuel Huntington dalam *Clash of Civilizations*? (perhatikan tanda tanya di judul itu) menyebutkan bahwa konflik di masa depan akan banyak disebabkan perbedaan budaya dan agama.

Esai Huntington itu terbit pertama kali di jurnal Foreign Affairs pada 1993 dengan gambaran perang kecil di berbagai wilayah. Sangat menyentak bagi para pengamat politik dunia Islam, seperempat abad kemudian, tesis itu masih sangat membekas di benak para pemikir sosial dan ekonomi hingga sekarang. Perang saudara di Suriah, maraknya IS, dan guncangnya geopolitik Timur Tengah seperti membenarkan ramalan Huntington. Pertanyaan kritisnya ialah mungkinkah konflik yang terjadi saat ini 'disebabkan' tesis Huntington?

Kita justru membutuhkan toleransi saat ini. Dunia sudah semakin kompleks dan modern. Manusia dan peradaban di dalamnya sudah semakin beragam dengan tingkat kehidupan yang lebih baik--khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan--membuat harapan hidup semakin panjang. Kesempatan semakin terbuka untuk siapa saja menjadi manusia yang berhasil, terlepas dari agama, suku, bangsa, etnik, dan gender (jenis kelamin). Bumi kita yang semakin dipadati penduduk dan terancam polusi, juga pemanasan global, membutuhkan kita semua untuk bekerja keras. Bagaimana mengatasi kebutuhan pangan dan energi buat 7,5 miliar penduduk (2016). Di sinilah semangat toleransi diperlukan. Kita harus saling menenggang rasa dan menghargai sesama karena kita bersama-sama menghadapi masalah. Kita perlu bekerja sama dan memanfaatkan semua bakat dan kepandaian yang ada, terlepas dari agama, ras, suku, gender, dan sebagainya.

Persoalan toleransi menjadi berat karena masih banyak saudara kita yang belum mendapatkan pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang memadai, dan posisi ekonomi-sosial yang masih rendah. Perjuangan mendorong toleransi menjadi berat ketika sebagian dari kita tidak melek huruf, literasi kurang, dan kesempatan belajar nyaris hilang. Demokrasi menjadi utopia buat orang-orang yang tertinggal dan tertindas. Mereka membutuhkan kesempatan yang sama, atau kalau perlu kesempatan yang diadakan khusus buat mereka (aksi afirmasi atau affirmative action) agar dapat sejajar dengan rekan-rekan mereka di masyarakat. Oleh sebab itu, kita perlu membangun manusia melalui pendidikan yang bermutu buat saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang kurang beruntung.

Kemampuan bertoleransi dimulai dari pendidikan dini di keluarga, lalu berlanjut ke sekolah formal dan pergaulan di masyarakat. Toleransi, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ialah sikap atau sifat 'toleran'. Nah, arti toleran sendiri ialah 'bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri'.

Di sinilah perlunya pendidikan yang bermutu buat anak-anak kita agar mereka mampu mewujudkan sikap toleran tersebut. Apakah pendidikan yang baik menjamin seseorang menjadi toleran? Belum tentu juga, tetapi setidaknya kalau dilihat porsi terbesar masyarakat beradab dan toleran biasanya terdiri dari orang-orang yang terdidik dengan baik.

Toleransi dapat ditumbuhkan dengan kepedulian sosial dari mereka yang sudah berhasil. India yang relatif lebih berat tantangan toleransinya saat ini mendorong perusahaan yang berhasil membantu mendirikan laboratorium sains dan komputer untuk kaum minoritas, marginal, wanita, dan anak berkebutuhan khusus. Negara harus hadir untuk memperkuat semangat toleransi dengan menghargai keragaman, pembangunan infrastruktur, pengendalian harga sembako, penyediaan kesempatan pelatihan, dan penegakan hukum.

Presiden Joko Widodo juga mengingatkan mayoritas agar melindungi minoritas dan sebaliknya minoritas menghargai mayoritas. Peran negara memang seharusnya mendorong kerja sama semua warga negara dari semua agama, ras, suku, dan gender agar cita-cita bangsa tercapai. Semua itu memungkinkan apabila semua pihak menjalankan toleransi secara baik dan nyata, bukan hanya retorika.

Sikap toleran dapat dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita biasakan anak kita melihat temannya dari penganut agama lain dalam beribadah, misalnya. Kok berbeda? Kita menjelaskan kepadanya dengan semangat toleransi. Hasilnya berbeda kalau kita sebagai orangtua memberikan penjelasan yang negatif dan merendahkan. Masih ada keluarga yang membesarkan anaknya dengan semangat intoleran tanpa disadarinya. Sikap kita yang 'berbeda' saja bila berhubungan dengan rekan yang berbeda agama atau suku dari kita akan

ditangkap anak-anak kita dengan mudah. Stereotip yang kita sampaikan mengenai suku tertentu atau penganut agama tertentu akan membekas di benak si anak bila dewasa nanti.

Oleh sebab itu, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Contoh, cobalah berbesar hati bila ada orang yang berbeda dari kita melakukan kesalahan. Sering kita mengomel, “Dasar si A ….(agama, gender, atau suku), makanya …. (cap negatif). Ungkapan sepele seperti itu bila didengar si anak akan membentuk persepsi si anak tentang kelompok tertentu dengan stereotipnya.

Ada nasihat yang baik dalam menumbuhkan toleransi di antara kita. Salah satunya ialah terapkan keramahan secara acak (apply random kindness). Kita harus tersenyum dengan siapa pun yang kita temui di mana pun dan kapan pun. Mudah, bukan? Mudah diucapkan, tetapi cobalah terapkan mulai hari ini. Jangan melihat warna kulitnya, bajunya, atau atribut-atribut yang 'berbeda' dari kita. Di situlah sebenarnya strategi agar kita menjadi pribadi yang toleran dan menghargai orang yang berbeda dari kita. Imbalan atau pahala yang kita peroleh akan sangat besar buat jiwa kita. Inilah rahasianya: toleransi bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Selamat Hari Toleransi Dunia, semoga kita berhasil menjadi orang yang memiliki toleransi.

Totok Amin Soefijanto, Wakil Rektor Akademik Universitas Paramadina;

Senior Advisor ACDP-Indonesia; Penasihat One-Indonesia.id

MEDIA INDONESIA, 23 November 2016

Beri Empati Kesempatan

Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 telah memberikan pelajaran moral yang sangat berharga. Ketika politik saling menyerang jadi dominan dan politik empati hilang dalam ruang sosial-politik, maka keadaban publik dan solidaritas tumbang. Gantinya, egosentrisme kelompok dan kebencian berbalut rasisme bertakhta dalam singgasana kekuasaan. Hilangnya politik empati dalam pertarungan politik seputar pemilihan presiden di Amerika Serikat tidak saja ditandai oleh menguatnya sentimen anti terhadap kebinekaan, tetapi juga diperkeras oleh maraknya perbincangan publik bernada cemooh dan cibiran dari kaum terdidik mapan terhadap para pendukung elite pengusung politik rasialis yang berlatar kaum marjinal.

Terasing secara sosial

Beberapa hari lalu, dalam lawatan ke AS untuk menyaksikan pemilihan presiden AS, di Bandara Iowa City saya sempat berbincang dengan seorang ibu berkulit putih yang bekerja menjadi cleaning service. Saya mengajukan pertanyaan kepadanya terkait kemenangan Donald Trump dalam pilpres kali ini. Ia menjawab, "*Saat ini di Amerika terlalu mencolok munculnya orang-orang yang sangat kaya, meninggalkan kami yang semakin lama semakin terpuruk dalam kemiskinan*."

Sentimen kemarahan dan perasaan ditinggalkan tidak saja dialami oleh Ibu Emma, seorang *cleaning service* di bandara, tetapi telah menjadi sebuah fenomena umum saat ini. Setelah krisis sosial yang mengakibatkan 9 juta orang kehilangan pekerjaan semenjak tahun 2008 (6 persen tenaga kerja di AS), tumbuh meluas perasaan terasing secara sosial di antara sebagian warga kelas pekerja Amerika Serikat (Bloomberg, 2013).

Kepahitan hidup akibat proses pemiskinan sosial dan menguatnya rasa malu akibat tak mampu bertahan dalam kondisi krisis, menurut pemuka agama sekaligus peneliti kesehatan publik Michael Lerner, menjadi kunci kekalahan Hillary Clinton dan kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden kali ini.

Mengutip penelitiannya tentang keadaan psikologis sosial kaum kelas menengah Amerika yang dilakukan National Institute of Mental Health, Lerner menjelaskan bahwa kondisi stres kelas pekerja di Amerika saat krisis sekarang diperkuat oleh rasa malu akibat tidak dapat berpartisipasi dan terintegrasi dalam persaingan ekonomi yang ditentukan oleh standar-standar meritokratik (kapasitas) masyarakat Amerika Serikat (The New York Times, November 2016).

Di sisi lain, tengah terjadi kegagapan saluran politik, baik melalui pelembagaan partai politik maupun proses kehidupan bernegara, untuk merespons problem sosial yang mereka hadapi. Di tengah pergeseran pemaknaan identitas kelompok pekerja sebagai tenaga produktif menjadi kaum chavz kelompok terbuang, kalangan politisi progresif-liberal gagal

mengajak kaum pekerja berpartisipasi untuk memperjuangkan kebutuhan dan aspirasi mereka dalam agenda politik inklusif berbasis kesetaraan.

Sementara kaum konservatif kanan berhasil memperdaya mereka dengan propaganda populis: bahwa akar dari keterpurukan nasib mereka saat ini karena kemakmuran Amerika telah diambil dari mereka—kaum pekerja kulit putih—oleh kaum imigran, Afro-Amerika, Asia, serta Muslim dan Timur-Tengah. Juga oleh kelas menengah terdidik yang mengabaikan mereka di tengah gaya hidup berkecukupan.Satu hal yang tentu tidak dikemukakan oleh kaum populis kanan tersebut adalah sebagian besar kaum imigran tak terdidik di AS mengalami keterpurukan sosial-ekonomi, seperti halnya yang dialami oleh rekan-rekan mereka dari kalangan kulit putih.

Absennya empati

Di tengah hubungan sosial yang semakin terbelah, momen politik elektoral pemilihan presiden di Amerika Serikat diwarnai oleh politik antagonisme budaya berbalut rasialisme yang direspons dengan suara-suara cemooh seruan bigot, rasis, dan fanatik. Tidak saja kepada kalangan elite politik, tetapi juga kepada pendukungnya dari kaum marjinal yang teperdaya oleh wacana-wacana eksklusivisme budaya dan kebencian.

Perbincangan politik di Amerika Serikat saat ini memperlihatkan absennya politik empati. Satu sikap politik yang berawal dari kesadaran bahwa realitas terdalam di balik dukungan kuat terhadap propaganda populis berbasis kebencian budaya adalah begitu banyaknya orang yang mengalami kepanikan dan kemiskinan di tengah pertumbuhan lapisan orang-orang kaya yang menguasai distribusi kemakmuran. Dari kalangan liberal terdidik, di tengah antusiasme mereka untuk mendorong anti rasisme, mereka tidak memiliki cukup jawaban bagaimana menyelesaikan persoalan keterpinggiran sosial ekonomi dari mereka yang mengalami penghancuran sosial akibat krisis, mereka yang saat ini jadi pendukung Trump.

Tiap kubu yang bertarung dalam pemilihan presiden kali ini tidak ada yang berhasil menawarkan gagasan penyembuhan sosial (*social healing*) dari realitas sosial masyarakat yang semakin terbelah. Telinga dan hati dari tiap pihak yang berseteru tidak cukup tersedia untuk mendengarkan suara kepedihan sosial yang dialami, baik oleh kaum yang mengalami pemiskinan sosial maupun mereka yang mengalami prasangka rasial.

Pelajaran untuk Indonesia

Apa yang tengah dihadapi masyarakat Amerika saat ini bukanlah hal yang asing bagi negeri kita. Setelah kita melewati Pemilihan Presiden 2014, suara-suara kebencian bersahutan satu sama lain tanpa memberi kesempatan bagi empati tiap pihak untuk memahami satu sama lain. Seperti halnya yang tengah terjadi di Amerika Serikat, republik kita membutuhkan lahirnya gagasan empatik yang mampu memberikan penjelasan bagaimana mereka yang tertinggal dalam deru pembangunan mudah terpikat oleh suara-suara intoleransi dan anti terhadap yang berbeda.

Demikian pula, di sisi lain, hati kita juga butuh mendengar bagaimana suara-suara dari kaum minoritas perlu didengarkan dan dirangkul dalam kesetaraan sebagai bangsa Indonesia. Ini penting, mengingat itu semua adalah sari pati dari kehidupan kita bernegara, yakni gotong royong!

Airlangga Pribadi Kusman, Direktur Centre of Statecraft and Citizenship Studies Universitas Airlangga

KOMPAS, 23 November 2016

Revitalisasi Komunikasi Sosial

Setelah aksi unjuk rasa 4 November, Presiden RI secara intensif melakukan komunikasi atau silaturahim kepada sejumlah tokoh masyarakat, politik, dan ormas. Tentu saja tindakan komunikasi sosial sebagai kepala negara perlu diapresiasi dan, sungguh, tak ada kata terlambat. Pelajaran berharga, betapa komunikasi sosial lintas golongan dan kepentingan dalam menjaga dan memelihara keutuhan NKRI di atas segalanya. Apalagi di era globalisasi yang sarat berbagai informasi dan komunikasi yang sangat sulit dikelola dan atau dikendalikan.

Pengaruh media massa dan sosial tak bisa dihindari lagi. Sumber kebenaran (kejujuran) informasi dan komunikasi (penggunaan bahasa verbal-nonverbal)dalam tataran pengelolaan kenegaraan semakin sulit dan krusial sehingga diperlukan ketulusan komunikasi.

Komunikasi yang tulus

Kesadaran akan pentingnya komunikasi sosial yang tulus dan solutif tentunya menjadi harapan semua anak bangsa. Termasuk para pembantu presiden (Kabinet Kerja), perlu melakukan tindakan komunikasi sosial yang lebih intensif, bukan hanya "*tindak kerja*", melainkan "tindakan komunikasi" pun tetap menjadi penting.

Bentuk komunikasi sosial ini yang dipraktikkan di sejumlah negara maju. Prasyarat utamanya adalah pemahaman dan kesadaran berbasis rasional, komprehensif, dan mendasar (bukan emosional-pragmatis) terhadap posisi dan peran setiap elite bangsa dan warga negaranya. Namun, di tengah-tengah ujian berat tersebut, masih kita saksikan berbagai fakta sosial dari para elite birokrasi, politisi, tokoh masyarakat, serta warga masyarakatyang belum menyadari akan peran dan fungsinya. Bahkan, krisis keteladanan dalam lingkup lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)semakin hari semakin masif dan transparan. Berbagai persoalan politik, ekonomi, budaya, agama, dan keamanan seakan menjadi tanggung jawab penuh presiden. Termasuk demo 4 November, menteri dan atau politisi (baca: parpol) seakan tak berfungsi sama sekali dalam menyerap aspirasi warganya. Bahkan, ada anggota DPR yang ikut demo, sungguh satu fenomena politik yang tidak konstruktif dan sehat.

Dalam situasi dilematis ini, Habermas (1967) mengingatkan, kekuasaan sebagai salah satu rangkaian dari praksis politik yang melibatkan rakyat banyak tak hanya sebagai "*praksis kerja*", tetapi juga "*praksis komunikasi*". Karena itu, pergelaran aktivitas kekuasaan tak terbatas pada pengendalian sarana teknis dan sistem reproduksi material. Tak kalah penting upaya-upaya memanipulasi sistem-sistem reproduksi ideasional sehingga ini mengukuhkan apa yang dikatakannya bahwa *language is also a medium of domination and power*.

Pentingnya komunikasi sosial sebagai solusi juga disampaikan Habermas, yang menggagas komunikasi sosial sebagai pengetahuan dan praksis sosial,

dan tidak dikotomis antara subyek dan obyek. Komunikasi sosial yang egaliter, reflektif yang bersandar pada kemurnian rasio atau nalar yang sehat dan tidak memaksakan (dominasi) kebenaran atau kehendak satu sama lain yang sedang berkomunikasi.

Interaksi dan komunikasi sosial satu sama lain yang reflektif dan kontemplatif, dan pada gilirannya, ketulusan dan kejujujuran sosial semakin mengemuka dan bisa menjadi solusi karena mampu membangun tujuan bersama yang disepakati para pelaku komunikasi. Bentuk komunikasi sosial inilah yang saat ini perlu menjadi acuan bersama dalam komunikasi politik elite negeri ini dengan warganya.

Dalam kondisi dan situasiyang serba cair (potensi liar) ini, tentunya para anggota kabinet dan semua lembaga negara tak lagi bisa berdiam diri untuk terus berupaya membuka pemahaman dan kesadaran akan fungsi komunikasi sosial, seperti yang dilakukan Presiden. Jika saja para pelaku media dan atau warga mampu menahan diri dari berbagai ujaran politik yang kasar, menghasut, penuh kebencian dan arogan, berbagai fenomena dan potensi perbedaan kepentingan golongan bisa diselesaikan melalui komunikasi sosial. Tentu sesuai dengan level dan kapasitas yang dimiliki para elite formal dan informal di masyarakat.

Demokrasi era digital

Munculnya netizen dalam praksis sosial politik sedang masif terjadi. Euforia kebebasan individu benar-benar telah melampaui nalar sehat. Namun, sayangnya, ujaran netizen sering kali tidak disertai tangung jawab dan atau kesadaran akan efek negatifnya. Brain McNair (2005) mengingatkan bahwa komunikasi politik pada era transformasi sangat cepat dan dinamis. Maka, sikap, pemikiran, dan perilaku politik para elite bangsa yang konservatif dan lambat akan menuai kegagalan komunikasi politik dan atau akan tumbuh iklim komunikasi politik yang tidak sehat.

Pada era digital, dengan ciri khasnya sebagai sosok demokrasi kosmopolit, telah membawa negara-negara berkembang, seperti Indonesia, tidak bisa menolak demokrasi kosmopolitan (demokrasi internasional). Ironisnya, negara sebagai praksis politik yang berlandaskan Pancasila seolah belum siap untuk bersanding atau bersaing dengan demokrasi kosmopolitan.

Demokrasi era digital telah memosisikan politik kultural Pancasila yang dibangun bersama para pendahulu negeri ini mulai kehilangan kepercayaan. Sebab, dalam domain kemasyarakatan, ia seakan belum mampu menjawab perkembangan dunia yang sangat kental dengan warna neolibnya. Persaingan global semakin meluluhkannya berbagai fondasi kultural dan atau ideologi negeri ini.

Inilah situasi ”gawat” yang sering mengemuka dalam kehidupan sehari-hari warganya. Tawaran kebebasan sosial yang permisif dan hedonis sering kali lebih mewarnai gaya hidup di sejumlah pelosok kota dan daerah. Kondisi

pragmatis dan konsumtif warga dan elitenya lebih sering muncul menjadi tren baru dalam kehidupan sosial.

Di sisi lain, perlu disadari bahwa kehadiran media massa sering kali tak mampu lagi jadi sumber informasi yang kredibel, apalagi sudah masuk wilayah kepentingan politik praktis, yang memunculkan keberpihakan politik media massa pada institusi politik.

Keberpihakan tersebut bisa jadi diperlihatkan lewat cara-carapemberitaan partai politik dan kandidat capres-cawapresnya.

Era kebebasan pers dan kebebasan berpolitik praktis telah sama-sama menempatkan domain politik dan media menjadi satu komoditas bisnis (komodifikasi) yang (tentunya) berupaya ”menjauhkan” diri dari nilai-nilai moralitas, norma, dan etika kekuasaan, serta telah menempatkan pers (media) pada posisi yang semakin dilematis situasinya. Bahkan, distorsi makna tentang politik dan media semakin jauh dari harapan, berbagai praktik pelanggaran etika pers dan moralitas kekuasaan semakin transparan dan menggurita sedemikian rupa. Bahkan, saat ini praktik politik telah mengalami distorsi luar biasa, anti klimaks, buruknya reputasi dan citra politisi sedemikian parah.

Situasi yang serba cepat inilah yang telah memaksa Presiden merasa perlu melakukan komunikasi sosial yang cepat, tepat, dan solutif. Tidak hanya dengan para ulama, tetapi juga dengan para tokoh politik, bisnis, ormas, dan kekuatan sosial lainnya. Dan, jangan lupa, demo 4 November merupakan reaksi dari lambatnya dan atau pembiaran elite politik di lingkaran Istana untuk membangun komunikasi sosial.

Suwandi Sumartias, Dosen Komunikasi Politik Fikom UnPad

KOMPAS, 23 November 2016

Din Syamsuddin: Kalau Ahok Lepas, Saya Pimpin Perlawanan

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mewanti-wanti Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian agar tak meremehkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia pun mengatakan tak akan segan memimpin perlawanan jika Ahok sampai lepas dari jerat hukum.

"*Pak Tito, kita bersahabat ya. Tapi kalau ini sampai lepas, saya akan memimpin perlawanan*," kata Din saat memberi sambutan di acara pembukaan rapat kerja nasional MUI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Rabu, 23 November 2016.

Din sangat yakin bahwa Ahok menistakan agama dengan mengatakan orang bisa saja tidak memilihnya karena telah dibohongi memakai Surat Al Maidah ayat 51. Surat itu menerangkan bahwa umat Islam dilarang memilih pemimpin non muslim.

Belakangan tafsir surat Al Maidah ayat 51 itu menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa kata awlia dalam surat itu berarti pemimpin. Namun ada yang menafsirkan kata itu sebagai teman sejati. Namun, keyakinan Din bahwa Ahok menista agama bukan soal tafsir ayat. Melainkan karena Ahok memberikan penilaian dengan menyalahkan tafsir yang bukan kepercayaannya. "*Padahal dia bukan dari agama tersebut*," kata dia.

Selanjutnya, Din menilai Ahok menggunakan kata yang sinis. "Dibohongin pakai, ini menurut keyakinan saya sudah memenuhi kriteria penistaan agama," ujar dia. "Kalau itu dibela-bela, apalagi ada gelagat penegak hukum dibela-bela, saya tersinggung."

Menurut Din, tak kunjung ditahannya Ahok bisa menimbulkan masalah yang lebih rumit. Seperti yang baru terjadi, Ahok kembali dilaporkan karena menuduh pengunjuk rasa 4 November menerima bayaran.

"Saya khawatir nanti dia punya ujaran baru lagi yang melanggar hukum. Jadi menurut saya bagus kalau ditahan itu. Supaya jangan lebih rumit lagi masalah," ujar Din.

Maya Ayu Puspitasari, Wartawan TEMPO

TEMPO.CO, 24 November 2016

Mekarnya Makar & Majunya Mundur

Mengawali tulisan ini, saya ingin menjelaskan kenapa Catatan Kamisan kali ini berjudul "Mekarnya Makar & Majunya Mundur". Ada dua kejadian seakan terpisah, namun saling berhubungan —meski tidak langsung— yang menarik perhatian saya dalam seminggu ini.

Pertama adalah langkah Presiden Joko Widodo yang melakukan politik naik kuda di Hambalang dan politik makan siang di Istana dengan beberapa Ketua Umum Partai, termasuk dengan Ketum Golkar, yang kabarnya akan maju lagi menjadi Ketua DPR, setelah sebelumnya sempat mengundurkan diri. *Kedua*, menjelang aksi demonstrasi 2 Desember, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memekarkan adanya potensi makar yang sedang digalang beberapa kelompok, untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi yang sah.

Soal mekarnya makar saya hanya akan membahas secara umum, karena bukan kompetensi saya menganalisa lebih jauh persoalan hukum pidana demikian. Menurut KUHP, ada beberapa pasal yang menyebut kata "*makar*", yaitu Pasal 87 (yang mensyaratkan makar dengan adanya perbuatan permulaan pelaksanaan); Pasal 104 (membunuh, merampas kemerdekaan, meniadakan kemampuan presiden dan wapres memerintah); Pasal 106 (memisahkan diri dari wilayah negara Indonesia); dan Pasal 107 (menggulingkan pemerintah).

Dalam Bahasa belanda, makar disebut aanslag yang dimaknai gewelddadige aanval atau violent attack, yang bagi sebagian ahli pidana mensyaratkan adanya serangan yang bersifat kuat atau nyata. Maka, kalau hanya mengibarkan bendera separatis atau menyatakan pendapat memisahkan diri semata, bagi beberapa ahli pidana, belum dapat dikategorikan sebagai tindakan makar. Meskipun, cukup banyak putusan Mahkamah Agung yang tetap menghukum bersalah pernyataan pendapat atau sikap yang demikian.

Terkait rencana demo 2 Desember, dan ancaman makar, saya menduga yang sedang dikhawatirkan adalah terjadinya upaya penggulingan pemerintahan yang sah menurut Pasal 107 KUHP—misalnya dengan upaya menduduki Gedung DPR, dan mendesak diadakannya Sidang Istimewa MPR untuk memberhentikan Presiden. Saya tidak akan membahas apakah demo 2 Desember dan rencana yang dikawatirkan aparat kepolisian itu sudah memenuhi unsur delik tindak pidana makar, biarkanlah itu menjadi lahan ahli pidana untuk membahasnya.

Izinkan saya memberikan perspektif hukum tata negara terkait "*menggulingkan pemerintah*" yang diatur dalam Pasal 107 KUHP tersebut. Penggulingan di sini harus dimaknai sebagai upaya untuk memberhentikan pemerintahan yang sah secara melawan hukum, dan karenanya menjadi tindak pidana makar. Karena pemerintahan yang sah —dalam hal ini presiden dan wakil presiden— hanya dapat diberhentikan melalui proses pemakzulan (*impeachment*) yang telah diatur secara lebih detail dalam UUD

1945. Tidak sebagaimana dulu sebelum perubahan konstitusi, MPR dapat bersidang untuk memberhentikan presiden; setelah perubahan UUD 1945 harus ada sidang DPR dulu yang mengusulkan pemberhentian karena presiden dianggap melanggar pasal pemakzulan. Usulan DPR demikian, jikalaupun disetujui mayoritas anggota dewan, harus diputuskan dulu oleh Mahkamah Konstitusi, sebelum akhirnya diputuskan pemberhentian presiden dalam sidang MPR.

Sehingga, jikalaupun memang ada kelompok yang ingin mendorong pemberhentian presiden di luar jalur yang diatur oleh UUD 1945 tersebut — apalagi upaya itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan- maka langkah hukum yang tegas memang harus ditegakkan oleh aparat kepolisian. Namun, sebaliknya, jika tidak terbukti adanya upaya yang demikian, maka tindak pidana makar sebaiknya tidak diterapkan, dan aksi unjuk rasa yang akan dijalankan cukup dikawal dan dipastikan berjalan damai tanpa kekerasan sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Soal pergantian kepemimpinan nasional ini, marilah kita sama-sama memastikan bahwa suksesi kepresidenan berjalan sesuai aturan konstitusi. Artinya, jika tidak ada pelanggaran atau pasal pemakzulan, maka presiden dan wakil presidennya harus diberikan kesempatan untuk memimpin sampai akhir masa jabatannya.

Perbedaan pandangan politik ataupun ketidakpuasan kinerja presiden ataupun wapresnya, tidak boleh dijadikan dasar untuk mendorong proses impeachment. Soal-soal perbedaan dan ketidakpuasan demikian hanya bisa disalurkan melalui pilpres setiap lima tahun. Kita sudah menunjukkan bahwa Indonesia bisa melakukan pergantian presiden secara demokratis, tanpa harus memberhentikan presiden sebelumnya. Kali pertama kita melakukannya adalah ketika Presiden SBY mengakhiri 10 tahun masa tugasnya dan memberikan estafet pemerintahan kepada Presiden Jokowi dengan damai. Mari kita jaga prestasi itu, dan kembali berkompetisi pada pilpres 2019 yang akan datang.

Demikianlah, saya sudahi pembahasan terkait soal pertama tentang "*mekarnya makar*" dan bagaimana kita sebaiknya tidak mendorong maju ataupun mendesak mundur proses penggantian presiden. Biarkan semuanya berjalan sesuai aturan konstitusi dan kehidupan demokrasi yang bermoral. Soal moralitas demokrasi inilah yang ingin saya garis bawahi pada bagian kedua tulisan Catatan Kamisan ini.

Bagaimanapun, saya membaca hiruk-pikuknya politik di Tanah Air kita sekarang, sedikit banyak dipengaruhi oleh tensi persaingan Pilgub Jakarta 2017, yang sebenarnya juga berwarna kompetisi Pilpres 2019. Saya khawatir bahwa siklus panasnya suhu politik ini akan berulang per lima tahun, selanjutnya di Pilgub Jakarta 2022, yang berasa Pilpres 2024, dan begitu seterusnya.

Walaupun, Pilgub Jakarta kali ini terasa lebih hangat dan menantang karena hadirnya sosok Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang sayangnya

membawa nuansa SARA etnis dan agama ke dalam politik Pilgub Jakarta. Kita semua paham, bahwa persaingan politik —termasuk pilgub Jakarta harusnya mengedepankan moralitas berdemokrasi, dan tidak terjebak dengan isu SARA yang berbahaya. Moralitas demokrasi juga tidak hanya mendorong kapan negawaran tahu untuk maju bersaing, tapi juga bila saatnya mundur bertanding.

Soal maju dan mundur dalam perpolitikan negara ini, memang tidak semuanya soal aturan hukum, tetapi juga soal derajat kenegarawanan seorang pemimpin. Yang terkait soal aturan hukum, tetap ada. Misalnya, Ahok yang sekarang menjadi tersangka tindak pidana penodaan agama, tetap tidak bisa mengundurkan diri karena telah ditetapkan KPUD Jakarta sebagai calon gubernur.

Kalau memaksakan mengundurkan diri, Ahok justru bisa dijerat tindak pidana dan dihukum penjara serta denda menurut UU pemilihan kepala daerah. Namun, tidak semua aturan bernegara itu, harus diatur hukum. Justru di atas hukum itu ada moralitas, meskipun tidak tertulis dalam hukum positif.

Saya sering mengutip pernyataan Profesor Hukum Yale University Ronald Dworkin yang mengatakan, "*Moral principle is the foundation of law*". Karena itu saya menaruh hormat pada Presiden Habibie, yang tidak maju menjadi calon presiden di tahun 1999, karena pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR—meskipun tidak ada aturan hukum tertulis yang melarangnya untuk maju lagi sebagai capres. Soal mundur dari jabatan kepresidenan, saya juga menaruh hormat kepada Moh. Hatta yang di tahun 1956 memilih mundur dari kursi wapres ketimbang berbeda pendapat dengan Presiden Soekarno.

Hormat yang sama bagaimanapun perlu kita sematkan kepada Presiden Soeharto yang memilih berhenti alias mundur dari kursi presiden di tahun 1998. Sebagian kalangan mungkin berpandangan mundurnya itu karena tekanan massa saat itu. Namun, Presiden Soeharto bisa saja memilih tetap bertahan dan menggunakan kekuatan TNI yang saat itu masih cukup solid di belakangnya untuk berhadapan dengan gerakan reformasi. Hal yang tidak dipilih oleh Pak Harto.

Soal budaya mundur karena moralitas kepemimpinan inilah —bukan semata karena aturan hukum— yang sekarang perlu terus kita dorong dalam kehidupan berdemokrasi di tanah air. Tidak banyak pejabat negara kita yang melakukannya. Baru-baru ini, kita mencatat Andi Mallarangeng yang memilih mundur dari Menpora ketika baru ditetapkan menjadi tersangka korupsi. Di level Dirjen akhir tahun lalu kita melihat Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengundurkan diri karena merasa gagal dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Sebenarnya desakan mundur juga didorong oleh beberapa kalangan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua

pimpinan negara itu telah diputus bersalah melanggar etika. Ketua MK karena mengeluarkan katebelece, Ketua BPK karena keterkaitannya dengan Panama Paper. Namun, keduanya memilih untuk bertahan, dan memang aturan hukum tertulis tidak ada yang melarang pilihan sikap keduanya tersebut. Meskipun sebagai negarawan menurut UU MK, maupun sebagai pimpinan lembaga audit negara, standar derajat etika dan moralitas keduanya tentu harus di atas rata-rata pejabat negara lainnya.

Soal pilihan mundur itu pula yang sempat menjadi berita di akhir tahun lalu, dan sekarang muncul lagi sebagai berita akan majunya kembali Setya Novanto ke kursi ketua DPR. Secara tegas, tidak ada aturan hukum tertulis yang dilanggar jika kelak Ketua DPR kembali dijabat yang bersangkutan. Pun, mayoritas partai politik di DPR akan menerimanya sebagai keputusan internal Partai Golkar yang harus dihormati. Presiden Jokowi sendiri —yang pernah berang karena namanya dicatut meminta saham— saya duga akan menerimanya sebagai realitas politik.

Pada titik inilah isu "mekarnya makar" dan "majunya mundur" dalam Catatan Kamisan ini bertemu. Akhirnya nilai-nilai demokrasi kita kembali diuji, sejauh mana kita bisa meletakkan moralitas antikorupsi untuk maju atau mundur dalam berkoalisi ketika berhadapan dengan ancaman makar yang tersebar di dunia maya.

Ataukah, semua soal moralitas selesai di meja makan siang Istana? Tentu tidak mudah untuk menjawabnya. Hitungan politiknya tentu tidak gampang, dan saya bukan ahlinya. Saya serahkan kepada para ahli politik dan sidang pembaca untuk menyimpulkannya.

Keep on fighting for the better Indonesia.

Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM; Visiting Professor pada Melbourne Law School dan Faculty of Arts, University of Melbourne

KORAN SINDO, 24 November 2016

Makar Versus Makan

Pekan-pekan belakangan ini, Presiden Joko Widodo pontang-panting. Tak bisa blusukan kedaerah-daerah mengecek infrastruktur, seperti kebiasaan dalam dua tahun ini. Presiden Jokowi malah blusukan ke markas tentara, komunitas dan tokoh-tokoh agama, serta bersafari kepada tokoh-tokoh politik. "*Akhir-akhir ini situasi politik sedikit memanas, sedikit.... Dan, karena pontang-panting itu saya yang biasanya enggak pernah naik kuda harus naik kuda*," kata Jokowi saat pidato di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di Jakarta, Selasa (22/11). Akhir Oktober lalu, Jokowi memang berkuda bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang.

Jakarta, ibu kota negara ini, memang tengah memanas, sepanas suhunya yang rata-rata di atas 30 derajat celsius. Isu, kabar burung, agitasi, provokasi berseliweran, bahkan hingga rumor makar atau upaya penggulingan pemerintah. Panasnya suhu politik saat ini tak lepas dari reaksi terhadap dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama, yang juga tak lepas dari rivalitas Pilkada DKI Jakarta.

Sepekan ini, Presiden Jokowi bertemu Prabowo (bahkan untuk kedua kali), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (juga dua kali), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Bahkan, Megawati bertemu Setya Novanto juga bertemu Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN).

Semuanya bicara soal bangsa dan negara yang tengah gonjang-ganjing. Memang, akan lebih lengkap jika Presiden Jokowi bertemu semua ketua umum parpol, misalnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden PKS Sohibul Iman, juga parpol lainnya. Jadi, komunikasi dan konsolidasinya akan lebih bulat, tidak lonjong.

Komunikasi meja makan

Menariknya, pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan parpol itu dilakukan dengan "*komunikasi di meja makan*". Misalnya, Prabowo dijamu santap siang ikan bakar. Waktu Jokowi ke Hambalang, akhir Oktober, keduanya menyantap nasi goreng. Megawati bahkan bawain bakmi rebus dan bakmi goreng untuk Presiden. Saat Surya Paloh ke Istana, diajak sarapan bubur dan mi aceh. Sewaktu Setya Novanto ke Istana, menu "*makan sore*" tersedia opor ayam hingga rempeyek. Begitu juga saat Romahurmuziy datang, Presiden juga menjamu makan siang.

Meja makan menjadi medium untuk membahas dan menyelesaikan persoalan bangsa. Komunikasi meja makan yang terlihat akrab dan santai ini seakan menjadi penyejuk di tengah isu makar yang mendidih. "*Ada upaya-upaya, rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda politik lain. Di antaranya upaya melakukan makar. Beberapa kelompok yang ingin masuk dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR*," ujar Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11). Pemerintah

menegaskan, jika terkait pengusutan kasus Ahok, proses hukum sedang berjalan.

Kalau memutar jarum waktu, setelah menang Pilpres 2014 ada rumor bahwa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan digulingkan dalam dua tahun. November 2016 ini persis dua tahun usia pemerintahan Jokowi-Kalla. Sekadar ingatan, dari enam presiden sebelumnya, empat presiden "*digulingkan*" atau diturunkan paksa. Soekarno diturunkan MPRS tahun 1967, pasca pidato Nawaksara-nya ditolak. Soeharto lengser oleh gerakan massa tahun 1998. BJ Habibie turun setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR tahun 1999. Abdurrahman Wahid diberhentikan MPR tahun 2001. Nasib Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono lebih baik karena berhenti sesuai sistem demokrasi langsung. Rakyatlah yang memutuskan dalam arena pemilihan presiden.

Bagaimana dengan Jokowi? Sebetulnya, memasuki tahun kedua usia pemerintahan, Jokowi berhasil membuyarkan kekuatan oposisi (Koalisi Merah Putih) terdiri Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, PBB. Jokowi bahkan berhasil menarik dua partai KMP, yaitu PAN dan Golkar ke lingkaran Istana bersama PDI-P, PKB, Hanura, Nasdem, PKPI. PPP juga sudah merapat ke Istana, terlebih saat terjadi konflik internal. Walaupun di seberang, PKS juga pernah bertemu Jokowi di Istana.

Jadi secara politik, penggulingan terhadap pemerintahan Jokowi sebetulnya tak beralasan. Mungkinkah lewat gerakan massa seperti Reformasi 1998 atau people power di Filipina tahun 1986? Ada dugaan kasus Ahok bisa menjadi semacam "*pintu masuk*" atau pemicu (*trigger factor*). Namun, sekarang ini zaman demokrasi langsung. Bukan lagi era otoritarian yang marak makar. Dan, "*makar*" selalu melahirkan cerita tragis, kebrutalan, balas dendam, pemaksaan kehendak. Sebaliknya, cerita soal "*makan*" selalu menghadirkan keakraban, kebersamaan, kesenangan. Sekarang, bangsa ini perlu bersama-sama.

M Subhan SD, Wartawan Senior KOMPAS

KOMPAS, 24 November 2016

Siapa Hendak Makar

Ada berita besar hari Senin, 21 November 2016. Megawati Soekarnoputri dalam kapasitasnya sebagai presiden ke-5 RI bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Agenda pertemuan tentu terkait politik terkini. Pada hari yang sama di Mabes Polri berlangsung konferensi pers Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Segaris dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut adanya aktor-aktor politik yang menunggangi aksi demonstrasi, Kapolri juga menyatakan adanya agenda gelap untuk makar dalam kegiatan unjuk rasa tanggal 2 Desember mendatang. Sementara itu, Panglima TNI mengatakan, jajarannya bersama Polri siap menghadapi upaya makar yang diduga disusupkan dalam aksi pada 2 Desember itu nanti.

Isu tentang rencana kudeta atau makar ini memang telah beredar luas dalam satu-dua minggu terakhir ini. Namun, ketika isu makar ini menarik perhatian seorang presiden yang tengah menjabat, yang baru saja melakukan pertemuan dengan seorang mantan presiden, nilai dan gemanya menjadi lain. Ini ancaman serius untuk stabilitas negara.

Harus diperjelas

Tampaknya, berita atau barangkali "laporan intelijen" seolah akan ada rencana makar inilah yang bisa menjawab pertanyaan besar dari rakyat mengapa Presiden Jokowi secara maraton berkunjung ke satuan-satuan tempur khusus, baik TNI maupun Polri. Dalam berbagai pernyataan disebutkan, jika ada keadaan darurat, Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI akan mengerahkan satuan-satuan khusus untuk menindak "musuh negara". Tentu berita ini akan memiliki dampak psikologis yang besar dan luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, Presiden perlu memberikan eksplanasi secara terang benderang kepada publik mengenai siapa yang dimaksudkan akan melakukan makar ini. Jika tidak, justru akan segera membuat komponen bangsa terpecah. Saling curiga satu sama lain. Masyarakat akan menjadi tegang.

Mengikuti perkembangan politik yang terjadi sekarang, saya teringat pada situasi dan peristiwa yang terjadi di republik ini tahun 1965. Menjelang dilakukan gerakan kudeta atau makar yang dilancarkan Letkol Untung dkk yang didukung oleh elemen Partai Komunis Indonesia, telah santer diberitakan bahwa ada rencana makar terhadap Presiden Soekarno. Yang dicurigai dan dituduh akan melakukan makar waktu itu adalah yang disebut Dewan Jenderal.

Dengan isu rencana makar Dewan Jenderal itulah akhirnya gabungan elemen TNI dan elemen politik melancarkan perebutan kekuasaan atau makar dari tangan pemerintah yang sah. Alasannya adalah untuk mendahului aksi makar yang bakal dilakukan oleh Dewan Jenderal. Cerita selanjutnya setelah terjadinya aksi makar pada 30 September 1965 itu telah

menjadi bagian dari sejarah kita. Segera setelah aksi makar itu, Indonesia tercinta mengalami tragedi besar.

Rakyat Indonesia hari-hari ini akan bertanya kepada pemimpin dan pemerintahnya apakah benar akan ada makar dan siapa yang akan melakukan makar itu? Dari elemen mana? Karena hampir semua aksi makar di mana pun di dunia itu dilakukan oleh elemen militer, pertanyaannya apakah ada ambisi dan rencana dari kalangan TNI untuk melakukan makar? Lantas, kalau tidak ada, dari siapa? Rakyat akan melakukan makarkah?

Kita semua rakyat Indonesia bertanya-tanya dalam ketakutan, ketidakpastian, dan mungkin juga saling curiga satu sama lain. Situasi nasional dikhawatirkan akan menjadi tidak aman karenanya. Dunia pun akan menyoroti, ada apa dengan Indonesia? Yang dikhawatirkan adalah jangan sampai justru isu makar ini akan membuat gejolak di dunia perekonomian. Jika merasa ada ketidakpastian, bahkan kecemasan bakal terjadi krisis politik dan keamanan, pasar bisa nervous dan bereaksi negatif dan akhirnya menjadi sulit untuk dikontrol. Kalau ekonomi jatuh, rakyat jugalah yang menjadi korban.

Siapa bermain

Ada lagi pertanyaan penting. Sinyalemen rencana makar ini apakah benar-benar produk dari lembaga intelijen Indonesia yang resmi atau bukan? Kalau benar, sejauh mana kebenaran dan akuntabilitas dari laporan intelijen itu? Ingat, di seluruh dunia, banyak sekali intelijen yang salah. Karena intelijennya salah, keputusan dan tindakan yang diambil pemerintah juga salah. Atau jangan-jangan ada pihak yang memancing di air keruh. Sengaja mendesain kekacauan atau political chaos untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Kita jadi ingat cara-cara intelijen yang klasik. Ciptakan kondisi, timbulkan musuh dan ancaman, kemudian tumpas. Pihak yang merekayasa dan sekaligus bisa mengatasi itu akhirnya menjadi pahlawan dan mendapatkan posisi politik yang diharapkan. Dalam sejarah di banyak negara, cara murah tapi jahat itu sering dilakukan oleh mereka yang memiliki ambisi politik tinggi, tetapi tak mau melalui jalan demokrasi. Itulah yang dulu kita kenal sebagai Operasi Intelijen yang Hitam.

Mungkin ada yang mencurigai bahwa ada tangan-tangan asing yang bermain. Mereka sengaja membuat negara kita porak poranda. Tapi, negara mana di abad ini yang mau berbuat seperti itu? Adakah indikasi ke arah sana? Kalau memang benar, mengapa pihak intelijen negara tak mampu mengungkap "gerakan" ini? Tidakkah organisasi intelijen itu dibentuk, dididik, dibiayai, dan ditugasi untuk menghadapi musuh negara, bukan menjadi kepanjangan dari kepentingan politik golongan tertentu?

Pesan demokrasi

Kembali pada isu rencana makar tadi, menurut saya ada sebuah pesan yang sangat penting, yaitu pesan demokrasi. Janganlah ada pihak mana pun di negeri ini yang memimpikan untuk mendapatkan kekuasaan politik dengan

cara merebutnya dari tangan yang sah. Tidakkah kita bersepakat untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan politik melalui cara-cara yang demokratis? Ada pemilihan umum yang secara reguler diselenggarakan setiap lima tahun. Itulah amanah konstitusi yang harus kita junjung tinggi dan lakukan.

Kalau ingin menjadi presiden dan wakil presiden, ikutilah proses pemilihan umum. Jangan menjegal dan merebut dari pemilik sahnya di tengah jalan. Apalagi jika melalui makar. Terlebih lagi jika makar itu menggunakan senjata. Senjata itu milik rakyat yang dipinjamkan kepada tentara untuk menghadapi musuh negara, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Bukan untuk kepentingan politik. Kalau itu terjadi, menangis Ibu Pertiwi dan robek demokrasi kita.

Saat ini, rakyat yang tidak selalu berdaya sungguh memerlukan perlindungan, kejelasan, dan kepastian. Rakyat telah memberikan mandatnya kepada para pemimpin dan wakil-wakilnya melalui Pemilu 2014 dan pilkada-pilkada yang telah diselenggarakan. Saatnya para pemimpin membalas jasa rakyat dengan cara memberikan ketenangan, dan bukan sebaliknya, menaburkan ketakutan dan kebencian sesama warga.

Mungkin ada pertanyaan orang-orang yang pasrah, jika pemerintah, TNI, dan Polri telah memiliki posisi untuk memberikan ultimatum kepada mereka yang diendus akan melakukan makar, yang belum tentu rakyat bisa memahaminya, lantas siapa lagi yang bisa menenangkan hati rakyat kita? Mestinya Presiden Jokowilah yang secara moral dan politik wajib melakukannya. Presidenlah yang paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan tidak terjadi di negara ini. Pak Jokowi harus membuat rakyat tenang. Juga dapat menjelaskan situasi yang sebenarnya.

Semoga negeri tercinta ini selalu dilindungi oleh Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga tidak terulang pula sejarah kelam tahun 1965 dulu. Sakitnya di sini, di hati kita semua.

Benny K Harman, Politisi Senior Partai Demokrat

KOMPAS, 24 November 2016

Mungkinkah Memakzulkan Presiden?

Tak lama setelah demonstrasi 4 November 2016 lalu, muncul isu tak sedap di panggung politik Indonesia tentang kemungkinan adanya usaha untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Pemakzulan tidak hanya akan menciptakan instabilitas politik, tetapi juga menjadi preseden buruk di kemudian hari. Pertanyaannya, mungkinkah memakzulkan presiden? Dalam situasi normal, bila tidak ada indikasi presiden melanggar konstitusi seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela (Pasal 7A UUD 1945), manuver politik untuk melengserkan presiden sangat mustahil dilakukan. Apalagi sekarang presiden mendapatkan dukungan penuh dari DPR ataupun dari publik. Saat ini dukungan partai koalisi terhadap pemerintahan Jokowi-JK mencapai 386 kursi atau setara dengan 69%.

Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan presiden sulit dimakzulkan. *Pertama*, kesulitan untuk memenuhi persyaratan dukungan dan persetujuan sidang paripurna DPR. Proses pemakzulan juga sangat panjang dan lama, mulai sidang paripurna terhadap usul pemberhentian presiden, pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Sidang Paripurna MPR yang dihadiri DPR dan DPD terkait *impeachment* presiden.

Pada tahap awal, berdasarkan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945, usul pemberhentian presiden oleh DPR ke MK harus dihadiri setidaknya 2/3 dari jumlah anggota DPR (378 orang), dan disetujui 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir. Dengan kekuatan mayoritas di DPR, menghadirkan sekurang- kurangnya 373 anggota DPR sangat sulit dilakukan, apalagi bila partai koalisi Jokowi-JK yang berjumlah 386 orang memboikot pelaksanaan sidang. Persetujuan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir seperti yang disyaratkan konstitusi juga sangat sulit diwujudkan, kecuali ada anggota koalisi yang membelot.

Pada tahap selanjutnya, meyakinkan hakim konstitusi bahwa presiden diduga telah melanggar konstitusi juga tidak mudah. Hingga sekarang tidak ada alasan konstitusional untuk memakzulkan presiden. Pada tahap akhir, sidang paripurna MPR juga sangat sulit untuk dipenuhi. Sidang tersebut harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR (692 orang), yaitu sekitar 519, dan disetujui oleh 2/3 dari yang hadir. Kedua, kesulitan untuk mendapatkan dukungan publik. Saat ini tingkat dukungan terhadap Jokowi masih tinggi dan kepuasan terhadap Jokowi masih tinggi.

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 lalu, tingkat kepuasan naik dari 50,6% pada tahun pertama menjadi 66,5% pada tahun kedua. Kepuasan terhadap pemerintah pada tahun kedua juga mengalami kenaikan pada semua bidang, baik ekonomi, politik, hukum, dan maritim. Begitu juga dari sisi sosio-demografi, kepuasan terhadap pemerintah merata pada segmen pemilih dari sisi pendidikan, pendapatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin dan Jawa serta luar Jawa.

Dengan dukungan yang masih kuat kepada presiden, usaha untuk melakukan pemakzulan hanya akan menciptakan instabilitas politik dan mengganggu kinerja pemerintahan. *Ketiga*, komitmen militer untuk tidak terlibat politik praktis. Saat ini militer tengah memperkuat pelembagaan organisasi dan meningkatkan profesionalitas anggota. Tantangan geopolitik dan keamanan di kawasan juga cukup tinggi, saya kira militer lebih memilih untuk fokus pada pelembagaan organisasi dan peningkatan kapasitas prajurit. Sejauh ini saya belum melihat adanya keinginan militer untuk melakukan kudeta kepada presiden. Di internal militer, sejauh ini juga tidak ada polarisasi di antara perwira tinggi yang dapat mendukung pelaksanaan kudeta. Keempat, hubungan presiden dengan partai oposisi relatif baik dan mulai harmonis. Beberapa kebijakan pemerintah di parlemen belum ada yang mengalami deadlock. Beberapa waktu lalu, Presiden bahkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, baik yang dilaksanakan di Hambalang, Bogor maupun di Istana Negara.

Wacana melengserkan presiden, saya kira menunjukkan ketidakpercayaan dan ketidaksabaran pada mekanisme dan prosedur dalam berdemokrasi. Sejauh presiden tidak ada indikasi melanggar konstitusi, seperti yang disyaratkan konstitusi, tidak ada alasan yang dapat membenarkan pemakzulan. Dalam sistem presidensial di mana presiden dipilih secara langsung, untuk masa jabatan lima tahun, legitimasi presiden sangat kuat. Presiden tidak mudah diberhentikan di tengah jalan, seperti yang terjadi pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Saya melihat hari ini, ada komitmen dan konsensus bersama elite politik agar presiden dapat menyelesaikan masa jabatannya dalam lima tahun.

Bila masih ada pihak yang menyuarakan isu pemakzulan, saya kira itu suara sumbang. Bila pemakzulan terjadi, itu akan menjadi preseden buruk di kemudian hari dan terlalu mahal harga yang harus dibayar. Selain instabilitas politik di tingkat domestik, investor dari luar negeri juga akan menarik kembali atau menunda investasinya. Apalagi, saat ini pemerintah Indonesia tengah menggenjot investasi luar negeri. Sulitnya mekanisme dan prosedur pemakzulan diharapkan dapat membuat presiden bekerja dengan tenang untuk memajukan kepentingan publik. Untuk itu, kita berharap presiden tidak perlu memiliki kekhawatiran yang berlebihan terkait wacana pemakzulan. Apalagi kita mempunyai preseden baik, di mana Presiden ke- 6 Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menyelesaikan masa jabatannya selama dua periode dengan soft landing.

Soliditas partai koalisi juga penting untuk memastikan agar presiden dapat bekerja dengan tenang. Meskipun begitu, publik dan DPR juga mempunyai kontrol pengawasan terhadap kinerja presiden. DPR dapat menggunakan ketiga haknya (hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat) untuk mempertanyakan kebijakan presiden yang dianggap kurang tepat. Sementara bila publik tidak puas terhadap kinerja presiden, publik dapat menghukumnya dengan tidak memilih partai pendukung presiden atau tidak memilih presiden, bila ia kembali mencalonkan.

Arya Fernandes, Peneliti Departemen Politik dan Hubungan International CSIS

KORAN SINDO, 24 November 2016

Agama dan Pancasila

Pada bulan November ini, ada dua peristiwa penting yang melibatkan ratusan ribu orang di Jakarta. Pertama pada Jumat (4/11) dan kedua pada Sabtu (19/11). Peristiwa pertama mengangkat isu tentang pentingnya pemurnian agama dan peristiwa kedua mengenai pentingnya keberagaman. Di balik peristiwa itu, isu-isu tentang politik uang, auktor intelektualis, desain pengerahan massa, hingga konteks pemilihan kepala daerah merupakan faktor-faktor yang tidak bisa dilepaskan dalam perbincangan publik. Namun, adalah fakta bahwa dua hal itu memberikan sketsa tentang praktik berbangsa kita hari ini. Artinya secara sederhana bisa dipertanyakan, apa untungnya bagi kita? Lebih tepatnya, apa efek dari partisipasi masyarakat bagi pemahaman publik ke depan?

Manusia ketiga

Jika pemahaman adalah realitas yang tersusun dari proses penafsiran atas fakta-fakta, pemahaman publik sebetulnya menuntut keruntutan realitas sosial yang bisa diterima secara luas. Maksudnya, apa yang bisa saya terima bukanlah apa saja yang menurut saya logis, melainkan juga apakah saya percaya atau tidak. Sebab, jika penjelasan luaran didasarkan pada hubungan-hubungan logis-rasional, penjelasan dalaman membutuhkan pemahaman tentang makna simbolik-intuitif. Itulah kenapa fakta-fakta yang sama bisa saja menghasilkan nalar dan keyakinan yang berbeda.

Jika dihadapkan pada pemahaman logis-formal, peristiwa tersebut persis dengan teori yang pernah dijelaskan oleh Ernest Gellner dalam *Postmodernism, Reason and Religion* (1992). Dia menyebut dengan istilah fundamentalisme religius dan fundamentalisme rasional. Ketika masyarakat mengalami masalah tersebut, dia kemudian mengusulkan agar melahirkan ”manusia ketiga”. Iniman usia yang mampu mengembangkan komunikasi secara baik untuk setiap pihak sehingga menemukan ruang dialog untuk berkompromi (1992:96). Katanya, hasil kompromi haruslah berupa kesepakatan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Solusi tersebut ternyata menemui kesulitan karena tidak ada jaminan bahwa ruang dialog tersebut bersih dari kekuasaan dan kepentingan. Di sisi lain, penyerahan masalah kepada institusi publik yang berwenang hanya akan menghasilkan ”permainan baru” dalam upaya penyelesaian masalah.

Sebagai bukti, hasil dari demonstrasi yang melibatkan ratusan ribu orang pada 4 November adalah penetapan status tersangka atas Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (16/11/2016). Kendati demikian, penetapan itu dikatakan oleh pemerintah bukan sebagai ”*keputusan yang mudah*” karena terjadi perdebatan antara penyelidik, saksi ahli, dan sejumlah ahli bahasa.

Pemberi harapan

Berdasarkan kenyataan tersebut, pemahaman logis-formal hanya akan sampai pada permainan logika bahasa. Jika direfleksikan pada realitas yang simbolik-tepercaya, kita membutuhkan pemahaman ideologis yang diyakini sebagai jalan mewujudkan cita-cita bersama. Ada empat fakta sosial ketika pemahaman logis-formal menjadi kesalahpahaman ideologis.

Pertama, keputusan pemerintah mengandung sejumlah kesalahpahaman memaknai praktik berbangsa yang partisipatif. Aparat terkesan ”meredam permasalahan” agar peristiwa satu hari tidak menimbulkan anomi di tengah masyarakat selama berhari-hari. Hal itu sekurang-kurangnya dapat dilihat dari lama waktu antara penetapan tersangka (16/11/2016), demonstrasi (4/11/2016), dan peristiwa di tempat kejadian perkara (29/9/2016).

Kedua, pemerintah melupakan konsep dasar berbangsa sebagaimana termaktub dalam tujuan pembentukan negara ini, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Negeri ini tidak terombang-ambing antara Pancasila dan agama jika pemahaman kebangsaan kita didasari kemampuan memperbaiki diri secara terbuka. Ketika sikap cerdas adalah kemampuan untuk belajar, kehidupan bangsa yang cerdas adalah kehidupan yang bersedia memperbaiki diri secara berkesinambungan, memaafkan, dan mengakui kesalahan.

Ketiga, fakta kedua terjadi karena pemerintah tidak pernah memiliki desain kurikulum ”mencerdaskan kehidupan bangsa” yang dapat diandalkan. Persoalannya, pembelajaran kehidupan bangsa dengan begitu bukanlah semata-mata mata pelajaran ideologis. Pendidikan kewarganegaraan memerlukan sinergi yang efisien dengan mata pelajaran lain, seperti agama dan ilmu-ilmu sosial.

Pembiasaan

Jika merujuk pada rencana pembelajaran, salah satu keluaran dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah adalah pembiasaan kehidupan yang sesuai dengan asas-asas ideologi bangsa. Pembiasaan memerlukan situasi, motivasi, dan keyakinan peserta didik. Karena itu, pendidikan tersebut jelas membutuhkan daya dukung dari disiplin ilmu lain sehingga memperoleh legitimasi yang cukup.

Keempat, pemerintah tidak memiliki media yang efektif dalam pembelajaran menuju kehidupan bangsa yang cerdas. Sebagaimana dimaktub dalam tujuan pendidikan nasional, keluaran dari pembelajaran terhadap anak bangsa adalah sebuah perikehidupan yang dilandasi oleh rasio dan religi demi mewujudkan cita-cita bersama. Hasil itu diejawantahkan dalam desain pembelajaran yang dikenal dengan istilah standar isi, standar proses, dan standar keluaran. Karena itu, tidak sulit menyatakan bahwa menghasilkan kehidupan bangsa yang cerdas berbanding lurus dengan desain pembelajaranyang tepat.

Berdasarkan perspektif itu, fenomena sosial di tengah-tengah masyarakat jelaslah merupakan satu media pembelajaran yang dapat digunakan pemerintah sebagai model praktik berbangsa ke depan. Segala daya upaya dapat diarahkan untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendeknya, kehidupan bangsa adalah sebuah iklim, situasi sosial, pola pikir, atau sikap bersama. Dengan kata lain, sikap bersama yang terbuka, toleran sekaligus religius adalah hasil final dari praktik nyata pembelajaran kehidupan bangsa yang cerdas. Ketika mekanisme dialog macet dan penegakan hukum berakhir pada permainan, sebetulnya pemerintah tidak cerdas dan publik tidak pernah diuntungkan.

Saifur Rohman, Pengajar Program Doktor Ilmu Pendidikan di UN Jakarta

KOMPAS, 24 November 2016

Kekacauan Komunikasi 411

KEKACAUAN komunikasi (*communication breakdown*) terjadi bukan hanya karena salah satu pihak atau keduanya tidak memahami isi pesan (*message*) yang dimaksud pengirimnya atau ketidakpahaman menafsirkan seluruh isi pesan, tapi juga karena isi pesan diterima yang bukan menjadi tujuannya. Contohnya tayangan televisi yang isinya diperuntukkan kalangan dewasa, tetapi ditonton anak-anak di bawah umur. Hal itu sesungguhnya juga berlaku pada kasus iklan mobil mewah, rumah mewah, dan gambaran hidup mewah yang ditangkap kalangan miskin.

Dalam konteks ini, saya menduga kasus penistaan agama yang mendera Gubernur (nonaktif) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mirip-mirip dengan itu. Semula Ahok memakai narasi Al Maidah 51 yang ditujukan kepada para pendukungnya di Kepulauan Seribu untuk menamsilkan bahwa orang-orang di luar yang tidak mendukung dirinya disebabkan adanya pesan dalam ayat tersebut di mana diwajibkan bagi kaum muslim memilih pemimpinnya dari kalangannya sendiri (muslim).

Tentu Ahok mengenal narasi itu dari suatu komunikasi yang entah di mana terjadi dalam kalangan internal (terbatas) kaum muslim. Dalam hal ini Ahok berstatus penerima pesan yang bukan tujuan aslinya. Ahok seperti halnya anak-anak yang menerima pesan orang dewasa menjadi tidak enak hati atau seperti orang miskin yang selalu disuguhi gambaran hidup mewah menjadi "*ngiler*".

Pesan yang sama memungkinkan dipersepsi berbeda sesuai dengan perbedaan entitasnya itu. Di masjid-masjid saya sangat sering mendengar seorang khatib "*mengolok-olok*" agama lain (dengan tujuan memperkuat iman/akidah jamaahnya). Hal tersebut tidak menimbulkan kekacauan dalam komunikasi karena pesannya diterima komunikan yang memang menjadi tujuannya. Pastilah bila di sana ada orang nonmuslim yang mendengar, dia akan mengalami persepsi berbeda. Dia merasa dihina. Padahal, maksud sang khatib bukanlah menghina, melainkan memperkuat kohesivitas kolektif.

Narasi Ahok tentang "*dibohongi pakai Al Maidah 51*" telanjur menyebar begitu luas, jauh melampaui komunikan yang menjadi tujuannya. Dalam alam posmodern seperti sekarang, seperti dikatakan Baudrillard, memang memungkinkan reproduksi informasi dan penyebarluasannya (difusi) seperti gerakan simulakral, begitu cepat dan berlipat-lipat. Efeknya, demo 4 November (demo 411) tak terelakkan.

Meskipun akhirnya Ahok ditetapkan sebagai tersangka, kekacauan komunikasi tidak lantas terhenti. Justru membelah opini publik di masyarakat menjadi seperti serpihan piring pecah. Angka 411 dikembangkan "lawan" Ahok sebagai tulisan "Allah", yang diasosiasikan bahwa demo tersebut mendapat pertolongan dari Tuhan. Sementara bagi pendukung Ahok, angka itu adalah malapetaka politik. Media massa ternyata tidak

menghentikan pemberitaan kasus tersebut karena memang punya *magnitude* yang besar dalam nilai jurnalistik (*news values*).

Tidak banyak publik yang menyadari bahwa dalam pemberitaan selalu ada bingkai (*framing*) sesuai dengan politik redaksionalnya. Padahal, kita tahu, pada media-media besar (televisi), ada relasi yang unik antara pemiliknya dan dukungan politik yang konkret terhadap Ahok.

Frekuensi dan intensitas terhadap pemberitaan pemeriksaan Ahok oleh Bareskrim Polri setelah berstatus tersangka membelah persepsi. Bagi yang kontra dengan Ahok, pemberitaan itu dimaknai sebagai penguatan terhadap kepuasan. Bagi pendukung Ahok, pemberitaan tersebut bisa dimaknai justru Ahok-lah yang sekarang sedang dinistakan media sehingga menimbulkan kesan sebagai individu yang sedang "*dikuyo-kuyo*" (dianiaya). Sedangkan bagi yang dukungan politiknya masih mengambang, bergantung pada keyakinan yang terbentuk. Bisa mendukung Ahok, bisa menolak, tapi bisa juga tak bersikap (bibit golput dalam pilkada DKI Jakarta).

Apa yang dilakukan Presiden Jokowi menjelang maupun sesudah 411 turut menyumbang kekacauan komunikasi. Kunjungan Jokowi ke markas TNI dan Brimob yang gesturnya ditayangkan berulang-ulang di TV dapat dimaknai: maksud Jokowi barangkali untuk menunjukkan bahwa dirinya masih eksis. Sebagai presiden maupun sebagai panglima tertinggi. Namun dapat dimaknai berbeda oleh pihak lain. Gestur Jokowi seperti hendak mengirimkan pesan bahwa dirinya siap mengerahkan militer bila terjadi "*makar*". Seolah-olah pemerintah sudah punya predisposisi bahwa demo 411 mengarah pada tampuk pemerintahannya. Pesan itu bisa menjadi liar ketika ada yang menafsirkan sebagai (maaf) "*politik adu domba*".

Kekacauan komunikasi berikutnya, Jokowi kurang jeli mengidentifikasi siapa gerangan para pendemo 411. Jokowi mengunjungi para ulama yang bukan bagian substantif inisiator unjuk rasa tersebut. Kunjungan Jokowi ke pimpinan NU dan Muhammadiyah jelas tidak tepat. Sebab, dua organisasi itu sebelum demo tidak menginstruksi anggotanya untuk turun ke jalan. Inisiator demo 411 justru berasal dari kalangan muslim yang secara ekonomi masuk menengah perkotaan, terpelajar, dan selama ini dimarginalkan pemerintah dan institusi sosial keagamaan yang mapan.

Mengapa kalangan tersebut tidak "disapa" presiden? Pesan Jokowi untuk tidak berdemo lagi mungkin benar karena menghabiskan energi dan berbahaya bila disusupi anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab. Namun, pesannya tertuju kepada penerima pesan (komunikan) yang salah. Jadi, potensi kekacauan komunikasinya lebih besar. Wajar bila ada inisiasi akan ada demo lagi. Ayo berkomunikasilah dengan khalayak yang tepat. Masih ada waktu….!

Redi Panuju, Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi Unitomo Surabaya

JAWA POS, 24 November 2016

Potret Negara Hukum

Kasus yang membelit Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ini adalah studi kasus yang menarik tentang negara hukum yang dalam bahasa asingnya disebut sebagai *rechstaat* atau *state based on rule of law*. Ada perbedaan dalam kedua terminologi di atas, tetapi tulisan ini berasumsi bahwa negara hukum adalah negara di mana supremasi hukum itu menjadi dasar, berlaku untuk semua, tidak diskriminatif dan memberikan keadilan. Untuk itu, berbagai peraturan perundangan diberlakukan bersamaan dengan yurisprudensi dan doktrin hukum yang berlaku. Semua prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal juga dijadikan rujukan di mana perlu. Pokoknya, dalam negara hukum berlaku adagium "*hukum adalah panglima*".

Dalam kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, konsep negara hukum itu tidak sepenuhnya dimengerti oleh banyak kalangan, terutama yang menentang Ahok. Secara sistematis Ahok sudah dinyatakan bersalah. Dan kalau kita membaca media sosial, maka kita akan menemukan banyak sekali pernyataan yang sudah mengambil hukum ke tangan mereka. Pokoknya Ahok sudah bersalah meski tanpa proses peradilan yang menyatakan dia bersalah. Di sini asas praduga tidak bersalah tak lagi diakui keberadaannya. Konsep due process of law sama sekali tak hadir.

Laporan kepada pihak kepolisian sudah dimasukkan bahwa Ahok dituduh melakukan penistaan agama. Pihak kepolisian sesungguhnya sedang melakukan penyelidikan dengan memanggil banyak pihak yang diklasifikasikan sebagai saksi fakta dan ahli. Namun, pihak kepolisian dianggap lamban dan dicurigai melindungi terlapor Ahok. Lalu sebuah demonstrasi besar dengan massa ratusan ribu orang terjadi beberapa waktu lalu. Di situ tuntutan kembali disuarakan dengan lantang bahwa Ahok harus dinyatakan sebagai tersangka dan segera ditahan. Sepertinya proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanyalah proforma karena status Ahok sebagai tersangka sudah merupakan harga mati dan Ahok juga mesti ditahan. Ahok juga harus dinyatakan tidak bisa mengikuti pilkada di Jakarta.

Dengan segala hormat terhadap suara-suara yang menolak Ahok dan menuduhnya melakukan penistaan agama, saya tetap berpendapat bahwa proses hukum harus dilalui sesuai dengan praktik hukum acara pidana yang berlaku. Ahok mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah berdasar asas praduga tak bersalah.

Dia berhak mendapatkan semua hak hukumnya untuk membela dirinya di hadapan penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim. Dia juga berhak membela dirinya di hadapan publik. Namun, Ahok seperti kehilangan semua haknya, padahal dia adalah juga warga negara, subyek hukum, yang hak-haknya dijamin oleh peraturan perundangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia termasuk Deklarasi dan Kovenan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Hormati proses hukum

Sekarang Ahok sudah dinyatakan sebagai tersangka berdasar gelar perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara terbuka. Gelar perkara ini masih dalam tingkat penyelidikan, sesuatu hal yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, karena pihak kepolisian menghendaki keterbukaan dan akuntabilitas, gelar perkara ini diadakan walaupun kesan yang timbul adalah bahwa gelar perkara ini dilakukan karena tekanan yang begitu besar pada pihak kepolisian.

Hanya saja, apakah gelar perkara pada tingkat penyelidikan dengan menghadirkan semua saksi fakta, ahli, dan para pihak tak menggerus independensi dan imparsialitas proses hukum itu sendiri? Siapa yang menjamin bahwa saksi fakta dan ahli tak mengubah kesaksian dan keterangan ahlinya nanti ketika penyidikan dimulai? Ketika pengadilan dimulai? Sukar untuk membantah bahwa para saksi fakta dan ahli setelah mengikuti gelar perkara akan menimbang kembali kesaksian dan keterangan ahli mereka karena hendak menyelamatkan diri mereka dari tekanan opini publik yang menyorot semua proses penyidikan tersebut. Siapa yang berani menjamin bahwa para saksi fakta dan ahli tidak akan diintervensi oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan untuk menghukum atau membebaskan Ahok?

Dengan kata lain, proses hukum kasus Ahok sangat rentan terhadap intervensi yang pada gilirannya akan memperkecil ruang bagi penegakan hukum dan penciptaan keadilan. Peradilan terhadap Ahok bisa-bisa menjadi peradilan opini publik. Dalam negara hukum, proses peradilan merupakan proses yang bebas dan merdeka dari semua bentuk campur tangan kekuasaan ataupun keuangan. Keberadaan independency of judiciary adalah salah satu persyaratan negara hukum.

Penanganan kasus Ahok memberikan alasan buat kita semua khawatir bahwa harga mati Ahok sudah menista agama dan harus dihukum penjara akan membuat majelis hakim mempunyai ruang yang sempit dan kehilangan kebebasan dan kemerdekaannya. Apalagi, opini publik dan demonstrasi kalau diadakan pastilah akan membuat lutut para hakim gemetar. Nalar bisa jadi akan menyerah pada tekanan.

Penulis tak mempersoalkan proses hukum terhadap Ahok karena proses hukum ini sesuatu yang harus dihadapi oleh Ahok. Biarkan proses hukum itu berjalan sesuai asas-asas hukum acara pidana yang berlaku. Namun, hormati due process of law, hormati hak asasi manusia, dan jauhkan intervensi dari mana pun. Apa pun hasil proses hukum nantinya semua pihak mesti menerima dengan lapang dada meski tak menerima substansi putusan tersebut. Inilah esensi negara hukum.

Todung Mulya Lubis, Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia;

KOMPAS, 25 November 2016

Mengerti Kebencian

Kebencian itu apa? Apa yang terjadi dalam pribadi yang membenci? Mengapa membenci? Presiden Joko Widodo pun menyampaikan keprihatinan tentang tersebar luasnya ujaran kebencian—hujatan, ejekan, makian, dan fitnah—dalam media sosial (Kompas, 13/11). Kebencian di sana kian bergunung-gunung karena dalam menyikapi sebuah isu, netizen dengan pendapat yang sama mengelompok dalam grupnya sendiri tanpa bersentuhan pandangan dengan grup lain yang memiliki pendapat berbeda. Dalam setiap kelompok mereka, netizen beramai-ramai menghujat kelompok lain (Kompas, 20/11).

Kebencian yang biasanya jadi tabu dan karena itu menjadi tak tampak jelas, bahkan cenderung misterius, kini tampil telanjang, tanpa tedeng aling-aling. Namun, membenci dapat berujung meremukkan, menghancurkan, mematikan, memusnahkan. Maka, tatkala kebencian ingar- bingar di tengah percakapan warga, bangsa sungguh berada di bawah bayang-bayang keremukan.

Naluri

Semula adalah naluri, instinct. Sigmund Freud (1915) menyebutkan ”naluri menghindari kematian” dan ”*naluri menumbuhkembangkan kehidupan*”. Kedua insting itu, tanpa dipelajari, sungguh hadir untuk mempertahankan hidup. Maka, ketika manusia mencintai, dia dibayang-bayangi membenci pesaingnya dalam mencintai, yang ia fantasikan bakal merebut obyek cintanya. Buat manusia, hadirnya cinta sekaligus adanya benci. Cinta dan benci adalah dua hal terpisah tetapi hadir bersama-sama. Bahkan, pada titik-titik terawal kemunculannya, kebencian justru ditujukan pada obyek yang sedemikian dicintai karena sang obyek dicemburui bakal membiarkan si pesaing mencintainya. Ada kemenduaan, ambivalensi, cinta di satu sisi dan benci di sisi lain; ini adalah sebuah kebercabangan, dan bisa jadi, makin cinta berarti kian benci.

Psikoanalis Donald Woods Winnicott (1988) membayangkan seorang anak yang terus mencorati kertas putih di hadapannya dengan pensil. Betapa kacaunya coret-mencoret itu, kadang melewati tepian kertas pula. Namun, di tengah terus berlangsungnya kegiatan mencoret-coret itu, si anak bertumbuh kembang dan pada akhirnya tangan dan jari jemarinya memadukan ujung awal dari coretannya dengan ujung akhirnya. Ia membentuk sebuah lingkaran, yang pada bentangan tiga dimensi mewakili sebuah globe atau buana.

Lingkaran ataupun buana itu seperti mewakili sebuah keberadaan dengan membran pembatas yang mengelilingi seluruh dirinya. Dan, sekarang, setelah diri menjadi berselaput pembatas, lantas ada ”yang di dalam” dan ”yang di luar”, sebuah ”aku” dan suatu ”bukan-aku”, ada ”aku” dan terdapat pula ”liyan”.

Dalam aku terdapat naluri-naluri itu, yang sebagian besar adalah agresif dan seksual, yang bermaksud menyelamatkan diri aku. Kalau perlu dengan merusak dan membenci apa pun. Namun, tatkala aku telah bersanding dengan liyan, ketika ada aku dan terdapat pula liyan, aku mulai tergelitik bertanggung jawab atas insting agresif dan seksualnya yang menggairahkan, tetapi meremukkan dan penuh kebencian.

Dalam naungan tanggung jawab yang bertumbuh kembang ini, dalam ”aku” merebak pula rasa bersalah, keadaan depresif yang sehat, yang mendorongnya untuk menghayati betapa ”liyan” jadi korban keganasan naluri-nalurinya. Kini kehidupan ”aku” mampu mengintegrasikan atau menyatupadukan cinta-dan-benci (bukan memenduakan, tidak mengambivalenkan). Ambivalensi diganti integrasi. Yang ada bukanlah cinta atau benci, melainkan cinta-dan-benci. Kebencian tidak lagi liar sendirian, tetapi dijinakkan oleh cinta. Barangkali inilah titik-titik awal sekaligus butir-butir mendasar dari tenggang rasa, toleransi. Dan, toleransi itu menerjalinkan ”aku” (diriku sendiri) dan ”liyan” (diri lain yang berbeda dari diriku sendiri).

Psikoanalis Jessica Benjamin melihat betapa pribadi manusia hanya bisa bertumbuh dengan baik jika ia diperlakukan orang- orang lain sebagai subyek (yang memiliki kemandirian). Namun, mengalami diri sendiri sebagai subjek hanya dimungkinkan jika diri sendiri itu melihat dan mengalami orang-orang lain sebagai subyek juga. Sebab, hanya orang lain yang adalah subyek pulalah yang dapat memberikan pengalaman bagi diri sendiri sebagai subyek. Penghayatan diri sebagai subyek tidak pernah dapat dilepaskan dari mengalami, mengakui, dan memperlakukan orang lain sebagai subyek pula.

Siapakah liyan itu? Ia adalah orang lain atau pihak lain yang pada suatu saat bisa menuruti apa yang diinginkan aku, tetapi bisa pula pada waktu yang lain sama sekali tidak mengiyakan apa yang dimaui oleh aku. Maka, hubungan subyek-dan-subyek itu pun meniscayakan tenggang rasa. Hubungan intersubyek itu integral dengan toleransi.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan di bagian awal, kebencian tidak bisa dilarang untuk ada, tetapi bisa diupayakan untuk tidak jadi liar dalam agresi dan destruksi yang meluluhlantakkan hidup. Kebencian perlu berintegrasi dengan kecintaan sehingga manusia tidak digelantungi kemenduaan cinta dan benci. Benci terhadap mereka yang berbeda dari diri sendiri, benci terhadap mereka yang tidak mau mengikuti keinginan diri sendiri, barangkali memang manusiawi belaka. Namun, ketika diri sendiri perlu bertumbuh kembang, ia tidak bisa lagi mengingkari bahwa ia adalah subyek yang memerlukan liyan yang juga subyek. Pengakuan, penghayatan, dan pemerlakuan liyan sebagai subyek itulah yang melahirkan dan menumbuhkembangkan toleransi aku dan liyan.

Mendengar dan berbagi

Dalam tenggang rasa itu kebencian tidak musnah, tetapi dijinakkan dalam cinta. Kebencian tidak lagi liar sendirian, tetapi diresapi kecintaan. Agresi

tidak lagi menghancurkan, tetapi terwujud dalam ketegasan dan gigihnya perundingan, yang melahirkan nilai-nilai baru, yaitu mendengarkan dan berbagi. Barangkali inilah ”keanekaragaman, keberbedaan, bahkan kebertentangan, tetapi yang menyatu padu”. Liyan tidak pernah bisa dan tak akan boleh diperlakukan sebagai obyek atau sasaran, karena, sebagaimana diri sendiri atau aku, setiap liyan adalah subyek yang berkemandirian.

Ada kalanya manusia sebegitu agresif, menyerang, ingin memusnahkan liyan dan segala yang ada di luar dirinya. Mungkin inilah keadaan kejiwaan yang oleh psikoanalis Melanie Klein (1932, 1934) disebut sebagai posisi skizoid paranoid. Namun, wajarnya, sang manusia pun mampu bergeser ke posisi lain, yang disebut posisi depresif. Dalam keadaan kejiwaan terakhir itu, manusia menghayati rasa bersalah, ia mawas diri, dan karenanya jadi bertanggung jawab dalam menggunakan kendara agresifnya.

Tanggung jawab itu memberinya pengertian bahwa agresi tidak boleh meremukkan, merusakkan, atau memusnahkan. Agresi boleh ada dalam ketegasan nir-kekerasan dan kegigihan berunding, yang kemudian justru meningkatkan kemampuan untuk mendengarkan dan berbagi. Sayang sekali, kedua nilai inilah (mendengarkan dengan saksama dan berbagi di antara sesama manusia) yang tidak bertumbuh di antara kelompok berpandangan diametral dalam media sosial.

Limas Sutanto, Psikiater Konsultan Psikoterapi; Tinggal di Malang

KOMPAS, 25 November 2016

Nasihat Enteng untuk Jokowi

Sedikit banyak, masyarakat yang pada 411 melakukan demo agar penegakan hukum dan keadilan atas skandal Ahok di Kepulauan Seribu, merasa lumayan lega begitu Ahok dijadikan tersangka. Namun, dalam pengamatan saya, yang sejak semula ikut demo dan aksi damai sejak 14 Oktober, ada pertanyaan besar. Mengapa Ahok tetap bebas dan masih bisa mengumbar pernyataan yang kian memanaskan suasana?

Sebagai contoh pernyataannya bahwa Indonesia belum utuh dan Pancasila belum benar-benar berfungsi bila minoritas belum jadi presiden. Juga celotehannya kalau sampai masuk penjara, justru dia akan jadi presiden seperti halnya Nelson Mandela di Afrika Selatan. Bahkan, Ahok menuduh setiap pendemo 411 dibayar Rp 500 ribu. Dia makin ngawur.

Bung Jokowi, mohon jangan menyalahkan para pendemo bila ada kesan kurang percaya pada pemerintahan Anda dalam menegakkan hukum dan keadilan pada Ahok. Anda sendiri sangat terlambat mengambil sikap tegas pada Ahok dan baru bersuara pada dini hari, 5 November di Istana. Setelah Anda menyaksikan gelombang unjuk rasa yang terbesar dan paling merata sepanjang sejarah negara kita.

Bung Jokowi, kita mundur sebentar. Ketika lebih dari dua juta hektare hutan kita dibakar oleh puluhan perusahaan tahun lalu, Anda bereaksi keras karena menyadari hutan adalah tabungan kehidupan masa depan bagi seluruh umat manusia. Negara pun diperkirakan rugi Rp 200 triliun, Anda mengatakan agar perusahaan pembakar hutan dicabut izinnya dan diproses secara hukum.

"*Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa tindakan hukum akan diambil dengan sangat tegas*." Kemudian, "*Jangan hanya menyasar rakyat biasa, tetapi harus juga tegas dan keras pada perusahaan yang menyuruh membakar*."

Kenyataannya, sepanjang 2016, hanya ada satu perusahaan pembakar hutan jadi tersangka. Padahal, bukan kerugian materiil saja yang harus diingat, ribuan anak bangsa yang sesak saluran pernapasannya, apalagi anak-anak, sesungguhnya merupakan kejahatan kemanusiaan.

Kini, puluhan perusahaan yang diduga keras terlibat pembakaran hutan itu sudah mengantongi SP3 atau surat perintah penghentian penyelidikan dari kepolisian. Mereka tersenyum dan sudah berjalan lenggang kangkung, sementara kebanyakan rakyat hidup makin kembang-kempis. Kita jadi ingat omongan Ahok bahwa Anda tidak mungkin jadi presiden tanpa bantuan para pengusaha.

Bung Jokowi, tulisan ini tidak ada unsur SARA-nya. Bila ada orang menghina suku, agama, ras, atau golongan tertentu, itu menyangkut SARA. Namun, menyebut nama orang karena dia melakukan kejahatan, apa pun suku, agama, ras, dan golongannya justru kita perlukan.

Bila SARA menjadi penghalang orang menyebut pelaku kejahatan karena takut menyinggung SARA tertentu, SARA semakin jadi momok penegak hukum dan keadilan. Masyarakat kita menjadi munafik karena pelaku kejahatan selalu melenggang bebas, tidak bisa dibuka karena takut menyinggung SARA.

Para cukong dewasa ini sudah sangat percaya diri dan sudah tinggi waktunya menggenggam ekonomi dan politik sekaligus. Mereka bahkan menuduh Letjen TNI Johanes Suryo Prabowo sebagai rasis gara-gara menasihati, "Bila Cina sedang berkuasa, jangan sok jago".

Walaupun mereka sudah menggenggam kekuatan ekonomi nyaris sempurna, tetapi masih sesak napas, masih terkungkung dalam ghetto ekonomi. Mereka bertanya apa salahnya bila mereka juga jadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, dan lainnya.

Sekelebatan aspirasi mereka itu demokratis. Namun jangan lupa, Bung Jokowi, seorang Milton Friedman, dedengkot ekonomi neolib saja memperingatkan lewat pendapatnya, "*The combination of economic and political power in the same hands is a sure recipe for tyrany*."

Bung Jokowi, mengapa saya sampaikan hal ini karena saya yakin kasus Ahok ini tidak berdiri sendiri. Ahok ini sebuah mata rantai kekuatan ekonomi yang sudah bercokol di Indonesia dan ingin menelan lebih jauh seluruh kedaulatan kita.

Tentu Anda lebih paham dari saya karena Anda di pusaran kekuatan itu sehingga kami paham bila Anda menghadapi pilihan sulit dalam penuntasan skandal Ahok. Untuk menyebut langsung nama Basuki Tjahaja Purnama saja, Anda perlu jeda 15 detik karena beban psikis yang Anda alami. Itu terekam di media sosial ketika Anda berkunjung ke PP Muhammadiyah.

Akhirnya, saya ingin sampaikan nasihat entheng-enthengan untuk Anda. Jangan Anda pernah berilusi satu detik pun, Anda mampu meletakkan TNI dan Polri berhadap-hadapan dengan rakyat Indonesia sendiri. Sepekan yang lalu, Anda bersafari sangat intensif ke markas-markas Kopassus, Kostrad, Brimob, Marinir, juga ke PBNU, PP Muhammadiyah, PKB, PPP, PAN, dan lainnya.

Ada pernyataan Anda yang mengagetkan bahwa selaku Presiden, Anda dapat menggerakkan Kopassus sebagai pasukan elite cadangan dalam keadaan darurat. Karena safari intensif Anda terjadi setelah demo 411, banyak yang membaca dengan tafsir ganda. Kalau ada musuh menyerang negara kita atau kalau ada pemberontakan separatis, pernyataan Anda itu sangat oke.

Namun, kalau demo menuntut penegakan hukum dan keadilan, secara tersirat Anda kategorikan bisa menjadi bahaya (emergency) yang harus dihadapi dengan senjata TNI kita, Anda, maaf, salah besar. Salah total.

TNI, dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marganya, Polri dengan Tribrata dan Catur Setyanya hanya setia pada bangsa, negara, dan pemerintah. Namun, loyalitas pada pemerintah ini tentu dengan catatan selama pemerintah masih konsisten dalam rel kepentingan bangsa dan negara. Bukan terseret pada kepentingan kelompok, apalagi kepentingan aseng dan asing.

Bung Jokowi, seragam gagah yang dipakai seluruh prajurit TNI, alutsista yang cukup mahal untuk memelihara integritas teritorial Indonesia, dan seluruh pendanaan latihan dan pendidikan TNI berasal dari uang rakyat.

Demikian juga yang berkaitan dengan kepolisian kita. Bahkan, pesawat kepresidenan, helikopter yang membawa Anda dari satu tempat ke tempat lain, seluruh anggota paspampres dan biaya apa saja yang dibutuhkan seorang presiden berasal dari uang rakyat.

Rakyat Indonesia, bukan rakyat negara lain. Karena itu, berpihaklah pada rakyat secara adil, termasuk umat Islam yang merupakan komponen terbesar rakyat Indonesia. Hari-hari ini lewat proses hukum, pemerintah segera menuntaskan dugaan penistaan Alquran dan ulama oleh Ahok. Di atas pasal dan ayat KUHP dan UU, rasa keadilan masyarakat tentu jauh lebih mendasar.

Nasihat saya, jangan gegabah. Unggulkan kepentingan bangsa dan rakyat sendiri. Apalagi, melancarkan tuduhan ada aktor politik penunggang demo 411, ada rencana makar menjelang 212, diperparah lagi oleh JK dengan menyatakan safari kilat Anda pasca-411 bukan karena akan ada kudeta (tentu tambah memperunyam suasana). Akibatnya, sumber masalah jadi makin tertutupi.

Muncullah isu ada gerakan massa mau mengganti dasar negara dan merobohkan Jokowi, ada kekuatan anti-Bhineka Tunggal Ika, ada aspirasi ISIS di demo 411, ada penggalangan people power ala 1998, dan berbagai isu lain yang menyeramkan.

Masalah pokok kita adalah skandal Ahokk. Titik! Selesaikan secara cepat, tegas, transparan, dan adil sesuai janji Anda. Jangan melebar, jangan bermain api. Bung Jokowi, jadilah bagian dari solusi. Jangan menjadi bagian dari masalah. Bravo!

M Amien Rais, Mantan Ketua MPR

REPUBLIKA, 25 November 2016

Ujian Demokrasi Pasca-Aksi 4 November

Salah satu cara menjelaskan dinamika politik yang berkembang pascaaksi 4 November 2016 berikut ketegangannya adalah melalui pendekatan sistem. Pendekatan ini bisa rumit atau kompleks, tetapi secara sederhana dapat diringkas oleh adanya aksi-aksi beberapa kelompok kepentingan di ranah informal sebagai masukan penentu kebijakan di ranah formal. Resultan dari semua proses itu menjadi realitas politik baru yang terus bergerak dinamis, menuju titik kesetimbangannya. Kelompok-kelompok kepentingan yang menggelar aksi 4 November pada hakikatnya disatukan oleh isu bersama, yakni dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang terkesan direspons lambat oleh aparat. Mereka lantas menggumpal menjadi kelompok penekan (*pressure group*) yang demikian fenomenal.

Selang dua minggu setelah aksi tersebut, pihak kepolisian menetapkan Ahok sebagai tersangka. Tapi, tampaknya tekanan belum sepenuhnya mereda, terutama dalam kaitannya dengan mengapa Ahok tidak ditahan. Hal ini dikaitkannya dengan masalah keadilan. Mereka merencanakan aksi 2 Desember 2016. Respons balik terhadap aksi 4 November pun cukup marak. Presiden Jokowi yang tidak menemui massa aksi melakukan safari ke organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam, terutama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Komunikasi politik dengan para ulama diperluas, termasuk yang digalang partai-partai politik.

Presiden juga berkunjung ke kalangan tentara dan kepolisian. Pun mengundang elite-elite partai ke Istana, termasuk Prabowo Subianto yang partainya berada di luar pemerintahan. Isu yang selalu ditekankan adalah menjaga persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika. Tampaknya, Presiden hendak memperkuat komunikasi politik dengan ulama dan kekuatan pendukungnya. Ekses-ekses politik pasca-aksi 4 November hendak diantisipasinya. Tekanan-tekanan lanjutan yang dilempar oleh elemen-elemen tertentu pascaaksi 4 November juga memperoleh reaksi dari Kapolri, Panglima TNI, dan Menko Polhukam. Mereka mencoba meyakinkan bahwa aksi-aksi lanjutan pascapenetapan Ahok sebagai tersangka tidak perlu dilakukan, karena proses hukum telah dilakukan. Yang menarik, diingatkan aksi pun bisa berubah makar. Kalau itu terjadi, aparat kepolisian dan militer siap bertindak tegas. Polisi berdalih sinyalemen itu dalam rangka pencegahan, kendati menuai kritik membatasi kebebasan berdemokrasi.

Di ranah non-elite, reaksi juga muncul dari aksi-aksi yang mengesankan sebagai tandingan. Secara massa, jumlahnya tidak sebanding dengan banyaknya peserta aksi 4 November. Tetapi, secara opini aksi-aksi yang mengedepankan jargon Bhinneka Tunggal Ika tersebut tak dapat diabaikan. Beberapa media massa dalam dan luar negeri pun terkesan berupaya menampilkannya sebanding dengan aksi 4 November.

Menilik isu dan jargon yang berkembang yang mengemuka sekarang seolah-olah tengah muncul polarisasi dalam masyarakat yang tak terelakkan. Yang satu "*kelompok Islam*", satunya lagi "*Bhinneka Tunggal Ika*". Generalisasi

demikian, sadar atau tidak, naif dan berbahaya. Apalagi kalau ada kesan "*kelompok Islam*" identik dengan mereka yang menghendaki makar. Harus ada klarifikasi yang mampu menjelaskan dalam konteks apa isu-isu tersebut mengemuka.

Dalam ujaran-ujaran Presiden, pejabat pemerintahan, kepolisian dan yang lain, terkesan kuat, maksudnya Bhinneka Tunggal Ika tengah dalam ancaman politik identitas. Kelompok yang mengedepankan identitasnya secara eksklusif berarti menafikan realitas pluralisme, mengancam bangsa, dan Pancasila. Maka, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, pun hadir sebagai tameng, sekaligus alat pukul terhadap mereka yang ditengarai mengedepankan politik identitas yang destruktif.

Hari-hari ini pemerintah tengah diuji kemampuannya, kalau bukan kecanggihan komunikasi politiknya. Ikhtiar Presiden Jokowi membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak seharusnya bermuara pada meningkatnya kepercayaan (trust) sebanyak mungkin kelompok masyarakat dengan beragam kepentingan.

Presiden berada pada posisi politik yang kuat dan tidak boleh dikesankan kurang percaya diri dalam merespons perkembangan politik belakangan ini. Manajemen komunikasi politik pemerintah harus efektif, justru karena pendekatannya yang inklusif dan diterima. Sehingga, semua pihak merasa dirangkul, bukan ditinggalkan atau merasa dikonfrontasikan. Ikhtiar membangun kepercayaan publik secara luas, tidak saja menjadi tugas pemerintah, tetapi juga elite-elite terkait, termasuk partai-partai politik.

Kalau partai efektif, maka isu-isu yang berkembang dalam masyarakat cukup dipercayakan kepada mereka. Sayangnya, fungsi penyerapan aspirasi dan pengambilalihan isu-isu strategis kalau bukan krusial oleh partai-partai dalam maknanya yang lebih positif dalam manajemen konflik, tidak terjadi. Seolah-olah isu-isu pokok yang disuarakan para kelompok penekan terpisah dari eksistensi dan kepentingan partai-partai. Fenomena ini seolah menegaskan kegagalan partai dalam sistem.

Hal sedemikian cukup menggelisahkan, mengingat ketika semakin banyak isu politik muncul dari kelompok kepentingan dan penekan, potensi konflik semakin meluas dengan melibatkan elite dan massa. Di atas semua itu, hari-hari ini demokrasi kita tengah diuji, bagaimana antar-elite yang berseberangan secara isu mampu saling merespons secara elegan dan damai. Pun, bagaimana mereka mampu meredakan situasi politik yang menegangkan melalui jalan keluar yang bijak.

Dari sisi cara pemerintah dan aparat mengatasi isu dan aksi atau unjuk rasa, demokrasi harus menjadi ukuran. Disisi lain, kelompok-kelompok penekan juga tidak boleh memaksakan kehendak dan naif. Aturannya jelas, manakala terjadi pelanggaran hukum, siapa pun bisa ditindak. Aparat memang sering dilematis, tetapi jangan sampai dikesankan bahwa mereka sekadar alat kekuasaan politik. Tantangan bangsa semakin tidak mudah ke depan. Persaingan global tak terelakkan.

Dalam rumus neo-developmentalis, stabilitas politik diperlukan untuk menjamin pembangunan bidang ekonomi. Tapi tentu kini caranya berbeda dengan di masa lalu yang represif dan monolitik. Tantangan pemerintah dalam bidang politik adalah membuat stabilitas yang terjadi kuat dalam paradigma demokrasi. Demokrasi membutuhkan daya persuasi yang kuat untuk membangun konsensus dalam bingkai kebersamaan. Ia membutuhkan kesabaran, bukan jalan pintas melalui ancaman-ancaman.

Dari sisi kelompok penekan yang tak terelakkan membawa simbol-simbol Islam juga harus mempertimbangkan hal-hal yang membuat dunia menilai demokrasi dapat berkembang baik di Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar. Mereka juga ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya proses demokrasi yang substansial dan bermaslahat, tak sekadar prosedural. Mayoritas umat Islam Indonesia tentu bukan kelompok anti, atau bahkan tak paham, demokrasi. Demokrasi Indonesia tidak boleh didegradasi oleh tindakan-tindakan yang fatalistik, justru oleh penekanan identitas kelompok yang berlebihan.

Di tengah ingar-bingar politik kita dewasa ini, sesungguhnya banyak isu bersama yang perlu memperoleh perhatian, terutama soal kemandirian dan kedaulatan bangsa. Ke depan kita harus keluar sebagai bangsa yang mandiri, maju, dan bermartabat.

Semoga resultannya akan ke sana, setelah semua pihak mampu mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa politik saat ini.

M Alfan Alfian, Dosen Pascasarjana Ilmu Politik UnNas Jakarta

KORAN SINDO, 25 November 2016

Beragama Bukan untuk Bikin Stres

Ada seorang teman bercerita, konon katanya, dia punya masalah dengan mertuanya gara-gara ribut kubu Ahok dan Anti-Ahok. Anggap saja begini: Ia dan suaminya adalah golongan yang menganggap Ahok tidak menista Alquran, sedangkan mertuanya adalah kubu yang menuntut kasus mulut comel Ahok diusut hingga tuntas.

Dua kubu ini berdebat seru di grup-grup whatsapp serta akun-akun sosial media mereka perihal alur kasus di Kepulauan Seribu, aksi bela Islam jilid pertama, jilid kedua hingga jilid-jilid yang akan datang. Lama kelamaan, tanpa mereka sadari, debat tekstual itu makin panas. Kebetulan, baik menantu maupun mertua sama-sama terpelajar pula. Mereka berdua merasa punya sikap beragama yang dilandasi konsekuensi logis dan pijakan perspektif yang kuat. Saya pun menjawab dengan serius,"*Kalau mau berantem itu soal diskusi mau beli tanah atau debat harga rumah aja kan lebih keren. Berantem kok gara-gara Ahok…*"

Rasa-rasanya, sejak akun sosmed kita jarang adem ayem pasca pilpres dua tahun lalu, fenomena semacam ini tidak ada habisnya. Coba diingat-ingat, siapa di antara kita yang belum baikan sama sahabat gara-gara beda pilihan calon presiden, padahal Jokowi sama Prabowo sendiri sudah kencan berkali-kali mulai dari nyari kodok hingga naik kuda. Atau, siapa diantara kita yang sering membatin dalam hatinya semacam ini: "*Si A itu sebetulnya baik sih, dia temanku sejak kecil, dia suka membantu orang lain…tapi kok sekarang jadi buzzer politik ya…tapi kok sekarang jadi bala jonru ya… tapi kok sekarang posting di akunnya bego banget ya…*". Dih, hayo, ternyata nggak saya aja!

Yang lagi kekinian, adalah soal tiga anak muda yang akhirnya datang menemui Gus Mus ke Pondok Raudhatut Thalibien, Leteh, Rembang, sebab mereka akhirnya kerepotan melihat reaksi linimasa atas ulahnya mengatakan "*Bid'ah Ndasmu*!" langsung ke akun twitter Abah Mustofa Bisri. Kalau mau adil, melontar pisuhan ke orang tua, siapapun itu, mau ulama atau bukan, ya memang kurang layak menurut adat ketimuran sih. Apalagi, jika pisuhan itu datangnya tanpa angin tanpa hujan. Gus Mus enak-enak ngetwit dengan ketinggian ilmunya, lha kok tiba-tiba si bocah emosi sendiri. Akhir-akhir ini, beragama jadi bikin emosi ya?

Dari hasil kunjungan tiga bocah itu, Gus Mus kemudian memberi nasihat begini: "Nomerku cateten wae, Le. Suk meneh yen awakmu anyel trus pengen misuhi aku, langsung wae. Aja sampek wong akeh ngerti." "Catat saja nomorku, Dik. Kapan-kapan kalau kau marah lalu ingin mengumpat lagi, langsung saja. Jangan sampai diketahui banyak orang."

Nasihat Gus Mus itu sesungguhnya mengandung filosofi dialektika Jawa yang tidak sederhana. Istilahnya, sanepan. Sanepan adalah campuran antara canda, sindiran serta nasihat yang dalam. Memang begitulah orang yang berilmu memahami bahasa. Beliau tahu bahwa bahasa menyediakan ruang-ruang toleransi. Di hadapan jiwa yang tulus dalam mendekati bahasa, bahasa

dapat berubah sebagai alat penyalur gagasan dalam berbagai bentuk yang indah, seperti cerita, dongeng, dan syair puisi.

Lucunya, di linimasa, kasus itu justru belum selesai. Dua kubu berseberangan yang mengklaim dirinya "Santri" versus "Non Santri" meneruskan sindir menyindir. Katanya, kaum santri yang nyantai, toh jadi berlebihan cuma gara-gara twitter. Di sisi lain, saya mengerti betul jika konsep guru, dalam kitab Ta'limut Taalim bukan sekadar harus dihormati, lebih jauh dari itu merupakan kunci utama ilmu yang bermanfaat dan hidup yang barokah.

Padahal, kalimat Gus Mus yang tidak berpanjang-panjang itu mestinya justru menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk bersama-sama mengakui ketololan diri masing-masing dan merasa konyol untuk larut dalam aktivitas sindir menyindir di sosial media karena merasa lebih saleh dan bertakwa. Ada juga lho yang kadarnya sudah sampai sulit tidur gara-gara hari ini kalah debat dalil dan kalah argumen ilmiah, dan dalam batin berniat untuk melanjutkan debat lanjutan di hari esok dengan persiapan dukungan data yang lebih lengkap. Halo, Ibu-ibu, itu gorengan ikan di dapur gosong sudah diangkat?

Agama itu kan mestinya sederhana: biar tenang, biar damai, biar rajin bekerja, biar nambah saudara, biar sayang keluarga, biar saling tolong menolong dalam kebaikan. Lah, zaman sekarang, kebanyakan cabang dewan debat aliran agama, udah nggak ada bedanya sama hatersnya Agnes Mo atau fansnya JKT 48. Memang betul sih, di mimbar-mimbar yang mereproduksi agama secara instan, ia seolah-olah menjadi alat untuk membangun sebuah kerajaan utopis yang mustahil bagi kehidupan manusia.

Semesta itu berbentuk dunia Islam dalam sempitnya pemikiran ideologi-ideologi tertentu yang menolak realitas kemanusiaan. Mereka menghilangkan sifat Ar Rahman Allah yang memayungi seluruh makhluk. Maka, muncul generasi baru yang suka marah, mengumpat dan menyerang umat lainnya sebab gagal mewujudkan cita-cita hidup yang seragam itu.

Generasi anti-realitas itu jumlahnya terus berlipat ganda dan semakin nyata. Banyak dari mereka bahkan sudah tidak lebih percaya dan tidak menaruh adab pada orang tuanya sendiri. Mereka memasrahkan akal sehatnya pada guru yang jauh dari kapasitas murabbi ruuh. Demi ideologisasi keseragaman yang mustahil, mereka rela meninggalkan orang tua, dan pelan-pelan juga membuat batas pada saudara, sanak keluarga, serta teman-teman dekatnya sendiri.

Mereka menggunakan hadis seruan jihad (perlawanan) untuk mendukung keputusannya, sedangkan tugas utama manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah fil ardh, atau penjaga yang baik bagi bumi seisinya. Gelombang pendakwah kalah yang tidak siap pada berbagai kondisi iman dan ragam manusia tidak akan mencipta harmoni, melainkan chaos satu ke chaos lainnya.

Gus Mus, seperti pula Almarhum Gus Dur, memang sosok guru yang cenderung unik. Keunikan itu dapat kita saksikan lewat hal-hal yang paling dekat dengan beliau sendiri. Sebagai pribadi yang "nyeni" dan pandai bergaul dengan semua golongan, mereka justru kerap dianggap aneh dan diragukan keulamaannya. Gus Mus bertopi ala penyair Pablo Neruda, membuat sajak dan melukis.

Anak serta menantu beliau pun merdeka untuk berpenampilan modern, tidak seperti anak-anak kiai pada umumnya, dengan profesi yang bermacam-macam pula. Plis, nggak perlu debat soal anak-menantu Gus Mus, wong Gus Mus aja nyantai. Bahkan, di dalam keluarga beliau, ada tradisi memanggil anak dan menantu untuk berdiskusi secara terhormat perihal sebuah kasus dengan menyajikan keilmuan dan kitab andalan masing-masing.

Gus Mus mempersonakan sisi manusiawi. Ia sedang meneladankan sesuatu tanpa mesti berteori. Lagipula, ketika orang-orang kerap menyalahpahami beliau, beliau tetap mengajar kitab setiap hari di pesantren sejak subuh hingga sore hari, juga menjadi pemimpin dan pendengar keluh dan peluh masyarakat yang datang tiap hari. Hampir tak ada waktu untuk dirinya sendiri.

Kuntowijoyo memang pernah bertanya,"Jika agama tidak boleh kubawa berpolitik, apa ia mesti disimpan dalam lemari?" Kita tentu boleh bersepakat dengan Kuntowijoyo, tetapi yang ia maksud dengan kata "berpolitik" tentu saja bukan sekadar sotoy di sosial media. Bolehlah menguji nilai Islam mana yang lebih baik untuk membangun sekolah, bolehlah kita mengadu konsep Islam yang lebih baik dalam mewujudkan ekonomi berasas keadilan, bolehlah kita berpikir konsep Islam bagian mana yang anti macet Jakarta dan bisa mengurangi pengangguran. Diskusi yang begitu sih sepertinya nggak bakalan berisik. Hehehe…

Jadi, kalau hari ini atau besok sedang debat agama trus ngomel-ngomel sendiri, coba dicek itu agama atau apa kok bikin stres.

Kalis Mardiasih, Menyelesaikan S1 di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sebelas Maret (UNS); Pernah jadi santri di Pondok Pesantren Khozinatul Ulum Blora selama 9 tahun; Kini nyantri tiap Jumat kliwonan; Kolomnis di beberapa media

DETIKNEWS, 26 November 2016

Demo, SARA, dan Kegagalan Islamisme

POST-ISLAMISME adalah sebagai sebuah fenomena yang menunjukkan sikap keberislaman yang mampu berdialog dengan persoalan kemanusiaan, demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan kawarganegaraan multikultural. Post-islamisme melambangkan tentang aksentuasi keagamaan yang tidak lagi dijangkarkan pada kerangka pemahaman konservatisme politik skolastik dan paham agama abad pertengahan yang serbahitam putih, tetapi ditafsir ulang secara modern dan kontekstual.

Dalam penjelasan Bayat (LKiS, 2011), "Sebuah upaya sadar membangun konsep rasionalitas dan modalitas secara strategis untuk membatasi gerakan islamisme di area sosial, politik, dan intelektual. Post-islamisme mewakili upaya meleburkan keagamaan dan hak, iman dan pembebasan, menegaskan kesejarahan kitab suci, menjunjung pluralitas dari dera suara otoritatif tunggal, kebebasan individu, pengakuan akan yang sekuler, pembebasan dari rigiditas dan penghapusan monopoli kebenaran, penyatuan agama dan tanggung jawab."

Konfigurasi politik Iran yang kian moderat setelah berakhirnya para ahli waris rezim Khomaini, gagalnya percobaan penerapan Islam kalangan Ikhwanul Muslimin, dan semakin akomodatifnya politik di Turki adalah beberapa contoh mutakhir yang menegaskan fakta bahwa islamisme yang selama ini diperjuangkan kalangan partai Islam dan kaum salafi tidak saja mengalami kegagapan ketika hendak diterapkan dalam politik harian, tapi juga sering kali dalam praktiknya hanya berujung pada upaya memanggungkan 'agama' sebatas sistem simbolis untuk mengelola kekuasaan secara tiranik.

Selebihnya ialah pekik slogan yang diulang-ulang tentang keniscayaan kembali menuju peta Islam arkaik, yang sejak awal ditahbiskan sebagai saleh dan murni.

Kegagalan Islamisme

Dalam telaah Olivier Roy (1996), islamisme hanyalah perhimpunan orang-orang buangan dari modernisme yang gagal, dengan penggalangannya berdasarkan mitos kembali ke autentisitas Islam yang sebenarnya tak pernah ada. Sebuah gerakan yang digulirkan tanpa model politik, ekonomi, sosial yang khas dan konkret kecuali sekadar jargon untuk menerapkan 'syariat' tanpa penjelasan utuh bagaimana syariat itu dioperasionalkan secara teknis-sosiologis dalam birokrasi, industri perbankan, kepartaian, dan sebagainya.

Sebuah model politik yang menuntut ketakwaan para anggotanya, tapi ketakwaan ini hanya bisa diperoleh lewat mimpi bila masyarakatnya benar-benar islami. Sementara persoalan laten kemiskinan, sistem ekonomi, krisis nilai, kemerosotan mutu pendidikan tidak pernah tersentuh dan tentu hal ini semakin memperjelas ilusi 'negara Islam' tersebut.

Kalau di sebagian belahan Timur Tengah islamisme mengalami kebangkrutan dan atau terpelanting dalam arus kecil fundamentalisme yang

gelap mata seperti ditampilkan NIIS dan wahabisme, di Indonesia justru gejalanya terbalik. Kita melihat pascarontoknya Orde Baru, terjadi gelombang kebangkitan gerakan islamisme minimal. Hal itu direpresentasikan melalui ormas-ormas puritan dengan kecenderungaan sikap dan tindakan keberagamaannya yang eksklusif, memandang 'Indonesia' hanya titik antara menuju negara yang difantasikannya selaras dengan hujjah metafisis yang diyakininya dianggit dari ayat-ayat Alquran yang telah ditafsirkan sepihak.

Dalam beberapa kasus, ormas-ormas garis keras itu berhasil menggertak negara. Dengan begitu, negara yang semestinya istikamah di garis khitah NKRI dan sebagai payung yang memberikan jaminan kepada semua kelompok sesuai amanat konstitusi, akhirnya melakukan pemihakan yang tidak perlu dan atau terkadang melakukan pembiaran. Negara faktanya acap kali absen melihat warganya mengembangkan politik yang nyata-nyata bertentangan dengan dasar negara, nyata-nyata mengoperasikan kekerasan baik fisik ataupun simbolis.

Aksi massa

Maka dalam hal ini, pendapat Budi Hardiman (2016) patut menjadi renungan barsama, bahwa kalau post-sekularisme di Barat mendapatkan sambutan meriah, di Indonesia agama tidak perlu dirangkul kembali karena tidak pernah pergi. Agama tidak usah dibangkitkan lagi karena tidak pernah mati, dan tak perlu disembuhkan karena tidak mengalami uzur.

Bahkan di negeri kepulauan sering kali agama melakukan ekspansi secara membabi buta ke ruang publik, tanpa terlebih dahulu dilakukan komunikasi diskursif dengan melibatkan partisipasi warga dan menyimak secara saksama aspirasi masyarakat.

Agama dalam realitasnya acap kali bertindak melampaui kewenangannya dan mengambil alih tugas yang semestinya diperankan negara. Peristiwa aksi 411 dan atau rencana demo besar besaran pada 2 Desember, bagi saya melambangkan tentang sikap yang tidak lagi memercayai proses hukum di satu sisi, dan di sisi lain keengganan mengedepankan dialog untuk menyelesaikan hal ihwal.

Bukan sikap dewasa dan mental demokratis yang dikedepankan, melainkan membajak ruang publik untuk memaksakan kehendak. Agama yang semestinya menjadi rute untuk mengukuhkan jangkar kebangsaan justru ditarik dalam pemaknaan penuh kebencian, ditafsirkan secara parsial, tak bertanggung jawab, dan serampangan.

Mereka yang tak ikut turun ke jalan dengan mudahnya mendapatkan stigma munafik dan kafir. Tentu harus dibedakan antara negara dan pemerintah. Kepada negara yang didirikan the founding fathers kita wajib merawatnya lengkap dengan falsafah yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Sementara pemerintah adalah mereka yang diberi mandat untuk mengelola negara yang kita pilih melalui sistem demokrasi lima tahunan. Pemerintah

bisa silih berganti datang dan pergi, sementara negara harus terus diperkukuh wujud eksistensialnya.

Pemerintah kalau tidak bisa 'memerintah' dan mengelola pemerintahannya secara amatiran, maka rakyat sebagai pemilik daulat penuh demokrasi bisa memberikan sanksi dengan tidak memilihnya kembali. Di seberang itu adalah 'bangsa' yang diimajinasikan sebagai hamparan keragaman etnik, budaya, agama, dan bahasa yang sudah bertekad untuk bersatu atas nama nasionalisme keindonesiaan.

Napas Pancasila

Hadirnya Pancasila sejatinya adalah jawaban visioner dan membumi untuk menempatkan secara proporsional posisi agama dalam ruang publik, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi ekspresi autentik politik-keagamaan post-islamisme. Dengan Pancasila status negara bukan lagi negara agama, juga bukan negara sekuler. Pancasila menjadi rute bersama atau 'jembatan emas' yang dapat menyampaikan seluruh anak bangsa menuju terwujudnya negara yang adil dan beradab. Atau dalam pidato Bung Karno saat sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia),

"*Semua untuk semua.... Kita hendak mendirikan suatu negara buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua untuk semua*." Di hadapan Pancasila, semua agama dan keyakinan mendapat perlakuan sama, kemanusiaan harus dimuliakan, persatuan dijunjung tinggi, musyawarah mufakat dikedepankan, dan tentu keadilan sosial semestinya menjadi lokus utama yang mendapatkan perhatian terutama dari pemerintah(an) yang tengah berkuasa.

Pancasila tidak memberikan ruang bagi berkembangnya wabah fanatisme, radikalisme, serta sikap beragama dan berpolitik yang puritan dan monolitik. Pancasila sebagai sumber etik yang menjadi pedoman dasar seluruh warga negara. Etika itu digali dari semua agama yang hidup di Nusantara dan atau dari kearifan perenial yang tumbuh subur sepanjang garis khatulistiwa yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur kita. Atau meminjam istilah Jean-Jacques Rosseau dalam *On Social Contract*, telah memenuhi syarat sebagai semacam 'agama sipil', *civil religion* (kebenaran yang lahir dari rahim ijma' masyarakat) sebagai lawan institutional religion yang datang dari wahyu Tuhan melalui jalur para nabi.

Pancasila seperti itulah yang ditahbiskan Bung Karno sebagai philosophschegrondslag, fundamen falsafah, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung 'Indonesia merdeka yang kekal dan abadi'. Indonesia yang beragam suku, agama, dan budaya. Siapa pun yang menista fakta keragaman ini, negara harus menindak tegas sebelum membesar dan merontokkan sendi-sendi kebangsaan.

Asep Salahudin, Dekan Fakultas Syariah IAILM

MEDIA INDONESIA, 26 November 2016

Penyebaran Berita Bohong dan Pilkada Serentak

KEMENANGAN Donald John Trump dalam pemilu di Amerika Serikat yang membawanya menjadi presiden ke-45 negara adikuasa tersebut pada 8 November lalu ternyata meninggalkan sejumput kisah menarik. Tidak hanya sikapnya yang kontroversial selama masa kampanye, tapi juga di balik kemenangannya atas Hillary Rodham Clinton ada peran besar media sosial. Ada beragam analisis mengapa Trump bisa menang. Faktornya banyak dan kompleks, tak satu pun penjelasan yang bisa menguraikannya secara akurat 100%. Beberapa pihak menilai salah satu yang ikut memengaruhi kemenangan itu ialah merebaknya kabar bohong di Facebook yang menguntungkan Trump.

Facebook, di samping segala kegunaannya, telah menjadi saluran utama dalam penyebaran informasi bohong. Joshua Benton, Direktur Nieman Journalism Lab di Universitas Harvard, mencontohkan sebuah kasus yang terjadi di Negara Bagian Louisiana, tempat ia berasal. Dalam artikelnya di laman Nieman Lab, ia menulis, selama 48 jam sebelum hari pemilihan, seorang wali kota di Louisiana membagikan di halaman Facebook-nya kabar seperti ini, 'Paus Fransiskus Mendukung Donald Trump', 'Hillary Clinton Menyerukan Perang Saudara jika Trump Terpilih', 'Agen FBI yang Diduga Membocorkan Korupsi Hillary Ditemukan Meninggal', dan lain-lain.

Berita 'dukungan' Paus kepada Trump itu dibagikan 868 ribu kali. Tapi berita yang menyatakan itu bohong hanya dibagikan 33 ribu kali. Tidak salah kalau akhirnya Trump dalam acara 60 menit di stasiun televisi CBS dan dikutip Theverge.com menegaskan, "*The fact that I have such power in terms of numbers with Facebook, Twitter, Instagram, etc. I think it helped me win all of these races where they're spending much more money than I spent*." Contoh lain tentang sebaran berita bohong ditunjukkan sebuah penelitian di awal 2016 tentang sebaran informasi mengenai virus Zika. Studi terhadap 200 berita paling populer yang dibagikan di Facebook menunjukkan 12% dari jumlah itu memuat informasi menyesatkan. Meski jumlahnya cuma 12%, jangkauan berita itu luar biasa.

Berita yang paling populer, yang mengklaim bahwa 'Zika adalah hoax', dibagikan sebanyak 500 ribu kali. Di sisi lain, sebuah video yang kredibel dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hanya dibagikan 43 ribu kali. Ini contoh riil betapa, meski kadang jumlahnya sedikit, berita bohong bisa memiliki penetrasi yang dahsyat.

Bagaimana di Indonesia?

Sebaran hoax semacam itu tidak asing bagi kita. Berdasarkan pengamatan penulis dan diskusi dengan sejumlah pengguna Facebook, kecenderungan munculnya berita menyesatkan (dari yang faktanya jelas bohong hingga pemelintiran informasi) meningkat tajam menjelang pilkada serentak 2017, terutama terkait dengan pilkada DKI Jakarta. Banjir informasi sesat yang masuk ke ruang-ruang pribadi kita, terutama melalui ponsel pintar, tentu

berbahaya bagi demokrasi dan kualitas informasi. Apalagi jika informasi tersebut terkait dengan SARA, jelas bisa membahayakan persatuan Indonesia.

Memang, orang bisa berdebat panjang-lebar seberapa jauh berita bohong memengaruhi perilaku pemilih. Akademisi juga memiliki pandangan beragam tentang pengaruh informasi terhadap sikap khalayak dan pemilih. Namun, kita bisa secara aman menyatakan berita bohong itu memiliki pengaruh bagi pemilih, entah bagi sedikit atau banyak pemilih, dalam derajat yang beragam. Apalagi jika kabar itu dibagikan oleh tokoh (opinion leader), yang lebih berpotensi memengaruhi (menggiring, memantapkan, atau mengubah) pilihan politik warga.

Terkait dengan pilkada DKI, sebaran kabar bohong itu lebih bisa diawasi dan ditanggapi dengan berita klarifikasi karena ada banyak sumber daya untuk itu. Tapi, bagaimana dengan pilkada di daerah-daerah yang luput dari perhatian media dan pengamat? Bukan tidak mungkin berita tanpa verifikasi di Facebook menjadi sumber informasi utama tentang pilkada bagi warga di banyak daerah. Kita harus ingat, pilkada serentak pada 15 Februari 2017 akan diadakan di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Di banyak daerah itu, penetrasi Facebook jauh lebih luas dan tajam ketimbang media berita profesional yang dimonitor Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia.

Lalu, bagaimana mengatasinya? Salah satu solusi yang sering diajukan ialah supaya Facebook mempekerjakan fact checker (manusia, bukan mesin) untuk menandai berita yang jelas bohong. Pada Oktober 2016, Google meluncurkan fitur fact check seperti itu di laman Google News bagi pengguna di Amerika Serikat dan Inggris Raya. Google mempekerjakan jurnalis yang berkompeten untuk menandai berita bohong, bukan memblokirnya, sehingga pengguna bisa mengetahuinya.

Banyak pihak menyambut baik inisiatif ini, meski dalam hal platform untuk mengakses berita, Facebook jauh lebih banyak diminati warga daripada Google News. Lalu, apakah kita hanya pasif menunggu mereka melakukan itu di Indonesia? Indonesia adalah negara keempat terbesar di dunia dalam hal pengguna Facebook, yakni 77,58 juta pengguna (data Mei 2016), setelah India, AS, dan Brasil. Sementara itu, dalam hal pengguna internet terbanyak di dunia, Indonesia menempati posisi ke-8, dengan jumlah 88 juta pengguna (data Juni 2016)

Dengan posisi seperti ini, Indonesia memiliki kekuatan sebagai pasar sangat besar yang berpotensi terus bertambah, mengingat pengguna internet kita masih 34% dari jumlah populasi. Jika penetrasi internet kita bisa mencapai 67% seperti di Brasil, yang menempati posisi ke-4 terbanyak dengan 139 juta pengguna, jumlah pengguna internet Indonesia akan mengalahkan Brasil dan membuat kita tepat di bawah Tiongkok (721 juta), India (462 juta), dan AS (286 juta). Kita adalah pasar dan mitra yang sangat strategis bagi Google dan Facebook. Dengan demikian, tidak berlebihan bila pemerintah berupaya mendorong supaya Google dan Facebook memprioritaskan Indonesia untuk

fitur fact check ini. Dulu, Menkominfo Rudiantara pernah berkomunikasi dengan pihak Vimeo terkait dengan pemblokiran Vimeo di Indonesia. Kali ini, beliau bisa memimpin inisiatif ini untuk berkomunikasi dengan Facebook dan Google, sekaligus mungkin mengoordinasi sumber daya pendukung lokal untuk mewujudkan pemeriksa fakta. Ini strategis bagi internet dan demokrasi yang sehat.

Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi I DPR RI

MEDIA INDONESIA, 26 November 2016

Berhukum Harus Bersabar

Judul tulisan di atas timbul dari dan sengaja saya kaitkan dengan masalah penegakan hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini menjadi tersangka dalam tindak pidana penistaan agama. Seperti diketahui, pada saat ini sedang bergemuruh suara dan gerakan agar, setelah dua pekan lalu dinyatakan sebagai tersangka, Ahok segera ditahan. Bahkan ada yang mengancam akan menggerakkan demo yang lebih besar daripada demo 4 November 2016 (411) jika Ahok tidak segera ditahan. Upaya mengawal tegaknya hukum memang menjadi kewajiban kita untuk melakukannya, lebih-lebih jika karena suatu keadaan, misalnya karena permainan politik, hukum sulit ditegakkan.

Tapi tetaplah harus diingat bahwa menegakkan hukum itu harus bersabar dan tidak boleh terburu-buru. Menegakkan hukum harus sabar mengikuti prosesnya yang mungkin memerlukan waktu dan harus berhati-hati agar tidak salah dan menyebabkan terjadinya kezaliman. Ini berlaku bagi semua kasus, termasuk kasus Ahok yang kini sedang menyedot perhatian kita.

Jika dilihat dari perkembangannya sejak terjadi demo 411 itu, penanganan terhadap kasus Ahok sudah cukup cepat waktunya dan kinerja polisi sudah cukup proporsional. Ketika menerima pimpinan demo 411, pemerintah yang dipimpin Wapres jusuf Kalla menjanjikan bahwa kasus Ahok akan diselesaikan dalam dua minggu oleh dan di kepolisian.

Janji itu sudah ditepati, bahkan belum sampai dua minggu setelah itu Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah menetapkan status Ahok sebagai tersangka, pada Jumat tanggal 25 November 2016 kemarin pihak kepolisian pun telah melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan agar segera bisa diajukan ke pengadilan. Terlepas dari tekanan situasi yang mungkin ada, faktanya kita melihat bahwa pihak kepolisian sudah bekerja dengan cepat. Oleh sebab itu demo yang lebih besar daripada demo 411 tidak diperlukan lagi karena tidak ada relevansinya. Apalagi pihak kejaksaan telah menjanjikan, perkara Ahok akan dilimpahkan ke pengadilan dalam 14 hari ke depan. Dalam berhukum kita harus bersabar mengikuti urut-urutan proses yang diatur oleh hukum itu sendiri, yakni hukum acara.

Jangan sampai terjadi aparat penegak hukum menersangkakan dan menggiring seseorang ke pengadilan karena tekanan dari luar. Sebab kalau kita membiarkan apalagi mendorong cara itu, kita pun bisa menjadi korban dari cara-cara seperti itu.

Kalau sekarang Anda mampu menggerakkan begitu banyak orang untuk menekan aparat agar menggelandang orang ke pengadilan, bukan tidak mungkin suatu saat ada orang yang mampu menggerakkan dan menekan aparat untuk menggelandang Anda ke pengadilan melalui apa yang biasa disebut kriminalisasi. Itulah relevansi seruan kita harus bersabar dan berhati-hati dalam berhukum.

Tapi aparat penegak hukum pun tidak boleh bermain-main dalam tugas untuk menegakkan hukum. Mereka tidak boleh tunduk pada tekanan politik dari arah manapun dalam menegakkan hukum. Aparat penegak hokum harus cekatan dan profesional dalam menangani kasus. Aparat hukum tidak bisa memanipulasi dalil ”*lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tak bersalah*” untuk melindungi seseorang. Yang bersalah, meskipun hanya satu orang, harus dicari dan ditemukan. Penegak hukum tidak boleh juga memanipulasi dalil agama yang menyatakan, ”*Janganlah kebencianmu kepada seseorang menyebabkan kamu berlaku tidak adil*.”

Sebab dalil itu pun bisa dibalik dengan metode mafhum mukhalafah sehingga berbunyi, ”*Janganlah kesukaanmu atau ketakutanmu terhadap tekanan seseorang menyebabkan kamu tidak berlaku adil*.” Ini sangat penting ditekankan karena kenyataan kita dalam berhukum sering kali dihantui permainan hukum antara aparat, politisi, dan cukong. Permainan hukum oleh aparat penegak hukum memang kerap kali terjadi di Indonesia. Buktinya, banyak penegak hukum, yakni hakim, jaksa, polisi, pengacara, bahkan pegawai administrasi pengadilan, yang digelandang ke pengadilan karena tertangkap memperjualbelikan kasus. Itu pun banyak yang meyakini bahwa tertangkapnya mereka hanya karena ”apes”, sebab selain yang tertangkap itu masih banyak penjual dan pembeli kasus yang berkeliaran dan tidak atau belum tertangkap. Dengan demikian, bersabar dalam menegakkan hukum bisa diartikan, minimal, dalam dua hal.

Pertama, kita harus bersabar mengikuti urut-urutan penanganan sebuah kasus agar dilakukan secara berhati-hati dan tidak menimbulkan kezaliman bagi seseorang yang diduga telah melakukan kesalahan. *Kedua*, penegak hukum harus bersikap profesional dan berani menghadapi tekanan dari arah mana pun, dari penguasa politik maupun pemilik uang suap.

Aparat tidak boleh ditekan oleh kekuatan politik dari atas dan oleh cukong-cukong penyuap dari samping. Aparat juga tidak boleh dipaksa-paksa oleh kekuatan massa yang mengepung untuk memaksakan kehendaknya. Aparat harus berani menolak, kalau perlu melawan, tekanan-tekanan yang mendorong dirinya untuk berlaku tidak profesional dan tidak adil.

Itulah wujud kesabaran yang harus ditunjukkan oleh aparat dalam menegakkan hukum. Berhukum mencakup pembuatan aturan hukum dan penegakan aturan hukum itu sendiri. Maka itu para pembuat aturan hukum juga harus bersabar dalam arti tekun dan berhati- hati serta tangguh menolak dan melawan tekanan, termasuk menolak suap yang akan menyesatkannya dari tugas pembuatan aturan hukum yang benar dan baik.

Moh Mahfud MD, Ketua MK-RI 2008-2013

KORAN SINDO, 26 November 2016

Membangun Kultur Berdemokrasi

DISKURSUS politik kebangsaan kita belakangan ini memasuki fase krusial. Kian mengukuhkan negara bangsa atau melemahkan. Ketidakmampuan membangun sinergitas positif demokrasi dengan agama dan etnisitas berujung pada berbagai *"aktivitas"* yang justru kontraproduktif.

Hal itu ditandai dengan masih dominannya isu agama dan etnisitas sebagai alat propaganda untuk kepentingan mobilisasi. Tidak heran, menjelang Pilkada 2017, isu agama dan etnisitas kian mencuat ke permukaan. Situasi yang tidak jauh berbeda dengan kondisi menjelang Pilpres 2014. Isunya sama, aktor yang memainkan peran itu pun tidak jauh berbeda.

Realitas itu menunjukkan bahwa penerimaan kita pada konsep negara bangsa belum tuntas. Begitupun, penerimaan pada sistem demokrasi masih setengah hati. Negara bangsa mengasosiasikan betapa negara ini adalah rumah pelbagai suku bangsa dan demokrasi meniscayakan bahwa setiap etnisitas dan (umat) beragama memiliki kedudukan yang sama. Karena itu, sistem demokrasi dipilih agar setiap anak bangsa dapat berpartisipasi dalam setiap proses politik. Tanpa intervensi dan dominasi dari kelompok mana pun. Kehidupan demokratis bukan sebuah kondisi yang tiba-tiba ada. Demokrasi merupakan suatu kondisi yang harus terus-menerus diperjuangkan. Begitupun, pemerintahan yang demokratis hampir mustahil tercipta ketika warga masyarakatnya tidak memiliki kultur berdemokrasi yang baik. Kultur berdemokrasi itu ada dalam masyarakat itu sendiri.

Sebuah pemerintahan yang baik bisa tumbuh dan stabil bila masyarakatnya punya sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi (Saiful Mujani, 2002). Tanpa kultur berdemokrasi, niscaya keinginan melahirkan pemerintahan yang demokratis juga akan sia-sia. Tanpa penghargaan kepada norma dasar demokrasi, konsepsi negara kebangsaan akan selalu melahirkan kegaduhan bersumber kepada perbedaan etnisitas dan agama. Nurcholis Madjid (2000) menyebutkan, ada tujuh (7) norma dasar yang menjadi pandangan hidup demokratis. *Pertama*, pentingnya kesadaran akan pluralitas. Masyarakat berpartisipasi aktif memelihara dan melindungi adanya keragaman.

Kedua, mengedepankan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat. Adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk tulus menerima setiap bentuk kompromi. Semangat musyawarah menuntut setiap orang menerima kemungkinan terjadinya partial finctioning of ideals, yakni pandangan dasar bahwa belum tentu dan tidak harus seluruh keinginan atau pikiran seseorang/kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Prinsip musyawarah –jelas– mengindikaskan ketiadaan intervensi dan pemaksanaan kehendak. *Ketiga*, adanya pertimbangan moral. Demokrasi mensyaratkan ketercapain tujuan yang baik harus sejalan dengan cara yang dilakukan. Memperjuangkan keadilan harus menggunakan cara yang berkeadilan pula. Politik menghalalkan segala cara jelas mereduksi nilai-nilai demokrasi. Alih-alih terbentuk masyarakat politik yang konstruktif, malahan yang lahir

kemudian adalah perilaku berpolitik yang tidak berperadaban yang hanya berorientasi kepada (perebutan) kekuasaan an sich melalui cara-cara yang cenderung ''tidak beradab''.

Keempat, pemufakatan yang jujur dan sehat. Pemufakatan merupakan hasil dari seni bermusyawarah yang lahir dari keikhlasan mencari jalan keluar dari kebuntuan. Pemufakatan menghindarkan diri dari berbagai bentuk rekayasa, manipulasi, dan ragam konspirasi yang lain. *Kelima*, pemenuhan segi-segi ekonomi. Demokrasi meniscayakan terdistribusinya akses ekonomi secara berkeadilan. Dalam iklim demokratis, penguasaan tunggal akses ekonomi merupakan ancaman bagi terpenuhinya kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh warga masyarakat.

Keenam, kerja sama antarwarga masyarakat dan sikap mempercayai iktikad baik masing-masing. Membangun sikap saling percaya kepada masyarakat yang lain akan melahirkan pola hubungan kondusif di antara keduanya. Distrust diyakini merupakan awal dari munculnya petaka yang merusak pola hubungan tersebut. Kondisi itu penting saat hubungan sosial antar warga belakangan ini melahirkan sikap curiga satu sama yang lain.

Dan *ketujuh*, pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan (Tim ICCE UIN Jakarta, 2003). Sebagai sebuah nilai yang harus terus- menerus dilahirkan, demokrasi memang menjadi ruang belajar setiap warga untuk mewujudkan itu dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara.

Mewujudkan kehidupan demokratis hanyalah menjadi mungkin ketika prinsip dalam tujuh norma dasar berdemokrasi terinternalisasi dalam ruang kesadaran warga bangsa Indonesia. Namun demikian, melihat gelagat menguatnya isu agama dan etnisitas, keinginan menciptakan kehidupan demokratis mendapat tantangan mahaberat. Realitas itu seolah-olah membenarkan tesis Miller bahwa kehidupan demokratis sulit dibangun dalam masyarakat yang beragama dan berkeyakinan berbeda.

Gejala menguatnya isu agama dan etnisitas dalam politik kebangsaan, jika tidak segera diantisipasi, dikhawatirkan menjadi kendala bagi terbentuknya masyarakat demokratis yang berkeadilan. Masyarakat harus diberi kesadaran bahwa risiko dalam berdemokrasi adalah setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi.

Setiap masalah tidak lah harus diselesaikan dengan mobilisasi massa, tetapi bisa juga diselesaikan melalui tradisi berembuk sebagai bagian dari kultur berdemokrasi. Percayalah, berembuk itu tradisi kita, bukan lainnya.

Listiyono Santoso, Pengajar mata kuliah Etika dan Filsafat Unnair

JAWA POS, 26 November 2016

Histeria di Media Sosial

Begitu gawatkah masalah media sosial di Indonesia hingga Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinannya secara terbuka?

Keprihatinan Presiden tentu merujuk pada penggunaan media sosial untuk menyebarkan sikap antipati dan kebencian berdimensi politik dan agama belakangan ini. Namun, ada masalah yang lebih mendasar di sini.

Ketika penggunaan media sosial sudah sedemikian masif dan berdampak ke mana-mana, kita sesungguhnya belum selesai mendefinisikan apa sebenarnya media sosial itu secara teoretis, etis, dan hukum. Kasus gugatan hukum atas Buni Yani yang dianggap menyebarkan kebencian dan permusuhan SARA melalui media sosial dapat menjadi titik tolak di sini. Satu aspek yang tidak banyak dibahas adalah posisi Facebook dalam penyebarluasan konten digital Buni Yani. Apakah Facebook sebagai penyedia layanan media sosial tidak berperan di sini sehingga tidak perlu ikut bertanggung jawab?

Bagi sebagian orang, media sosial seperti Facebook dibayangkan seperti ruang publik terbuka tempat semua orang dapat berbicara sekehendak hatinya. Kata sosial dalam media sosial secara hegemonik membuat banyak orang berpikir, media sosial sepenuhnya entitas sosial yang memberikan fasilitas cuma-cuma kepada semua orang untuk berinteraksi dalam cara dan lingkup yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena sudah begitu baiknya kepada masyarakat, tak seharusnya pengelola media sosial dibebani tanggung jawab membayar pajak, mendidik penggunanya tentang etika berkomunikasi, dan lain-lain.

Namun, sebenarnya cukup mudah mengidentifikasi media sosial tidak sepenuhnya bermotif "sosial", alih-alih entitas bisnis yang motif utamanya adalah komodifikasi. Media sosial merekam semua aktivitas digital penggunanya untuk menghasilkan behavioral data. Behavioral data ini kemudian jadi dasar aktivitas periklanan digital yang secara eksesif memasuki ruang-ruang pribadi kita tanpa pernah permisi.

Dari monetisasi behavioral data ini, Facebook, Instagram, Twitter meraih keuntungan ekonomi yang sangat besar. Kita juga tidak tahu secara persis untuk urusan apa lagi behavioral data ini digunakan oleh raksasa-raksasa digital itu. Dalam konteks inilah, berkembang tuntutan pelembagaan right to be forgotten di Eropa belakangan ini.

Dualitas status

Agar tak terjerumus pada apriori atas kontribusi positif media sosial, barangkali lebih tepat untuk meletakkan media sosial sebagai dualitas antara institusi sosial sekaligus bisnis. Media sosial adalah institusi sosial yang berkontribusi dalam proses demokratisasi dan deliberasi ruang publik, tetapi juga bersikap instrumentalistik terhadap ketergantungan masyarakat atas media sosial dengan menggunakannya sebagai obyek komodifikasi.

Media sosial berperan besar dalam menyediakan ruang perdebatan publik, tetapi juga mengambil keuntungan dari perdebatan itu untuk menaikkan popularitas atau leverage-nya di mata publik dan pengiklan. Dalam konteks ini, mestinya ada tanggung jawab yang dibebankan ke penyedia aplikasi media sosial jika muncul kasus hukum seperti kasus Buni Yani. Patut dicatat, kontroversi dan gugatan hukum tidak akan terjadi tanpa peran Facebook dalam menyebarluaskan konten digital Buni Yani.

Para ahli komunikasi dan hukum media tampaknya perlu mendiskusikan sejauh mana lingkup tanggung jawab pengelola media sosial ini tanpa harus mengabaikan kontribusi positif media sosial untuk berbagai bidang. Pada intinya, perlu dibedakan antara tanggung jawab pengguna media sosial dan tanggung jawab pengelola media sosial. Penyedia layanan media sosial juga semestinya dibebani tanggung jawab untuk mewujudkan ruang publik digital yang beretika dan beradab.

Permasalahan kedua, media sosial merujuk pada mode komunikasi kelompok, komunikasi publik atau komunikasi massa? Pakar-pakar komunikasi berbeda pendapat tentang pokok persoalan ini. Adanya aktivitas periklanan digital dan penyebaran informasi tentang isu-isu publik secara luas melalui teknologi komunikasi membuat media sosial cenderung dikategorikan sebagai mode komunikasi massa. Namun, bahwa media sosial memungkinkan umpan balik dan interaktivitas komunikator-komunikan, membuatnya cenderung dilihat sebagai mode komunikasi kelompok.

Pengategorian media sosial sebagai mode komunikasi ini memiliki implikasi serius. Jika media sosial merujuk pada mode komunikasi kelompok atau mode komunikasi publik, gugatan atas Buni Yani sebagai pribadi adalah relevan. Namun, jika media sosial adalah sebentuk mode komunikasi massa, relevansi gugatan itu perlu diperiksa kembali. Jangan-jangan yang terjadi adalah menimpakan masalah institusi sekaligus pribadi hanya kepada pribadi semata.

Sebagai analogi, jika muncul gugatan hukum atas penulis surat pembaca atau sumber berita di media massa konvensional, maka media bersangkutan juga harus turut bertanggung jawab. Pertimbangannya, gugatan hukum terjadi setelah surat pembaca atau kutipan pernyataan sumber berita disebarluaskan oleh media massa tersebut.

Nihilisme baru

Masalah ini cukup mendesak untuk dikaji lebih jauh, baik dari sisi teori komunikasi maupun dari sisi hukum dan etika media. Posisi media sosial memang unik: menggabungkan sekaligus mode komunikasi interpersonal, kelompok, publik, dan komunikasi massa sekaligus. Implikasinya sangat serius: praktik berkomunikasi di media sosial menunjukkan leburnya antara yang publik dan yang privat, yang pantas dan yang tak pantas, yang etis dan tak etis. Nihilisme baru tercipta dan terjadi kebingungan tentang standar etika dan moralitas mana yang harus digunakan.

Setiap tindakan komunikasi semestinya selalu mengandaikan mode komunikasi intrapersonal, yakni kemampuan untuk berkomunikasi dengan diri sendiri sebelum berkomunikasi dengan orang lain. Kemampuan untuk merenung sebelum berbicara, menimbang hati nurani dan memikirkan nasib orang lain, menakar kepantasan dan kelayakan tindakan dan ucapan.

Dimensi komunikasi intrapersonal ini yang terabaikan dalam praktik berkomunikasi di media sosial. Kita seperti dikondisikan bertindak serba spontan, berkata-kata secara instan tanpa memikirkan kepantasan dan kepatutan. Begitu sering kita terlambat menyadari bahwa ujaran kita telah tersebar luas dan berdampak kepada nasib orang lain.

Meminjam istilah Heidegger dalam Being and Times, media sosial membuat banyak orang terperosok dalam kualifikasi Dasman. Orang-orang yang kehilangan kesejatian atau distingsi diri, menjadi manusia rata-rata atau manusia kebanyakan. Kualifikasi moral dan intelektual sulit dipertahankan karena yang berkembang adalah tren perilaku yang sama: bertindak serba spontan, apatis, acuh tak acuh.

Yang agamis, intelek, ataupun awam mudah terjerumus pada tindakan aniaya terhadap perasaan orang lain. Dalam konteks inilah, keprihatinan Presiden Jokowi jadi sangat relevan. Mendiskusikan media sosial hari ini adalah mendiskusikan harkat dan martabat kita sebagai bangsa.

Agus Sudibyo, Kaprodi Komunikasi Massa ATVI Jakarta

KOMPAS, 28 November 2016

Mimpi Kerukunan Umat Beragama

Ketika berada di Washington DC, dua tahun yang lalu, seorang teman bertanya: mau shalat Jumat di mana? Di sini, kata teman itu, shalat Jumat juga bisa di gereja. Kalau begitu, kami ingin shalat Jumat di gereja, jawab kami. Bersama teman itu kami menuju ke sebuah gereja di dekat Gedung Putih, yang ternyata adalah gereja Anglikan. Kami tiba sekitar pukul 12.00, disambut seorang petugas gereja dan dipersilakan mengambil wudu. Shalat itu berlangsung di altar gereja dengan membentangkan sajadah untuk sekitar 200 anggota jemaah. Imam dan khatibnya berkebangsaan Pakistan, yang menyampaikan pesan perlunya kerukunan antarumat beragama. Setelah shalat Jumat, seorang dermawan menyumbang makan siang, sepotong piza untuk setiap anggota jemaah. Setelah itu, giliran jemaah yang kedua. Di gereja itu, shalat Jumat diselenggarakan dua kali karena jumlah jemaah banyak, sedangkan tempat terbatas.

Ketika IMAAM (Indonesian Moslem Associatioan in America) meresmikan masjidnya di Washington, tahun 2014, juga dihadiri pemuka umat beragama lain. Bahkan, ketika ada pemuka agamaKatolik yang merasa belum memperoleh undangan, pemuka agama Katolik itu menelepon IMAAM untuk memperoleh undangan.

Peresmian masjid itu, sebagaimana kita ketahui, dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pada waktu itu ada acara menghadiri sidang PBB. Karena itu, upacara peresmian masjid tersebut juga dihadiri wakil Pemerintah AS.

Kalau kita berkunjung ke gereja Bethlehem di Jerusalem, beberapa tahun yang lalu, Anda pasti ditunjukkan sebuah kursi yang beradadi tengah, di deretan paling depan. Kursi itu diperuntukkan bagi Yasser Arafat ketika menghadiri peringatan Natal. Pemandu wisata juga dengan bangga menceritakan bagaimana indahnya Palestina, di mana agama-agama samawi (Islam, Kristen, dan Yahudi) hidup berdampingan. Karena itu, ketika Yasser Arafat berpidato di depan Majelis Umum PBB, ia menyatakan negara Palestina yang diperjuangkannya itu adalah negara sekuler, yang menjamin kehidupan semua umat beragama melaksanakan ibadahnya.

Gambaran di atas adalah sekelumit contoh bagaimana umat beragama di negara lain, bahkan di negara sekuler sekalipun. Masih banyak contoh lain yang sebenarnya dapat dikemukakan. Hal ini mungkin perlu kita renungkan ketika kita sedang membangun dan menyosialisasikan Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat kita yang beragam agama.

Mimpi buruk

Indahnya kehidupan antarumat beragama, sebagaimana digambarkan di atas, perlu kita renungkan ketika kita diterpa mimpi buruk pada tahun 2000-an, saatdi Maluku terjadi konflik antarumat beragama. Demikian juga kejadian akhir-akhir ini, ketika ada bom meledak di sebuah gerejadi Samarinda dan lainnya. Di sejumlah daerah masih sering terdengar konflik

seputar pendirian rumah ibadah. Selain konflik antarumat beragama juga konflik internal sesama umat beragama, khususnya Islam. Apa yang salah dengan kehidupan antarumat beragama di negara yang berdasarkan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu pilarnya kehidupan berbangsa dan bernegaranya ini?

Ada kesan, kita harus berhati-hati mencermati perkembangan zaman,di mana informasi masuk dan keluar begitu cepat ke rumah kita. Masa depan dunia, menurut Samuel Huntington dalam bukunya, The Clash of Civilization, memang akan diwarnai konflik antarbudaya, di mana agama ikut berperan. Konflik itu dapat bersifat global ataupun lokal. Konflik itu terjadi di mana- mana, melibatkan banyak negara, sebagaimana sedang terjadi di Suriah, Irak, dan Afganistan.Apa yang terjadi di negara lain selayaknya harus dapat dicerna secara selektif sehingga tidak berdampak buruk. Ketahanan nasional dalam hal ini sangat diperlukan.Berita-berita di sekitar terorisme sering terkait dengan NIIS sehingga merepotkan aparat kepolisian kita. Akankah mimpi buruk itu tetap berlanjut dan sampai kapan?

Agama apa saja pasti mengajarkan kehidupan yang aman dan damai. Kita diajarkan untuk selalu berhubungan baikdengan tetangga dan masyarakat pada umumnya tanpa membedakan agamanya. Kalau ada di antara kita membuat kehidupan masyarakat terganggu, dengan sendirinya ada ajaran agama yang tidak diamalkan sebagaimana mestinya. Atau, dengan perkataan lain, kalau kita semua memegang teguh dan mengamalkan ajaran agama kita masing-masing, insya Allah akan tercipta kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan damai.

Adanya konflik antarumat beragama, apalagi internal sesama umat seagama, mengindikasikan lemahnya pengamalan agama kita masing-masing. Padahal, Pancasila dengan sila pertamanya, Ketuhanan Yang Maha Esa, mendorong pengamalan semua agama dengan sebaik-baiknya. Adanya konflik berlatar belakang kehidupan beragama, dengan demikian, juga merupakan wujud lemahnya pengamalan Pancasila. Negara, dengan demikian, ikut bertanggung jawab.

Harapan

Langkah apa yang perlu dipersiapkan? Jawabnya: melalui proses pendidikan sumber daya manusia kita. Pendidikan, baik formal maupun nonformal, berupa lingkungan yang kondusif, dalam hal ini sangat berperan. Sebab, pemahaman yang benar terkait ajaran agamadan pengamalan Pancasila bergantung pada kualitas dan karakter manusianya sehingga slogan perlunya character and nation building masih sangat relevan. Dan, kualitas manusia itu bergantung pada proses pendidikan, formal dan nonformal, yang dialaminya. Tidak berlebih, harapan itu ingin kita sampaikan kepada pemerintah/ presiden serta DPR/ DPD/MPR yang bertanggungjawab atas jalannya penyelenggaraan negara sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, sudah tentu juga kepada para pemuka agama.

Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, masalah ini perlu direspons sesegera mungkin. Misalnya, perlukah UU tentang kerukunan antarumat beragama? Atau, perlukah membangun etika yang dapat disepakati bersama dalam membangun kerukunan antarumat beragama?

Kalau tidak, Indonesia akan jadi korban buruknya perkembangan zaman yang sangat sulit dielakkan, yaitu konflik antarbudaya/agama, lokal ataupun global, berupa terorisme lokal dan konflik-konflik berlatar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan. Semoga kita dapat segera bermimpi indah dalam kerukunan antarumat beragama.

Sulastomo, Ketua Umum PB HMI Periode 1953-1966

KOMPAS, 28 November 2016

Dalam Kebencian, Cinta Tak Hilang

”*Bayangkanlah seorang gadis belia di Israel. Ia hidup di zona nyaman dan tak pernah bertemu muka dengan orang-orang Palestina*.” Demikian salah satu penggalan percakapan Niza Yanay, penulis buku Ideology of Hatred: The Psychic Power of Discourse (2012) dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh www.aljazeera.com (14/11/2012).

”Secara personal, mungkinkah gadis itu memiliki kebencian terhadap warga Palestina atau semua orang Arab? Tapi, kenapa begitu banyak warga Israel—yang tak pernah dilukai oleh rakyat Palestina—kemudian membenci saudara-saudaranya di Palestina?” lanjut Niza, menjelaskan bagaimana cara kebencian bekerja. Baginya, kebencian bukan lagi sekadar hasrat yang membara di labirin personal, melainkan kesadaran palsu yang sudah bergerak secara massal karena dikendalikan oleh sebuah kekuatan yang tak kasatmata. Atas dasar itu, ia berkesimpulan: kebencian telah beralih rupa menjadi ideologi.

Sisi kelam dunia maya

Dalam realitas politik di Indonesia hari ini, pengandaian associate professor Departemen Sosiologi dan Antropologi Universitas Ben Gurion, Beer Sheva (Israel), itu cukup masuk akal. Mungkinkah seorang anak muda di pedalaman Sumatera bisa membenci sejawat dunia mayanya—katakanlah ia bermukim di Jakarta—meskipun keduanya tak pernah bertatap muka secara langsung? Tapi, di media sosial, dua anak muda yang berbeda pilihan politik itu tiada henti saling memaki, tiada sudah-sudah saling menyerang—dengan berbagai macam argumen, alibi, dan fitnah guna mempertajam kebencian masing-masing—dan tak kunjung letih dari aktivitas saling mengejek, saling mempermalukan, saling menantang.

Pengandaian Niza Yanay dapat pula diputarbalikkan ke kutub berlawanan. Bagaimana mungkin dua sahabat karib selama bertahun-tahun, hidup setikar-setempat tidur, lapar-kenyang dan sedih-riang bersama, bisa pecah kongsi kemudian saling membenci karena berbeda pilihan politik dalam sebuah kontestasi pilkada? Dalam perseteruan yang berkesinambungan itu, ucapan selamat ulang tahun, atau ungkapan turut berduka pun, dapat ditimbang sebagai muslihat dan ancaman. Pilihan politik yang berbeda telah mengakibatkan jembatan persahabatan mereka runtuh, pertemanan yang karib pecah berkeping-keping, dan yang tersisa hanyalah kebencian.

Inilah sisi tak terbayangkan dari pergaulan dunia maya yang sedang merebak di mana-mana. Di awal pertumbuhannya, media sosial mendekatkan kembali semua yang renggang, menyatukan kembali orang-orang yang terpisah selama bertahun-tahun, dan menghadirkan rasa menemukan bagi sekian banyak orang yang dulu merasa kehilangan.

Media sosial juga dapat membiakkan kasih sayang dan cinta di antara orang-orang yang sebelumnya tak pernah bertemu muka. Banyak orang, yang sedemikian bahagianya menikmati asmara tanpa temu muka, lalu

menganggap perjumpaan fisik hanya akan menyusutkan kedalaman perasaan mereka.

Namun, pada sisi yang kelam, pergaulan dunia maya juga dapat menjauhkan yang semula berkerabat, merenggangkan yang semula akrab, menghancurkan banyak hubungan persahabatan, dan menistai etos kepedulian yang telah dibangun sejak lama. Kehangatan, kebersamaan, dan solidaritas berubah wajah jadi sinisme, kedengkian, dan caci maki yang tiada henti, hanya karena pilihan politik yang berseberangan. Seorang tokoh penting tidak lagi dianggap bagian dari kampung halamannya lantaran ia memiliki pandangan berbeda dengan orang-orang di tanah kelahirannya. Sejak kapan berbeda pendapat menjadi dalil guna membenci seseorang? Begitu pertanyaan seorang kawan di laman media sosialnya.

Berkaca ke Hamka-Yamin

Tentang hal ini, ada pelajaran berharga dari persahabatan Buya Hamka dengan Mohamad Yamin, sebagaimana diikhtisarkan kembali oleh situs www.ranah.id (12/11/2016). Sidik jari politik Yamin adalah PNI, sementara Hamka mewakili Partai Masyumi yang menghendaki Islam sebagai ideologi negara. Pidato keras Hamka di konstituante jadi awal mula permusuhan keduanya. Bagi Yamin, Hamka bukan hanya musuh ideologis, melainkan juga seteru pribadi. Setelah konstituante dibubarkan dan Demokrasi Terpimpin dijalankan, Yamin menjabat sebagai Menteri Sosial dan Kebudayaan, sementara Partai Masyumi dibubarkan. Hamka kian terjepit karena tuduhan keterlibatan Masyumi dalam PRRI/Permesta. Sikap Yamin yang memusuhi PRRI di kampung halamannya membuat ia terus dipercaya dalam pemerintahan.

Pada 1962, Chairul Saleh mendatangi rumah Hamka. Menteri Perindustrian itu membawa pesan dari Yamin yang sedang sakit di RSPAD. Kepada musuh ideologisnya itu, Yamin meminta agar ia didampingi menjelang akhir hayatnya, dan jika Hamka berkenan agar memakamkan jenazahnya di Talawi, Sijunjung. Yamin khawatir, orang kampungnya tidak mau menerima jenazahnya karena sikapnya yang memusuhi PRRI. Permintaan itu ikhlas ditunaikan oleh Hamka. Yamin meninggal dalam genggaman tangannya di RSPAD. Hamka pula yang mengantarkan jenazah Yamin ke Minangkabau. Kisah ini membuktikan ungkapan Niza Yanay: *In hate, love is never lost* (dalam benci, cinta tak pernah hilang).

Kini, dalam arus kebencian yang begitu deras, ikhtiar menyampaikan pendapat pribadi saja bukan perkara yang gampang. Di musim pilkada, jika dilakukan secara terang-terangan, itu sama saja dengan berdiri di hadapan gerombolan anak-anak berandalan dengan katapel di genggaman masing-masing. Inilah risiko yang mesti ditanggung oleh orang-orang yang hidup di era personal politic. Tak ada yang tak bisa dikaitkan dengan politik. Sekadar menginformasikan kemacetan parah selepas hujan di jalur tertentu, bisa ditanggapi sebagai sikap politik. Ibu rumah tangga yang mengeluh tentang

harga cabai yang terus melambung juga pernyataan politik yang bisa direspons macam-macam.

”*Tak ada yang kebal dari jaring laba-laba politik. Dunia sedang bernapas politik. Makan politik. Berak politik*,” kata sastrawan Argentina, Luisa Valenzuela.

Begitu pula ideologi kebencian bekerja. Kebencian bukan lagi hasrat individual, melainkan hasrat komunal untuk bertahan dari rasa takut. Dalam iklim pilkada, tentulah itu rasa takut akan kekalahan. Iklim politik yang minim pikiran menyambut baik karnaval kebencian itu. Jika realitas politik di masa lalu adalah arena pertarungan gagasan demi kemaslahatan bersama, politik masa kini semata-mata meringkus kuasa dengan karnaval kebencian sebagai kendaraannya. Selepas kompetisi, kebencian tak menyusut. Ia meluas ke mana-mana.

Dalam kebencian, cinta mungkin tak hilang, tapi akal sehat yang sekarat bisa mengubah pesta demokrasi menjadi sekadar kisah panjang tentang sumbu-sumbu yang pendek....

Damhuri Muhammad, Pengajar Filsafat di Universitas Darma Persada, Jakarta

KOMPAS, 29 November 2016

Kecemasan dan Kekerasan

Kabut kecemasan mengepung dunia, menyulut sentimen primordial di berbagai belahan bumi. Api permusuhan dan penyingkiran ”*yang berbeda*” menjalar mulai dari Timur Tengah hingga Eropa, Amerika Serikat hingga Amerika Latin, dari Myanmar hingga Indonesia.

Arus globalisasi membuka rongga kebebasan ruang publik dan intensitas perjumpaan lintas peradaban. Kebebasan dan perjumpaan melambungkan banyak harapan. Tingginya harapan pada kenyataannya tidak selalu sejalan dengan pemenuhan ekspektasi keadilan. Jarak lebar antara kebebasan dan keadilan itulah yang melahirkan kecemasan dan kekerasan.

Dalam konteks Indonesia, Orde Reformasi melahirkan momentum keterbukaan ruang publik dan pemberdayaan ”masyarakat sipil” (civil society). Hal ini ditandai oleh penguatan kembali hak-hak sipil, kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Walaupun demikian, nilai-nilai demokrasi tidak bisa ditegakkan dengan mudah di tengah kuatnya budaya feodalisme, rendahnya tingkat pendidikan, buruknya situasi ekonomi, dan lemahnya supremasi hukum. Pengembangan demokrasi dan reformasi politik tanpa dukungan tertib hukum dan keadilan sosial-ekonomi sering kali dibarengi dengan konflik sosial, disintegrasi, dan kekerasan etno-religius.

Dengan kata lain, penguatan demokrasi dan masyarakat sipil menghendaki adanya kebebasan yang sejalan dengan keadilan. Dalam sistem politik otoritarian, ancaman utama terhadap kebebasan muncul dari negara. Dalam sistem demokratis, ancaman itu justru muncul dari kekuatan-kekuatan masyarakat sipil, dalam bentuk fanatisme komunalistik.

Fanatisme merupakan antipoda dari masyarakat sipil karena menolak rasionalitas, prinsip representasi dalam politik serta pemerintahan hukum (konstitusional) sebagai bantalan vital demokrasi. Kelompok-kelompok mapan yang mengalami kemunduran atau kalangan yang terlempar dari gelanggang politik formal akan mengembangkan fanatisme dan cenderung bersikap ”iri” (*resentment*) terhadap kebebasan, partisipasi, dan modernisasi.

Namun, fanatisme tidaklah muncul tanpa akar. Ia muncul akibat terganggunya basis-basis keadilan dan distorsi komunikasi dalam ruang publik. Berdasarkan pengalaman lintas negara, banyak kekerasan dan konflik sosial terjadi akibat ketidakadilan (baik nyata maupun perseptual) dalam alokasi sumber daya, penyerobotan lahan kehidupan serta deprivasi sosial; baik dalam relasi domestik maupun internasional. Ketidakadilan dan ketercerabutan sosial-ekonomi ini diperparah oleh pelumpuhan daya-daya komunikatif dalam ruang publik karena penundukan sistem nilai kebajikan hidup bersama (lifeworld) oleh dunia sistem kapitalisme.

Keadilan hukum terganggu ketika warga negara diberi perlakuan yang berbeda atau tak diberi perlindungan oleh negara atas hak-hak sipil-politik dan hak-hak ekonomi-sosial-budayanya. Jika warga negara gagal memperoleh perlindungan dari negara, secara alamiah mereka akan mencari

perlindungan dari sumber-sumber yang lain. Sumber-sumber alternatif ini bisa dalam bentuk fundamentalisme keagamaan, tribalisme-etnosentrisme, premanisme, dan koncoisme.

Ketidakadilan ekonomi terganggu manakala perluasan ruang partisipasi di bidang politik tidak seiring dengan perluasan partisipasi di bidang ekonomi. Di Indonesia, pergeseran ke arah sistem politik demokratis yang membawa serta gelombang aspirasi neoliberal dalam perekonomian terjadi ketika tradisi negara kesejahteraan masih lemah. Penetrasi kapital dan kebijakan pro pasar di tengah-tengah peluasan korupsi serta lemahnya regulasi negara, memberi peluang bagi merajalelanya ”predator-predator” ekonomi raksasa, yang secara cepat memangsa pelaku-pelaku ekonomi menengah dan kecil. Ekspansi kepentingan predator besar ini tidak berhenti pada dunia usaha, tetapi juga menyusup ke soal perumusan perundang-undangan, bahkan sampai pada pemilihan pejabat pemerintah di daerah. Kesenjangan ekonomi melebar yang menyulut kecemburuan sosial.

Dengan demikian, untuk mencapai demokrasi substantif, kebebasan di ruang publik harus dikelola secara dewasa. Kebebasan harus digunakan secara bertanggung jawab dalam rangka ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia akan berhasil jika kita mampu mengelola tuntutan kebebasan yang bersejalan dengan keadilan. Jika keduanya tak berjalan berkelindan, ancaman yang akan kita hadapi tidak saja soal disintegrasi sosial, tetapi juga akan hancurnya kerekatan sosial dalam masyarakat. Apabila kerekatan sosial hancur, akan tumbuh sosial distrust (iklim tidak saling memercayai) di antara kelompok-kelompok sosial sehingga kelompok yang satu dengan yang lainnya akan saling curiga, saling bermusuhan atau bahkan, yang paling mengerikan, adanya upaya untuk saling meniadakan. Dalam situasi demikian, mimpi buruk Hobbesian berupa ”perang semua lawan semua” (*war of all against all*) bisa jadi kenyataan. Dengan ini, kita sadar, betapa pentingnya melakukan refleksi diri, membuka hati penuh cinta untuk yang lain.

Yudi Latif, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

KOMPAS, 29 November 2016

Demokrasi Tetap Jalan Terbaik

(Wawancara)

Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan, kemajuan bangsa Indonesia di masa depan hanya bisa diraih jika sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Prabowo menilai demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik dan sudah teruji di banyak negara.

Untuk itu, menurut Prabowo dalam wawancara khusus dengan harian Kompas dan Kompas TV di kediamannya, di Jakarta, Senin (28/11) malam, jangan sampai elite politik merusak sistem demokrasi. Saluran kritik rakyat terhadap elite politik dan penguasa negeri tetap harus dibuka untuk menjamin demokrasi tetap terjaga.

Dinamika politik yang terjadi selama beberapa waktu terakhir, menurut Prabowo, menjadi salah satu ujian bagi semua komponen bangsa untuk tetap memegang teguh demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Prabowo menilai kudeta atau upaya pengambilalihan kekuasaan dari pemerintah yang sah dan terpilih melalui pemilu yang demokratis akan selalu berujung pada krisis legitimasi, apalagi kudeta di Indonesia tak pernah berhasil.

"*Tadi saya jawab bahwa risikonya, kalau pengambilalihan (kekuasaan) bisa saja di mana-mana terjadi, tetapi legitimasinya yang menjadi masalah. Kebetulan sampai sekarang di Indonesia tidak pernah berhasil*," ujarnya.

Prabowo mengatakan, demokrasi dan Pancasila sebenarnya mengajarkan bangsa Indonesia bahwa semua persoalan bangsa dapat diselesaikan dengan musyawarah dan saling mengerti. "*Saya selalu mengajak, mari kita selesaikan dengan sistem terbaik, yang sudah diuji di dunia, yang terbaik itu adalah demokrasi. Selesaikan melalui pemilihan. Kita juga punya budaya Pancasila, jangan jadi mantra di mulut. Semua bisa diselesaikan dengan musyawarah. Saya kira kalau dengan musyawarah, kita saling mengerti. Jangan permusuhan kita ciptakan atau kita teruskan. Itu, kan, enggak perlu. Enggak baik. Kecurigaan kita selesaikan dengan kebaikan*," katanya.

Perbedaan tajam di antara elite politik karena kontestasi yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah tidak seharusnya mengarah pada perpecahan bangsa.

"*Saya prihatin, di sinilah demokrasi kita harus kita jaga benar-benar. Ini memang kadang-kadang banyak pemimpin politik memikirkan kepentingan pribadi, jadi dia berbuat tidak melihat dampak kepada rakyat. Itu yang saya khawatir*," ujar Prabowo.

Secara khusus Prabowo mengapresiasi pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo dan upayanya meredakan ketegangan politik di Tanah Air. Prabowo mengatakan, dirinya memang memberi masukan kepada Presiden dalam pertemuan tersebut. "*Saya memberi masukan-masukan dan saya lihat*

bagaimanapun ketegangan harus kita redakan. Suatu keadaan yang tegang merugikan semua pihak," ujarnya.

Prabowo juga memuji langkah yang dilakukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Tito Karnavian yang menggelar pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah ulama yang menggagas demonstrasi terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama. "*Alhamdulillah, pertemuan tokoh-tokoh (inisiator unjuk rasa) 2 Desember dengan Kapolri ternyata membuahkan kesadaran yang baik. Kita berharap 2 Desember nanti sejuk*," katanya.

Dewasa dan arif

Menurut Prabowo, elite politik dan semua pemimpin di Indonesia harus mulai dewasa dan arif. Pemimpin juga harus bertindak hati-hati agar rakyat tidak dirugikan di kemudian hari. Demokrasi mengajarkan bahwa semua persoalan harus diselesaikan dengan kepala dingin. Prabowo mengatakan, ada kepentingan bangsa yang lebih besar dan harus dijaga.

"*Saya mengajak semua pihak untuk damai, sejuk, arif, dewasa, dan sabar. Menyelesaikan semua masalah dengan kepala dingin dan dengan memikirkan kepentingan yang besar bahwa kita harus jaga ketenteraman dan kedamaian. Itu keyakinan saya. Kalau pemimpin tidak hati-hati, yang rugi banyak orang, banyak pihak. Kita semua rugi, bangsa kita akan rugi*," ujar Prabowo.

Upaya yang sama untuk menciptakan kedamaian juga dilakukan Prabowo yang mengaku selama dua pekan terakhir menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh. "*Saya dalam pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh, selama dua minggu ini, selalu mengajak mereka seperti itu. Jadi, kita boleh merasa benar, tapi kita juga harus memikirkan semua dampak, ucapan dan sikap kita masing-masing*," katanya.

Prabowo mengungkapkan, pelajaran yang dapat diambil dari dinamika politik yang cukup menegangkan selama beberapa hari terakhir adalah pemimpin harus menjaga amanah yang diberikan kepada rakyat. "*Ini, kan, tergantung kita, tergantung pemimpin. Kita harus mendidik yang baik, bertindak yang baik. Kita harus menjaga integritas. Jangan undang-undang yang kita hasilkan hanya menguntungkan pihak-pihak yang punya uang. Jangan rakyat kecil tidak dianggap*," kata Prabowo.

KOMPAS, 29 November 2016

Anatomi Amuk Massa

Dua dasawarsa lalu, pendatang Inggris yang datang ke Asia Tenggara menyaksikan fenomena yang mereka sebut dengan kata ”*amock*”. Menurut mereka, ”*to run amock*” artinya seseorang atau sekelompok orang yang membunuh musuh-musuhnya untuk membalas dendam, yang didahului dengan ritual meminum candu sampai mabuk. ”*Setelah mabuk kepayang mereka berhamburan dari rumah mereka untuk membunuh. Bahkan, orang yang mencoba mencegah mereka juga ikut dibunuh*,” tulis Captain Cook. Secara perlahan kata amock berubah jadi ”amok”.

Ada yang menafsirkan amok sebagai ”bentuk ganjil dari ketidaknalaran akal manusia”. Ada pula yang melihat amok dari sisi psikologis sebagai ”perilaku sangat destruktif yang diikuti dengan amnesia, rasa lelah, bahkan bunuh diri”. Namun, dalam ranah sosial ketidaknalaran akal itu semakin kasatmata karena para amuco juga memegang senjata dalam bentuk berbagai rupa. Amok atau amuk dalam bahasa kita kadang masih terjadi di negara ini, mulai dari di ajang politik sampai ajang sepak bola.

Hilangnya nalar kadang kala membuat kita, yang masih nalar, ikut terkesima seperti orang Portugis di masa lalu. Apa salahnya fasilitas umum sampai dirusak, apa pula salahnya mobil-mobil perpelat kota lain dipecahkan kacanya cuma karena yang terjadi di lapangan hijau?

Agak sulit menebak mulai kapan amok menjadi bagian dari kultur politik kita. Soalnya sejak kecil kita diajari bahwa Indonesia adalah bangsa yang ramah tamah dan suka gotong royong, sebuah antitesis dari sikap suka mengamuk.

Ada yang yakin kultur amok pertama kali berkembang karena sikap anti-Tionghoa pada era penjajahan Belanda. Kesalahan kompeni adalah menempatkan para pedagang Tionghoa di kelas sosial teratas bersama para pejabat Belanda.

Kita masih belum lepas dari penyakit amok terhadap etnis Tionghoa yang terus terjadi sampai kini. Beberapa teman Tionghoa saya sempat diliputi rasa takut akan terjadinya kekerasan terhadap mereka lagi sebagai penularan terhadap sikap anti sebagian orang terhadap gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama.

Kultur amok berkembang subur setelah terjadinya pembunuhan terhadap jenderal-jenderal kita pada tahun 1965. Tak lama kemudian terjadi pembunuhan terhadap mereka yang komunis ataupun yang bukan. Sampai kini jumlah korban akibat amuk massa itu belum diketahui persis.

Anatomi amuk massa perlahan berubah. Faktor penyebab amok semakin bertambah, mulai dari perbedaan tafsir agama, sengketa pilkada, sampai persoalan kecil seperti perlakuan kejam majikan terhadap pembantu rumah tangga.

Amuk massa juga menjadi bisnis yang menguntungkan karena Anda bisa datang ke begitu banyak entitas pengerah massa. Jika harga sudah cocok, Anda tinggal saksikan massa pro-Anda menyerbu ke mana pun.

Selama era Reformasi ini setiap tahun pasti ada amuk massa. Frekuensinya sangat tergantung dari seberapa persaingan politik di tingkat elite.

Amuk massa tentu juga mengalami desentralisasi. Anda sendiri melihat betapa banyaknya calon kepala daerah yang saling bertarung bukan cuma dengan tema-tema kampanye, melainkan juga dengan pengerahan massa.

Jangan salah, para pejabat yang memerintah juga mempunyai massa. Saya jadi ingat peristiwa di Jalan Sudirman pada 13 November 1998.

Penguasa di kala petang itu mengerahkan puluhan anggota pamswakarsa untuk menghadapi para mahasiswa.

Penguasa memang memiliki berbagai cara untuk mencegah terjadinya amuk massa. Ada demo tandingan, ada pawang hujan, ada imbauan, dan ada pula ancaman.

Semua orang pasti setuju Aksi Bela Islam I, II, dan III berjalan aman dan tertib. Sayang sekali yang kedua tanggal 4 November sempat diwarnai kericuhan kecil. Sampai kini polisi masih belum mengungkap tuntas motivasi para pelaku kericuhan kecil itu. Namun, sejarah kekerasan di negeri ini selalu mengaitkan antara kerusuhan yang diotaki sang dalang yang berjudi untuk ambil keuntungan.

Ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan massa, yang damai ataupun beringas, juga dalam rangka berjudi untuk memetik keuntungan. Itu sebabnya muncul spekulasi Aksi Bela Islam bukan mustahil ditunggangi mereka yang ingin memaksakan proses pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo.

Siapa yang mendalangi kericuhan 4 November dan siapa saja yang ingin memanfaatkan kemungkinan amuk massa untuk menggelar Sidang Istimewa MPR untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, mudah-mudahan akan terungkap.

Patut dipuji langkah Presiden Joko Widodo ikut shalat Jumat di Monas bersama para peserta Aksi Bela Islam III yang ternyata memang superdamai. Langkah Presiden dibutuhkan untuk menjamin ketenteraman kita menjalani kehidupan sehari-hari dan juga untuk menyemangati aparat keamanan yang bekerja profesional. Sekali lagi, salut untuk Presiden Joko Widodo. Pada saat yang kurang mengenakkan belakangan ini, kita butuh pemimpin yang bernyali besar.

Budiarto Shambazy, Wartawan Senior KOMPAS

KOMPAS, 03 Desember 2016

Hilangnya Ruh Agama Dakwah

AKHIR-AKHIR ini bila dicermati secara seksama, Islam di Indonesia semakin memudar atau lentur sebagai agama dakwah. Selanjutnya, wajah Islam lebih dominan tampil sebagai agama politik. Memang, tidak haram bagi Islam menyandingkan agama dan politik karena di dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari dimensi politik. Islam sebagai agama dakwah sangat berbeda dari Islam sebagai kekuatan agama politik.

Islam sebagai agama dakwah mengedepankan nilai-nilai subtansial Islam. Islam kemudian mengejawantah menjadi agama rahmat, santun, akhlakul karimah, bersifat merangkul, merajut persaudaraan, kebersamaan, saling asah, asih dan asuh dalam tata kehidupan sosial dan keagamaan.

Religiusitas menjadi sejuk dan damai, membawa kententraman lahir dan batin. Itulah ruh Islam sebagai agama dakwah. Adapun Islam sebagai agama politik mengedepankan sentimen pribadi, kelompok, etnis dan suku menjadi sangat dominan.

Sifat lemah lembut, suka memaafkan, suka bergandeng tangan dengan nonmuslim, suka kebinekaan adalah bentuk kelemahan dan ketidakberdayaan. Islam harus tampil strong, power full dan tegas serta tidak kenal kompromi terhadap siapa pun termasuk dengan sesama muslim yang tidak sepaham.

Islam sebagai agama dakwah bersifat mengajak semua pihak ke jalan Allah Swt. Islam memelihara mereka yang sudah benar keimanannya, membimbing yang belum benar, mendampingi yang agak melenceng-melenceng aqidahnya dan merangkul yang belum muslim agar menjadi muslim, yang belum beriman menjadi beriman. Karena itu manusia yang memahami Islam sebagai agama dakwah akan bersifat lemah lembut, santun, mengutamakan akhlakul karimah dan tidak membangun garis demargasi yang keras dan cenderung memvonis.

Sikap dan prinsipnya fleksibel yang penting subtansinya bisa tercapai. Prinsip sebagai agama dakwah adalah bagaimana semua manusia dari kelompok suku, ras dan agama mana pun agar bisa menikmati bahwa Islam itu agama rahmat.

Agama yang membawa kedamaian dan jalan lurus bagi manusia yang ingin sukses dunia dan akhirat. Hal ini berbeda dari prinsip Islam sebagai agama politik. Tampilan mereka keras dan tegas. Wajah yang ditampilkan adalah tidak kenal kompromi dan tidak mau mengalah dengan siapa pun. Bukan hanya dengan kelompok nonmuslim, dengan sesama muslim pun yang meraka anggap pahamnya tidak sama atau dalam memahami agama ada perbedaan dianggap bukan kelompoknya dan bisa dituding kafir.

Kalau sudah dituduh kafir, maka selanjutnya akan dianggapm halal darahnya dan tidak perlu dikasihani. Kekakuan wajah Islam akhir-akhir ini dirasa bukan hanya oleh nonmuslim tetapi oleh kelompok muslim yang meyakini Islam sebagai agama rahmat juga mengalami kegelisahan.

Gelisah karena wajah islam semakin menyeramkan, menakutkan dan kurang lembut serta membawa kedamaian. Kelompok yang mengaku Islamnya paling benar sering menilai kelompok lain yang tidak sepaham dan seirama sebagai ahli bidíah, musyrik, dan kafir. Kata-kata kafir semakin sering menghiasi dan membanjiri kosa kata dalam pergaulan Islam kontemporer. Padahal tuduhan kafir itu bukan hak manusia tetapi haknya Allah Swt, pemilik agama dan keimanan.

Welas Asih

Implikasi dari Islam yang berwajah politik adalah menghalalkan satu sama sama lainnya sesama muslim saling menuduh, memfitnah, membuka aib, menjelekkan, memojokkan. Orang yang memiliki pemahaman yang berbeda dari yang mereka yakini akan dianggap menyeleweng dari agama dan dijadikan bahan olok-olok serta kampanye. Bahasa-bahasa yang muncul kemudian semakin menggelisahkan, bukan menyejukkan. Sekan-akan surga itu miliknya dan yang lain tidak bisa mendapatkannya.

Padahal kalau dihayati dengan seksama sebetulnya manusia di hadapan Allah itu tidak perlu merebut otoritas Allah. Manusia itu bukan penentu ibadahnya yang paling sah, perilakunya paling mulia, dan menganggap yang lain semua salah. Itu semua adalah hak prerogratif Allah.

Allah tidak perlu dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun dalam menegakkan otoritasnya. Siapa tahu manusia-manusia yang selalu diolok-olok, dipojokkan, dihina dan dituduh bidíah justru ibadah dan hidupnya diterima oleh Allah. Allah menerima bukan karena ibadahnya benar tetapi karena sifat welas asihnya kepada orang yang selalu dizalimi. Sebaliknya menolak ibadahnya orang-orang yang selalu merasa benar dan paling sah karena sikap dan merasa diri seperti itu sudah mengintervensi hak prerogratif Allah. Jika terjadi semacam itu, manusia mau apa? Lewat tulisan ini, penulis mengajak kepada semua saudara-saudara se-iman se-agama, sebangsa dan setanah air, marilah kembali kepada ruh Islam sebagai agama dakwah.

Jabir Alfaruqi, Ketua PW Ansor Jawa Tengah 2010-2014

SUARA MERDEKA, 20 Desember 2016

Ahok dan Perang Keramaian

Aton Rustandi Muliana (2014) dalam studinya secara spesifik menjelaskan bahwa keramaian, kegaduhan, dan kebisingan sering kali dibentuk atas dasar kesengajaan. Keramaian itu adalah sebuah citra sosial yang dibangun untuk memberi kesan mendalam terkait dengan dua hal, yakni kekuatan dan peristiwa besar. Dalam konteks permasalahan yang dihadapi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang dituduh menistakan agama, misalnya, kemudian ada gerakan dari masyarakat—berbasis agama—turun ke jalan dengan jumlah besar. Mereka ingin mengkonstruksi citra sebuah kekuatan massa sekaligus hendak menunjukkan bahwa kasus itu besar dan penting. Setelahnya, keramaian tidak hanya diwakili oleh tubuh-tubuh yang berkumpul, tapi juga komentar-komentar di media sosial. Perang wacana dan pembelaan dari masing-masing kubu menjadi kegaduhan—keramaian—tersendiri yang tak kalah sengit.

Selama ini belum ada studi yang secara spesifik mengamati fenomena "*keramaian*", terutama dalam konteks politik. Keramaian yang dimaksudkan bukan tentang "*apa yang diramaikan*", melainkan bagaimana keramaian itu dibentuk, dimaknai, dan implikasi apa yang ditimbulkannya. Dalam konteks ini, apa yang diramaikan menjadi tidak lagi penting untuk diulas. Kini kita memasuki "*zaman keramaian*" (kegaduhan?) atau, meminjam istilah Guy Debord (1967), disebut sebagai *spectacle*. Hal ini terjadi ketika kita menjadikan apa pun sebagai sebuah masalah berjemaah, konsumsi publik, dan siapa pun dapat memberinya makna dan nilai baru.

Michael Oriard (1993) dan Alan Tomlinson (2006) meneliti bagaimana proses keramaian itu dibentuk. Ia mengambil kasus dalam pertandingan olahraga, sepak bola. Pertandingan sepak bola dalam arti sesungguhnya tidaklah penting. Yang penting justru bagaimana menjadikan peristiwa itu bermakna dan bernilai. Hal ini dikonstruksi, misalnya, dengan perang komentar-wacana antara klub dan pelatih, menggerakkan suporter, mengangkat isu rasial, hingga membuat pertandingan tampak menarik dengan adanya dentuman kembang api, tari-tarian, serta nyanyian (musik).

Peristiwa biasa kemudian menjadi luar biasa. Seseorang kemudian menonton sepak bola tak hendak menyaksikan gelindingan bola dari kaki ke kaki, melainkan pembelaan terhadap harga diri dan gengsi. Mereka bisa sangat marah dan berbuat anarkistis saat klub yang dibelanya kalah, dan menjadi sangat jemawa saat klub yang dibelanya menang. Secara hierarkis, sebenarnya mereka tidak memiliki hubungan langsung terhadap pertandingan dan pelaku permainan itu (pemain, pelatih, pengurus). Namun kehadiran individu-individu itu seolah dibuat dekat dengan memunculkan "*ritual keramaian*" tadi. Wacana, isu, dan gosip diembuskan untuk meraih simpati, terutama lewat berbagai media. Orang-orang dalam radius terjauh pun merasa memiliki kewajiban untuk terlibat langsung. Timbullah kemudian fans club, suporter, sepak bola Eropa di Indonesia yang mati-matian membela klubnya nan jauh di sana.

Jika teori itu dihadapkan dalam persoalan politik mutakhir, orang-orang yang tak pernah bersentuhan langsung dengan Ahok merasa memiliki kewajiban untuk terlibat, entah membela atau menghujat. Mereka meluapkan dengan berbagai cara. Keramaian pun semakin membuncah sehingga esensi persoalan yang sebenarnya menjadi bias alias kabur. Tidak lagi penting tentang apa yang diucapkan Ahok, melainkan bagaimana keramaian itu terus dipelihara lewat pemunculan atau produksi wacana, konflik, isu, dan gosip baru. Sama seperti pertarungan di antara dua klub sepak bola, bukan lagi persoalan kalah-menang, melainkan tentang citra-harga diri yang dibangun.

Pada zaman ini keramaian sengaja dibentuk dengan berbagai kepentingan, sering kali bagi orang-orang yang paham dan mampu mengolah justru menjadikannya senjata nan akurat dan berguna. Ia mengolah kegaduhan itu dengan teliti, menggerakkan manusia-manusia dengan hanya satu produksi wacana kecil. Kisah Ahok berkembang bukan lagi semata penistaan agama, tapi juga menyangkut persoalan politik, suku, ras, hukum, ekonomi, dan kultural. Setiap individu perang wacana.

Dalam dunia seni pertunjukan, Ngarot di Indramayu dan pasar malam di Jawa adalah contoh yang ideal bagaimana peristiwa kegaduhan bunyi diproduksi untuk meraih simpati publik agar datang dan terlibat. Suara bising orkes dangdut dibenturkan dengan musik memekik kesenian reog, suara gamelan tari topeng, dan bunyi mainan anak-anak secara bersamaan. Kegaduhan itu adalah katalisator dalam meraih tujuan-tujuan tertentu. Dalam keramaian ada eksistensi dan harga diri. Lewat keramaian mereka menciptakan ruang yang gaduh dengan berbagai diskusi dan wacana. Pertanyaannya kemudian, apa yang hendak mereka cari lewat keramaian itu? Jika demikian, apabila setiap orang begitu ramai dan gaduh menanggapi kasus Ahok, apa yang sudah dan akan mereka dapatkan? Bukankah hubungan pertemanan seringkali harus berakhir, hidup menjadi tidak tenang dengan berbagai teror keramaian baru?

Alangkah baiknya jika kita dapat mengolah keramaian itu dengan bijak, dengan sedikit menahan untuk tidak menyampaikan wacana yang dapat membuat kegaduhan baru. Bukankah terlalu ramai hingga menyebabkan bising dan noise juga tidak baik untuk kesehatan? Karena itu, dalam beberapa kasus, keramaian memang harus dihindari agar hidup menjadi lebih tenang dan damai.

Aris Setiawan, Etnomusikolog ISI Surakarta

TEMPO.CO, 20 Desember 2016

Imparsialitas Hakim Kasus Ahok

SIDANG pengadilan perdana dugaan kasus penistaan agama dengan tersangka calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) telah digelar pada 13 Desember 2016 lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto. Proses persidangan kasus ini bukan hanya menjadi perhatian publik nasional, melainkan juga publik internasional setidaknya beberapa media asing menjadikan sebagai headlines-nya, antara lain New York Times, The Washington Post (USA), dan The Guardian (Inggris).

Fokus perhatian publik pada sidang kasus ini ingin membuktikan dan menguji seberapa kuat institusi pengadilan dan para hakimnya mampu bersikap imparsialitas (ketidakberpihakan), yakni, semua warga negara diperlakukan secara sama dan adil di depan hukum tanpa prasangka atas dasar perbedaan apa pun. Hal ini merupakan prinsip dasar tegaknya hukum (*rule of law*) dan proses penegakan hukum di pengadilan (*due process of law*) menuju pengadilan pidana yang adil (*fair trial*).

Tantangan Hakim

Sesungguhnya pengadilan kasus dugaan penistaan agama ini bukan untuk yang pertama, namun telah kerap terjadi hanya saja kasus Ahok ini sangat berbeda karena bersangkut-paut dengan isu politik menjelang Pilkada DKI Jakarta. Akibatnya banyak pihak berkepentingan dalam kasus ini.

Itulah sebabnya kasus ini menjadi tantangan tersendiri bagi hakim dan institusi pengadilan karena menjadi penentu salah dan benarnya seseorang telah melakukan tindak pidana sesuai hasil penyidikan Polri dan dakwaan jaksa sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Fokus perhatian dan harapan publik kini ditujukan pada hakim karena sesungguhnya inti tegaknya hukum di tangan hakim. Dengan demikian hakim menjadi kunci utama untuk dapat menutup rapat dan menyudahi sebuah kasus tindak pidana melalui putusannya yang adil dan memenuhi rasa keadilan masyarakat berdasarkan fakta-fakta, alat bukti, saksi di persidangan serta keyakinan hakim. Dalam tradisi hukum disebut sebagai sidang pengadilan judex fictie, yakni kemampuan para pihak yang berperkara untuk mampu meyakinkan hakim agar dapat memutus perkara sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan para pihak.

Publik berharap hakim dalam mengadili kasus ini tidak terpengaruh oleh opini publik yang cenderung bersifat menjustifikasi bahwa terdakwa dalam kasus ini pasti bersalah dan dihukum. Dalam khazanah hukum kerap kali hakim dalam membuat putusan heurastic atau mental hourtcut sehingga putusan hukumnya cenderung bias hanya ingin menguntungkan salah satu pihak yang berperkara karena kuatnya opini publik.

Padahal jauh hari DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi manusia) PBB pada tahun 1948 telah menegaskan bahwa Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang; setiap orang,

dalam persamaan yang penuh, berhak atas proses peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.” Ketentuan DUHAM ini kemudian diterjemahkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 pascaamandemen yang menegaskan bahwa, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Steven Lubet (1998) dalam *Judicial Dicipline and Judicial Independence*, mengingat bahwa yang dimaksud kekuasaan kehakiman yang merdeka itu setidaknya mengandung tiga nilai dasar, yakni adil (*fairness*), tidak berpihak (*impartiality*), dan berdasarkan kejujuran moral (*good faith*). *Fairness* maksudnya bahwa hakim dalam memutus perkara haruslah memberi kesempatan yang sama dan terbuka kepada semua pihak untuk didengar tanpa mempertimbangan aspek status sosial para pihak berperkara.

Impartiality maksudnya hakim yang merdeka adalah hakim yang dalam membuat putusan hukum tidak terpengaruh dan bebas dari tekanan publik dan kekuasaan politik tertentu. Good faith maksudnya hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan kejujuran moralitas masyarakat dan bersedia menanggung risiko atau akibat atas putusannya baik yang bersifat personal, politis maupun ekonomi. Maka di titik ini profesi hakim adalah profesi yang sangat mulia (*nobile officiun*) sepanjang sang hakim bekerja berdasarkan perintah nurani, bukan atas dasar pesanan dan tekanan opini publik. Putusan hakim dalam semua perkara tak berdiri sendiri, namun berkait dengan kemampuan dan kemauan masyarakat terutama pihak-pihak yang berperkara untuk menerima apa pun putusan hakim. Karena ketidakpatuhan dan ketidaktaatan masyarakat pada putusan hukum akan dapat berakibat pada tak berwibawanya negara hukum (*state of law*) sebagai inti dari adanya pengadilan. Putusan hakim dalam kasus Ahok ini merupakan ujian bagi negara hukum Indonesia.

Itulah sebabnya sebagai bangsa yang beradab yang mempercayai demokrasi dan hukum sebagai pilar jalannya negara, maka hari ini dan beberapa waktu ke depan kita sedang diuji mampukah kita tetap mempertahankan konsensus, bahwa demokrasi tanpa hukum akan timpang. Sebaliknya, sistem hukum yang baik adalah yang imparsialitas. Keduanya merupakan mutualis-simbiosis yang harus bergandegan secara simultan dan sistematis.

Agus Riewanto, Pengajar Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

SUARA MERDEKA, 20 Desember 2016

Apakah Pasal Penebar Kebencian Masih Relevan Dipertahankan?

Perdebatan mengenai konstitusionalitas Pasal 156a KUHP seharusnya sudah berakhir dengan diputusnya konstitusionalitas pasal ini oleh Putusan MK Nomor 84/ PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Sekalipun demikian, pro dan kontra masih saja bergulir tentang bagaimana sikap negara terhadap persoalan yang menyangkut penistaan agama di Indonesia. Dalam putusan MK No 140/ PUU-VII/2009, MK berpandangan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut paham urusan agama tidak dipisahkan dari negara. Artinya, negara tidak secara otonom menentukan pokok-pokok ajaran suatu agama dan hanya menerima kesepakatan internal agama yang bersangkutan.

Namun, pertimbangan ini melupakan kenyataan bahwa terkadang di dalam internal agama sekalipun terdapat perbedaan pendapat. Sehingga, apabila perbedaan pendapat ini terjadi, Pasal 156a KUHP dikhawatirkan dapat menjadi bola liar yang tidak terkendali. Bangsa Indonesia seharusnya tidak abai terhadap pendapat dari bapak-bapak pendiri bangsa. Bung Hatta misalnya menekankan pemisahan antara negara dan agama (scheiding van kerk en staat) di dalam pidatonya di persidangan BPUPKI.

Atau, bahkan Bung Karno yang berpandangan bahwa pemerintah justru merupakan halangan apabila mencampuri urusan agama. Namun, pada akhirnya Pasal 156a KUHP tetap dipandang penting sebagai bagian dari delik-delik penebar kebencian. Tujuannya untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di kalangan penduduk agar jangan sampai terkena berbagai macam hasutan yang menyebar kebencian misalnya dengan ucapan, tulisan, gambar, dan sebagainya di depan umum atau di media massa. Namun, saat ini justru marak isu perpecahan, intoleransi, bahkan politisasi dengan membonceng persoalan yang sedang terjadi dengan menggunakan Pasal 156a KUHP. Tentu ini sangat membahayakan konsep NKRI. Karena itu, menjadi pertanyaan penting untuk dipikirkan oleh kita bersama, masihkah kita akan bertahan dengan sebuah ketentuan yang justru menjadi alat politik *devide et empera*.

Apalagi akhir-akhir ini, di tengah pertarungan politik yang semakin bebas, demokrasi langsung dan transparansi serta kehadiran media sosial menjadi benang kusut yang saling berkelindan. Belum semua politisi dapat bertindak dan berperilaku dewasa dan mampu menjaga diri dari ambisi pribadi dan kepentingan kelompok. Beragam cara dilakukan untuk dapat memenangkan pertaruhan politik demi kemenangan partai atau kelompoknya. Maka, saling pelintir perkataan, terlebih jika telah disebarkan melalui media sosial, menjadi senjata mematikan. Apalagi, jika perkataan yang dipelintir justru bersangkut paut dengan soal agama. Jika sudah begini, akan sangat sulit memisahkan mana persoalan hukum, mana persoalan politik, ataupun yang murni soal agama. Tentu akan sangat baik apabila politisi menahan diri dari perilaku dan tutur kata apa pun yang berpotensi memecah belah dalam pertarungan politik.

Seorang negarawan seharusnya paham dan bijak dalam memilah apa hal yang perlu ataupun tidak perlu disampaikan kepada publik. Namun, di tengah-tengah kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat akibat suhu panas menjelang pilkada ini, ada juga pihak-pihak yang tega mengeksploitasi kelemahan lawan politiknya untuk memenangkan pilkada tanpa memusingkan bahwa kesatuan dan keutuhan negara, toleransi yang telah terpupuk dan terpelihara, serta semangat Bhinneka Tunggal Ika menjadi porak-poranda dengan mengorbankan NKRI.

Sikap-sikap politik seperti ini sama jahatnya sehingga pada akhirnya hukum hanya menjadi alat untuk melayani kekuasaan. Kita harus ingat bahwa citacita negara hukum (rechtsstaat) yang ingin diwujudkan tidak akan dapat menjadi kenyataan apabila hukum masih dianggap sebagai subordinat dari kekuasaan. Hukum memang dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat, tetapi juga harus ditegakkan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mencapai perubahan yang dicita-citakan. Inilah yang dikemukakan Roscoe Pound sebagai *law as a social engineering*.

Maka, jika masyarakat dan penguasa tengah salah menerapkan hukum, seharusnya hukum tidak boleh larut, melainkan harus menjadi sarana untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan penguasa ke jalan yang benar. Saat ini masyarakat memandang hukum hanya sebagai alat untuk melindungi kepentingan tanpa mengerti apa yang dimaksud dengan kepentingan dan sebenarnya kepentingan apa yang tengah diperjuangkannya.

Kepentingan pribadi tersebut, sekalipun dimiliki banyak orang ataupun golongan terbesar, tidak serta-merta menjadi kepentingan umum. Menurut Roscoe Pound, kepentingan sosial adalah sesuatu yang lazim dan wajar, klaim, tuntutan, keinginan, atau harapan de facto di mana manusia secara kolektif berusaha untuk memuaskannya dan masyarakat beradab harus mengakui dan melindunginya melalui hukum. Karena itu, kepentingan sosial sejatinya tercermin dalam hukum dan konstitusi yang ada di suatu negara. Kepentingan sosial tidak didasarkan pada pendapat individu ataupun kelompok apalagi yang bersifat sektarian. Jika dasarnya adalah pendapat individu dan kelompok, itu masih masuk dalam kepentingan pribadi. Maka, hukum tidak boleh sekadar melindungi kepentingan pribadi, tapi juga harus melindungi kepentingan publik yang dijamin berdasarkan konstitusi.

Kalau justru kepentingan individu-individu yang banyak ini berupaya untuk menegasikan kepentingan umum, negara seharusnya tidak tinggal diam. Kini pergulatan Pasal 156a KUHP membawa banyak pelajaran bagi publik dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita semua sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati. Namun, pertanyaannya kini, NKRI seperti apa yang akan kita bangun bersama? NKRI yang melindungi seluruh tumpah darahnya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi atau NKRI yang tunduk untuk melayani kepentingan individu per individu?

Frans H Winarta, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan; Mantan Anggota Governing Board Komisi Hukum Nasional (KHN)

KORAN SINDO, 20 Desember 2016

Politik Manipulasi "Emosi" di Dunia Maya

> "*This is the world of information warfare, where computer disinformation disseminated through an array of blinking screens carries real-world impact*" (Marc Goodman, 2015)

Tak gampang memilah antara fakta dan tipuan di era "tsunami" informasi. Apalagi, jika informasi palsu acap kali didesain memanipulasi "emosi" pengguna internet hingga menekan rasionalitas dalam memilah informasi. Akibatnya, kohesi sosial dan persatuan terancam.

Pemilihan presiden Amerika Serikat pada November silam mengilustrasikan dampak informasi palsu di media sosial terhadap kehidupan sebuah bangsa. Data Politicawave dari hasil uji petik berita terkait pilpres AS yang dibagikan di Facebook menunjukkan berita-berita palsu dari media tak jelas lebih banyak menarik keterlibatan pengguna Facebook ketimbang berita faktual dari media arus utama.

Beberapa pekan sebelum pemungutan suara, berita palsu lebih banyak dibagikan, mendapat reaksi, dan dikomentari ketimbang berita faktual. Penyebaran informasi dan berita palsu yang cenderung bernada negatif terhadap Hillary Clinton disebut beberapa pengamat politik sebagai salah satu dari sekian banyak variabel yang menyebabkan kekalahan kandidat presiden dari Partai Demokrat tersebut.

Jika AS yang infrastruktur demokrasinya terbilang maju seperti itu, bagaimana dengan Indonesia? Beberapa bulan terakhir ada peningkatan penyebaran informasi palsu di media sosial di Indonesia. Target serangan informasi bohong atau informasi yang "dipelintir" hingga keluar konteks itu mulai dari tokoh agama, tokoh politik, hingga penegak hukum. Sering kali isu yang dibicarakan atau disebarkan memainkan aspek emosi atau "perasaan" pengguna internet dengan menggunakan sentimen primordial ataupun sentimen agama.

Judul dan isi informasi dibuat bombastis. Akibatnya, tidak jarang diskusi soal isu yang diulas membuat pengguna internet saling bersitegang. Dalam banyak kasus, diskusi di media sosial itu tidak mengubah sudut pandang dan posisi pihak-pihak yang berbeda pandangan.

Polarisasi

Fenomena tersebut tidak terlepas dari polarisasi pandangan politik yang tak kunjung pulih seusai Pemilihan Presiden RI 2014. Ketika para kandidat yang bertarung di Pilpres 2014 sudah menjalin komunikasi, sebagian pendukungnya masih belum bisa meninggalkan atmosfer pilpres. Sentimen itu terbawa hingga kini. Awetnya polarisasi ini, selain karena tiap-tiap pihak sudah tersentuh "*emosi*"-nya, juga karena sumbangsih faktor teknis dan ekonomi media sosial.

Marc Goodman dalam bukunya, *Future Crimes* (2015), menjelaskan pengalaman di dunia maya merupakan hasil "kurasi" penyedia layanan.

Pengelola laman daring atau media sosial menyaring informasi yang amat banyak lewat rangkaian algoritme, lalu menyajikan informasi yang cocok untuk individu pengguna. Informasi itu disesuaikan dengan karakter individu berdasarkan aktivitas mereka di dunia maya, seperti dari pertukaran pesan atau laman yang dikunjungi. Tujuannya, agar seseorang bertahan makin lama sehingga perusahaan dapat penghasilan iklan lebih banyak lagi.

Meski demikian, pola ini berpotensi membuat orang makin sering terpapar dengan ide atau pandangan yang sepaham dengannya. Lama-lama, hal ini menurunkan kadar toleransi mereka terhadap perbedaan pandangan. Hal ini juga diperparah fenomena bias konfirmasi, yakni kecenderungan untuk mencari informasi yang hanya memperkuat pandangannya.

Di Indonesia, pengguna internet dan media sosial terus tumbuh. Pada Juni 2016, penetrasi internet di Indonesia berdasarkan data Internetworldstats sudah mencapai 34 persen atau sekitar 88 juta pengguna. Apakah fenomena informasi palsu dan polarisasi ini di dunia maya akan semakin merenggangkan kohesi sosial di Indonesia? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Semua bergantung pada respons dan antisipasi yang disiapkan. Beberapa aktivis demokrasi digital di Indonesia mendorong program literasi digital di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga didorong mendeteksi dini informasi-informasi palsu.

Pada saat bersamaan, memunculkan narasi-narasi penyeimbang untuk menangkis informasi palsu yang agitatif dan berpotensi menimbulkan perpecahan. Pemerintah perlu memiliki desain besar mengelola ruang publik baru di ranah digital, tetapi tetap menghormati privasi dan kebebasan berekspresi.

Sinyal positif muncul dari adanya kesadaran kolektif sebagian pengguna internet untuk meminimalkan dampak negatif informasi palsu itu. Akhir Desember ini, pegiat urundaya di dunia maya berencana meluncurkan wadah "Turn Back Hoax".

Fokusnya pada pembangunan basis data (database) dan pelaporan informasi palsu di laman daring, pesan berantai, serta gambar palsu. Selanjutnya, data itu akan jadi basis menandai informasi bohong dan laman penyebar informasi itu. Inisiatif ini muncul karena ada kekhawatiran atas makin maraknya penyebaran informasi palsu yang bisa mengadu domba masyarakat.

Namun, inisiatif urundaya masyarakat serta upaya pencegahan pemerintah perlu juga diikuti dengan langkah untuk menyentuh episentrum persoalan. Jika diibaratkan fenomena medis, munculnya informasi palsu di dunia maya yang ditangkap, diyakini, lantas makin membelah masyarakat merupakan simtom atau gejala. Tentu pemangku kepentingan harus mencari "penyakitnya". Tanpa itu, tindakan yang muncul hanya reaktif, dan tak menyelesaikan "penyakit".

Globalisasi dan integrasi ekonomi internasional menimbulkan fenomena kelas menengah yang naik dalam mobilisasi vertikal. Namun, ada pula yang "jatuh" dan merasa tidak aman akibat relasi ekonomi politik. Kelas menengah yang "jatuh" itu perlu mencari kambing hitam. Dalam konteks Amerika Serikat, sasaran tuduhan kelas menengah itu jatuh pada imigran Amerika Latin, Asia, ataupun imigran berlatar belakang Muslim.

Guy Standing dalam *The Precariat: The New Dangerous Class* (2011) bahkan menyebut globalisasi menciptakan kelas sosial baru yang berbahaya, yakni prekariat; orang-orang yang tak aman pekerjaannya, tak aman secara identitas, serta tak punya kuasa atas waktunya. Kelas sosial ini mudah tersulut amarah. Dalam konteks Indonesia, kelas menengah yang merasa tidak aman itu tidak bisa menyalurkan kegundahan melalui partai politik ataupun jalur formal lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pola komunikasi yang lebih deliberatif dari para pemangku kebijakan. Selain itu, tentu saja, pemerintah juga harus mengatasi persoalan ketidakadilan dan kesenjangan kesejahteraan yang kini cukup lebar.

Antony Lee, Litbang KOMPAS

KOMPAS, 20 Desember 2016

Alarm Telah Berbunyi Nyaring

Bara api di Timur Tengah tak pernah padam. Konflik dan perang membakar kehidupan masa depan, dan hampir tak menyisakan peradaban masa silam. Suriah, Libya, Irak terbelah, menambah buram peta geopolitik kawasan yang tak jua selesai didera masalah Palestina. Ada contoh klasik sebuah negara-bangsa modern, "*pemain dunia*" pada dekade 1950-1960 yang terbelah berkeping-keping menjadi negara lebih kecil, awal dekade 1990. Yugoslavia tinggal menjadi catatan sejarah.

Yugoslavia yang adalah negara multietnik dan multikultural bubar bukan karena faktor luar. Sejarawan asal Jerman, Holm Sundhaussen (2012), menyatakan, Yugoslavia bubar akibat perbuatan kelompok-kelompok politiknya sendiri. Yugoslavia adalah teman Indonesia, sama-sama pelopor Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 1955 yang kemudian memunculkan Gerakan Non Blok, kekuatan penyeimbang di antara Blok Barat (Amerika Serikat dkk) dan Blok Timur (Uni Soviet dkk). Artinya, Indonesia juga pemain dunia. Dalam sejarah, sudah teruji tangguh, tetapi sekaligus juga menyimpan kerentanan.

Pilar-pilar bangsa yang ditopang oleh serpihan perbedaan di masa perjuangan lampau kini terlihat berkarat. Peristiwa akhir-akhir ini, baik dalam bentuk gerakan massa maupun dalam pikiran yang tersebar di dunia maya (media sosial), terkhusus tersulut kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memperlihatkan "keterbelahan" bangsa ini berada di "titik didih".

Hal itu terkonfirmasi dengan hasil kajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) tahun 2016. Kajian itu mengukur ketahanan nasional yang terdiri dari tiga gatra bersifat statis (geografi, demografi, kekayaan alam) dan lima gatra bersifat dinamis (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan/hankam). Ukuran skalanya 1-5. Makin besar angkanya, makin baik. Sebaliknya, angka makin kecil berarti makin buruk.

Lemhannas menandai skala itu dengan warna-warna yang juga punya makna. Angka 1-1,8 adalah berarti rawan (berwarna merah), 1,8-2,6 berarti kurang tangguh (kuning), 2,6-3,4 berarti cukup tangguh (hijau), 3,4-4,2 berarti tangguh (biru), 4,2-5 berarti sangat tangguh (ungu). Temuan Lemhannas menunjukkan indeks ketahanan nasional tahun 2016 hanya 2,60. Ini masuk kategori kurang tangguh. Ada empat gatra yang berkontribusi kurang tangguh, yakni sumber kekayaan alam (2,56), ideologi (2,06), politik (2,43), dan sosial budaya (2,14). Namun, empat gatra lain terbilang cukup tangguh, yaitu geografi (2,68), demografi (2,96), ekonomi (2,73), dan hankam (3,08). Meskipun demikian, secara agregat, indeks ketahanan nasional bangsa ini sesungguhnya mencemaskan. Dibandingkan temuan tahun 2010 yang berskala 2,43 dan tahun 2015 berskala 2,55, memang temuan tahun 2016 ini ada "peningkatan poin". Namun, hal itu tidak berarti apa-apa ketika masih berwarna kuning. Artinya, selama lebih lima tahun ini ketahanan ideologi bangsa "*kurang tangguh*". Apalagi, jika dikaitkan dengan

persoalan ideologi bangsa yang tengah hangat akhir-akhir ini, bertambah runyam karena angkanya paling rendah (2,06).

Ujian

Apa arti kurang tangguh itu? Keuletan dan ketangguhan bangsa ini berada pada kondisi yang lemah walaupun dalam jangka pendek negara masih dapat bertahan dari tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan (TAHG). Jika dikaitkan dengan situasi akhir-akhir ini, sangat riskan mengingat kondisi daya lentur bangsa ini lemah. Toleransi mendapat ujian karena polarisasi masyarakat tidak lagi bersifat laten. Pemilihan Presiden 2014 menjadi titik awal ekstremnya polarisasi publik, termasuk di dunia maya (media sosial).

Meskipun Presiden Joko Widodo berkali-kali menunjukkan persahabatan dengan Prabowo Subianto, rival saat pemilihan presiden lalu, tetap saja keterbelahan masyarakat tidak lantas sirna. Pertemuan kedua tokoh itu tidak lantas menjadi "*pesan*" agar publik-pendukung masing-masing-memahami kebersamaan juga merembes ke akar rumput. Bahkan, terkadang pertemuan kedua tokoh itu dimaknai macam-macam yang dilukiskan dengan berbagai meme sindiran.

Karakter dunia maya memang tidak mudah dipahami. Ujaran kebencian (hate speech) atau persoalan suku, agama, ras, antargolongan (SARA) begitu memenuhi ruang dunia maya. Nyaris sulit menemukan pola komunikasi yang dialogis. Yang dominan justru pandangan intoleran dan mengerasnya sikap masing-masing pihak. Sekarang ini di dunia maya publik justru lebih "*percaya*" dengan berita-berita yang belum terkonfirmasi atau hoax. Kebenaran informasi atau berita bukan lagi diutamakan. Buktinya, publik dunia maya (netizen) lebih cenderung membagi berita hingga menjadi viral justru dari sumber-sumber yang tak jelas. Netizen berpaling dari sumber-sumber berita mainstream yang terverifikasi.

Padahal, dunia maya menjadi dunia kelas sosial yang memiliki akses pendidikan, ekonomi, sosial, politik lebih baik, yang rata-rata bagian dari kelas menengah yang mulai muncul di era Orde Baru. Kelas ini menjadi subyek penting dalam perubahan-perubahan politik-ekonomi ataupun sosial-budaya. Namun, perubahan-perubahan besar Indonesia, dengan bonus demografinya, titik rawannya malah berada di kelas menengah. Perilaku kelas menengah menjadi titik genting karena berpengaruh ke kalangan bawah.

Dalam komposisi kelas menengah itu, ada the rising middle class pedesaan terdidik yang menjadi kaum urban, kemudian mencari identitas, di antaranya lewat jalan spiritualitas. Dalam kalangan Muslim, misalnya, kelompok-kelompok itu mendominasi masjid-masjid kampus di perguruan tinggi negeri yang selama ini terlupakan oleh organisasi masyarakat besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Pasalnya, mereka fokus ke kampus-kampus yang dibangun sendiri. Akibatnya, kampus PTN pun cenderung jadi pemasok pandangan yang lebih keras. Di sisi lain, juga menjadi ruang baru bagi kelompok *the falling middle class*.

Tak hanya itu, sebetulnya di internal ormas-ormas arus utama itu juga terjadi pergulatan di mana muncul kelompok-kelompok muda yang punya pandangan lebih keras. Menggunakan media sosial, mereka mengungkapkan sikap sendiri sehingga terkesan representasi dari sikap ormas arus utama. Padahal, hal itu tidak terkait sama sekali dengan sikap ormas tempat mereka bernaung. Oleh karena itu, Muhammadiyah yang terus mengembangkan mazhab harmonis, misalnya, meskipun tidak mudah, tetap membuka ruang dialog dengan kelompok-kelompok keras yang tumbuh di internal. Dialog itu terus dilakukan dalam upaya membangun kesamaan visi kebangsaan.

Transformasi demokrasi

Di sisi lain bermunculan penceramah-penceramah-baik di Islam, Kristen, maupun agama lain-yang pengalaman pendidikannya kurang kuat. Namun, mereka pandai bicara, muda, berpenampilan menarik, media darling, dan populis. Mereka ini yang justru memikat hati publik. Sebaliknya, kiai-kiai yang memiliki basis pengalaman pendidikan dan keilmuan yang amat panjang dan paham yang toleran serta moderat sebagaimana banyak dimiliki oleh NU justru kurang diminati publik.

Hal itu bisa jadi karena kurang akses media, sudah tua, atau kurang populer. Dengan realitas itu dan terkait upaya membangun visi keindonesiaan, pemerintah dirasakan perlu memberi panggung kepada tokoh-tokoh agama sehingga publik memperoleh pemahaman yang lebih luas, sejuk, dan moderat. Setidaknya mereka menjadi penanding yang bisa mengerem pandangan-pandangan yang keras.

Masalah agama dan kemudian relasinya dengan negara memang belum selesai sampai hari ini. Namun, spirit NU dan Muhammadiyah secara tegas menyatakan bahwa relasi tersebut secara simbiotik adalah spirit kebangsaan. Dalam pandangan ormas-ormas tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hubungan negara dan agama yang lebih pas. Namun, faktanya, persoalan sekarang yang muncul adalah gejala sektarianisme dan juga primordialisme, antara lain dalam konteks otonomi daerah.

Munculnya persoalan itu dipercaya akibat transformasi demokrasi belum terjadi sejak reformasi 18 tahun silam. Selama ini yang terjadi adalah transisi demokrasi, bukan transformasi demokrasi. Hanya berganti aktor, tetapi perilaku belum berubah. Tampaknya masih jauh untuk menemukan perubahan nilai-nilai. Dengan kata lain, pasca tumbangnya Orde Baru, Indonesia baru "*berganti*", belum "berubah". Dengan konsep demokrasi yang dinilai belum matang, akan timbul situasi yang tidak pasti arahnya ke mana.

Inilah kenyataannya bahwa kekuatan masyarakat madani (*civil society*) sebagai kekuatan yang menumbangkan Presiden Soeharto tahun 1998 ternyata gagal menghancurkan Orde Baru secara total karena memang sifat *civil society itu* terpecah-pecah dan tak teratur (Hadiz, 2000). Sebagai gambaran, aktor-aktor politik atau institusi politik baru gagal menghasilkan suatu agenda konkret terkait reformasi ekonomi dan politik lebih komprehensif. Maka, sampai saat ini panggung politik lebih banyak

menampilkan adegan-adegan gaduh yang dramatik. Padahal, pasca Orde Baru, slogan reformasi dan demokratisasi menjadi jargon politik berdaya tarik luar biasa, tetapi tidak memberikan dasar bagi pembentukan platform perjuangan politik yang konkret.

Ambil contoh Pancasila. Ketika pengamalan Pancasila semasa Orde Baru dicemooh sebagai tindakan indoktrinasi dan kaku yang membuat Pancasila membeku, tetapi rezim reformasi juga tidak bisa menawarkan opsi "peta jalan baru" mencerahkan dan dialogis agar Pancasila menjadi ideologi yang terus berkembang dan hidup. Ini adalah kegagalan besar, hanya membuang waktu percuma sepanjang 18 tahun reformasi ini. Karena itu, temuan Lemhannas tentang kurang tangguhnya ketahanan nasional adalah sebuah peringatan. Harus ada perbaikan signifikan jika negara-bangsa ini tak ingin bubar berkeping-keping seperti Yugoslavia atau terbakar seperti negara-negara di Timur Tengah. Alarm telah berbunyi nyaring, jangan berdiam diri!

M Subhan SD, Wartawan Senior KOMPAS

KOMPAS, 20 Desember 2016

Survei Pilkada DKI - Pemilih Loyal Menjadi Kunci

Pilkada DKI Jakarta adalah satu bagian dari pelaksanaan pilkada serempak di 101 daerah seluruh Indonesia. Untuk melihat preferensi publik dalam Pilkada DKI Jakarta, Litbang "Kompas" akan menurunkan tulisan dari hasil survei "*pre-election*" secara berturut-turut dalam empat tulisan mulai hari ini.

Ketatnya persaingan tiga pasangan calon membuat pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI berpeluang terjadi dua putaran. Kurang dari dua bulan menjelang pemungutan suara, perubahan pilihan masih bisa terjadi. Merawat pemilih loyal menjadi kunci mengamankan potensi dukungan.

Persaingan ketat tergambar dari hasil survei Kompas. Tingkat elektabilitas ketiga pasangan calon belum pada posisi dominan menguasai separuh potensi suara pemilih. Potensi keterpilihan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylviana) tercatat paling tinggi, 37,1 persen. Posisi ini dibayangi ketat oleh pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Basuki-Djarot) 33 persen. Selanjutnya potensi keterpilihan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno berada di angka 19,5 persen.

Secara teoretis, dengan memasukkan margin error ±3,46 persen, potensi elektabilitas Agus-Sylviana masih beririsan dengan potensi elektabilitas Basuki-Djarot. Jika diperhitungkan, rentang irisan potensi elektabilitas kedua pasangan calon itu ada di angka 33,64 persen sampai dengan 36,46 persen. Artinya, kedua pasangan calon masih berpeluang memperoleh suara dalam rentang irisan angka elektabilitas tersebut.

Pengalaman sejumlah survei menyebutkan, tingkat popularitas yang tinggi dan kinerja selama menjabat kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi modal tersendiri bagi pasangan petahana. Dari tiga calon gubernur, tingkat popularitas Basuki paling tinggi. Demikian juga dengan popularitas Djarot.

Namun, dalam survei kali ini pasangan petahana Basuki-Djarot kurang mendominasi angka elektabilitas. Kondisi ini boleh jadi tidak lepas dari tingkat resistensi yang relatif tinggi pada pasangan ini dibandingkan dengan dua pasang penantangnya. Survei merekam 51,5 responden mengaku tidak akan memilih pasangan petahana ini. Faktor gaya komunikasi dan kasus hukum yang menjerat Basuki menjadi alasan dominan.

Pemilih loyal

Tingkat resistensi yang sama terbagi merata kepada pasangan Agus-Sylviana dan Anies-Sandiaga. Penolakan terhadap dua pasangan ini lebih karena belum berpengalaman memimpin sebuah organisasi pemerintahan daerah. Sebaliknya, pengalaman dan rekam jejak kinerja inilah yang menjadi nilai positif bagi pasangan Basuki-Djarot. Hasil survei merekam separuh lebih responden yang akan memilih pasangan petahana ini didorong oleh kinerja Basuki-Djarot yang sudah terbukti. Secara umum, soal kinerja ini diakui 67,6 persen responden yang menyatakan Basuki relatif berhasil memimpin Jakarta.

Faktor resistensi lain juga terlihat dari tingkat kesukaan responden. Dari enam nama calon gubernur dan wakil gubernur, tingkat kesukaan responden paling rendah pada Basuki dan Djarot, yakni di bawah 80 persen.

Tingkat resistensi paling tinggi dan tingkat kesukaan paling rendah memang beban bagi pasangan Basuki-Djarot. Namun, dari sisi karakter pemilih, pemilih pasangan ini paling loyal dibandingkan dengan pemilih dua pasangan lainnya. Loyalitas di sini dimaknai sebagai pemilih yang sudah mantap dengan pilihannya dan tak akan mengubah pilihannya.

Survei mencatat 61,7 persen pemilih pasangan Basuki-Djarot menyatakan tidak akan mengubah pilihannya. Angka ini relatif paling tinggi dibandingkan dengan loyalitas pemilih dari dua pasangan calon lainnya. Sebaliknya, responden yang menyatakan masih mungkin berubah pilihan paling tinggi ada di pemilih pasangan Anies-Sandiaga.

Potret lain soal loyalitas pemilih juga terlihat dari tindakan pemilih untuk pasangan calon pilihannya. Pemilih pasangan Basuki-Djarot relatif lebih aktif bertindak untuk melakukan hal yang positif bagi pasangan calon pilihannya. Sebanyak 58,7 persen responden pemilih pasangan petahana akan mengatakan hal-hal positif tentang Basuki-Djarot. Porsi pemilih seperti ini juga banyak dijumpai pada pemilih Agus-Sylviana meskipun angkanya lebih rendah dari pemilih pasangan petahana.

Loyalitas pemilih inilah yang sebenarnya menentukan potensi suara yang akan diraih pasangan calon. Di tengah persaingan yang ketat, yang terlihat dari distribusi suara yang relatif merata ketiga pasangan calon, mengamankan pemilih loyal menjadi langkah strategis untuk memastikan perolehan suara. Namun, sesuai Pasal 11 UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Perubahan pilihan

Perubahan pilihan dalam kontestasi politik masih mungkin terjadi, baik menjelang pemungutan suara maupun pada putaran kedua. Survei menangkap ada gejala pola perpindahan suara dari satu pasangan ke pasangan calon lainnya. Dye and Zeigler (1983) menyebut perpindahan ini sebagai gejala volatilitas politik, gejala pergeseran kesetiaan pemilih, dari satu pemilihan ke pemilihan yang lain.

Survei Kompas kali ini menangkap gejala volatilitas ini dalam dua pola. Pola pertama terjadi karena kedekatan emosional pemilih di antara pemilih dua pasangan calon. Sementara di sisi yang lain, ada pola "pragmatisme", yaitu perubahan pilihan pemilih menyebar merata ke pasangan yang lain.

Pola pertama terlihat pada karakter pemilih Agus-Sylviana dan pasangan Anies-Sandiaga. Ada kedekatan emosional yang sama di antara kedua kelompok pemilih ini. Jika salah satu pasangan ini gagal berlaga di putaran pertama, tiap responden pemilihnya cenderung mengarahkan kepada salah

satu pasangan ini. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pasangan calon ini punya pasar pemilih yang sama dan cenderung menghindari pilihan kepada pasangan petahana Basuki-Djarot.

Pola kedua justru ada pada karakter pemilih Basuki-Djarot. Jika pasangan petahana ini gagal melaju ke putaran kedua, ada kecenderungan peralihan pemilihnya tersebar merata ke dua pasangan calon lainnya. Namun, ada sekitar 18,9 persen pemilih pasangan petahana ini mengaku tidak akan menggunakan hak pilihnya alias golput. Inilah potret loyalitas pemilih (*diehard voters*) pasangan Basuki-Djarot yang tidak ada pada pasangan lainnya.

Di tengah persaingan yang ketat inilah, merawat kesetiaan pemilih menjadi kunci untuk menjaga tingkat keterpilihan menjelang pemungutan suara nanti. Tentu, selain merawat pemilih loyalnya, pasangan calon harus juga bekerja menarik simpati pemilih baru di tengah potensi perubahan pilihan yang masih terbuka. Apalagi masih ada kelompok pemilih belum menentukan pilihannya (*undecided-voters*) yang juga menjadi potensi tambahan suara.

Yohan Wahyu, Litbang KOMPAS

KOMPAS, 21 Desember 2016

Musim Pancaroba Politik

Iklim politik nasional di penghujung 2016 ibarat musim pancaroba. Kondisi politik kerap berubah cepat seiring dengan suhu yang memanas diiringi relasi antagonistis yang mengemuka tak hanya di level elite, melainkan juga di kalangan warga biasa.

Musim pancaroba butuh daya tahan karena perubahan menuntut kondisi prima untuk mengatasi masalah bersama-sama. Sejak September hingga sekarang suhu politik kita terus eskalatif dan diprediksi akan mengalami titik kulminasi awal 2017. Penting bagi kita untuk membuat refleksi dari apa yang terjadi sepanjang tahun ini dan membuat proyeksi politik untuk tahun depan.

Ujian Kekitaan

Semester pertama 2016 situasi politik sudah berada di zona nyaman. Pemerintahan Jokowi memanen banyak dukungan politik, terutama di DPR. Beberapa partai yang sebelumnya berbeda kongsi dengan pemerintah pindah haluan. Beberapa pihak menyebut fase ini sebagai titik keseimbangan politik Jokowi. Di saat bersamaan, menjadi fase menentukan dalam ujian keberbedaan kepemimpinan Jokowi.

Koalisi besar partai politik penyokong pemerintahan bermakna semakin besar pula beban kepentingan yang harus diakomodasi dan dinegosiasikan Jokowi. Pertanyaan mendasarnya, seberapa besar asas kemanfaatan dari koalisi besar penyokong pemerintahan tersebut bagi akselerasi kerja pemerintah pada tahun kedua dan ketiga yang sering disebut sebagai tahun produktivitas. Selalu ada dilema antara bonnum commune atau prinsip kepentingan umum dan kepentingan oligarki partai politik.

Memasuki semester kedua, saat Jokowi sedang berupaya menjawab tantangan menuntaskan janji kampanyenya untuk bekerja, ujian dahsyat pun tiba. Titik panasnya ada di DKI, yakni polemik ucapan kandidat petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal Al-Maidah ayat 51. Bak bola panas, pernyataan Basuki yang oleh sebagian kalangan diduga menodai agama Islam menyulut gerakan massa lintas teritorial yang mewujud dalam gerakan 4 November dan 2 Desember 2016.

Perang informasi ibarat air bah yang menerjang ragam kanal komunikasi warga. Banyak yang tiba-tiba ”sakit” dan tak lagi bisa menggunakan kewarasan nalar dan keajekan sikap yang berimbas pada klaimklaim kebenaran sepihak. Pemerintahan Jokowi tentu harus memastikan hukum dan keadilan tegak tanpa intervensi siapa pun dan kelompok mana pun. Ujian kekitaan lainnya adalah kontestasi elektoral di Pilkada Serentak 2017. Contoh paling nyata juga Pilkada DKI.

Agresivitas verbal antarpendukung membuncah di ragam kanal terutama media sosial. Lini masa disesaki sumpah-serapah, cacian, ujaran kebencian, rumor, gosip, fitnah yang berkelindan dengan berita palsu. Proses produksi, reproduksi, dan konsumsi informasi banyak tercemar oleh kepentingan

politik. Dukungmendukung berubah menjadi perang informasi yang tak seluruhnya berkeadaban.

Sebaliknya, justru menghidupkan semangat kita dan mereka, in group dan out group tanpa berorientasi pada adu gagasan dan program nyata secara lebih memadai. Dalam menyikapi audiens yang terfragmentasi seperti ini, James Stanyer dalam Modern Political Communication (2008) menyarankan agar ada rekonseptualisasi hubungan antarwarga dan beradaptasi dengan perubahan.

Hubungan antarwarga di dunia maya harus diletakkan dalam koridornya yang tepat, mana informasi dan mana propaganda, mana yang ”sampah” dan mana yang ”nutrisi”. Adaptasi dengan perubahan terutama dalam berbincang politik di media digital harus memastikan informasi yang diterima verifikatif, bukan berita palsu.

Tahun Serbapolitik

Tahun 2017 akan menjadi tahun serbapolitik. *Pertama*, agenda pilkada serentak yang akan menentukan proses konsolidasi demokrasi ke depan. Pilkada digelar serentak parsial mulai tahun 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023, 2025 sebelum akhirnya serentak nasional pada 2027. Karena itu, pilkada awal tahun besok ini menjadi ujian daya tahan penyelenggaraannya. Meski pada 15 Februari tahun depan pilkada serentak digelar di 101 daerah, tetapi yang menjadi hot spot adalah DKI, Aceh, dan Papua.

Kedua, jagat politik akan diramaikan permainan politik di wilayah regulasi. Awal tahun akan disambut dengan pembahasan revisi UU MD3 yang rencananya akan disahkan pada persidangan awal Januari. Tarik-menarik kepentingan tak terelakan. Apakah pembahasan revisi terbatas pada akomodasi PDIP di penambahan kursi pimpinan atau akan ada pertarungan kocok ulang pimpinan DPR. UU Pemilu juga akan ramai, mengingat belum semua fraksi bersepakat tentang beberapa hal prinsip seperti sistem yang akan digunakan, terutama dalam menyikapi pemilu legislatif yang digelar serentak dengan pemilu presiden. Sementara itu, KPU menuntut awal tahun depan UU Pemilu bisa disahkan mengingat akan ada beberapa tahapan yang harus sudah dijalankan. Misalnya soal verifikasi partai peserta pemilu dan juga pemetaan daerah pemilihan untuk pemilu DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota.

Ketiga, akselerasi kerja pemerintahan Jokowi di tengah padatnya agenda politik nasional. Sebagaimana kita ketahui, jagat politik nasional kita akan diramaikan oleh Pilkada Serentak 2017, 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019. Sangat biasa agenda politik ini menyebabkan tarik- menarik kepentingan di masyarakat. Sementara publik menuntut kerja nyata Jokowi harus optimal pada tahun ketiga hingga semester kedua tahun keempat karena tahun kelima energi pemerintah akan lebih banyak tersedot pada pertarungan perebutan kuasa jelang Pemilu 2019.

Dalam teori inokulasi (*inoculation theory*) dari William J McGuire sebagaimana dikutip dalam tulisan Pfau, *The Inoculation Model of Resistance to Influence* (1997) bisa kita analogikan seperti di dunia medis. Orang harus diberi vaksin untuk merangsang mekanisme daya tahan tubuhnya. Pun demikian juga dalam hal komunikasi, orang yang tak memiliki informasi mengenai suatu hal, akan lebih mudah dipersuasi.

Agar tak mudah terpengaruh secara rapuh, harus ada upaya ”menyuntik” warga dengan ”vaksin” argumentasi balasan (couter-arguments). Dalam konteks inilah, literasi politik selalu dibutuhkan sebagai suntikan ”vaksin” agar warga memiliki daya tahan dalam melampaui musim pancaroba. Warga harus lebih berdaya dalam menyikapi setiap perubahan.

Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute;

KORAN SINDO, 23 Desember 2016

Fatwa Kapolri dan Fatwa MUI

Kamis, 22 Desember2016, dua hari yang lalu, selama seharian saya berdiskusi melalui Twitter dengan sangat banyak netizen tentang fatwa. Diskusi tersebut dipicu oleh pernyataan Kapolri Tito Karnavian bahwa fatwa MUI bukan hukum positif. Pekan lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang mengeluarkan Fatwa No. 56 Tahun 2016 yang menyatakan "*haram*" bagi kaum muslimin memakai atribut-atribut agama lain, termasuk atribut Natal. Diberitakan, ada dua kapolres yang merespons dengan cepat dan bermaksud memberlakukan Fatwa MUI tersebut di lapangan. Namun, Kapolri Tito Karnavian menegur keduanya dan menyatakan bahwa Polri tidak bisa menegakkan fatwa tersebut dalam posisinya sebagai penegak hukum, karena fatwa bukanlah hukum positif. Atas pertanyaan seorang netizen, saya mengatakan bahwa "*Kapolri benar, fatwa bukan hukum positif sehingga penegakannya tidak bisa menggunakan Polri sebagai aparat penegak hukum*".

Ternyata banyak netizen yang belum paham arti fatwa dan arti hukum, bahkan tidak paham perbedaan antara norma hukum dan norma yang bukan hukum. Akun Twitter saya pun dibanjiri berbagai respons. Selain yang sependapat dengan saya, ada juga netizen yang tidak setuju dan menyatakan fatwa MUI adalah hukum Islam yang mengikat bagi umat Islam. Bahkan ada juga yang mempertanyakan keislaman saya dengan tudingan, saya anti-MUI atau antihukum Islam. Saya sendiri tak terganggu sedikit pun dengan tudingan tersebut. Pendapat saya bahwa fatwa bukan hukum positif dan tidak mengikat merupakan dalil yang tidak perlu persetujuan dari siapa pun.

Kalau ada yang tidak setuju pun, dalil itu tetap berlaku: fatwa tidak mengikat. Jangankan hanya fatwa MUI, fatwa Mahkamah Agung (MA) yang merupakan lembaga yudikatif tertinggi pun tidak mengikat, tidak harus diikuti. Fatwa hanyalah pendapat hukum (legal opinion) dan bukan hukum itu sendiri.

Soal identitas keislaman, saya nyatakan bahwa justru karena saya Islam maka saya berpendirian bahwa fatwa keagamaan tidak mengikat dalam arti hukum, boleh diikuti dan boleh tidak. Saya juga sama sekali tidak anti-MUI karena saya tidak termasuk orang ikut berteriak agar MUI dibubarkan.

Bagi saya, MUI sangat penting keberadaannya sebagai pembimbing umat yang sekaligus menjadi jembatan antara umat Islam dan pemerintah. Saya menyatakan pendapat saya tentang fatwa sebagai pembelajar hukum, termasuk hukum Islam. Oleh sebab itu, masalah kedudukan fatwa yang tidak mengikat itu bisa saya jelaskan baik dari hukum nasional maupun dari hukum Islam sendiri.

Dari sudut hukum nasional fatwa itu, meskipun bersisi fatwa tentang hukum Islam, tetap tidak mengikat. Dalam hukum nasional, yang mengikat adalah norma yang sudah dijadikan norma hukum, yakni ditetapkan keberlakuannya oleh negara. Di dalam masyarakat, banyak sekali norma

atau kaidah sebagai pedoman bertingkah laku, tetapi tidak semua norma menjadi hukum.

Pada hari pertama mahasiswa belajar di fakultas hukum, misalnya, yang diajarkan adalah doktrin dan dalil utama bahwa di dalam masyarakat ada empat macam norma atau kaidah, yaitu norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma yang mengikat dan bisa dipaksakan keberlakuannya melalui aparat negara adalah norma hukum, yakni norma yang diberlakukan secara resmi oleh negara melalui pemberlakuan oleh lembaga yang berwenang, misalnya, dijadikan UU atau perda oleh lembaga legislatif.

Orang memerkosa, misalnya, harus diadili dan dihukum karena yang bersangkutan melanggar norma yang sudah dijadikan UU, bukan karena melanggar hukum agama. Namun, orang melanggar norma kesopanan seperti hanya memakai kaus ketika menghadap rektor atau melanggar norma agama seperti tidak mau berpuasa bulan Ramadan tidaklah dapat dihukum karena hal-hal tersebut bukan norma hukum.

Kalau begitu, bisakah norma agama dijadikan hukum? Tentu saja bisa, sepanjang disahkan sebagai hukum oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan UU atau diberi bentuk peraturan perundang-undangan lainnya dan bukan hanya berbentuk fatwa. Dalam bidang keperdataan, misalnya, sudah ada norma agama Islam yang dijadikan hukum seperti di bidang perkawinan, pewarisan, dan ekonomi syariah yang bisa ditegakkan melalui kekuatan negara.

Hukum pidana Islam (*jinayat*) yang mengenal qishas (sanksi hukuman yang sama dengan pidana yang dilakukan) atau had (jenis hukuman tertentu seperti cambuk dan potong tangan) sejatinya bukan hukum di Indonesia karena hal tersebut tidak diberlakukan. Jadi, benarlah pendapat hukum atau fatwa Kapolri bahwa fatwa MUI tentang atribut Natal tak bisa ditegakkan oleh negara karena ia, dalam konteks Indonesia, bukanlah hukum positif.

Lebih dari itu, di kalangan internal umat Islam sendiri sebenarnya fatwa itu juga tidak mengikat karena ia hanya pendapat hukum dan belum tentu sama dengan hukum itu sendiri. Itulah sebabnya setiap ulama bisa membuat fatwanya sendiri-sendiri.

Hasil penelitian dosen UIN Jakarta Rumadi yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku, "*Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia*" menguraikan adanya beberapa fatwa yang berbeda dalam isu yang sama antara tiga lembaga yakni MUI (Komisi Fatwa), NU (Lembaga Bahtsul Masail), dan Muhammadiyah (Majelis Tarjih). Dalam hal mengucapkan selamat Natal, pemimpin perempuan, atau bunga bank, misalnya, ketiga lembaga tersebut mengeluarkan fatwa yang berbeda-beda. Keberbedaan tersebut bisa saja terjadi karena fatwa itu hanyalah pendapat hukum dan bukan hukum itu sendiri. Makanya fatwa tidak mengikat, kita boleh ikut salah satunya, boleh juga tidak diikuti ketiganya karena kita mengikuti fatwa yang lain lagi. Kalau begitu, apakah fatwa itu penting? Tentu penting sebagai rujukan karena

fatwa itu hanya boleh dibuat oleh orang atau lembaga yang berkompeten dalam bidang agama.

Apakah fatwa itu baik? Tentu pada umumnya fatwa-fatwa itu baik karena bisa menjadi tuntunan bagi umat yang membutuhkan bimbingan. Tetapi terlepas dari soal penting dan baik, fatwa bukanlah hukum dan penegakannya tidak bisa menggunakan aparatur hukum negara.

Moh Mahfud MD, Ketua MK-RI 2008-2013

KORAN SINDO, 24 Desember 2016

Darurat Komunikasi Bangsa

BADAI belum berlalu di penghujung 2016. Situasi penuh paradoks masih menghiasi praktik komunikasi bangsa kita yang dikenal sebagai bangsa yang menjunjung keadaban publik. Melimpahnya informasi di beragam kanal komunikasi warga menampakkan wajah janusnya. Di satu sisi, kian terfasilitasinya kebebasan informasi sebagai hal hakiki negara demokrasi, di sisi lainnya rumor, gosip, berita palsu, dan ujaran kebencian deras memancar dari banyak grup perbincangan, media sosial, bahkan kanal berita 'jadi-jadian'.

Semakin berisik dan mengusik tatkala ragam cara bercerita dan berbagi kata masuk di lorong politik yang dibangun dengan atmosfer antagonistis. Luapan kemarahan dan ketersinggungan menggelegak dalam uraian kata dan kalimat yang begitu mudah terfasilitasi teknologi.

Homo Narran

Sejatinya manusia memang homo narran alias makhluk pencerita. Istilah ini berasal dari komunikolog teori naratif, Walter Fisher, sebagaimana dikutip dalam buku Julia T Wood, *Communication Theories in Action* (2004). Pemikiran Fisher sebenarnya dipengaruhi bacaan teori moral yang dikemukakan Alasdair MacIntyre yang menyatakan manusia dalam tindakan, praktik, dan juga dalam fisiknya, pada dasarnya ialah makhluk pencerita. Tentu, cara orang bercerita akan sangat dipengaruhi konteks budaya, situasi, dan ragam cara yang memfasilitasinya.

Cerita tak hanya bersandar pada kekuatan kata, tetapi juga logika, alur berpikir, dan tujuannya. Di situlah letak tanggung jawab sosial menjadi penting dipertimbangkan sebagian bagian utuh dari cara menjaga kredibilitas sang pencerita. Banyaknya aplikasi berbasis teknologi daring yang memudahkan orang terhubung satu sama lainnya tanpa sekat teritorial, organisasi, dan bahkan ideologi menyebabkan migrasi besar-besaran homo narran dari ruang fisik ke virtual. Pada titik itu bisa kita tebak betapa mudahnya bangsa ini bersahut-sahutan, bertukar cerita dan perasaan.

Bahkan, banyak orang yang lupa daratan, dengan mudah saling memaki, menebar kebencian, kata dan sikap tak toleran, yang berpotensi merobek kebinekaan, bahkan keindonesiaan. Panggung pilkada DKI menjadi contoh, betapa banyak sosial media, weblog interaktif, dan juga grup-grup perbincangan yang memainkan isu SARA tanpa rasa bersalah. Betapa lama dan panjangnya sejarah para pendiri Republik ini, para pejuang, pemikir, serta pengisi kemerdekaan yang menenun nilai keindonesiaan.

Sulit, pelik, dan membutuhkan kesabaran sehingga Indonesia raya bisa kita nikmati hari ini sebagai negara yang menghormati keragaman. Namun, pragmatisme politik terutama dalam kontestasi elektoral kerap merusaknya. Contohnya ialah ucapan dan tindakan menuntut penegakan hukum atas seseorang, tetapi di saat bersamaan si penuntut melanggar bahkan mengabaikan hukum itu sendiri. Misalnya melakukan propaganda dengan

teknik *name calling* atau memberi label buruk yang semestinya hanya baru bisa dilabelkan setelah vonis pengadilan dijatuhkan. Belum lagi kalau kita tengok informasi yang dibagi di beragam kanal, umpatan, makian, kata-kata kotor, dan sumpah serapah aktual menjadi menu harian. Praktik semacam inilah yang kerap merusak nalar kritis warga dan menggantikannya dengan gemuruh angkara murka. Pengguna media sosial yang bertanggung jawab ialah mereka yang melakukan manajemen privasi komunikasi.

Meminjam konstruksi berpikir teori manajemen privasi komunikasi dari Sandra Petronio dalam bukunya, *Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclousure* (2002), bahwa kita membuat pilihan dan peraturan mengenai apa yang harus dikatakan, dan apa yang harus disimpan dari orang lain berdasarkan 'kalkulus mental' dengan mempertimbangkan kriteria penting-tidaknya sesuatu yang mau kita sampaikan itu. Kata-kata dan informasi yang berpotensi memecah belah dan memprovokasi konflik horizontal wajib dihindari terlebih jika membalutnya dengan kebohongan.

Industri kabar palsu

Satu fenomena baru yang juga harus dikritisi saat ini ialah industri kabar palsu. Itu merupakan gejala global yang menjadi tren buruk paradoks teknologi. Surat kabar *Financial Times* beberapa waktu lalu mengangkat berita soal kemenangan Donald Trump pada pemilu Amerika Serikat yang diduga terbantu karena aliran-aliran berita palsu dan ujaran kebencian. Bukan lagi fenomena buzzer yang biasanya dilakukan para relawan, melainkan sudah menjadi industri kabar palsu yang setiap hari akan menyesaki lini masa warga.

Fenomena itu sudah nyata adanya di Indonesia. Banyak orang yang bekerja di 'kegelapan' berita 'jadi-jadian' yang disajikan mereka. Beberapa indikatornya bisa kita perhatikan hampir setiap saat. Pertama, berita diproduksi, direproduksi, dan didistribusikan lewat media-media daring yang sangat tidak populer bahkan terkesan 'jadi-jadian' setiap ada event politik seperti pilkada atau sejenisnya. Banyak juga nama laman mereka memakai model bayangan dari nama web atau media yang sebelumnya sudah populer.

Biasanya dipakai untuk mengecoh pembaca. Kedua, sangat terbiasa menggunakan judul yang gampang memalingkan perhatian pembaca. Provokatif atau memilih diksi yang mendorong efek domino pada perasaan pembaca meskipun isinya kerap tak seperti yang ada di judul. Teknik itu dibuat untuk memancing pembaca dan membagikannya tanpa verifikasi isi.

Ketiga, secara keseluruhan tulisan yang dikemas seolah-olah berita tersebut tidak memenuhi standar kerja jurnalistik seperti konfirmasi, verifikasi data, dan keberimbangan sumber informasi. Tulisan mereka ialah propaganda, bukan fakta jurnalistik. Keempat, memanfaatkan secara intensif media sosial untuk diseminasi informasinya. Industri itu menyuntikkan kabar palsu seperti virus lewat transfusi informasi setiap hari.

Jangan heran jika kabar-kabar palsu itu berseliweran di media sosial dan menjadikannya viral. Pengulangan dan peneguhan terus dilakukan sehingga warga tak bisa lagi membedakan antara fakta dan fantasi, antara kenyataan dan kepalsuan. Darurat komunikasi bangsa ini harus diatasi secara bersama-sama dengan bertanggung jawab atas informasi yang dibuat, dikonsumsi, dan didistribusikan. Setop jadi mata rantai industri kabar palsu!

Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute;

MEDIA INDONESIA, 27 Desember 2016

Tentang Para Cendekiawan Medsos yang Pintar Tapi Sombong

Sejak media sosial menguasai segenap sendi kehidupan kita, rasanya kita jarang tenang dalam menjalani hidup sebagai warga masyarakat dan warga negara. Ini jauh berbeda dengan, katakanlah, 10 tahun silam. Masihkah untuk soal ini diperlukan penjelasan?

Dulu, bahkan sampai ketika bangsa manusia sudah menemukan makhluk bernama *Friendster*, tak semua mulut bisa terdengar suaranya, dan tak semua jempol bisa menggoyang dunia. Oke lah, sudah ada blog. Namun kesaktiannya masih saja jauh di bawah media sosial di masa sekarang.

Maka saya membayangkan, betapa pusingnya pemegang kuasa menghadapi gempuran nyaris setiap saat di waktu ini. Ada langkah sedikit, isu ini-itu bertebaran. Muncul di lapangan peristiwa seiprit, tudingan sana-sini muncul berentetan. Jadilah bukan cuma orang-orang di atas saja yang tak pernah nyenyak tidurnya. Kaum jelata pun tak beda.

Namun, tak mengapa. Biarlah itu jadi takdir karakter wajah bumi di Zaman Kalabendu ini. Kita sebagai masyarakat awam yang berjuang agar tetap waras, mestinya cuma bisa berusaha agar "*ngeli ning ora keli*", kalau orang Jawa mengibaratkan. Ikut arus, tapi tidak terhanyut. Karena itulah dalam segenap keterbatasan, yang bisa kita lakukan cuma berhati-hati dan tekun menyimak hingga tuntas setiap perkembangan. Sebab dari situlah kita bisa menemukan banyak kesempatan untuk belajar.

Mari ambil contoh. Baru saja ada kericuhan di medsos terkait uang baru yang dikeluarkan Bank Indonesia. Ada sebagian pihak (ah, sebenarnya cuma itu-itu saja sih) yang tiba-tiba menyatakan bahwa eksistensi umat Islam dipinggirkan melalui pemilihan tokoh pahlawan yang dipajang di lembar-lembar uang tersebut. Sontak, "tafsir kreatif" semacam itu segera disambut oleh publik galau, misalnya dengan ungkapan-ungkapan tak pantas dan rasis yang ditujukan kepada sosok yang terpampang di uang Rp 10.000.

Untunglah, segera muncul beberapa orang yang dengan gamblang, pelan-pelan, dan sederhana, menjelaskan tentang siapa itu Frans Kaisiepo, pahlawan nasional Indonesia dari Tanah Papua. Bahwa ia menjadi wakil Papua dalam Konferensi Malino tahun 1946 saat pembentukan Republik Indonesia Serikat, bahwa ia tokoh yang mengusulkan nama Irian waktu itu, bahwa ia diangkat sebagai pahlawan nasional pada era Orde Baru.

Jujur saja, saya sendiri pun baru tahu semua itu. Kebangetan? Mungkin. Tapi ada berapa puluh juta orang yang sama kebangetannya seperti saya? Maka saya menghaturkan segenap penghormatan kepada siapa pun yang dengan rendah hati mau menjelaskan dengan bahasa sederhana tentang siapa itu Frans Kaisepo. Sungguh, hal sekecil itu sangat bermanfaat buat kami, para sudra pengetahuan ini.

Satu saja lah, contoh kasusnya. Anda semua tentu tahu, bahwa ada puluhan kericuhan sejenis, dalam obrolan sehari-hari kita. Ada yang berujung happy ending seperti kisah uang bergambar Frans Kaisepo, namun banyak juga

yang tak berujung apa-apa selain kerumitan, kebingungan, dan publik awam yang semakin tak paham.

Lalu dalam situasi ruwet tak berujung begitu, siapa yang pantas digugat? Izinkan saya menuding muka Anda, Anda, dan Anda: para orang pintar, para elite pengetahuan yang aktif beraktualisasi di media sosial, namun lebih asyik berbincang riuh-rendah dengan kalangan kalian sendiri.

Ambil misal, ketika sedang ribut-ribut penggusuran di Jakarta. Dalam perdebatan terkait hal itu, para fans Ahok selalu mengandalkan mantera legalitas. "Orang-orang itu memang tidak punya legalitas atas tanah mereka. Lha kenapa mereka dibiarkan? Sah-sah saja kan mereka digusur? Di mana salah Pak Ahok?" Begitu kalimat standar mereka.

Saya kira, jalan pikiran demikian itulah yang paling umum, paling lazim, dan paling gampang masuk ke nalar publik. Orang tahunya cuma peraturan, hukum, regulasi. Negeri ini sudah terlalu busuk dalam kegagalannya menjalankan hukum dan peraturan. Maka, ketika ada upaya agar peraturan ditegakkan dan korupsi dilawan, ya itulah yang pertama-tama akan didukung. Ini logika simpel saja yang paling mudah dipahami kalangan awam.

Memang, ada logika lain yang baru akan tampak jika kita menarik segala persoalannya jauh ke belakang. Ini tentang problem struktural. Orang-orang yang menduduki tanah ilegal itu adalah korban dari ketidakadilan pembangunan. Mereka korban dari puluhan tahun obsesi atas pertumbuhan yang mengabaikan pemerataan. Persis di titik itulah soal legal dan ilegal jadi tidak relevan. Pertanyaannya, ada berapa gelintir kalangan awam yang paham logika demikian?

Malangnya, alih-alih memberikan penjelasan yang gamblang dan sederhana tentang logika struktural tersebut, para intelektual publik di medsos lebih doyan menempelkan label kepada kalangan yang mereka hantam: "*Percuma sekolah tinggi-tinggi kalau tahunya cuma legalitas. Kalian ini kelas menengah ngehek yang hanya mengejar kenyamanan bagi diri kalian sendiri*!" Aduh, Mas...

Adegan selanjutnya seperti yang biasa terjadi. Mereka riuh berbincang dengan kalangan mereka sendiri, sesama intelektual hebat yang kenyang dengan buku-buku berat, sambil abai bahwa orang-orang yang telah mereka bubuhi label itu sesungguhnya membutuhkan penjelasan yang jauh lebih sederhana, dengan bahasa manusia biasa, tentang di mana salahnya mengandalkan jargon legalitas.

Saya sering menjumpai jenis-jenis orang pintar semacam itu. Kalangan tersebut sangat terampil mengucap, "Nggak usah dilayani debat sama orang seperti dia. Cuma bikin kita down grade saja."; "Tulisan yang itu ramai dikutip orang, padahal dari kacamata ilmu, itu semua tak ada isinya."; dan sebagainya. Atau yang paling sering bikin tertangkap mata ya ucapan legendaris ini: "*Sudah Bung, sana baca buku duluuu*!"

Haha. Mereka lupa, bahwa kesempatan mengakses pengetahuan pun tak dimiliki setiap orang. Para kelas menengah yang mereka tuding-tuding itu pun belum tentu mereka pahami "*situasi struktural*"-nya. Boleh jadi kelas menengah itu adalah kelompok demografis pekerja kantoran yang pergi subuh dan pulang menjelang tengah malam, yang sering terpaksa lembur karena teror bos mereka, yang hanya memiliki kehidupan riil di akhir pekan dan itu pun habis untuk keluarga. Kapan mereka punya kesempatan membaca kitab yang berat-berat, apalagi pekerjaan mereka pun tak terkait dengan itu semua?

Barangkali memang benar, para kelas menengah yang dicap sebagai pengejar kenyamanan itu memiliki bawah sadar neolib. Mereka menganggap bahwa kaum miskin tergusur di mana-mana semata karena kalah berkompetisi dalam realitas dunia yang semakin ketat, padahal kenyataannya kompetisi tidak dimulai dari garis start yang sama. Oke, di titik itu saya sepakat.

Namun para intelektual publik itu pun lupa, bahwa mereka tak kalah neolibnya. Apa dikiranya keberuntungan berupa kesempatan mengakses pengetahuan, takdir yang mempertemukan mereka dengan buku-buku hebat, itu 100% murni karena kerja keras mereka sendiri? Hahaha. Sombong sekali. Sombong sekali.

Saya kira, sudah saatnya kelas intelektual mulai bertobat, berendah hati, untuk memberikan pengajaran publik tentang setiap hal yang terjadi di tengah segala keributan ini. Dengan cara sederhana, dengan bahasa-bahasa orang awam, dengan melupakan keagungan posisi sebagai elite pengetahuan.

Percayalah, itu akan jauh lebih berguna dalam ikhtiar membentuk masyarakat yang rasional, dan jauh lebih mulia ketimbang sekadar "mengehek-ngehekkan". Kami orang-orang bodoh ini butuh dicerahkan, Tuan. Bukan ditertawakan.

Iqbal Aji Daryono, Praktisi Media Sosial

DETIKNEWS, 27 Desember 2016

Proyeksi dan Tantangan Politik di 2017

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla relatif berhasil melalui tahun 2016 dengan baik. Dalam sejumlah sigi lembaga survei, tingkat kepuasan terhadap pemerintah mengalami kenaikan dibandingkan periode pertama.

Survei CSIS pada Agustus 2016 menunjukkan tingkat kepuasan mengalami kenaikan sekitar 15% dari 50,6% pada tahun pertama menjadi 66,5% pada tahun kedua. Tingkat kepercayaan publik terhadap presiden juga mengalami kenaikan dari 79% pada tahun pertama menjadi 87% pada tahun kedua. Survei SMRC menjelaskan, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan berada pada angka 67%. Di tahun pertama tantangan pemerintahan memang tidak mudah. Ekspektasi publik yang cukup tinggi membuat Jokowi harus hati-hati mengambil kebijakan politik. Presiden juga harusmembuat keseimbangan baru di antara partai pendukung pemerintah. Proses penentuan kursi menteri tidak semudah yang diperkirakan.

Jokowi dihadapkan pada kenyataan adanya pengaruh anggota koalisi dari pemilihan calon menteri. Pada saat reshuffle pertama terlihat pengaruh dari anggota koalisi. Di tingkat publik, sisa-sisa kontestasi pilpres masih terasa. Publik ketika itu masih terbelah antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo.

Di tahun kedua pelan-pelan Jokowi berhasil melaluinya dengan baik. Konsolidasi ke-kuasaan bisa dilakukan dengan efektif. Hubungan Presiden dengan PDIP, sebagai pendukung utama, mulai membaik dibandingkan tahun pertama. Saat reshuffle kabinet kedua, Jokowi sudah menunjukkan power dan pengaruhnya sebagai presiden. Jokowi benar-benar menggunakan hak prerogatifnya untuk mengangkat dan memberhentikan seorang anggota kabinet. Hubungan Jokowi dengan partai pengusung utama, terutamaPDIP, ditahunkeduarelatif tidak ada halangan yang berarti.

Pijakan untuk memperkuat hubungan seperti akomodasi politik dan alokasi kursi di Kabinet Kerja mungkin akan memperkuat hubungan tersebut. Soliditas anggota kabinet diperkirakan akan stabil seperti tahun kedua. Kegaduhan politik antar-menteri yang terjadi pada tahun pertama kecil kemungkinan akan terjadi lagi. Presiden betul-betul memegang penuh kendali pemerintahan.

Tantangan di 2017

Menghadapi tahun 2017 tentu tidak mudah juga bagi Presiden. Setidaknya ada beberapa tantangan politik bagi Jokowipada 2017. Pertama, ujian bagi soliditas anggota koalisi dan ujian bagi hubungan antara Jokowi dan PDIP. Ujian soliditas anggota koalisi tersebut, salah satunya akan terlihat dari bagaimana sikap fraksi-fraksi menanggapi usulan RUU Penyelenggaraan Pemilu dari pemerintah.

Format persyaratan dukungan capres salah satunya akan memengaruhi tingkat loyalitas partai kepada Presiden. Tingkat loyalitas diperkirakan akan melemah bila setiap partai peserta pemilu dapat mengusulkan calon

presiden— mengingat pemilu presiden dan pemilu legislatif dilaksanakan serentak.

Namun, bila skenario persyaratan dukungan calon presiden tetap menggunakan syarat lama, yaitu 20% dari kursi DPR atau 25% dari suara sah partai politik—skenario koalisi antarpartai akan terjadi. Bila menggunakan skenario ini, loyalitas partai kepada Presiden diperkirakan akan menguat, karena partai politik akan mengambil keuntungan dari dukungan terhadap Jokowi.

Berikutnya hubungan Jokowi dan PDIP akan diuji bagaimana Jokowi memosisikan diri di antara PDIP dan Golkar dalam pemerintah, terutama setelah Golkar begitu dekat dengan pemerintahan. Apalagi, Golkar tercatat sebagai partai yang pertama kali menegaskan dukungan terhadap pencalonan kembali Jokowi pada Pemilu Presiden 2019—jauh sebelum PDIP mendeklarasikannya.

Tantangan kedua, meningkatkan kinerja para menteri. Pada tahun kedua kepuasan terhadap kabinet kerja masih belum maksimal. Temuan survei CSIS, pada Agustus 2016 hanya 56% publik yang mengaku puas dengan kinerja Kabinet Kerja secara umum. Tantangan pada 2017 adalah menggenjot kinerja para menteri di bidang ekonomi.

Hal ini memang tidak mudah di tengah perekonomian dunia yang tengah melesu. Meskipun kepuasan terhadap bidang ekonomi mengalami kenaikan 16%, yaitu 30% di tahun pertama menjadi 46% di tahun kedua, kepuasan terhadap ekonomi masih rendah dibanding bidang lain yang sudah di atas angka 50%, bahkan bidang maritim mencapai angka kepuasan 63,9%.

Reshuffle kabinet diperkirakan akan kembali dilakukan pada 2017. Presiden mungkin akan kembali mengevaluasi kinerja Kabinet Kerja pada bidang-bidang yang belum maksimal. Hal tersebut dilakukan agar pada tahun keempat, Presiden dapat bekerja dengan baik dengan performa kabinet yang baik pula.

Tapi, perkiraan reshuffle tidak dilakukan secara besar-besaran. Kenapa reshuffle kembali dilakukan di tahun ketiga pemerintahan? Karena terlalu berbahaya bagi Presiden untuk melakukan reshuffle pada tahun keempat. Selain akan menciptakan guncangan politik, juga akan mengganggu hubungan Presiden dengan anggota koalisi.

Tantangan ketiga, memastikan pelaksanaan pilkada serentak gelombang kedua berjalan secara demokratis dan lancar. Pada pilkada gelombang pertama relatif tidak ada kekisruhan berarti. Pilkada berhasil dilaksanakan damai dan demokratis. Pada 2017 juga akan dilakukan persiapan menghadapi pilkada gelombang ketiga, pada 2018 nanti.

Kinerja DPR

Di tengah dukungan mayoritas fraksi di DPR, yaitu sekitar 68% kepada pemerintahan Jokowi-Kalla, parlemen dikhawatirkan akan mandul.

Diperkirakan pengawasan terhadap pemerintah tidak begitu nyaring. Hubungan Jokowi dengan partai oposisi juga relatif membaik. Dalam beberapa kesempatan Jokowi bertemu dengan Prabowo Subianto, rivalnya dalam pemilu presiden lalu.

Hal tersebut memang dilematis. Pada satu sisi kita berharap dukungan terhadap presiden yang kuat. Namun, bila itu terpenuhi, kontrol terhadap pemerintah juga dikhawatirkan akan melemah—karena banyak partai berbondong-bondong masuk Istana.

Pada 2017 juga di DPR ada pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017, termasuk revisi UU MD3 yang diperkirakan akan menjadi isu hangat di awal tahun nanti. Keinginan PDIP untuk merevisi undang-undang dengan menambah jumlah kursi pimpinan MPR/DPR diperkirakan tidak akan mengalami kesulitan berarti.

Ke depan, perlu dipertimbangkan periodisasi jabatan pimpinan DPR/MPR agar memberikan kenyamanan bagi pimpinan untuk bekerja dan tidak diberhentikan di tengah jalan, seperti yang dialami Ade Komaruddin. Akhirnya, bagi Jokowi tahun 2017 penting sebagai jembatan untuk memperoleh dukungan publik dalam pencalonan Presiden 2019.

Bagi partai-partai, tahun ini adalah masa untuk meningkatkan performa politik di tengah publik. Di tengah persaingan politik yang ketat, semoga Presiden dan DPR bekerja dengan baik untuk memperjuangkan kepentingan kolektif publik.

Arya Fernandes, Peneliti CSIS

KORAN SINDO, 28 Desember 2016

Menyuarakan Mayoritas yang Diam

Guru besar hukum Islam dan Timur Tengah di Universitas California di Los Angeles, AS, Khaled Abou el-Fadl, berpandangan bahwa kelompok radikal di dunia Islam sejatinya adalah kelompok kecil. Sebaliknya, kelompok moderat merupakan kelompok mayoritas. Namun, kelompok radikal yang kecil terasa besar di tengah diamnya kelompok moderat yang ia sebut sebagai *silent majority*.

Beberapa perkembangan mutakhir yang terjadi di republik ini menunjukkan bahwa pandangan Khaled Abou el-Fadl di atas masih memiliki ruang relevansi yang sangat luas di tengah kehidupan masyarakat. Betapa tidak, kelompok-kelompok non-arus utama belakangan acap mewarnai ruang publik, khususnya melalui aksi damai di semua jilidnya.

Padahal, berapa pun jumlah umat yang turun ke jalan dalam aksi damai (ataupun aksi-aksi tandingannya) tetaplah tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan jumlah mereka yang memilih sikap diam di rumah masing-masing. Namun, karena dalam hening, sikap dan suara mayoritas diam ini nyaris dianggap nihil. Bahkan, pada beberapa bagian, suara dan sikap mayoritas diam ini menjadi ajang perebutan klaim bagi mereka yang kerap bersuara lantang di ruang publik; masing-masing pihak mengklaim mewakili aspirasi kelompok mayoritas diam.

Terlepas apakah pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) benar-benar mengandung unsur penodaan agama atau tidak, terma penodaan agama telah menjadi denyut nadi sebagian umat dalam beberapa waktu terakhir. Mereka telanjur meyakini bahwa kemuliaan agama ataupun kitab sucinya telah dinodai. Hal ini bisa terlihat jelas dari sikap dan kegelisahan masyarakat umum di tingkat akar rumput, khususnya di kalangan basis-basis utama umat Islam. Sekali lagi, hal ini terlepas apakah pernyataan Ahok memang mengandung unsur penodaan agama atau tidak.

Oleh karena itu, ketika diajak untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasinya, mereka acap tidak berdaya untuk menolak. Nyaris tak ada kekuasaan apa pun untuk menghalanginya; apabila tidakada angkutan umum pun, mereka berjalan kaki.

Dengan kata lain, turun ke jalan tak ubahnya panggilan agama yang membuat mereka rela meninggalkan rutinitasnya, rela mengeluarkan uang pribadinya. Bahkan, sebagian pihak sampai pada tahap melupakan sakitnya demi untuk bisa berpartisipasi dalam aksi yang diyakini demi kemuliaan agama ini.

Tentu masing-masing pihak harus melakukan refleksi mendalam dan jujur: kenapa bisa terbentuk denyut nadi umat seperti ini? Dari segi hukum sebab-akibat, tak mungkin denyut nadi ini tiba-tiba terbentuk dengan sendirinya atau jatuh dari langit tanpa ada proses. Dengan kata lain, ada proses panjang dan kompleks menuju terbentuknya denyut nadi ini.

Kegamangan kelompok moderat

Ironisnya, ketika denyut nadi umat sudah terbentuk seperti di atas, kelompok moderat justru terjebak dalam sikap kegamangan yang akut. Di satu sisi turut berkontribusi bagi terbentuknya denyut nadi tersebut, tetapi di sisi lain mereka khawatir persoalan ini menjebol komitmen kebangsaan yang ada.

Kelompok moderat juga gamang menempatkan diri di antara sikap pemerintah dan tuntutan umat. Bahkan, kelompok moderat juga gamang antara mendukung atau melarang aksi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Singkat kata, kegamangan yang ada telah membuat kelompok moderat enggan memberikan saluran bagi umat untuk menyampaikan aspirasinya. Sementara kelompok non-arus utama justru memberikan saluran sebesar-besarnya bagi umat yang hendak menyampaikan aspirasi.

Itu sebabnya, jangan heran jika kelompok-kelompok non-arus utama tampak seperti penguasa umat. Hampir bisa dipastikan, sebagian dari mereka yang turun ke jalan adalah umat dari ormas- ormas moderat. Namun, karena kelompok moderat terjebak dalam kegamangan seperti di atas, kelompok non-arus utama berhasil menjadi lidah dan bersuara atas nama mereka.

Menurut hemat penulis, inilah yang membuat kelompok silent majority semakin asyik dengan keheningan dan sikap diam mereka. Di satu sisi, kelompok ini merasakan kekhawatiran mendalam terkait dengan dampak dari persoalan yang semakin liar ini. Akan tetapi, di sisi lain, mereka tidak rela suaranya diatasnamakan oleh kelompok yang selama ini cenderung bersikap radikal. Bahkan, mereka mungkin juga tidak rela suaranya dijadikan modal untuk kepentingan kontestasi politik pilkada yang melebur dalam hiruk-pikuk persoalan ini. Dalam kondisi seperti ini, sikap paling aman bagi mereka adalah diam. Suara paling merdu adalah keheningan.

Suara perdamaian

Oleh karena itu, tak ada pilihan lain, kelompok moderat harus keluar dari kegamangan yang ada; memberikan saluran bagi denyut nadi umat sekaligus membuat kelompok silent majority bersuara. Memberikan saluran bagi denyut nadi umat artinya memahami bahwa sebagian masyarakat saat ini telanjur meyakini akan terjadinya penodaan agama. Sejauh ini masyarakat sangat menghormati dan menaruh harapan tinggi terhadap proses hukum yang berlangsung.

Di satu sisi, kehadiran kelompok moderat dalam kondisi seperti ini sangat penting untuk memastikan aspirasi masyarakat mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait, khususnya aparat penegak hukum. Di sisi lain, kelompok moderat bisa menjadi wadah yang nyaman dan terkontrol bagi masyarakat, khususnya pada saat-saat keluarnya vonis pengadilan sebagai kalimat terakhir dari persoalan ini. Lebih jauh lagi, kehadiran kelompok moderat seperti ini bisa membuat kelompok *silent majority* keluar dari ruang heningnya

dan bersuara lantang. Akan tetapi, tentu saja demi perdamaian dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersifat majemuk.

Diakui atau tidak, perdamaian adalah cita-cita tertinggi dari masyarakat luas. Para pihak yang belakangan saling melakukan aksi pengerahan massa juga mengklaim aksinya demi perdamaian, bahkan aksi super damai. Pun diakui atau tidak, keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersifat majemuk masih menjadi komitmen semua pihak, termasuk para pihak yang belakangan saling melakukan aksi pengerahan massa.

Dengan kata lain, sekompleks dan sepelik apa pun persoalan yang timbul akibat persoalan dugaan penodaan agama yang dilakukan Ahok, masyarakat tidak menghendaki masalah ini berkembang menjadi konflik yang sarat dengan kekerasan, alih-alih menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersifat majemuk. Apabila ada pihak-pihak yang menghendaki demikian, mereka adalah kelompok kecil yang dari dahulu memang tidak menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan senantiasa menggunakan cara-cara kekerasan dalam perjuangannya.

Dalam konteks seperti ini, kehadiran dan peran kelompok moderat dapat menjadi gembok kebangsaan bagi penyelesaian persoalan dugaan penodaan agama melalui jalur hukum. Pada waktu yang bersamaan, peran dari kelompok moderat dapat menutup pintu-pintu fitnah kebangsaan yang belakangan bermunculan dengan memanfaatkan persoalan dugaan penodaan agama ini.

Hasibullah Satrawi, Pengamat Politik Timur Tengah dan Dunia Islam

KOMPAS, 24 Januari 2017

Twit SBY dan Fatwa MUI

SBY melalui akun Twitter @SBYudhoyono, Jumat (20/1/017) menulis: "*Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah dan penyebar 'hoax' berkuasa dan merajalela. Kapan rakyat dan yang lemah menang*? *SBY*." Keluhan SBY di akun Twitter-nya itu bisa dimengerti karena saat ini media sosial penuh berita bohong dan fitnah. Celakanya, berita bohong dan fitnah itu sering dipercaya massa begitu saja tanpa tabayyun sehingga mengakibatkan kerugian pihak tertentu yang difitnah.

Salah satu berita bohong itu misalnya perihal pulau reklamasi seluas 800 hektare yang konon akan menjadi tempat 20 juta imigran China. Berita 20 juta imigran China di tanah reklamasi itu telah menjadi viral dan mendapat tanggapan jutaan netizen. Terlepas dari setuju dan tidak pengadaan pulau reklamasi, berita 20 juta imigran China yang akan menempati pulau itu sungguh-sungguh tak masuk akal. Seorang netizen, Achmad Barmawi - fisikawan UGM Yogya - menganalisis: 800 hektare itu sama artinya dengan 8.000.000 meter persegi. Jadi kalau diisi 20 juta imigran China, berarti tiap imigran hanya dapat ruang 0,4 meter persegi. Bangunan apa itu?

Apa seluruh luas tanah yang 800 hektare itu akan jadi kandang burung dengan luas 0,4 meter persegi? Berita tersebut secara logika jelas bohong, hanya provokasi. Hal yang sama dengan berita ada 20 juta pekerja asal China di Indonesia. Berita ini sudah diklarifikasi Presiden Jokowi. Betul ada pekerja asal China yang dikaryakan di proyek-proyek yang dibiayai pemerintah/perusahaan China. Tapi, jumlahnya hanya 21.000 orang. Para "*pembuat berita bohong*" atau hoax lalu menyulapnya menjadi 20 juta karena Jokowi memang pernah menargetkan Indonesia akan kedatangan 20 juta wisatawan China. Kedatangan 20 juta turis China jelas akan sangat menguntungkan bagi industri pariwisata. Ternyata kata 20 juta itu kemudian dimanipulasi oleh pembuat hoax menjadi 20 juta imigran China yang bekerja di Indonesia.

Masih banyak lagi berita-berita bohong lain sehingga "*dunia online* " nyaris menjadi ajang fitnah, caci maki, dan berita bohong. Salah satu berita fitnah juga mengarah pada MUI yang dikatakan sebagai "*bungker*"-nya para teroris, kaum ekstremis, dan melindungi orang-orang yang anti-Pancasila.

Seorang dosen di UI misalnya dalam tulisannya di Facebook menyatakan bahwa MUI adalah pemecah- belah bangsa. Gara-gara fatwa MUI, bangsa Indonesia terbelah. Apalagi, setelah MUI "*ditunggangi*" Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPFMUI), kini MUI seakan telah membentuk organisasi yang mengoordinasi demo dan membakar massa untuk berbuat makar terhadap pemerintah. Perlu diketahui bahwa GNPFMUI sama sekali tidak ada hubungan organisatoris dengan MUI.

Gerakan ini muncul sendiri di masyarakat tanpa sepengetahuan MUI. Tapi, apakah MUI bisa membubarkan GNPFMUI? Tidak bisa. MUI sudah berkali-kali menyatakan GNPFMUI bukanlah MUI dan tidak ada hubungan

organis maupun organisatoris dengan MUI. Bila kemudian GNPF-MUI dengan strateginya mampu mengajak publik untuk melakukan demo masif 411 dan 212, itu bukan pekerjaan MUI. Pekerjaan MUI hanya menyampaikan fatwa. Fatwa itu pun merupakan tanggung jawab MUI kepada umat Islam.

Fatwa Penistaan Agama

MUI melalui Komisi Fatwa memang pernah melansir fatwa bahwa Ahok telah menista Alquran melalui penafsirannya terhadap Surat Al-Maidah: 51. Sebelum mengeluarkan fatwa tersebut, Komisi Fatwa yang terdiri atas ahli agama Islam dari berbagai perwakilan organisasiorganisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, Jamiatul Wasliyah, Mathlaul Anwar, dan lain-lain mengadakan sidang yang membahas kasus penafsiran Al-Maidah: 51 yang dilakukan gubernur DKI tersebut.

Setelah berdebat panjang, akhirnya keluarlah keputusan fatwa MUI bahwa Ahok telah melakukanpenistaanagama. Isi lengkap Fatwa MUI itu sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, ”... Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak-Ibu enggak bisa pilih saya, ya kan.

Dibohongin pakai Surat Al- Maidah: 51, macem-macem itu. Itu hak Bapak-Ibu, jadi Bapak-Ibu perasaan enggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..” yang telah meresahkan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut: 1. Alquran Surat Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin.

Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin; 2. Ulama wajib menyampaikan isi Surat Al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib; 3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin; 4. Menyatakan bahwa kandungan Surat Al- Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Alquran; 5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil Surat Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan: (1) menghina Alquran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan: (1) Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Alquran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut. (3)

Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Alquran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(4) Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum. (5) Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang (MUI, 11 Oktober 2016).

Sehubungan dengan ada fatwa tersebut, MUI merekomendasikan kepada pemerintah dan masyarakat untuk wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jelas sekali, MUI tidak menghendaki ada perpecahan bangsa akibat fatwa tersebut. Sejauh ini MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa soal penistaan agama Islam seperti kasus Lia Eden, Ahmad Mosadeq, dan lain-lain.

Pemerintah saat itu segera menindaklanjuti kasus penistaan agama tersebut dengan menahan pelakunya. Penahanan mereka ternyata tidak menimbulkan gejolak di masyarakat dan sama sekali tidak menimbulkan perpecahan bangsa. Dalam kasus Ahok misalnya fatwa MUI sebetulnya murni hasil kajian para pakar Islam di Komisi Fatwa. Sedikit pun tidak ada niat MUI untuk mencampuri Pilkada DKI, di mana Ahok menjadi salah satu cagubnya.

Tapi, kenapa kemudian kasus tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga timbul tuduhan bahwa MUI adalah pemecah- belah bangsa? Tuduhan tersebut jelas tidak punya dasar. Salah satu fungsi MUI seperti tertuang dalam Konferensi Ulama Nasional 21-27 Juli 1975 adalah menjadi penerjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatankegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat. Dalam rangka ini terkandung arti mendorong, memberi arah, dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya.

MUI memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah. Dalam istilah Presiden Soeharto, MUI adalah penghubung antara pemerintah dan ulama. Sedangkan ulama adalah pihak yang mewakili umat Islam. Kita tahu dalam kepenguruan MUI semua organisasi keagamaan (Islam) terwakili di dalamnya. Dari paparan di atas, tuduhan bahwa MUI menjadi bungker teroris dan kaum radikal serta pemecah bangsa tidak benar sama sekali. MUI justru menjadi penghubung antara pemerintah dan umat Islam.

Jika kemudian muncul ”masalah” dalam soal fatwa MUI terhadap penafsiran Basuki Tjahaja Purnama atas Surat Al-Maidah: 51, kemudian muncul demo besarbesaran, berarti kemungkinan ada ”mispersepsi” dalam

soal hubungan antara pemerintah dan umat Islam. Pertanyaannya, kenapa pemerintah atau pihak berwajib memperlakukan hal yang tidak sama antara kasus Lia Eden dan Ahmad Mosadiq dengan kasus Ahok? Seandainya perlakuannya sama, niscaya tidak akan timbul dua demo masif itu. Saat ini, diakui atau tidak, masyarakat masih kurang puas melihat perlakuan pemerintah terhadap terdakwa Ahok. Ini karena Ahok tidak ditahan sebagaimana kasus Lia Eden dan Mosadeq.

Seandainya perlakuan terhadap Ahok seperti perlakuan terhadap kasus penistaan agama yang lain, niscaya tidak akan timbul gejolak seperti sekarang ini. Diakui atau tidak, timbul ”gejolak” di masyarakat seperti yang terungkap dalam twit SBY di atas sebagian akibat ”bias” masalah pengadilan Ahok. Semoga hal tersebut bisa dipahami pemerintah.

Dan, kita berharap, MUI sebagai jembatan antara pemerintah dan umat Islam tetap berfungsi seperti sedia kala. Wabil khusus, kita apresiatif terhadap twit SBY tadi. Ini artinya sang mantan presiden itu masih tetap punya kepedulian tinggi terhadap kondisi bangsa Indonesia.

Amidhan Shaberah, Ketua MUI (1995-2015)

KORAN SINDO, 24 Januari 2017

Menguatkan Teologi Kerukunan

RAPAT konsultasi antara Presiden Joko Widodo dan pimpinan MPR di Istana Merdeka (24/1) yang membahas soal kerukunan dan mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan dalam menyelesaikan persoalan sangat penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat dewasa ini menguatnya pihak-pihak yang cenderung mengungkit sentimen agama untuk saling membenturkan kerukunan kehidupan umat beragama. Karena itu, dituntut adanya kewaspadaan dari oknum pihak ketiga yang ingin bermain di 'air keruh'. Di sisi lain, perlu ditegaskan agar nilai-nilai toleransi serta kerukunan harus tetap terjaga sebab bangsa ini bagai sebuah mozaik, baik keyakinan agama, karakter budaya, identitas, maupun etnik. Lazimnya sebuah mozaik, jika direnungkan sesaat, di dalam diri bangsa ini tecermin apa yang disebut antropolog Prancis, Claude Levi-Strauss (1995), bahwa keragaman ada di belakang, di depan, dan bahkan di sekeliling kita.

Dengan demikian, keragaman dalam berbagai hal itu memang sebuah realitas, sama sekali bukanlah hal yang baru. Emosi karena kebencian yang terus disuarakan ditakutkan akan menyulutkan api-api kecil yang akan membesar di seluruh penjuru negeri. Bahkan, hal itu dikhawatirkan memunculkan statemen yang mengatakan dan menghujat agama lain berasal dari kaum yang dibenci Allah. Sebagai umat muslim janganlah kita hanya memandang dari satu arah seperti mengharamkan toleransi sehingga kita memeranginya hanya karena ada ayat yang berbunyi "*Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka*." (QS Al-Baqarah:120).

Kebencian timbul biasanya disebabkan ketidakadilan, baik oleh umat lain, pemerintah, LSM, maupun pemberitaan sehingga kadang kala kita menuntut hal tersebut, berlaku tidak adil, bahkan sampai melarangnya. Padahal, ada ayat yang menyatakan, "*Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil-lah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa*." (QS Al-Maidah:8). Di masa kini, teramat penting untuk membangun masyarakat yang bertolak dari rasa saling menghargai, menghormati, dan mengasihi antarsesama.

Masyarakat bisa dikatakan ideal jika di dalamnya terdapat bangunan jiwa persaudaraan, persamaan, dan keadilan yang tecermin pada setiap pribadi manusia sebagai anggota masyarakat. Bagaimanapun sikap-sikap kemanusiaan semacam itu sangat diperlukan untuk menandingi kecenderungan di sebagian kecil masyarakat yang membenarkan adanya praktik-praktik kekerasan. Praktik kekerasan yang ditimpakan pada komunitas yang berbeda paham ideologi maupun keagamaan oleh pihak-pihak tertentu, atau fenomena mengerikan seperti tindakan terorisme atau bom bunuh diri atas nama agama.

Seorang ahli syariat Islam di University of California, LA, Khaled Abu al-Fadl menyebutkan bahwa sebenarnya tindakan-tindakan kekerasan tak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Islam dilakukan oleh segelintir kalangan yang tentu sedikit jumlahnya (peripheral). Namun, jumlah yang sedikit tersebut seakan-akan mewakili dari jumlah umat Islam yang banyak. Ini tentu pada

gilirannya sangat merugikan umat Islam secara keseluruhan. Sikap keberagamaan tertutup sebenarnya menjadi pangkal persoalan karena praktik kekerasan maupun terorisme atas nama agama bermula dari sikap keberagamaan itu. Ciri utama keberagamaan tertutup, antara lain seperti menolak kebenaran dalam agama-agama lain, mengklaim agamanya yang paling benar, sempit dalam menafsirkan kitab suci Alquran, menolak keterbukaan, kerja sama, dan dialog dengan penganut agama lain. Sikap keberagamaan tersebut tentunya tidak menguntungkan bagi keberadaan bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Bangsa majemuk mensyaratkan bagi warga negaranya untuk bersikap terbuka, mendialogkan adanya perbedaan-perbedaan, saling menghormati, menghargai, bekerja sama, dan menyayangi antarsesama.

Dengan kata lain, persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah) teramat diperlukan bagi sebuah bangsa yang majemuk. Tanpa adanya rasa persaudaraan kebangsaan, tekad yang sama, cita-cita bersama, bangsa ini sudah sedari awal mengalami perpecahan atau disintegrasi. Karena itulah, sikap keberagamaan tertutup dapat merusak tatanan kebangsaan ini. Karena dengan sikap tersebut, sebuah komunitas umat akan terblokade berdasarkan paham keagamaannya saja.

Sementara dalam bernegara dan berbangsa, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda sebagai fitrah ketuhanan, sebagaimana ayat Alquran yang dikutip di bagian awal tulisan ini. Bukankah hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, "*Belum sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sama seperti ia mencintai dirinya sendiri*." (HR Bukhari). Ini menandakan betapa dalam Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan antarsesama umat manusia, terlepas dari perbedaan agama, ideologi, ras, atau suku bangsa.

Sayangnya, terlalu banyak muslim di negeri ini tidak melaksanakan keimanan dan ketakwaannya yang sesungguh-sungguhnya sehingga bangsa ini akhirnya terombang-ambing dan karut-marut dilanda berbagai persoalan, baik ekonomi, sosal, maupun politik. Kehidupan masyarakatnya penuh dengan ketidakmenentuan, penyakit-penyakit sosial masih eksis. Pengembangan dan pelaksanaan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*) perlu dilakukan dan dikukuhkan secara bersama-sama, saling mendukung, dan bersifat sinergis.

Persaudaraan kebangsaan perlu ditopang dengan adanya kesadaran persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah*) bukan hanya sebatas persaudaraan Islam (*ukhuwah islamiyah*) semata-mata. Jika hanya mengukuhkan persaudaraan Islam tanpa mengikutkan persaudaraan kemanusiaan, sama halnya mengutubkan kemanusiaan dalam sebuah blokade-blokade perbedaan agama yang sangat merugikan. Sementara iklim peradaban saat ini pun mengharuskan adanya kerja sama yang terbuka yang dibangun berdasarkan kesadaran bersama, saling menghargai, menghormati, dan mengasihi antarsesama umat manusia untuk membangun peradaban kemanusiaan di masa kini dan untuk masa datang.

Ismatillah A Nu'ad, Peneliti Indonesian Institute for Social Research and Development, Jakarta

MEDIA INDONESIA, 26 Januari 2017

Bahagia itu Hak Warga Jakarta

Sering kali orang berpikir bahwa bahagia itu abstrak, tak bisa diukur dan terkesan hanya impian janji manis. Namun, tak bisa dimungkiri, bahagia itu adalah tujuan hidup. Terlebih jika pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan berani menjamin kebahagiaan warganya, maka di situlah letak pendekatan humanis suatu negara. Sebagaimana kita ketahui, salah satu visi pasangan calon (paslon) dalam Pilkada DKI adalah membuat bahagia warganya. Sebagian masyarakat menilai paslon tersebut hanya omong kosong, bahkan ada yang mencemooh bahwa tidak ada yang bisa memastikan indikator kebahagiaan warga Jakarta.

Maka mereka berpikir, visimisi pembangunan dan infrastrukturlah yang lebih terukur. Mereka lupa, siapa yang sebenarnya menikmati kue pembangunan dan infrastruktur itu kalau bukan para pemodal dan kalangan menengah atas. Orang miskin kian tergerus dan dianggap tak layak menikmati hasil pembangunan megah dan mewah tersebut. Tingginya jumlah penduduk serta banyaknya problematika, baik sosial maupun ekonomi, membuat sebagian warga Jakarta harus berjuang mengatasi tekanan hidup serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Banyaknya problematika berakibat tidak sedikit warga Ibu Kota yang pada akhirnya memiliki tingkat frustrasi, depresi, dan stres yang tinggi hingga menimbulkan masalah kesehatan jiwa. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Departemen Kesehatan 2014 menyebutkan, terdapat 1 juta jiwa pasien gangguan jiwa berat dan 19 juta pasien gangguan jiwa ringan di Indonesia. Dari jumlah itu, 385.700 jiwa atau 2,03% pasien gangguan jiwa terdapat di Jakarta dan berada di peringkat pertama nasional. Angka ini meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya.

Hal yang kurang lebih sama terjadi pada 2015. Berdasarkan data profil kesehatan kab/kota administratif menyebutkan persentase jumlah kunjungan ke puskesmas bagi penderita gangguan jiwa sebanyak 6.281.810 kunjungan rawat jalan dan 311.921 kunjungan gangguan jiwa. Fenomena ini kian mempertegas perlunya perbaikan situasi kepemimpinan di DKI Jakarta yang memprioritaskan kebahagiaan sebagai tujuan hidup warganya.

Indikator Kebahagiaan

Sebagai satu-satunya negara yang mengadopsi gross national of happiness, Bhutan telah menginspirasi negara-negara di dunia untuk berlomba menjadi negara paling bahagia dalam world happiness report yang dirilis setiap tahun. Bagi Bhutan, kebahagiaan rakyatnya adalah prioritas dari segalanya. Meski dinobatkan sebagai salah satu negara miskin di dunia, Bhutan tak kalang kabut untuk berlomba dengan negara berkembang lain yang kerap mengejar indikator pembangunan untuk mencapai predikat negara maju di dunia.

Ada empat pilar dan sembilan indikator yang digunakan Bhutan dalam mengukur program pemerintah yang didedikasikan bagi kebahagiaan warganya. Empat faktor itu pemerintahan yang baik, pembangunan social ekonomi yang berkelanjutan, kelestarian dan promosi kebudayaan, dan perlindungan

alam/lingkungan. Dari empat pilar tersebut, lahirlah sembilan indikator yang dijadikan alat ukur dalam program pemerintahnya, antara lain standar hidup, pendidikan, kesehatan, lingkungan, kekuatan komunitas, efektivitas waktu yang digunakan, kesejahteraan psikologis, pemerintahan yang baik, dan kelestarian budaya.

Pilar dan indikator tersebut jelas memiliki satu misi, yakni kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Bhutan. Menjadikan rakyat bahagia tentu harus ada alat ukurnya. Hal itulah yang terlihat dari kampanye salah satu paslon Pilkada DKI yang selalu mengedepankan tagline ”*bahagia, adil, dan sejahtera*” bagi warga Jakarta ke depan. Indikator ini dapat dilihat dari janji politik paslon tersebut yang mengunggah tiga pilar dalam programnya.

Pertama, pilar pembangunan manusia dengan mengusung jaminan stabilitas harga pokok, membangun kehangatan hubungan antarwarga, membangun kepemimpinan yang menggerakkan, dan melibatkan publik dalam penyelenggaraan *good governance*. *Kedua*, pilar pembangunan lingkungan kota. Pilar ini diwujudkan dengan mengusung program penanggulangan masalah banjir dan air bersih serta pengelolaan dan pengurangan sampah. *Ketiga*, pilar pembangunan kesejahteraan. Pilar ini mengusung program menciptakan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan penanggulangan mobilitas serta kemacetan. Sekilas, ketiga pilar dan beberapa indikator program tersebut telah mencerminkan kebahagiaan sebagaimana dianut dalam gross national of happiness. Pilar kehidupan dengan mengedepankan kebahagiaan inilah yang kerap kali luput dari jangkauan pemikiran pemimpin kita saat ini. Benturan kepentingan dan ambisi pribadi maupun partai kerap melupakan bagian penting dari kehidupan rakyat, yakni bahagia.

Kebahagiaan, seperti juga kesusahan, bisa menular kepada siapa saja di sekitar kita. Artinya, jika program pembangunan dan kerja nyata hanya berakibat menyusahkan warga Jakarta, maka sebagai ibu kota negara tentulah dapat menularkan iklim kesusahan itu kepada provinsi lain di Indonesia–bahkan bisa jadi menjadi gambaran nasional Indonesia. Maka, kebahagiaan adalah sebuah pilihan, siapkah kita menularkan kebahagiaan Jakarta sebagai bagian dari cerminan bangsa Indonesia ke wilayah di sekitar kita?

Karena itu, sebagai sebuah pilihan, warga Jakartalah yang menentukan kepada siapa mereka berharap bahagia? Apakah kepada pemimpin yang jelas terbukti tidak membuat mereka bahagia, atau pada pemimpin yang menjamin kebahagiaan mereka? Bagaimanapun, bahagia adalah hak warga Jakarta.

Pilkada 15 Februari nanti adalah momentum apakah warga Ibu Kota mampu memilih pemimpin yang akan membawa mereka bahagia atau malah ”mempertaruhkan kebahagiaan” mereka dengan memilih pemimpin yang salah. Wallahualam bish-shawab.

M Nasir Djamil, Anggota DPR RI

KORAN SINDO, 26 Januari 2017

Menjaga Kualitas Pilkada

Dalam hitungan hari gelaran pilkada serentak tahap kedua akan segera dilaksanakan di 101 wilayah seluruh Indonesia. Rinciannya, 7 pilkada di tingkat provinsi, 18 pilkada di tingkat kota, dan 76 pilkada di level kabupaten. Hajatan lima tahunan ini akan menjadi momentum memilih pemimpin populer yang mampu meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja. Sebab, pilkada bukan semata ritual demokrasi tanpa arti, melainkan ajang meningkatkan derajat kehidupan masyarakat melalui program kerakyatan.

Berulang kali kita telah menyelenggarakan pilkada, namun tetap saja praktik demokrasi substantif masih jauh panggang dari api. Sejumlah problem krusial seperti *money politics*, netralitas birokrasi, rendahnya partisipasi, hingga gurita politik dinasti yang terbukti korup. Praktik politik semacam ini menghambat lahirnya pemimpin prorakyat. Pemenang pilkada adalah mereka yang miskin komitmen memperbaiki kualitas hidup masyarakat di daerah. Dengan uang dan mobilisasi birokrasi, mereka begitu digdaya menang dalam pilkada.

Karena itu, kualitas pilkada mesti terus dijaga, baik dari segi teknis penyelenggaraan, domain isu, politik beradab, serta melawan calon kepala daerah yang terbukti tak membumi dan berasal dari keluarga korup. Tanpa menafikan faktor penting teknis penyelenggaraan pilkada, ada empat variabel substantif yang perlu diperhatikan secara serius guna merawat kualitas pilkada serentak tahap kedua. Pertama, partisipasi pemilih. Mengacu pada pilkada serentak tahap pertama pada 2015, kalkulasi partisipasi pemilih nasional rata-rata 70%.

Angka ini menurun dibandingkan dengan Pemilu 2014 yang mencapai 75%. Banyak faktor yang mengakibatkan partisipasi menurun. Misalnya konflik antarpartai, kandidat yang tak menjual atau bermasalah, hingga rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pilkada. Bagi mereka, pilkada hanya ajang pesta pora pemburu kekuasaan yang abai terhadap persoalan mendasar publik. Anthony Giddens dalam *Runaway World* (1999) mengatakan, menurunnya angka partisipasi pemilih dalam sebuah negara demokratis disebabkan oleh kinerja pemerintah, performa parpol, perilaku elite, serta kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik.

Demokrasi hanya sebatas ajang ritual tanpa substansi. Silih berganti suksesi kepemimpinan dilakukan secara berkala, namun tetap saja kesejahteraan dan pemerataan hidup tak kunjung hadir. Pada saat bersamaan, kelakuan elite semakin memamerkan sikap acuh terhadap persoalan-persoalan mendasar rakyat. Akibatnya, publik apatis terhadap persoalan politik.

Publik berkeyakinan, siapa pun yang jadi pemimpin, kesejahteraan sebatas janji indah saat kampanye. Bahkan, tak sedikit pemimpin terpilih yang mempertontonkan gaya hidup glamor menikmati hasil korupsi. Sejatinya, demokrasi kita yang kian matang memberikan efek positif bagi lahirnya

pemilih rasional. Yakni, pemilih cerdas yang menambatkan pilihan hatinya pada pemimpin yang merakyat, serta melawan calon kepala daerah yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Kedua, politik uang (*money politics*). Praktik kotor ini inhern dalam politik elektoral kita. Hampir bisa dipastikan, semua kontestan berusaha menjadikan uang sebagai mesin utama pendulang suara. Meski ilegal, barter suara pemilih dengan "*uang segar*" marak dilakukan. Tentu saja money politics menjadi kisah pilu dalam pilkada kita. Ironis karena rakyat dijadikan objek jual beli suara demi kemenangan elektoral. Tak ada lagi ruang beradu argumen, visi misi, dan gagasan besar membangun daerah.

Yang ada hanya ruang transaksi logistik antarelite dengan rakyat. Di tengah pragmatisme hidup, para kontestan silih berganti menawarkan segepok cash money sebagai kompensasi meraup dukungan. Iming-iming logistik menandakan sang kandidat miskin program. Tak ada lagi tata krama, kecuali hasrat berkuasa. Alam bawah sadar rakyat dijejali janji palsu yang semu. Di era demokrasi transaksional, uang nyatanya mampu menjadi alat politik mahaampuh meraih dukungan di level *grass root*. Uang adalah raja yang secara perlahan menggiring rakyat pada jurang kehancuran.

Dalam konteks inilah moral politik dicampakkan ke tong sampah. *Ketiga*, netralitas birokrasi yang hingga kini menjadi persoalan serius. Hasil evaluasi pilkada serentak tahap pertama memperlihatkan birokrasi tetap menjadi instrumen politik demi memobilisasi dukungan. Kandidat petahana merupakan pihak yang paling mudah mengapitalisasi dukungan di semua level birokrasi. Bahkan, tidak sedikit oknum aparat birokrasi yang menjadi tim pemenangan kandidat tertentu. Modus kerjanya berjalan begitu rapi, terstruktur dan sistematis.

Hingga tak ada yang mengira bahwa mereka bekerja memenangkan salah satu calon. Godaan politik yang begitu besar mengakibatkan birokrasi kita sulit bekerja profesional. Realitas ini makin menyuburkan nada peyoratif bahwa birokrasi tetap menjadi sumber masalah, memihak, dan kerap menyalahgunakan fasilitas negara. Padahal, birokrasi harus netral demi mewujudkan administrasi negara yang bersih dan efisien, sesuai amanat konstitusi. Posisi birokrasi sebagai kepanjangan pejabat harus kuat, mampu menghindar dari jebakan kepentingan politik penguasa.

Di banyak daerah birokrasi masih menjadi mesin politik yang ampuh untuk memengaruhi pemilih. Penetrasi jaringan ke semua level semakin mempermudah "kerja" aparat birokrasi memenangkan pasangan calon jagoannya. *Keempat*, gurita politik dinasti. Secara umum, dinasti politik bernada negatif karena selalu dikaitkan dengan korupsi. Sebab itu, dinasti politik sering mendapat perlawanan, jika bukan penolakan, di banyak daerah.

Kampanye antipolitik dinasti didasarkan pada realitas korupsi di sejumlah daerah seperti di Banten dilakukan Ratu Atut Chosiyah. Teranyar adalah korupsi Bupati Klaten, Sri Hartini yang terkena operasi tangkap tangan

(OTT) KPK dalam kasus suap. Realitas ini yang membuat politik dinasti harus diamputasi. Ruang gerak politik dinasti sempat dibatasi dalam UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada. Namun, undang-undang ini dianulir Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah dengan alasan inkonstitusional dan membatasi hak politik warga negara.

Ketua KPK Agus Rahardjo, dalam banyak kesempatan, mengungkapkan pentingnya melawan dominasi politik dinasti. Baginya, politik dinasti di mana pun akan selalu menyuburkan praktik politik yang manipulatif, kotor, dan mendistorsi struktur masyarakat. Politik dinasti adalah aib dari praktik demokrasi elektoral saat ini. Karena itu, sebagai upaya merawat kualitas pilkada, menjadi penting menjaga netralitas birokrasi, meningkatkan partisipasi pemilih rasional, melawan politik uang, serta memutus mata rantai politik dinasti. Semua hal ini dilakukan sebagai ikhtiar untuk membangun demokrasi yang substantif.

Adi Prayitno, Dosen Politik FISIP UIN Jakarta

KORAN SINDO, 26 Januari 2017

Bersikap Adil pada Rizieq dan Ahok

Pilkada DKI Jakarta yang akan diselenggarakan pada 15 Februari 2017 agaknya tidak pernah sepi dari berita-berita panas yang menyertainya. Kompetisi politik antara tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-DJarot Saepul Hidayat, dan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno, menghadirkan aroma panas. Yang menarik, aroma panas tersebut bukan hanya terkait dengan para calon, tetapi juga dengan tokoh-tokoh lain.

Kini ada dua tokoh yang sekarang sedang ramai diperbincangkan publik jelang gelaran pilkada, yaitu Habib Rizieq dan Ahok. Keduanya kini menjadi pusat perhatian, bukan hanya publik Jakarta, atau Indonesia, melainkan juga publik dunia. Rizieq kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar atas dugaan penistaan terhadap dasar negara Pancasila. Sementara Ahok sudah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama terkait pidatonya di Kepulauan Seribu, bahkan kini sudah menjalani proses hukum di pengadilan.

Boleh Benci, asal Adil

Namun, ada satu hal yang sangat memprihatinkan terkait sikap publik terhadap Rizieq dan Ahok, yakni kebencian yang mendalam sehingga mereka mengabaikan nalar sehat. Kelompok anti-Ahok misalnya menyimpan kebencian yang sangat kuat terhadap gubernur Jakarta nonaktif tersebut sehingga apa pun yang terucap dari mulutnya, dan yang terlihat dari tindak tanduknya, dipandang sebagai sesuatu yang buruk atau salah. Sejumlah prestasi Ahok selama memimpin Ibu kota pun, bagi kelompok ini, sama sekali tidak berarti.

Demikian pula sebaliknya. Kelompok anti-Rizieq yang boleh dikatakan merupakan para pendukung Ahok melakukan hal yang sama kepada Rizieq. Segala yang terpancar dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, bahkan membahayakan dan berpotensi memecah belah bangsa Indonesia.

Torehan-torehan Rizieq dan FPI yang oleh sebagian kalangan dianggap positif, bagi kelompok yang anti ini, dipandang sebagai sesuatu yang tidak berharga sama sekali. Belakangan serangan-serangan terhadap Rizieq kian tak terkendali. Sesuatu yang masih belum jelas kebenarannya atau setidaknya masih dalam proses penyelidikan dijadikan amunisi serangan oleh kalangan anti-Rizieq. Beredar luas chat-nya di media-media sosial bersama seorang perempuan yang mengandung pornografi, bahkan ada yang disertai video rekaman. Penyebaran itu dilakukan secara gencar yang tentu bisa digunakan untuk menyerang Rizieq.

Hal yang sama juga kerap dilakukan kelompok anti-Ahok. Berbagai hoax yang disebarkan di media-media sosial terkait Ahok luar biasa kejam. Gambar-gambar editan yang dikaitkan dengan Ahok, misalnya kepalanya

diganti dengan hewan tertentu, tidak terhitung jumlahnya. Serangan-serangan tak beretika semacam ini, baik terhadap Rizieq maupun Ahok, menunjukkan bahwa kita bersikap semena-mena terhadap orang lain, terutama yang dibenci. Dalam perspektif agama (Islam), kebencian, meskipun sudah sangat mendalam, tidak boleh dijadikan landasan untuk bersikap tidak adil.

Tuhan menegaskan bahwa sekali pun kita sangat benci pada sebuah sekelompok atau seseorang, tetapi itu tidak boleh membuat kita bersikap tidak adil kepada mereka (al-Maal-Maidah: 8). Dalam sejumlahkitab tafsir disebutkan, meski kita berada di medan perang di mana kita menganggap musuh sebagai kelompok yang sangat dibenci, kita tetap diminta bersikap adil.

Antara lain dengan cara menghormati musuh misalnya memberi kesempatan untuk bersiap, menghentikan serangan saat musuh menyerah, dan sebagainya. Demikianlah yang seharusnya dilakukan, baik terhadap Rizieq maupunAhok. Orang boleh benci kepada Rizieq dan Ahok karena rasa benci itu sifat manusiawi.

Tidak ada seorang pun di dunia ini yang terlepas dari perasaan benci. Meski demikian, mereka tetap harus bersikap adil kepada keduanya. Adil terhadap keduanya itu misalnya dengan cara memberikan keduanya hak-hak yang mesti diterima: dihormati, diberi kesempatan untuk membela diri, tidak dilontarkan fitnah kepada keduanya, dan sebagainya.

Dalam konteks yang lebih luas, bersikap adil terhadap Rizieq dan Ahok bisa dilakukan antara lain dengan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Mencoba melakukan intervensi misalnya dengan menggalang massa atau menggiring opini publik terhadap proses hukum tidaklah adil, apalagi sampai mengungkapkan kalimat-kalimat yang mengandung ancaman bila proses hukum tidak sesuai dengan keinginannya.

Keras versus Keras

Apa yang tersajikan di panggung politik Pikada DKI hari ini sesungguhnya merupakan sebuah tontonan yang tidak edukatif. Ada pertunjukan kekerasan di sana, bahkan kekerasan yang dibalas pula dengan kekerasan. Saling melaporkan, saling mengejek, saling memfitnah, dan sebagainya kini seolah telah menjelma menjadi menu harian.

Padahal, selama kekerasan dibalas dengan kekerasan, hasil akhirnya tidak akan pernah memuaskan. Ibarat cerita silat klasik yang selalu menyajikan tragedi saling balas dendam yang kerapkali menjadi ruh cerita. Ketika seorang tokoh terbunuh, dengan cara apa pun terbunuhnya, pasti keluarganya akan membalas dendam. Saat mereka berhasil membunuh pelakunya, keluarga pelakunya juga menuntut balas.

Demikian seterusnya, saling dendam seolah menjadi mata rantai yang tidak bisa putus. Permusuhan pun berlangsung abadi. Itulah yang terjadi jika kekerasan selalu dibalas oleh kekerasan. Karena itu, para pendukung dua

belah pihak, baik Rizieq maupun Ahok, sebaiknya berusaha menahan diri untuk tidak terjebak dalam labirin balas dendam yang tiada akhir.

Sebuah pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan, two wrongs don't make a right, kalau keras dibalas dengan keras, tidak akan ada solusi. Bahkan mungkin saja yang akan terjadi adalah kekacauan (chaos). Sebagai anak bangsa tentu kita berharap bahwa kecenderungan tersebut tidak terjadi di Indonesia.

Apalagi politik (dukung-mendukung calon) sebenarnya adalah persoalan duniawi-temporer. Suatu saat orangyangsekarangkitadukung habis-habisan atau mati-matian mungkin suatu saat menjadi orang yang paling kita benci. Hal itu bisa saja terjadi karena misalnya ia tidak konsisten dengan janjinya.

Dengan demikian, sudah saatnya bagi kita semua untuk mengakhiri sikap kebencian yang berlebihan terhadap siapa pun, baik terhadap Rizieq maupun Ahok. Jika pun tidak bisa melepaskan kebencian itu, setidaknya kita bisa berlaku adil kepada mereka berdua.

Iding Rosyidin, Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

KORAN SINDO, 09 Februari 2017

Basuki, Demokrasi, dan Nabi Khidir

BASUKI Tjahaja Purnama alias Ahok seperti tak ada habisnya. Setelah kisruh Al-Maidah 51, yang sempat membuat Jakarta mencekam oleh massa itu tidak hanya sekali muncul lagi kehebohan baru. Dia digugat oleh banyak pihak karena dianggap telah mengancam seorang tua yang terpandang, Ketua Umum MUI, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Ma'ruf Amin. 'Ancaman' itu disampaikannya saat sidang ke-8 kasus dugaan penistaan agama yang melilit dirinya. Saat itu, dengan suara bergetar karena menahan emosi, Basuki menilai sang kiai telah memberikan kesaksian palsu karena tidak mengakui pernah menerima telepon dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 7 Oktober 2016. Padahal, bukti begitu nyata bahwa yang bersangkutan memang pernah dikontak oleh Presiden ke-6 RI tersebut.

Liputan6.com menyimpan fakta itu hingga kini. "*Percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Mahakuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu per satu dipermalukan. Terima kasih*," demikian ucapan Ahok mengakhiri tanggapannya atas kesaksian Kiai Ma'ruf. Oleh berbagai kalangan, terutama kaum nahdiyin, ucapan ini dianggap tidak pantas disampaikan Ahok kepada figur yang menempati posisi paling tinggi di organisasi Islam terbesar di Indonesia. Tidak kurang seorang Mahfud MD, mantan Ketua MK, turut menggugat cara Ahok berbicara kepada sang kiai. Anshor dan Banser juga menyatakan keberatannya dan mengancam akan mengerahkan massa jika dalam waktu tiga hari suami Veronica Tan ini tidak meminta maaf.

Tidak ketinggalan, para lawan politik Ahok langsung menggoreng santapan empuk nan lezat ini hingga muncul tagar #MendadakNU di media sosial. Beruntung, baik Ahok dan Kiai Ma'ruf langsung saling memaafkan sehari kemudian. Semua itu terjadi karena satu hal saja, kelugasan seorang Ahok. Ia lugas dalam berpolitik, ia lugas dalam memimpin, dan terutama ia lugas dalam berbicara. Soal kelugasan ini, sebagian ada yang tidak suka, atau dipandang sebagai kekurangan sang petahana Gubernur DKI, bahkan ada yang menggugatnya sehingga harus dienyahkan dari jagat politik.

Pasalnya, menurut pandangan yang justru keluar dari seorang yang mengaku penganut liberalisme ini, Ahok terlalu berbahaya bagi Republik yang masih ringkih seperti Indonesia. Sepak terjangnya sering membuat kaum intoleran menjadi menguat. Karena itu, rawan bagi negeri ini jika dia terus dibela dan dibiarkan menjadi pejabat publik. Namun, tidak kurang juga yang mendukungnya. Bagi kalangan ini, kelugasan Ahok ialah antitesis dari sikap munafik kebanyakan pejabat publik dan tokoh masyarakat saat ini. Tidak hanya itu, Ahok juga banyak memberikan kerja dan bukti tanpa harus banyak berkata, apalagi menebar citra. Toh, publik juga tetap banyak yang mendukungnya. Di atas itu semua, dia adalah individu sekaligus warga yang punya hak untuk menjadi dirinya sendiri.

Kehendak Zaman

Namun, itulah mungkin konsekuensi dari alam yang bernama demokrasi. Semua boleh memainkan peran dan lakon sesuai dengan keinginannya masing-masing. Semua setara dan memiliki hak yang sama di dalamnya. Mengapa bisa demikian? Karena demokrasi adalah sebuah sistem yang paling volaid (cair) bagi masyarakat modern, dan juga negara modern. Sebagai sebuah sistem bersama, demokrasi memberikan kebebasan bagi para penghuninya untuk melahirkan apa saja; seorang diktator sekalipun. Obama lahir dari sistem demokrasi, tapi Hitler juga lahir dari sistem demokrasi. Demikian juga Donald Trump, fenomena Amerika hari ini, lahir dari negara yang katanya dedengkot demokrasi. Pemimpin negara-negara Amerika Latin, lahir dan tumbuh di alam demokrasi. Bahkan terorisme dan radikalisme hidup subur di dalamnya. Osama bin Laden hidup di Amerika, Hizbut Tahrir besar di Inggris.

Sedemikian terbukanya demokrasi hingga fenomena seperti LGBT hanya mampu marak dalam ruang bernama demokrasi, lengkap dengan para penentangnya. Jika merunut dari awal kumunculannya, demokrasi memang lahir dari sebuah kehendak bersama warga kota. Mereka ingin ada kesetaraan untuk bersuara (freedom of expression), bukan hanya para aristokrat atau elite berkuasa. Mereka ingin keputusan diambil bersama, bukan oleh seorang raja semata. Kehendak ini kemudian menjadi kehendak manusia di mana-mana hingga kemudian menjadi kehendak zaman yang semakin terbuka untuk merayakan kebebasan (kehendak bebas) manusia (warga kota) di banyak belahan dunia.

Demokrasi selalu lahir bukan karena sebuah ketukan palu kebijakan dari pemegang otoritas tertentu, melainkan karena benturan zaman (dialektika). Lihatlah demokrasi di Amerika, Eropa, Indonesia sendiri, dan yang teranyar adalah negeri-negeri di Arab (Arab Spring). Ia lahir dari kehendak bersama warganya, bukan hadiah atau kebijakan para penguasanya. Namun demikian, sebagai sebuah sistem terbuka yang dinamis, demokrasi harus memiliki jangkar sebagai mekanisme pertahanan diri sebab demokrasi itu ibarat orang yang baik hati. Saking baiknya ia sampai mau memberi ruang kepada pihak yang menggugatnya, bahkan yang ingin membinasakannya.

Oleh karena itu, lahirlah perangkat bernama hukum. Namun tidak cukup hanya itu, demokrasi juga harus memastikan transisi sebuah kekuasaan berjalan damai dari satu kelompok kepentingan kepada kelompok kepentingan lainnya. Dalam momen transisi kekuasaan, kerap muncul ekspresi-ekspresi semisal primordialisme, sektarianisme, politik identitas, seperti yang marak belakangan ini. Ia memang menjadi keniscayaan yang tumbuh bersamaan dengan maraknya kebebasan. Namun, kenyataan tersebut juga bisa menguat menjadi ekstremitas sikap hingga memunculkan identitas mayoritas dan minoritas yang berkelindan menjadi komoditi politik.

Fenomena terakhir ini tidak pernah ditemui dalam masa sosiodemokrasi di era Bung Karno ataupun era demokrasi terbatas Orde Baru. Di dua masa itu tidak ada gugatan terhadap asal-usul (SARA) terhadap seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau pemerintahan. Oleh kalangan semacam itu demokrasi kerap berada dalam ancamannya yang nyata.

Martir Demokrasi

Di titik ini demokrasi kerap membutuhkan martir agar ia tetap hidup, bahkan semakin maju dan berkualitas. Alih-alih harus disingkirkan, sesungguhnya Basuki bisa disebut sebagai martir itu. Sebagai calon gubernur, dia tengah menguji bangsa ini, khususnya warga DKI, apakah mampu berdemokrasi sebagaimana mestinya. Basuki hari ini ialah manifestasi demokrasi itu sendiri. Narasi Basuki hari ini bukanlah soal menang atau kalah dalam pilkada. Kehadirannya menjadi semacam 'utusan zaman' yang tengah menjadi penyeimbang ekosistem bernama demokrasi. Bukan sedang menyamakannya tentu saja, tapi kehadiran dia dalam gelanggang politik mengingatkan kita pada sosok Nabi Khidir.

Kepada Musa, Khidir memberi pelajaran hidup dengan cara yang tidak normatif. Dia membocorkan perahu yang justru sedang dinaikinya bersama Musa beserta banyak orang. Tanpa banyak cakap, tiba-tiba dia membunuh seorang anak kecil. Terakhir, Khidir meminta Musa untuk memperbaiki sebuah rumah di perkampungan yang justru penduduknya tidak ramah kepada mereka berdua. Demikian juga Ahok. Dia seperti sedang memberikan pembelajaran bagi bangsa ini dengan serangkaian gugatan-gugatannya, baik secara langsung maupun tidak, terhadap praktik-praktik yang mencederai demokrasi. Praktik- praktik diskriminasi, kriminalisasi, politisasi agama dan ulama, dan seterusnya, digugat dengan keteguhan sikapnya. Dengan bacotnya yang bawel dan menjengkelkan berbagai pihak, dia banyak mengungkap kebenaran-kebenaran, sebagaimana Khidir yang menjengkelkan Musa, tetapi banyak memberinya pelajaran.

Willy Aditya, Wakil Sekjen DPP Partai NasDem

MEDIA INDONESIA, 10 Februari 2017

Siapa Pilihan Rakyat Jakarta

HIRUK pikuk kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) di 101 daerah, termasuk DKI Jakarta, baru saja usai dua hari lalu (11/2). Kini kita memasuki hari tenang yang akan disusul oleh hari pemungutan suara pada Rabu (15/2). Kita berharap sekitar 7 juta penduduk DKI Jakarta yang memiliki hak untuk memberikan suaranya akan berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (TPS). Kita juga berharap tidak ada lagi intimidasi, baik berupa ancaman langsung maupun melalui media sosial, kepada semua kelompok masyarakat yang berupa larangan ataupun paksaan untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu. Kita juga berharap Pilkada DKI Jakarta pada 2017 ini bersih dari praktik-praktik yang terkait dengan politik uang karena tanpanya rakyat Jakarta dapat benar-benar memberikan suaranya sesuai dengan hati nurani mereka.

Setiap pasangan calon (paslon), Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (1), Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat (2), dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (3), tentunya sudah memiliki konstituen pemilih masing-masing. Konstituen pemilih ini bisa atas dasar dukungan partai, kedekatan sosial-budaya, agama, ataupun rekam jejak paslon masing-masing. Namun, dari berbagai hasil survei yang dirilis, suatu kenyataan bahwa tidak ada paslon yang pemilihnya tidak akan beralih pilihan, sekecil apa pun jumlahnya. Karena itu, bukan mustahil masih akan terjadi perpindahan pilihan dari yang tadinya akan memilih paslon tertentu ke paslon lainnya. Bandul perpindahan pilihan (swing voter) ini bisa saja terjadi setelah mereka menonton televisi tiga kali perdebatan yang dikelola KPU DKI Jakarta.

Dari tampilan pada debat tersebut para calon pemilih dapat menilai secara jernih paslon mana yang paling menguasai permasalahan di DKI Jakarta, memiliki program kerja yang masuk akal unuk diimplementasikan, dan tentunya memiliki kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak yang baik untuk membangun Jakarta.

Jakarta serbakompleks

Jakarta ialah ibu kota negara karena itu memiliki persoalan yang serba kompleks. Dilihat dari penduduknya, tidak ada kelompok etnik yang dominan di DKI Jakarta. Orang Betawi pun dari dulu hingga sekarang ialah kelompok etnik yang terbuka terhadap etnik dan agama lain, bahkan telah menyerap berbagai budaya, kebiasaan, makanan dan tingkah laku dari berbagai etnik yang datang dan menetap di Jakarta. Karena itu, tidaklah elok jika ada individu paslon yang mengajak masyarakat untuk memulangkan individu paslon lain ke kampung halamannya pascapilkada, sementara ia sendiri bukan berasal dari etnik asli Betawi!

Jakarta juga bukan kota yang hanya dihuni oleh masyarakat dengan agama dan/atau etnik tertentu. Berbagai agama dan etnik tumbuh dan berkembang di Jakarta bagaikan bunga-bunga yang tumbuh subur di Taman Sari-nya

Indonesia. Mereka menyatu dalam derap kehidupan di ibu kota negara, saling menolong, saling berbagi, saling menyapa, saling bersilaturahim dalam setiap kegiatan agama dan budaya, bahkan dalam situasi suka ataupun duka. Karena itu, masa kampanye lalu yang mengotak-ngotakkan warga Jakarta atas dasar agama, khususnya pada November-Desember 2017, seakan menyebabkan kita hidup dalam situasi yang mencekam dan dalam situasi bahaya. Kita bersyukur masih banyak elite, baik elite penguasa negeri maupun nonpenguasa negeri, elite agama maupun bukan agama, yang masih berpikiran waras untuk menjaga harmoni kehidupan warga masyarakat dalam keberagaman yang memang sudah menjadi keniscayaan di Indonesia.

Jakarta juga dihuni oleh masyarakat dari berbagai golongan, dari golongan amat sangat kaya raya, menengah, sampai yang kelompok masyarakat yang kurang mampu atau bahkan tidak berpunya. Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku dan berbagai golongan agar manusia dapat saling bekerja sama, bukan untuk saling menghujat atau bahkan meniadakan satu sama lain. Membangun Jakarta tentunya harus memiliki empati kepada rakyat miskin dan juga keberanian untuk memaksa agar yang kaya memberikan lebih banyak lagi kepada yang miskin dalam bentuk apa pun, ini demi menjaga harmoni di antara berbagai kelompok masyarakat. Subsidi silang atau bentuk pajak dan retribusi apa pun tentunya perlu dilakukan agar terjadi keseimbangan pembangunan.

Jakarta merupakan kota yang dihuni pula oleh sebagian kalangan masyarakat yang belum tentu patuh kepada hukum atau aturan negara. Karena itu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus memiliki kepiawaian dalam memimpin, kapan harus menggunakan kekuasaan dalam artian hard power untuk memaksa warganya menuruti undang-undang, kapan pula harus menggunakan soft-power untuk membujuk agar warga Jakarta menuruti aturan demi kebaikan mereka sendiri.

Kepentingan elite nasional

Selama masa kampanye tampak jelas betapa berbagai partai politik dan elite nasional memiliki kepentingan di pilkada Jakarta. Megawati Soekarnoputri misalnya, sebagai putri salah seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, ia tentunya ingin agar Pancasila tetap menjadi ideologi negara dan Jakarta tetap menjadi tempat yang nyaman bagi berbagai bangsa dan masyarakat Indonesia. Mega juga memiliki kepentingan agar PDI-P dapat menjadi pemenang kembali pada pemilu serentak nasional pada 2019, baik pemilu legislatifnya maupun pemilu presiden langsungnya. Partai-partai lain pendukung paslon 2 tentunya juga berkepentingan agar tingkat keterpilihannya di Jakarta semakin baik pada Pemilu 2019.

Bagi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, bukan saja berkepentingan agar dinasti yang ia bangun dapat eksis melalui debut anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono di pilkada DKI, dan mungkin ingin mengikuti langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melangkah apik dari Wali Kota Solo menjadi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian Presiden

RI. Dari tiga calon Gubernur DKI Jakarta, hanya AHY yang tidak secara tegas dan eksplisit menyatakan tidak akan maju sebagai calon presiden pada 2019. Bagi Prabowo Subianto, pilkada DKI Jakarta juga menjadi pertaruhan politik bagi Gerindra untuk mengukuhkan sebagai partai nomor tiga atau bahkan nomor dua terkuat di Indonesia. Prabowo juga berkepentingan agar paslon nomor 3 memenangi pilkada di Jakarta agar dia dapat melangkah menjadi capres pada 2019.

Presiden Jokowi tentunya juga memiliki kepentingan politik walau tidak secara nyata mendukung pasangan Ahok-Djarot. Jokowi-Ahok berani mendobrak gaya kepemimpinan di Jakarta. Di masa pemerintahan Jokowi-Ahok pula mulai dibangun MRT dan LRT melintasi Jakarta, proyek yang sejak lama Gubernur Jakarta tidak mampu untuk melakukannya karena kurang kreatif untuk mendanainya. Di bawah Jokowi-Ahok pula persoalan banjir dan penataan daerah sepadan sungai dirapikan.

Jokowi juga menilai bahwa Ahok-Djarot ialah pasangan yang antikorupsi dan terus melanjutkan apa yang sudah dilakukan Jokowi-Ahok di Jakarta. Karena itu, Jokowi berpentingan agar berbagai proyek infrastruktur di Jakarta yang diawalinya selesai pada 2019.

Mesin politik paslon

Bila kita analisis geliat kampanye selama tiga setengah bulan lalu, tampak jelas betapa ada perbedaan gerak mesin politik tiga paslon. Paslon nomor 1 tampak jelas hanya didukung secara mati-matian oleh Partai Demokrat dan kurang tampak dukungan nyata dari PPP, PKB, dan PAN. Elite politik yang selalu tampak mengampanyekan paslon nomor 1 juga hanya Susilo Bambang Yudhoyono, sedangkan Romahurmuzy (PPP), Zulkifli Hasan (PAN), dan Muhaimin Iskandar (PKB) juga kurang tampak mengampanyekan AHY-Sylvi, termasuk dalam rapat akbar pasangan nomor 1. Mungkin saja dukungan tiga partai ini setengah hati, atau karena sulit bagi pimpinan elite PPP, PKB, dan PAN mengikuti elan dan gaya kampanye politik SBY yang sering menuduh pemerintahan Jokowi-JK dan aparatnya melakukan penyadapan atau tidak mau menjawab cuitan atau WA-nya.

Itu karena PPP, PKB, dan PAN bagian dari pemerintahan Jokowi-JK. Pasangan nomor 1 juga sangat mengandalkan kelompok profesional dalam mengelola kampanye politiknya ketimbang mesin politik partai-partai pendukungnya.

Paslon nomor 2 menunjukkan fenomena yang berbeda. *Teman Ahok* yang mengawali dukungan terhadap Ahok untuk menjadi calon petahana Gubernur DKI Jakarta ialah kelompok yang tetap mengampanyekannya dari awal sampai akhir. PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP Djan Farid tampak menyatu di Rumah Lembang dan kegiatan-kegiatan kampanye Ahok-Djarot. Sesuatu yang baru terjadi dalam sejarah pilkada di Indonesia, paslon nomor 2 ini menolak menerima bantuan dari pengusaha-pengusaha besar nasional di Jakarta yang menawarkan bantuan belasan sampai puluhan miliar rupiah. Mereka lebih mengandalkan sumbangan sukarela rakyat yang

datang ke Rumah Lembang atau kegiatan lain. Mereka juga bukan hanya mengandalkan mesin-mesin partai, tetapi juga kalangan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan antargolongan serta kalangan artis yang dimotori oleh Sys NS yang dulu menjadi salah seorang pendiri Partai Demokrat.

Paslon 3 bukan hanya didukung secara kuat oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan juga Presiden/Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, tetapi juga mesin-mesin Partai Gerindra dan PKS. Dua partai ini amat solid karena mereka ialah dua partai tersisa di dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang dulu mendukung Prabowo-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Jajaran resmi dan tidak resmi dua partai ini, termasuk PKS Piyungan, ialah kelompok-kelompok yang secara intens mengampanyekan pasangan Anies-Sandi.

Satu hal yang menarik dari hasil survei, turunnya elektabilitas AHY-Sylvi memiliki korelasi positif dengan naiknya elektabilitas pasangan Anies-Sandi. Tampaknya mereka menggantungkan pemilih pada konstituen yang sama, yakni kalangan Islam. Karena itu, tidaklah mengherankan jika ketika Anies-Sandi mengampanyekan coblos pecinya, tagline AHY-Sylvi pun kini menekankan coblos jilbabnya.

Sesuai hati nurani

Pilkada 15 Februari di Jakarta akan menentukan apakah Jakarta ke depan akan berubah secara sosiokultural dan juga kesinambungan pembangunannya. Berbagai agitasi, intimidasi, dan juga kampanye telah berlangsung selama masa kampanye. Kini warga Jakarta dapat mengendapkan emosi dan nalar pikiran mereka mengenai siapa yang paling pas memimpin Jakarta dalam lima tahun ke depan. Hanya dengan menenangkan pikiran dan keteguhan hati, warga Jakarta dapat memilih secara tepat paslon mana yang akan mereka pilih. Selamat memilih.

Ikrar Nusa Bhakti, Profesor Riset LIPI

MEDIA INDONESIA, 13 Februari 2017

Siapa yang akan Menang di DKI Jakarta?

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) di DKI Jakarta yang merupakan bagian dari pilkada serentak di 101 daerah di Indonesia baru saja usai. Dari hasil hitung cepat berbagai penyelenggaraan survei di Jakarta, hasilnya hampir sama, yaitu berkisar antara 17% untuk pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, 43% untuk pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat, dan 40% untuk pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Ini berarti pilkada di DKI Jakarta akan masuk ke putaran kedua yang akan diselenggarakan pada 19 April 2017.

Pilkada putaran kedua di DKI Jakarta tentunya akan seru karena tidak saja *head-to-head* yang menghadapkan antara Ahok-Djarot dan Anies-Sandi, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial-budaya, politik, ekonomi, dan keamanan bagi Jakarta dalam lima tahun ke depan. Pertanyaannya kemudian ialah, pertama, bagaimana dinamika politik di putaran kedua pilkada Jakarta? Kedua, akankah terjadi pengalihan dukungan dari konstituen koalisi partai, khususnya pendukung pasangan nomor 1 yang kalah kepada dua paslon yang masuk putaran kedua? Ke mana suara pendukung Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN akan disalurkan? Ketiga, akankah pendekatan primordial dan SARA akan terus dimainkan di putaran kedua ini? Terakhir, tapi penting, keempat, siapa yang akan muncul sebagai pemenang pada Pilkada DKI 2017 ini?

Hasil putaran pertama yang menarik

Hasil pilkada di Jakarta putaran pertama sungguh menarik untuk dibahas. Paslon nomor 1, yang mengawali debutnya dengan cukup baik pada hasil survei pilkada Jakarta, ternyata mengalami perununan tajam sejak debat publik pertama sampai ketiga. Paslon petahana nomor 2, yang awalnya tertatih-tatih merangkak pada perhitungan survei, akhirnya menjadi pemenang pertama yang memperoleh suara tertinggi, yakni sekitar 43%. Paslon nomor 3, yang awalnya dipandang sebagai underdog, ternyata bisa menguras suara dukungan dari paslon 1 dan menjadi pemenang kedua pada putaran pertama dengan angka yang cukup meyakinkan, 40%.

Menurunnya perolehan suara paslon 1 sebenarnya disebabkan oleh banyak hal. Pertama, hiruk pikuk politik yang disebabkan berbagai cuitan politik Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang juga ayah dari Agus Harimurti Yudhoyono, merupakan salah satu penyebab menurunnya tingkat keterpilihan paslon 1. Cuitan-cuitan tersebut menimbulkan kesan politik negatif, seakan AHY ialah seorang anak yang harus dilin-dungi dan disokong terus-menerus oleh ayahnya yang kebetulan pernah menjadi presiden RI selama 10 tahun.

Kedua, tidak seperti paslon nomor 3 yang jelas-jelas mengambil pangsa pasar kelompok muslim, paslon nomor 1 agak malu-malu dan baru di masa-masa akhir kampanye menggunakan jargon keislaman seperti pergi umrah dan tagline#Coblos Jilbabnya. Ketiga, dalam tiga kali debat publik, tampak jelas

betapa AHY lebih menonjolkan hafalan ketimbang lepas bicara dengan kreativitas politiknya. Keempat, paslon nomor 1 juga kurang didukung data akurat sehingga Sylviana Murni membuat kesalahan dalam mengkritik pasangan petahana yang kebetulan kepala daerah/wakil kepala daerah dengan Sylvi menjadi salah seorang deputinya.

Pasangan petahana amat terpuruk di awal survei akibat politisasi agama yang dilakukan lawan-lawan politik Ahok akibat apa yang diungkapkannya di Kepulauan Seribu yang menyebabkannya berhadapan dengan pe-ngadilan. Namun, hal yang menarik, paslon nomor 2 ini ternyata menang di pilkada putaran 1 di daerah basis Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, di TPS yang basis Forum Betawi Rempuk (FBR) dan di Kepulauan Seribu. Kekuatan paslon nomor 2 bukan saja karena didukung partai nasionalis besar PDI-P dan Golkar serta NasDem dan Hanura, melainkan juga oleh kalangan menengah atas dan bawah yang mengutamakan kebhinneka-tunggalikaan. Paslon nomor 3 bukan saja didukung oleh PKS dan Gerindra yang solid, tetapi juga oleh kepiawaian Anies Baswedan dalam memainkan isu agama dan pendekatannya secara fisik dengan FPI yang dulu dikecamnya, dan kalangan masjid tempat anak-anak muda muslim berkumpul.

Dinamika politik yang menarik

Dinamika politik hari ini sampai 19 April akan sangat menarik. Apakah akan terjadi lagi salah ucap Ahok yang bisa 'digoreng' seakan Ahok anti-Islam. Pendekatan Islam dan non-Islam merupakan isu utama dan terutama pada pilkada DKI Jakarta sehingga membelah masyarakat Jakarta antara mereka yang mendukung kebinekaan dan pendukung paslon muslim. Belajar dari pengalaman pilkada di DKI Jakarta pada 2007 dan 2012, isu itu juga muncul walau tak sekuat pada Pilkada 2017 ini.

Pada dua pilkada sebelumnya, kampanye dengan isu Islam ternyata kurang berpengaruh pada pilkada Jakarta. Namun, kali ini ada isu lain yang juga mengemuka, yakni isu ras dan golongan. Ahok keturunan Tionghoa yang sekaligus mewakili golongan menengah atas. Isu kedua ini tampaknya lebih kuat ketimbang soal agama.

Kita akan menyaksikan ke mana dukungan partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN. Demokrat ialah partai nasionalis religius yang multiagama. Terlepas dari cuitan SBY yang keras terhadap pemerintah yang dituduh mendukung paslon petahana, para pendukung Demokrat tentunya akan terbelah antara akan mendukung paslon 2 atau paslon 3. PPP, PKB, dan PAN akan penuh kebimbangan. Di satu pihak mereka ialah partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK, di lain pihak konstituen mereka sebagian besar ialah kalangan Islam. Di sini akan kita lihat apakah mereka akan segaris dengan PKS dan FPI yang berarti mendukung paslon 3, atau lebih mengutamakan keislaman mereka yang moderat yang berarti mendukung paslon 2. Seandainya isu SARA akan tetap dimainkan pada putaran kedua pilkada Jakarta, ini akan memberikan keuntungan bagi paslon nomor dua.

Mengapa demikian? Jawabnya ialah, pertama, Jakarta ialah ibu kota negara, kota metropolitan, dan kota internasional. Warga Jakarta, seperti pada Pilkada Jakarta 2007 dan 2012, tentunya ingin menjaga ketenangan dan kenyamanan hidup. Mereka yang tadinya menjadi pendukung paslon 1 atau 3 yang tidak kuat warna keislamannya, tentunya akan berpikir dua kali untuk memilih paslon 3 yang didukung kuat oleh FPI.

Ini bukan persoalan ketakutan pada Islam, melainkan masih khawatir pada politik Islam macam apa yang akan dikembangkan di Jakarta ke depan. Faktor FPI bukan lagi sebagai aset, melainkan liabilitas, terbukti dengan menangnya paslon nomor 2 di basis kekuatan FPI di Petamburan. Konstituen tentunya akan berpikir bahwa FPI yang sudah menjadi salah satu pendukung kuat paslon 3, akan meminta bagian kue kekuasaan karena mereka ikut andil besar atau memiliki saham politik bagi kemenangan Anies-Sandi, terlepas persepsi FPI belum tentu benar.

Siapa yang akan menang?

Jika aspek kebinekaan lebih menonjol ketimbang faktor agama, pasangan petahana akan memenangi pilkada Jakarta putaran 2. PDI-P, Golkar, NasDem, Hanura, dan PPP versi Djan Farid tentunya akan kerja keras unuk memenangkan Ahok-Djarot. Kelompok anak-anak muda, kelompok miskin kota dan kelompok menengah dan atas, tentunya akan semakin mendukung paslon petahana karena sudah terbukti berhasil mengubah Jakarta menjadi lebih nyaman bagi semua warganya dari golongan dan agama apa pun.

Mereka yang tidak terdaftar atau tidak bisa memberikan suaranya pada pilkada hari ini, tentunya akan berusaha untuk dapat memberikan suaranya pada 19 April nanti. Dua puluh lima persen warga yang tidak memberikan suaranya hari ini tentunya akan berupaya keras untuk tidak golput pada 19 April karena ini akan menentukan masa depan mereka di Jakarta. Jika aspek keislaman yang lebih mengemuka, pasangan Anies-Sandi yang akan menang. PKS tentunya akan berjuang keras untuk memenangkan paslon 3 karena PKS pernah gagal pada Pilkada Jakarta 2007 khususnya. Gerindra juga akan bertempur keras untuk membalas kebengalan Ahok yang dulu kader partainya. Petanyaannya ialah sudah siapkah warga Jakarta untuk memiliki pemimpin yang menonjolkan agama tertentu? Pertanyaan ini baru akan (terjawab?) pada 19 April mendatang.

Ikrar Nusa Bhakti, Profesor Riset LIPI

MEDIA INDONESIA, 16 Februari 2017

Pilkada DKI dan Politik Sentimentil

PILKADA DKI Jakarta telah usai digelar dan dipastikan akan berlangsung dua putaran, karena dari tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (Paslon) yang bertanding tidak satu pun dapat memperoleh suara di atas 50 persen. Hasil perhitungan cepat (quick count) sejumlah lembaga survei menempatkan Paslon Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga sebagai pasangan yang memperoleh suara berimbang dengan kisaran perolehan suara antara 39-43 persen. Karena itu kedua Paslon ini akan bertanding lagi pada putaran kedua. Kendati masih harus menunggu hasil rekapitulasi resmi KPU DKI Jakarta pada tanggal 4 Maret 2016 mendatang, namun berdasarkan pengalaman Pilkada selama ini, hasil quick count tak berbeda jauh dari hasil rekapitulasi resmi KPU. Pilkada DKI ini berbeda dari Pilkada di tempat lain, karena merupakan daerah khusus yang diatur dengan mekanisme tersendiri, bersama dengan Provinsi Aceh dan Papua.

Pilkada di tiga provinsi ini mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 36 ayat 2, yang menyatakan jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh data lebih dari 50 persen, maka diadakan putaran kedua. Pada putaran kedua, diikuti oleh paslon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama. PKPU No 6/2016 itu telah mengatur secara rigid tahapan penyelenggaraan putaran kedua, paling tidak ada 4 tahapan yang akan dijalani oleh paslon. (a). Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan; (b).

Kampanye dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program pasangan calon; (c). Pemungutan dan penghitungan suara; dan (d). Rekapitulasi hasil perolehan suara. Jika tak ada persoalan yang berarti, maka Pilkada serentak DKI dan juga daerah lain akan berlangsung dua putaran pada tanggal 19 April 2017. Hasil quick count Pilkada DKI kali ini cukup mengejutkan karena telah mengeliminasi Agus-Silvy untuk bertarung di putaran kedua, munculnya Anies-Sandiaga dan menstabilkan posisi Ahok-Djarot. Hasil survei selama ini selalu menempatkan Agus-Silvy diposisi kedua, dan Anies-Sandiaga di posisi buncit, serta Ahok-Djarot diposisi paling atas.

Fenomena ini dapat terjadi karena pemilih DKI adalah pemilih yang relatif rasional. Preferensi pilihan pemilih DKI lebih didasarkan pada pengalaman memimpin, kecakapan berargumentasi dalam debat publik, hasil karya nyata calon dan yang lebih menarik adalah antibayang-bayang pemimpin sebelumnya. Fenomena ini menjelaskan bahwa, Agus-Silvi bukan pilihan ideal publik DKI, selain tidak punya pengalaman memimpin, tidak cukup cakap berdebat, dan relatif tidak punya rekam jejak karya nyata dan yang pasti diduga kuat berada dalam bayang-bayang ayahnya, mantan Presiden SBY.

Faktor lain yang menyebabkan tereliminasnya Agus-Silvy dari pertarungan kali ini, juga karena sejumlah pernyataan dan sikap politik yang ditunjukkan SBY dalam beberapa pekan belakangan ini baik melalui media sosial

maupun sejumlah konferensi pers telah memantik tidak simpatinya publik pada Agus-Silvy. Lebih dari itu, isu kontroversi perseteruan antara Antasri Azhar (mantan Ketua KPK) dengan SBY terkait dengan dugaan kriminalisasi yang dituduhkan Antasari kepada SBY telah turut menyumbang tereliminasinya Agus-Silvi.

Pilpres 2019

Kini yang tersisa untuk bertarung di putaran kedua adalah pasangan Ahok-Djarot Vs Anies-Sandiaga, pertarungan antar keduanya dalam Pilkada DKI putaran kedua akan jauh lebih menarik untuk dicermati karena mencerminkan cita rasa dan miniatur pemilihan presiden (Pilpres 2019). Pilkada DKI putaran kedua merupakan ajang yang sangat bergengsi karena berada di pusaran kekuasaan politik, pusat selebriti media dan pusat kegiatan uang dan ekonomi. Karena itu siapa pun yang bertarung dalam Pilkada DKI telah menanam saham popularitas secara nasional. Itulah sebabnya Jakarta selalu diidentikkan dengan Indonesia. Siapa yang dapat "*menaklukkan*" Jakarta, maka dipastikan akan dapat "*menaklukkan*" Indonesia.

Dalam konteks politik siapa pun calon yang akan menang dalam Pilkada DKI sulit dibantah tak akan melaju ke puncak pencalonan pemilihan presiden 2019 mendatang. Realitas ini telah dialami oleh Jokowi ketika ia mampu "*menaklukkan*" pemilih Jakarta dan menang dalam Pilkada DKI tahun 2012 lalu, maka kemudian Jokowi berhasil merebut kursi presiden pada Pilpres 2014 lalu. Sikap politik yang mengedepankan akal sehat seharusnya menjadi tumpuan utama dalam memilih bukan berdasarkan pada dua politik sentimentil, yakni ketokohan dan agama. Karena kedua sentimentil ini sulit dipisahkan dari tradisi panggung politik di Indonesia.

Itulah sebabnya kedua sentimentil itu harus dihindari dan ditempatkan dalam konteks kewajaran bukan keluarbiasaan sehingga tidak berpotensi memecah belah kohesifitas sosial.

Agus Riewanto, Pengajar Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

SUARA MERDEKA, 18 Februari 2017

Konservatisme dan Pilkada

Propaganda adalah senjata ampuh dalam setiap pemilihan politik. Lebih ampuh lagi jika propaganda tersebut berpijak pada diktum-diktum konservatisme. Memang pada awalnya propaganda konservatif sering dipandang sebelah mata. Berpolitik dengan menjual identitas seperti barang antik di kurun kemajemukan dewasa ini. Saat kita sudah berbicara warga negara dunia, rasisme bukan sesuatu yang menjanjikan lagi secara politik. Namun, apa daya, perebutan kekuasaan tetap bersandar pada politik identitas yang pekat. Kemenangan Trump seperti lonceng yang menyadarkan kelompok konservatif di seantero planet, khususnya kelompok agama.

Politisasi ketakutan

Konservatisme pada awalnya adalah secarik proposal filsafat politik. Di tengah deru perubahan sosial yang bergegas, tradisi perlu mendapat pembelaan filosofis. Perubahan yang serta-merta cenderung tak terkendali dan mematahkan sendi-sendi tradisi. Di sini filsuf konservatif awal bernama Edmund Burke menyatakan betapa tradisi, keluarga, dan institusi agama tak boleh dirobohkan atas nama revolusi sosial. Perubahan, pun jika ada, harus dibiarkan berjalan secara organik, bukan lewat rekayasa sosial.

Proposal filsafat itu lambat laun jadi politik praktis. Dia bukan lagi abstraksi filosofis, melainkan ideologi yang operasional. Berbagai kelompok politik pun bermunculan dengan merek dagang "konservatisme". Mereka menjual romantisisme tentang tradisi, keluarga, dan agama. Saat kelompok liberal mempropagandakan kebebasan, konservatif menekankan kekerabatan. Kekerabatan yang, sayangnya, sering kali ditafsirkan secara ketat dan sektarian. Ujung-ujungnya adalah supremasi ras dan bahkan agama.

Konservatisme pun bertemu dengan agama. Pikiran bertemu keyakinan. Kombinasi keduanya menghasilkan kekuatan politik lumayan dahsyat. Sebab, pada dasarnya irisan keduanya cukup tebal. Keduanya bersandar pada politik identitas. Sama-sama memuliakan tradisi. Keduanya menolak berbagai kebaruan sosial yang dianggap kebablasan dan mengancam kemapanan. Sama-sama meromantisasi masa lalu. Sejarah bergerak menurun. Keduanya beranggapan bahwa kita perlu mengembalikan kejayaan masa lalu untuk menyembuhkan masa kini yang sesat.

Konservatisme agama pun menjadi komoditas baru dalam politik praktis. Namun, jangan kira ini hanya berlaku di negara berkembang dengan populasi kaum tak terdidik cukup besar. Negara maju pun tak lepas dari jerat konservatisme agama dalam politik hariannya. Bush Junior saat mencalonkan diri sebagai presiden di Amerika Serikat kerap mengutip ayat untuk menjaring dukungan dari kelompok agama. Ia juga mengusung prinsip kesucian hidup yang bertolak dari teologi guna menentang aborsi. Subkultur gay dan lesbian dianggap sebagai anomali sosial yang membahayakan pakem teologis heteroseksualitas.

Politik yang bersandar pada konservatisme agama terbukti masih cukup menjanjikan. Sebab, dia niscaya berbuah dukungan publik. Mengapa demikian? Sebab, politik jenis ini sejatinya melakukan politisasi ketakutan. Orangtua yang takut anaknya menjalani seks bebas mendukung program razia kondom dan kos-kosan.

Umat yang khawatir terjadi pemurtadan mendukung pembatasan pembangunan tempat ibadah agama lain. Komunisme menghantui iman generasi muda harapan bangsa. Oleh karena itu, program politik anti komunisme harus didukung habis-habisan.

Politisasi ketakutan adalah kernel dari konservatisme agama. Berbicara agama selalu berujung pada kosakata kemurnian. Kemurnian harus diproteksi dengan segala cara. Ancaman terhadap kemurnian tersebut perlu terus diwaspadai agar tidak terjaga dari tidur latennya. Politik konservatif pun niscaya berbicara mengenai aturan, batasan, prosedur yang melindungi kemurnian dari kontaminasi liyan.

Politik konservatif bergaung di setiap momen elektoral. Psikologi publik yang senantiasa tercekam oleh agresi liyan dimanfaatkan secara optimal. Singkatnya, pilih pemimpin yang tidak akan membiarkan ideologi sesat berserakan di ruang publik. Pilih pemimpin yang seiman sehingga tidak akan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan keyakinan. Pilih pemimpin yang akan melindungi iman dari setiap godaan yang mungkin. Akhirnya, pilih pemimpin yang akan menghapus semua godaan lewat aturan dan kebijakan.

Pilkada

Konservatisme agama mendapatkan momen elektoralnya dalam Pilkada Ibu Kota saat ini. Saat politik meritokrasi tidak ampuh mendulang suara, sentimen agama pun dimainkan habis-habisan. Sejak dentang pertama pilkada, isu agama sudah dimainkan sedemikian rupa. Propaganda terus diderukan untuk menggalang suara pemilih. Demo, selebaran, ceramah. Semua metode yang mungkin dipakai untuk memainkan sentimen keagamaan di kalangan kelas menengah.

Pertanyaannya, apakah konservatisme agama memiliki kekuatan politik untuk menggalang kelas menengah terdidik di Ibu Kota? Kelas menengah terdidik adalah kelas yang mengutamakan akal sehat ketimbang afiliasi-afiliasi emosional. Namun, banyak yang lupa bahwa karakter kelas menengah adalah senantiasa mencari distingsi alias perbedaan.

Saat distingsi sosial-ekonomi semakin memudar, agama menjadi distingsi baru yang menarik bagi kelas menengah. Maka, pengajian-pengajian di hotel berbintang pun menjamur. Sosialita menjadikan agama sebagai identitas dalam pergaulan elite sehari-hari.

Di sini konservatisme agama menjadi sangat efektif saat diturunkan menjadi strategi politik. Kelas menengah yang haus identitas dengan mudah dimainkan sentimen keagamaannya. Apalagi globalisasi menghasilkan efek

balik, yakni menguatnya suaka-suaka identitas. Saat semuanya menjadi cair dan mungkin, batasan, larangan, isolasi justru semakin menguat. Saya teringat bagaimana salah satu calon gubernur dalam Pilkada DKI menggugat lemahnya calon gubernur petahana dalam menertibkan salah satu tempat hiburan malam di Ibu Kota.

Putaran pertama pilkada membuktikan konservatisme agama cukup efektif mendulang suara. Survei-survei awal menunjukkan betapa elektabilitas pasangan petahana jauh di atas elektabilitas dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur lain. Namun, begitu sentimen agama dimainkan, peta kekuatan pun berubah.

Suara kelas menengah pun sebagian beralih ke kedua pasangan calon lainnya. Namun, "kecelakaan politik" yang dialami pasangan calon nomor satu membuatnya gagal memanfaatkan konservatisme agama secara maksimal. Kelas menengah sepertinya tidak sekadar menimbang agama sebagai simbol, tetapi juga perilaku sebagai manifestasi keyakinan. Tuduhan korupsi terhadap calon wakil gubernur dari pasangan nomor satu terbukti mampu menurunkan elektabilitas secara signifikan.

Putaran kedua sudah di depan mata. Sentimen agama saya kira masih akan dimainkan untuk melawan politik meritokrasi pasangan petahana. Sebab, dari segi program dan kompetensi manajerial publik, pasangan petahana sulit dilumpuhkan. Pasangan nomor tiga akan terus menjual kebijakan yang "agamis" guna membedakan diri dengan pasangan petahana. Kelas menengah terdidik masih akan menjadi "rebutan elektoral" bagi kedua pasangan calon. Di sini pertaruhannya. Apakah kelas menengah mampu direbut suaranya lewat politik konservatisme agama? Apakah politisasi ketakutan mampu mendulang suara di kalangan kelas menengah?

Kita belum bisa meramalkan. Yang pasti putaran kedua akan berjalan ketat. Suara pasangan calon nomor satu belum tentu beralih total ke pasangan calon nomor tiga. Politik konservatisme agama bisa jadi kontraproduktif juga. Kelas menengah Ibu Kota cenderung menghindari konflik yang berdampak pada kemapanan ekonomi.

Politik konservatisme agama cenderung agresif dan berpeluang melahirkan konflik horizontal yang berbahaya. Ideologi sektarianisme yang tertutup bisa jadi pemicu gesekan sosial yang panas dan berlarut-larut. Apa pun, kelas menengah menjadi kunci kemenangan bagi kedua pasangan calon. Pertarungan merebut kelas menengah akan membuktikan: apakah politik meritokrasi atau konservatisme agama yang menjadi pemenangnya. Kita lihat saja nanti.

Donny Gahral Adian, Dosen Filsafat Universitas Indonesia

KOMPAS, 20 Februari 2017

Keniscayaan Pemberhentian Gubernur Ahok

Masa cuti kampanye, yang memiliki konsekuensi status nonaktif kepala daerah yang dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, telah berakhir pada 11 Februari 2017. Maka, Ahok sudah dapat aktif kembali sebagai gubernur pada 12 Februari 2017. Namun Ahok kini telah menyandang status sebagai terdakwa dalam kasus hukum pidana penodaan agama.

Status terdakwa ini membawa konsekuensi hukum pemberhentian Ahok dari jabatan Gubernur DKI. Ini yang harus ditegakkan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tanggung jawab konstitusional pemberhentian gubernur ini merupakan suatu *conditio sine qua non*, kondisi yang mengharuskan Presiden mau tidak mau memberhentikan Ahok.

Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa "*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah-belah Negara Kesatuan Republik Indonesia*."

Berkenaan dengan hal tersebut, timbul sejumlah pertanyaan hukum. Pertama, apakah Presiden dan Menteri Dalam Negeri dapat memperpanjang masa cuti Ahok sebagai gubernur nonaktif? Jawabnya tidak, karena empat hal. *Pertama*, ketentuan masa cuti kampanye telah berakhir. *Kedua*, tidak ada lagi istilah perpanjangan masa cuti karena kampanye telah berakhir. *Ketiga*, status nonaktif dalam alasan perpanjangan cuti tidak dapat dibenarkan secara hukum. *Keempat*, status nonaktif dapat diberlakukan kembali, tapi harus dengan dasar hukum yang berbeda, yaitu Pasal 83 (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah tentang pemberhentian kepala daerah dengan status terdakwa.

Kedua, apakah Presiden dan Menteri harus menunggu tuntutan jaksa atau usul dari DPRD untuk menonaktifkan Ahok? Pasal 83 membebankan kewajiban untuk memberhentikan itu kepada Presiden, bukan kepada Menteri. Pemberhentian ini merupakan pemberhentian sementara, bukan tetap. Pemberhentian tetap oleh Presiden hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Pemberhentian sementara ini tidak perlu menunggu usul dari DPRD DKI Jakarta.

Pemberhentian ini juga tidak perlu menunggu pemberitahuan atau tuntutan dari Jaksa Agung atau jaksa penuntut umum. Pasal 83 tidak menyebut dan tidak mensyaratkan adanya "tuntutan jaksa penuntut umum", melainkan "*kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun*". Apakah jaksa akan menuntut di bawah atau di atas 5 tahun adalah persoalan lain yang sama sekali tidak menjadi syarat dari Pasal 83.

Ketiga, apakah Presiden boleh mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan alasan subyektif tertentu? Peraturan itu dapat dikeluarkan karena adanya kegentingan memaksa. Dalam konteks kasus ini, sama sekali tidak ada keadaan yang dapat dinilai secara subyektif oleh Presiden sebagai suatu keadaan darurat.

Keempat, apakah penonaktifan kepala daerah tersebut merupakan tindakan maladministrasi? Ombudsman memiliki kewajiban hukum dan moral untuk mengingatkan lembaga-lembaga negara untuk menegakkan hukum secara tegas dan nondiskriminatif. Beberapa kepala daerah yang telah terkena ketentuan hukum pemberhentian tersebut merupakan preseden yang harus dilaksanakan oleh lembaga negara terkait. Penafsiran dan perlakuan yang berbeda atas kasus ini adalah tindakan diskriminasi hukum yang, dalam perspektif Ombudsman, adalah tindak maladministrasi.

Kelima, adakah implikasi hukum serius apabila Presiden tidak menonaktifkan Ahok? Apabila Presiden tidak mematuhi hukum atau memberlakukan hukum secara berbeda dalam suatu kasus, maka hal ini merupakan pelanggaran sumpah jabatan dan akan berimplikasi yuridis serius dalam perspektif hukum tata negara.

Ringkasnya, apabila Presiden Jokowi tidak memberhentikan Ahok sebagai Gubernur DKI, hanya ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, proses pemakzulan akan bergulir sebagai proses hukum tata negara. Langkah ini bergantung pada konstelasi politik di DPR. Kedua, terbukanya alasan politik untuk terjadinya gerakan sosial yang menuntut Presiden untuk mundur dari jabatan atau softly movement agar Presiden menegakkan hukum secara adil.

Kedua kemungkinan itu akan selalu memunculkan instabilitas politik dan memicu munculnya kerusuhan sosial yang luas. Situasi ini rentan terhadap intervensi kekuatan asing yang memiliki kepentingan ideologi dan kapital dalam menguasai dan mengkooptasi kedaulatan NKRI. Hal inilah yang harus kita cegah melalui proses hukum yang adil dan beradab.

Hendra Nurtjahjo, Anggota Ombudsman Republik Indonesia 2011-2016

TEMPO.CO, 20 Februari 2017

Kontroversi Pengaktifan Kembali Gubernur Jakarta

Sesuai dengan amanat UUD 1945, Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi penegakan hukum yang adil di mana setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Segala persoalan yang terjadi harus diselesaikan secara hukum dan setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Proses demokrasi yang terjadi di Indonesia semenjak era reformasi begitu dinamis. Dahulu banyak orang yang tadinya apatis terhadap keberlangsungan negara. Bisa jadi karena sebelumnya, kebebasan berekspresi sempat dibungkam.

Namun, saat ini seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dalam demokrasi dengan menggunakan elemen-elemen yang dimungkinkan dalam sistem demokrasi. Tahun 2017 ini pilkada diadakan serentak di Indonesia. Setiap warga negara berhak untuk memilih calon kepala daerah yang mampu membangun sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.

Dapat kita rasakan sendiri, banyak hal yang terjadi menjelang hari- H pilkada DKI Jakarta yang menarik perhatian rakyat Indonesia. Hampir seluruh lapisan masyarakat begitu peduli terhadap jalannya pemerintahan. Adapun yang menjadi faktor utama bagi warga Jakarta pada umumnya adalah mengenai program kerja calon gubernur dan wakil gubernur DKI.

Warga Jakarta merasakan sendiri perubahan baik yang terjadi di Jakarta beberapa tahun belakangan sehingga standar penilaian terhadap cagub dan cawagub menjadi lebih tinggi pula. Yang lebih hebat, janji-janji politik tidaklah menjadi penilaian utama warga Jakarta, melainkan program pembangunan yang benar-benar dilaksanakan. Walaupun begitu, fokus debat publik kemarin ternyata para paslon kurang bermutu dan agak jauh dari harapan.

Padahal, persoalan yang dihadapi DKI Jakarta sangatlah kompleks. Warga Jakarta mengharapkan perdebatan yang sengit dalam isu lingkungan hidup, transportasi publik, pengangguran, reformasi birokrasi, narkoba, dan tingkat kejahatan, serta isu disabilitas, dan isu-isu lainnya.

Gejolak Politik

Sistem meritokrasi adalah sistem politik yang paling tepat dilaksanakan untuk memberikan penghargaan lebih bagi mereka yang berprestasi. Hal ini tentunya untuk menghindari sistem politik dinasti yang hanya memberikan kesempatan kepada keluarga untuk kembali melanjutkan kekuasaan. Namun, perlu diperhatikan mengenai etika berpolitik di Indonesia yang dikenal dengan adat ketimurannya.

Hal ini untuk memberikan nilai teladan kepada generasi muda yang mempunyai keinginan untuk menjadi pemimpin. Tidak bisa dimungkiri terjadi ingar bingar di Ibu Kota semenjak Basuki Tjahaja Purnama (BTP) diduga melakukan penodaan agama di Pulau Seribu akhir tahun 2016 lalu. Mulai dari beberapa kali unjuk rasa hingga ketegangan yang terjadi dalam proses pemeriksaan saksi dari JPU, yaitu Ketua Umum MUI Kiai Maruf

Amin di persidangan penodaan agama beberapa waktu lalu. Setelah cuti masa kampanye pilkada selesai, gubernur nonaktif DKI seharusnya kembali ke balai kota untuk melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang kepala daerah.

Namun, karena status baru yang disandangnya sebagai terdakwa, Mendagri harusnya mendorong Presiden Jokowi untuk segera memberhentikan sementara BTP setelah cuti kampanye pilkada selesai. Hal ini sesuai dengan aturan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana pemberhentian sementara gubernur dilakukan oleh presiden. Hal ini tentu juga demi menghindari cacat hukum dan tidak berpotensi melanggar undang-undang.

Presiden Jokowi tidak boleh ragu dalam mengambil keputusan dan sudah seharusnya Presiden Jokowi segera mengambil tindakan yang nyata agar tidak terjadi gejolak lagi ke depannya. Setelah gubernur diberhentikan sementara, nantinya wakil gubernur mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang gubernur yang berhalangan sementara. Jika Presiden Jokowi tidak mengambil langkah tersebut, hal ini akan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Karena telah terjadi begitu banyak persoalan yang muncul bagaikan benang ruwet yang harus segera diurai. Asas praduga tak bersalah wajib diutamakan, namun pencegahan persoalan menjadi meluas dan berlarut-larut tentunya lebih baik. Dan yang paling penting, hal ini dilakukan untuk menjaga suasana Ibu Kota agar tetap kondusif.

Bahkan, menurut berita yang beredar di media massa, beberapa fraksi DPRD DKI Jakarta enggan untuk melaksanakan rapat kerja dengan SKPD Pemprov DKI. Hal ini dilakukan karena memang ada potensi penyimpangan dengan kembalinya seorang terdakwa menjabat sebagai gubernur setelah selesai cuti kampanye pilkada kemarin. Tentu ini akan mengganggu efektivitas kinerja banyak pihak.

Perlu diingat, musuh terberat bangsa Indonesia saat ini adalah semakin banyak elemen masyarakat yang seolah menginginkan retaknya persatuan dan kesatuan yang telah dipupuk berpuluh-puluh tahun oleh para pendiri bangsa ini (the founding fathers). Tentunya hal tersebut harus dihindari. Karena untuk menjadi sebuah bangsa yang besar seperti saat ini memerlukan perjuangan berat, beserta keringat dan darah seluruh rakyat Indonesia pada masa lampau. Terlebih janganlah rakyat mau dialihkan perhatiannya dari fokus paling utama negara ini, yaitu pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Frans H Winarta, Guru Besar Universitas Pelita Harapan;

KORAN SINDO, 23 Februari 2017

Menggugat Keabsahan Gubernur Terdakwa

Pilkada DKI Jakarta 15 Februari 2017 tengah memasuki babak rekapitulasi suara dengan hasil yang telah dipahami publik akan ada putaran kedua. Rakyat mengikuti penuh antusias dan terus bertekad mengawal sampai tuntas, termasuk proses persidangan yang sedang dilakoni. Suasana pertunjukan demokrasi di DKI menghadirkan degup sekaligus mendebarkan dada sebagian khalayak. Fenomena hadirnya gubernur terdakwa merupakan potret manajemen politik yang secara yuridis melahirkan tragedi "penodaan" negara hukum Indonesia.

Pemegang otoritas negara tampil tanpa ragu menggiring negara hukum (*rechtsstaat*) menjelma menjadi negara kekuasaan (*machtsstaat*). Polemik terus-menerus diramu dengan aroma yang menyesakkan rongga-rongga sosial. Norma hukum penonaktifan gubernur berstatus terdakwa sudah sangat jelas, tanpa perlu tafsir hukum layaknya perkuliahan.

Pasal 83 ayat (1) UU Pemda (UU Nomor 23/2014) menyatakan: Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberhentian sementara gubernur terdakwa dilakukan berdasarkan register perkara di pengadilan seperti diatur Pasal 83 ayat (2) UU Pemda. Pihak yang diberi kewenangan untuk memberhentikan gubernur terdakwa adalah presiden sebagaimana dinarasikan Pasal 83 ayat (3) UU Pemda: Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilakukan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Pembaca mengetahui bahwa PN Jakarta Utara mendapatkan pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 1 Desember 2016 dengan nomor perkara: 1537/PidB/2016/PNJkt.Utr atas nama Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sejak saat itu niscaya tersedia alas hukum bagi presiden untuk memberhentikan gubernur terdakwa. Pemberhentian ini merupakan kewajiban hukum dalam menjalankan ketentuan undang-undang senapas sumpah presiden.

Menurut Pasal 9 UUD 1945: Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguhsungguh di hadapan MPR atau DPR sebagai berikut: Sumpah presiden (wakil presiden): "Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-

Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Bertindak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya ternyata menjadi norma utama Sumpah Presiden dalam menjalankan kekuasaan negara. Menjalankan seluruh regulasi pun merupakan pesan konstitusi yang harus dilaksanakan oleh presiden. Apabila mendagri memberikan sinyal bahwa pemberhentian sementara menunggu tuntutan jaksa merupakan ungkapan yang sangat protektif terhadap gubernur terdakwa.

Bukankah kejaksaan telah menggunakan Pasal 156 dan 156a KUHP perkara penistaan agama? Tindakan bermain tafsir terhadap Pasal 83 UU Pemda dikaitkan dengan dakwaan penistaan agama menimbulkan penilaian sikap "*memunggungi*" konstitusi. Suatu tindakan yang terpotret melecehkan wibawa negara hukum. Perlakuan ini tidak hanya menyangkut teks hukum dalam UU Pemda, juga menyentuh etika kehidupan berbangsa yang ditetapkan Tap MPR NoVI/MPR/2001.

Pemimpin yang menunjung tinggi etika dan moralitas dalam pemerintahan pastilah merasa risih atas status tersangka, apalagi terdakwa. Atas status hukum itulah, standar etika pemerintahan mengajarkan kebajikan seorang pemimpin untuk mengambil posisi tahu diri. Hukum pemerintahan (*bestuursrecht*) mengajarkan bahwa untuk menguji tindakan-tindakan pemerintahan (*bestuurshandelingen*) itu tidak hanya peraturan perundangundangan, melainkan juga *algemene beginselen van behorlijke bestuur* (asas-asas umum pemerintahan yang baik).

Dalam skala kepemimpinan mutlak dipertimbangkan secara keabsahan etika karena etika pemerintahan mengajarkan laku yang mawas diri tentang kepantasan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan berstatus terdakwa. Kecuali memang etika pemerintahan dibuang dari praksis bernegara yang berfalsafah Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga menuntun keadilan dan keadaban seorang pemimpin.

Dalam lingkup ini mungkin ada yang berpijak pada Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 121.32/4438/ OTDA perihal Mekanisme Pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Menjadi Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017. Hukum administrasi memang mengenal asas *vermoeden van rechtsmatigheid* atau *praesumption iustae causa*, yaitu asas praduga keabsahan seluruh tindakan pemerintahan.

Asas ini memiliki makna bahwa suatu keputusan tata usaha negara harus dianggap sah (*rechtmatige*) sampai ada pembalatan. Dengan demikian, selama tidak ada pembatalan terhadap Kemendagri tersebut, maka posisi gubernur terdakwa tetaplah sah. Memang pemikiran positivistik yang fasih mengeja pasal-pasal Kepmendagri dimaksud akan memperkuat kedudukan gubernur terdakwa, statusnya tetap berkeabsahan, tetapi ini hanyalah keabsahan yang problematis, keabsahan yang kehilangan makna pemerintahan yang mengenal etika.

Pemerintahan yang dijalankan oleh gubernur terdakwa memiliki implikasi luas lahirnya kebijakan-kebijakan yang memperolok "pemerintahan terdakwa". Hal ini amatlah naif dan memberikan pukulan hukum yang berat serta bertentangan dengan kaidah *good governance*. Konstelasi pemerintahan gubernur terdakwa, meminjam kata-kata Francis Fukuyama, telah menggiring negara hukum pada situasi "*the great disruption*".

Hukum direndahkan derajatnya di ketiak kekuasaan yang mengabaikan norma *good governance* sehingga negara hukum nyaris kehilangan martabatnya. Situasi demikian mereduksi hukum sekadar pasal-pasal yang berjejer tanpa rasa keadilan. Kalau hukum diseret ke kaukus politik dan dijajar di tepian jalan untuk memagari kekuasaan yang melindungi "*jagoannya*", inilah dering lonceng kematian negara hukum. Rakyat pada akhirnya menyaksikan tingkat integritas para tokoh dan "*pemulung*" kekuasaan.

Silang sengkarut setiap hari dilontarkan sebagai suguhan agitatif yang digembalakan dari ruang institusi negara. Adu kekuatan yang berputar di lingkar hukum difestivalkan untuk memancing lawan beraksi. Adakah pemegang mandat sedang mengajak "adu kuat tarik napas" kepada rakyatnya sendiri? Aparatur hukum disorongkan menjadi pelayan yang membopong sang tuan. Lembar aturan dibuka untuk "mengafani" pihak liyan.

Meluasnya ekskalasi saling lapor dan saling demo serta mencuatnya sikap abai "pemandu kekuasaan" tengah menorehkan labirin hukum. Ada kesan bahwa beragam konflik dicipta atas nama dinamika bernegara. Nalar sehat berkata agar negara tidak memproteksi penebar kegaduhan yang berkelanjutan.

Kesadaran kolektif sejatinya membuka ruang kepemimpinan yang mengajarkan kecerdasan, bukan keculasan. Sesungguhnya rakyat sudah hafal betul di mana "pabrik keonaran" ini beralamat. Kosmologi masyarakat memberikan pekabaran yang sangat terang bahwa polarisasi "perang tanding" ini bersumber dari ucapan leader yang merasa super.

Suparto Wijoyo, Ketua Pusat Studi Mitra Otonomi Daerah Fakultas Hukum; Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

KORAN SINDO, 23 Februari 2017

Bola Panas

Pesta boleh usai, tetapi masalah belum selesai. Di beberapa daerah, pemilihan kepala daerah yang digelar serentak pada 15 Februari lalu kemungkinan berujung ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, perolehan suara yang "beti" (beda tipis) memunculkan saling klaim. Contohnya, di Banten atau Sulawesi Barat. Namun, tetap DKI Jakarta yang membuat hati ketar-ketir. Bukan persoalan putaran keduanya, melainkan persoalan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Alhasil, seusai pesta pilkada, pentas politik tak lantas sunyi. Pangkalnya, Ahok yang berstatus terdakwa kasus penodaan agama, yang kini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sudah aktif kembali menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta per 11 Februari lalu setelah cuti tiga bulan. Sepuluh hari kemudian, muncul kembali gerakan massa ke DPR atau "*aksi 212*" (mengacu tanggal aksi 21 Februari). Salah satu tuntutannya adalah penonaktifan Ahok dari kursi gubernur.

Memang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 83 Ayat (1) menyebutkan, "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Kali ini tekanan terhadap kasus Ahok itu tidak hanya lewat gerakan massa, tetapi gerakan politik di parlemen. Rapat DPRD dengan Pemprov DKI pun diboikot sejumlah politisi dari Fraksi PKS, Gerindra, PKB, PPP. Bahkan, di DPR tengah bergulir hak angket yang diusulkan Fraksi PKS, Gerindra, Demokrat, PAN. Pihak-pihak yang menginginkan pencopotan Ahok juga mengacu pada asas "*keadilan*" bahwa kepala daerah yang bermasalah langsung diberhentikan. Contohnya, pencopotan Atut Chosiyah tahun 2014 dari posisi Gubernur Banten. Namun, bedanya, Atut terjerat kasus korupsi.

Karena itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo punya sikap sendiri. Alasannya, Ahok didakwa dua pasal KUHP, yaitu Pasal 156 (a) dan alternatif Pasal 156. Di Pasal 156 (a), ancaman hukumannya selama-lamanya 5 tahun penjara, sedangkan di Pasal 156, ancaman hukumannya paling lama 4 tahun. KUHP menggunakan frase "*selama-lamanya*", sedangkan UU No 23/2014 menggunakan frase "paling singkat". Tafsir pun berbeda. Biarlah hukum yang menyelesaikan kasus tersebut.

Bagaimanapun kasus Ahok ini adalah pertarungan politik sangat alot. Panggung politik di Jakarta yang "panas-dingin" juga karena faktor Ahok. Bermula karena persoalan perangai dan komunikasi Ahok, kemudian melebar menjadi isu agama dan etnis di ajang pilkada. Kuatnya posisi Ahok, sebagian publik menduga dilindungi pemerintah.

Semula Presiden Jokowi menunggu fatwa Mahkamah Agung soal pengaktifan kembali Ahok. Namun, MA enggan memberikan fatwa. Sebab, ada dua gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. MA tak ingin mengusik independensi hakim. MA mengembalikan putusan kasus Ahok kepada Mendagri Tjahjo Kumolo. Di DPR, Tjahjo mengklarifikasi, sikapnya itu bukan untuk membela Ahok, melainkan membela Presiden Jokowi.

Bola panas pun kembali ke Istana. Pertarungan politik memang belum usai. Sisa-sisa rivalitas Pilpres 2014 sepertinya bersemi kembali. Namun, apakah pertarungan sengit berakhir seperti nasib dua politisi Inggris, Viscount Castlereagh (Menteri Urusan Perang) dan George Canning (Menteri Luar Negeri), yang harus duel pada 1809 gara-gara saling menyalahkan dalam kekalahan perang melawan Napoleon. Tunggu saja apakah bola panas mendingin atau malah semakin terbakar....

M Subhan SD, Wartawan Senior Kompas

KOMPAS, 23 Februari 2017

Pilkada vs Pil KB

Semakin dewasa usia NKRI, manusia Indonesia sebagai warga negara ternyata semakin "*bijak*". Komentar seperti itulah yang kerap kita dengar seusai pilkada serentak 15 Februari 2017. Yaitu 101 pilkada yang kondusif dan aman untuk memilih gubernur/bupati/wali kota di seluruh Indonesia. Namun, sebenarnya masih tersisa pertanyaan penting dalam pesta demokrasi tersebut. Yaitu, mengapa masih begitu dominan dan kentalnya "*pendekatan elite*" dalam kehidupan politik di negeri ini? Jawaban klasiknya adalah karena elite adalah produsen politik, sedangkan masyarakat adalah konsumen politik. Elite politik bagaikan pengusaha dan penjual yang menjajakan dagangan mereka berupa agenda dan program politik yang kemudian ditawarkan ke pasar terbuka yang bernama pilkada.

Secara substansial, kita berkeyakinan bahwa pilkada dan pemilu tidaklah identik dengan demokrasi. Memang pilkada adalah instrumen untuk melegitimasi kekuasaan. Tetapi, pilkada bukanlah obat ajaib yang mampu menyelesaikan semua masalah yang menimpa wong cilik; padahal pemilik kekuasaan dan kedaulatan adalah rakyat. O'Donnell dan Schmitter, penulis buku *Transition from Authoritarian Rule*, menyatakan bahwa transisi dari rezim otoriter menuju "*sesuatu yang lain*" selalu belum jelas. Sesuatu itu bisa jadi ditegakkannya demokrasi politik, bisa berupa pemulihan kembali suatu bentuk pemerintahan otoriter baru yang lebih kejam. Bisa pula hasil akhirnya adalah "*sekadar*" rotasi kekuasaan pemerintah secara rutin, tetapi gagal menciptakan solusi atas problem-problem pokok rakyat sebagai warga bangsa.

Sebagaimana kita ketahui, buah era reformasi sejak Mei 1998 adalah terkikisnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, setelah 18 tahun era reformasi, realitas empiris yang kita rasakan adalah reformasi "hanyalah" untuk sirkulasi kekuasaan. Dalam setiap pemilu dan pilkada, yang terjadi adalah rakyat hanya diambil "*vote*"-nya, bukan "*voice*"-nya. Padahal, justru voice atau aspirasi rakyatlah yang sangat penting untuk direspons dan dituntaskan para penguasa.

Lebih lanjut, jika kita telusuri jauh ke belakang, tahun 1965 adalah peristiwa besar. Namun, tidak berarti ia mengembalikan demokrasi terpimpin ke demokrasi sejati, tapi mengubahnya menjadi suatu sistem otokrasi yang diyakini mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan membangun prasarana. Sistem pemerintahan otoritarian selama 32 tahun tersebut ternyata menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang amat besar. Bahkan, output-nya adalah tumbuh suburnya KKN dan merajalelanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Lebih dari itu, terdapat warisan lain dari Orde Baru yang masih mengakar di masyarakat, yaitu disorganisasi mendasar terhadap *civil society*. Komunitas strategis tersebut belum mampu memfungsikan dirinya sebagai "*artikulator*" dari kepentingan publik sebagaimana prediksi teori politik konvensional. Tampaknya, yang terjadi adalah banyak di antara mereka yang menjalin

aliansi taktis di dalam kelompok yang sejak dahulu kontrareformasi, baik di level nasional maupun lokal.

Dalam perspektif kekuasaan, dahulu dikenal kekuasaan itu bersifat supernatural yang berasal dari Tuhan. Itulah kekuasaan raja dan kaum aristokrat sehingga para raja selalu berlindung di balik dalil suara Tuhan adalah suara rakyat (*vox Dei-vox populi*). Sedangkan dalam sistem demokrasi, sumber kekuasaan adalah dari rakyat sehingga berlaku dalil suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populivox Dei*).

Apa pun dan dari mana pun wujud serta sumber kekuasaan itu, ia selalu menimbulkan ketidaksederajatan (*unequality*). Namun, yang harus selalu diingat adalah ia selalu berimplikasi terhadap adanya tanggung jawab dan kewajiban dari para penguasa. Eksistensi power tidak sekadar absah secara formalitas. Namun, yang harus dicegah adalah terlalu banyak munculnya ketidakadilan (*injustice*) yang dialami para buruh, petani, nelayan, dan seluruh wong cilik. Demikianlah, kita diingatkan agar selalu memihak mereka yang diperlakukan tidak adil walaupun hal itu tidak memberikan kenikmatan pragmatis. Adalah orang bijak yang bisa berempati dan merasa bersalah jika terus-menerus memihak mereka golongan yang kuat.

Menyangkut kemiskinan wong cilik, data mutakhir Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, sejak 2011 rasio Gini bertahan 0,41 dan per Maret 2016 turun sedikit menjadi 0,397 atau turun 0,003 dari September 2015. Meski demikian, penghitungan kemiskinan di Indonesia didasarkan pada pendapatan per kapita Rp 354.000 per bulan atau sekitar Rp 11.800 per hari. Padahal, realitasnya angka itu terlalu rendah, bahkan untuk ukuran Indonesia. Data lain dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat keempat negara yang paling timpang di dunia. Hal itu terlihat antara lain dari penguasaan 49,3 persen aset nasional yang hanya dimiliki 1 persen orang di negeri tercinta ini. Apalagi ditambah data yang menyedihkan, jika ada bayi lahir hari ini, dia langsung menanggung beban utang Rp 9,2 juta.

Walhasil, benarlah komentar wong cilik tentang pilkada, yaitu pilkada itu memang beda dengan pil KB. Kalau pil KB, lupa minum obat berakibat jadi (anak). Tapi, kalau pilkada, kalau sudah jadi (mendapatkan kursi kekuasaan), mereka lupa (kepada wong cilik).

Akhirnya, simaklah dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang bahaya besar jika para pemimpin bangsa tidak memperhatikan fakir miskin. Beliau menyampaikan, akan muncul empat musibah, yaitu para pemimpin yang kejam (za'imun dhalimun), aparat hukum yang khianat (hakimun khainun), pertengkaran dan permusuhan dalam masyarakat (al-khushumah wa al-'adawah), dan zaman menjadi sulit (masyaqqatu al-zaman). Semoga Tuhan melindungi kita. Amin.

Ali Maschan Moesa, Guru Besar Sosiologi Bahasa UIN Sunan Ampel Surabaya

JAWA POS, 24 Februari 2017

Blas, Demokrasi Kita Bablas

BILA sungguh kita ikhlas untuk bersikap jujur dan berpikir jernih, dengan perangkat common sense (nalar umum) saja, apa yang dapat kita pahami dan terima dari ketentuan (hampir) aksiomatis dalam matematika 'ajaib' seperti: 50+1 = menang? Itulah matematika dasar dalam ritus utama demokrasi bernama pemilihan (umum) atau election. Bagaimana kita menakar dengan seluruh pengetahuan dan kearifan hidup kita, arti 0,5% atau sekadar ratusan atau puluhan suara mampu memaksa seorang (kandidat) lain untuk menerima kalah dalam kompetisi pilkada, seperti yang baru saja berlangsung di ratusan wilayah negeri ini.

Angka sederhana itu bukan saja menafikan perjuangan dan doa, keringat hingga airmata, harta hingga warisan dari sang pecundang, tapi juga membuat 49,5% perolehan suara sang pecundang tak punya makna apa-apa. Dalam demokrasi, jumlah yang bisa dikatakan 'setengah' itu tak memiliki hak apa pun, jangankan untuk jatah kekuasaan dan fasilitas lainnya, tapi juga untuk menetapkan kebenaran, kebaikan, atau kebajikan bagi orang lain, bagi konstituen atau masyarakat pada umumnya.

The winner takes all, dan pecundang pun harus duduk saja di belakang, jadi penumpang ke mana pun kereta negeri dipacu kencang. Apa yang kemudian menjadi ironi ialah, setengah persen atau sekian ratus/ribu suara itu memberi hak penuh pada pemenang untuk merengkuh seluruh kuasa, mengendalikan seluruh permodalan rakyat (anggaran belanja dan sebagainya) dan menentukan bukan hanya cara berdiplomasi atau berhubungan dengan dunia luar, menggunakan senjata, hingga ke mana masa depan seluruh masyarakat diarahkan. Tak ada tempat untuk kebenaran, kebajikan, atau pertimbangan lain. Cukup setengah persen, atau bahkan satu suara lebih saja. Ironi itu menjadi tragedi ketika peroleh suara lebih itu didapatkan dengan cara yang tidak elegan, bermartabat, bahkan kriminal. Dengan politik uang, sembako, hingga ancaman. Atau seperti yang banyak terjadi, dimenangkan keputusan pengadilan atau hakim mahkamah.

Itulah yang terjadi sekian kali bahkan di negeri yang menjadi acuan demokrasi dunia, Amerika Serikat, dengan popular votes atau perolehan suara terbanyak bisa dipecundangi sistem untuk memenangi pihak yang kalah suara. Itulah demokrasi. Sistem yang ternyata tidak mencegah kekuatan ekstrem meraih kekuasaan atau dominasi politik, seperti Geert Wilders di Belanda, Marine Le Penn di Prancis, dan banyak negara lain di Eropa. Itulah juga sistem yang melegetimasi secara kuat pemimpin-pemimpin negara yang oleh banyak kalangan dianggap 'preman' atau otoriter, seperti terjadi di Turki, Malaysia, Filipina, juga Amerika.

Tragik demokrasi

Akhirnya kita semua menjadi saksi dari munculnya bukti: sistem politik pilihan universal, demokrasi, pada dasarnya tidak mampu memberi garansi akan muncul dan berlakunya tata kemasyarakatan hingga tata negara yang

ideal. Setidaknya yang mampu memberi garansi kenyamanan hidup bagi manusia, di tingkat nasional hingga personal, kecuali ia menjadi medium legal untuk ekspresi pikiran dan perasaan, sampai di tingkat di mana ekspresi itu lebih dipengaruhi libido atau syahwat kekuasaan atau kenikmatan yang di luar kontrol; nafsu egoistik, dan selfish yang keluar dari takaran.

Maka tidaklah mengherankan jika praktik demokrasi, di negeri ini misalnya, sebenarnya juga di banyak negeri lainnya, menghasilkan lebih banyak keributan ketimbang kebaikan. Lebih banyak kata-kata ketimbang refleksi, nafsu, dan ambisi ketimbang pengabdian dan kejujuran, dan seterusnya. Terlebih ketika dalam situasi itu lahir produk-produk mutakhir dalam teknologi informasi dan komunikasi, dalam bentuk web dan semua turunannya: dunia virtual yang memberi izin bagi semua bentuk ekspresi imajinatif hingga ilusif.

Demokrasi, dengan seluruh perangkat filosofis hingga praktisnya, tidak mampu mencegah keriuhan bahkan di saat tertentu menjadi kaos virtual karena semua memainkan hak yang justru diciptakan dan dilindungi demokrasi itu sendiri. Bahwa kemudian berseliweran, menjadi hantu yang acap kali dianggap nyata, slogan busuk, janji kosong, berita palsu (hoax), intimidasi, dan pelbagai ekspresi buruk dan jahat lainnya, menjadi konsekuensi tak terelakkan. Dan kita, dipaksa, harus menerimanya.

Karena kita menerima demokrasi. Itulah yang terjadi, di Jerman, Prancis, Italia, atau Amerika juga. Apakah itu berarti kita, juga banyak rakyat di banyak negara, kebablasan dalam menerapkan demokrasi? Atau justru demokrasi itu sendiri adalah sistem yang sudah pada dasarnya kebablasan dalam memahami manusia dan perilakunya? Kebablasan dalam arti demokrasi pada akhirnya sadar bahkan ia tidak mampu mengendalikan dampak buruk atau ekses yang memang sudah menjadi bagian integral dalam keberadaannya. Maka blas, demokrasi memang sudah lahirnya bablas. Bukan cuma angine, tapi juga kemurniannya, kemuliaannya, juga hasil idealnya.

Jawaban itu

Ini bukan pesimisme, mungkin sebuah kritik, sedikit pedas mungkin. Karena sejarah sudah berkali-kali membuktikan. Bahkan sejak mula demokrasi tulen diterapkan di Eropa, Jerman dalam hal ini, produknya ialah sebuah tragedi dianggap cacat peradaban di sekujur sejarah manusia, namanya: Adolf Hitler. Maka tidak perlu kita terlalu optimistis pada demokrasi dan merasa banyak pihak mengganggu atau membuatnya kebablasan, karena boleh jadi satu kali nanti, figur semacam Trump, Erdogan, atau Wilders bahkan Hitler pun dapat menang dalam pemilu di negeri ini, entah daerah atau nasional.

Mau omong apa? Demokrasi. Saya kira sudah saatnya kita, juga banyak pihak di atas bumi ini sebenarnya, berpikir ulang tentang implementasi sistemik dari ide yang sebenarnya sudah terbelakang ini. Kita harus berani jujur dan berani mengatakan, dalam praktik atau kenyataannya, demokrasi di banyak bagian bumi ini telah menjadi sumber legitimasi dari kekuasaan

dominatif segelintir orang, elite, entah elite politik, modal, agama, akademik, dsb.

Ini perbincangan lama di banyak mimbar akademik dunia. Tapi tak pernah sudah, karena lagi-lagi, elite yang punya kuasa dapat mengendalikan kalau perlu menghabisi pikiran-pikiran miring dan alternatif (di luar demokrasi) itu. Bagi kita, rakyat negeri penuh sejarah yang bisa menjadi sampah ini, saya merasakan urgensi yang mendesak untuk melakukan pemikiran ulang. Sebagian kalangan yang pesimistis atau penuh prasangka, mungkin mencurigainya, karena ia mengancam comfort zone mereka.

Sebagian lain mendapatkan jalan buntu karena mata hati dan pikirannya, yang terdidik secara 'demokratis'-kontinental sejak PAUD hingga S4, tidak bisa melihat 'jalan' lain, alternatif lain. Padahal kita semua tahu, ada satu kekuatan dalam diri kita yang sebenarnya mampu memberi jawaban-jawaban untuk semua persoalan di atas. Kekuatan yang sudah diuji jauh lebih lama dan hebat dari mayoritas bangsa di muka bumi ini.

Kekuatan kebudayaan yang tidak berada di luar, tapi di dalam diri kita sendiri. Tersimpan dalam jejak ribuan tahun, menjadi semacam genetika kultural. Sayangnya, kita lupa. Tidak...kita tidak peduli, mempersetankan, bahkan menghinanya.

Radhar Panca Dahana, Budayawan

MEDIA INDONESIA, 24 Februari 2017

Demokrasi Kebablasan

Adalah wajar jika kemudian timbul kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat tentang masa depan Indonesia ketika Presiden Jokowi, tiga hari yang lalu, mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia sudah kebablasen. Kebablasen atau yang bakunya "*kebablasan*" adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti berlebihan atau melampaui batas yang wajar. Kekhawatiran itu timbul karena jika Presiden yang mengatakan itu secara terbuka, artinya ada, minimal, dua kemungkinan.

Pertama, demokrasi di Indonesia mengancam eksistensi bangsa dan negara Indonesia yang "bersatu dalam keberagaman" karena di kalangan masyarakat sudah cenderung anarkistis, keluar dari batasbatas wajar melalui kebebasan yang agak brutal sehingga, demi keselamatan negara dan bangsa, harus segera diatasi.

Kedua, pernyataan Presiden itu juga bisa ditafsirkan sebagai isyarat akan ada pembatasan -pembatasan kembali atau tindakan- tindakan represif atas semua penggunaan hak-hak konstitusional yang menggunakan kendaraan demokrasi yang, katanya, kebablasen itu. Sebenarnya ungkapan "demokrasi kebablasen" sudah mengemuka dalam pertemuan terbatas antara Presiden dengan alumni kelompok Cipayung sehari sebelum Presiden mengemukakannya secara terbuka pada pelantikan DPP Partai Hanura, Rabu, 22 Februari 2017.

Pada hari Selasa, 21 Februari 2017, para pimpinan alumni organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung, yakni HMI, GMNI, PMII, GMKI, dan PMKRI, bersilaturahmi dengan Presiden di Istana Negara. Pada saat itu kami mendiskusikan banyak hal dengan Presiden, termasuk demokrasi yang agak kebablasen itu. Jauh sebelum itu istilah demokrasi kebablasen sebenarnya sudah sering kita dengar. Beberapa purnawirawan ABRI (TNI dan Polri) sering mengeluhkan amendemen atau perubahan UUD 1945 (periode 1999- 2002) yang dikatakannya sebagai produk dari reformasi dan demokrasi yang kebablasen sehingga hasil amendemen UUD 1945 itu keluar dari nilainilai Pancasila dan semangat para pendiri negara (*founding fathers*).

Tapi benarkah perjalanan demokrasi kita sekarang kebablasen? Jujur, gejala tersebut memang ada meskipun tidak bisa dimungkiri kita telah mencatat banyak kemajuan dalam berdemokrasi. Gejala demokrasi kebablasen itu terjadi baik di tingkat supra-maupun infrastruktur politik maupun di kalangan masyarakat. Kita bisa melihat dengan mata telanjang betapa para pemain resmi politik telah menggunakan mekanisme resmi demokrasi untuk menggarong kekayaan negara dan merampas hak-hak rakyat.

Di dalam studi-studi politik malah muncul ungkapan "demokrasi sebagai jalan untuk korupsi". Dengan menggunakan posisinya di lembaga demokrasi para politikus telah membuat dan menjualbelikan kebijakan dan hukum negara untuk mencuri hak-hak rakyat. Begitu pula kerap kali ada kolusi antara oknum penting di legislatif dan eksekutif untuk berkorupsi-ria. Ada juga kolusikolusi di lembaga yudikatif.

Semuanya menggunakan mekanisme formal demokrasi sehingga disimpulkan, korupsi sengaja dilakukan melalui mekanisme demokrasi. Di tengah-tengah masyarakat pun terasa ada penggunaan hak konstitusional melalui demokrasi yang kebablasen. Gejala saling mencaci, menyebar fitnah, dan membuat informasi hoax melalui media massa dan media sosial tak terbantahkan berseliweran setiap hari.

Isu SARA yang sebenarnya ditiupkan untuk kepentingan kelompok politik tertentu dan jangka pendek semata telah dipergunakan sebagai senjata untuk saling menyerang. Orang berbicara keadilan dan hukum dituduh SARA, rasis, diskriminatif, anti-keberagaman, dan sebagainya. Penuduhnya pun kemudian dituding balik sebagai antek dan jongos kelompok primordial tertentu yang juga berbau SARA. Saling tuding tersebut kemudian menggumpal menjadi kubu-kubu yang saling serang dengan bendera primordialisme alias SARA. Itulah demokrasi yang kebablasen. Jadi tidak salahlah Presiden ketika mengatakan ada gejala demokrasi kebablasen karena selain hal itu sudah lama diungkapkan oleh kelompok-kelompok masyarakat, faktanya pun memang sangat terasa.

Meskipun Presiden mengatakan hal tersebut banyak muncul di media sosial dengan akun-akun yang tidak bertuan, sedangkan yang di media massa konvensional bisa dikendalikan, faktanya media konvensional pun tidak jarang memainkan irama demokrasi yang kebablasen ini melalui trik-triknya yang juga canggih. Soalnya, bagaimana menghadapi dan mengatasi gejala yang bisa membahayakan eksistensi NKRI itu? Jawabannya sebenarnya ada pada pernyataan Presiden sendiri, yakni penegakan hukum tanpa pandang bulu, tegas, dan tidak ragu. Presiden mengatakan, "*Tegakkan hukum, jangan ragu*." Solusi tentang penegakan hukum oleh Presiden ini pun benar. Konstitusi kita menyatakan negara kita adalah negara demokrasi (kerakyatan) dan negara nomokrasi (negara hukum).

Demokrasi tanpa hukum bisa liar dan anarkistis, hukum tanpa demokrasi bisa elitis dan sewenangwenang. Itu yang bisa dibunyikan dari Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Tapi harus segera dinyatakan juga bahwa saat ini rasa keadilan di dalam masyarakat terlukai karena hukum belum suprime, hukum masih terasa membedakan siapa subjek yang harus ditindak dan dilayani. Pada tingkat elite hukum kerap kali kolutif, sedangkan pada tingkat massa hukum kerap kali anarkistis.

Ketidak beresan hukum pada tingkat elite, terutama di birokrasi, ini sebenarnya tergantung dan di bawah kendali sah Presiden. Jadi, syukur alhamdulillah, Presiden sendiri yang mengemukakan adanya gejala atau problem "*demokrasi liar dan penegakan hukum*", sebab Presiden pasti sudah tahu bagaimana menyikapi berbagai masalah dan langkah apa yang harus diambil untuk menegakkan hukum agar demokrasi tidak kebablasen.

Moh Mahfud MD, Ketua MK-RI 2008-2013

KORAN SINDO, 25 Februari 2017

Praktik Curang Pilkada Kita

Ancaman terhadap proses demokrasi elektoral yang perlu mendapat perhatian adalah terjadinya kecurangan yang sengaja dilakukan untuk memenangkan calon tertentu. Kecurangan (*election fraud*) terjadi tak hanya dalam pilkada serentak yang baru saja dilaksanakan, tapi hampir di setiap pemilu. Seakan-akan kecurangan ini menjadi bagian dari strategi pamungkas untuk memenangkan calon tertentu ketimbang menggunakan cara yang dibenarkan oleh undang-undang guna mendapatkan suara pemilih.

Padahal, pilkada ini merupakan refleksi kesepahaman antar-individu di ranah publik untuk memberi legitimasi pemimpin yang terpilih berdasarkan prinsip jujur dan adil. Sangat di sayangkan jika itu harus dinodai dengan cara-cara di luar aturan yang telah disepakati. Umumnya kecurangan dilakukan secara sistematis dengan modus "*seolah-olah*" ini terjadi karena kesalahan administrasi pilkada atau kelalaian penyelenggara. Pilihan alasan ini dimaksudkan agar tak ada protes dan tuntutan yang berlebihan sehingga dapat membatalkan kemenangan calon yang melakukan kecurangan tersebut. Tidaklah mengherankan jika dalam setiap pilkada yang muncul adalah tudingan terjadinya kecurangan oleh pihak tertentu. Dampaknya muncul sikap penafian terhadap hasil pilkada dari pihak yang merasa dicurangi. Yang paling ekstrem, akan mencetuskan penolakan terhadap keputusan KPU disertai dengan kerusuhan massa dan kekerasan yang melibatkan pendukung calon yang kalah. Dalam catatan sejarah pilkada di Indonesia, kerusuhan yang terjadi selalu diawali dengan perilaku curang.

Sangat mengherankan, antusiasme publik mengikuti pilkada justru harus dicederai dengan perbuatan curang oleh kelompok tertentu. Kelompok ini jelas memiliki hubungan dengan tim pemenangan calon kepala daerah. Idealnya, kecurangan dalam pilkada dapat dicegah karena setiap tahapan pemilihan yang dilaksanakan selalu diawasi, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga ke penghitungan suara. Namun, mengapa masih saja terjadi kecurangan tersebut?

Penyebab dan penegakan hukum

Paling tidak ada empat faktor yang berkaitan langsung dengan perbuatan curang tim pemenangan calon kepala daerah. *Pertama*, rendahnya tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan pelaksanaan demokrasi elektoral yang menjadi pilihan masyarakat. Sungguh disayangkan, komitmen bersama yang sudah terbangun selama ini, yaitu menolak dikembalikannya sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD, harus dihancurkan oleh perbuatan curang ini. Sangat jelas perbuatan curang itu telah memberikan pengaruh buruk pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Tanpa disadari, kepercayaan masyarakat terhadap pilkada akan menurun. Jika ini yang terjadi, tentu suatu kemunduran dalam berdemokrasi yang sudah kita rasakan sejak pemerintahan Orde Baru mundur dari kekuasaan politiknya.

Kedua, tidak profesionalnya penyelenggara pilkada. Profesionalisme ini dapat dilihat dari kemampuan penyelenggara melaksanakan tugas kepemiluannya mulai dari tingkat KPPS hingga ke komisioner dalam melaksanakan tahapan pilkada. Dari pengamatan sekilas, refleksi ketidakprofesionalan ini dapat dilihat

dari keberpihakan penyelenggara kepada calon tertentu. Indikasi lain adalah kurangnya surat suara sehingga pemilih tak dapat menggunakan suaranya, penggunaan data orang lain untuk mencoblos, adanya pemilih ganda, migrasi pemilih ke TPS di luar domisili mereka, tidak tersebarnya formulir C6 untuk masyarakat, dan manipulasi hasil penghitungan suara.

Memang tak mudah mencari penyelenggara yang profesional dan mampu melaksanakan pekerjaannya sampai selesai sesuai ketentuan yang ada, terutama di tingkat KPPS. Sialnya, justru tingkat KPPS inilah yang cenderung terabaikan dan luput dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal, KPPS adalah titik krusial terjadinya kecurangan dalam pilkada. Walaupun ada antisipasi untuk menurunkan praktik kecurangan dengan melibatkan saksi, sering kali praktik manipulatif yang dilakukan penyelenggara sulit diketahui publik.

Ketiga, hasrat besar tim sukses untuk memenangkan calonnya dengan segala cara. Hal ini terjadi karena adanya "kontrak" yang harus dilaksanakan agar mereka mendapat "bagian" dari kemenangan yang dicapai calon kepala daerah yang mereka dukung. Akibatnya, politik menghalalkan segala cara akan dilakukan, termasuk menafikan aturan perundang-undangan dan melakukan intimidasi kepada pemilih. Selain itu, modus mendatangkan pemilih siluman dan melakukan politik uang juga sering ditemukan. Celakanya, calon kepala daerah yang diharapkan bisa mencegah perbuatan curang tim pemenangan ini cenderung pasif dan menerima apa pun yang akan dilakukan oleh timnya agar bisa menang dalam pilkada.

Keempat, lemahnya pengawasan dan tidak adanya upaya penegakan hukum bagi yang melanggar aturan pilkada secara optimal. Banyak kecurangan dilaporkan masyarakat dan menjadi temuan panitia pengawas pilkada, tetapi jarang ditindaklanjuti menjadi kasus hukum yang berimplikasi pada pemidanaan. Bagi pelaku sendiri, keadaan ini tentu menguntungkan sehingga tidak ada rasa takut dan rasa bersalah ketika berbuat curang dalam pilkada berikutnya. Praktik curang ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pilkada. Tindakan pencegahan harus dilakukan tidak hanya oleh penyelenggara, tetapi juga masyarakat yang menjadi aktor utama keberhasilan pelaksanaan pilkada. Membangun kesadaran politik masyarakat menjadi salah satu cara mencegah munculnya kecurangan ini. Paling tidak, dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan menutup celah bagi sejumlah pihak yang ingin merusak sistem demokrasi yang sudah terbangun ini.

Apalagi, dalam waktu dekat juga akan berlangsung pilkada putaran kedua di DKI Jakarta yang akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pilkada serentak gelombang ketiga pada bulan Juni 2018. Idealnya, harus ada upaya sungguh-sungguh untuk meniadakan kecurangan ini agar kepercayaan publik terhadap pilkada sebagai mekanisme memilih pemimpin secara jujur dan adil tetap terpelihara.

Asrinaldi Asril, Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas

KOMPAS, 27 Februari 2017

Pancasila dan Hikmah Pilkada

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak baru saja usai. Betapapun daerah-daerah tertentu masih berlanjut ke putaran kedua, dari *quick count* telah dapat diketahui gambaran umum, siapa pemenangnya. Panasnya suhu politik menjelang hari H pilkada, kini mulai mereda. Dengan harapharap cemas, pasangan calon maupun pemilih menunggu hasil akhir perhitungan manual oleh Komisi Pemilihan Umum. Saya kurang sreg dengan sistem pilkada ini. Selain karena rawan perpecahan, begitu mahal ongkos sosial (*social cost*) maupun ongkos finansial (*financial cost*) pesta demokrasi ini.

Sumber daya alam melimpah-ruah, dan berbagai proyek-proyek strategis, digadaikan kepada cukong- cukong demi tercukupinya biaya pilkada. Rakyat digusur dan digeser dengan alasanalasan irasional. Ketidakadilan sosial menjadi realitas masif, tanpa ada tanda-tanda penegakan hukum konsisten, berwawasan kebangsaan.

Keberpihakan aparat penegak hukum melalui ”*permainan hukum*” berlangsung semakin nekat. Benarkah realitas politik ”hitam- buram” ini cobaan, ujian, atau laknat bernegara? Bila kita mampu membaca sejarah kebangsaan dan kehidupan umatumat terdahulu dengan optik Pancasila, banyak hikmah-hikmah dapat diambil untuk bahan pendewasaan diri sehingga tidak tersandung kedua kali, sekaligus dapat dirajut kebersatuan bangsa. Untuk diketahui, nilai-nilai Pancasila ada di Bumi Pertiwi ini sejak ratusan tahun silam. Karena kelalaian oknum-oknum penguasa terdahulu, demi takhta, nilai-nilai Pancasila dicampakkan. Demi kemenangan dalam perang saudara, dilibatkanlah kekuatan eksternal untuk membantu.

Melalui intervensi politik, ketika perang saudara usai dan dimenangkan, janji politik perlu dilunasi dengan penyerahan bagian- bagian wilayah kerajaan. Dominasi dan hegemoni politik berlanjut pada dekonstruksi hokum dibidang sumberdaya alam, kependudukan, dan sebagainya. Akibat itu, kedaulatan negara tergadaikan pada bangsa asing melalui kolonialisasi. Oleh penjajah, nilai-nilai Pancasila yang telah mengakar pada agama-agama, adat-istiadat, dan budaya mulai ditenggelamkan dan digantikan nilainilai asing berkarakter individual-liberalistik. Para *founding fathers*, sebagai negarawan-negarawan generasi emas, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan lain-lainnya, ”*sesak nafasnya, tertusuk hatinya*” melihat realitas penjajahan itu.

Berbagai upaya dilakukan untuk pembebasan diri–di ranah politik, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan sebagainya–mulai dilakukan perjuangan terorganisasi. Nilai-nilai Pancasila–berkarakter komunalistik-religius, yang terbenam sedemikian dalam di dasar samudera–diangkat ke permukaan, disosialisasikan sebagai *way of life*, dan dirumuskan sebagai *philosophischegroundslag*.

Sejak saat itu, Pancasila mestinya dijadikan sumber inspirasi, fondasi, dan paradigma demokrasi, termasuk mendesain dan melaksanakan pilkada. Sistem pilkada pada era formasi ini bila dicermati seksama, banyak kemiripannya dengan sistem pengelolaan kekuasaan pada era awal penjajahan dan jauh dari Pancasila.

Itulah, saya tidak sreg dan mengajak bangsa ini bersikap kritis agar penjajahan oleh bangsa asing tidak terulang. Caranya bagaimana? Cara termudah adalah ber-Pancasila melalui pengamalan ajaran-ajaran agama secara tulus dan tidak sekali-kali ingkar terhadapnya. Bagi umat Islam, ada ajaran penuh hikmah bersumber hadits Rasulullah SAW.

Seorang sahabat bertanya, ”*Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya*?” Dijawabnya: ”Para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian yang sesudah mereka secara berurutan berdasarkan tingkat kesalehannya. Seseorang akan diberikan ujian sesuai dengan kadar agamanya. Bila ia kuat, ditambah cobaan baginya. Kalau ia lemah dalam agamanya, akan diringankan cobaan baginya. Seorang mukmin akan tetap diberi cobaan, sampai ia berjalan di muka bumi ini tanpa dosa sedikit pun.” (HR Bukhari). Direntang pada persoalan pilkada, hadits di atas sejatinya menunjukkan bahwa pilkada merupakan ujian untuk penguatan jiwa kebangsaan.

Bagi pemerintah dan kepolisian serta penyelenggara, jadilah penguasa adil berjiwa kebangsaan, jauhi keperpihakan kepada salah satu kontestan. Bagi pemilih, bersikaplah cerdas, bersabarlah, dan terimalah dengan keikhlasan apa pun hasilnya. ”*Menang aja umuk, kalah aja ngamuk* ”, kata orang Jawa. Tidak perlu fitnah memfitnah, menyebar hoax, ataupun bersikap berlebihan.

Tafakuri dan temukan hikmah dari apa pun yang terjadi. Dalam rangka ber-Pancasila melalui ajaran agama, kita ambil hikmah hadits Rasulullah SAW lainnya. Beliau pernah bercerita tentang pertemuan seorang laki-laki dengan seekor anjing pada sebuah sumur. Kisah perjumpaan dimulai ketika tenggorokan lelaki tersebut betul-betul kering. Ia terus melangkah sepanjang perjalanan hingga ditemukan sebuah sumur. Ia terjun dan meminum air di dalamnya. Tenggorokan kembali basah, tenaganya sedikit bertambah. Saat keluar dari sumur, ia terperanjat. Di hadapannya berdiri seekor anjing dengan muka memelas. Nafasnya terengah-engah. Lidahnya menjulur-julur. Anjing itu kehausan. Laki-laki tersebut menyadari bahwa anjing sekarat itu tak mungkin turun ke dalam sumur karena tindakannya bisa mencelakakannya. Seketika ia terjun kembali ke dalam sumur. Sepatunya dipenuhi air, dan naik lagi dengan beban dan tingkat kesulitan bertambah.

Lelaki itu bahagia bisa berbagi air dengan anjing. Apa selanjutnya yang terjadi pada lelaki itu? Rasulullah berkata, ”*Allah berterima kasih kepadanya, mengampuni dosa-dosanya, lantas memasukkannya ke surga*.” Indonesia akan menjadi surga dunia bila dalam pilkada semua pihak mampu berperilaku welas asih kepada sesama. Status haram dan najis pada anjing tak boleh berbanding lurus dengan saling menghinakan dalam pilkada. Pilkada melibatkan interaksi antarmanusia, makhluk yang martabatnya lebih tinggi dari anjing. Kalau kepada anjing kita dapat menebar welas asih, pilkada perlu diterjemahkan sebagai aktivitas politik berbasis Pancasila. Wallahualam.

Sudjito, Guru Besar Ilmu Hukum UGM. KORAN SINDO, 28 Februari 2017

Gelojoh Kuasa Melibas Negara

Putaran kedua Pilkada DKI Jakarta dimulai minggu ini. Pelajaran utama dari putaran pertama adalah praktik demokrasi yang sarat hasrat kemaruk (gelojoh) kuasa dapat melibas tatanan negara. Nilai-nilai mulia sebagai basis ideologi identitas masyarakat sipil (*civil identity*) yang beradab, terhuyung-huyung melawan ketamakan para penggelojoh kekuasaan yang mempersenjatai diri dengan senjata yang mematikan "bermerek" SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) atau politik identitas.

Sedemikian kuatnya gelombang politik identitas SARA, seakan-akan negara telah digulung ombak kebencian dan permusuhan. Rakyat celingukan mencari keberadaan negara karena tidak dirasakan kehadirannya. Sementara itu, politik identitas semakin membatu dan kasatmata. Masyarakat juga semakin bingung dan gelisah; alih-alih merasakan negara melakukan perlawanan sengit terhadap isu-isu SARA, rakyat heran karena sementara petinggi negara justru memberikan sinyal ancaman negara di depan mata adalah gerakan komunisme, yang terbukti gagal total di seantero dunia.

Kehadiran negara dirasakan setelah Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa praktik demokrasi dewasa ini sudah kebablasan. Ia menegaskan, demokrasi membuka peluang artikulasi politik yang ekstrem, seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dalam bentuk suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA (Kompas.com, 24/2).

Presiden tampaknya sangat menghayati politik identitas semakin mengeras. Betapa mencemaskannya politik SARA, antara lain menjadi berita utama The Jakarta Post (27/2), "*Muslim Residents Against Threats of No Burial Rites*", disertai foto mencolok memamerkan ancaman bersifat diskriminatif. Ilustrasi tersebut mewakili dahsyatnya gelombang politik SARA dan kegelisahan masyarakat terhadap ancaman politik identitas. Apabila Pilkada DKI Jakarta didominasi oleh pertarungan politik SARA, siapa pun yang menang bukan hanya mengalahkan lawan politiknya, melainkan juga keindonesiaan, kekalahan politik ke-Bhinneka Tunggal Ika-an yang inklusif. Harganya amat mahal.

Pengalaman di negara-negara Eropa menjelang dan pasca Perang Dunia I serta konflik politik SARA pasca runtuhnya negara-negara komunis menelan korban puluhan juta manusia meninggal dan penderitaan lahir batin bagi yang masih hidup. Diperlukan waktu puluhan bahkan mungkin ratusan tahun untuk memulihkan luka batin rakyat akibat perilaku para penggelojoh kekuasaan yang memanipulasi politik SARA.

Demikian pula prinsip kesetaraan jika dipraktikkan tanpa pandang bulu justru dapat merusak demokrasi karena kesetaraan dianggap semua orang sama derajat, niat, dan kompetensinya. Tidak peduli mereka yang ingin

memuliakan kehidupan bersama atau mereka yang ingin menghancurkan tatanan kehidupan demi mengejar kekuasaan.

Referensi pengelolaan kekuasaan dalam konteks manajemen pemerintahan untuk kepentingan umum telah ribuan tahun didiskusikan mendalam antara Socrates dan Glaucon (sahabatnya). Wacana yang dapat dijadikan pelajaran tersebut dikumpulkan Plato dalam bukunya, *Republic*, Chris Emlyn-Jones dan William Preddy (editor), 2013.

Dalam Bab VIII (hal 107-305), memuat perdebatan tentang kekuasaan. Pelajaran penting, antara lain, manipulasi para elite politik yang mengobarkan propaganda untuk memenuhi hasrat kuasa hanya menempatkan rakyat sebagai budak. Namun, para budak tersebut semakin lama tidak dapat dikendalikan sehingga akan menghasilkan pemerintahan oleh gerombolan yang tidak mempunyai kompetensi memerintah alias mobokrasi. Kemaruk kuasa selalu dapat memorakporandakan negara.

Mewujudkan cita-cita tatanan demokrasi dalam masyarakat plural karena identitas primordial sangatlah rumit. Jebakan demokrasi yang paling mudah menjerat kedaulatan rakyat adalah dalil mulia dari demokrasi itu sendiri: kebebasan dan kesetaraan. Prinsip tersebut baru bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan umum jika disertai kualitas manusia yang mampu membatasi kebebasannya untuk merawat nilai dan aturan guna mewujudkan cita-cita bersama.

Praktik di negara-negara yang mapan demokrasinya, biasanya sebelum terjadi ledakan partisipasi rakyat, lembaga-lembaga politik telah dibangun sehingga dapat menampung partisipasi publik. Sebab, tanpa manusia yang mempunyai kompetensi dan tingkat pemahaman tentang hidup bersama, kebebasan menjadi ekspresi kemerdekaan yang liar dan tidak bertanggung jawab, anarkistis.

Kebebasan individual harus dipagari oleh kepentingan umum melalui hukum dan lembaga-lembaga politik yang mampu mengelola partisipasi publik. Tanpa batas-batas jelas, para penggelojoh kekuasaan dengan sigap akan mengobarkan propaganda, mengelabui rakyat, membangun dukungan untuk kepentingan mereka sendiri.

Agenda bangsa Indonesia membangun tatanan kekuasaan bermartabat adalah menyusun politik pendidikan yang jelas. Tujuannya, membangun watak generasi muda memahami dan loyal pada nilai-nilai yang menjadi landasan hidup bersama dalam keanekaragaman. Tanpa agenda tersebut, demokrasi justru akan luluh lantak oleh dalilnya sendiri. Oleh sebab itu, pilkada putaran kedua harus menihilkan propaganda yang mengobarkan kebencian dan permusuhan SARA agar Indonesia tetap kukuh sebagai bangsa yang memuliakan Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an.

J Kristiadi, Peneliti Senior CSIS

KOMPAS, 07 Maret 2017

Kendala Mencopot Ahok

Isu pemberhentian kepala daerah pada era otonomi daerah dewasa ini selalu menjadi perhatian publik. Pemerintah tentu "*kenyang*" menghadapi perkara ini. Misalnya, kasus Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo yang memenangi pilkada pada tahun 2010 walaupun menjadi terdakwa. Yang bersangkutan dilantik dulu dan pada hari yang sama diberhentikan sementara. Lalu wakilnya ditunjuk sebagai pelaksana tugas bupati supaya pemerintahan tetap berjalan. Publik mengeritik, "*terdakwa kok dilantik*", "*itu tidak etis*", teriak pengamat.

Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ditahan KPK karena tindak pidana korupsi. Mereka meskipun dalam tahanan namun tetap memimpin provinsinya, karena masih berstatus tersangka (belum terdakwa), sehingga tidak bisa diberhentikan sementara. Penyelenggaraan pemerintahan provinsipun terganggu. Wakil gubernur tidak berwenang menandatangani surat, apalagi peraturan daerah.

Pemerintah keluar dengan solusinya melalui UU No.23/2014, bila kepala daerah menjadi tersangka dan ditahan, maka wakilnya melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Gubernur Riau Annas Ma'mun "korban" pertamanya. Publik mengapresiasi pemerintah.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dengan register Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt-Ut ditetapkan sebagai terdakwa penistaan agama dan telah pula disidangkan perkaranya sejak 13 Desember 2016. Tetapi dia tidak ditahan.

Pertanyaannya kemudian, bukankah Ahok telah berstatus terdakwa? Bukankah ancaman hukumannya sudah 5 (lima) tahun penjara? Mengapa Presiden Joko Widodo belum memberhentikan dan Mendagri Tjahjo Kumolo sampai "pasang badan". Publik pun menyoal "beleid" pemerintah. Bahkan, empat fraksi di DPR mengusulkan hak angket.

Filosofi Pemberhentian

Gubernur adalah *primus inter pares* atau first among equal, yaitu orang nomor satu di daerahnya. Di wajahnya cermin keteladanan dan kewibawaan (*gezag*) pemerintahan. Dia pemimpin penyelenggaraan pemerintahan provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat yang bertanggungjawab atas tata kelola pemerintahan yang baik dan mengawal segala kepentingan nasional.

Itulah sebabnya kalau ada "*arang tercoreng di keningnya*" seperti terkena ancaman pidana berat dan/atau melakukan perbuatan memecah belah NKRI, maka dia tidak boleh "memegang" pemerintahan sampai perkaranya selesai tuntas. Dengan begitu, pemerintahan "aman" dan yang bersangkutan bisa fokus mengurus kasus hukumnya. Jika nanti terbukti dia tidak bersalah (inkracht), presiden merehabilitasinya. Dia bisa diaktifkan kembali.

Bagaimana kalau dia sedang mencalonkan diri dalam pilkada? Hak politiknya untuk dipilih, memilih, dan berkampanye tidak gugur walaupun

menyandang predikat terdakwa. Malahan, kalau dia hebat sekali, dia bisa memenangkan pemilihan.

Dakwaan atau Tuntutan?

Kapan kepala daerah diberhentikan sementara? Norma di dalam pasal 83 ayat (1) UU Pemda No.23/2014 cukup jelas kepala daerah diberhentikan sementara ketika "didakwa" melakukan tidak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, bukan ketika dituntut jaksa atau divonis hakim.

Memang dalam pasal 30 ayat (1) UU Pemda terdahulu No.32/2004, khususnya pemberhentian sementara kepala daerah yang melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dilakukan setelah ada putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Tetapi, bagi yang melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda No.32/2004, mereka diberhentikan sementara ketika berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan (didakwa).

Di dalam UU Pemda yang baru No.23/2014 waktu pemberhentian sementara kepala daerah baik yang melakukan tindak pidana korupsi dan lain-lain, maupun tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, adalah ketika yang bersangkutan menjadi terdakwa yang dibuktikan dengan register perkara dari pengadilan. Jadi, UU Pemda No.23/2014 telah mengoreksi ketentuan pasal 30 ayat (1) UU Pemda No.32/2004, karena bila pemberhentian sementara kepala daerah menunggu vonis maka berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas kepala daerah.

Dalam kasus Gubernur DKI Ahok, pemerintah menghadapi kendala untuk mencopotnya sementara, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak tegas tetapi memakai dua alternatif. Pertama, pasal 156a KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Kedua, pasal 156 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.

Seingat saya, belum pernah ada dakwaan Jaksa terhadap kepala daerah seperti ini. Karena itu, pemerintah tampak bingung. Mendagri Tjahjo Kumolo mencoba meminta fatwa ke Mahkamah Agung, namun ditolak. Kebijakan pemerintah kemudian menunggu dibacakannya tuntutan. Bila tuntutannya 5 tahun barulah Gubernur Ahok diberhentikan sementara, tetapi jika kurang dari 5 tahun, maka dia tetap memimpin DKI Jakarta hingga akhir masa jabatannya 15 Oktober 2017.

Implikasi Politik

Empat fraksi dan sekitar 100 orang anggota DPR telah mengusulkan penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan terjadinya pelanggaran Pasal 83 ayat (1) UU Pemda No.23/2014 oleh Presiden, karena tidak memberhentikan sementara Gubernur Ahok.

Tentu saja tidak mudah menggolkan hak angket ini di DPR yang kekuatan mayoritasnya dikuasai oleh parpol pendukung pemerintah. Sebab untuk bisa diterima menjadi hak angket, harus disetujui oleh separoh plus satu anggota dewan yang hadir.

Ke depan, kalau ada revisi UU Pemda No.23/2014 sebaiknya pasal 83 ayat (1) diubah. Pertama, kalimat “paling singkat 5 tahun” diganti menjadi “5 tahun atau lebih”. Kedua, dibuat ayat (2) baru, apabila JPU mendakwa secara alternatif, maka pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilakukan setelah tuntutan dibacakan.

Djohermansyah Djohan, Dirjen OTDA Kemendagri (2010-2014)

REPUBLIKA, 20 Maret 2017

Untuk Apa Pilkada?

Pilkada Jakarta tahun 2017 adalah pilkada yang paling heboh dalam sejarahnya. Ketegangan pilkada ini merambat, melampaui batas Provinsi DKI, bergaung ke seluruh pelosok nusantara. Hampir semua orang merasa berkepentingan untuk menentukan hasil pilkada ini. Kenapa? Tentu banyak orang berdalih bahwa keriuhan ini bukan soal pilkada, melainkan soal dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, gubernur petahana yang kini bertarung dalam pilkada.

Jauh sebelum tuduhan penistaan itu ada, Ahok sudah ditolak oleh kelompok yang sama dengan yang memotori demonstrasi terhadap kasus pelecehan itu. Bahkan, sejak pilkada 2012, ketika Ahok dicalonkan sebagai wakil gubernur berpasangan dengan Jokowi, isu SARA sudah dimainkan untuk menghadangnya. Bagi saya soalnya sangat jelas, yaitu soal ego sebagian kaum muslim, yang tidak rela Jakarta dipimpin oleh non-muslim. Soal lain-lain hanyalah basa-basi untuk menutupi fakta itu belaka.

Hasilnya, pilkada Jakarta jauh dari perdebatan soal program kerja. Berbagai program kerja yang dipaparkan secara detil oleh Ahok-Djarot seperti menerpa ruang kosong. Orang-orang lebih tertarik untuk mencegah Ahok yang non-muslim menjadi gubernur lagi, ketimbang memikirkan bagaimana nasib pembangunan Jakarta 5 tahun lagi.

Karena alasan itulah maka pilkada di daerah lain jadi sepi dari sorotan. Tengoklah misalnya Pilkada Banten, yang bersebelahan dengan Jakarta. Meski kedua pasangan calon bersaing ketat, tak ada keriuhan yang berarti. Kenapa? Karena keduanya tak menyodorkan perbedaan apapun. Ini hanya pertarungan 2 politikus, yang sebenarnya pertarungan ulang dari pilkada sebelumnya. Rakyat disuruh memilih 2 pasangan yang entah apa bedanya. Bagaimana rakyat menentukan? Karena tak ada isu panas soal muslim dan non-muslim, parameter penentuan pilihan jadi sangat kabur. Pilihan akhirnya ditentukan berdasarkan gencarnya pendekatan selama kampanye, keterikatan emosional dengan pasangan calon, atau boleh jadi digiring oleh kekuatan politik uang.

Pilkada di daerah lain pun begitu pula adanya. Tanpa ideologi, tanpa program kerja. Hanya sedikit calon yang mampu menyodorkan program nyata untuk membangun. Kalau pun ada, belum tentu sanggup menarik perhatian pemilih.

Ada banyak kasus di mana janji-janji kampanye ternyata hanya janji kosong belaka. Akhirnya rakyat pun skeptis dengan tawaran program, karena toh setiap calon bisa menawarkan program yang manis yang indah.

Ada begitu banyak daerah dengan berbagai masalah pembangunan yang tak kunjung dibereskan. Pemimpin datang silih berganti, dipilih langsung melalui pilkada. Tapi tak pernah ada perubahan. Pemimpin yang terpilih kembali belum tentu karena rakyat puas dengan kinerjanya. Yang kalah juga

tak mesti kinerja atau tawaran programnya buruk. Karena pilkada kita memang bukan soal kinerja dan program.

Jadi, untuk apa pilkada? Pilkada hanyalah pekan raya, atau kompetisi bak piala dunia sepak bola. Kita ikut hura-huranya. Kita mendukung calon tertentu, sebagaimana kita mendukung tim sepak bola tertentu pada piala dunia. Ketika mereka menang kita bersorak, ketika kalah kita kecewa. Tapi itu hanya sejenak. Selepas itu, kita kembali pada hidup masing-masing. Pekan raya dan piala dunia tak punya efek terhadap hidup kita.

Jadi, ini salah siapa? Ya salah kita, sebagai pemilih. Pemilih masih belum sanggup merangkai hubungan yang nyata antara satu coblosan yang ia buat di bilik suara dengan perubahan dalam kehidupannya. Banyak yang belum paham soal itu. Ada pula yang sebenarnya paham, namun tetap lebih suka mengejar bagian hura-hura, mementingkan kepuasan emosi ketimbang menggunakan nalar.

Apa boleh buat, 5-10 tahun ke depan pilkada kita sebagian besar masih akan seperti ini. Tapi kita tidak boleh berhenti melakukan pendidikan politik untuk memperbaikinya.

Hasanudin Abdurakhman, Cendekiawan; Penulis

DETIKNEWS, 20 Maret 2017

Politik Identitas dalam Pilkada

Politik identitas tampak kembali menemukan momentum. Fenomena ini terjadi tak hanya dalam pilkada dan pemilu di Indonesia, tetapi juga di banyak negara berpenduduk majemuk, di mana kaum Muslim merupakan penduduk mayoritas atau jadi kelompok minoritas. Fenomena ini, misalnya, juga terungkap dalam penelitian Tufyal Choudhury (2007) tentang kebangkitan politik identitas di kalangan kaum Muslim Inggris. Dalam pengamatannya, sejak 1990-an terjadi peningkatan signifikan politik identitas di kalangan kaum Muslim.

Peningkatan politik identitas Islam itu tak jarang tumpang tindih dengan identitas etnis. Dalam kasus Inggris, politik identitas Islam tumpang tindih dengan etnisitas Pakistan atau Banglades yang berhadapan dengan hegemoni Anglo-Saxon. Gejala sama terlihat di Jerman. Politik identitas Islam tumpang tindih dengan etnisitas Turki.

Politik identitas Islam yang berpadu dengan etnisitas juga terlihat di Malaysia, seperti diwakili Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Partai Islam se-Malaysia (PAS). Hasil perpaduan politik itu adalah "*politik komunal*" sangat divisif dan sengit intra-Muslim dan antarumat berbeda.

Peningkatan agama sebagai politik identitas terjadi karena kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal. Politik identitas agama menguat, antara lain, karena meningkatnya semangat memegang Islam lebih ketat berhadapan dengan tantangan dan ancaman kebangkitan politik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, yang dianggap mengancam eksistensi, identitas, dan ekspresi keislaman Muslimin.

Fenomena politik identitas Islam bukan gejala baru di Indonesia. Sejak Pemilu 1955 sampai Pemilu Presiden 2014 dan pilkada sejak 2005 sampai pilkada serentak 2017, politik identitas Islam hampir selalu hadir.

Politik identitas agama sempat menyurut saat rezim Orde Baru menetapkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Semua ormas, termasuk parpol, wajib menggunakan asas tunggal Pancasila. Politik identitas bangkit kembali pada Orde Reformasi saat parpol dibenarkan mengganti asas Pancasila dengan agama sehingga parpol berasas Islam dan Kristen tampil kembali.

Namun, politik identitas Islam tidak pernah berjaya di Indonesia, baik di tingkat lokal maupun nasional. Penyebab pokoknya adalah watak Islam Indonesia yang inklusif dan akomodatif, intra dan antar-umat.

Masalahnya kini eskalasi politik identitas Islam akibat dibawanya isu teologis dan fikih ke dalam kontestasi politik partisan. Ini mengakibatkan peningkatan khilafiyah (pertikaian keagamaan) di kalangan Muslimin sendiri. Soal khilafiyah—apalagi terkait politik dan kekuasaan—menimbulkan tensi serta konflik intra dan antarumat.

Isu teologis, misalnya, terkait tuduhan ”*munafik*” atau ”*kafir*” dari sekelompok Muslim terhadap Muslim lain yang berbeda sikap dan posisi politik. Isu fikih, misalnya, terkait tentang memberikan suara pada calon non-Muslim dalam pilkada; paling kontroversial tentang boleh atau tidak menshalatkan orang Islam yang mencoblos calon non-Muslim.

Khilafiyah sektarianisme aliran di antara Muslimin sudah terjadi sejak masa pasca Nabi Muhammad SAW dengan munculnya berbagai aliran kalam (teologi), fikih, dan tasawuf. Sektarianisme aliran memburuk ketika terkait politik dan kekuasaan.

Gejala eskalasi politik identitas dengan khilafiyah sektarianisme religio-politik di Indonesia, beberapa waktu lalu, sempat terlihat dari adanya spanduk di beberapa masjid yang menyatakan masjid itu menolak menyelenggarakan shalat jenazah bagi jenazah yang pada masa hidupnya memberikan suara kepada pasangan calon tertentu di Pilkada DKI Jakarta. Entah siapa yang membuat, spanduk serupa juga sempat dipasang di ”jalan tikus”, pagar, dan tempat lainnya.

Mengerasnya politik identitas khilafiyah sektarian ini bukan sekadar pernyataan spanduk, melainkan menjadi aksi konkret. Ini terlihat dari penolakan menshalatkan jenazah Hindun binti Raisan (77) di mushala di dekat rumahnya, sekitar Setiabudi, Jakarta Selatan.

Nasib yang sama dialami jenazah Siti Rohbaniah (80) yang ditolak pengurus masjid di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jenazah almarhumah akhirnya dishalatkan setelah keluarga menandatangani pernyataan mendukung calon tertentu dalam Pilkada DKI Jakarta yang disodorkan ketua RT. Memang shalat jenazah tidak wajib dilakukan di masjid atau mushala. Jenazah bisa dishalatkan di rumah atau tempat lain yang bersih, suci, dan pantas sebagai tempat menyelenggarakan shalat umumnya.

Jelas sesuai ketentuan fikih, kaum Muslim wajib menyelenggarakan jenazah; memandikan, mengafani, menshalatkan, dan menguburkan. Wajib ini fardhu kifayah—sebagian Muslim wajib melakukan. Jika tidak, semuanya terkena dosa. Penolakan (pengurus) masjid atau mushala menshalatkan jenazah hanya karena alasan politik partisan tidak sesuai dengan ajaran Islam (fikih). Perbedaan sikap dan posisi politik semestinya tak jadi alasan untuk tidak menjalankan perintah wajib menyelenggarakan jenazah.

Kaum Muslim yang adalah bagian terbesar bangsa Indonesia semestinya tetap memelihara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah. Tak sebaliknya, hanya karena politik partisan dan kekuasaan merusak ketiga bentuk ukhuwah lewat aksi politik identitas khilafiyah sektarian dengan, misalnya, menolak ketentuan wajib memberikan kehormatan dan pemuliaan terakhir kepada jenazah.

Azyumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

KOMPAS, 21 Maret 2017

Perilaku Pemilih Pilkada DKI

Perdebatan perilaku pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017 kali ini sangat menarik. Tulisan Eep Saefulloh Fatah di kolom majalah Tempo edisi 12 Maret 2017 menggelitik karena menafikan dua teori utama dalam melihat pemilih DKI. Pemilih rasional sering terlalu disederhanakan sebagai pemilih yang menggunakan akal sehat dan diterjemahkan dalam pilkada ketika pemilih melihat kinerja sebagai basis pilihan. Politik aliran lebih melihat sekat-sekat kelompok, khususnya agama, sebagai salah satu penentu bagi pemilih di Indonesia.

Bisa dikatakan hasil putaran pertama pilkada DKI ini adalah imbang untuk kedua kerangka teori pemilih rasional versus politik aliran. Hasil putaran pertama menempatkan petahana Basuki Tjahaja Purnama dengan 43 persen suara dan penantangnya, Anies Baswedan, 40 persen. Ini menunjukkan bahwa dua teori tersebut mempunyai kekuatan penjelas tapi terbatas.

Ketika elektabilitas Ahok menukik tajam sampai di titik 20 persen sekitar November, alasan utama yang digarisbawahi adalah kasus penistaan agama yang menjerat Ahok ke dalam kasus hukum. Menariknya, setelah kasus penistaan tersebut masuk ke pengadilan, justru elektabilitas Ahok menanjak ke angka 30-an persen.

Dari kasus ini bisa dikatakan kurang akurat jika menggambarkan 400 ribu umat muslim yang turun dalam aksi 411 dan 212 semata marah karena agamanya dinistakan. Sebab, jika kemarahan itu demikian besar, elektabilitas Ahok pasti tidak akan mencapai 43 persen pada putaran pertama lantaran pemilih muslim di DKI Jakarta lebih dari 80 persen.

Besarnya demonstrasi pada dua tanggal tersebut merupakan konvergensi berbagai kepentingan politik yang memobilisasi massa. Seperti survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada populasi nasional: 60 persen responden menganggap Ahok menistakan Islam, tapi 80 persen lebih tidak tahu kasus tersebut secara detail. Di sisi lain, kenyataan bahwa Ahok hanya mendapat 43 persen suara, jauh di bawah tingkat kepuasan terhadap kinerjanya (70 persen), memang menunjukkan ada efek politik aliran tapi tetap diimbangi pemilih rasional.

Ini artinya, pemilih dalam pilkada DKI ada dalam dua konstruksi tersebut, tapi ada elemen ketiga yang lebih menjadi penentu. Inilah yang dalam literatur psikologi politik disebut sebagai affective intelligence voting, yakni peran emosi dalam menentukan pilihan di luar dari kognisi (kalkulasi rasional) dan identitas primordial semata.

Eep mungkin cukup benar ketika mengatakan pemilih Anies bukan hanya pemilih berdasarkan alasan primordial agama. Namun asersinya yang menyatakan hal tersebut adalah efek dari gagal paham inkumben dalam menangkap angin populisme bisa dikatakan kurang tepat.

Pertama, Eep bernalar bahwa populisme secara otomatis adalah kebijakan yang menjawab permasalahan masyarakat banyak. Populisme dalam

literatur politik adalah kemampuan pemimpin memobilisasi emosi warga (seperti Islamofobia Trump). Namun bukan berarti janji atau narasi populis adalah satu sikap yang positif bagi rakyat.

Kedua, Eep berasumsi berdasar exit poll Polmark bahwa hanya 9,4 persen yang memilih Anies karena alasan agama. Ia mengatakan, "*Ternyata tawaran janji kerja serta bukti kapasitas kandidat memainkan peran signifikan*." Hal ini merupakan asersi tanpa dasar. Seperti halnya tidak adil membandingkan Ahok dengan Anies berdasar kinerja karena yang satu inkumben dan satunya tidak mempunyai rekam jejak sebagai kepala daerah.

Bounded rationality (keterbatasan informasi, pendidikan, dan pengetahuan) dari para pemilih membuat pemilihan berdasarkan pilihan rasional sangat terbatas. Pemilih tidak memiliki cukup informasi akan janji kerja yang ada. Belum lagi, dalam debat sebelum putaran pertama, bisa dilihat semua kandidat berputar-putar menunjukkan kebolehan tanpa substansi yang bisa dibandingkan secara jelas.

Pada akhirnya, kerangka teori ketiga mungkin dapat menjelaskan perilaku pemilih rakyat Jakarta pada putaran pertama dan menjelang putaran kedua pada 19 April. Affective intelligence voting melihat variabel lain yang lebih mudah berubah dibanding kalkulasi rasional (pilihan rasional) atau identitas primordial. Ini adalah teori yang melihat psikologis pemilih yang terbentuk oleh nuansa kondisi sekitar, apakah membuat kecemasan (*anxiety*) atau antusias. Hal ini terlihat cukup jelas pada pendukung kedua belah pihak.

Dari kubu Ahok kelihatan sekali ada antusiasme besar yang kadang berlebihan, sementara sebagian pendukung Anies didasari kecemasan (pengaruh narasi hoax Cina menguasai dan pemimpin nonmuslim yang tidak sah). Pada akhirnya, yang menentukan siapa pemenang pada putaran kedua rasanya akan bertumpu pada pemilih dalam kerangka affective intelligence ini.

Pemilih tidak semata-mata mengkalkulasi pilihannya maupun terjebak identitas dalam pilihannya. Pemilih akan terpengaruh nuansa sosial dan politik serta perasaan terhadap kedua kandidat menjelang pemilihan. Faktor apakah yang akan menentukan nuansa dan psikologis tersebut? Itulah hal yang menarik dan perlu ditelusuri lebih lanjut oleh peneliti perilaku politik di Jakarta.

Tobias Basuki, Peneliti Centre for Strategic and International Studies

TEMPO.CO, 21 Maret 2017

Post-Truth Politician

Salah satu keyakinan yang berkembang di masyarakat terkait kehidupan politik adalah kebohongan berpotensi dilakukan oleh mereka yang tengah memiliki kekuasaan.

Saat ini kekuasaan sepenuhnya ada di tangan politisi, dan kebohongan demi kebohongan yang melanda publik tidak lepas dari sikap dan perilaku politisi itu. Kehidupan politik dan kebohongan mungkin menjadi tidak terelakkan. Keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang. Politisi yang andal adalah mereka yang mampu mengelak dengan cantik atas apa yang pernah dikatakannya dan mampu bersikap seolah-olah tidak bersalah, serta (hebatnya) selalu mampu kemudian muncul dalam posisi yang benar dan akhirnya menguntungkan secara politik.

Di sisi lain, jika seorang politisi terjebak berkali-kali dan akhirnya terjerat karena omongannya, bisa jadi dia belum cukup matang menjadi politisi atau terlalu polos untuk masuk dalam dunia politik. Meski demikian, kemampuan mengelak itu apa pun namanya tetap akarnya adalah kebohongan. Saat ini muncul fenomena yang kerap disebut sebagai posttruth politician.

Guardian, salah satu koran berpengaruh di Inggris, menggunakan istilah ini untuk memotret politisi yang gemar berbohong. Istilah itu sebenarnya berakar dari kata *post-truth* yang pertama kali digunakan oleh Steve Tesich sekitar lebih dari dua dekade lalu. Kata post-truth saat ini menjadi salah satu kata ikonik dan didaulat menjadi kata paling populer pada 2016 menurut Oxford Dictionaries.

Ini membuktikan bahwa fenomena ini bersifat mondial. Istilah post-truth itu sendiri dibuat untuk menandai sebuah situasi atau era di mana terdapat semakin banyak politisi yang dalam upayanya meyakinkan publik tidak jujur dalam berargumentasi. Alih-alih fokus pada sebuah pembelaan empiris, apalagi akademis, atas apa yang disampaikan ke publik, politisi era post-truth ini lebih suka bermain dengan fantasi yang membius publik.

Mereka juga amat peduli dengan upaya membangun citra, bukan melalui pertimbangan kebenaran atau objektivitas dan dengan cara-cara yang berlebihan. Politisi model ini gemar mengutak-atik emosi publik dengan kata-kata yang sepintas masuk akal, menggugah semangat, kadang menakut-nakuti (scaremongering), membuat terpukau, terheran-heran, hingga merasa larut dalam semangat pembelaan kepada figur atau partai tertentu, yang sebenarnya bersifat fatamorgana.

Fenomena ini dilihat dari substansinya bukanlah barang baru dan terus terjadi hingga kini. Ini sudah ada mulai sejak Adolf Hitler dengan lebenstraum dan antisemitisme untuk mendukung proyek fasismenya hingga Boris Johnson dengan soal 350 juta poundsterling perminggu defisit untuk menyerang Uni Eropa sekaligus promosi atas Brexitnya. Sebagian lainnya mengaitkan fenomena ini dengan apa yang terjadi saat Pemilihan Presiden

AS terakhir. Semua itu melakukan permainan ilusi dan fantasi untuk meraih simpati dan kemenangan.

Bagaimana dengan Indonesia

Pada masa lalu politisi di Tanah Air cenderung mengutarakan idealismenya dengan pembelaan-pembelaan argumen yang bersifat ideologis, bahkan akademis, kerap disertai data-data empiris. Lihat dan cermatilah berbagai surat kabar, majalah, atau selebaran-selebaran yang dikeluarkan oleh partai-partai atau politisi era demokrasi liberal. Saling-silang dan saling serang demikian ramai dan membahana.

Pukul-memukul dalam konteks kata-kata, opini, dan wacana menjadi hal yang biasa. Meski terselip di sana-sini salah paham atau pengaburan makna, bahkan mungkin juga halusinasi, penyampaian argumen pada umumnya disandarkan pada aspek-aspek empiris atau setidaknya dugaan-dugaan yang bersifat akademis induktif.

Yang pasti, saat itu tidak banyak hoax meski bukan berarti dunia politik tidak pula diisi oleh canda dan perumpamaanperumpamaan yang jenaka baik untuk menyerang lawan atau membela diri. Fenomena ini tidak mengherankan terjadi karena beberapa hal.

Pertama, elite politik masa itu kebanyakan tokoh intelektual dan ideologi yang terbiasa kritis, lugas, dan berbicara secara empiris.

Dengan karakternya ini, meski kerap bercampur dengan kepentingan politik, sikap untuk melakukan pembelaan yang berlebihlebihan dan tidak pada tempatnya bukan merupakan pilihan utama mereka.

Kedua, kesadaran kebangsaan mereka demikian tinggi yang disertai keinginan amat kuat untuk membimbing anak bangsa. Itulah mengapa mereka disebut sebagai bapak bangsa plus negarawan.

Dalam nuansa ini niatan membohongi publik bukanlah selera kebanyakan politisi saat itu. Sebisa mungkin mereka menjaga marwah untuk tetap menjaga kepercayaan publik. Namun, saat ini prinsip the end justifies the mean menjadi hal yang lumrah. Kebohongan dan penipuan menjadi makin menjamur. Seseorang dapat lompat pada posisi yang berbeda secara diametrikal dalam hitungan bulan atau bahkan minggu saja.

Tidak hanya itu, mereka juga tidak ragu untuk mengerahkan semua sumber daya baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan sumber daya yang haram untuk membantu pembenaran katakata, sikap, dan tentu saja kemenangan politik. Padahal, kita tahu kebanyakan substansi dan prosesi pembelaan itu sebenarnya hanya ketoprak humor.

Tidak ada lagi rasa malu apalagi penghargaan atas pentingnya mewariskan kepercayaan kepada generasi mendatang akan pentingnya kehidupan politik yang bermartabat. Dalam nuansa ini, tidak heran jika kebohongan publik meluas yang tercermin dari maraknya hoax. Tidak itu saja, nilainilai dasar

yang selama ini dihormati dan telah membawa banyak manfaat ikut diguncang demi sekadar memenangkan sebuah argumen.

Sejalan dengan itu, kesantunan dan moralitas berpolitik menjadi barang langka. Dan, hal lain yang juga menyedihkan adalah politisi terjebak dalam nuansa homo homini lupus yang sama sekali tidak mencerahkan. Hal yang menyebabkan bangsa ini tidak saja semakin miskin akan ide-ide politik yang bernas, namun juga telah masuk dalam gerbang masamasa kegelapan.

Bisa jadi ini semua juga disebabkan oleh jaring-jaring kekuasaan dan kepentingan eksklusif yang menggiurkan, utang politik yang menggurita dan sulit terbayar, hingga masyarakat kebanyakan yang tidak mandiri atau peduli politik, hingga justru mudah termanipulasi. Semua ini sungguh tantangan yang berat bagi bangsa untuk dapat membebaskan diri dari model post-truth politician. Meski demikian, apakah memang semua politisi kita itu gemar dan canggih berbohong? Tentu saja tidak.

Sebagaimana yang terjadi pada masa lalu, saat ini masih ada figur-figur yang bermental negarawan dan politisi yang punya rasa malu cukup tebal. Sayangnya, pengaruh mereka saat ini masih belum signifikan. Kita nantikan kapan mereka semua dapat mengambil alih kehidupan politik bangsa. Agar bangsa ini dapat terbebas dari kehidupan politik yang makin terasa sesak oleh asap dagelan politik yang penuh dengan kedegilan ini.

Firman Noor, Peneliti Pusat Penelitian Politik-LIPI;

KORAN SINDO, 23 Maret 2017

Para Perusak Demokrasi

Musuh demokrasi yang sedang kita hadapi sebenarnya bukanlah pihak asing yang dengan sengaja merusak, menggerogoti, dan kemudian merobohkan demokrasi. Mereka tidak lain adalah anggota keluarga bangsa ini yang telah tega memakan bangkai saudaranya sendiri: para koruptor. Mereka adalah perusak sendi-sendi demokrasi yang bisa menghancurkan dan menenggelamkan NKRI, bukan orang lain. Ironisnya, para koruptor adalah mereka yang terlalu bebal terhadap cara-cara busuk yang ditempuh para pendahulu mereka. Lebih tepatnya, mereka tidak mengambil pelajaran dari jalan hidup para koruptor sebelumnya. Akibatnya, jalan cerita korupsi di negeri ini cenderung repetitif, copy-paste, dan tidak kreatif.

Daur Ulang Korupsi

Di negeri ini tindakan korupsi hampir selalu mengambil bentuk, pola, dan modus yang sama: korupsi politik. Dibandingkan dengan korupsi konvensional, korupsi politik paling banyak dilakukan di sektor pelayanan publik. Dalam konteks ini, kasus korupsi KTP elektronik yang menimbulkan kerugian negara Rp 2,3 triliun merupakan contoh korupsi di sektor pelayanan publik dimaksud. Transparansi Internasional dalam Laporan Korupsi Global tahun 2004 mendefinisikan korupsi politik sebagai *the abuse of entrusted power by political leaders for private gain*.

> *Dalam rezim demokrasi, korupsi kerap terjadi karena "transkrip demokrasi" telah dikhianati, yakni ketika prinsip-prinsip demokrasi seperti akuntabilitas dan transparansi publik telah dikebiri* (Philp, 1997: 438).

Di Indonesia, korupsi politik telah menjangkiti semua lembaga negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam melakukan kejahatan korupsi, para koruptor hampir selalu melakukannya secara "berjemaah". Dari semua lembaga negara yang ada, hanya KPK yang masih steril dan menjadi tumpuan terakhir bangsa ini untuk menghadang laju korupsi.

Oleh karena itu, korupsi di era demokrasi tidak mungkin dilakukan oleh rakyat secara perseorangan, partikelir, atau terpisah dari konteks politik-kekuasaan. Rakyat justru lebih banyak menjadi korban atau tumbal dari mata rantai siklikal kejahatan ko- rupsi "berjemaah" tersebut. Mengapa? Karena korupsi politik dapat dipastikan akan menggerus dan mendegradasi kualitas layanan publik yang harus diterima oleh rakyat dalam bentuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, dan semacamnya. Dengan demikian, korupsi politik tidak mungkin dilakukan di luar struktur ekonomi-politik yang ada.

Dalam konteks ini, memahami perilaku korupsi di kalangan elite politik dalam perspektif Darwinian menjadi imperatif. Konsekuensinya, seorang elite politik, betapa bersih pun dia, niscaya akan melakukan korupsi karena dorongan struktur yang bersifat koersif secara berantai untuk memenuhi tuntutan struktur politik yang korup.

Dalam derajat tertentu, bisa saja tindakan korupsi merupakan bentuk strategi mekanisme pertahanan diri seorang koruptor untuk menghadapi kontestasi dan kompetisi politik. Dengan kata lain, para koruptor adalah ”penyintas politik” yang bisa dipahami dalam konteksnya sebagai bagian dari sebuah sistem atau struktur besar yang korup.

Di era demokrasi, pola dan modus korupsi semestinya semakin canggih, subtil, dan kompleks. Kenyataannya, para koruptor di negeri ini tidak mau belajar dari sejarah sehingga mereka mereplikasi jalan korupsi para pendahulu mereka. Akibatnya, modus pembocoran APBN hampir pasti selalu berulang. Mereka selalu beraksi di setiap proyek besar nasional. Proyek-proyek tersebut selalu melahirkan wajah-wajah baru koruptor di kemudian hari. Modusnya pun hampir selalu sama: penggelembungan anggaran, pengadaan barang fiktif, hingga jual beli hukum.

Saya yakin para koruptor bukan tidak menyadari sepenuhnya akibat dan dampak buruk perilaku mereka. Mereka pasti tahu bahwa jalan yang ditempuh dapat mengantarkan mereka dan bangsa ini ke jurang kehancuran. Namun, kekuatan struktur korupsi yang sistemik telanjur mengatasi dan melumpuhkan kapasitas individu-individu yang bersih. Akibatnya, kapasitas diri seorang koruptor tidak kuasa di hadapan kekuatan struktur besar yang mengerdilkan mereka. Hati nurani menjadi buta, akal budi menjadi tumpul. Hasrat hidup bersih terkalahkan oleh solidaritas korupsi ”berjemaah” tersebut.

Memartabatkan Demokrasi

Dalam konteks relasi antara demokrasi dan korupsi, tidak ada satu pun ilmuwan yang meniscayakan absennya hubungan di antara keduanya. Demokrasi dan korupsi berhubungan dalam pengertiannya yang negatif dan kontradiktif; keduanya saling menegasikan. Korupsi adalah antitesis demokrasi. Korupsi dapat menggerogoti dan merontokkan rezim demokrasi (lihat Warren, 2004; Johnston, 2005; Rock, 2009).

Yang perlu digarisbawahi, korupsi di lingkungan semua lembaga negara merupakan kejahatan ganda; menikam kepercayaan rakyat sekaligus membunuh mereka pelan-pelan. Kasus-kasus besar korupsi yang terungkap belakangan ini semestinya menyadarkan semua elemen bangsa ini, terutama para elite politik, untuk mampu mengidentifikasi dan mewaspadai bagaimana jebakan atau jerat-jerat korupsi bekerja.

Memartabatkan demokrasi dalam pengertiannya yang in optima forma merupakan satu-satunya kata kunci yang dapat menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran akibat korupsi. Namun, jangan salah, dengan memartabatkan demokrasi, kita tidak sedang memberhalakan demokrasi. Mengapa? Karena demokrasi bukanlah tujuan, melainkan alat mencapai tujuan. Maksud dari ungkapan tersebut adalah: hanya dengan memartabatkan demokrasi, kita akan memartabatkan semua elemen bangsa, terutama rakyat sebagai satu-satunya pemangku kepentingan republik ini.

Mendekonstruksi budaya politik bangsa ke arah budaya politik yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan sebuah keniscayaan jika kita hendak memartabatkan demokrasi. Persoalannya, bagaimana mungkin kita bisa membangun budaya politik demikian di tengah kepungan struktur ekonomi-politik yang korup? Itulah tantangan sekaligus rintangan pertama sebelum kita membangun budaya politik yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Upaya memartabatkan demokrasi, dengan demikian, meniscayakan dua langkah sekaligus: top-down dan bottom-up. Di tingkat atas, sudah saatnya para elite dan parpol memelopori pola hidup bersih, transparan, dan akuntabel. Mereka jangan lagi melihat realitas APBN yang dikucurkan lewat kementerian sebagai sumber pendanaan kegiatan politik karena penjarahan APBN yang dilakukan hari ini pasti—sekali lagi, pasti!—akan terkuak di kemudian hari. Sementara itu, di tingkat akar rumput, rakyat jangan diajari untuk menerima politik uang, terutama menjelang pemilu dan pilkada.

Di sisi lain, rakyat harus kritis terhadap sumbangan dari elite politik dalam bentuk apa pun karena pada ujungnya para elite harus mencari gantinya dari sumber-sumber keuangan negara (baca: APBN). Politik uang yang diterima rakyat sebenarnya merupakan panjar yang dapat menunda dan menggadaikan kesejahteraan mereka sendiri. Hanya dengan kedua cara itu, demokrasi akan dapat memuliakan tuannya: kita semua. Semoga!

Masdar Hilmy, Guru Besar Ilmu-ilmu Sosial UIN Sunan Ampel, Surabaya

KOMPAS, 24 Maret 2017

Mencegah Kebablasan Demokrasi

Sulit rasanya menolak fakta bahwa lembaran demokrasi kita hari ini cenderung bergerak secara liar ke arah kebebasan dan begitu lamban bergerak pada area kesejahteraan. Demokrasi saat ini juga cenderung memberikan tekanan pembangunan pada lapis negara, tetapi pada saat yang sama gagal melakukan internalisasi nilai dan kultur demokrasi yang berkeadaban pada level massa. Akibatnya, gerakan ekspresif tetapi kental anarkistis menjadi fenomena lazim dalam perjalanan demokrasi saat ini. Trayek demokrasi pun saat ini dapat dikatakan seolah hanya terfokus pada kebebasan, tetapi abai terhadap kesejahteraan. Akibatnya, sulit menutup mata untuk tidak melihat masih banyaknya kaum proletar bertebaran di bumi pertiwi Indonesia.

Hakikat Demokrasi

Padahal, hakikat demokrasi menurut Amartya Sen (2009) adalah: (1) terdorongnya fungsi pembangun dalam pembentukan nilai-nilai; dan (2) pentingnya hakikat kehidupan manusia (kesejahteraan). Demokrasi Indonesia seharusnya dapat diarahkan pada kedua hakikat tersebut.

Sesungguhnya, banyak negara yang bisa dijadikan cermin untuk mengubah kompas demokrasi yang dianggap kebablasan saat ini dan dapat diorbitkan pada kesejahteraan. Republik Rakyat China adalah salah satu negara yang sukses membawa nilai demokrasi ke taraf kesejahteraan yang lebih baik. Malah, saat ini China merupakan negara yang bisa dikatakan makmur jika dibandingkan dengan negara-negara komunisme lainnya.

Di sisi lain, contoh negara yang gagal mewujudkan nilai demokrasi ke arah kesejahteraan jumlahnya tidak sedikit. Negara di Amerika Latin, seperti Argentina, dan Afrika Timur, seperti Mozambik, bisa menjadi representasi bahwa ketika pintu demokrasi dibuka, yang terjadi adalah kekacauan politik, kerusuhan horizontal antarwarga negara, perang saudara, kerusuhan etnis, dan lain-lain.

Mengonversi Watak

Kunci keberhasilan China dalam mengonversi watak demokrasi yang seakan liar adalah dengan membangun internalisasi atas nilai dan kultur demokrasi secara kontinu pada lapisan massa. Sementara negara yang gagal justru menyuburkan demokrasi hanya pada lapis kebebasan dan elitis.

Berkaca pada praktik negara di atas, agar dalam menapaki demokrasi tidak memunculkan antitesis terhadap demokrasi itu sendiri, pemaknaan terhadap demokrasi tidak semata pada hadirnya proses liberalisasi politik dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga hadirnya norma-norma politik berkeadaban. Kemudian, euforia demokrasi yang merupakan ciri dalam transisi demokrasi juga harus segera diakhiri. Membiarkan fase transisi tanpa kenal waktu justru hanya akan mendogma masyarakat pada apatisme politik. Hal ini jelas berdampak negatif karena akan memicu titik balik demokrasi yang selama ini sudah dibangun dengan susah payah.

Titik balik demokrasi, bagaimanapun, adalah tahap yang amat menyakitkan. Selain memberikan beban pada ongkos sejarah yang mahal, juga dapat membawa bernegara ke arah terowongan labirin yang berliku dan amat gelap.

Hak dan Kewajiban

Tidak kalah pentingnya dalam mencegah demokrasi yang kebablasan, maka perwujudan antara hak dan kewajiban yang berimbang harus menjadi prioritas dalam bernegara. Pemerintah bersama jaringan organisasi non-pemerintah secara proaktif bekerja mendampingi masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh hak dan menunaikan kewajibannya secara seimbang. Artinya, ketika masyarakat sudah menentukan pilihannya, dalam hal bisa disebut sebagai hak, mereka sekaligus akan diikat oleh suatu kewajiban.

Suatu kewajiban yang menjadikan setiap warga negara secara relatif akan memperoleh peluang yang sama dalam menikmati kesejahteraan. Oleh karena itu, tahap ini merupakan tahap yang ditandai dengan kesejahteraan sosial yang semakin meluas. Inilah yang sesungguhnya disebut hakikat demokrasi.

Hakikat demokrasi adalah mengantarkan suatu bangsa untuk dapat menikmati kesejahteraan sosial.

Hindari "Demoriter"

Meski demikian, penting untuk menjadi catatan bahwa mewujudkan kesejahteraan dalam demokrasi jangan sampai terjebak pada rezim demoriter (bentuk demokratis, tetapi isinya otoriter). Dengan jaminan kesejahteraan yang diberikan, rakyat tidak mempermasalahkan apakah negara tersebut menjadi demokratis atau tidak. Guna menghindarinya, partisipasi dan ekspresi politik tetap diberikan dengan cara dilepaskan secara perlahan-lahan. Kemudian, masyarakat juga harus belajar dan diajarkan tentang konsep demokrasi sebelum mereka menerapkan demokrasi. Akhirnya, masalah demokrasi bagi negara Indonesia yang saat ini dianggap kebablasan, ujungnya harus berpulang pada sebuah pertanyaan klasik: demokrasi itu menjadi tujuan atau sekadar menjadi sarana?

Secara ideal, demokrasi adalah sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, jika nilai dan kultur demokrasi mampu diinternalisasikan ke dalam semua lapisan, demokrasi yang mencipta kesejahteraan merupakan sebuah keniscayaan untuk diwujudkan.

Semoga.

Ali Rido, Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

KOMPAS, 25 Maret 2017

Relevansi Makar pada Era Reformasi

SEDIKITNYA 10 tokoh aktivis ditangkap dan ditahan kepolisian sehari sebelum aksi demo besar-besaran 2 Desember (212) berlangsung. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan, penangkapan mereka terkait dugaan makar dengan menunggani aksi demo 212.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, penangkapan para aktivis atas tuduhan makar bukan perkara main-main. Sebab, sesuai KUHP, hukumannya bisa sampai hukuman mati. Sebaliknya, kalangan dari DPR menuding bahwa tuduhan makar itu hanya mengada-ada. Sri Bintang Pamungkas, salah seorang tokoh yang ditangkap, berkilah kelompoknya hanya ingin menyerahkan semacam petisi kepada pimpinan MPR, mendesak MPR segera menggelar sidang istimewa untuk menjatuhkan pemerintah Jokowi karena berbagai alasan.

Bukankah tindakan seperti itu masuk ranah makar?

Secara sederhana, makar adalah upaya terorganisasi dari kekuatan politik tertentu untuk menjatuhkan/menggulingkan pemerintahan yang konstitusional. Makar beda dengan revolusi. Oxford Dictionary mendefinisikan revolusi *''A forcible overthrow of a government or social order, in favour of a new system''*. Gerakan (bisa dengan kekerasan, bisa juga secara damai) untuk mengganti sebuah pemerintahan yang sah atau mengubah sistem pemerintahan. Sedangkan makar dilakukan secara ''kasak-kusuk'', penuh kerahasiaan, dan intrik-intrik antara sejumlah kekuatan politik. Makar bisa juga dilancarkan, biasanya digerakkan, oleh koalisi berbagai kekuatan politik dengan mengandalkan kekuatan massa.

Revolusi bisa berlangsung dengan kekerasan, bisa juga secara damai. Aksi rakyat Filipina menjatuhkan rezim Marcos pada 22–25 Februari 1986 di bawah kepemimpinan Corazon Aquino adalah revolusi (damai). Revolusi Rakyat (*People Power Revolution*) tentu didahului aksi-aksi menggoyang pemerintahan Marcos yang dipicu pembunuhan Senator Aquino karena ketakutan Marcos bahwa kekuatan populer Senator Aquino dapat menumbangkan kekuasaannya. Aksi-aksi unjuk rasa massa di hampir semua kota besar Mesir yang dimulai pada 25 Januari 2011 merupakan sebuah revolusi juga. Puncak aksi People Poweritu terjadi ketika kerumunan massa ratusan ribu bergerak dan berorasi diTahrir Square (Kairo) pada 8 Februari 2011. Revolusi selama 18 hari itu berhasil memaksa Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri.

Bagaimana dengan gerakan mahasiswa menjatuhkan rezim Orde Baru pada Mei 1998? Revolusi atau makar?

Pernyataan Jenderal Tito Karnavian ketika itu banyak ditanggapi secara sinis. Mana ada lagi relevansi berbicara tentang makar pada era reformasi atau era demokrasi sekarang? Bukankah konstitusi kita (khususnya pasal 2 UUD 1945) mengatur secara jelas bagaimana presiden dan/atau wapres

dijatuhkan. Di luar mekanisme itu, upaya menjatuhkan presiden dan/atau wapres ''tidak ada ceritanya'' alias bullshit!

Politik, apa?

Hendaknya semua pihak menyadari betul apa sesungguhnya politik itu.

Politik adalah *the art of the possibility*, seni berkemungkinan. Dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Sebaliknya, yang mungkin bisa jadi tidak mungkin. Itulah politik! Maka, permainan politik adakalanya susah ''setengah mati'' untuk diprediksi, banyak liku-liku, banyak intrik. Yang kawan bisa jadi lawan, yang sebetulnya teman tiba-tiba bisa berubah menohok kita dari belakang.

Secara konstitusional, pintu untuk menjatuhkan presiden/pemerintah digembok kuat oleh UUD 1945. Namun, di luar mekanisme konstitusional, tetap saja terbuka peluang untuk menjatuhkan pemerintah. Karena ini urusan politik, dan dalam politik tidak ada yang mustahil.

Tuduhan makar yang dilontarkan pimpinan Polri, menurut hemat saya, berdasar data intelijen yang kuat. Dan, orang-orang intelijen membuat analisis demikian, antara lain, berdasar persepsi. Dalam sosiologi dan ilmu komunikasi diajarkan bahwa manusia berpikir, berpandangan, dan bertindak, terutama, berdasar persepsi.

Pada kasus aksi 411, penyelenggara demo menjamin demo akan berlangsung tertib dan damai. Tujuannya hanya satu: memproses dan menahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena tuduhan menghina agama Islam. Mereka juga sudah membuat kesepakatan dengan pihak Polri bahwa demo akan berlangsung sampai pukul 18.00, lokasi unjuk rasa di depan Istana, dan sekitarnya. Namun realitasnya, aksi menjurus anarkistis, dan ada aksi bakar-bakaran (meski lokal) di Jalan Merdeka Barat. Dan, di daerah Jakarta Utara tiba-tiba meledak aksi penjarahan. Sebagian aksi unjuk rasa berlangsung hingga pukul 3–4 pagi, sebagian massa berkumpul di gedung DPR/MPR, menolak membubarkan diri sebelum bertemu dan berdialog bersama pimpinan DPR dan MPR. Bukankah pemandangan ini bisa dipersepsikan mirip dengan situasi di gedung DPR/MPR menjelang jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto?

Semua kejadian tersebut benar-benar di luar skenario yang disepakati. Semua itu, tentu, mengundang persepsi negatif di benak para pimpinan Polri, TNI, dan aparat intelijen. Ada apa sesungguhnya? Maka, keluarlah ucapan Presiden Jokowi pada 5 November sekitar pukul 00.30. *''Tapi, kita menyesalkan kejadian bakda isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi*.''

Terkait aksi 212, pagi hari 2 Desember 2016, masyarakat melihat Kapolri Tito tampil di layar televisi. Menurut Kapolri Tito dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, ada laporan intelijen yang menunjukkan demo

anti-Ahok 2 Desember 2016 telah disusupi aktor-aktor yang ingin makar atas pemerintahan yang sah. Strategi mereka: menduduki gedung DPR/MPR.

Di luar persepsi (negatif) yang ada di benak pimpinan penegak hukum dan intelijen, ada juga kondisi subjektif dan objektif yang dapat menimbulkan kecurigaan bakal terjadinya makar. Belakangan ini cukup banyak berita yang menggambarkan sisi negatif pemerintahan Jokowi-JK. Misalnya, kesenjangan ekonomi yang makin lebar, daya beli rakyat yang menurun, dan utang luar negeri yang kian membengkak. Memang pemerintah yang baru berumur 2,5 tahun mustahil bisa mengerjakan semua PR warisan yang begitu berat.

Mengenai kondisi subjektif, sampai hari ini tampaknya masih ada pihak-pihak yang kalah dalam Pilpres 2014 yang masih tidak legawa menerima kekalahannya. Beberapa politikus dan anggota DPR tetap saja sangat vokal. Praktis, kebijakan apa pun yang diambil pemerintah selalu dikritik, bahkan dikecam.

Seorang politikus Prancis Jean Monnet (1988) pernah mengatakan: tujuan politisi memang selalu mengejar kekuasaan. Untuk apa kekuasaan dan bagaimana memecahkan permasalahan bangsa tidak jarang dilupakan. Nah, demi menggapai kekuasaan, bisa saja politisi menempuh cara apa pun, termasuk mengabaikan ketentuan konstitusi sebagaimana diajarkan oleh Antonio Machavelli.

Tjipta Lesmana, Pengamat Politik; Anggota Komisi Konstitusi MPR 2004

JAWA POS, 25 Maret 2017

Lubang Hitam Populisme

Akhir-akhir ini, narasi populisme diperbicangkan banyak kalangan. Bahkan, di beberapa negara maju seperti daratan Eropa, populisme menjadi semacam "*hantu sosial*" yang dianggap merusak peradaban dunia. Kekhawatiran terhadap bercokolnya populisme pun dirasakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. Dalam pidato pertama di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia di Geneva, Swiss (27/2/2017), Guterres menyampaikan bahwa "kita semakin sering menyaksikan fenomena negatif populisme dan ekstremisme yang saling mendukung, menyuburkan rasisme, xenophobia, anti semitisme dan bentuk lain toleransi".

Berbagai kegelisahan massal tentang populisme yang mulai tumbuh di sejumlah negara dan aksi penolakan yang dilakukan oleh banyak pihak seperti yang terjadi di Belanda, Perancis, dan Jerman untuk mengadang populisme menyelipkan pertanyaan penting, mengapa populisme serasa menakutkan?

Corak Otoritarianisme

Dalam peradaban Islam, populisme merupakan fenomena sosial yang sudah berlangsung sejak beberapa abad lalu. Karya Ibnu Khaldun yang berjudul Muqaddimah memberikan penjelasan tentang ashabiyah—yang konstruksi sosialnya senada dengan populisme—yang terjadi di lingkungan orang Arab kala itu. Secara sosiologis, Ibnu Khaldun menguraikan ashabiyah sebagai kerangka persaudaraan yang dibangun berdasarkan kelompok. Dalam kelompok yang bernuansa kesukuan menjadi ruang kohesivitas untuk membangun ikatan sosial antarindividu yang ada di dalamnya.

Akan tetapi, lazimnya bangunan sosial dalam kesukuan, yang terjadi justru perilaku otoritarianisme. Apalagi, corak antropologi bangsa Arab yang berbasis kesukuan memang mengedepankan kesetiaan dan fanatisme buta terhadap ketua sukunya. Ruang ashabiyah yang terbangun dalam kultur Arab adalah kelompok yang kuat dapat mendominasi kelompok yang lemah.

Dalam peradaban Barat pun, populisme mengalami pola yang hampir sama di mana nuansa ikatannya berbasis kepada pengunggulan golongan tertentu sembari disertai intrik untuk mengenyampingkan pihak lain. Setidaknya, peristiwa Nazi yang dipimpin oleh Hitler menjadi salah satu puncak sarkasme bagaimana populisme digunakan sebagai gerakan politik yang otoritarian untuk mengganyang orang-orang Yahudi.

Bahkan, di negara tetangga kita sendiri, berdasarkan kajian Anne Muro-kua dalam buku Authoritarian Populism in Malaysia menunjukkan potret sosial yang serupa di mana pengabaian hak asasi yang terjadi di Malaysia adalah efek dari populisme yang bercorak otoritarian.

Sekian peristiwa sejarah yang terjadi di sejumlah negara itu semakin meneguhkan keyakinan banyak pihak bahwa populisme dalam wajah yang negatif telah menjadi arena tanding untuk menyuburkan otoritarianisme. Secara satirik, kita bisa menganggap bahwa populisme negatif yang

berlangsung otoriter lamatlamat bermetamorfosis sebagai lubang hitam (*black hole*) yang mampu menghentikan kebenaran akal sehat.

Aura negatif populisme—seperti yang diekspresikan oleh Donald Trump—menjadi penanda pula bagaimana semangat kebersamaan, egalitarianisme, dan kosmopolitanisme lamat-lamat tersekap dalam lubang hitam kebijakan rasialnya yang memicu tumbuh-suburnya sikap intoleransi. Dalam Event Horizon—sebuah batas tak bisa melarikan diri—yang menjadi bagian intrinsik dalam lubang hitam, populisme negatif menjadi virus pengabaian hak asasi manusia yang dilakukan oleh Trump.

Apalagi, model kepemimpinan Trump yang ditampilkan di muka publik lebih mengedepankan corak otoritarianismenya.

Corak Konservatisme

Fenomena populisme yang terjadi di banyak negara menjuntai pula di Indonesia. Dalam amatan F Budi Hardiman yang ditulis di Kompas berjudul "*Gerakan Murka dalam Demokrasi*" (2/3/2017) ada gambaran bahwa gerakan populisme di negara ini disertai penguatan konservatisme berbasis agama tertentu. Hal ini bisa dicermati pada fenomena sosial keberagamaan yang akhir-akhir ini mencuat ke permukaan di mana konservatisme mulai melibatkan diri ke dalam arena populisme. Bahkan, dengan ciri eksklusivismenya, konservatisme diam-diam banyak dirujuk oleh sekelompok umat beragama untuk dijadikan sebagai titik masuk "pensalehan diri" (*self pietism*).

Terlebih lagi dalam momentum politik, konservatisme dijadikan instrumen untuk mendulang barisan massa pendukung. Dengan mengacu pada nilai-nilai keagamaan yang dianut secara fundamental-tradisional, nuansa konservatisme diwarnai oleh semangat populisme dengan membatasi keberpihakannya hanya kepada seseorang dan kelompok yang sealiran. Bahkan, secara ekstrem, pembingkaian konservatisme dan populisme dilokalisasi sebagai strategi untuk mengunggulkan seseorang yang sedang terlibat dalam politik praktis.

Implikasinya, perjalinan konservatisme dan populisme melahirkan sebuah kekuatan tersendiri untuk mengucilkan siapa pun yang dianggap bukan pendukungnya. Berbagai modus pengucilan ditampakkan ke permukaan meskipun cara-cara yang digunakan kurang beradab. Di antara contohnya adalah pengucilan terhadap sekelompok orang yang bukan pendukungnya dengan cara tidak boleh menshalatkan jenazah orang-orang tersebut di sebuah masjid yang sudah dikooptasi oleh pihak-pihak tertentu.

Dari potret ini, kita pun mulai menyadari betapa konservatisme yang berkelindan dengan populisme sudah sedemikian banal ketika melibatkan diri dalam arena perpolitikan. Praktik-praktik demikian itu sesungguhnya sudah mencemari wajah agama yang sejatinya adalah menjadi jalan untuk perdamaian dan persatuan.

Padahal, disadari atau tidak, sesungguhnya sikap populisme yang demikian akan melahirkan perilaku ambivalensi. Di saat perilaku keagamaan kaum konservatif yang kesalehan individualnya cukup mumpuni, tetapi perilakunya selalu menuai kegaduhan, sentimen, dan kerentanan sosial, sesungguhnya memicu sebuah kebatilan sosial.

Konservatisme Agama dan Agresivitas

Dalam sebuah kebatilan sosial, kaum populis-konservatif cenderung melansir berbagai riwayat, mengutip pandangan seseorang yang ditokohkan, dan bahkan kutipan-kutipan ayat secara parsial, tetapi justru banyak diarahkan ke muatan pesan negatif yang memicu kebencian dan permusuhan terhadap kelompok lain. Dengan demikian, jika bangunan agama digunakan sebagai jalan "saling menegasi", benar apa yang diuraikan Donny Gahral Adian dalam tulisannya "*Konservatisme dan Pilkada*" (Kompas, 21/2/2017) bahwa konservatisme agama akan melahirkan kecenderungan agresivitas yang dimainkan masing-masing kelompok yang beraliran populisme dan berpeluang melahirkan konflik horizontal yang akan membahayakan sendi-sendi kebangsaan kita.

Agama yang sejatinya menjadi ruang refleksi diri (*self reflection*) untuk menciptakan kemaslahatan bersama oleh kelompok populis-konservatis justru dijadikan sebagai pengingkaran diri dengan cara membajak ajarannya untuk kepentingan tertentu. Pada titik ini, lubang hitam populisme kian menunjukkan Event Horizon untuk menyekap siapa pun yang rajin merajut konsolidasi kebangsaan, melakukan restorasi keumatan, dan dialog antaragama. Sebab, kelompok populis-konservatif selalu mengonstruksi agama sebagai instrumen otoritarianisme dalam melansir dukung-mendukung yang tidak beradab.

Fathorrahman Ghufron, Wakil Katib Syuriyah PWNU;

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

KOMPAS, 27 Maret 2017

Nihilisme Moralitas Bermedia

Hari ini kian jarang orang mempermasalahkan pemilik media yang berpolitik atau menggunakan medianya untuk tujuan-tujuan politik. Barangkali orang sudah lelah mempersoalkannya dan ternyata tak ada perubahan signifikan.

Bisa jadi standar moral menilai praktik itu telah berubah sehingga semua orang makin permisif dan menganggapnya sebagai kewajaran, sebagaimana dewasa ini orang makin toleran terhadap praktik jurnalisme amplop.

Pada aras ini cukup beralasan menyatakan bahwa dunia media kita sedang mengarah pada nihilisme, suatu keadaan ketika tiada lagi standar etika dan moralitas yang otoritatif mampu tegak-berdiri sebagai sandaran bagi kehidupan bermedia secara keseluruhan. Nihilisme yang ditandai dengan repetisipelanggaran etika atau hukum media yang, alih-alih ditangani dengan konsekuen, justru semakin dianggap sebagai kewajaran, bahkan jadi pola perilaku bersama.

Pertanda lain adalah semakin banalnya pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan media. Hari ini begitu mudah menemukan berita yang tak berimbang, tanpa verifikasi, atau melanggar asas praduga tak bersalah. Begitu mudah pula kita menemukan berita dengan judul yang tidak menggambarkan isi, bombastis, atau menghakimi. Begitu mudah orang mendirikan media atau menjadi wartawan tanpa pemahaman komprehensif tentang jurnalisme dan bagaimana jurnalisme mesti dijalankan.

Jurnalisme seperti berhenti sebagai disiplin yang menuntut ortodoksi, konsistensi, serta distingsi diri dalam penerapan metode kerja dan standar moral. Jurnalisme hari ini juga semakin kurang membuat orang segan dan menaruh respek karena begitu lazim dipraktikkan secara main-main.

Akibatnya, orang semakin sulit membedakan berita, informasi, dan spekulasi. Yang gosip dianggap berita, yang berita justru dianggap gosip. Orang juga sulit membedakan mana media yang kredibel, independen, profesional, dan mana yang sebaliknya. Istilah hoax yang sering diterjemahkan sebagai berita bohong dan fakenews yang dimengerti sebagai berita palsu semakin memperparah kekaburan.

Bagaimana kita memahami istilah berita bohong atau berita palsu jika di dalam pengertian berita secara epistemologis selalu tertanam pengandaian tentang *check and recheck*, uji kebenaran informasi,disiplin verifikasi? Logikanya, yang masih mengandung kebohongan atau kepalsuan jelas belum layak disebut berita.

Tugas jurnalisme adalah menyeleksi, mengolah, dan memfalsifikasi informasi, data, gosip, desas-desus sedemikian rupa sehingga menghasilkan formula yang layak dikonsumsi publik, yakni berita. Jurnalisme menjadi terhormat dan menyandang status ”isme” karena kemampuannya memilah-milah mana yang bohong mana yang jujur, mana yang palsu mana yang asli.

Mewabah

Celakanya, kekaburan dan kebingungan ini mewabah. Bukan hanya orang awam, melainkan juga kaum terdidik, kelas menengah, kalangan pemerintahan, bahkan pelaku media sendiri mengalami kekaburan batas-batas antara yang berita dan bukan berita. Beberapa media bahkan konon mendasarkan pemberitaannya pada hoax dan fakenews.

Dalam situasi yang nihilistis seperti ini, siapa yang diuntungkan? Pelaku media sepertinya diuntungkan. Mendirikan media semakin mudah, menjadi wartawan juga semakin mudah. Pelanggaran hukum dan etika media terjadi begitu bebas tanpa ada konsekuensi serius bagi pelakunya. Para pengambil kebijakan, penegak aturan, masyarakat, dan pelaku media semakin toleran terhadap pelanggaran tersebut.

Akan tetapi, dengan menurunkan standar moralitas dan profesionalismenya, media konvensional sebenarnya justru sedang memasuki perangkap kompetitor barunya: media sosial. Seperti digambarkan David Levy, Direktur The Reuters Institute for the Study of Journalism, Universitas Oxford, media konvensional terpacu menjalankan genre jurnalisme yang mengejar kecepatan, aktualitas, sensasionalitas, dan interaktivitas dalam arena pacuan yang sedemikian dikuasai media sosial. Media konvensional terpancing menurunkan standar etika dan profesionalisme sebagai strategi mempertahankan hidup di dalam lanskap komunikasi-informasi baru yang sesungguhnya merupakan habitat alami dari kompetitornya.

Sekali lagi perlu ditegaskan, ruang bermedia yang melonggarkan etika berkomunikasi dan moralitas ruang publik adalah ruang hidup media sosial.Jenis media baru yang tak terdefinisikan menurut etika dan regulasi media komunikasi, tetapi hadir sebagai kekuatan raksasa digital yang mengubahlanskap ekonomi-politik media global ataupun nasional.

Semua aturan dan norma media komunikasi seperti tak berlaku untuk mereka. Mereka tak membayar pajak seperti media konvensional harus membayar pajak untuk pendapatan iklan yang diterima. Mereka turut menyebarluaskan hoax dan memonetisasi penyebarluasan hoax, tetapi tidak harus bertanggung jawab terhadap dampak negatif hoax. Bandingkan dengan setiap berita media konvensional yang harus dipertanggungjawabkan secara etis atau hukum jika mengandung kesalahan!

Media sosial juga tak mengenal ideologi apa pun kecuali kapitalisme. Seperti digambarkan Evgeny Morozov dalam tulisan berjudul "*Moral panic over fake news hides the real enemy—the digital giants*" (The Guardian, 8/1/2017), untuk media sosial, tak penting siapa yang menjadi Presiden Amerika Serikat dan apa dampak keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Bagi media sosial, yang penting adalah kontroversi-kontroversi politik meningkatkan akses dan diskusi di media sosial sedemikian rupa sehingga berkorelasi dengan peningkatan harga saham dan pendapatan perusahaan media sosial.

Kembali ke Esensi

Menghadapi media sosial dengan karakter tak terperikan itu, media konvensional semestinya kembali kepada ciri distingtifnya: kemampuan menyajikan informasi yang berkualitas dan mencerahkan. Masyarakat yang jengah dengan diskusi di media sosial yang konfliktual dan memecah-belah sebagian akan kembali ke media konvensional.

Di AS dan beberapa negara Eropa, gejala ini sudah mulai mengemuka. Persoalannya, bagaimana kita membayangkan terjadinya media consumption reborn ini jika media konvensional ternyata tak jauh beda dengan media sosial, sama-sama konfliktual dan memecah belah. Bagaimana bisa menarik kembali minat masyarakat jika media konvensional cenderung menjadi *follower* media sosial dalam menyajikan kebohongan dan kepalsuan?

Gejala media *consumption reborn* menunjukkan masyarakat masih butuhinformasi atau berita berkualitas. Yang perlu dilakukan media konvensionaljelas bukan mengikuti arus dan kecenderungan media sosial, melainkan sebaliknya: menampilkan hal yang lebih baik, mendalam, dan substansial. Seperti yang telah dikatakan para pakar, strategi untuk mempertahankan diri di era nihilisme moralitas bermedia dewasa ini adalah kembali pada esensi jurnalisme yang bermutu dan mencerahkan masyarakat.

Agus Sudibyo, Pendiri Indonesia New Media Watch

KOMPAS, 27 Maret 2017

Ke Mana Negara Mengembara?

Mengungkapkan kegalauan terhadap fenomena ancaman intoleransi, yang secara sadar dan sengaja diinternalisasikan kepada bocah usia amat dini, Oom Pasikom melukis karikatur kepala bocah plontos diinjeksi dengan serum "*anti-keberagaman*". Akibatnya, si bocah menjadi puyeng dan ndleming (mengigau): "*SARA, intoleran, demi kekuasaan*, dll". Di bawah tertulis: "*Virus telah meracuni anak-anak kita*!" (Kompas, 1 April 2017).

Karikatur tersebut mewakili persepsi publik bahwa proses menegara dengan pilar nilai-nilai keindonesiaan yang memuliakan keragaman telah keropos karena saraf otak yang merawat ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dimangsa oleh virus anti-keberagaman. Generasi muda yang sudah ditanami virus anti-keberagaman dapat dipastikan akan mudah digerakkan oleh motif-motif primordial dan instingtual demi kepentingan kekuasaan.

Kelumpuhan pusat saraf sentral negara mengakibatkan negara akan mengembara tanpa tujuan jelas. Negara berjalan limbung dan sangat mudah dikendalikan para elite penguasa untuk memuaskan dorongan angkara murkanya. Konstatasi ini bukan paranoid karena simtom-simtom amat nyata. Misalnya, megakorupsi KTP elektronik yang melibatkan petinggi negara, upaya kalangan anggota DPR menggalang kekuatan untuk menolak kandidat komisioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Badan Pengawas Pemilu karena ingin memasukkan unsur partai di lembaga independen, mengulur-ulur waktu penyelesaian RUU Pemilu, perdebatan hanya disibukkan dengan tawar-menawar ambang batas kursi di parlemen dan pencalonan presiden, upaya konsisten pelemahan KPK, anggota Dewan Perwakilan Daerah berbondong-bondong menjadi anggota partai politik, dan sebagainya.

Saraf sentral negara yang sudah dimangsa racun anti-toleransi mematikan nurani penyelenggaranya. Dalam cakrawala konstitusional, Pasal 1 Ayat (1), yang menegaskan: "*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik*", mendapat ancaman yang serius. Konsensus para pendiri negara merumuskan negara berbentuk republik menunjukkan para pendiri negara dan penyusun konstitusi paham sekali prinsip Republikanisme.

Hidup bersama hanya mungkin diwujudkan jika semua diurus oleh semua. Kehidupan bersama adalah urusan bersama (*Res-publica*, artinya 'public issue' atau *'public matter'*). Intinya, negara mengurus kepentingan bersama. Gagasan Republikanisme yang berkembang ribuan tahun yang lalu melahirkan ide yang disebut kontrak sosial. Mulai dari Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, hingga JJ Rousseau mempunyai paham dan keyakinan sama bahwa kehidupan masyarakat plural hanya dapat diwujudkan dengan nilai-nilai hasil konsensus bersama.

Oleh karena itu, toleransi, hak-hak pribadi, dan kebebasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip dasar Republikanisme. Kesepakatan itu dilembagakan dalam kontrak sosial yang menghasilkan negara dengan tugas

utama mewujudkan kesejahteraan umum, menjamin kerukunan, kebebasan, dan keanekaragaman. Negara dilarang memonopoli kebenaran, moralitas, serta nilai-nilai utama (*virtue*).

Peringatan

Fenomena ancaman serius terhadap konstitusi tersebut tampaknya menyengat Presiden Joko Widodo. Ia secara sekilas menyebutkan agar persoalan politik dipisahkan dengan agama (Kompas.com, 24 Maret 2017). Kebiasaan Presiden Joko Widodo mengungkapkan kalimat yang singkat sudah menjadi pemahaman umum sehingga publik tidak menafsirkan ucapan tersebut secara berlebihan. Namun, secara esensial, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar negara tidak dibiarkan "mengembara" tanpa tengara dan penanda. Arah bangsa menegara telah mulai jauh melenceng dari nilai-nilai mulia yang menjadi acuan bersama, Pancasila. Kegaduhan wacana bernuansa atau nyata-nyata SARA telah menyuburkan kebencian dan permusuhan masyarakat pada titik yang berbahaya. Jika gejala ini dibiarkan tanpa perlawanan, konstitusi hanya menjadi huruf mati. Partisipasi rakyat dalam kontestasi politik hanya menjadi agregat angka mati, bukan kumpulan pribadi-pribadi yang secara adikodrati mempunyai hati dan aspirasi.

Peringatan atau pepeling Presiden Joko Widodo menjadi amat penting karena dia ingin memicu atau mengaktifkan kembali obat penawar atau serum kekebalan yang berada di tubuh bangsa untuk melawan virus anti-keberagaman yang telah disuntikkan kepada anak-anak. Harapan tersebut tidak berlebihan mengingat rasa keprihatinan tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, dan lain-lain mempunyai persepsi yang sama.

Mereka juga mempunyai tingkat keprihatinan yang setara. Apabila virus anti-toleransi dibiarkan berkembang biak dalam otak anak-anak muda, ia akan meluluhlantakkan negara yang sudah dibangun dengan darah, nyawa, serta derita. Karena itu, pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin yang mempertanyakan urgensi gelar aksi 313 merupakan tanda aksi-aksi yang bernuansa SARA sudah sampai tingkat yang membahayakan bangsa dan negara.

Sejalan dengan peringatan Presiden Joko Widodo serta isyarat dari para ulama besar, kompetisi politik putaran kedua Pilkada DKI Jakarta harus lebih mengutamakan nilai-nilai yang semakin memperkukuh nilai-nilai kebersamaan. Berbekal kekebalan tubuh bangsa, pengembaraan negara akan tegak lurus mewujudkan cita-cita bangsa dengan semakin meresapi nilai-nilai Pancasila.

J Kristiadi, Peneliti Senior CSIS

KOMPAS, 04 April 2017

Ahok dan Kepemimpinan Islami

Dalam sebuah acara halaqoh kaum muda NU Jakarta bertema Pilkada: Kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945 beberapa waktu lalu, KH Ishomudin menyatakan pemimpin sekarang harus bisa dipercaya dan mampu membawa kemajuan. Kriteria tersebut bisa didapat dari seorang muslim maupun nonmuslim. Sebab, keduanya sama-sama mempunyai hak menjadi pemimpin. Demikian pula hasil halaqoh bahtsul masail GP Anshor (11–12 Maret 2017) yang menyatakan berdasarkan konstitusi, siapa pun berhak memilih dan dipilih dalam sebuah pemilihan daerah. Maka, bila yang terpilih nonmuslim sekalipun, adalah sah menurut agama dan negara. Siapa pun tidak bisa menolaknya.

Lalu, bagaimana bila pandangan tersebut dikaitkan dengan posisi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini tengah mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta, namun selalu dipersoalkan kelompok agama tertentu. Hal ini bisa dilihat kerasnya sekelompok umat beragama yang menolaknya disertai berbagai adagium agama yang menegaskan bahwa Indonesia hanya pantas dipimpin orang Islam. Mereka melansir berbagai ayat dan riwayat sebagai alat legitimasi untuk menekan Ahok.

Padahal, jejak rekam kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur Jakarta selama beberapa tahun menggantikan Jokowi yang terpilih sebagai Presiden menunjukkan kesesuaian ekspektasi masyarakat Jakarta yang merindukan pemimpin amanah. Hal ini bisa dicermati dari berbagai terobosan Ahok dalam mengelola administrasi kepemerintahan Jakarta secara transparan dan akuntabel. Dia juga berani menindak sikap despotik berbagai aparat dan oknum yang menyalahgunakan kekuasaan. Dia pun bersedia merumuskan kebijakan yang bisa diakses masyarakat luas dan mengubah pola kepemimpinan horizontal sehingga siapa pun yang memenuhi syarat, bisa tampil di pucuk pimpinan.

Di samping itu, sikap amanah yang dimanifestasikan Ahok dapat dicermati pula pada komitmennya dalam menjalankan karakter kepemimpinan yang berani dan bernyali. Dia tidak memperjualbelikan jabatan untuk kepentingan dirinya. Dia tidak takut ancaman sekelompok orang yang dapat merugikan orang banyak. Kesediaannya mematuhi aturan konstitusi yang menjadi ajaran hidup bernegara. Dia juga tegas dalam menghadapi segala macam ancaman kelompok masyarakat yang memiliki muatan kepentingan tertentu.

Oase

Dengan demikian, sesungguhnya kehadiran Ahok menjadi oase bagi masyarakat Jakarta yang merindukan pemimpin berani merombak struktur dan kultur kepemerintahan yang selama ini menjadi benalu bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ahok mengekspresikan naluri kekuatan berupa profesionalisme dalam menyajikan berbagai aturan dan peraturan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Tidak heran bila di berbagai kesempatan, dia selalu tegas dan teguh dalam menyampaikan sikap

politiknya untuk menjalankan kekuasaan guna meningkatkan kesejahteraan warga. Dalam kaitan ini, berbagai performa Ahok dalam menjalankan jabatan secara amanah, akuntabel, transparan, dan jujur tersebut dapat dikategorikan sebagai model kepemimpinan islami. Sebab, secara substantif, prinsip kepemimpinan islami harus mampu melahirkan kebijakan berdasarkan kepentingan rakyat. Dalam akidah fikih disebut tasharraful imam 'ala ar ro'iyah manuthun bil maslahah.

Dalam sebuah forum diskusi, KH Malik Madani (Katib 'Am PBNU periode 2010–2015) memaparkan pandangan tentang ukhuwah islamiyah dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sangat bernas. Secara epistemologis, ukhuwah islamiyah adalah persaudaraan berdasarkan nilai-nilai Islam. dia tak sekadar meniscayakan hubungan persaudaraan dengan sesama umat Islam saja, tetapi dengan setiap manusia, meskipun berbeda keyakinan dan agama. Landasannya nilai-nilai saling menghormati dan menghargai.

Paparan KH Malik Madani menggambarkan hal serupa. Artinya, bisa jadi pula kepemimpinan islami tidak hanya mengacu pada semangat lahiriah yang hanya berkutat soal identitas keislaman. Dia juga mengacu pada nilai-nilai spirit dan ajaran dalam Islam seperti dapat dipercaya, cakap menyampaikan gagasan, amanah, dan jujur. Ini diimplementasikan dalam setiap laku kepemimpinannya.

Berdasarkan kontekstualisasi nilai-nilai tersebut, tidak terlalu berlebihan bila dalam salah satu survei tentang negara paling islami yang dilakukan akademisi di George Washington University menyebutkan, Selandia Baru sebagai role model terdepan dalam mengembankan nilai-nilai kehidupan islami. Selandia Baru berhasil menerapkan nilai-nilai, seperti keadilan, penghargaan, dan menjunjung hak asasi manusia.

Ini artinya, tantangan terbesar bagi Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim harus mampu menempatkan diri secara rasional dan proporsional dalam memperlakukan sikap islami agar berdampak bagi keadilan masyarakat. Pemimpin harus mengacu pada nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad, bukan berhenti pada status agama an sich.

Apalagi, dalam konteks negara yang penduduknya terdiri dari aneka ragam latar belakang ideologi, agama, etnik, dan golongan tentu tidak patut mengedepankan egoisme kelompok untuk menobatkan pemimpin yang sesuai emosi keyakinannya, sementara unsur keyakinan lain selalu ditampik hanya karena dominasi mayoritas.

Dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang intinya secara analogis dapat diasumsikan menyiratkan sebuah pesan senada bahwa bisa jadi Jakarta yang di dalamnya penuh persoalan struktur kepemerintahan yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, kultur masyarakat yang susah diatur, birokrasi rente yang menyuburkan korupsi dan kolusi, sesungguhnya kehadiran Ahok dalam bursa calon gubernur Jakarta menjadi salah satu

keniscayaan untuk menjadi pemimpin. Dia berpeluang menciptakan perbaikan dan membawa kemajuan.

Pengalaman ini setidaknya menjadi pelajaran kita semua, siapa pun yang memenuhi kualifikasi dan sesuai dengan konstitusi negara berhak menjadi pemimpin yang kultur masyarakatnya sangat beragam. Pernyataan KH Ishomudin dan GP Anshor tadi gagasan rasional yang dapat diterima semua orang. Roh keindonesiaannya dibangun berdasarkan spirit kewarganegaraan yang inklusif dan tidak menonjolkan spirit keumatan eksklusif.

Fathorrahman Ghufron, Dosen Kewarganegaraan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta

KORAN JAKARTA, 17 April 2017

Pilkada Jakarta 2017: Kalau Ahok atau Anies Menang

Jakarta melaksanakan pemilihan kepala daerah hari ini. Sekitar 6,9 juta penduduk Jakarta akan memilih salah satu dari dua pasangan calon pemimpinnya: Ahok-Djarot atau Anies-Sandi. Tapi yang sibuk bukan hanya penduduk Jakarta, praktis seluruh penjuru negeri seperti "terlibat" pilkada Jakarta ini.

Siapa pun yang menang, sejarah mencatat pilkada 2017 ini sebagai salah satu yang tergolong buruk sepanjang sejarah pemilihan di Jakarta. Isu agama dan ras secara memualkan dieksploitasi menjadi alat untuk menyerang lawan politik. Keluarga, grup pertemanan, komunitas kantor, semua terbelah mengikuti pilihan politik. Suap merajalela, dan tidak seorang pun berani mengatakan kedua pasangan bebas dari cacat dan cela ini.

Sedihnya, yang diperdebatkan bukan program kedua pasangan, tapi stempel yang dilekatkan paksa pada kedua pasangan. Maka yang terdengar di mana-mana: pilih Ahok itu dosa karena dia "kafir" dan menista agama, pilih Anies itu menyuburkan radikalisme dan mengembalikan Orde Baru karena dia dirangkul Rizieq serta Cendana.

Adu program yang sebenarnya terjadi, paling tidak pada saat debat, seakan-akan tidak lagi mempengaruhi pilihan di Tempat Pemungutan Suara pagi ini. Saya setuju dengan pendapat ini: siapapun yang menang, ketegangan tidak akan segera pergi dari Jakarta. Perbedaan ini akan lama mengendap, butuh usaha yang kuat dan jujur dari sang pemenang untuk mengakomodasi yang kalah. Bila tak ditangani serius, kelompok kalah akan tetap bertahan sebagai "*kelompok penolak*", resisten terhadap semua program, apatis, bahkan mungkin destruktif -- semua sikap yang sangat menghambat pemenang untuk membangun Jakarta.

Tapi lebih baik kita tidak berkutat pada yang sudah ditunjukkan Ahok atau Anies selama ini, tapi membayangkan Jakarta (dan Indonesia) yang kita impikan untuk masa mendatang ini.

Yang kita impikan adalah Jakarta yang bebas korupsi dan pungli. Kota yang menjadi cerminan praktek demokrasi kita. Kota yang menjunjung keberagaman atau pluralisme. Kota di mana kesetaraan warganya di mata hukum menjadi contoh bagi kota lain. Kota yang memberikan peluang ekonomi yang proporsional bagi warga. Kota yang adil bagi semua penghuninya, kota yang nyaman dihuni. Kota di mana pemimpinnya mau mendengar warganya, mau mendengar kritik, mau berembuk, berunding demi kebaikan bersama. Kota dengan pemimpin yang bersih dari korupsi.

Dengan Anggaran Daerah lebih dari Rp 70 triliun, tuntutan itu rasanya sangat masuk akal. Pemimpin Jakarta perlu memiliki standar kompetensi dan standar moral yang sangat tinggi. Pemimpin yang siap menerima yang kalah dalam barisannya.

Bagaimana kalau Ahok menang? Apakah dia mampu memenuhi semua impian ini? Ahok jelas memiliki kinerja yang baik sejak dia menggantikan

Jokowi pada November 2014 lalu. Semua program dia jalankan dengan lugas, keras, dengan ketegasan yang luar biasa. Bicaranya blak-blakan, pedas, dan sengaja ia unggah rapat2 yang pedas dengan staf-nya itu di You Tube. Para pegawai DKI yang korupsi dia sikat habis.

Jakarta jelas berubah, warga merasakan perubahan positif itu. Kepuasan warganya pada kerja Ahok tidak diragukan. Seharusnya dengan semua itu Ahok melenggang menang di putaran pertama. Tapi fakta menyatakan dia tidak dipilih mutlak oleh warga yang dilayaninya itu. Sebagian besar warga Jakarta pasti puas akan kerja Ahok, tapi mereka banyak yang tidak memilih Ahok di TPS.

Apa yang terjadi sebenarnya? Tentu tak ada jawaban pasti atas "keterbelahan" sikap warga Jakarta ini. Saya menduga-duga dengan pertanyaan sederhana ini: kalau tidak ada kasus Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu itu, apakah Ahok akan menang satu putaran? Saya yakin jawabannya adalah: YA. Artinya, kerja bagus Ahok seperti dilupakan ketika dia menyinggung hal paling sensitif dalam pandangan sebagian warga Jakarta: soal agama. Saya termasuk yang tidak percaya Ahok menista agama dengan ucapannya di Kepulauan Seribu itu, tapi ingatlah bahwa tidak semua orang tidak percaya. Banyak yang yakin penistaan terjadi, banyak yang "dipaksa" yakin oleh lawan politik Ahok.

Begitu kuatnya keyakinan penistaan itu dipompakan sampai-sampai menghanguskan semua hal baik yang sudah ditebar Ahok. Pendukung Ahok mungkin beranggapan: panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Tidak saya pungkiri, barangkali sebagian kecil warga masih ada yang beranggapan "*tidak mau memilih keturunan Tionghoa*" -- seperti juga sebagian yang lain "*menolak memilih keturunan Arab*".

Maka, tantangan Ahok kalau ia terpilih adalah mengubah gaya kepemimpinannya. Gaya otoriter yang ia pakai selama ini sudah terbukti membuatnya harus tertatih-tatih melewati putaran kedua. Ini indikator yang jujur, tidak semua warga suka dengan *style* "*suka-suka gue*" yang ia jalankan. Ia mesti lebih sabar, termasuk menerima kritik dari lingkungan yang bukan teman-temannya. Ahok perlu paham, bahwa wartawan yang mengkritik itu bukan musuh (tidak perlu juga diusir dari Balaikota), dan kritik itu tidak berbahaya. Ia tidak perlu sesabar Jokowi dengan makan siang lebih 50 kali sebelum memindahkan pedagang pasar, tapi gaya buldozer hanya akan menuai problem yang tidak perlu datang kalau ia sedikit bersabar.

Tantangan terbesar Ahok tentu saja memberesi reklamasi. Ini tidak hanya menyangkut perizinan, tapi perlakuan terhadap investor raksasa seperti Aguan yang sudah menanam triliunan rupiah di sana versus keprihatinan nelayan dan para penggiat lingkungan hidup. Kebijakan apapun yang diambil Ahok kelak kalau ia menang, akan menunjukkan ke mana ia berpihak, maka semoga ia berhasil meniti buih.

Bagaimana kalau Anies menang? Anies terlempar dari kabinet Jokowi. Orang banyak bilang, itu lantaran Anies kelak bisa jadi kuda hitam pada

pemilihan presiden 2019. Tapi tak sedikit yang mengatakan bahwa kinerjanya tidak kinclong sebagai menteri pendidikan. Ia tidak pernah memimpin birokrasi yang besar, maka banyak yang ragu apakah Anies sanggup mengatasi birokrasi DKI yang luas itu. Ia memang pernah bergiat di KPK, tapi banyak yang meragukan apakah ia seberani Ahok untuk memberantas korupsi di birokrasi Jakarta.

Lalu soal radikalisme. Kunjungan Anies ke markas FPI di Petamburan membawa kesan bahwa ia kelak sulit bersikap tegas kepada kelompok garis keras itu. Memang tidak adil menimpakan meningkatnya radikalisme belakangan ini pada Anies seorang, tapi justru itu tantangan paling besar kalau Anies terpilih. Akankah dia sanggup mengatasi ulah kelompok-kelompok garis keras yang sekarang mendukungnya ketika ada masalah nantinya. Orang menunggu dengan cemas sikap Anies terhadap aksi sweeping, arak-arakan bermotor kelompok kupluk putih, atau razia ke tempat-tempat hiburan yang selama ini kerap mereka lakukan.

Orang juga akan menakar Anies dari hubungannya dengan Cendana, kalau ia menang kelak. Banyak yang bilang, membawa-bawa aspirasi Orde Baru bukanlah inspirasi yang baik bagi pemimpin yang bekerja demi masa depan, termasuk masa depan Jakarta. Jakarta merupakan etalase negeri, termasuk dalam membangun hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Kepemimpinan searah, yang tidak menumbuhkan partisipasi luas seperti dipertontonkan Orba, bukanlah contoh yang hubungan pemimpin-rakyat yang mesti dibangun di Jakarta.

Anies mesti membuktikan diri kelak bebas dari pengaruh Cendana ini dalam menjalankan kepemimpinannya, dan ini tidak akan mudah. Banyak orang menyayangkan Anies yang seperti tidak pandai menutupi ambisi politiknya, untuk pada suatu hari sampai ke Istana. Ia dinilai kurang sabar, terburu-buru memutuskan meniti "jembatan" menuju kursi tertinggi Republik itu dengan ikut berlomba merebut Balaikota DKI.

Ia baru 47 tahun pada bulan Mei ini –lebih muda daripada Ahok yang 50 tahun. Sikap yang dianggap terburu-buru ini membuat Anies seperti ingin cepat-cepat meraih dukungan dari mana saja, tanpa perduli pada platform yang selama ini ia tunjukkan: sebagai orang yang moderat, toleran, punya visi masa depan yang baik. Maka, Anies punya pekerjaan besar sesungguhnya, kalau ia rela berkunjung ke markas FPI Petamburan, bagaimana ia akan menunjukkan pada orang bahwa ia bukan bagian ide penyebaran agama versi kelompok itu. Bagaimana ia akan meredakan perbedaan di Jakarta yang terbelah akibat "*doa bersama massal*" yang sekarang justru dipuja-puja banyak orang dan seperti "*diaminkan*" Anies. Jakarta memerlukan tokoh pluralis yang bisa menjaga dan merawat kebhinekaan ini, demi masa depan bersama yang lebih baik.

Begitu pilkada selesai, Anies sudah tak bisa lagi berakrobat politik demi mendulang suara –kalau ia menang. Banyak orang menunggu, sikapnya yang menerima terbuka dukungan kelompok keras ini sikap yang temporer

selama pilkada atau sikap permanen. Anies tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan pidato dan retorika, ia harus menjawabnya dengan tindakan dan program.

Kalau Anies menang, bagaimana dia akan menyamai prestasi kerja Ahok. Ini yang paling memeras keringat. Mengeruk sungai, membangun jalan layang, membangun apartemen murah, kartu Jakarta sehat, kartu Jakarta pintar, itu hanya sebagian yang mesti Anies kejar. Tidak akan mudah, apalagi dengan pengalamannya yang minim dalam birokrasi kota.

Anies menolak reklamasi. Tapi bagaimana ia akan menyelesaikan triliunan rupiah yang sudah ditanamkan di sana. Ia tidak bisa hanya berpikir kepentingan nelayan atau penggiat lingkungan, tapi juga jalan keluar yang win-win bagi pengusaha yang sudah kadung mengucurkan duit besar. Tidak mudah, perlu pikiran bjak dan terobosan berpikir yang tidak biasa.

Ahok dan Anies bukan pemimpin ideal untuk tugas besar memimpin Jakarta yang saya dan mungkin kita semua impikan. Tapi mereka berdua layak diberi kesempatan. Layak untuk tidak mendapat stigma yang salah: bahwa memilih Ahok itu "*dosa*", memilih Anies itu menyuburkan yang "*radikal*".

Saya tidak memilih Ahok. Saya memilih bukan Anies. Saya memilih Rano Karno. Dan kalah.

Toriq Hadad, Wartawan Senior TEMPO

INDONESIANA, 19 April 2017

Investigasi Allan Nairn : Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar

Laporan aslinya dirilis pertama kali di The Intercept berjudul: "*Trump's Indonesian Allies in Bed with ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected President*"

Rekan-rekan Donald Trump di Indonesia telah bergabung bersama para tentara dan preman jalanan yang terindikasi berhubungan dengan ISIS dalam sebuah kampanye yang tujuan akhirnya menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Menurut beberapa tokoh senior dan perwira militer dan intelijen yang terlibat dalam aksi yang mereka sebut sebagai "*makar*", gerakan melawan Presiden Jokowi diorkestrasi dari belakang layar oleh beberapa jenderal aktif dan pensiunan.

Pendukung utama gerakan makar ini termasuk Fadli Zon, Wakil Ketua DPR-RI dan salah satu penyokong politik Donald Trump; dan Hary Tanoesoedibjo, rekan bisnis Trump yang membangun dua Trump Resort, satu di Bali dan satu di dekat Jakarta (di Lido, Jawa Barat).

Laporan tentang gerakan menjatuhkan Presiden Jokowi ini disusun berdasarkan sejumlah wawancara dan dilengkapi dokumen dari internal tentara, kepolisian, dan intelijen yang saya baca dan peroleh di Indonesia, juga dokumen Badan Keamanan Nasional AS (NSA) yang dibocorkan Edward Snowden. Banyak sumber dari dua belah pihak yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya. Dua dari mereka mengungkapkan kekhawatiran atas keselamatan mereka.

Usaha Makar

Protes besar-besaran muncul menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017. Mereka menuntut petahana Gubernur Jakarta Basuki "*Ahok*" Tjahaja Purnama dipenjara atas tuduhan penistaan agama. Dengan pendanaan yang baik dan terorganisir, demonstrasi berhasil mengumpulkan ratusan ribu di jalanan Jakarta.

Dalam perbincangan dengan tokoh-tokoh kunci gerakan perlawanan terhadap Ahok, diketahui kasus penistaan agama ini hanya dalih untuk tujuan yang lebih besar: menyingkirkan Joko Widodo dan mencegah tentara diadili atas peristiwa pembantaian sipil 1965—pembunuhan massal oleh militer Indonesia dan didukung pemerintah AS. Aktor utama dalam 'serangan pembuka' yang berperan sebagai penyuara dan pendesak adalah Front Pembela Islam (FPI), yang diketuai Rizieq Shihab. Bersama Rizieq, dalam rantai komando, ada juru bicara dan Ketua Bidang Keorganisasian FPI, Munarman, serta Fadli Zon.

Munarman, yang sempat terekam hadir dalam pembaiatan massal kepada ISIS dan Abu Bakar al-Baghdadi, adalah pengacara yang bekerja untuk Freeport McMoran, yang saat ini dikendalikan oleh Carl Icahn, sahabat Donald Trump. Meski koneksi Trump tampak penting dalam plot makar ini,

belum diketahui apakah Trump atau Icahn punya hubungan langsung. Sementara Munarman tidak menanggapi permintaan komentar untuk artikel ini.

Arsip Edward Snowden menyimpan banyak dokumen terkait FPI. Termasuk di dalamnya dokumen yang menuliskan bahwa kepolisian Republik Indonesia tak berani menangkap FPI karena takut serangan balik, dan dokumen lain yang memaparkan FPI adalah cabang dari Jemaah Islamiyah, jaringan jihad yang terlibat dalam Bom Bali tahun 2002, dan dokumen pengiriman senjata api dari Kepolisian Republik Indonesia untuk latihan anggota FPI Aceh. NSA dan Gedung Putih tak merespons tulisan ini.

Sementara gerakan protes besar-besaran yang digelar FPI berlangsung selama enam bulan terakhir, saya mendapatkan informasi yang rinci dari lima laporan internal intelijen Indonesia. Laporan-laporan itu disusun oleh tiga agen pemerintah Indonesia. Seluruhnya dikonfirmasi oleh sedikitnya dua tokoh militer, intelijen, atau staf istana.

Salah satu laporan menyatakan bahwa gerakan ini sebagian didanai Tommy Soeharto—anak diktator Soeharto—yang pernah masuk bui gara-gara menembak mati hakim yang memvonisnya bersalah. Sumbangan finansial Tommy juga diakui oleh Jenderal (Purn) Kivlan Zen. Kivlan sendiri, yang membantu FPI memimpin protes besar-besaran di Jakarta pada November 2016, sedang menghadapi ancaman penjara dengan tuduhan makar. Ia juga bekas pemimpin tim kampanye Prabowo dalam pemilu 2014.

Laporan lain menyatakan sebagian dana berasal dari Hary Tanoe, miliuner rekanan bisnis Donald Trump. Para tokoh penting gerakan protes itu—beberapa di antaranya saya temui pada Jumat silam (14/4)—berkali-kali menekankan kepada saya bahwa Hary adalah salah satu pendukung mereka yang terpenting. Mereka berharap Hary dapat jadi penghubung antara Prabowo dan Trump.

Manimbang Kahariady, seorang pejabat Partai Gerindra, mengaku ia berjumpa Hary tiga hari sebelum pertemuan kami. Ia dan tokoh-tokoh gerakan yang lain yakin bahwa Hary memberitahu Trump mengenai pentingnya mendukung mereka dan menyingkirkan lawan-lawan mereka, dan itu dimulai dari Ahok. Tommy Soeharto tak dapat dihubungi untuk dimintai keterangan. Harry Tanoe menolak berkomentar.

Laporan ketiga menyatakan sebagian dana gerakan FPI berasal dari mantan presiden dan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)—informasi yang membikin jengkel Presiden Jokowi ini terbongkar kepada khalayak dan kemudian ditanggapi SBY dalam mode marah. SBY langsung menyatakan itu dusta belaka dan pemerintah telah menjahatinya dengan cara menyadap teleponnya.

Tujuh staf intelijen/militer aktif dan pensiunan menyatakan kepada saya bahwa SBY memang menyumbang untuk aksi protes FPI, tetapi menyalurkannya secara tidak langsung. Salah satu informan tersebut adalah

Laksamana (Purn) Soleman B. Ponto—bukan pendukung gerakan makar—mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan penasihat aktif Badan Intelijen Negara (BIN). "*SBY menyalurkan bantuannya lewat masjid dan sekolah*," kata Soleman.

Hampir semua pensiunan tentara dan sebagian tokoh militer, menurut Soleman, mendukung tindakan SBY tersebut. Ia mengetahui hal ini karena—selain keterlibatannya di dunia intelijen—jenderal-jenderal pro makar adalah rekan dan kawan-kawannya, banyak di antara mereka berhimpun dalam grup WhatsApp "*The Old Soldier*".

Menurut Soleman, para pendukung gerakan makar di kalangan militer menganggap Ahok cuma pintu masuk, gula-gula rasa agama buat menarik massa. "*Sasaran mereka yang sebenarnya adalah Jokowi*," katanya.

Caranya tentu bukan serangan langsung militer ke Istana Negara, melainkan "kudeta lewat hukum", mirip-mirip kebangkitan rakyat yang menggulingkan Soeharto pada 1998. Hanya, kali ini publik tidak berada di pihak pemberontak—dan tentara nasional Indonesia, alih-alih melindungi Presiden, lebih senang ikut menggerogotinya.

"*Makar ini bakal kelihatan seperti pertunjukan People Power*," ujar Soleman. "*Tetapi karena semuanya sudah ada yang mengongkosi, militer tinggal tidur*," dan presiden sudah terjengkang saat mereka bangun.

Skenario lain: Aksi-aksi protes yang dipimpin FPI bakal menggelembung kelewat besar, membikin Jakarta dan kota-kota lain kacau-balau, lalu militer datang dan menguasai segalanya atas nama menyelamatkan negara. Kemungkinan penuh kekerasan ini dibicarakan secara rinci oleh Muhammad Khaththath, Sekjen Forum Umat Islam, dan Usamah Hisyam saat saya bertemu mereka Februari lalu (Usamah adalah penulis biografi SBY berjudul SBY: Sang Demokrat).

Lebih dari urusan keagamaan, menurut mereka, masalah terbesar Indonesia saat ini adalah komunisme gaya baru, dan militer harus siap turut campur dan menggembalakan keadaan karena Indonesia belum cukup dewasa untuk demokrasi. Jokowi, kata mereka, menyediakan lahan bagi komunisme dan satu-satunya organisasi yang cukup kuat buat menghadapi komunisme ialah tentara nasional.

Mereka mengaku sudah punya daftar orang-orang komunis di Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang mereka incar. Di lapangan, mereka mengikuti panduan taktik dan strategi dari seorang jenderal antikomunis yang bekerja bersama mereka. Tentara hanya mungkin ikut campur bila ada kekacauan. Dalam keadaan damai, mereka tak dapat berbuat apa-apa.

Khaththath dan Usamah berkata kepada saya bahwa mereka tidak menginginkan pertumpahan darah. Mereka ingin kudeta damai, tetapi juga menekankan, dalam beberapa pekan ke depan, bakal ada revolusi oleh umat. Istana ketakutan, kata mereka.

Setelah Khaththath ditangkap polisi dengan tuduhan makar, Usamah mengirimkan pesan kepada saya bahwa kini ia mengambil kendali perjuangan di lapangan—sebagaimana peran Khattath setelah imam besar FPI Rizieq Shihab digembosi skandal seks dan masalah-masalah lain.

1965, Lagi

Segera setelah wawancara kami selesai, saya menerima dokumen dari seorang perwira militer, yang bisa dianggap sebagai template untuk komentar-komentar Khaththath dan Usamah tentang aksi-aksi jalan. Berjudul "*Analisis Ancaman Komunis Gaya Baru di Indonesia*", dokumen ini ialah rangkaian salindia powerpoint yang digunakan sebagai materi pelatihan ideologis di tangsi-tangsi militer seantero Indonesia.

Komunisme Gaya Baru, disingkat KGB, adalah sebuah konsep yang mengisahkan ancaman komunis melalui cerita-cerita tentang sosok Stalin, Pol Pot, dan Hitler—dan tampaknya ancaman ini cukup luas sampai-sampai mencakup siapa pun yang mengkritik TNI.

Mengacu pada kebijakan yang dituding berwatak komunis seperti "*program kesehatan dan pendidikan gratis*," dokumen itu mencela "pluralisme dan keragaman dalam sistem sosial" sebagai ancaman khas "KGB" yang sedang pasang di Indonesia. Dengan menggunakan teknik penilaian ancaman (threat assessment techniques) yang diambil dari nukilan-nukilan doktrin dan teks intelijen Barat—kadang ditulis dalam bahasa Inggris—dokumen ini memperingatkan kaum komunis "*sedang memisahkan tentara dari rakyat*" dan "*memanfaatkan isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi, seraya memosisikan diri sebagai korban demi meraih simpati*."

Pernyataan tentang korban-korban pelanggaran HAM jelas merujuk pada tokoh-tokoh seperti Munir Said Thalib, teman saya, seorang pembela keadilan sosial yang brilian, yang dibunuh pada 2004 dengan dosis besar arsenik yang menyebabkan ia muntah sampai mati dalam sebuah penerbangan ke Amsterdam; atau korban pembantaian 1965 yang berjumlah sekitar satu juta warga sipil, yang dibunuh oleh tentara dengan dukungan AS dalam rangka mengonsolidasikan kekuasaan setelah percobaan kudeta.

Ihwal pembantaian 1965 muncul ketika saya berbincang dengan Jenderal (Purn) Kivlan Zen, yang mengatakan jika Jokowi menolak tunduk pada keinginan tentara, taktik serupa bisa dikerahkan lagi.

Sebagaimana banyak pejabat yang sempat berbincang dengan saya, Kivlan menyatakan gerakan jalanan yang didukung tentara dan krisis saat ini buntut dari Simposium 1965, yang memungkinkan penyintas dan keturunan korban '65 untuk membicarakan secara terbuka atas apa yang telah menimpa mereka dan menceritakan bagaimana orang-orang yang mereka cintai meninggal.

Bagi sebagian besar tentara, simposium itu adalah kekurangajaran yang tak bisa diterima dan dengan sendirinya menjustifikasi gerakan kudeta. Seorang jenderal mengatakan kepada saya, yang paling membuat marah rekan-rekannya adalah karena simposium itu "*menyenangkan korban*." Simposium

itu, tentu saja, tidak ada hubungannya dengan Gubernur Ahok atau persoalan agama mana pun, melainkan soal tentara dan kejahatannya.

"*Kalau bukan karena Simposium itu, gerakan seperti sekarang ini tidak akan ada*," kata Kivlan. "*Sekarang komunis sedang bangkit lagi*," keluh Kivlan. "*Mereka ingin mendirikan partai komunis baru. Para korban '65, mereka semua menyalahkan kami.... Mungkin kita akan lawan mereka lagi, seperti tahun '65*."

Saya terkejut dengan pernyataan itu. Saya ingin memastikan saya tidak keliru mendengarnya.

"*Bisa saja terjadi, '65 bisa terulang lagi*," ulang Kivlan.

Alasannya?

"*Mereka mencari keadilan yang setimpal*."

Dengan kata lain, Kivlan sedang membangkitkan momok baru pembantaian massal jika korban tidak berusaha melupakan. Kivlan menjelaskan secara rinci mengapa kudeta '65 dibenarkan. Dia mengatakan presiden yang digulingkan, Sukarno, yang saat itu 'ditawan' oleh tentara, telah memberikan perintah kepada angkatan bersenjata untuk mengambil alih kekuasaan. Dan parlemen telah "menyerahkan kekuasaan" kepada Angkatan Bersenjata.

Saya bertanya, mungkinkah itu terjadi lagi sekarang?

"*Bisa saja*," jawabnya. "*Tentara bisa bergerak lagi sekarang, seperti Soeharto di era itu*."

Kivlan mengatakan kepada saya bahwa Juli lalu, setelah Simposium, Jokowi mengunjungi markas TNI dan menyatakan kepada para jenderal yang berkumpul saat itu bahwa "*ia tidak akan meminta maaf kepada PKI*."

"*Jika Jokowi tetap berada di jalur itu*"—sikap tidak meminta maaf—"*Dia tidak akan digulingkan. Dia akan selamat. Tapi jika dia meminta maaf: [dia] Selesai, tamat*," kata Kivlan.

Saya ingin memastikan kembali apakah dia benar-benar mengatakan bahwa tentara akan bertindak seperti di tahun '65 lagi.

"*Ya, untuk mengamankan situasi, termasuk seperti tindakan di tahun '65*."

"*No say surrender*," pungkasnya, dalam bahasa Inggris.

Meskipun Kivlan dipandang sebagai golongan yang cenderung ideologis di antara para jenderal, perlu dicatat bahwa banyak rekannya mulai kasak-kusuk menggulingkan Jokowi sekalipun Jokowi tidak meminta maaf. Dalam hal ini, Kivlan termasuk dalam sayap moderat. Yang luar biasa, usulan minta maaf kepada korban ternyata cukup membuat para jenderal kebakaran jenggot untuk menggulingkan presiden.

Kivlan sering disebut-sebut sebagai salah satu orang yang berjasa menciptakan FPI setelah Soeharto jatuh. Dalam percakapan kami, Kivlan membantah ikut bertanggung jawab merancang FPI, tapi dia terus

membahas secara rinci bagaimana kelompok tersebut hanyalah salah satu contoh yang lebih luas dari strategi tentara dan polisi untuk menciptakan kelompok-kelompok sipil binaan—yang kadang bercirikan Islam, kadang tidak—yang dapat digunakan untuk menyerang para pembangkang seraya mencuci tangan aparat.

Kivlan menyatakan bahwa beberapa hari sebelum demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada 4 November 2016, ia menerima pesan teks dari Mayjen (Purn) Budi Sugiana yang memintanya "*untuk ikut serta dan mengambil alih gerakan 411*." Misinya, kata Kivlan, "*untuk menyelamatkan Indonesia*," dengan bergabung bersama pemimpin FPI Habib Rizieq di atas mobil komando selama demonstrasi, karena "*mereka butuh orang untuk mengambil alih massa [di luar istana], seandainya [Rizieq] ditembak dan mati*."

Pada Desember 2016, Kivlan ditangkap polisi atas tuduhan menggulingkan Jokowi. Namun, ketika kami berbincang pada akhir Februari, dia tetap saja bebas dan bahkan melancong ke luar negeri. Dia malah menyatakan sedang melaksanakan suatu misi untuk Jenderal Gatot Nurmantyo, Panglima TNI saat ini, yakni berupaya membebaskan para sandera Indonesia di Filipina.

Soal pertanyaan siapa yang diam-diam membekingi gerakan tersebut dan siapa yang betulan "komunis", Kivlan berbicara secara on-the-record dan off-the-record, secara persis dan umum. Karakterisasinya atas sikap kawan-kawannya sesama jenderal sangat berkaitan erat dengan sikap aparat lain yang banyak diceritakan orang. Namun, tidak seperti kebanyakan dari mereka, Kivlan mengatakannya secara on-the-record.

"*Begitu banyak pensiunan militer—dan yang masih aktif dalam militer—yang bersama FPI ... Karena FPI pun bertujuan melawan komunis*."

Setelah apa yang dia bicarakan tentang penggulingan Jokowi dan mengambil tindakan seperti pada tahun '65, saya bertanya: Apakah Jenderal Gatot—Panglima TNI saat ini—setuju?

"*Dia setuju*!"

Tapi dia pun menambahkan, sebagai perwira yang masih aktif, Gatot harus "*sangat berhati-hati*" mengambil sikap di depan publik.

Pernyataan on-the-record Jenderal Kivlan tentang peran Gatot konsisten dengan jenderal-jenderal lain dan para penggerak kudeta, serta dengan pernyataan yang diduga bersumber dari Presiden Jokowi sendiri. Saya pun bertanya kepada seorang pejabat yang memiliki akses rutin ke presiden tentang klaim yang dilontarkan Jokowi, "*Apakah Gatot merupakan faktor utama dalam kudeta tersebut*?" Pejabat itu menjawab, ya, presiden mengatakan itu, dalam pertemuan tertutup. Gatot tidak merespons permintaan tanggapan untuk artikel ini.

Mengenai bos lamanya, Prabowo, Kivlan berkata: "*Dia tak mau dekat-dekat, tetapi dia terlibat melalui Fadli Zon*." Prabowo akan kesulitan jika terlihat mesra dengan gerakan itu. Sedangkan mengenai menteri pertahanan Ryamizard

Ryacudu, Kivlan bilang "*hatinya setuju dengan tujuan kami, tetapi tidak dapat bicara*."

Kivlan memuji cara Wiranto menempatkan diri. "*Wiranto bagus*," katanya, "*karena dia mau bikin harmoni dengan gerakan*" dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam kapasitasnya selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kivlan menambahkan bahwa Wiranto, yang terancam dakwaan kejahatan perang di Timor Leste, punya rencana bagus untuk perkara genting yang dihadapi tentara. Ia mendesak Jokowi supaya "*tak ada pengadilan HAM*."

Elegannya strategi mendorong kudeta itu adalah militer akan menang sekalipun kudeta gagal. Meski Jokowi tetap menjabat presiden, para jenderal akan aman—menurut mereka—dari pengadilan HAM. Sebab, untuk menyingkirkan segerombolan pembunuh, presiden harus merangkul kumpulan jenderal yang tak kalah bengisnya.

Yang terdepan di antara mereka adalah A.M. Hendropriyono, mantan Kepala BIN dan aset CIA, yang terlibat dalam pembunuhan Munir serta serangkaian kejahatan besar lain. Sepanjang krisis ini, orang-orang Hendro-lah (tentara, intelijen, polisi, sipil) yang mengepalai benteng pelindung Jokowi. Orang-orang Hendro-lah yang mengatur penangkapan-penangkapan atas nama kudeta dan memincangkan Rizieq Shihab dengan skandal bokep, juga menghajar sumber-sumber dana gerakan dengan tuduhan pencucian uang ISIS.

Gantinya, Hendro dan konco-konconya memperoleh jaminan kekebalan dari peradilan. Dan dalam aturan aparat, jika mereka aman, semua orang aman. Ada persetujuan diam-diam untuk menolak persekusi terhadap rekan, sekalipun jika kedua pihak bermusuhan.

Pada Februari 2017, di bawah tekanan istana, pengadilan administrasi Jakarta menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi bisa menghindari kewajiban hukum merilis laporan tim pencari fakta yang secara terbuka membahas tanggung jawab Hendropriyono dalam perkara pembunuhan Munir. Janda Munir, Suciwati, dan Haris Azhar dari Kontras, mengecam vonis itu dan menyebutnya sebagai usaha "*melegalkan kriminalitas*".

Dengan gaya yang mirip, gerakan kudeta juga telah membantu Freeport. Sejak tahun lalu, pemerintah Jokowi berupaya menulis ulang kontrak negara dengan Freeport dan mengembalikan hak ekspor mereka. Pada saat yang sama, pemerintah diguncang oleh gerakan yang dipimpin pengacara yang bekerja untuk Freeport.

Pada awal April, setelah gerakan permulaan yang polisi klaim sebagai empat upaya merebut DPR dan Istana, pemerintahan Jokowi mengejutkan dunia politik Indonesia dengan tiba-tiba menyerah kepada Freeport dan memberi lampu hijau ekspor tembaga baru. Mundur tiba-tiba tidak membuat sengketa selesai—lebih dalam lagi, isu mengenai kontrak masih tersisa—tetapi, seperti

yang dikatakan pejabat Jokowi kepada saya, pemerintah saat ini merasa posisinya melemah.

Dalam sebuah cerita yang berjudul lucu, "*Freeport mendapat karpet merah, sekali lagi*," The Jakarta Post menulis: "*Pemerintah berusaha membela keputusannya, meskipun tidak ada dasar hukum yang membelakanginya ... Freeport dinilai telah menghindari peluru lagi*."

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence akan mengunjungi Indonesia pada 20 April. Staf-staf pemerintahan Jokowi menduga, berbisik-bisik, bahwa tuntutan-tuntutan Freeport akan jadi prioritas utamanya. Salah seorang tokoh gerakan, dalam pertemuan kami Jumat lalu, menatap saya dan berseru: "Pence bakal mengancam Jokowi soal Freeport!"

Freeport Indonesia tidak menanggapi permintaan konfirmasi.

Dalih Penistaan Agama

Kivlan Zen mengejutkan saya ketika menyatakan bahwa Gubernur Ahok telah memberi "*sebuah berkah*" kepada gerakan tersebut dengan "*keseleo lidahnya*" terkait Al-Maidah ayat 51. Dalam penampilan mereka di muka publik, para pemimpin gerakan diharuskan mengklaim mereka selamanya terluka oleh ucapan Ahok. Tapi salah satu dari mereka, dengan senyum simpul, mengakui secara strategis pernyataan Ahok itu mereka terima dengan senang hati, karena ia memungkinkan FPI dan para sponsornya menggeser perimbangan kekuasaan di Indonesia, melesatkan reputasi mereka dari preman jalanan menjadi pakar agama.

Lebih dari itu, saat saya duduk dengan Usamah dan para pimpinan gerakan lain, yang dengan setengah bercanda ia sebut sebagai "*politbiro*", mereka secara santai berdebat tentang boleh tidaknya nonmuslim memimpin umat Islam. Mereka melakukan itu ketika mendiskusikan Hary Tanoe, yang secara berlebihan mereka puji sebagai pendukung utama gerakan mereka—melalui bantuan dana langsung dan stasiun televisinya, yang kena tegur KPI karena bias politik yang terlalu pro-gerakan secara tak wajar dan ketidakakuratan dalam pemberitaan—dan garis hidup yang mereka bayangkan terhubung dengan Presiden Donald Trump.

Mereka yang berada di ruangan itu satu suara menginginkan pemerintahan Prabowo-Hary Tanoe, Hary sebagai presiden dan Prabowo sebagai wakil, atau sebaliknya, tergantung poling.

Persoalannya, dan sepertinya tidak terlalu mengusik mereka, Hary adalah seorang China-Kristen seperti Ahok. Apabila standar yang mereka tetapkan kepada Ahok dipegang teguh, seharusnya Hary tidak masuk kualifikasi untuk memimpin Jakarta, apalagi Indonesia.

Allan Nairn, Jurnalis investigasi Amerika

TIRTO.ID, 19 April 2017

Stigma

Ahok kalah; pilkada DKI 2017 sudah menentukan itu. Segera, apa yang terjadi dengan hiruk pikuk selama ini, akan jadi sejarah. Banyak yang lega -- karena Anies menang ataupun karena kita akhirnya melampaui kebencian yang meracuni udara kampanye, suasana yang meretakkan banyak pertemanan.

Tapi saya harap satu hal tak dilupakan.

Ahok maju ke dalam arena dengan belenggu di tubuhnya: belenggu sebagai "penista agama". Ia bisa bergerak dan bisa bicara, tapi ia tak sepenuhnya bebas. Prestasinya sebagai kepala daerah, yang diakui sebagian besar warga -- yang membuat ia sebenarnya tak tertandingi -- nyaris tak tampak dan terdengar lagi.

Dalam sejarah politik Indonesia, mungkin apa yang dicapkan pada Ahok merupakan teknik membuat stigma yang paling berhasil.

Stigma itu bermula dari fitnah. Ia tak menghina agama Islam, tapi tuduhan itu tiap hari diulang-ulang; seperti kata ahli propaganda Nazi Jerman, dusta yang terus menerus diulang akan jadi "kebenaran". Kita mendengarnya di masjid-masjid, di media sosial, di percakapan sehari-hari, sangkaan itu menjadi bukan sangkaan, tapi sudah kepastian.

Ahok pun harus diusut oleh pengadilan, dengan undang-undang "penistaan agama" yang diproduksi rezim Orde Baru -- sebuah undang-undang yang batas pelanggarannya tak jelas, dan tak jelas pula siapa yang sah mewakili agama yang dinista itu.

Walhasil, Ahok diperlakukan tidak adil dalam tiga hal: (1) difitnah, (2) dinyatakan bersalah sebelum pengadilan, (3) diadili dengan hukum yang meragukan.

Mengakui adanya ketidak-adilan di dalam kasus ini tapi bertepuk tangan untuk kekalahan politik Ahok -- yang tak bisa diubah -- adalah sebuah ketidak-jujuran.

Ahok kalah, ia bahkan masih bisa di jatuhi hukuman dalam proses pengadilan yang di bawah tekanan aksi massa itu. Jangan-jangan kebenaran juga kalah -- di masa yang merayakan "pasca-kebenaran" kini.

Goenawan Mohamad, Mantan Pemimpin Redaksi Majalah TEMPO

INDONESIANA, 20 April 2017

Kemenangan Anies-Sandi

Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga, pasangan nomor urut 3 (Anies Rasyid Baswedan- Sandiaga Uno) unggul atas pasangan calon nomor urut 2 (Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat) lebih dari 15%. Tentu ini merupakan kemenangan versi lembaga hitung cepat, meskipun biasanya tak berbeda jauh dengan hasil rekapitulasi suara resmi KPU. Kemenangan Anies-Sandi ini harus dimaknai dalam konteks demokrasi di DKI dan agenda kepemimpinan mereka lima tahun ke depan.

Hasil Mengejutkan

Pada putaran kedua ada penambahan 109.691 pemilih. Tambahan tersebut berasal dari pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT putaran pertama, pemilih yang baru mendaftarkan diri ke posko yang dibuat KPUD. Lalu, ada pula pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun pada putaran kedua ini. Ada juga pemilih alih status yang tadinya anggota TNI/ Polri pada putaran kedua jadi warga sipil karena pensiun. Total DPT pada putaran kedua 7.218.280 pemilih yang tersebar di 13.034 TPS.

Hasil hitung cepat cukup mengejutkan karena awalnya hampir seluruh lembaga survei memprediksi ketatnya persaingan perolehan suara di putaran kedua. Survei SMRC pada 31 Maret-5 April 2017 memprediksi Ahok-Djarot 46,9%, Anies- Sandi 47,9%. Bedanya hanya 1% dengan keunggulan Anies-Sandi. Survei Median yang digelar 13-14 April 2017 menunjukkan elektabilitas Ahok-Djarot 47,1% dan Anies-Sandi 49%. Bedanya 1,9% Anies-sandi unggul.

Menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia, pasangan Ahok-Djarot dipilih 47,4% responden. Sementara itu, pasangan Anies-Sandi dipilih oleh 48,2% responden. Bedanya juga sangat tipis, yakni 0,8% untuk kemenangan Anies-Sandi. Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei pada Kamis (13/4/2017). Hasilnya, pasangan Ahok-Djarot memiliki elektabilitas 42,7% dan elektabilitas pasangan Anies-Sandi 51,4%.

Selisihnya jauh, yakni 8,7% dengan keunggulan Anies-Sandi. Satu-satunya lembaga survei yang memenangkan Ahok-Djarot di injury time adalah rilis survei Charta Politika. Tingkat elektabilitas Ahok-Djarot sebesar 47,3% dan elektabilitas Anies- Sandi 44,8%. Bedanya 2,5% dengan keunggulan Ahok. Pilihan warga sudah ditentukan, pemenang pun sudah tergambar, yakni Anies-Sandi. Tapi perbedaan suara keduanya cukup jauh, yakni kurang lebih 15%.

Hal ini menandakan tiga hal penting.

Pertama, dukungan pada Ahok- Djarot stagnan, bahkan relatif turun dari perolehan suara di putaran pertama.

Kedua, dengan selisih yang cukup jauh tersebut teramat berat bagi Ahok-Djarot untuk menggugat dan melakukan sengketa hasil pemilu di MK.

Mengacu ke Pasal 158 UU Nomor 10/ 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah disebutkan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta sampai dengan 12 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU provinsi.

Ketiga, penting untuk memastikan para pihak yang berkompetisi di Pilkada DKI untuk menunaikan ikrar pilkada damai, yakni semua siap menang dan siap kalah dengan menghormati hasil yang sudah ditentukan warga DKI.

Langkah ke Depan

Pilkada bukan semata soal prosedur, melainkan juga bersifat substansial. Keterpilihan pasangan calon harus dihormati oleh siapa pun. Pasangan calon, tim sukses, tim relawan, para pendukung, harus menahan diri untuk tidak bersikap berlebihan. Menang versi hitung cepat harus dimaknai sebagai kemenangan sementara dan bersabar untuk menunggu hasil hitung suara versi resmi KPU. Hitung cepat sejumlah lembaga bisa menjadi prediksi siapa yang memenangi kontestasi sekaligus menjadi partisipasi warga untuk mengontrol hitungan resmi KPU.

Karenanya, para pasangan calon, tim sukses, tim relawan, dan kelompok-kelompok pendukung harus memiliki tanggung jawab sosial untuk menciptakan situasi kondusif sebagaimana diikrarkan sejak awal tahapan Pilkada DKI, yakni siap menang dan siap kalah. Ke depan, siapa pun yang memenangi kontestasi memiliki agenda mahapenting, yakni mengelola Jakarta dengan lebih baik. Tantangan penting diurai dan dituntaskan.

Di level makro tantangan bagi Anies-Sandi adalah mengubah watak birokrasi. Tantangannya adalah konsistensi Anies- Sandi untuk menjadikan seluruh jajaran birokrasi Pemprov DKI bekerja melayani warga dengan pendekatan-pendekatan profesional, humanis, tanggap, bersih dan transparan. Asumsinya, jika birokrasi di Pemprov DKI memiliki komitmen pada good governance dan clean government, maka pelaksanaan beragam program oleh seluruh staf Pemprov DKI dan rekanan dari pihak swasta akan bermuara pada output yang sama, yakni kebermanfaatan birokrasi untuk warga Jakarta.

Di level meso ada empat tantangan utama.

Pertama, problem transparansi yang indikatornya adalah keterbukaan informasi publik, misalnya menyangkut informasi besaran anggaran dan peruntukannya.

Kedua, soal pola komunikasi birokrasi dengan warga Jakarta.

Kesenjangan komunikasi kerap melahirkan prasangka buruk, kekecewaan, bahkan penentangan - penentangan yang kurang proporsional. Hal ini tentu terkait dengan beragam informasi yang seharusnya disampaikan oleh Pemprov DKI secara strategis, terencana, terbuka, dan berkelanjutan, tetapi dalam praktiknya justru kabur dan distortif.

Ketiga, soal pola hubungan antara Pemrov DKI dengan pemerintahan pusat dan pemdapemda sekitar.

Keempat, relasi kuasa antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI.

Suka tidak suka salah satu tantangan Anies-Sandi adalah kekuatan politik di DPRD. Tetapi tentu saja politik itu selalu dinamis, masih terbuka lebar kesempatan bagi Anies- Sandi untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai yang bukan pengusung utamanya. Hanya, Anies-Sandi juga hendaknya tidak sampai terjebak pada skenario membangun harmoni dengan DPRD dan larut dalam skema pragmatisme kaum elite politisi. Di level mikro, terkait halhal teknis berbagai kerja leading sector seperti transportasi publik, penanganan ketertiban umum, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Hal ini tentu saja berkaitan dengan operasionalisasi program yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta. Tentu, karena kompleksnya persoalan Jakarta, tidak mungkin seluruh masalah di Jakarta bisa diurai dengan cepat oleh Anies-Sandi. Jika harapan publik tidak terkelola dengan baik, penulis khawatir muncul desonansi kognitif. Dalam pandangan Leon Festinger (dalam Shaw & Constanzo, 1982) disonanasi kognitif dipahami sebagai ketidakcocokan hubungan antarelemen kognisi.

Pengetahuan, pendapat, keyakinan atau apa yang dipercayai tentang dirinya sendiri dan lingkungannya merupakan bagian dari elemen-elemen pokok kognisi. Tidak konsistennya antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan atau dialami menyebabkan kekecewaan bahkan frustrasi.

Dalam konteks Pilkada DKI, jika masyarakat memahami Anies-Sandi terpilih dalam satu mekanisme demokratis dan diasumsikan akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik sementara dalam praktiknya hanya menjadi rebutan para elite partai politik, maka akan melahirkan hubungan disonan atau penyangkalan di tengah warga Jakarta.

Ini merupakan keadaan psikologis yang tidak menyenangkan yang timbul saat dalam diri pemilih terjadi konflik antara dua kognisi, yakni antara pengetahuan mengenai pentingnya mewujudkan partisipasi politik warga dalam pilkada dan ketidakyakinan terhadap kualitas pemimpin yang mereka pilih. DKI membutuhkan gubernur yang memiliki kemampuan prima. Tidak semata ngotot menjaga citra kekinian (current image), tetapi juga memiliki kapabilitas untuk menjadi pemecah masalah dan bukan penambah keruwetan DKI.

Gun Gun Heryanto, Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

KORAN SINDO, 20 April 2017

Setelah Pilkada Jakarta Usai

HASIL hitung cepat berbagai lembaga survei terkait dengan pilkada Jakarta menunjukkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menang telak atas pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Angkanya pun tak tanggung-tanggung, di atas 15%. Dari pengalaman pilkada-pilkada sebelumnya, hasil pilkada DKI Jakarta menunjukkan sebuah anomali politik karena pasangan petahana yang tingkat kepuasan publiknya 70%-76% ternyata dapat dikalahkan pasangan yang tidak memiliki pengalaman di bidang pemerintahan lokal atau daerah. Pastinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anomali politik itu terjadi. Pertama, seperti tampak pula dari berbagai survei, agama menjadi faktor utama dari kemenangan Anies-Sandi. Secara kebetulan, pada September 2016, dalam sebuah acara di Kepulauan Seribu, Basuki alias Ahok membuat pernyataan yang bisa mengaitkan agama dan politik. Pernyataan yang mengaitkan politisasi Surah Al Maidah ayat 51 itu tentu saja menjadi bumerang baginya.

Persoalan itu kemudian menjadi isu agama karena secara kebetulan Ahok beragama Kristen dan beretnik Tionghoa. Kalau saja Ahok tidak memiliki dobel minoritas itu, belum tentu isu politisasi agama menjadi isu besar, bahkan menimbulkan demonstrasi besar-besaran dari yang disebut 411, 212, 212, hingga 311. Berbagai isu, bahwa memilih orang kafir sebagai gubernur akan masuk neraka, pemilih Ahok tak boleh disalati atau bahkan tak boleh dibantu pemakamannya, menambah semakin takutnya warga muslim untuk memilih Ahok-Djarot. Kedua, persoalan penggusuran untuk normalisasi Kali Ciliwung yang digoreng Anies Baswedan juga menimbulkan kesan seakan-akan Ahok ialah gubernur yang suka menggusur rakyat kecil. Apalagi hal itu dikaitkan dengan proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang lagi-lagi digoreng seakan-akan Ahok lebih mengutamakan kepentingan ekonomi para konglomerat dan menyusahkan para nelayan yang ialah juga bagian dari rakyat kecil.

Meski Ahok sudah berbusa-busa menjelaskan keuntungan yang akan dinikmati rakyat kecil dan miskin Jakarta dari berbagai proyek yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, semua itu dianggap tidak menarik ketimbang berbagai tuduhan negatif Anies terhadap Ahok yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Ketiga, gaya Anies yang pandai memilih kata-kata di dalam kampanye politiknya, seperti “Rakyat Jakarta menginginkan gubernur baru, saya akan menutup tempat mesum di Hotel Alexis, saya akan memecat Ahok sebagai gubernur, saya akan menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Lalu, saya akan menyatukan sistem transportasi di Jakarta dan rakyat hanya membayar Rp5.000, saya akan memberikan DP 0% untuk rakyat Jakarta yang akan memiliki rumah, saya akan memberikan kartu Jakarta pintar (KJP) kepada mereka yang tidak sekolah.” Semua itu menarik rakyat yang memimpikan bisa membeli rumah tanpa DP, yang ingin juga tetap dapat uang walaupun tidak sekolah atau tidak bekerja. Keempat, pemilih Jakarta terimbas oleh kebangkitan kembali konservatisme baru seperti yang terjadi di Inggris terkait dengan hasil referendum yang

menyebabkan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) dan menangnya Donald Trump pada pemilu di AS 2016. Dengan kata lain, cara berpikir yang konservatif ternyata dapat mengalahkan cara berpikir yang rasional dan modern.

Pelajaran berharga

Hasil pilkada Jakarta memberikan pelajaran berharga bagi partai-partai nasionalis dan partai-partai Islam yang mengedepankan Islam moderat. Pertama, mereka selama ini seakan melupakan atau membiarkan konstituen Islam mereka di arus bawah sehingga dapat dirasuki pikiran-pikiran yang sempit dalam keberagamaan mereka. Ketika rakyat akar rumput ketakutan dengan ungkapan kalau meninggal tidak dimandikan atau disalati, mereka tidak cepat didekati para ulama yang merupakan bagian dari Islam moderat. *Kedua*, pilkada Jakarta sekali lagi membuktikan bahwa jumlah partai pendukung tidak identik dengan jumlah perolehan suara yang akan didapat di pilkada. Gaya berkampanye, sosok calon yang dikontraskan dengan petahana, isi kampanye yang membuai mimpi kaum miskin, dan kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa semua kenikmatan dan kemudahan yang sudah dirasakan rakyat tak akan dihilangkan ternyata lebih menarik ketimbang hasil yang sudah dicapai petahana dan dinikmati rakyat miskin.

Ketiga, mobilisasi massa secara masif atas dasar agama yang bukan saja berasal dari dalam Jakarta, melainkan juga dari luar Jakarta sulit dibendung ketika jargon-jargon agama, politik, dan demokrasi disa-tukan untuk membenarkan mobilisasi massa itu. Atas nama demokrasi, kegiatan politik yang masif itu tentunya tak mungkin dihentikan karena pemerintah dan aparat keamanan tidak ingin dikatakan anti-Islam atau bertentangan dengan Islam. Apakah gaya politik ini bisa dikembangkan pada Pilpres 2019 tampaknya agak sulit karena pada pilkada kedekatan emosional pemilih dan yang dipilih amat kuat karena faktor geografis, politis, dan agama. Namun, pada pilpres ada jarak yang cukup jauh antara pemilih dan yang dipilih. *Keempat*, melihat hasil pilkada Jakarta, bukan mustahil pendekatan agama akan semakin digunakan pada pilkada-pilkada lainnya pada 2018 dan seterusnya. Ini mengalahkan hasil kerja atau pun kejujuran dari seorang calon gubernur petahana, apalagi jika sang petahana memiliki perbedaan agama dengan sebagian besar penduduk di provinsi, kabupaten, atau kota tertentu.

Tantangan gubernur baru

Kita semua harus menerima hasil pilkada DKI Jakarta dengan lapang dada. Saya juga percaya bahwa para pemilih Ahok-Djarot bukanlah rakyat yang bodoh, irasional, dan emosional yang tidak mau menerima kekalahan mereka. Ini berbeda dengan pemilih Prabowo-Hatta yang sempat emosional dan tidak menerima kekalahan mereka secara lapang data. Mereka juga tidak seperti pendukung Partai Demokrat dan Hillary Clinton yang ramai melakukan demonstrasi di berbagai tempat di AS hingga kini dan tidak bisa menerima kemenangan Donald Trump. Tidaklah mengherankan jika Trump

menggunakan gaya lama kebijakan Partai Republik, yakni menjadikan perang untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi dari rakyat, seperti melalui pengeboman dahsyat tentara AS di Suriah. Pendukung Ahok-Djarot juga bukan para rasionalis Inggris yang tidak bisa menerima kekalahan pada referendum yang menyebabkan Inggris keluar dari Uni Eropa.

Persoalannya kemudian ialah, pertama, dapatkah Anies kembali ke masa lalunya sebagai orang yang sering bicara mengenai pentingnya kita merajut kebangsaan di dalam kebinekaan ketimbang seseorang yang mulai lekat dengan sektarianisme atas dasar sentimen agama? Kedua, Anies tentunya berutang budi pada tokoh-tokoh Islam garis keras. Akankah dia memenuhi semua tuntutan tokoh-tokoh agama itu untuk menjadikan Jakarta bersyariah? Ketiga, bisakah Anies-Sandi adil terhadap penduduk Jakarta tanpa memandang suku-agama-ras-golongan mereka? Keempat, akankah Anies men-deliver janji-janji politik mereka soal DP rumah 0%, memberikan uang kepada mereka yang tidak sekolah dan bekerja, tidak akan menggusur orang, akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta, dan sebagainya? Kita akan menyaksikan apakah Jakarta akan berubah ke arah lebih baik dalam lima tahun ke depan. Namun, sebagai langkah awal, mari kita berikan ucapan selamat kepada Anies-Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Setelah masa jabatan Ahok-Djarot berakhir pada Oktober 2017 ini, kita akan melihat apakah janji-janji kampanye itu tinggal janji, ataukah janji itu akan dilaksanakan secara konsisten.

Ikrar Nusa Bhakti, Profesor Riset LIPI

MEDIA INDONESIA, 20 April 2017

Menang Tanpa "Ngasorake"

Banyak orang kadang lupa. Dalam kontestasi, sejatinya yang utama diperjuangkan adalah moralitas. Oleh karena itu, kalah dan menang, orang tetap terhormat. Moralitas adalah esensi yang meneguhkan eksistensi. Kalah tetapi bermartabat jauh lebih mulia daripada menang/jaya tetapi nista.

Olahraga memaknai moralitas dengan sportivitas (sikap adil/obyektif dan jujur). Dalam kompetisi sepak bola Liga Champions, Bayern Muenchen menerima kekalahan dengan kepala tegak ketika disingkirkan Real Madrid dengan agregat 3-6. Kedua tim sama-sama bermain bagus. Kalah dan menang hanya akibat. Pihak yang kalah dan yang menang sama-sama terhormat! Yang membedakan, hanyalah keberuntungan. Nasib!

Kehormatan dan Martabat

Dalam kontestasi apa pun, seyogianya orang harus siap menang dan siap kalah. Namun, hal itu tidak gampang dijalani bagi pihak yang kalah. Kekalahan sering menjelma menjadi kekuatan mengerikan yang dapat melemparkan siapa pun ke dalam ruang hampa. Dunia terasa gelap. Habis. Kiamat. Kesabaran datang menjadi percik cahaya. Agama bilang, orang harus bersikap tawakal ketika sudah berusaha dan berjuang tetapi tetap gagal mendapatkan hasil terbaik. Biarlah Tuhan yang menilai. Di sini, keimanan bicara. Religiusitas (penghayatan keimanan) memang selalu ada di dalam setiap kontestasi. Kekalahan tak lagi disikapi dengan kecengengan atau amarah. Itulah moralitas yang bersumber dari keyakinan agama.

Hidup kita selalu disertai moral sehingga kita bisa membedakan baik-buruk, benar-salah, mulia-hina, pantas-tidak pantas, dan layak-tidak layak. Moral merupakan sistem pengetahuan dan sistem ajaran kebajikan yang menjadi rujukan bagi cara berpikir dan perilaku manusia yang mengindahkan keadaban. Sumber moralitas, antara lain agama, ideologi/filsafat, dan kearifan lokal (local wisdom).

Menang tanpa ngasorake (mencapai kemenangan tanpa merendahkan budi pekerti, baik diri sendiri maupun orang lain), adalah salah satu kearifan lokal budaya Jawa. Ia mengajari kita tentang pentingnya kehormatan dan martabat di dalam meraih kemenangan. Kemenangan memang penting, tetapi jauh lebih penting adalah cara meraihnya. Proses selalu menjadi pertimbangan utama untuk mencapai hasil.

Tidak ada artinya jika kemenangan diraih dengan cara hina dan nista: melabrak etika, norma, dan hukum (aturan). Jika keburukan itu dilakukan, kemenangan itu dicapai dengan ngasorake diri sendiri sekaligus ngasorake liyan (kompetitor atau publik) karena liyan telah diakali atau dicurangi. Kemenangan yang diraih hanyalah kemenangan formal bukan kemenangan substansial yang oleh budaya Jawa disebut menang sak gebyaran (kemenangan semu).

Kemenangan menjadi pencapaian berkualitas, indah, dan otentik justru ketika kita berada pada jalur dan rambu regulasi, yakni perangkat keras dari

etika, moral, dan norma. Asyik dan indahnya kontestasi justru karena ada peraturan dan risiko hukuman, bukan malah menghancurkan aturan. Karena tanpa aturan, kontestasi berubah jadi perebutan kemenangan secara liar dan tak beradab, bahkan layak juga disebut "penjarahan".

Bayangkan betapa brutalnya pertandingan sepak bola jika tanpa wasit. Lapangan sepak bola pasti berubah jadi arena bar-barian, di mana masing-masing pendukung tim turut bermain. Adu kekuatan otot. Chaos! Yang menang bukan juara sejati, tetapi komunitas ganas yang mengandalkan okol, bukan akal.

Menang tanpa ngasorake merupakan cerminan watak ksatria. Ia menaruh kehormatan dan martabat di atas kekuasaan dan pencapaian material-imaterial melalui kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Seorang striker bisa saja menceploskan bola ke gawang yang sudah melompong. Namun, ia justru membuang bola keluar ketika melihat ada pemain lawan yang terkapar kesakitan.

Jadilah sang kesatria

Itulah sikap kesatria. Namun, bagi orang yang berideologi menang, pasti akan mengutuk sang striker. Namun, bagi yang menghormati sportivitas, pasti mengapresiasi tindakan sang striker yang bermoral dan sportif itu. Itulah sebabnya, para legenda sepak bola di dunia biasanya memiliki jiwa sportif yang tinggi.

Mungkin orang lebih mengagumi Pele (Edison Arantes do Nascimento) daripada Maradona yang penah menciptakan gol dengan "*tangan Tuhan*". Maradona memang memberikan kemenangan bagi Argentina yang menyingkirkan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986. Akan tetapi, kemenangan itu tidak bersih karena dicapai dengan ngasorake dirinya, lawan, pengadil, dan publik sepak bola. Kecurangan Maradona dikenang publik dunia secara abadi. Maradona jadi legenda cacat sepak bola.

Manusia adalah makhluk kemungkinan. Ia bebas memilih. Menang secara elegan (jujur, adil, terhormat) atau menang secara tidak terhormat. Menang secara elegan berarti menempuh proses secara wajar dan baik sesuai regulasi, etika, norma, dan moralitas.

Kemenangan otentik itu menjadi wahana yang membawa sang pemenang pada kualitas mental dan moral yang turunannya adalah nama baik, prestasi dan reputasi. Adapun menang secara tidak terhormat tak ubahnya menggenggam hasil semu yang dikutuk waktu dan suatu ketika bakal longsor ketika kekuasaan yang menopangnya ambrol oleh akal sehat dan kebenaran sejati. Menang tanpa ngasorake, memang sulit dan pahit, tetapi dia bernilai dan abadi.

Indra Tranggono, Pemerhati Kebudayaan dan Sastrawan

KOMPAS, 21 April 2017

Berkaca pada Pilkada Jakarta

Riuh-rendah Pilkada DKI akhirnya mencapai puncak 19 April 2017. Hasilnya sudah kita maklumi bersama. Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno terpilih mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di putaran kedua.

Pasangan Anies-Sandi berhasil membalik fenomena yang banyak terjadi, termasuk dalam Pilkada DKI 2012, di mana pasangan yang unggul di putaran pertama kembali unggul di putaran kedua. Apakah kemenangan Anies-Sandi sebuah kejutan? Tidak. Itu jawaban yang saya sampaikan di televisi swasta jelang dimulainya hitung cepat (quick count) pukul 13.00. Justru kalau Basuki-Djarot menang itu kejutan mengingat 90 persen survei yang dilakukan jelang akhir masa kampanye menunjukkan keunggulan Anies-Sandi. Rentang keunggulannya saja yang berbeda-beda antarlembaga. Antara 1 dan 10 persen. Jadi, ini hasil yang sangat terduga.

Dari survei tampak pula variabel-variabel yang memengaruhi pilihan masyarakat. Apa saja variabel-variabel itu? Dalam setiap pilkada selalu ada tiga variabel besar yang bekerja memengaruhi pilihan masyarakat. Pertama, variabel rasional seperti persepsi mengenai kemampuan calon dan kinerja petahana. Kedua, variabel kepribadian seperti kesukaan/ ketidaksukaan kepada kandidat. Dan, ketiga, variabel sosiologis/ primordial seperti kesamaan latar belakang suku dan agama.

Dalam aspek rasional, sebenarnya Basuki-Djarot unggul dibanding Anies-Sandi. Dalam debat di acara Mata Najwa, misalnya, publik menilai penampilan Basuki lebih baik dibanding Anies. Hal ini konsisten dengan survei-survei terhadap debat-debat putaran pertama. Dari segi kepuasan publik, angka penilaian terhadap Basuki lebih dari 70 persen. Lazimnya, calon dengan tingkat kepuasan setinggi ini cenderung didukung mayoritas pemilih. Kelemahan Basuki bukan pada kinerja, melainkan pada variabel kedua dan ketiga. Untuk variabel kepribadian, kesukaan terhadap kandidat, skor Basuki paling rendah, bahkan lebih rendah daripada Djarot dan Sandi. Skor kesukaan pada Basuki 60 persen. Pada Djarot dan Sandi di kisaran 70 persen. Sementara Anies 80 persen.

Variabel suku dan khususnya agama juga menjadi kelemahan Basuki. Pemilih beragama Kristen dominan kepada Basuki-Djarot, sementara mayoritas pemilih Islam mendukung Anies-Sandi. Hal ini penting dan menarik karena terjadi pergeseran komposisi dukungan pemilih Islam pada Basuki-Djarot. Sebelum peristiwa Al Maidah 51 di Kepulauan Seribu, pemilih Muslim mayoritas ke Basuki-Djarot. Namun, setelah peristiwa itu, mayoritas pemilih Muslim pindah ke Anies-Sandi. Di satu sisi kita bisa menyatakan: ini kesalahan seorang Basuki. Mulutmu, harimaumu. Kata pepatah lama. Tujuan dan kegiatan Basuki di Kepulauan Seribu adalah untuk bicara tentang program perikanan. Untuk apa dia: (1) berbicara soal Pilkada DKI, (2) jikapun bicara pilkada, untuk apa dikaitkan dengan soal

memilih atau tak memilih siapa, (3) jikapun bicara soal dukungan politik dan alasannya, tidak perlu mengutip kitab suci agama lain.

Di sisi lain tidak dapat dimungkiri bahwa terjadi upaya framing (pembingkaian) dan mobilisasi isu agama dan rasial terhadap Basuki. Upaya framing dan mobilisasi isu itu mendapatkan pintu masuk yang terbuka lebar dengan adanya peristiwa Al Maidah 51. Framing dan mobilisasi isu penodaan agama kemudian dikait-kaitkan dengan latar belakang agama dan rasial Basuki. Yang terjadi kemudian adalah sebuah "*big bang*" (dentuman besar) opini dan mobilisasi massa seperti yang terlihat pada peristiwa 411 dan 212.

"Kudeta Merayap"

Ada yang mengatakan, dentuman besar opini dan mobilisasi massa tidak lepas dari bertemunya berbagai kepentingan kelompok dan tokoh politik. Ada yang berkepentingan dengan Pilkada DKI 2017. Ada pula yang bermain catur politik kekuasaan nasional baik untuk tujuan sekarang maupun 2019. Pendapat ini tentu tak dapat dinafikan. Itu sebabnya isu "kudeta merayap" dan sejenisnya turut berkembang dalam dinamika Pilkada DKI. Tak semua elite politik mau dan sabar menunggu momentum pemilu berikutnya untuk kesempatan pergantian kekuasaan. Terlepas dari alasan dan perbedaan konteks, peristiwa pergantian kekuasaan nasional di 2001 dan 1965 telah dijadikan referensi dan preseden sejarah bahwa pergantian kekuasaan di tengah jalan adalah suatu "celah" dalam dinamika kekuasaan nasional. Namun, di luar faktor manuver elite, rasanya memang ada yang ditata kembali dalam masyarakat kita. Sebab, politik identitas tak berada di ruang hampa. Upaya framing dan mobilisasi punya batas kemampuan. Tanpa harus berdebat tentang berapa jumlah persis massa yang hadir dalam peristiwa 411 atau 212, kita dapat akui itulah momen pengumpulan massa di satu titik yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Pastinya, ada perasaan kolektif yang sama yang mampu menggerakkan massa dalam jumlah sebesar itu.

Indikator lain soal perasaan kolektif adalah masifnya penyebaran informasi atau isu berbasis SARA pada satu sisi dan benturan-benturan keras antarpribadi dan kelompok sebagai akibat penyebaran isu-isu yang membelah. Adapun perbenturan paling keras tak (dapat) kita saksikan di media massa konvensional seperti televisi atau koran karena figur-figur yang tampil di sana elite politik yang terlatih berakrobat kata-kata atau telah melalui proses editing kuat dari redaktur media massa. Perbenturan paling keras justru terjadi di ruang-ruang bersifat personal seperti grup Whatsapp atau Facebook dan ranah media sosial seperti Instagram dan Twitter. Pertukaran kata-kata kasar yang berujung pada ketersinggungan dan permusuhan banyak terjadi dalam kurun enam bulan selama pilkada.

Isu SARA

Tanpa bermaksud untuk menimbulkan pesimisme, isu SARA dan politik identitas diperkirakan kembali muncul dalam kontestasi politik ke depan seperti Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Apa dasar pemikiran ini? *Pertama*, fenomena politik identitas dan isu SARA di Pilkada DKI sesungguhnya mirip Pemilu 2014. Tema-tema yang muncul saat itu seperti soal ras, agama, siapa penguasa aset ekonomi terbesar di Indonesia, serta dukungan politik yang diberikan penguasa ekonomi pada calon tertentu kembali muncul pada 2017 ini. Ingat tabloid Obor Rakyat? Pilkada DKI 2017 adalah Pilpres 2014 minus Obor Rakyat. Jika politik identitas telah muncul dua kali dalam Pilpres 2014 dan Pilkada 2017, kiranya tak salah menduga hal itu akan muncul lagi di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Kedua, politik identitas dan framing isu tak akan berhasil apabila latar makro dari masyarakat Indonesia tak kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya isu dan framing demikian. Politik identitas dan framing isu tak berada dalam ruang hampa. Ia memiliki akar kuat dan dalam pada realitas politik (sebagian) masyarakat. Pasti ada sebagian kelompok masyarakat yang merasa tak puas, terancam, atau minimal tak suka dengan realitas ekonomi dan politik tertentu yang membuat mereka mudah masuk dalam politik identitas dan isu SARA sebagai sarana penyaluran frustrasi sosial dan politik mereka.

Mengapa mereka tak suka realitas politik tertentu? Kajian-kajian konflik dan psikologi sosial mengenal konsep deprivasi relatif (relative deprivation), suatu konsep yang sering dipakai untuk menjelaskan munculnya suatu gerakan atau konflik sosial dan politik. Deprivasi relatif adalah suatu kondisi subyektif di mana seseorang atau kelompok merasa tak puas dengan kondisi yang dialami atau dimilikinya dibandingkan kondisi yang dimiliki orang atau kelompok lain. Perasaan tak puas ini bisa berkaitan dengan soal ekonomi (materi), hak politik, pengakuan, atau hal lain yang dianggap penting dan berharga.

Siapakah mereka ini? Identifikasi tentang siapa mereka dapat dilakukan dengan melihat kelompok-kelompok dan individu-individu yang muncul di permukaan serta retorika-retorika yang dipakai. Tentu pemerintah memiliki perangkat dan instrumen untuk mengidentifikasi. Tapi yang tak kalah penting, mengidentifikasi persoalan mendasar yang menyebabkan timbul dan kuatnya isu politik identitas dan SARA dalam politik kita belakangan ini.

Persoalan itu tak lain persoalan kesenjangan ekonomi penduduk seperti tecermin pada koefisien Gini. Juga tecermin kesenjangan penguasaan aset antarkelompok masyarakat dalam peringkat orang terkaya Indonesia seperti dirilis majalah bisnis Forbes dan LSM internasional Oxfam. Pengalaman Pilkada DKI menunjukkan, pemerintah pusat harus segera mengambil suatu seri kebijakan yang mampu menyelesaikan, minimal mengurangi kesenjangan ekonomi ini, sehingga deprivasi relatif yang selalu muncul dalam bentuk politik identitas dan isu SARA tak muncul kembali dalam pilkada dan pemilu. Prioritas kebijakan yang harus diambil pemerintahan hari ini mungkin bukan pertumbuhan, melainkan pemerataan ekonomi.

M Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer. KOMPAS, 22 April 2017

Ekonomi Politik Pilkada Jakarta

KESUKSESAN putaran kedua pilkada DKI Jakarta yang akhirnya dimenangi Anies-Sandi memberikan pengaruh signifikan terhadap geliat ekonomi politik. Paling tidak hal ini terkait dengan potensi konflik berdalih agama sebagai ancaman pilkada putaran kedua. Kekalahan Ahok sekaligus mengulang hal serupa pada pilkada sebelumnya ketika Ahok mengalahkan Foke pada 2012. Oleh karena itu, ikrar Anies-Sandi yang lantang menegaskan untuk bersama membangun Jakarta tanpa mengebiri kekuatan pesaing mereka di pilkada kemarin menjadi penting sekaligus meredam ancaman gejolak yang bisa saja muncul, terutama dalam konteks ekonomi-politik.

Kekhawatiran dari putaran kedua pilkada DKI Jakarta tentu beralasan karena Jakarta adalah ibu kota sebagai nadi geliat ekonomi politik sehingga warna pilkada di Jakarta menjadi warna ekonomi politik di Indonesia. Kalkulasi ekonomi politik dari putaran kedua pilkada DKI Jakarta sekaligus menjadi test case terkait dengan iklim sospol, terutama ini mengacu keyakinan pasar dan sentimen investor. Oleh karena itu, kesuksesan putaran kedua pilkada DKI Jakarta menjadi acuan tentang perilaku wait and see dan aspek ancaman menjadi wait and worry.

Sikap legowo Ahok-Djarot sekaligus menepis ancaman iklim sospol dan secara tidak langsung memberikan sinyal positif terhadap kepastian tidak terjadinya wait and worry. Artinya, fenomena ini bisa menjadi peluang memacu ekonomi bisnis untuk lima tahun ke depan di era Anies-Sandi tentu dengan berbagai formula perubahan untuk mencapai pembangunan terbaik.

Sentimen

Fakta yang tidak bisa diabaikan dari putaran kedua pilkada DKI Jakarta ialah sentimen terhadap bursa, yaitu pada sepekan menjelang pilkada IHSG mencapai level 5.644,30 pada 10 April dan menjadi 5.606,52 pada 18 April sehari menjelang pilkada meski sehari pascapilkada yaitu 20 April ditutup melemah 0,2% di level 5.595,31. Realitas di balik geliat bursa juga terlihat dari rekam jejak pelaksanaan pilkada DKI Jakarta pada 8 Agustus 2007, yaitu perbandingan ISHG pada 31 juli 2007 di level 2.348,67, sedangkan perubahannya pascapilkada pada 31 Agustus 2007 mencapai level 2.194,33.

Selain itu, pada putaran pertama pilkada DKI Jakarta 11 Juli 2012, ternyata IHSG pada 2 Juli 2012 mencapai 3.991,54, sedangkan pascapilkada pada 31 Juli 2012 berada di level 4.142,33 dan di putaran kedua pada 20 September 2012 ternyata perubahan pada 31 Agustus 2012 mencapai 4.060,33 dan pascapilkada pada 28 September 2012 berada di level 4.262,45. Terkait dengan ini, pergerakan IHSG pada putaran pertama pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari 2017 lalu, yaitu pada 31 Januari 2017, mencapai 5.294,10 dan pascapilkada pada 28 Februari 2017 berada di level 5.386,89.

Geliat bursa hanyalah salah satu indikator terkait dengan pilkada, sedangkan interaksi antara ekonomi politik dan politik ekonomi dari pelaksanaan

pilkada tidak dapat diabaikan. Karena itu, kesuksesan pilkada serentak yang lalu memberi pengaruh positif terhadap sentimen pasar dan putaran kedua pilkada DKI Jakarta memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi bisnis di semester awal 2017. Oleh karena itu, Anies-Sandi tidak bisa mengelak dari tantangan pembangunan ekonomi untuk lima tahun ke depan yang semakin berat. Artinya, ada sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dicermati, misalnya tentang ancaman bencana banjir tahunan. Bencana biasanya disertai kelumpuhan ekonomi lokal, infrastruktur ekonomi hancur dan tidak berfungsi, dan pasar dan berbagai ruang usaha rusak, barang dan jasa tidak tersedia dan harga melambung, serta penduduk menjadi kehilangan pekerjaannya. Aset bangunan dan peralatan yang menjadi modal usaha dan agunan pinjaman menjadi barang yang tidak bernilai. Konsekuensinya utang menumpuk, sedangkan kemampuan berusaha menjadi tidak ada sehingga kredit macet membengkak. Oleh karena dunia usaha kolaps, pekerja tidak lagi memiliki pekerjaan dan hal ini mengancam kemiskinan karena sumber penghasilan rumah tangga hilang, padahal berbagai kebutuhan mendesak harus terpenuhi.

Fakta ini perlu dicermati karena implikasinya ialah proses terhadap persoalan sosial yang kemudian bisa merembet ke kriminal. Artinya, Anies-Sandi harus mewaspadai persoalan ini sebagai tantangan lima tahun ke depan.

Imbas persoalan di atas ialah daya saing ekonomi dan pertumbuhan ekonomi domestik. Sementara itu, di satu sisi, hal ini terkait dengan kondisi makroekonomi dan sejumlah faktor yang mendasarinya.

Di sisi lain, daya saing tidak terlepas dari problem pertumbuhan. Oleh karena itu, perlambatan ekonomi semester awal 2017 sebagai konsekuensi dari pilkada serentak tampaknya semakin berat di semester kedua. Paling tidak, ini juga dipicu rendahnya belanja pemerintah. Oleh karena itu, beralasan jika pemerintah lalu mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mengacu pada percepatan pembangunan infrastruktur strategis serta realisasi penyerapan anggaran. Pemerintah juga akan terus memantau serapan anggaran di semester kedua 2017. Upaya ini menjadi langkah penting karena pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua cenderung melambat karena ada Ramadan yang mengancam inflasi musiman.

Beragam

Mencermati perlambatan ekonomi di semester kedua pada dasarnya tidak bisa terlepas dari faktor makro yang terjadi karena realitas ini merupakan bagian dari kondisi makro. Oleh karena itu, Anies-Sandi tampaknya perlu hati-hati mencermati situasi ini. Selain itu, faktor ekonomi global ikut andil memengaruhi situasi ini. Apalagi kondisi demokrasi politik dalam negeri masih berkutat dengan kepentingan parpol, termasuk misal kekisruhan DPD, sementara kondisi fiskal cenderung lemah. Artinya, situasi perlambatan ekonomi kali ini harus dikaji dari beberapa aspek yang kompleks dan ini

tantangan bagi Anies-Sandi sebagai pemenang putaran kedua pilkada DKI Jakarta.

Beberapa aspek yang perlu dicermati terkait dengan ekonomi politik putaran kedua pilkada DKI Jakarta, yaitu pertama: beratnya tantangan mencapai target pertumbuhan, maka perlu dipetakan potensi pertumbuhan ekonomi dan persoalannya. Artinya stimulus perlu juga dipertimbangkan, termasuk aspek penyerapan anggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur strategis.

Kedua, fakta lain yang tidak bisa diabaikan ialah pertumbuhan di kuartal kedua yang belum maksimal. Oleh karena itu, berharap kepada porsi daya beli agar pertumbuhan terpacu oleh konsumsi masyarakat tampaknya semakin berat juga.

Ketiga, tidak bisa disangkal bahwa perputaran ekonomi juga rentan terhadap nilai tukar dan ini mengisyaratkan jika nilai tukar tidak menguat, belanja modal meningkat dan tentu berpengaruh terhadap biaya produksi terutama jika komponen produksi masih impor.

Keempat, sinergi investasi dan pertumbuhan adalah penting dan perlu regulasi memacu daya tarik investasi, baik padat modal atau padat karya pascapilkada putaran kedua. Selain itu, jaminan iklim sospol dan kepastian hukum perlu ditegakkan dan ini menjadi PR bagi Anies-Sandi untuk lima tahun ke depan.

Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

MEDIA INDONESIA, 22 April 2017

Ekstremisme Islam pada Pilkada DKI

Perhitungan suara final oleh KPU belum resmi, tetapi semua hasil quick count dan situs KPU senada dalam mengumumkan kalahnya petahana Basuki Tjahaja Purnama dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Hasil ini menuai banyak tanggapan. Yang menarik adalah tanggapan yang ramai banyak pengamat baik nasional mapun internasional yang mengatakan bahwa kemenangan ini adalah hasil atau perwujudan dari 'ekstremisme Islam' (ada juga yang menyebut 'radikal' atau 'Islamic hardliners'). Sulit untuk tidak merenung: siapakah yang dimaksud dengan 'ekstremis Islam'?

Apakah maksudnya Da'esh (ISIS) atau Alqaidah? Tetapi terlepas sentimen kebencian agama yang ada, tidak ada aksi teror kecuali sebuah serangan pada kantor polisi yang tidak berhubungan dengan pilgub DKI. Ada satu bom mobil, tetapi sasarannya justru sebuah perkumpulan Front Pembela Islam (FPI) yang dihadiri oleh Habib Rizieq Shihab.

Atau maksudnya FPI? Dengan sejarah warna-warni antara aksi kekerasan dan kemanusiaan, mereka memimpin salah satu aksi demonstrasi yang menurut kepolisian diduga akan ditunggangi untuk makar, antara lain dengan menyusup melalui gorong-gorong. Ternyata demonstrasi ini adalah demonstrasi paling damai dan bersih yang pernah terjadi di Indonesia.

Sebetulnya aksi agresif FPI tertangkap kamera saat Aksi Bela Islam 411. *Pertama*, mereka tampak berusaha mencegah beberapa demonstran (bukan anggota FPI) yang mulai menyerang polisi. *Kedua*, mereka membuat barikade menghadap demonstran untuk melindungi polisi. FPI pun sempat mengawal sebuah sepasang calon pengantin beragama Katolik yang hendak menikah di Katedral yang dilewati massa Aksi Bela Islam.

Ataukah Wahabi? Mereka jelas anti-petahana. Tapi kelompok yang banyak merujuk ulama-ulama Saudi Arabia ini justru mengharamkan aksi demonstrasi. Saat Aksi Bela Islam, mereka justru sibuk mengkritisi demonstran. Salah satu da'i Wahabi Ustaz Riyadh Bajrey bahkan mengatakan bahwa pemerintah halal menumpahkan darah para demonstran. Ekstrem? Mungkin. Tapi ini menguntungkan petahana.

Mungkin Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)? Belum ada sejarah kekerasan, kecuali baru-baru ini di Makassar. Itupun pembelaan diri setelah lebih dulu diserang oleh GP Ansor. GP Ansor juga menghadang dan memaksa bubar aksi (legal) HTI di Surabaya, tapi HTI kali ini memilih mundur menghindari kekerasan walaupun jumlah mereka lebih banyak. Apakah tindakan GP Ansor adalah ekstrem? Perlu dicatat bahwa GP Ansor cenderung pro-Petahana.

Semua kandidat 'ekstremis' ini punya satu keserupaan: menolak pemimpin non-Muslim. Bersama-sama dengan isu penistaan agama, inilah yang dipercayai menjadi faktor utama kekalahan petahana. Tampaknya inilah maksud 'ekstremisme': agama menjadi faktor dalam political choice. Label

‘ekstremisme Islam’ yang menakutkan ini telah tereduksi dari aksi kekerasan ke pilihan politik. Apakah tepat melabeli ini sebagai ‘ekstremisme’? Apakah seorang individu mengimani bahwa hanya boleh memilih pemimpin seiman adalah ‘ekstrem’?

Siapa sih yang menentukan apa yang ‘ekstrem’ dan apa yang tidak? Di mana standarnya?

Apakah Hak Asasi Manusia (HAM)? Mengesampingkan isu ‘masuk akalkah mengatur hukum Tuhan dengan hukum internasional?’, hukum HAM internasional pun samar di sini. Pasal 26 dan 25(b) ICCPR berturut-turut mengatur persamaan di muka hukum dan hak untuk dipilih melalui pemilu. Tapi pasal-pasal tersebut juga memberikan kebebasan berpendapat dan hak memilih dengan jaminan "free expression of the will of the electors".

Kebebasan memilih dan menjalankan agama juga dilindungi di Pasal 18(1). Apakah karena kebetulan mayoritas mengimani agama tertentu, yang membuat mereka menghendaki hal yang sama, menjadikannya melanggar hak secara sistematis atau ketertiban umum (pengecualian kebebasan beragama di PAsal 18[3])?

Hukum Indonesia pun mengakui hak yang sama, lebih diperkuat kenyataan bahwa Indonesia adalah bukan negara sekuler melainkan beragama (bukan agama) sesuai Pasal 29 UUD 1945.

Agak sulit memahami kenapa memilih berdasarkan nilai-nilai sebuah agama yang diimani adalah ekstrem, tetapi memilih berdasarkan nilai-nilai sebuah parpol tidak ekstrem. Konyol tapi sah memilih kandidat karena gantengnya. Ketika pilihan ini adalah murni diskresi personal, kenapa dilabeli sebagai ‘ekstrem’?

Keimanan kepada Tuhan, bagi pemeluk agama, adalah sebuah nilai. Misalnya adalah walaupun teologi Nasrani adalah monoteis menurut pemaknaan Nasrani, ia adalah politeis menurut konsep tauhid dalam Islam. Pemeluk agama menjadikan Tuhan dan agama sebagai prioritas di atas yang lain, dan umat Islam percaya bahwa dosa dan penghinaan Tuhan paling besar adalah syirik (politeisme). Bukan berarti memaksa Nasrani mengikuti ajaran Islam. Tapi kemudian apa salahnya seorang Muslim menolak memilih seorang pelaku syirik (sebagaimana dimaknai oleh ajaran Islam), ketika seseorang yang berhaluan ‘kiri’ menolak memilih seorang yang kapitalis adalah wajar?

Khususnya, Alquran tegas melarang memilih pemimpin non-Muslim. Banyak ayatnya, tapi yang terkenal adalah Surah Al Maidah ayat 51. Mayoritas ulama sekarang pun (dulu konsensus) berpendapat demikian, termasuk yang otoritatif di Indonesia. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berfatwa demikian. Selain itu, dua ormas terbesar Indonesia yang terkenal moderat pun berfatwa serupa, yaitu Muhammadiyah (fatwa tahun 2009) dan Nahdlatul Ulama atau NU (keputusan tahun 1999).

Dalam Islam, ekstremisme adalah ketika seseorang melampaui batasan-batasan syariat. Jika larangan memilih pemimpin adalah aturan hukum Islam, apakah ia ekstrem?

Ataukah standarnya adalah intoleransi? Toleransi adalah menghargai agama dan pilihan. Manakah yang intoleran: seseorang menggunakan diskresi pribadinya untuk memilih seseorang yang tidak sesuai nilai yang ia imani? Atau menuntut orang ini berubah serta membatasinya dalam menggunakan diskresi pribadinya sehingga tidak boleh membuat pilihan tadi?

Kasus penistaan agama agak rumit. Memang pidana penistaan agama keras diperdebatkan oleh para ahli HAM, tapi perspektif ‘toleransi’ akan berbeda. Apakah sebuah penistaan agama adalah sebuah aksi yang toleran? Apakah manusiawi jika pemeluk suatu agama menjadi murka ketika seorang pejabat publik ketika menjalankan tugas menista agama mereka? Kemurkaan pemeluk agama ini kemudian diekspresikan melalui demonstrasi yang besar namun sangat damai, dan tidak menuntut sesuatu yang baru atau istimewa: mohon jalankan hukum sesuai yang berlaku.

Apakah tuntutan tersebut semata-mata karena petahana adalah minoritas (etnis dan agama)? Bolehkah mayoritas bebas menghina minoritas? Jelas tidak, tapi soalan ini kompleks. Satu hal yang harus diakui adalah bahwa aturan penistaan agama yang berlaku sulit membedakan antara penistaan agama murni dan diskursus dalam perbandingan agama. Yang terakhir ini tempatnya di forum ilmiah, bukan untuk diteriakkan di muka umum.

‘Klaim kebenaran’ dan mengatakan agama lain akan masuk neraka adalah sebuah fitur yang umum pada banyak agama, dan diceramahkan secara internal. Bersikap baik dan ramah terhadap umat agama lain pun adalah ajaran yang umum pada kebanyakan agama, termasuk Islam. Tidak ada cerita boleh berteriak ‘kafir’ atau ‘bau jahanam’ kepada setiap non-Muslim yang ditemui. Mungkin sebagian melihat ini sebagai ‘bermuka dua’, tapi ini lebih dekat pada upaya baik untuk tetap beriman pada agama dan bertoleransi pada yang lain.

Pada akhirnya, apakah pilgub DKI dimenangkan oleh ‘ekstremisme Islam’? Istilah ini kian hari makin sulit dipahami. Ini jadi semata-mata masalah worldview dan bagaimana seseorang mengimani hubungan antara hidup dan agamanya. Kadang agak sulit untuk sempurna memahami orang lain sehingga kesalahpahaman dapat terjadi.

Mungkin kita memang mengalami clash of civilizations, tapi kita harus menjembatani ‘ke-tunggal ika-an’ dari sebuah ‘kebhinnekaan’. Ingatlah jahwa jembatan ini harus terbuka dua arah. Ada yang bisa dikompromi dan ada yang tidak.

Fajri Matahati Muhammadin, Dosen pada Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

REPUBLIKA, 24 April 2017

Selamat Berjuang Menaklukkan Kekuasaan

Kalah dan menang dalam kompetisi politik adalah lumrah. Maka kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta bukan peristiwa luar biasa. Respons pasangan Badja (Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat) juga datar-datar saja, tidak menunjukkan sesal dan kesal. Mungkin dalam hati paling dalam, Badja sudah menyiapkan diri menerima kekalahan karena panggung politik DKI Jakarta selama berbulan-bulan bias oleh gelar politik hiperbolik pasca-kebenaran (*post-truth politics*), yang mengakibatkan opini publik lebih didominasi oleh emosi, sentimen personal dan primordial daripada fakta dan akal sehat.

Oleh karena itu, meskipun berbagai survei menunjukkan secara konsisten tingkat kepuasan masyarakat terhadap prestasi kerja nyata Badja sekitar 70 persen, preferensi terhadap pasangan tersebut sulit mencapai 50 persen. Keikhlasan juga ditunjukkan pasangan Badja yang tidak hanya menyampaikan ucapan selamat, bahkan memberikan kesempatan gubernur terpilih seawal mungkin memahami pengelolaan kekuasaan pemerintahan DKI.

Salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari prestasi kerja petahana adalah kiat menjinakkan kekuasaan. Mereka sebagai pemegang kekuasaan bukan menjadikan diri penguasa, melainkan pelayan rakyat, prestasinya mendapat rekognisi publik. Kemampuan mereka berjuang agar kekuasaan bertekuk lutut tidak mudah. Pasalnya, kekuasaan selain instrumen yang mempunyai daya paksa untuk mencapai tujuan tertentu, ia juga kenikmatan sehingga daya pikatnya amat mudah membuat orang yang tidak dapat mengendalikan hasrat kuasa sulit membedakan perbuatan mulia dan bejat. Karena itu, karakter kekuasaan juga sering disebut libido dominandi, nafsu buat menindas dan sewenang-wenang.

Terlebih dalam praktik, daya goda kekuasaan bukan wajah seram dan menakutkan, melainkan wajah santun bawahan yang menjilat, tetapi memeras rakyat; kolega politik yang amat lihai dan cerdik melakukan rayuan maut untuk menawarkan transaksi kepentingan; pemilik kapital yang kata dan tingkah lakunya lemah lembut, senyum memikat, tetapi penuh jerat dan piawai membujuk agar proyek, meskipun melanggar aturan, memaksa tetap disetujui; serta segala jenis kedurhakaan lain yang dikemas dengan kesantunan. Perlawanan yang dilakukan oleh petahana selama ini antara lain membuat kebijakan transparansi kebijakan, terutama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), membenahi birokrasi termasuk "bonus" prestasi kerja, serta merespons keluhan dan kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi di lapangan.

Introduksi tersebut sangat bermakna karena janji-janji kampanye Anies-Sandi meski beberapa mirip dan merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya di antaranya ada yang spektakuler. Karena itu, selain memerlukan kemampuan mengelola harapan, juga dibutuhkan kemampuan manajerial untuk tidak memberikan kesempatan kekuasaan ngelunjak dan

merajalela sehingga menjadi petaka. Beberapa janji spektakuler yang ramai dibicarakan publik karena masyarakat segera ingin tahu realisasinya antara lain uang muka nol rupiah pembelian rumah murah, menghentikan reklamasi Teluk Jakarta, membuka 200.000 lapangan kerja baru, mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok, membangun pemerintahan yang bersih dan modern dengan pemanfaatan teknologi (Smart City), dan memuliakan serta memberdayakan perempuan Jakarta.

Agenda pasca-Pilkada DKI lain yang tidak kalah penting adalah mengembalikan kota Jakarta kembali teduh sebagai rumah bersama. Seluruh komponen warga DKI Jakarta wajib tidak beringsut dari kiblat bangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan filsafat dan konstitusi kehidupan bersama. Piweling dan piwulang (ajaran) yang amat mendasar yang disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin, cicit Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, Bapak Kitab Kuning Indonesia, perlu diresapi dan dihayati: "*Indonesia kan sistemnya republik, pilar kebangsaan yang disepakati. Kita tak perlu bicara khilafah, sudah tak ada lagi*." (Kompas.com, 23/4)

Meski wanti-wanti tersebut disampaikan secara lembut dan lirih, gema dan maknanya menggetarkan nurani kebangsaan. Pasalnya, selain meredam kekhawatiran masyarakat yang galau dengan arah politik yang membingungkan, juga mengingatkan elemen-elemen yang mencoba mengganti ideologi Pancasila dengan gagasan lain. Penegasan beliau bentuk negara Indonesia adalah republik bermakna urusan hidup bersama harus dilakukan secara bersama-sama, res publica, urusan bersama, urusan rakyat diurus oleh rakyat (demokrasi), bukan dimonopoli oleh jenis kekuasaan apa pun, terlebih kekuasan yang didasarkan atas garis keturunan, suku, ras, dan primordialisme lain.

Pilkada telah menghasilkan pelayan baru. Masyarakat harus memberikan dukungan penuh kepada mereka. Gubernur dan wakil gubernur terpilih sudah berjanji akan menjadi pelayan seluruh masyarakat Jakarta. Selamat berjuang menaklukkan kekuasaan, dukungan dan doa rakyat Jakarta menyertai Anda berdua. Semoga sukses dalam memenuhi janji-janji yang memikat.

J Kristiadi, Peneliti Senior CSIS

KOMPAS, 25 April 2017

Intolerankah Indonesia?

Ada saja beberapa teman yang menghendaki saya untuk menyudutkan, atau tepatnya memburuk-burukkan Indonesia, karena hasil pilkada Jakarta dan berbagai hiruk pikuk yang terkait dengannya. Teman-teman saya itu menginginkan saya untuk mempropagandakan jika Indonesia saat ini berada di jurang radikalisme, yang boleh saja akan berakhir tragis seperti Irak dan Suriah.

Propaganda tentang Indonesia krisis radikalisme saya dengar di mana-mana. Persis ketika saya berada di Indonesia mendengar di mana-mana jika Amerika itu adalah musuh utama Islam. Saya berkali-kali mendengarkan hal seperti itu di berbagai diskusi, bahkan diskusi yang layaknya cendekia seperti di think tank, universitas, dan kelompok cendekia lainnya.

Sejak zaman presiden Bush Jr, presiden yang memulai "*so called war on terror*" dengan menyerang Afghanistan lalu Irak. Presiden yang memporak porandakan negara lain karena nafsu perangnya. Saya sejak itu juga selalu membela Amerika sebagai negara toleran. Gesekan-gesekan sosial yang terjadi itu adalah fenomena wajar dalam perjalanan sebuah bangsa. Bahkan saya pernah dicurigai oleh sebagian teman-teman Muslim jika saya punya kepentingan membela Amerika. Karena di mana saja di dunia ini saya ditanya tentang Amerika, saya tetap membela jika Amerika adalah negara yang toleran. Sempurnahkah? Tentu tidak!

Lalu apa alasan saya membela Amerika sebagai negaa toleran? Alasannya sederhana. Karena Amerika masih menjadikan hukum sebagai "*acuan kehidupan publik*". Tapi apakah dengan itu tidak ada diskriminasi-diskriminasi terhadap minoritas? Jawabannya pasti banyak.

Lalu kenapa saya masih bersikukuh mempertahankan jika Amarika adalah negara toleran? Jawabannya karena kasus-kasus itu bukan representasi dari negara atau institusi kenegaraan. Pelakunya masih kemungkinan besar mendapatkan ganjarannya. Sebaliknya korban diskriminasi-diskriminasi itu masih merasakan pembelaan hukum.

Bahkan, di saat diskiriminasi itu sekalipun datang dari Gedung Putih, saya belum mebgatakan Amerika itu anti Islam selama hukum masih berada di atas kepala presidennya. Itulah yang menjadikan beberapa kali executive order Donald Trump dibatalkan oleh Hakim Tinggi di Amerika. Artinya hukum masih hidup dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Mungkin suatu ketika saya bisa berubah pandangan di saat hukum menjadi impoten alias tidak bisa tegak lagi. Kalau hukum sudah lumpuh maka baik penguasa maupun rakyat akan melakukan apa saja sesuai dorongan hawa nafsunya. Dan kalau ini terjadi di Amerika saya tidak akan ragu mendeklarasikannya sebagai negara yang diskriminatif dan anti Islam.

Toleransi Indonesia

Toleransi di Indonesia bukan barang baru. Indonesia dengan segala kekurangannya memiliki sejarah panjang toleransi. Memang diakui bahwa dalam perjalanannya sekali-sekali mengalami pasang surut, bahkan pada titik nadir yang terendah. Tapi jangan lupa, toleransi itu tidak hanya diperlukan di saat mayoritas kuat. Beberapa kali juga justeru intoleransi terjadi di saat minoritas di atas angin. Ini bukan sesuatu yang memerlukan penjabaran karena memang itulah fakta sejarah panjang perjalanan bangsa ini, khususnya dalam dekade pertengahan orde baru.

Sebagaimana berulang-ulang disebutkan bahwa toleransi itu adalah "darah daging" bahkan "nafas" kehidupan Nusantara. Jika karena satu dan lain hal, terjadi sikap intoleran, maka itu bukan wajah Nusantara yang sejati. Itu adalah "deviasi" dari kehidupan Nusantara yang sesungguhnya.

Kenyataan bahwa hingga kini Indonesia masih utuh dalam kesatuan di tengah kebhinnekaan hampir dalam segala aspek kehidupan, menunjukkan bahwa tabiat kebangsaan Indonesia ini memang mendukung itu. Salah satu tabiat yang mendukung penuh kesatuan itu adalah karakter toleransi yang tinggi.

Sejak awal perjuangan memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah asing, termasuk Belanda, Portugis, dan Jepang, bangsa Indonesia berjuang, walau dengan semangat keberagamaan dengan pekik "Allahu Akbar" misalnya, namun kita kenal bahwa perjuangan mereka bukan untuk kepentingan kelompok. Bung Tomo dengan arek-arek Suroboyo, atau Panglima Sudirman yang sangat taat beribadah, diangkut dari hutan ke hutan, menaruh hidup bukan untuk umat Islam semata. Tapi demi kemerdekaan bangsa dan negera Indonesia dari sabang sampai marauke dengan segala ragam manusianya.

Dalam persiapan membentuk institusi negara, yang kita tahu bersama sebagai bentuk negara Indonesia ke depan dan selamanya, tokoh-tokoh Islam juga mengedepankan toleransi dengan mengakomodir realita bangsa Indonesia yang ragam. Bahwa pada akhirnya lahirlah Pancasila dan UUD 45 menunjukkan toleransi tinggi dari bangsa Indonesia itu. Dan sejak itu pula bangsa Indonesia hidup dalam NKRI secara damai dan rukun.

Dalam perjalanannya pilar berbangsa dan bernegara itu tetap menjadi pijakan kehidupan masyarakat. Kehidupan berbangsa didasarkan kepada kedua pijakan itu (Pancasila dan UUD 45), dan diterjemahkan tentunya berdasarkan kepada pemahaman masing-masing kelompok dalam rumah Indonesia tanpa mengganggu, apalagi mencabut pilar yang telah disepakati bersama itu.

Komitmen terhadap pilar kebangsaan dan bernegara itu, walau dipahami berdasarkan ragam kelompok yang ada, itu sesungguh dimungkinkan oleh karakter toleran itu. Maka, umat Islam bisa memahami sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan konsep tauhid agama Islam. Sebaliknya, pasal yang sama

memungkinkan untuk dipahami berdasarkan konsep iman saudara-saudara sebangsa kita yang beragama lain.

Demikianlah perjalanan bangsa ini dari masa ke masa. Ada dinamika sosial yang terjadi. Hubungan horizonal kebangsaan mengalami pasang surut, kadang sangat harmoni dan kadang pula sebaliknya. Tidak jarang terjadi gesekan-gesekan, bahkan pada tingkatan yang cukup menegangkan.

Salah satu masa-masa yang menegangkan itu adalah ditahun 80-an di mana umat Islam mengalami represi yang cukup kuat. Secara ekonomi mereka dianak tirikan, secara sosial keagamaan juga mereka ditekan. Ada pelarangan berjilbab bagi wanita-wanita di sekolah umum. Bahkan ceramah para ustaz juga dimonitor oleh rezim orde baru. Dan bukan rahasia umum lagi bahwa kekuatan di balik dari kebijakan represi itu adalah kelompok tertentu.

Barulah kemudian di awal tahun 90-an umat kembali mendapat angin segar. Dimulai dari berdirinya ICMI di bawah kepemimpinan Prof Dr BJ Habibie, mulai tumbuh dedaunan menyambut semi kebangkitan umat Islam. Istilah penghijauan pun menjadi trend saat itu. Singkat kata, berbicara tentang toleransi di Indonesia bukan barang baru. Tapi darah perjalanan sejarah bangsa dan sekaligus nafas kehidupannya. Yang terjadi adalah kadang karena udara, atau karena faktor lainnya, darah itu menjadi kotor dan nafas menjadi terganggu. Tapi apapun itu, Indonesia hidup karena karakternya yang toleran. Dan ini harus menjadi harga mati. Bahwa toleransi bag Indonesia adalah kehidupan dan karenanya mutlak dipertahankan untuk menjaga hidup Indonesia itu sendiri.

Masalahnya kemudian, dan semoga saya salah, ketika toleransi dipahami sebagai landasan kepentingan tertentu. Ketika sebuah aksi atau reaksi terjadi dan menguntungkan kelompok kita, kita bangga dan di mana-mana berkoar dengan kebanggaan itu. Tapi, di saat ada aksi atau reaksi itu dianggap kurang menguntungkan kelompok kita, maka bangsa dan negara ini tidak tanggung-tanggung dan enteng kita rusak, minimal merusak nama baiknya di dunia internasional.

Tidak jarang pula ketika kelompok kita melakukan tindakan anarkis dan separatis, walau itu jelas merusak tatanan NKRI, kita diam seribu bahasa. Dan di saat pemerintah Indonesia melakukan reaksi demi menjaga NKRI, tidak sungkan-sungkan pula kita promosikan Indonesia sebagai negara pelanggar HAM.

Di sinilah, saya, yang selama ini, berusaha membangun hubungan dan dialog dengan semua orang, bahkan dengan kelompok yang sebagian umat Islam dianggap musuh abadi, saya menjadi curiga. Jangan-jangan kata toleransi itu memang hanya dimaksudkan untuk kelompok tertentu? Wallahu a'lam!

Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation

REPUBLIKA, 03 Mei 2017

Memetik Hikmah dari Badai Hujatan

Akibat memohon Basuki Tjahaja Purnama untuk tidak melontarkan kata-kata kotor, kemudian akibat peduli nasib rakyat tergusur di Kampung Pulo, Pasar Ikan, Luar Batang, Bukit Duri, disusul akibat memohon informasi tentang siapa pemrakarsa Parade Papan Bunga untuk menerima anugerah MURI, saya babak belur dihajar badai hujatan.

Hujatan itu antara lain "*otak kelas dua, rasis, provokator, tua bangka bau tanah cari popularitas, botak, jelek, pendek, bogel, kontet, kampret, gak kualitas banyak gaya, Cina tidak pilih Cina, 'ciong' (tidak sejalan) sama ahok, 'hater' (pembenci) ahok, tukang ngeles*". Menyadari bahwa saya adalah manusia biasa penuh keterbatasan dan kekurangan, maka segenap hujatan saya terima sebagai peringatan bagi diri saya untuk senantiasa mawas diri. Oleh karena itu, saya mencoba memahami makna hujatan "otak kelas dua" sebagai bukan hujatan namun pujian bahwa ternyata saya memiliki otak meski cuma kelas dua.

Mengenai hujatan "*botak, jelek, pendek, bogel, kontet*" sah-sah saja, akibat kepala saya memang botak, penampilan saya jika dibanding dengan Brad Pitt memang lebih jelek dan tubuh saya memang pendek, bogel, kontet mirip Napoleon Bonaparte, Danny De Vito, Peter Dinklage atau Ateng. Hujatan rasis juga tepat sebab saya memang rasis dalam makna positif yaitu saya senantiasa menghargai dan menghormati sesama manusia beda ras dengan diri saya karena dari sesama manusia yang beda ras dengan diri saya pribadi, saya dapat belajar memperluas wawasan pandang terhadap beranekaragam peradaban dan kebudayaan umat manusia di planet bumi ini.

Perlu diluruskan

Mengenai "*Cina tidak pilih Cina*" perlu sedikit diluruskan yaitu sebenarnya saya tidak pernah merasa diri saya Cina dan apabila memilih pasti saya bukan melihat latar belakang ras Cina atau bukan Cina, tetapi apakah menindas rakyat atau tidak menindas rakyat. Hujatan "hater ahok" dan "*ciong sama ahok*" juga perlu dikoreksi. Saya tidak benci Ahok, namun saya memang tidak setuju pada kebijakan Ahok menggusur rakyat secara melanggar hukum, hak asasi manusia (HAM), agenda pembangunan berkelanjutan, kontrak politik Jokowi dengan rakyat miskin, serta Pancasila.

Mengenai saya "*ciong sama Ahok*" perlu diperjelas dalam hal apa. Jika dalam hal antikorupsi jelas saya tidak "ciong" sebab sepaham dengan Ahok, namun dalam hal bicara kotor dan kebijakan menggusur rakyat, memang saya tidak sepaham dengan Ahok. Hujatan "*kampret*" saya anggap pujian sebab saya pengagum kampret yang mampu terbang melayang di malam hari gelap gulita tanpa nabrak-nabrak di samping kampret ternyata memegang peran ekologis sangat penting. Hujatan "*provokator*" adalah sanjungan namun sebenarnya terlalu tinggi bagi saya. Sebab para pejuang kemerdekaan Indonesia yang sangat saya hormati adalah para provokator gerakan perlawanan terhadap penjajah.

Hujatan "*tua bangka bau tanah cari popularitas*" sebagian benar sebagian keliru. Berdasar usia yaitu 68 tahun, saya memang layak disebut sebagai "*tua bangka bau tanah*". Namun hujatan "*cari popularitas*" bikin saya bingung menanggapinya. Jika saya membenarkan berarti saya ingkar kenyataan tidak pernah merasa "*cari popularitas*" sebab popularitas yang mencari saya, maka pasti saya malah akan dihujat "sombong".

Ketimbang dihujat "*sombong*", maka saya mengalah saja dengan membenarkan bahwa saya memang "tua bangka bau tanah cari popularitas" sekaligus demi memuaskan para penghujat saya. Mohon dimaafkan bahwa hujatan "*tukang ngeles*" terpaksa saya anggap sebagai pujian sebab kemampuan "*ngeles*" merupakan kemampuan paling penting dalam semua ilmu bela diri termasuk tinju. Hujatan "*gak kualitas banyak gaya*" 50 persen benar sebab secara lahir-batin memang saya "*gak kualitas*" namun tidak benar bahwa saya "*banyak gaya*" sebab saya merasa tidak memiliki hal-hal yang layak menjadi alasan bagi saya untuk "banyak gaya".

Bersyukur

Saya bersyukur sebab akibat dihajar badai hujatan, maka saya lebih bersemangat dalam mengejawantahkan makna luhur terkandung di dalam ajaran Jesus Kristus "Jangan Menghakimi" di mana di dalamnya juga hadir ajaran "Jangan Menghujat".

Saya juga makin mantap dalam berupaya menghayati makna luhur terkandung di dalam hadits Jihad Al-Nafs: Al Sukuni meriwayatkan dari Abu Abdillah Al Shadiq bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menyambut pasukan sariyyah kembali setelah memenangkan peperangan, Beliau bersabda: "Selamat datang wahai orang-orang yang telah melaksanakan jihad kecil tetapi masih harus melaksanakan jihad akbar!".

Ketika orang-orang bertanya tentang makna sabda itu, Rasul SAW menjawab: "Jihad kecil adalah perjuangan menaklukkan musuh. Jihad akbar adalah jihad Al-Nafs, perjuangan menaklukkan diri sendiri!".

Mematuhi ajaran Jesus serta terinspirasi oleh hadits Jihad Al-Nafs, maka ketimbang bersusah payah menaklukkan orang lain untuk tidak menghujat, lebih bijak saya berupaya menaklukkan diri saya sendiri agar jangan sampai jemawa menghujat orang lain.

Pada hakikatnya, memang kemelut hajaran badai hujatan membuat saya bersyukur bahwa saya bukan manusia yang menghujat sesama manusia namun manusia yang dihujat oleh sesama manusia.

Jaya Suprana, Seniman dan budayawan;

Pendiri Sanggar Pembelajar Kemanusiaan

REPUBLIKA, 03 Mei 2017

Politik Bunga yang Lucu-lucu Gimanaaa Gitu!

Tiga anak kecil/ Dalam langkah malu-malu/ Datang ke Salemba/ Sore itu. Akrab, atau bahkan mungkin hafal dengan kalimat-kalimat sederhana yang sangat deskriptif itu? Ya, itu adalah penggalan awal baris-baris puisi Taufiq Ismail berjudul 'Karangan Bunga' yang kita pelajari sejak SMP dulu.

Jika kita ingat lanjutannya —Ini dari kami bertiga/ Pita hitam pada karangan bunga/ Sebab kami ikut berduka/ Bagi kakak yang ditembah mati/ Siang tadi— maka terlihat bahwa dalam puisi itu karangan bunga dimaksudkan sebagai bentuk ungkapan duka cita.

Termuat dalam buku 'Tirani dan Benteng' yang pertama kali terbit pada 1966, puisi tersebut lahir dari situasi politik masa itu. Kala itu, terjadi demonstrasi mahasiswa melawan pemerintah Orde Lama. Bunga, setidaknya dalam puisi itu, terasa dekat dengan dunia politik, menjadi idiom untuk mewakili sebuah sikap polos dari anak-anak yang bersimpati pada perjuangan mahasiswa.

Bunga memang bisa menjadi apa saja, untuk mewakili ungkapan perasaan. Sampai-sampai, ada peribahasa yang sangat terkenal; ungkapkanlah dengan bunga. Pada Sitor Situmorang, bunga mewakili perasaan kesepian yang teramat sangat. Simak puisi pendeknya yang cukup terkenal, 'Bunga di Atas Batu':

> *bunga di atas batu/ dibakar sepi // mengatas indera/ ia menanti // bunga di atas batu/ dibakar sepi*

Kelak, di kemudian hari, bunga menjelma menjadi simbol perjuangan yang "nggegirisi" pada puisi Wiji Thukul, penyair-aktivis yang hilang dalam huru-hara Reformasi 1998.

> *Seumpama bunga/ kami adalah bunga yang tak kau kehendaki/ tumbuh…//…kami adalah bunga yang dirontokkan di bumi/ kami sendiri // jika kami bunga/ engkau adalah tembok/ tapi di tubuh tembok itu telah kami tebar biji-biji/ suatu saat kami akan tumbuh bersama/ dengan keyakinan: engkau harus hancur.*

Imajinasi sang penyair yang ingin menghancurkan tembok dengan menebar biji yang kelak tumbuh bunga, merupakan sesuatu yang menggetarkan. Mengapa bunga? Menghancurkan tembok dengan bunga? Sungguh mengejutkan bahwa Wiji Thukul, seorang buruh yang berorganisasi dan menulis puisi, menggunakan matafora bunga sebagai sesuatu yang kelak menumbangkan tirani.

Kita pun jadi ingat sebuah cerita pendek yang legendaris karya Kuntowijoyo yang ditulis pada 1968, berjudul 'Dilarang Mencintai Bunga-bunga'. Cerpen ini mengisahkan hubungan antara sang tokoh utama, seorang bocah dengan bapaknya yang mendidik dirinya dengan keras. Sang bapak selalu menunjukkan wibawanya sebagai orangtua dengan menanamkan nilai-nilai keberanian dan kekuatan seorang laki-laki kepadanya.

Namun, secara ironis, sang bocah justru memperlihatkan kecenderungannya menyukai bunga-bunga, yang dianggap sebagai simbol kelemahan. Hal itu akibat dari persahabatannya dengan seorang kakek tetangga dekat rumahnya, yang mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diajarkan sang ayah.

Sang kakek gemar merawat bunga, dan bocah itu belajar darinya tentang makna kedamaian dan keindahan; bahwa selain keberanian dan kekuatan seperti yang diajarkan ayahnya di rumah, orang perlu juga mengenal nilai-nilai kelembutan dan ketenangan, yang disimbolkan dengan bunga --sesuatu yang membuat sang ayah marah.

Bunga memang subversif. Ia bisa terasa mengusik, mengganggu, mengancam, dan mengintimidasi karena kekayaan makna yang bisa disampaikan olehnya. Ketika seseorang merayakan sebuah kebahagiaan atau kemenangan dalam hidupnya, lalu mendapatkan hadiah bunga, maka yang terjadi adalah sebuah kelaziman. Bunga seolah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Namun, ketika ada orang yang kalah dalam sebuah pertandingan, katakanlah menjadi "pecundang", namun mendapat kiriman karangan bunga yang mengalir tiada henti, maka hal itu menjadi masalah. Bunga tiba-tiba menjadi sesuatu yang "melawan kodrat"-nya; dan itu membuat banyak orang gelisah. Masa orang yang sedang "menderita" kekalahan justru mendapat ungkapan simpati lewat bunga, ini jelas ndak benar!

Pasti semua itu hanya rekayasa. Maka, timbullah berbagai spekulasi, komentar dan analisis; ada yang mengatakan bunga-bunga itu adalah rekayasa —sebenarnya pengirimnya hanya satu orang, dengan ucapan yang dibuat bermacam-macam. Bunga-bunga itu adalah sebuah "kecelakaan"; sudah telanjur dipesan untuk merayakan kemenangan, namun ternyata kekalahanlah yang didapat, maka dibuatlah seolah-olah bunga-bunga itu adalah bentuk dukungan spontan tanda simpati.

Ada juga yang dengan lantang dan keras berteriak, bunga-bunga itu hanyalah pencitraan murahan. Namun, semakin orang mengomentari macam-macam soal bunga-bunga itu, justru diam-diam semakin menunjukkan bahwa orang mengakui sedemikian besar makna bunga-bunga itu. Bunga-bunga yang diam membisu itu, pasrah diterpa angin atau pun hujan, seolah-olah bicara sendiri; bicara banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Apapun kata orang, faktanya, bunga-bunga terus mengalir, meluber sampai tak tertampung di tempat yang semestinya. Orang-orang bahkan rela antri untuk berfoto bersama bunga-bunga itu, atau memfoto satu per satu karangan bunga itu sendiri, lalu menyebarkannya. Sehingga, orang bisa membaca ucapan yang tertera pada tiap-tiap karangan bunga itu, yang semuanya bernada lucu-lucu.

Bunga-bunga itu ternyata seolah-olah sedang menertawakan diri sendiri, menertawakan sebuah kekalahan yang memang mau diapain lagi, namanya sudah kalah….

Pada akhirnya, bunga-bunga yang dipersoalkan oleh sebagian kelompok orang itu ternyata justru pertama-tama bukan ditujukan kepada pihak penerima. Melainkan, bunga-bunga itu —kalau kita lihat fotonya satu per satu yang beredar di sosmed— sebenarnya ditujukan untuk kesenangan dan hiburan pihak pengirimnya sendiri, sebagai bentuk lucu-lucuan, main-main, dengan berbagai ucapan yang aneh-aneh; dari 'undangan pernikahan' hingga berbagai plesetan dan lawakan lainnya.

Dan, hal itu pun ternyata justru semakin membuat sebagian orang, kelompok-kelompok tertentu, yang merasa terganggu, terancam, terintimidasi, semakin merasa gimanaaa…gitu. Lho, wong kalah kok malah tertawa. Bersuka ria dengan bunga-bunga. Foto-foto. Mestinya kan sedih dan menangis tersedu-sedu. Terpuruk menyesal di pojokan. Lagi-lagi, ini jelas ndak benar!

Tapi, seperti kata kakek pecinta bunga sahabat sang bocah dalam cerpen Kuntowijoyo tadi, "Menangis adalah cara yang sesat untuk meredakan kesengsaraan. Kenapa tidak tersenyum, Cucu? Tersenyumlah. Bahkan, sesaat sebelum orang membunuhmu. Ketenangan jiwa dan keteguhan batin mengalahkan penderitaan. Mengalahkan, bahkan kematian…."

Ah, seandainya bunga-bunga itu sejak awal dibiarkan saja —tapi, apa mungkin? Dari aromanya saja, bunga-bunga dengan aneka warna yang indah itu kadang memang bisa meresahkan. Bunga mawar di malam Jumat misalnya, bikin bulu kuduk merinding. Bunga memang bisa menjadi apa saja, bermakna apa saja, ditafsirkan sebagai apa saja. Ya, politik bunga itu sungguh subversif. Kabar terakhir, mereka membakar bunga-bunga itu….

Is Mujiarso, Wartawan Detikcom; Tulisan ini merupakan pendapat dan pandangan pribadi, sama sekali tidak mewakili sikap dan kebijakan redaksi

DETIKNEWS, 03 Mei 2017

Institusionalisasi Kebohongan

"*Dengan menyediakan akses ke berbagai kalangan dengan beragam latar belakang, media sosial memperkaya pengetahuan dan perspektif penggunanya.*" Inilah klaim perusahaan media sosial Facebook tentang apa yang mereka berikan kepada penggunanya. Harus diakui, media baru memberikan keluasan lingkup pemikiran dan sudut pandang. Internet hadir menembus berbagai ketidakmungkinan. Hari ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, data, dan wacana dalam spektrum yang sangat luas dengan begitu mudah dan murah. Media sosial memungkinkan setiap orang untuk bertindak sebagai sumber yang otonom dan bebas dalam ruang publik baru yang sangat egaliter.

Peran Internet

Namun, benarkah internet memperkaya perspektif dan pemahaman penggunanya? Farhad Manjoo dalam ulasannya berjudul "*How the Internet Is Loosening Our Grip on the Truth*" (New York Times, 3/11/2016) menunjukkan tren yang sebaliknya. Merujuk pada beberapa penelitian, Manjoo mengingatkan media sosial juga berdampak distortif terhadap pemahaman masyarakat tentang kebenaran dan bagaimana kebenaran semestinya diperlakukan. Kebanyakan pengguna internet, terlebih-lebih ketika menghadapi hoaks dan fakenews, terjerembab dalam apa yang disebut sebagai echo chambers of information.

Keluasan data, informasi, dan perspektif yang tersaji di dunia maya tidak selalu membuat pikiran kita lebih terbuka terhadap perbedaan dan keragaman tafsir. Sering terjadi, banyak orang menggunakan internet hanya untuk memperoleh informasi atau pernyataan yang mengafirmasi pendapatnya sendiri, lalu kemudian menganggap informasi dan pernyataan yang sebaliknya sebagai bohong atau palsu.

Banyak orang menggunakan internet untuk menjumpai orang-orang seideologi serta untuk menempatkan orang-orang yang tidak seideologi sebagai musuh atau pesakitan. Lebih jauh lagi, mereka kemudian menyebarkan keyakinan ideologis tanpa merasa perlu untuk melakukan falsifikasi terlebih dahulu. Alih-alih memperluas cakrawala pemikiran, internet di sini lebih berfungi sebagai sarana untuk meneguhkan dan menyebarkan keyakinan ideologis tanpa peduli betapa problematisnya penyebaran keyakinan tersebut bagi khalayak luas.

Hal ini dibuktikan dalam penelitian The Laboratory of Computational Social Science di IMT School for Advanced Studies Lucca, Italia, tahun 2014. Penelitian ini menunjukkan ketidakpercayaan institusional (institutional distrust) dan bias kognitif merupakan fakta dominan dalam lalu lintas diskusi di media sosial. Para pengguna media sosial hanya tertarik pada informasi atau pernyataan yang sesuai dengan pandangannya sendiri meskipun mereka paham informasi dan pernyataan tersebut spekulatif atau palsu.

Berhadapan dengan pluralitas pendapat dan perspektif, pengguna internet justru cenderung irasional dan acuh tak acuh. Mereka selalu terdorong berbicara secara impulsif dan spontan berdasarkan pra-anggapan, bias, dan apriori yang telah terlebih dahulu ada dalam benak mereka.

Apa yang hilang pada aras ini lebih mendasar dari sekadar keterbukaan terhadap perbedaan pendapat, tetapi juga sesuatu yang khas bagi spesies manusia: kemampuan berkomunikasi dengan diri sendiri (intrapersonal communication).

Yang membedakan manusia dengan binatang adalah binatang bertindak murni berdasarkan naluri, sedangkan manusia mampu bertindak berdasarkan pertimbangan hati nurani, norma-norma serta empati pada orang lain. Manusia adalah makhluk yang mampu menunda tindakannya untuk berpikir tentang dampak dan konsekuensi.

Pada era media sosial hari ini, kemampuan berkomunikasi intrapersonal ini memudar pada begitu banyak orang. Tiba-tiba saja pengguna media sosial, tidak peduli latar belakang pendidikan dan status sosialnya, muncul bagaikan serigala yang siap menerkam siapa pun yang berbeda pendapat dengan dirinya. Yang juga hilang pada diri pengguna media sosial adalah kemampuan melakukan verifikasi. Hari ini, kemampuan atau lebih tepatnya kemauan untuk melakukan verifikasi menjadi sesuatu yang mahal. Bahkan, media konvensional pun semakin lazim mengabaikan disiplin verifikasi. Kalaupun masih ada segmen media jurnalistik yang berusaha berdisiplin verifikasi, ikhtiar mulia ini kalah gaungnya dengan arus hoaks dan fakenews yang begitu deras membanjiri ruang media.

Industri Kebohongan

Dalam konteks inilah, Manjoo berbicara tentang fenomena institusionalisasi kebohongan. Institusionalisasi ini terjadi paling tidak dalam tiga pengertian. Pertama, hoaks dan fakenews tidak diperlakukan sebagai amoralitas atau pelanggaran hukum, tetapi justru secara sengaja dipraktikkan bahkan dikomodifikasi. Persebaran hoaks dan fakenews telah menjadi bisnis baru dan diadopsi sebagai bagian dari strategi pemenangan pemilu.

Analisis BuzzFeed terhadap pesan-pesan politik yang disebarkan melalui Facebook tentang pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun lalu menunjukkan 38 persen dari pernyataan-pernyataan kubu Republik berisihoaks atau fakenews, demikian juga sebaliknya, 20 persen dari pernyataan-pernyataan kubu Demokrat juga hoaks atau fakenews.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Dalam Pilkada DKI Jakarta, misalnya, cukup mudah menemukan bukti-bukti bahwa di gelanggang media sosial, semua kandidat dirugikan sekaligus diuntungkan oleh penyebaran hoaks dan fakenews. Menyudutkan lawan politik dengan informasi yang spekulatif dan menghakimi menjadi hal yang tak terelakkan dalam strategi pemenangan pemilu pada kedua belah pihak.

Kedua, cara yang paling ampuh untuk menghadapi hoaksdan fakenews sesungguhnya adalah dengan mengalihkan perhatian publik pada jurnalisme yang benar dan bermartabat. Namun, bersamaan dengan datangnya gelombang hoaks dan fakenews, media jurnalistik konvensional justru tengah mengalami krisis eksistensi yang luar biasa.

Meminjam analisis Senator Claire McCaskill (The New York Times, 6/10/2016), jika demokrasi mengalami krisis dewasa ini, penyebabnya bukan hanya karena hoaksdan fakenews telah merasuki masyarakat, tetapi juga karena media jurnalistik konvensional tidak mampu hadir sebagai ”juru selamat”.

Media konvensional gamang dalam mentransformasikan diri dalam lanskap komunikasi-informasi yang baru dan semakin memudar performa bisnis sekaligus pengaruh politiknya. Jika masyarakat semakin terseret oleh arushoaks dan fakenews, itu karena jurnalisme yang benar dan bermartabat tidak hadir dengan kekuatan yang mengarahkan masyarakat.

Ketiga, institusionalisasi kebohongan pada akhirnya mewujud dalam ketidakmampuan kolektif untuk membedakan mana yang bohong dan mana yang jujur, mana yang palsu dan mana yang asli. Dalam ruang publik yang sedemikian rupa didominasi oleh media-media baru hari ini, masyarakat kehilangan referensi untuk memahami persoalan secara jernih dan hati-hati. Sebagian media jurnalistik konvensional tidak bisa mengambil jarak dari arus hoaksdan fakenews, alih-alih justru memanfaatkannya sebagai strategi untuk menarik perhatian khalayaknya.

Karena itu, yang terjadi kemudian adalah yang bohong dianggap sebagai kebenaran, yang benar dipahami sebagai fitnah, yang palsu sering dianggap sebagai asli dan seterusnya. Inilah habitat yang kondusif untuk berkembangnya industri kebohongan dan kepalsuan.

Agus Sudibyo, Direktur Indonesia New Media Watch

KOMPAS, 06 Mei 2017

Politik Miskin Apresiasi

Politik kita hari ini telah melahirkan level antagonisme yang tinggi.

Kompetisi pemilihan umum, baik daerah maupun pusat, sudah dimaknai dengan harga yang sebanding hidup dan mati, dibuktikan dengan seluruh energi, fanatisme, dan kemarahan politik yang menyertai. Komitmen damai yang diteken oleh para calon di hadapan penyelenggara pemilu jarang yang secara sungguh-sungguh menggaransi keamanan. Sampai hajatan pemilu itu sendiri usai, sentimentalitas politik masih mengental di sekujur struktur sosial.

Mode Alamiah Politik

Ada berkah dari fakta itu. Kemalasan publik akibat trauma politik pada era Orde Baru pelan-pelan hilang. Gairah partisipasi politik membubung tinggi, terlepas dari apa pun bentuk dan definisi dari partisipasi itu, merusak ataupun membangun. Apatisme yang selama beberapa tahun terakhir sering menjadi hantu dalam ritus pemilu kini diganti dengan semangat yang menyala-nyala. Masyarakat kita secara psikologis sedang melakukan pemosisian ulang dan penyembuhan diri dari trauma masa lampau.

Di balik berkah berharga ini sayangnya masih menyimpan kutuk: partisipasi politik yang tinggi tak sejalan dengan kualitasnya. Kesibukan orang dalam bertukar pesan politik tak diimbangi dengan kesadaran untuk tetap menenggang dan menghidupkan toleransi. Pada gilirannya ruang publik terbelah menjadi dua kutub sikap, antara puja-puji pada kandidat idola atau sumpah-serapah untuk kandidat sebelah.

Masuk akal andai kini kita tiba pada situasi politik yang miskin apresiasi dan pelit memberi kredit positif. Ikatan emosional yang dijahit lewat momen-momen politik membuktikan betapa kuatnya jalinan itu, terkadang mengalahkan akal sehat. Aura permusuhan dihidupkan bukan saja karena politik menuntut kesetiaan sepihak, melainkan juga karena dari sana sifat alami dari politik meruap: ia melazimkan tabrakan sosial demi ketercapaian tujuan. Logika yang sangat Machiavellian ini adalah akar dari miskinnya apresiasi, yang secara sengaja bahkan tak diizinkan untuk ada. Sebabnya jelas, harmoni bukanlah mode alamiah dari kekuasaan.

Konflik adalah jalan yang direstui karena dari sana dapat dicapai tujuan yang didamba sekaligus dapat disingkirkan penghalang yang mengganggu. Jika rumusnya demikian, adakah positivitas dalam kehidupan politik bersama kemustahilan belaka? Apakah sikap apresiatif harus mundur demi memberi jalan pada tujuan-tujuan satu dimensi yang membakar kohesi sosial?

Teladan

Kesulitan dalam menghadirkan harmoni sesungguhnya berakar dari ketiadaan penjelasan yang mampu menyepakati apa yang sedang diperjuangkan Indonesia melalui politiknya. Mustahil merumuskan

kesepakatan itu jika pada saat yang sama kita kehilangan teladan ideologis dan teladan elite, yang mampu melampaui logika biner menang-kalah *zero sum game*.

Perjalanan berjenjang setelah periode reformasi membuktikan betapa banyak keyakinan dan argumen yang dihidupi mati-matian demi kemenangan politik secara pragmatis. Siapa atau apa teladan itu tak jua jelas batang hidungnya. Ia harus memiliki kapasitas menebang semua prasangka yang merusak, menabung simpati dari segala lini, dan menularkan kerendah-hatian. Teladan kita butuhkan karena kondisi khaotik telah membutakan semua orang dari pegangannya, baik moral maupun ideologis.

Selain itu, politik harus dilepaskan dari anggapan sebagai praktik sehari-hari dalam mengelola kekuasaan. Ia jauh lebih genuine dan sakral karena menentukan kehidupan bersama sebagai alasan mendasar mengapa sistem politik dibangun.

Maka, menahan gejolak konflik sambil menumbuhkan dukungan dan apresiasi politik harus diletakkan sebagai sebuah fase kudus dari kedewasaan politik. Terkandung pula di sana suatu martabat, baik kelompok maupun individual, yang harus dijaga. Menerima keadaan bahwa kehidupan bersama jauh lebih berharga dari apa pun, berarti pula menanggalkan beratnya jubah egoisme politik.

Hal itu tentu saja harus dipuji sebagai sikap menjaga martabat. Sikap semacam ini juga melambangkan respons akademik yang elegan bagi elite politik terhadap masyarakat politik.

Rendy Pahrun Wadipalapa, Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya

KOMPAS, 06 Mei 2017

Kontroversi Vonis Ahok

Apa saja yang kita bicarakan tentang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selalu memantik kontroversi. Banyak yang suka tapi tidak sedikit pula yang membencinya. Yang mencela dan membela Ahok jumlahnya berimbang – hampir sama. Karena itu kata "kontroversi" bisa mewakili ekspresi kita terhadap sosok Ahok.

Proses peradilan terhadap Ahok pun tak lepas dari kontroversi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pelaku penodaan agama, perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum dan ahli agama terbelah cukup tajam. Banyak pihak yang mengatakan bahwa Ahok telah melakukan penodaan agama. Tapi, tidak sedikit orang yang membelanya sembari menyatakan bahwa Ahok tidak menodai agama.

Kontroversi kemudian berlanjut saat pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jaksa Penuntut Umum (JPU), alih-alih menuntut Ahok dengan Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama sebagai dakwaan primer, malah menuntut Ahok dengan tuduhan melanggar Pasal 156 KUHP sebagai dakwaan alternatif pertama. Yang mengagetkan kita justru vonis hakim yang berbanding terbalik dengan tuntutan JPU.

Majelis hakim justru menerapkan Pasal 156a KUHP dalam putusannya. Ahok pun divonis 2 tahun penjara, dengan perintah dilakukan penahanan. Bagaimanakah potret hukum atas putusan Ahok tersebut?

Negara Absen

Bila kita berdiri dalam posisi yang netral dan membaca dengan saksama Penetapan Presiden No.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, kita akan menyadari bahwa ada proses yang terlewatkan ketika Ahok ditersangkakan, terlebih lagi divonis bersalah di pengadilan.

Pada Pasal 2 ayat (1) peraturan a quo, disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan penodaan agama maka diberi peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu, dalam satu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Pada Pasal 3 ditegaskan bahwa jika ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) tidak diindahkan maka pelaku dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun.

Merujuk pada peraturan ini bayangan saya adalah bahwa jika ada orang yang melakukan penodaan agama maka hal yang paling utama adalah diberi peringatan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, dalam bentuk surat keputusan bersama. Jika ia kemudian tidak mengindahkannya maka orang tersebut dipidana.

Itu artinya ketentuan a quo sesungguhnya lebih mengutamakan tindakan preventif atau pencegahan ketimbang tindakan represif. Hal ini sejalan dengan filsafat pemidanaan: nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne

peccetur; artinya seorang bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa.

Apalagi secara normatif karakter penodaan agama berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Tidak ada kerugian individu secara langsung atas penodaan agama, kecuali terganggungnya ketertiban dalam beribadah dan bermasyarakat. Atas dasar itulah negara mesti memberi teguran terlebih dahulu sebelum diproses hukum.

Dalam kasus Ahok, ia sama sekali tidak diberi peringatan keras oleh negara melalui Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Karena itu proses hukumnya sesungguhnya contradictio interminis dengan peraturan a quo. Sehingga tidak memenuhi prinsip rule of law. Dengan tidak adanya peringatan keras maka menunjukkan bahwa negara tidak hadir alias absen dari proses hukum yang dialami Ahok.

Substansi Vonis

Paling tidak ada tiga pertimbangan majelis hakim yang kontradiktif. Pertama, majelis hakim memvonis Ahok 2 tahun penjara dengan berpedoman pada Pasal 156a KUHP. Sebelum diputus, Ahok telah dituntut oleh JPU dengan Pasal 156 KUHP berupa pidana penjara 1 tahun, masa percobaan 2 tahun. Meskipun pada dakwaannya JPU menggunakan dakwaan alternatif yang menempatkan Pasal 156a KUHP sebagai dakwaan utama dan 156 sebagai dakwaan alternatif pertama, tapi dalam tuntutannya JPU malah menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP. Itu artinya JPU sangat mahfum, bahwa ia tidak memiliki bukti yang memadai untuk menuntut Ahok dengan pasal penodaan agama.

Tegasnya, dakwaan penodaan agama dalam perspektif JPU tidak akan terbukti sehingga dialihkan pada dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 156 KUHP. Lalu mengapa majelis hakim justru memvonis Ahok dengan Pasal 156a KUHP?

Saya membayangkan bahwa kelihatannya majelis hakim menggunakan bukti pidato Ahok yang menyinggung Surat Al Maidah di Kepulauan Seribu sebagai alat bukti utama, kemudian dikuatkan dengan alat bukti keterangan ahli dari JPU. Padahal ada friksi yang sangat tajam antara pendapat ahli JPU dengan ahli dari terdakwa. Selain itu, menunjukkan bahwa majelis hakim justru secara diam-diam berusaha mengkonstruksi alat bukti sendiri, yang mana JPU malah sudah tidak yakin dengan alat bukti yang diajukannya.

Inilah yang pernah saya katakan bahwa sulit melihat hukum berjalan tegak dalam kasus Ahok. Ia akan berkelindan dengan intervensi politik dan kekuasaan.

Kedua, pertimbangan yang memberatkan Ahok bahwa ia sebagai gubernur seharusnya tidak melakukan penodaan agama. Pertimbangan ini kelihatannya agak sumir dalam konteks tindak pidana penodaan agama.

Justru seharusnya yang menjadi pertimbangan hakim adalah karena Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta yang sudah berkontribusi dan berprestasi membangun ibukota, maka ini menjadi alasan yang meringankan —bukan malah memberatkan. Pertimbangan majelis hakim tersebut akan sangat tepat digunakan bila memutus tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crimes*. Artinya pejabat publiknya tidak amanah –merampok uang negara sehingga mesti menjadi alasan yang memberatkan.

Ketiga, majelis hakim memerintahkan agar terdakwa ditahan. Secara kasat mata kita dapat melihat bahwa Ahok begitu kooperatif dan sopan saat menghadiri persidangan. Karena itu pada tahap penyidikan dan penuntutan ia tidak ditahan. Lalu mengapa sekarang harus ditahan?

Saya berpendapat seharusnya Ahok tak perlu ditahan sebab ia pejabat publik yang sulit untuk melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti apalagi mengulangi tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Apalagi perkaranya belum berkekuatan hukum tetap sehingga belum saatnya ia ditahan.

Terakhir yang ingin saya tegaskan adalah bahwa tulisan ini tidak ditujukan untuk membela Ahok. Melainkan, sebagai refleksi agar tidak terjadi proses hukum yang serupa di masa yang akan datang.

Hariman Satria, Kandidat Doktor Ilmu Hukum UGM; Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

DETIKNEWS, 10 Mei 2017

Menyikapi Vonis Ahok

TEKA-TEKI yang selama ini mengambang, terjawab sudah! Majelis hakim yang diketuai Ketua PN Jakut Dwiarso Budi Santiarto dengan mantap tanpa ragu mengetukkan palu, dua tahun penjara dan langsung masuk penjara untuk Ahok yang dinilai menista agama. Ahok terbukti bersalah, memenuhi semua unsur pelanggaran yang ada pada Pasal 156a KUHP. Baik unsur menyatakan permusuhan atau kebencian, penodaan terhadap suatu agama dan dilakukan di depan umum. Pujian atas independensi majelis hakim ini dalam bertindak tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri khususnya dari kaum muslimin di mancanegara.

Selama ini sikap skeptis masyarakat cukup beralasan. Sejak awal dilaporkan ke polisi, Ahok tidak ditahan. Padahal para penista agama sebelumnya langsung saja ditahan, baru kemudian diadili. Kenapa Ahok mendapat perlakuan istimewa? Begitu juga saat kasus dinyatakan P-21 (berkas lengkap), jaksa penuntut umum (JPU) juga tidak menahannya, kemudian dalam hitungan jam JPU langsung mendaftarkan berkasnya ke PN Jakut. Kesannya kasus ini bagaikan bola panas membara jika dipegang terlalu lama oleh aparat penegak hukum.

Rasa keadilan masyarakat pun terluka. Harapan masyarakat satu-satunya hanyalah majelis hakim sebagai gerbang terakhir penegakan hukum. Kini, walau dijatuhi hukuman dua tahun penjara tapi langsung dipenjara, sebagian besar masyarakat merasa terobati rasa kecewanya selama ini yang berbulan-bulan mengikuti masa persidangan yang seolah bagaikan panggung sandiwara, karena biasanya untuk kasus yang sama cukup 3 atau 4 kali persidangan saja.

Vonis dua tahun itu memang bersifat ultrapetita, yaitu vonis melebihi tuntutan JPU yang hanya satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Ketentuan yang melarang ultrapetita itu hanya berlaku untuk perkara perdata yang diatur pada Pasal 178 (2) HIR. Sementara untuk kasus pidana, hakim secara independen tidak perlu tunduk pada ketentuan tersebut guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat sebagaimana maksud-tujuan diadakan UU tersebut.

Dampak Perbuatan Ahok

Sebagaimana kita tahu, *multiplier effect* yang ditimbulkan perbuatan Ahok selama ini memang tidak sedikit. Masyarakat seakan terpecah ada yang pro dan kontra Ahok. Rusaknya rasa kesatuan dan persatuan sesama anak bangsa. Semakin menipisnya rasa nasionalisme masyarakat yang selama ini dikenal sangat patriotik dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tanpa pamrih, tercabiknya rasa kerukunan dan sopan santun dalam bertutur kata di masyarakat. Siapa yang meniup angin maka pantaslah dia menerima badai. Tangan mencincang bahu memikul. Dengan berpikir positif, kita berharap vonis yang telah dijatuhkan ini bisa merekat kembali keretakan atau menjahit perpecahan yang tercabik.

Menyikapi Vonis

Bagi teman-teman pendukung Ahok yang selama ini mengidolakan jagoannya agar terbebas dari jerat hukum, bisa dipahami jika kecewa. Kalau vonis dirasa kurang adil, masih banyak upaya hukum untuk diperjuangkan. Banding atau kasasi salah satu di antaranya, selain peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa. Vonis yang menghukum Ahok bukan berarti esok hari Jakarta akan kiamat, melainkan hanya "the show must go on." Untuk sementara, satu permasalahan hukum sudah selesai. Mari berkemas untuk menapak masa depan Jakarta yang lebih baik pascakasus Ahok, bersama pemimpin yang bisa diterima mayoritas masyarakat Jakarta.

Sebagai umat beragama, semestinya kita berpikir bahwa tidak ada "suatu peristiwa terjadi secara kebetulan" melainkan hal itu terjadi atas kehendak dari Tuhan Yang Mahakuasa. Sebutir debu pun tidak akan berpindah tempat jika tidak diterbangkan angin dan begitulah selanjutnya.

Bagi kaum muslimin, tidak ada hal yang perlu dirayakan untuk vonis tersebut, tetapi harus bisa mengambil hikmah daripadanya. Karena suatu sikap arogansi dalam kepemimpinan serta memaksakan kehendak demi mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara, termasuk mencoba mengadu domba umat Islam dengan menghinakan kitab suci Alquran sehingga menimbulkan pro-kontra di antara mereka bukanlah suatu perbuatan yang baik.

Untuk menyikapi gerakan Ahok ini, umat Islam sudah di posisi yang tepat tanpa harus terpancing emosional dan berujung perang saudara. Aksi damai berkali-kali dengan menyuarakan kebenaran tanpa merusak lingkungan sekitar dirasa cukup tepat. Karena Allah SWT memerintahkan agar berusaha mengatasi masalah tersebut sesuai tingkat keimanan yang kita miliki masing-masing dan setelah itu berserah dirilah kepada Allah SWT.

Dan itu dialami Ahok dalam beberapa momentum terakhir. Proyek reklamasi Jakarta yang dibanggakannya dibatalkan PTUN Jakarta, kalah di Pilkada DKI Jakarta pada 19 April 2017 yang tidak pernah dia perkirakan sebelumnya, kemudian divonis dua tahun penjara dan langsung ditahan pada 9 Mei 2017, dan lain-lain.

Maka itu, mari kita ambil hikmah dari semua peristiwa di atas. Tidak perlu mengolok-olok kebenaran Alquran. Sang pencipta Tuhan YME akan murka jika hasil karyanya dinodai/ dihina. Mungkin akan lebih elegan jika kita saling jaga dan menghormati keimanan seseorang sesuai keyakinannya. "*Lakum dinukum waliyadin*" bagiku agamaku dan bagimu agamamu, aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah dan engkau tidak menyembah Tuhan yang kami sembah.

Muhammad Yuntri, Praktisi Hukum di Jakarta

KORAN SINDO, 10 Mei 2017

Terima Kasih Ahok!

Dalam tradisi Islam, dan sekiranya Ahok meyakininya, kata yang pantas terucap dalam kasus ini adalah alhamdulillah (puji syukur pada Tuhan). Syukur karena terlalu banyak pelajaran yang wajar, bahkan harus diambil oleh semua pihak. Hikmah-hikmah dari peristiwa ini serasa telah dirancang oleh Pencipta langit dan bumi. Mungkin, selama ini, banyak hal berlalu tapi semua seolah seperti biasa. Menjadikan kita berpura-pura bisu, atau memang telah buta dan tuli, sehingga semua berlalu tanpa makna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saya menuliskan ini secara khusus ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Ahok. Ini bukan basa basi. Tapi, tersadarkan oleh sensitivitas rasa adil yang masih bersemayam dalam hati kecil ini. Bahwa Ahok telah secara tidak langsung menjadi "penyebab" hadirnya hikmah-hikmah tadi.

Selama ini mayoritas rakyat Jakarta, bahkan Indonesia, terbuai oleh propaganda-propaganda media dan pencitraan, seolah calon pelayan publik jika datangnya dari kelompok mayoritas bangsa ini pasti diidentikkan dengan ketidak mampuan dan korupsi. Sehingga, begitu banyak rakyat Jakarta, dan Indonesia menutup mata terhadap realita bahwa yang namanya kesempatan dan kapabilitas itu tidak harusnya didominasi oleh kelompok tertentu. Jujurnya, terlalu banyak juga dari kalangan umat Islam yang mampu asal diberikan kesempatan yang sama.

Kalau bukan karena ulah Ahok, secara khusus seperti yang diputuskan oleh Majelis Hakim sebagai penistaan agama tertentu, mungkin saja rakyat Jakarta masih terbuai dengan propaganda-propaganda tadi. Sehingga, persepsi yang berkembang selama ini cenderung diterima sebagai fakta.

Terima kasih Ahok. Anda sudah membangunkan kesadaran umat Jakarta, dan dengan sendirinya Indonesia, jika dalam dunia demokrasi biarlah semua berjalan secara alami. Jangan pernah ada vonis sosial melalui ketuhanan media dan uang untuk menggagalkan peluang bagi semua kalangan dalam rumah Indonesia kita.

Selama ini yang paling berat bagi umat Islam adalah keluar dari sel-sel sempit golongan mereka. Masing-masing merasa berjuang untuk bangsa, negara dan agamanya. Tapi, sesungguhnya esensi perjuangan mereka adalah sekedar memperkuat dan memperindah sel-sel sempit itu.

Terima kasih Ahok. Anda telah memberikan nasehat dan peringatan yang berharga kepada umat Islam. Bahwa persatuan itu begitu berharga. Bahwa persatuan itu adalah kekuatan yang dahsyat.

Selama ini umat tercabik-cabik oleh kepentingan sempit dan golongan masing-masing. Tapi dengan sikap anda, baik pada kata-kata maupun karakter, telah menyadarkan mereka bahwa di hadapan umat ini adalah kepentingan yang lebih besar. Yaitu membela kebenaran, keadilan,

keragaman dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran yang terbangun dengan begitu dahsyat karena Anda.

Kesatuan umat itu tersimbolkan dalam gerakan 411, 212, dan seterusnya. Sebuah aksi demokrasi yang seharusnya dicatat oleh sejarah, tidak saja oleh bangsa Indonesia. Tapi dicatat oleh sejarah perjalanan demokrasi dunia itu sendiri.

Bagaimana mungkin ada demo besar, menuntut keadilan atas penistaan Kitab Suci mereka, dengan realita bahwa mereka adalah mayoritas. Tapi, semua itu, dilakukan dengan suasana damai dan tertib. Di mana di dunia ini bisa terjadi seperti itu? Apalagi dalam konteks umat Islam yang selalu dipersepsikan keras dan anarkis?

Terima kasih Ahok. Andalah penyebab sehingga realita yang sesungguhnya tentang umat ini mematahkan mitos banyak orang jika umat Islam itu tidak mengenal kata damai. Anda membuka mata dunia bahwa yang diinginkan umat Islam itu hanya satu, adil.

Dan jika keadilan itu dipenuhi, damai yang memang karakter alami umat ini dapat diwujudkan. Maka seharusnya Aksi 212 itu masuk MURI dan dijadikan kebanggan nasional Indonesia dan dunia Islam. Karenanya sekali lagi, terima kasih Ahok. Anda menjad penyebab tersingkapnya mutiara keumatan ini.

Juga terima kasih Ahok, Anda telah menjadi contoh dua hal sekaligus. Bahwa sesungguhnya Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, yang selama ini berusaha dipropagandakan sebagai negara yang "kurang fair" terhadap minoritas, anda membuktikan mampu menjadi walikota ibukotanya.

Terima kasih karena Anda dari kalangan minoritas dalam minoritas (Kristen Cina) tapi menjadi penyebab tersingkapnya realita bahwa dalam negara Indonesia itu semua bisa saja menjadi seseorang. Termasuk Anda menjadi gubernur dari ibukota negara Muslim terbesar di dunia.

Kalau itu terjadi di Inggris mungkin biasa saja. Toh memang kita akui bersama kalau Inggris sudah taubat dari masa lalunya yang kelam di seluruh dunia. Kalau itu terjadi di Amerika, mungkin itu juga biasa saja. Karena Amerika memang telah merdeka sejak 4 Juli 1776. Tapi ini terjadi di sebuah negara berkembang, mayoritas Muslim, merdeka relatif baru.

Tentu banyak orang yang terbingung-bingung bahkan menganggap ini sebuah peristiwa aneh. Negara berkembang, mayoritas Muslim, relatif baru memasuki era demokrasi, kok bisa seorang minoritas dalam monoritas bisa menjabat gubernur ibukota. Sebuah posisi yang sesungguhnya mewakili wajah dari negara Indonesia itu sendiri.

Maka, saya membayangkan di Cina sana ada orang Muslim yang jadi gubernur, di salah satu daerah saja. Tidak usahlah di Peking atau di ibukota RRT. Atau saya membayangkan seorang Muslim menjadi gubernur di

ibukota Singapura. Atau seorang Muslim menjadi gubernur di Manila, Roma, atau di negara-negara yang mayoritas non Muslim itu. Ah nampaknya mimpi. Tapi terima kasih Ahok, anda telah menjadi penyambung lidah bangsa ini kalau Indonesia itu memang hebat.

Terima kasih juga Ahok, anda telah menjadi penyebab harapan dan optimisme di Indonesia. Bahwa hukum dan penegak hukum (hakim-hakim) di negara ini masih banyak yang jujur. Saya yakin proses persidangan anda penuh dengan intervensi. Intervensi oleh masyarakat di jalan-jalan, dan ini adalah wajar dalam dunia kebebasan dan demokrasi selama dilakukan secara damai dan civil (beradab).

Tapi, juga tidak kalah pentingnya melalui kasus Anda, hakim-hakim telah membuktikan reputasi yang baik. Saya yakin, tekanan dan intervensi di belakang layar itu sangat luar biasa dari pihak yang punya kekuatan, baik politik maupun ekonomi. Tapi, pada akhirnya hakim telah memutuskan sesuatu yang boleh jadi belum memuaskan kedua pihak. Tapi itulah kata hukum. Di saat hukum telah berbicara, maka biarlah hukum menikmati hak supremasinya tanpa intervensi lagi.

Banyak orang yang ragu apakah hakim akan independen dalam keputusannya. Saya yakin di kedua belah pihak ada keraguan itu. Kenyataannya, kasus Anda ini bisa kembali dijadikan sebagai "barometer" keadilan di Indonesia. Walau ini hanya percikan cahaya di tengah kegelapan peradilan di Tanah Air.

Akhirnya juga terima kasih karena Anda telah mengingatkan kita semua betapa berharganya "toleransi dan kerukunan" antaumat itu. Tapi, toleransi dan kerukunan itu bukan sesutau yang jatuh dari langit. Melainkan sebuah proses panjang, menaiki gunung tinggi dan menyelami dalamnya laut. Betapa tidak mudahnya merajut hubungan harmoni di tengah keragaman Indonesia yang luar biasa itu.

Dengan sikap Anda selama ini, dan pernyataan Anda dalam beberapa kesempatan itu, telah mengingatkan kita bahwa toleransi dan kerukunan yang mahal itu harus kita jaga bersama. Itu adalah aset bangsa dan negara ini, melebih Freeport dan kekayaan lainnya.

Apalah arti kekayaan alam, jika manusianya tidak mampu membangun kehidupan yang harmoni dan damai di antara mereka. Oleh karenanya setiap sikap dan kata dari anak-anak bangsa harus dijaga sensitivitasnya agar toleransi dan kerukunan yang telah menjadi "darah daging" manusia Indonesia itu tidak terkoyak dan terkontaminasi.

Pada akhirnya saya ingin menutup dengan mengingatkan kepada saudara-sauara seiman dan seislam saya. Bahwa jika selama ini Anda merasa berjuang untuk memenangkan sesuatu, yakinkan diri Anda bahwa yang Anda perjuangkan bukan ego dan amarah. Bukan permusuhan dan dendam. Tapi demi kebenaran dan keadilan untuk terwujudnya kebaikan nasional bagi bangsa dan negara.

Oleh karenanya, jangan angkuh dan sombong. Sebaliknya "fasabbih bihamdi Rabbika wastagfiruh" (besarkan puji Tuhan seraya meminta ampun). Mengingatkan kita semua untuk rendah hati dan mengembalikan pujian kepada Allah semata. Bahkan meminta ampun karena dalam proses itu boleh jadi ada yang kurang, atau sebaliknya ada juga yang melampaui batas.

Ingat, hiruk pikuk selama ini bukan anti minoritas, bukan anti Kristen, bukan anti ras tertentu (Cina), dan lain-lain. Kalau ada di antara umat ini yang memusuhi orang karena agamanya atau karena etnik dan ras, saya akan berada di garis terdepan untuk mengingatkan, bahkan melawan. Karena kalau itu terjadi maka dengan sendirinya kita melecehkan agama (Alqur'an dan sunnah Rasul) itu sendiri, yang mewasiatkan: "jangan karena kebencian kamu kepada kaum tertentu menjadikan kamu tidak adil. Bersikap adillah karena lebih dekat kepada ketakwaan" (Alquran).

Allahu Akbar...merdeka!

Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation

REPUBLIKA, 10 Mei 2017

Palu Hakim untuk Ahok

BERITA tentang putusan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memutus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tervonis dua tahun penjara untuk kasus penodaan agama, telah menjadi trending topic dunia, sebagaimana dilansir Twitter. Kasus yang telah menyita perhatian publik selama hampir enam bulan tersebut telah menemui ujung pertama, yaitu dengan putusan pidana terhadap Ahok yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah menoda agama Islam sebagaimana juga terdapat dalam dakwaan alternatif jaksa penuntut umum (JPU).

Putusan majelis hakim yang berbeda dengan tuntutan JPU ditegaskan dalam pertimbangan majelis bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan JPU dan pembelaan penasihat hukum yang menyatakan dakwaan penodaan agama tidak terbukti. Dalam putusan majelis hakim berpendapat bahwa penodaan agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156a KUHP secara sah dan meyakinkan terbukti.

Tulisan ini akan membahas lebih lanjut tentang berbagai hal yang terkait dengan perspektif global dan domestik atas penodaan agama, vonis hakim yang lebih tinggi dari tuntutan JPU, dan penempatan penahanan terhadap Ahok.

Penodaan Agama

Masalah penodaan agama atau penghinaan terhadap agama (*blasphemy or defamation of religion*) adalah masalah yang juga dialami berbagai negara di dunia, yang kerap juga menimbulkan reaksi sangat kuat atas tindakan tersebut. Masalah penodaan terhadap agama ini juga perhatian global yang ditandai dengan diterbitkannya Resolusi PBB Nomor 66/167 tentang Perang terhadap Intoleransi, Stereotipe Negatif, Stigmatisasi, Diskriminasi, Hasutan yang Mengakibatkan Kekerasan dan Kekerasan Terhadap Orang atas Dasar Agama/Kepercayaan. Dalam resolusi tersebut, negara-negara mengecam praktik-praktik intoleransi atas dasar agama termasuk ujaran kebencian yang menimbulkan kemarahan publik ataupun kekerasan.

Dalam nada yang juga secara tegas dinyatakan dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR), khususnya Pasal 18 ayat (3), ”*Kebebasan untuk menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain*.”

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, bahwa standar internasional yang terdapat ICCPR pada khususnya Pasal 18 ayat (3) tersebut justru memberikan legalitas atas pembatasan oleh negara peserta dalam hal ekspresi keagamaan (forum externum). Dalam hal mana pembatasan tersebut diperlukan untuk pencegahan terhadap penodaan agama.

Perlu disadari bahwa penistaan atau penodaan agama yang dilakukan oleh seseorang itu mempunyai potensi untuk lahirnya hasutan yang berujung penyerangan kepada seseorang yang mungkin punya karakter sama atau mirip dengan si pelaku yang sejatinya hanya satu orang. Resolusi PBB tersebut meminta setiap negara anggota yang dalam hal ini tentu harus dipegang teguh oleh setiap aparatur negara agar mempromosikan secara penuh terhadap budaya toleransi dan kedamaian di semua tingkat kehidupan. Di mana promosi toleransi ini dilandasi dengan pemikiran bahwa hal ini dilakukan dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberagaman agama serta kepercayaan. Bukan malah melakukan tindakan yang berpotensi pada kemarahan publik yang menganut agama tertentu dengan ucapan yang menista atau menodai perasaan beragamanya.

Pengaturan pemidanaan terkait penodaan agama di Indonesia lebih ditujukan untuk menjaga atau memelihara ketenteraman beragama. Ketenteraman beragama ini juga lebih ditujukan pada suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa ketersinggungan umat beragama akan adanya sikap kelompok aliran yang mengusik ketenteraman umat beragama, dalam hal ini peran pimpinan kelompok agama menjadi sangat penting dalam pelaksanaan undang-undang. Untuk itu, penilaian dari pimpinan kelompok agama seperti MUI bagi umat Islam, atau PGI dan KWI bagi umat Kristen dan Katolik, menjadi sangat penting sebagai bukti dalam melakukan penilaian penistaan terhadap agama tersebut.

Putusan Berbeda dengan Tuntutan

Pengadilan pidana di Indonesia berasaskan hakim aktif. Majelis hakim adalah figur utama dalam memutus, bahkan dapat sama sekali berbeda atau mengesampingkan tuntutan JPU, namun tidak boleh memutus kesalahan di luar pasal dakwaan. Berbeda dengan perkara perdata yang mana terdapat asas hakim tidak memutus melebih dari apa yang diminta (ultra petita). Dalam hukum pidana tidak dikenal larangan ultra petita ini. Namun, hakim dapat memutus pidana sepanjang tidak melebihi ancaman maksimal dalam undang-undang serta pasal dakwaan itu terdapat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh JPU.

Maknanya, bahwa kebebasan hakim tidak serta-merta sebebas-bebasnya, akan tetapi terbatas pada ketentuan ancaman maksimal, surat dakwaan, serta fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh JPU adalah suatu kesimpulan yang diambil oleh JPU dalam menilai fakta persidangan sehingga dicapai kesimpulan unsur dalam pasal dakwaan mana yang terpenuhi sehingga pasal dakwaan menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam hal ini maknanya bahwa hakim dalam memutus perkara ini didasarkan pada sekurangnya dua alat bukti (saksi, ahli, surat dan petunjuk) di mana timbul keyakinan bahwa memang terdapat tindak pidana dan terdakwalah yang dapat dipersalahkan.

Hal yang menarik dalam persidangan ini, dakwaan yang diajukan secara alternatif, namun dalam tuntutannya JPU seolah-olah bahwa dakwaan disusun secara berlapis ataupun kumulatif. Di mana JPU membuktikan satu per satu dari kedua pasal dakwaan yang telah disusun secara alternatif. Majelis hakim dalam putusannya juga mencermati tentang tuntutan pidana yang dibuat oleh JPU, di mana JPU menyatakan terdapat hal yang memberatkan, akan tetapi JPU malah menuntut pidana percobaan. Dalam hal ini majelis hakim hendak mengutarakan bahwa tuntutan pidana yang dibuat JPU kurang lazim sebagaimana harusnya suatu tuntutan pidana itu disusun.

Ketidaklaziman tuntutan pidana percobaan yang di dalamnya terdapat hal yang memberatkan direspons oleh majelis hakim dengan mengutarakan hal yang memberatkan atas apa yang diperbuat terdakwa sehingga menghukum terdakwa dengan pidana penjara, bukan pidana percobaan. Dalam hal ini hakim menyatakan pendapat yang berbeda sangat tegas dengan JPU, di mana hakim memandang yang terbukti adalah dakwaan kesatu, yaitu terkait pasal 156a KUHP (penodaan agama) dan bukan dakwaan kedua sebagaimana yang terdapat dalam pasal 156 KUHP (penodaan terhadap suatu golongan agama).

Penetapan Penahanan untuk Ahok

Pasal 197k KUHAP secara tegas mengatur tentang salah satu substansi dalam putusan pidana, yaitu tentang keadaan atau status penahanan dari terdakwa. Dalam bagian awal, majelis hakim menyatakan dengan tegas bahwa karena terdakwa tidak ditahan sedangkan dalam Pasal 197k a quo perlu ditetapkan tentang status penahanan terdakwa yang disertai perintah kepada JPU apakah terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Mengingat apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal 197 tersebut akan berakibat putusan menjadi batal demi hukum maka hakim harus mempertimbangkan status penahanan tersebut.

Dalam putusannya majelis hakim membuat penetapan untuk menempatkan terdakwa dalam tahanan, hal ini maknanya bahwa sudah selayaknya setelah putusan dibacakan maka kandungan penetapan dalam putusan tersebut untuk menempatkan terdakwa dalam tahanan harus segera dilaksanakan oleh JPU. Terkecuali dalam putusannya majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap dalam status penahanan yang sama maka terdakwa tidak perlu ditempatkan dalam rumah tahanan negara (rutan) guna dilakukan penahanan terhadap terdakwa yang kini tervonis. Jadi, apa yang terjadi pada Ahok sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

Namun, sepertinya putusan ini di luar bayangan atau dugaan dari banyak pihak, termasuk penasihat hukum, di mana hakim memutus bersalah dan menjatuhkan pidana dua tahun penjara yang disertai perintah langsung penahanan terhadap Ahok. Pada saat pernyataan banding secara lisan sejatinya secara bersamaan telah dipersiapkan pernyataan banding itu secara tertulis agar segera dicatatkan di Kepaniteraan PN Jakarta Utara serta diikuti

dengan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap Ahok secara simultan.

Apresiasi

Persidangan kasus penistaan agama yang telah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara patut diapresiasi dengan baik karena pemeriksaan saksi tidak secara langsung televisi sebagaimana opera sabun. Larangan siaran langsung atas persidangan pemeriksaan saksi sangat tepat serta telah sesuai dengan KUHAP karena masih sesuai dengan asas segala persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan dan terdakwanya anak-anak. Larangan siaran langsung oleh televisi itu adalah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di persidangan (vide Pasal 159 KUHAP). Maknanya, hakim berusaha dalam pemeriksaan dilakukan secara berimbang dan adil di mana hal ini ditunjukkan dengan pemeriksaan saksi secara satu per satu dan untuk mencegah sejauh mungkin saling memengaruhi di antara para saksi.

Namun, dalam bagian pembacaan tuntutan pidana, pembelaan maupun pembacaan putusan diputuskan secara terbuka dan disiarkan secara langsung oleh televisi sehingga hal ini dapat diketahui secara terbuka oleh publik. Persidangan atas terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menurut hemat saya, telah dilangsungkan dengan sangat baik dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Apa pun yang menjadi putusan majelis hakim dalam kasus ini harus diterima dengan baik sebagai cara pengadilan untuk mengadili perkara ini sebagaimana mestinya.

Junaedi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia

KORAN SINDO, 10 Mei 2017

Ahok Bukan Nelson Mandela

Setelah ketukan palu hakim yang memvonis hukuman dua tahun penjara kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, banyak orang yang menyamakan Gubernur Jakarta itu dengan Nelson Mandela, tokoh ikonik yang pernah menjadi presiden Afrika Selatan setelah dipenjara selama lebih dari dua puluh tahun.

Tapi, bagi saya Ahok bukanlah Nelson Mandela.

Di awal reformasi, ketika (Presiden) Gus Dur menyatakan permintaan maafnya secara pribadi terhadap korbanaan maaf tersebut tidak lebih dari basa-basi. Goenawan Mohamad kemudian menanggapinya dengan mengatakan bahwa Pramoedya sebaiknya belajar dari Nelson Mandela, yang mau memaafkan orang-orang kulit putih yang sebelumnya memberinya hukuman penjara seumur hidup.

Nelson Mandela mengambil sikap berbeda dengan apa yang dilakukan Yahudi Zionis (sengaja saya beri tambahan "zionis", karena tidak semua orang Yahudi mendukung pendudukan Israel atas Palestina), ketika mereka seolah-olah menganggap apa yang dilakukan pemerintahan Hitler kepada mereka menjadi pembenaran atas apa yang mereka lakukan terhadap penduduk Palestina.

Tapi, tidak semua korban harus mengalah. Tidak semua korban harus mengambil sikap pasif. Banyak revolusi, perubahan, dan kemerdakaan yang tidak akan terjadi jika para korban memilih untuk bersikap pasif.

Toh, Mahatma Gandhi dibiarkan oleh pemerintah Inggris justru karena sikap pasifnya yang tidak melakukan perlawanan bersenjata, berbeda dengan sikap tokoh India lain yang memilih melawan. Kemerdekaan, revolusi, atau perubahan tidak selalu berhasil dengan cara Gandhi.

Karenanya, ucapan Gandhi "*jika mata dibalas mata maka semua orang akan menjadi buta*" menurut saya terlalu naif. Saya lebih memilih dua ayat Al-Qur'an; yang satunya menyatakan bahwa "*mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, tapi lebih baik untukmu bersabar*", dan satunya lagi menyatakan, "*barang siapa menyelamatkan satu jiwa maka seolah-olah dia menyelamatkan jiwa seluruh dunia, dan barang siapa membunuh satu jiwa tanpa hak maka dia seolah-olah membunuh seluruh jiwa di dunia*."

Sebelumnya, saya merasa apa yang diucapkan Ahok di Kepulauan Seribu, ataupun kengototannya atas ketidakbersalahannya atas ucapannya itu, adalah sesuatu yang benar-benar tidak perlu. Tapi, saya tidak tahu rasanya berada di posisi Ahok. Saya tidak tahu rasanya berada di posisi korban; yakni, posisi orang Tionghoa di masa Orde Baru sebagai warga "*kelas dua*".

Kejadian Mei '98 ketika rumah orang-orang Tionghoa dihancurkan, dan banyak wanita keturunan Tionghoa diperkosa sehingga membuat banyak wanita yang memakai mukena sebagai pelindung identitas, dan rumah-

rumah ditandai dengan tulisan 'Milik Pribumi', tentu saya yakini memberi trauma mendalam kepada mereka. Juga, mungkin kepada Ahok.

Maka ketika Ahok ngotot bahwa apa yang diucapkannya di Kepulauan Seribu tidak salah (yang menurut hasil sidang menjadi salah satu hal yang memberatkannya), itu adalah teriakan seorang korban yang tidak rela disuruh begitu saja meminta maaf.

Apalagi ucapan itu bukan dimaksudkan untuk menyinggung kaum muslim maupun Al-Qur'an, melainkan untuk menyinggung orang-orang yang menyalahgunakan ayat-ayat dalam Al-Qur'an demi kepentingan politik dan kekuasaan. Orang-orang seperti itu, dalam Al-Qur'an pun disebutkan sebagai "orang-orang yang menjual ayat-ayat Al-Qur'an dengan harga yang murah."

Dan, untuk menutup tulisan ini saya ingin mengutip kata-kata Fidel Castro yang saya rasa mungkin diucapkan Ahok dalam hatinya saat ia mengacungkan dua jari berbentuk huruf V ke arah wartawan; kata-kata dalam bahasa Spanyol yang juga dikutip Banda Neira dengan sedih tapi tegar dalam lagu mereka berjudul 'Tini dan Yanti':

La historia me absolvera!

Muhammad Al-Fatih Hadi, Anggota Persatuan Pelajar Indonesia (PPI)

Uni Emirat Arab; Sedang menempuh pendidikan di Al-Ain

DETIKNEWS, 12 Mei 2017

Solidaritas

... melambai-lambai, nyiur di pantai....

Romo Imam melambaikan tangan kanannya, sementara tangan kiri asyik memegang handphone. Ia ikut bernyanyi meski suaranya tak begitu keras. "*Tolong sampaikan sama Mas Addhie, saya ikut merinding menyaksikan konser spontan di Balai Kota Jakarta ini*," kata Romo seperti baru sadar kalau saya sudah duduk manis di depannya.

"*Addhie M.S. itu orang hebat yang rendah hati. Sempat-sempatnya mengirimi saya CD yang berisi lagu-lagu daerah yang sudah dia olah dalam bentuk orkestra. Padahal saya hanya akrab di media sosial*," kata saya.

Romo mematikan lagu di handphone-nya. "*Yang membuat dia lebih hebat daripada seniman dan budayawan lainnya adalah konser spontan yang dikerjakannya itu tak dikaitkan dengan dukung-mendukung seseorang. Bahkan disebutkannya tak ada kaitan dengan penahanan Ahok, tak ada pula kaitan dengan pilkada Jakarta. Dia hanya gelisah melihat bangsa ini seperti terpecah-pecah. Lalu dia memilih tiga lagu: Indonesia Raya, Rayuan Pulau Kelapa, dan Garuda Pancasila. Pilihan yang tepat, Indonesia adalah negeri yang indah dan damai jika tetap berlandaskan Pancasila. Ini konser spontan solidaritas untuk bangsa*," kata Romo.

Saya tertarik dengan kata solidaritas itu. "*Romo, saat ini solidaritas bergema untuk Ahok setelah dihukum dua tahun penjara. Di berbagai tempat orang berkumpul menyalakan lilin, karangan bunga dikirim ke tempat penahanan Ahok, ribuan orang menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk untuk ikut menjamin penangguhan penahanan Ahok. Para selebritas terus memuji kehebatan Ahok sambil menyebutkan orang sebaik Ahok tak pantas dipenjara dan harus dilepaskan dari tahanan, bahkan harus dibebaskan dari hukuman. Mereka mendesak hakim pengadilan tinggi segera menangguhkan penahanan Ahok dan segera pula menyidangkan banding untuk membebaskan Ahok*."

Romo memotong ucapan saya: "*Jadi, kalau pengadilan tinggi nanti menangguhkan penahanan Ahok dan memberi vonis bebas, artinya itu karena desakan kelompok massa, kan? Bukan karena mendalami proses hukum dan fakta-fakta dalam persidangan? Apakah itu tidak intervensi namanya?*"

Saya tak bisa menjawab. Romo melanjutkan: "*Hakim itu serba salah ketika kita memihak kepada orang yang diadili dan orang itu dihukum. Kita sebut hakim terpengaruh aksi massa, hakim tak bersih, keadilan telah mati, macam-macam. Lalu aksi-aksi dilakukan, bahkan sampai malam hari. Coba kalau dibebaskan, hakim pasti dipuji. Hakim yang tak goyah dengan godaan meski ke kantor naik angkutan kota, hakim berintegritas, hakim teladan, ini kemenangan hukum, macam-macam pula. Ini risiko pengadil, yang kalah ngamuk, yang menang berpesta. Kalau sepakat proses hukum dijunjung dan dihormati, seharusnya ketidakpuasan itu hanya dilakukan dengan menelaah keputusan hakim, lalu berjuang di pengadilan banding. Jika hanya ini dilakukan, putusan banding pun tak perlu dicurigai diintervensi.*

Sekarang jadi penuh prasangka, siapa pun yang kalah akan menyebut ada intervensi."

Saya diam. "*Sampeyan kok diam*?" tiba-tiba Romo menegur. Saya kaget. "*Saya kagum solidaritas orang kepada Ahok sampai di berbagai daerah. Semuanya memuji. Seharusnya dia yang menang di pilkada Jakarta*."

Romo tertawa. "*Ya, termasuk orang Bali seperti sampeyan semua kagum pada kerja Ahok. Tapi begitu Ahok diisukan menjadi calon Gubernur Bali, kalian menolak. Alasannya, masih banyak orang Bali yang mampu, komunikasi Ahok tak cocok dengan budaya Bali, macam-macam. Sama dengan orang Jakarta, kan*?"

Saya seperti petinju dipukul KO.

Putu Setia, Wartawan Senior Tempo

TEMPO.CO, 13 Mei 2017

Babak Baru Jakarta

5 Mei 2017 lalu KPU DKI Jakarta telah menetapkan Gubernur-Wakil Gubernur Terpilih Periode 2017- 2022: Anies Rasyid Baswedan- Sandiaga Salahuddin Uno. Orasi kemenangan di Museum Bank Indonesia pun dihelat penuh makna. Retorika yang dipilih sangat memukau di ajang acara Pesan Persatuan Jakarta Menuju Satu Jakarta. Ungkapan "*...kami akan hadir mewujudkan keadilan sosial bagi warga*" sangatlah dirindukan. Dinyatakan pula bahwa Kota Jakarta bukan hanya kumpulan real estate, gedung, rumah, sungai, dan jalan raya, tetapi kumpulan manusia berjiwa. Jakarta bukan sekadar barang tak berjiwa. Sebuah peneguhan ke mana pendulum kebijakan hendak ditambatkan oleh pemimpin baru Jakarta ini.

Janji kampanye yang terus terngiang adalah Anies-Sandi bertekad menata kota tanpa penggusuran dan penataan kota yang mengutamakan dialog. Esensi pidato yang simpatik tersebut menandakan lahirnya babak penting perkembangan Jakarta. Tim Sinkronisasi yang dibentuk untuk melakukan langkah-langkah formulatif guna mengimplementasikan program yang telah dikampanyekan harus bertindak sigap di hadapan rezim transisi sekarang ini. Masa transisi sampai agenda pelantikan 4 Oktober 2017 sudah sepatutnya dikawal, terutama oleh publik Jakarta.

Pemimpin hasil Pilkada DKI Jakarta 9 April 2017 diberi amanat warga untuk mampu memberikan solusi yang mendera Ibu Kota selama ini, bukan untuk menyandera dengan ingar-bingar yang melelahkan. Pemerintahan transisi sekarang ini secara etik-birokratik semestinya tidak membuat kebijakan yang mendendamkan problematika ke depan. Permasalahan banjir, ketimpangan sosial, kemacetan, dan peminggiran warga miskin telah memberikan referensi yang cukup untuk membenahi Jakarta. Fenomena Ibu Kota kebanjiran saja adalah sebuah realitas yang menuliskan pesan betapa banyak pekerjaan yang harus diemban gubernur terpilih.

Wajah Jakarta sejatinya menorehkan kelamnya derita ekologis kota di balik gemerlapnya jalanan. Kejadian banjir yang melanda Jakarta selama ini telah melukiskan adanya kerapuhan planologi Jakarta yang lebih menonjolkan sebagai ladang bisnis daripada Ibu Kota yang administratif.

Saatnya Jakarta Jujur

Jakarta dicatat tidak berkata jujur dan bertindak semestinya sebagai Ibu Kota. Pembangunannya tidak dibarengi perubahan paradigma layaknya seorang ibu. Ibu Kota tidak tampil feminis, melainkan berkarakter maskulin, karena hanya mempertontonkan kekekarannya. Mas langitnya menepikan warga, menggersangkan jiwa, dan "mengusir" kampungkampung nelayan tua. Ibu Kota tidak membopong anak kandungnya, tetapi tampil "menyusui investor" yang mendegradasi imunitasnya sendiri.

Reklamasi yang dibarengi bangunan gedung apartemen dan pergudangan adalah simbol nyata kerakusan yang menyeruak di Jakarta. Ibu Kota kurang dikonstruksi dengan infrastruktur penampung air seperti telaga, embung,

kolam, sumur resapan, sebagai bak penampung sebelum semuanya mengalir ke pantai Jakarta. Jakarta memiliki 13 sungai dan didekap dua kali besar, di timur ada Citarum, di barat ada Cisadane. Bahkan, Kali Ciliwung eksis membelah dan menghidupi Ibu Kota meski luapannya sering "*dikriminalisasi*" sebagai penyebab banjir. Atas nama keindahan aliran belasan sungai itulah, Jakarta pada era kolonial dikenal sebagai Venesia dari Timur, kota yang dikelilingi sungai-sungai eksotik laksana Venesia (Italia).

Sungai-sungai di Ibu Kota dapat difungsikan sebagai moda transportasi air yang hebat. Adalah kenaifan apabila pantai Jakarta yang secara ekologis menjadi basis tangkapan air, justru digiring menjadi daerah permukiman dengan direklamasi. Tabiat reklamasi dengan mozaik beton gnjadi arena pertandingan memutar uang yang menggelisahkan dari dimensi kajian lingkungan. Reklamasi yang brutal akan memorak-porandakan pesisir pantai. Hal ini membawa perubahan signifikan hilangnya biota air dan daya dukung teluk sebagai daerah penampung air.

Aktivis lingkungan Jakarta secara cerdas telah menerka: dengan reklamasi, Jakarta niscaya tergenang dan tenggelam. Pejuang lingkungan Jakarta sudah mafhum, sebelum dilakukan reklamasi saja, Jakarta kerap kebanjiran, apalagi dengan agenda membuat 17 pulau, frekuensi banjir akan meningkat. Dengan proyek reklamasi yang ada, bencana banjir di Jakarta tidak terelakkan menjadi ritual musiman. Sadarlah bahwa di pantura itu bermuara aliran ke-13 sungai. Kalau pantainya diuruk, logika sederhananya adalah terdapat pendangkalan pantura. Bayangan yang sudah terlihat adalah kerusakan habitat nelayan Jakarta dengan "pesta air bah".

Modernisme membawa serta mahalnya warga Ibu Kota menikmati keindahan pantai. Di Ibu Kota, banjir memberi literasi perlunya rekonstruksi pembangunan agar Jakarta berperilaku keibuan. Setiap reklamasi pantai yang semula ideal untuk kenyamanan perkotaan, pada praktiknya menyorong penghuni yang renta ekonomi ke tepian. Kalau reklamasi terus dipaksakan, sebelum semuanya mengerti hendak ke mana kota ini diperjalankan, saya khawatir pantura menjadi ajang ontranontran dalam dimensi sosio-ekosistemiknya.

Pemegang kuasa harus memahami bahwa kehidupan tanpa lingkungan hanyalah abstraksi belaka. Tata Kota Jakarta jangan mengulang cerita lama kepiluan kota dengan ungkapan-ungkapan vulgar yang sinis sebagaimana ditulis Kunstter: *tragic sprawl scope of cartoon architecture, junked cities and ravaged country side*. Bung Anies-Sandi adalah penggenggam waktu untuk membangun Jakarta berspirit feminis.

Feminisme Kota

Penataan Jakarta membutuhkan penguatan orientasi wawasan dari visi membangun kota raya yang maskulin ke arah kesadaran lingkungan yang feminis, setarikan napas sebutan Ibu Kota. Kita tidak ingin menyaksikan Jakarta tergelincir menjadi kota yang congkak secara ekologis ("*junk city*").

Telah terbangun persepsi umum bahwa kepentingan ekonomi di Jakarta mampu menggeser kepatutan ekologisnya. Harus diresapi bahwa Jakarta tidak cukup hanya ditopang uang dengan mengabaikan kepentingan lingkungan. Metropolitan yang "terlalu kekar" dapat dengan mudah terpelanting menjadi nekropolitan, yaitu kota yang menyesakkanbagi warganya. Mewujudkan Jakarta sebagai ibu kota yang menyediakan telaga bagi anak-anaknya adalah pilihan primer. Bangunan yang menjulang tanpa telaga penampungan air sudah sering kali mengalami kelumpuhan melawan banjir bandang. Kearifan tradisional mengajarkan tata kampung dari abad yang telah lampau. Setiap kampung menyediakan satu embung (telaga) sebagai sentrum kehidupan yang menjadi tandon air terpenting.

Embung memberi dan menerima bukan saja air hujan, juga air dari waduk sebagai induk pengairan lintas kawasan. Embung adalah lambang feminisme kehayatan desa maupun kota. Dari sinilah setiap hujan air disimpan dan pada musim kemarau air dialirkan ke warga. Embung pada kenyataannya adalah mangkuk air yang pada saatnya didistribusi kepada warga untuk keperluan sehari-hari maupun pertanian urban. Telaga-telaga kecil di setiap titik simpul Jakarta mutlak diadakan dalam jejaring ekosistem ("spesialized ecosystem") dengan sumur-sumur yang tersedia di setiap rumah tangga.

Tata kelola lingkungan model telaga kampung ini merupakan kekayaan tradisi yang bermuatan referensi kecanggihan teknologi tertib air. Kota menjadi bebas banjir. Embung menyediakan water resource demi kelangsungan hidup warga. Jadikanlah Jakarta bertradisi ramah lingkungan dan membahagiakan semua warganya.

Suparto Wijoyo, Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga

KORAN SINDO, 13 Mei 2017

Politik Anggaran Kepala Daerah Terpilih

> "*Keinginan Anies Baswedan yang ingin intervensi pada proses, dan mekanisme penganggaran (APBD) DKI sendiri didasari dalih untuk segera bekerja mewujudkan janji dan program kampanye.*"

GUBERNUR DKI terpilih Anies Baswedan beberapa waktu lalu bertemu dengan Gubernur DKI (sat itu) Basuki Tjahaja Purnama untuk membahas penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam pertemuan kali pertama pascapilkada, Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan bahwa sistem penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan model E-Budgeting yang dalam aplikasinya mendapatkan pengawasan (monitoring) dari BPK dan KPK. Dijelaskan pula bahwa dalam model penganggaran E-Budgeting perubahan APBD tidak mudah dilaksanakan tanpa rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri ataupun institusi pengawas anggaran (BPK). Dengan kata lain, keinginan Anies Baswedan agar beberapa usulan program yang berpijak pada janji kampanye Pilkada tidak bisa diakomodir dalam skema APBD DKI tahun 2017. Meskipun mekanisme Perubahan Anggaran dan Kegiatan (PAK) APBD bisa dilaksanakan pada medio bulan Juni-Juli 2017.

Namun legitimasi sebagai kuasa anggaran masih di tangan Gubernur DKI yang lama, Basuki Tjahaja Purnama. Keinginan tergesa-gesa Cagub Terpilih DKI itu untuk memasukkan usulan program pada formula APBD DKI 2017 bergeser menjadi "seruan politis". Tim pendukung Anies Baswe dan——tim transisi——-mencoba memberikan usulan bahwa Gubernur lama DKI Basuki Tjahaja Purnama jangan membuat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

Usulan tersebut jika ditelaah dalam prinsip penganggaran merupakan sesuatu yang tidak masuk akal dan justru menunjukkan ketidakpahaman Cagub terpilih DKI dan tim pendukungnya terhadap prinsip, filosofi, dan mekanisme penganggaran daerah. Dalam alur perencanaan penganggaran daerah (APBD) yang telah dirumuskan sebagai draf awal rencana awal penganggaran (Renwal) APBD 2018 tetap berpijak pada RPJMD tahun 2013-2018.

Intinya adalah bahwa skema RAPBD 2018 merupakan pencerminan dari program prioritas dan super prioritas yang didesain oleh gubernur DKI saat ini. Sehingga Cagub terpilih hasil Pilkada 2017 tidak memiliki legitimasi politik dan hukum untuk memaksakan usulan program dalam RAPBD 2018.

Beban APBD

Anies Baswedan baru memiliki legalitas mengubah atau memasukkan usulan progrram kegiatan pada draf Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) APBD 2018 setelah resmi dilantik sebagai Gubernur DKI pada bulan Oktober 2017.

Itu pun dengan catatan bahwa PAK APBD 2018 tidak boleh berubah secara drastis karena akan menghentikan proses implementasi program pada tahun anggaran berjalan. Akan membuat beban bagi APBD DKI 2018.

Keinginan terburu-buru Anies Baswedan yang ingin ”intervensi” pada proses, dan mekanisme penganggaran (APBD) DKI sendiri didasari dalih untuk segera bekerja mewujudkan janji dan program kampanye. Namun tidak sedikit kalangan yang memiliki perhatian terhadap politik anggaran menaruh curiga.

Kecurigaan tersebut pada umumnya terkait dengan kemungkinan adanya niat ”balas budi” politik cagub terpilih dengan kelompok pendukungnya. APBD DKI dicurigai akan menjadi alat untuk memenuhi janji politik yang jauh dari kerangka usulan program yang partisipatif.

Usulan program dan kegiatan pembangunan yang partisipatif jelas tercantum dalam rekomendasi Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta dan tertuang dalam pelbagai item program unggulan dalam RPJMD 2013-2018.

Jika Cagub DKI terpilih memahami mekanisme penganggaran, idealnya harus lebih dahulu berkonsentrasi pada penyusunan RPJMD Propinsi DKI tahun 2018-2023.

RPJMD tersebut menjadi acuan substansial dalam PAK APBD DKI tahun 2018 dan perencanaan awal program dan kegiatan RAPBD 2019. Langkah ”mengintervensi” implementasi APBD oleh Calon Kepala daerah terpilih sesungguhnya tidak hanya terjadi di DKI Jakarta.

Banyak calon kepala daerah terpilih hasil Pilkada tahun 2017 yang baru akan dilantik pada Mei 2017 mencoba melakukan lobi politik pada kepala daerah yang masih menjabat agar usulan program yang mereka janjikan dalam masa kampanye Pilkada bisa diakomodasi dalam PAK APBD 2017.

Hal tersebut boleh jadi dipenuhi oleh kepala daerah yang tinggal menyelesaikan sisa masa jabatan. Namun PAK APBD 2017 yang mulai dikerjakan oleh tim teknis birokrasi pemerintah daerah pada awal Mei 2017 harus berdasar pada revisi RPJMD.

Trisno Yulianto, Koordinator Forum Kajian dan Transparansi Anggaran (Forkata)

SUARA MERDEKA, 13 Mei 2017

Efek Pilkada Jakarta

Pagi kemarin saya mendapat telpon dari Robert Silverman, Director of Muslim-Jewish relations at AJC (American Jewsih Comittee). Mr. Silverman menyampaikan agar saya baiknya istirahat saja dari posisi saya sebagai anggota Muslim-Jewish Council yang dibentuk oleh AJC beberapa bulan lalu. Posisi saya sebagai anggota di Muslim-Jewish Council AJC ini hanya satu dari sekian banyak keanggotaan saya di berbagai organisasi lintas agama di Amerika Serikat. Saya juga adalah penasehat pada the Tanenbaum Center, Federation for Middle East Peace, Clergy International, dan seabrek organisasi lintas agama lainnya. Sehingga sejujurnya posisi saya pada berbagai organisasi itu tidak lebih sebagai simbol perakilan saja. Toh saya sendiri terkadang tidak terlalu paham kenapa saya diminta duduk dalam berbagai organisasi itu.

Sebagai mantan diplomat, Mr. Silverman menyampaikan pesannya dengan bahasa diplomasi. Dan dalam posisi saya yang juga berdekatan dengan tugas-tugas diplomasi paham betul apa yang dimaksud. Yaitu meminta saya untuk mundur dari posisi saya sebagai anggota di council itu. Saya tidak terkejut apalagi bersedih dengan permintaan itu. Saya hanya menyayangkan dua hal: satu, meminta saya mundur karena tuduhan anti non Muslim, yang didasarkan kepada tulisan-tulisan saya di media sosial. Termasuk di dalamnya tentang hiruk pikuk proses demokrasi dan pilkada Jakarta baru-baru ini.

Tapi yang kedua, dan ini yang saya sayangkan, menurutnya ada tulisan saya yang pernah saya tulis di tahun 2015 dianggap anti Yahudi. Saya terkejut dengan tuduhan itu. Karena sejak saya memulai dialog saya dengan komunitas Yahudi, prioritas kerja-kerja interfaith saya adalah membangun komunikasi dan kerjasama dengan komunitas ini. Jadi rasanya dengan tuduhan itu upaya-upaya saya itu sia-sia.

Saya sebenarnya mendesak Mr. Silverman untuk menunjukkan kepada saya tulisan-tulisan yang dianggap "anti minoritas", khususnya anti Yahudi. Tapi jawaban yang saya dapatkan hanya "*there are many on your facebook*". Saya semakin bingung karena semua tulisan saya itu tidak pernah menyerang golongan, baik agama maupun ras. Bahkan di tulisan terakhir saya menegaskan bahwa jika ada di kalangan umat Islam melakukan protes karena agama dan ras orang lain, saya akan berada di garis terdepan untuk mengingatkan dan menentangnya.

Mungkin yang paling membingunkan saya adalah realita paradoks ini. Saya bangga hidup di Amerika karena banyak hal. Salah satunya adalah bahwa di negara ini semua orang punya hak untuk menyampaikan opini dan bebas mengekspresikan opini mereka di masyarakat. Tapi di sini saya menemukan organisasi yang meminta saya mundur karena opini pribadi. Toh di saat saya menyampaikan sebuah opini itu di masa lalu, itu adalah opini pribadi yang tidak mewakili institusi.

Dan mungkin yang sedikit mengganggu adalah ketika Mr. Silverman mengambil kesimpulan tanpa pernah melakukan klarifikasi dengan saya sendiri. Oleh karena tulisan-tulisan saya semuanya berbahasa Indonesia, maka saya yakin ada orang-orang Indonesia (entah siapa) yang memberikan terjemahan dan/atau interpretasi terhadap tulisan itu. Mungkin di sinilah terjadi kesalah pahaman, baik disengaja ataupun tidak disengaja.

Seharusnya Mr. Silverman ketika menemukan atau mendapatkan informasi mengenai tulisan yang menimbulkan pertanyaan, disampaikan ke saya dan diminta penjelasan atau klarifikasi. Saya yakin ini adalah sikap yang elegan, sekaligus fair kepada saya sebagai penulis. Sayangnya kesimpulan itu diambil secara sepihak tanpa klarifikasi ke saya sebagai penulis.

Satu hal yang pasti adalah bahwa hal ini mesti terjadi karena efek tulisan-tulisan saya tentang pilkada dan Ahok. Walaupun dengan sangat jelas dan tegas saya sampaikan bahwa saya memiliki pilihan bukan karena anti kepada agama dan/atau ras tertentu. Tapi murni karena "ijtihad" atau opini pribadi berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Tapi itu sudah berlalu. Yang ingin saya katakan adalah betapa dampak pilkada DKI kali ini menembus batas benua. Hiruk pikuk pilkada Jakarta juga menjadi hiruk pikuk berbagai kalangan di Amerika, bahkan di Eropa.

Yang menggelitik juga adalah betapa toleransi tidak malu-malu untuk sekedar diukur dengan ukuran keperbihakan kepada kandidat tertentu. Jika anda tidak memihak kepada kandidat itu maka toleransi anda dipertanyakan. Anda tidak luwes, tidak tahu bergaul, ekstrim atau mendukung kaum radikal, bahkan boleh jadi anda dituduh radikal. Ukuran tolerasi bagi saya seperti ini adalah lucu dan menggelikan.

Dialog dengan Komunitas Yahudi

Dari sekian banyak kelompok dialog Muslim-Yahudi saat ini, barangkali tidaklah berlebihan jika saya katakan hampir semua itu merupakan perpanjangan dari inisiasi yang kami mulai di penghujung tahun 2005 yang lalu. Di tahun itulah kami memulai mengadakan dialog antara komunitas Muslim dan Yahudi dengan diselenggarakannya pertemuan tingkat tinggi para Imam dan Rabi se Amerika Utara. Sejak pertemuan itu gelombang dialog membesar dan dilakukan tidak saja di Amerika Utara. Tapi merambah juga ke negara-negara Eropa. Tiga tahun lalu bahkan program "*Twinning*" (pertemuan Yahudi-Muslim) yang kita mulai dari New York di tahun 2007 menjalar hingga ke Australia, New Zealand dan Afrika Selatan. Bahkan untuk pertama kalinya tahun 2015 lalu, juga di Tunisia diadakan dialog resmi Muslim dan Yahudi.

Sejujurnya saya katakan hasil pertama dari dialog itu adalah saya sendiri. Melalui dalog itu saya melakukan transformasi diri dari seseorang yang penuh ketakutan dan kecurigaan, kepada kepribadian yang mencoba membangun pandangan positif kepada masyarakat Yahudi. Dan dengan dialog itu pula saya menjadi saksi betapa banyak teman-teman Yahudi, bahkan dari kalangan pemimpinnya berubah pandangan terhadap komunitas

Muslim. Singkatnya saya merasakan perubahan positif, baik di kalangan komunitas Muslim maupun Yahudi karena dialog yang kita lakukan. Tentu tanpa mengingkari adanya perbedaan-perbedaan yang masih mengganggu hubungan kedua komunitas, khususnya dalam masalah konflik Palestina dan Israel. Sungguh memang tidak mudah menjalani dialog ini. Apalagi sensitifitas hubungan kedua komunitas ini kerap kali terbangun oleh hiruk pikuk dan tensi konflik Timur Tengah. Sehingga terus terang saja, saya menghadapi tantangan dari dua arah.

Di satu sisi harus diakui teman-teman Yahudi tidak begitu mudah percaya dengan i'tikad baik saya. Karena bagaimanapun juga memang ada interpretasi teks-teks agama yang cenderung melihat jika komunitas yahudi adalah musuh abadi umat Islam. Tentu juga karena faktor media yang lebih sering menyesatkan. Di sisi lain, betapa seringkali saya mendengarkan jika di luar sana, masih ada saudara-saudara seiman saya yang curiga jika saya ini tidak peduli dengan ajaran Islam. Saya dianggap terlalu kompromise, bahkan liberal dalam memahami teks-teks agama khususnya yang berkenaan dengan komunita Yahudi. Barangkali salah satu contoh terdepan adalah ketika saya harus meninggalkan Islamic Cultural Center of New York. Saya melakukan itu karena Ketua Dewan Pengurusnya, Dubes Kuwait untuk PBB, menyatajan bahwa membangun hubungan dengan Yahudi adalah pengkhianatan.

Perlu saya jelaskan bahwa hanya ada satu di benak saya sehingga saya memiliki keberanian dan motivasi dalam menghadapi dan merintangi berbagai aral dan rintangan itu: rekonsiliasi dan perdamaian lewat dialog dan kerjasama. Dan itu telah kita buktikan pada tingkatan-tingkatan tertentu. Mungkin salah satu kerja fenomenal yang kami lakukan di jalan dialog ini adalah menulis buku bersama teman dan partner saya dalam dialog, Rabbi Marc Schneier, dengan judul: Anak-Anak Ibrahim.

Rasanya saya tidak perlu menceritakan segala hal yang telah kita lakukan, dan apa saja hasil positif yang telah kedua komunitas ini dapatkan. Hanya saja dengan sikap dan respon dari AJC melalui direktur hubungan Muslim-Yahudinya itu sangat saya sayangkan. Tapi perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa ini tidak akan mengurangi komitmen saya untuk terus membangun komunikasi dan dialog dengan komunitas Yahudi, demi terwujudnya dunia yang lebih aman dan damai.

Terus terang, saya diminta untuk duduk di council itu hanya lewat percakapan antara saya dan Mr. Silverman ketika saya menjadi pembicara di sebuah acara di salah satu synagogue di kota New York. Saya pun menerima permintaan itu karena saya merasa memang penting kedua komunitas ini membangun komunikasi untuk mengurangi kesalah pahaman yang luar biasa itu. Artinya duduk di council ini sama sekali tidak disengaja dan bukan prioritas. Sehingga selama council berdiri saya baru ikut dua kali pertemuan. Sekali di Washington DC dan sekali lagi di kota New York. Itupun pertemuan yang membosankan, dan saya tidak pernah sama sekali

menyampaikan pendapat apapun dalam pertemuan itu. Karena merasa pertemuan itu hanya seremonial dan basa basi.

Oleh karenanya saya menyampaikan terima kasih atas kehormatan dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai anggota Muslim-Jewish Council di AJC. Tapi di sisi lain saya sangat terusik dengan sikap Mr. Silverman yang tidak fair dalam menyikapi berbagai opini yang telah saya sampaikan melalui tulisan-tulisan saya terdahulu.

Akhirnya saya kembali tersadarkan betapa dahsyatnya efek pilkada Jakarta ini. Sampai-sampai sebuah organisasi tua dan besar di Amerika ikut terusik karena pilihan sikap yang saya ambil dalam pilkada lalu. Saya hanya kembali curiga, jangan-jangan kata toleransi itu sudah dipasok dari sananya sebagai dukungan kepada pihak "*tertentu*" saja. Dan bukan untuk yang lain. Untuk dianggap toleran anda harus mendukung kelompok tertentu. Jika tidak, maka bersiap-siaplah dituduh intoleran.

Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation

REPUBLIKA, 14 Mei 2017

Ahok

Ahok ada, pernah ada, akan ada. Tempatnya lain, waktunya berbeda, tapi tiap kali kita akan ingat ketika ketidakadilan berhasil menghukum orang yang tak bersalah, ketika politik, kebencian, dan purbasangka disebut "*hakim*".

Di Prancis, di akhir abad ke-19, Ahok bernama Alfred Dreyfus. Ia opsir pasukan artileri, seorang keturunan Yahudi dari daerah Alsace, di timur laut Prancis, di perbatasan dengan Jerman. Ia didakwa membocorkan rahasia militer ke pihak Jerman; dengan bukti yang terlalu tipis, ia dinyatakan bersalah melalui proses pengadilan militer yang tertutup. Ia dipecat dengan tak hormat.

Pada 5 Januari 1895, sebuah upacara digelar di halaman le cole Militaire di Champ-de-Mars, Paris, untuk mempertontonkan pemecatan itu ke depan publik. Perwira yang dianggap pengkhianat itu harus mematahkan pedangnya di lutut pejabat yang menghukumnya. Medalinya direnggutkan dari baju seragamnya yang dirobek dan ia disuruh berjalan berkeliling lapangan, untuk diludahi dan dicemooh. Dreyfus tetap mencoba menyuarakan kesetiaannya kepada Prancis, tapi khalayak berteriak terus, "*Yahudi jorok! Pengkhianat*!" Yang terhasut dan penghasut bersatu. Seorang wartawan sayap kanan yang terkenal, Maurice BarrÃ¨s, menulis dengan penuh kebencian: ia gambarkan bagaimana kacamata Dreyfus bertengger di hidungnya yang "*etnis*", yang Yahudi, dan bagaimana sosok tubuhnya yang "*asing*" menimbulkan rasa mual bagi yang melihatnya. Kemudian ia dibuang ke Pulau Iblis, nun di Amerika Selatan, dijaga ketat, untuk seumur hidup.

Seluruh proses adalah sebuah skandal. Bukti untuk menghukum Dreyfus hanya sebuah tanda tangan pada bordereau, memo rahasia seorang perwira Prancis di Markas Besar yang berisi penawaran informasi kepada atase militer Jerman. Tanda tangan itu tak cocok dengan tanda tangan Dreyfus, tapi penyidik menandaskan bahwa ketidakcocokan itu karena "*dipalsu*".

Empat tahun kemudian, kesewenang-wenangan ini terungkap, berkat kerja keras Mathieu, adik Dreyfus, yang mengumpulkan data dan koneksi untuk membuktikan sesatnya pengadilan kakaknya. Kecaman mula terdengar, kian lama kian keras, kepada kalangan militer yang menutup-nutupi kepalsuannya. Kasus pun dibuka kembali. Seorang perwira lain, Mayor Esterhazy, kini dituduh, dengan bukti yang lebih meyakinkan, sebagai si pengkhianat. Tapi para pembesar tentara tetap mempertahankan posisi dan institusi mereka, dan vonis bagi Dreyfus tak berubah. Di saat itulah Emile Zola menyiarkan sebuah pamflet, "Jâ Laccuse" ("Aku menuduh"). Sastrawan besar itu mengarahkan telunjuknya ke muka jenderal dan kolonel yang memanipulasi peradilan.

Tapi kata-katanya melampaui sekadar amarah. Ia menulis dalam pamflet itu: "Satu kejahatan untuk meracuni pikiran orang-orang yang halus budi dan bersahaja, dengan mengobarkan gelora reaksionisme dan antitoleransi....

Satu kejahatan untuk memanfaatkan semangat patriotik dengan melayani kebencian."

Polemik pun membelah masyarakat Prancis. Zola diadukan sebagai pemfitnah. Ia diadili-dan melarikan diri ke Inggris. Kian tajam ketegangan antara para "*Dreyfusard*", yang yakin Dreyfus tak bersalah, dan mereka yang meneriaki perwira itu sebagai "*Yudas*", nama Yahudi yang mengkhianati Yesus. Purbasangka rasial jadi api. Anti-Semitisme menyusup dalam ke masyarakat Katholik Prancis yang juga membawa panji-panji anti-asing. Juru bicara rasialisme, seperti harian Katholik La Croix dan koran Ãdouard Drumont, La Libre Parole, menebarkan benih paranoia sosial yang kian akut.

Pada gilirannya, Kasus Dreyfus memicu gerakan Zionisme yang meyakini perlunya umat Yahudi-yang ditolak bahkan di Prancis-punya tanah air sendiri.

Tapi cerita-cerita besar tak punya satu faset. Pendiri Zionisme, Theodore Herzel, justru percaya Dreyfus bersalah. Di sisi lain Dreyfus sendiri tak melihat ia dianiaya karena ke-Yahudi-annya. Ia meyakini republik yang ia cintai tetap republik dengan cita-cita Revolusi Prancis yang memisahkan agama dari kekuasaan politik dan mengakui hak yang sama bagi setiap orang.

Tapi baru pada 1906, haknya dipulihkan. Ia diterima kembali di ketentaraan dengan pangkat dinaikkan jadi mayor dan menerima bintang la Lagion dâ honneur.

Memang ada yang lain yang penting, dan merisaukan, dalam kisah Dreyfus di Prancis abad ke-19 seperti halnya cerita Ahok di Indonesia abad ke-21. Sebagaimana ditulis Adam Gopnik dalam The New Yorker 28 September 2009, Kasus Dreyfus penting diingat karena di sana tampak bagaimana sejumlah besar orang yang penuh senyum ternyata mudah melibatkan diri dalam kebencian yang brutal-kebencian yang terbit dari keyakinan agama. "*Kebencian dan perilaku bigot bukan sisa masa lalu yang dikuasai takhayul*," tulis Gopnik, "*tapi seunggun api yang hidup-yang mudah datang dan membakar*."

Dari Ahok ke Ahok: agama memang tampak memisahkan diri dari apa yang semula jadi akar rohaninya sendiri: kerinduan akan kebenaran, kerinduan akan keadilan, kerinduan akan damai.

Goenawan Mohamad, Esais; Mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo

TEMPO.CO, 15 Mei 2017

Ahok dan Transubstansiasi Politik

HARIAN Umum Media Indonesia (12/5/2017)--dalam editorial '*Di Balik Simpati kepada Basuki*'--menarik satu garis permenungan dalam rangkaian reaksi terkini terhadap pengalaman personal 'Basuki Tjahaja Purna-ma' (Ahok). Dalam kerangka 'melihat' sesuatu yang berada di balik kenyataan (latensi) fisik-politik kekinian, persoalannya bukan lagi pada 'ke-terpesonaan' momental belaka terhadap satu penampilan politik (kekuasaan) individual, melainkan sebuah proses menemukan dan membela 'nilai keberpihakan' politik pada kemaslahatan umat (rakyat).

Tentu saja, Basuki (Ahok) bukan hanya semata kisah perjuangan 'seorang', melainkan juga mempresentasikan kemunculan segelintir pelaku politik yang menunjukkan tindakan kekuasaan yang 'tidak biasa', terutama bagi sebagian warga yang telah sekian lama berdiri di sisi terjauh hiruk-pikuk politik. Ini juga tentang sebuah aliran dukungan publik yang secara perlahan menunjukkan satu hal bahwa berada terlalu jauh dari diskursus politik justru membuat mereka tahu bagaimana pedihnya wajah mereka ketika dilempar 'batu kemaruk' para penguasa.

Pada usaha menemukan 'latensi' dari fenomena yang mencuat dari tindakan kekuasaan 'segelintir' pelaku politik yang mencuri perhatian dan dukungan publik, tiga aspek dapat diangkat ke permukaan.

Pertama, Komparasi

Telah berada pada jangka waktu yang sangat lama, publik tidak menemukan 'tindakan radikal' dalam banyak kebijakan politik. Proses-proses politik dan demokrasi hanya menghasilkan dan memuncul-kan portofolio politik yang monoton, belum terbilang kelakuan politik elitis yang menjemukkan. Sederhananya, pilihan kebijakan politik propublik--yang tidak hanya mentereng dalam ranah verbalisme kekuasaan belaka--nyatanya belum menjadi pengalaman yang jamak.

Kelakuan politik 'racikan' orang-orang seperti Jokowi, Ahok, Risma, dan sederet figur lainnya di panggung kekuasaan memunculkan bahan per-bandingan (komparasi) bagi publik tentang bagaimana semestinya para pejabat publik memperjuangkan rakyat. Juga ketika mereka 'terpaksa'--kelihatan kasar--dalam membereskan kekacauan dan persoalan krusial warisan masa lalu. Orang-orang seperti ini menjadikan diri mereka sebagai 'bahan perbandingan' yang secara lekas mencuri dukungan publik.

Publik--dengan sisa harapan yang begitu kecil dalam impitan pesimisme terhadap kekuasaan yang kehilangan muruah kerakyatan--menemukan kembali harapan mereka terjaga dalam tapa-laku kekuasaan sedikit tokoh ini. Di tengah atmosfer yang terkunci pada kesempitan, sebagian publik bergembira karena masih ada tokoh-tokoh politik yang menawarkan 'jalan baru' berkekuasaan. Publik kini menggenggam satu patokan tentang '*code of conduct*' para pelaku politik-kekuasaan.

Kedua, Kristalisasi

Pada titik berikut, sikap-sikap politik yang menghasilkan '*comparative values*' (nilai-nilai komparatif) merembes ke dalam kesadaran publik. Itu seperti 'pancingan' yang menjalar ke dalam kesadaran politik masyarakat. Pada titik awal, politik kembali menjadi salah satu medan perhatian publik. Banyak orang menyesal karena pada kurun waktu waktu lama mereka 'alergi' terhadap politik. Ketika mereka menjauh dari keterlibatan dalam proses-proses edukasi kritis terhadap publik. Ketika mereka dengan enteng melepaskan proses-proses demokrasi kepada tangan-tangan sesat.

Sikap tanggap (positif) terhadap kinerja dan integritas politik 'satu-dua' pelaku politik di panggung kekuasaan pada titik tertentu tidak lagi menjadi pengalaman individual. Bantuan yang dialami tidak bersifat pribadi lagi. Cerita-cerita beredar dari orang ke orang, dari keluarga ke keluarga, komunitas ke komunitas, tentang langkah-langkah progresif dan komprehensif sedikit pelaku politik ini, dalam menempatkan kebutuhan publik di atas budaya 'kongkalikong' yang mengakar dalam tubuh kekuasaan.

Proses alamiah sedang berlangsung. Tanggapan-tanggapan itu sedang 'mengkristal' dan membentuk satu titik acuan dalam ekspektasi publik tentang bagaimana semestinya 'negara' bertindak dan berkelakuan di hadapan kebutuhan publik. Di satu sisi, publik memiliki 'standar tetap' tentang sistem, kultur, dan figur dalam dalam ranah politik yang dianggap mumpuni menyelesaikan persoalan-persoalan kerakyat-an. Di sisi sebelahnya, publik memiliki 'referensi' konkret dalam proses kritis mengawal kekuasaan.

Ketiga, Transubstansiasi

Pada level lain, politik sudah keluar dari 'ukuran-ukuran' konvensional--baik sebagai konsep atau sebagai perilaku kekuasaan--yang selama sekian lama menjejali cara pikir publik dan negara. Itu terlihat ketika misalnya penerapan-penerapan 'gaya baru' manajemen birokrasi terasa sebagai sesuatu yang mengganggu 'sis--tem' yang diterima sebagai biasa dan benar dalam periode masa tertentu. Pada titik ini, sebagian publik terpicu kenyataan--di satu pihak mengerasnya keangkuhan para penguasa yang menyebabkan kerusakan. Di pihak lain melihat kegigihan segelintir pelaku politik dalam mengusung kebaikan untuk semua yang ditaruh dan diperjuangkan dalam kerangka kebijakan politik.

Publik melihat sesuatu yang lain--melebihi sosok tertentu dalam kekuasaan semisalnya--tentang politik dan orang-orang politik. Tokoh-tokoh politik 'gaya baru' ini ialah mereka yang hendak meroboh-kan 'pakem' yang coba diabadikan dalam konstruksi kekuasaan dan mengekang persepsi publik. Mereka tetap hadir sebagai sekelompok politikus yang menerobos batas nalar dan kebiasaan dengan sega--la risiko yang mereka terima dari sedikit ruang kekurangan personal yang mereka tunjukkan.

Ketika tu, pada masa kini, melalui integritas dan profesionalisme segelintir tokoh politik ini--politik pada dirinya sendiri mengalami proses ‘transubstansiasi’ yang mencolok. Politik seolah berada pada bentuknya--pada proses-proses yang terlihat seperti biasa--tetapi sesungguhnya politik sudah menemukan makna baru dalam ruang keprihatinan publik.

Itu terlihat pada ‘kesetiaan’ komunitas-komunitas sosial ber-diri bersama tokoh-tokoh politik yang sedang ‘dirundung’ masalah. Politik—karena tata kelola kekuasaan yang semakin bersih di tangan orang-orang baik dan tangguh--sedang meninggikan maknanya. Gelombang dukungan kepada seorang Ahok--sebagai contoh--telah melampaui cara pandang politik formal belaka, yakni proses ‘merayakan’ nilai-nilai utama yang sedang tertemu di satu titik--pada kesadaran publik.

Max Regus, Kandidat Doktor School of Humanities, University of Tilburg, Belanda

MEDIA INDONESIA, 16 Mei 2017

Vonis Ahok dan Rezim HAM Internasional

Ramai pemberitaan ketika Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengkritik vonis kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. PBB meminta Indonesia meninjau dan tentu mencabut pasal penistaan agama yang menjerat Ahok. Inipun bukan pertama kalinya Indonesia kena 'panggang' di PBB karena masalah HAM. Bagaimana menyikapinya?

Masalah ini sangat kompleks, khususnya dalam berusaha memahami rezim hukum HAM internasional. Berangkat dari konstruk berfikir yang sekuler dan Eropa-sentris, kriminalisasi penistaan agama adalah dianggap pelanggaran kebebasan berekspresi. Penistaan agama tidak eksplisit disebut dalam instrumen HAM Internasional antara lain Deklarasi Universal HAM, ICCPR, dan semisalnya, tapi tertulis dalam General Comments yaitu dokumen yang disusun oleh Komite HAM PBB.

Menarik untuk dicatat bahwa sebuah Konvensi HAM butuh diratifikasi dulu sebelum mengikat kepada sebuah negara, dan sudah mafhum bahwa ratifikasi dilakukan melalui prosedur di hukum nasional masing-masing negara agar dapat selaras dengan kepentingan negara tersebut. Mengapa ketika sebuah komite kecil mengeluarkan dokumen (yang tidak mengikat secara formal) bisa langsung dianggap penafsiran otoritatif yang satu kesatuan dengan konvensinya tadi dan mengikat bagi negara-negara?

Sebegitu mudahnyakah terkikisnya kedaulatan negara oleh sebuah komite kecil, walaupun demikian kompleks dan komprehensifnya mandat sebuah negaranya untuk mengikuti rakyatnya sendiri? Ataukah penafsiran yang dilakukan oleh komite ini adalah penafsiran yang sifatnya universal?

Begitu populer dan meyakinkan klaim 'universalitas' ini. Padahal banyak sekali subrezim hukum HAM, seperti di Eropa, ASEAN, bahkan Organisasi Konferensi Islam, yang memiliki khasnya masing masing. Memang semua instrumen tersebut merujuk pada instrumen HAM Internasional (seperti Deklarasi Universal HAM, ICCPR, dan lainnya), tapi batasan 'tidak melanggar instrumen internasional' kenyataannya terkadang tidak jelas.

Perdebatan batas-batas HAM banyak yang akhirnya bermuara pada worldview. Hal ini adalah perkara filosofis yang secara hakikat tentu bukan masalah hukum, tapi jelas akan sangat berpengaruh dalam aliran penafsiran dan penerapan hukum. Ketika rules dalam hukum ada yang bertentangan, maka diselesaikan dengan asas-asas hukum. Ketika asas-asas hukum ini pun bertentangan, diselesaikan dengan nilai-nilai. Ketika nilai-nilai bertentangan? Hukum tidak punya solusi. Apakah di sini memang sewajarnya harus terjadi *clash of civilizations*?

Dalam konteks clash inilah, misalnya, Helen Quane menyebut bahwa sebuah rezim hukum agama boleh saja memiliki pemahaman dan penafsiran sendiri terhadap HAM. Asalkan, menurut beliau, pemahaman dan penafsiran tersebut harus sesuai dengan hukum internasional. Hal ini hanya masuk akal menurut kerangka berfikir sekuler yang, sebagaimana ditulis

Syed Naquib Al-Attas, lahir dari pengalaman Nasrani-Eropa. Apakah ideologi yang lahir dari pengalaman spesifik regional seperti ini dapat dipaksakan secara universal?

Barangkali di sinilah perlu diamati pandangan-pandangan kritis terhadap hukum internasional secara umum. Misalnya pandangan Anthonie Anghie yang melihat bahwa kolonialisme adalah isu sentral pada pembentukan hukum internasional modern di abad pertengahan. Apakah era dekolonialisasi memberikan kesempatan yang adil untuk para eks-jajahan untuk berpartisipasi dalam pembentukan norma-norma hukum internasional?

Secara formal positif mungkin ya, mengingat ratifikasi hampir universal. Tapi apakah prosesnya adil? Ataukah jangan-jangan kita kembali pada rezim hukum alam ala Fransisco de Vitoria yang dulu menjustifikasi penjajahan Spanyol terhadap suku Indian dengan argumen: ‘memberadabkan’ (dengan standar ‘keberadaban’ yang dibuat sendiri oleh negara-negara Eropa)?

Khusus soal HAM, apakah betul argumen yang diajukan Benoit Mayer? Beliau menyebut bahwa rezim HAM Internasional dibuat oleh sebuah konsensus semu (istilah beliau ‘*magic circle*’) yang hanya melibatkan sebuah lingkaran elite kecil dan mengesampingkan mayoritas lainnya dalam pengembangan norma-norma HAM. Memang, misalnya, mantan Hakim Mahkamah Internasional (MI) Awn Al-Khasawneh menyebut bahwa memang MI dalam beberapa kasus tampak cenderung lebih suka berpegang pada teori asal barat tentang hukum internasional dan menolak selainnya.

Jangan-jangan sebenarnya masih sangat relevan diskursus terhadap perkataan John Austin pada abad-19: tidak ada yang namanya hukum internasional melainkan hanya ‘moral internasional’ saja? Panjang sekali kalau mau membicarakan diskursus hukum internasional seperti ini, yang akan berimplikasi pada pandangan soal HAM, PBB, dan lain sebagainya.

Mari kita sekarang melihat Indonesia. Indonesia turut serta dalam Deklarasi HAM ASEAN dan Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam. Kedua deklarasi ini mengakomodasi konsep HAM internasional dalam penafsiran yang lebih sesuai dengan nilai-nilai di ASEAN dan Islam, dan mungkin lebih sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di Indonesia. Tapi di saat yang sama, Indonesia juga meratifikasi instrumen instrumen HAM internasional dengan nyaris tanpa pengecualian maupun catatan. Padahal, banyak pasal yang akan bertentangan dengan hukum nasional. Misalnya, Pasal 19 ICCPR tentang kebebasan berekspresi. Ada baiknya dilakukan pengecualian (atau dalam terminologi perjanjian internasional: *reservation*) secara terkualifikasi dalam konteks tertentu, yaitu antara lain penistaan agama yang esensial bagi nilai-nilai hukum di Indonesia. Akan tetapi, dalam meratifikasi ICCPR Indonesia tidak melakukan pengecualian dan menerima hampir semua norma. Hanya pada Pasal 1 tentang right of self-determination saja Indonesia melakukan deklarasi untuk membatasi maknanya agar mencegah pasal ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang menyuarakan agenda-agenda disintegrasi.

Contoh lain adalah konvensi yang menuntut kesetaraan hak laki laki dan perempuan yaitu CEDAW. Tujuan ini tidak masalah dalam hukum Indonesia. Tapi, apakah 'setara' harus berarti 'sama'? Pasal 16 CEDAW menuntut persamaan dalam hukum keluarga. Ini berbeda dengan hukum keluarga Indonesia yang memberikan hak dan kewajiban yang mungkin tidak sama tetapi setara, sesuai nilai-nilai agama dan adat istiadat. Entah mengapa Indonesia tidak melakukan pengecualian terhadap pasal ini, mengingat lebih dari 20 negara lain (termasuk Malaysia, Israel, Irlandia, dan United Kingdom) pun melakukan pengecualian terhadap pasal ini baik sebagian atau seluruhnya.

Daftar contoh ini tidak akan habis. Ini belum lagi kita bahas masalah-masalah lain misalnya dalam perkara yang terkait nilai nilai agama. Isu agama ini mungkin dianggap primordial oleh pemikir-pemikir barat (tentu berlandaskan sekulerisme), padahal Ketuhanan adalah sila pertama Pancasila. Ditambah lagi kekayaan budaya adat istiadat Indonesia yang dapat mereka pelajari tapi akan sulit mereka pahami dan maknai. Lebih banyak masalah akan lahir jika memandang dari sudut pandang PBB.

Karena itulah, sungguh menarik situasi ini. Di satu sisi, kita memiliki PBB yang kokoh memaksakan universalitas di dunia yang tidak universal. Di sisi lain, kita memiliki Indonesia yang memiliki nilai-nilai tersendiri dalam menghargai manusia yang sebagiannya berbeda dengan PBB tapi secara hukum Internasional malah mengikatkan diri pada hukum PBB tersebut dengan nyaris tanpa kecuali. Terjadilah benturan antara setidaknya dua nilai yang sama-sama diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan Indonesia.

Hubungan internasional memang penting, sebagaimana diamanatkan antara lain oleh pembukaan UUD 45 "*…ikut melaksanakan ketertiban dunia…*". Akan tetapi, Indonesia hanya perlu berpartisipasi sepanjang hubungan internasional adalah selaras dengan nilai-nilai bangsa ini yang tertanam dalam Pancasila dan UUD 45, yang mana mungkin memang sebagian besarnya selaras. Tentu ada sebagian kecil norma-norma hukum internasional –yang ternyata tidak seuniversal yang diklaimkan— yang tidak selaras dengan nilai-nilai Indonesia. Tentu Indonesia tidak perlu dan tidak boleh melaksanakan yang tidak selaras ini.

Ketidaksesuaian stance internasional dan domestik Indonesia dalam nilai-nilai HAM adalah sangat disayangkan, dan harus menjadi pertimbangan bagaimana ke depannya Indonesia berstrategi dalam keikutsertaannya dalam pembentukan norma-norma HAM Internasional. Akan tetapi ketika pertentangan keduanya terjadi dalam forum hukum domestik, sudah sewajarnya Indonesia lebih mengedepankan nilai-nilai yang dianut oleh konstituennya. Ketidakpahaman PBB terhadapnya bukanlah alasan untuk kita mulai goyah dari nilai nilai ini, tapi bolehlah mereka berpendapat dengan nilai-nilai mereka sendiri. Pada akhirnya: *lakum diinukum waliyadiin.*

Fajri Matahati Muhammadin, Dosen Hukum Internasional UGM

REPUBLIKA, 16 Mei 2017

Toleransi yang Memihak

Sejujurnya, semakin kita melibatkan diri dalam banyak hiruk pikuk dunia kita saat ini, semakin pula membingunkan. Kalau bukan karena sebuah tujuan mulia, yaitu demi terwujudnya hubungan yang harmonis dan perdamaian di antara manusia, boleh jadi sebagian di antara kita akan berpikir: "*who cares and why care*?" Bagi saya, melibatkan diri dengan berbagai upaya membangun dialog, demi terwujudnya saling memahami, mwnghormati bahkan kerjasama, tidak saja karena tuntutan sosial. Bukan hanya karena posisi saya sebagai minoritas yang hidup dalam tatanan masyarakat mayoritas non Muslim. Terlebih lagi di negara super power yang memang masih relatif belum paham tentang Islam.

Ada dua hal minimal yang menjadi pijakan saya dalam membangun dialog ini. Pertama, karena memang saya meyakini jika agama yang saya anut ini adalah agama yang mengedepankan dialog dan kerjasama di atas konflik dan permusuhan. Agama yang mengedepankan toleransi, saling memahami dan menghormati di atas pandangan sempit, saling mencurigai dan mengecilkan bahkan mengucilkan. Berbagai ayat dalam Alquran, terutama tentang ayat "*ta'aruf*" (saling mengenal) dan "*tanawwu'*" (pluralitas) serta ayat yang mengakui esksitensi keyakinan orang lain kendatipun tidak menyetujuinya (*lakum dinukum wa liya diin*) serta ketauladanan kepada Rasulullah SAW menjadi acuan saya dalam membangun dialog itu.

Kedua, karena saya memahami betul bahwa dunia kita saat ini adalah dunia global. Dunia yang ditandai salah satunya oleh "interconnectedness" (saling tergantung antara satu dan lainnya). Dunia yang semakin kecil sehingga semua manusia sesungguhnya hidup di bawah atap yang sama. Bahwa dengan kemajuan sains dan tekonologi, khususnya di bidang telekomunikasi dan informasi, hampir saja menjadikan pembatas di antara manusia tumbang. Dan karenanya manusia hanya punya satu pilihan, berdialog dan kerjasama. Atau saling menjauh, mencurigai dan membenci, lalu bermusuhan dan berperang.

Dalam dialog dan kerja sama, sesungguhnya diperlukan "*mutualitas*" (*mutuality*). Artinya, jika Anda ingin dikenal, maka belajarlah mengenal orang. Jika Anda ingin dipahami, maka belajarlah memahami orang lain. Jika Anda ingin dihormati, maka Anda harus belajar menghormati orang-orang di sekitar Anda. Intinya, tepuk tidak akan terjadi hanya dengan sebelah telapak.

Kata mutualitas, itulah sesungguhnya yang tercermin dari ayat "saling mengenal" (*ta'aruf*) yang disebutkan di atas. Bahwa proses membangun toleransi dan kerukunan itu adalah bagian dari dinamika komunal. Dan karenanya mengharuskan setiap anggota komunitas itu untuk mengambil bahagian. Ada hukum timbal balik dalam proses membangun toleransi itu. Artinya, toleransi seharusnya tidak dipahami sebagai tanggung jawab sepihak. Dan tidak ditujukan untuk kepentingan sepihak semata. Menuntut sikap toleran dari orang lain dengan sendirinya menuntut anda untuk

membangun sikap toleransi itu. Tidak sekedar mengenal hak dalam toleransi. Tapi juga sadar tanggung jawab dalam toleransi. Pemahaman toleransi seperti inilah sesungguhnya yang diajarkan oleh Islam. Toleransi yang terbangun di atas asas keadilan. Bahwa toleransi harus ditegakkan kepada semua tanpa pandang bulu, tanpa ikatan kepentingan pribadi atau golongan.

Toleransi dan Kepentingan

Kenyataannya membangun toleransi ternyata tidak seindah harapan dan idealisme banyak orang. Dalam praktiknya, toleransi seringkali identik dengan kepentingan tertentu. Kentalnya kepentingan dalam proses toleransi ini, seringkali membingunkan. Tidak saja di luar dari satu kelompok sosial atau komunitas. Bahkan, dalam satu komunitas sekalipun sangat membingungkan.

Di atas saya menyebutkan bahwa toleransi seyogyanya tidak memihak kepada golongan, tapi menganut asas keadilan yang tidak memiliki batas apapun. Tapi, ketika bersentuhan dengan kepentingan, dalam satu golongan pun terkadang menjadi korban toleransi atau juga intoleransi. Ada pihak-pihak yang rela mengorbankan kelompoknya demi memburu kepentingan yang dimaksud.

Saya barangkali ingin blak-blakan dan terbuka apa adanya dengan pengalaman saya sendiri. Sejak awal, saya terlibat dalam membangun dialog dan kerja sama lintas agama, saya banyak mendapat pujian. Dikarenakan saya banyak menyuarakan pembelaan terhadap ketidakadilan terhadap minoritas non Muslim di dunia Islam. Apa yang saya sampaikan adalah kenyataan yang masih terjadi di berbagai negara-negara Muslim mayoritas, khususnya di Timur Tengah. Saya tidak merasa tersanjung dengan pujian itu. Karena saya merasa membela hak-hak minoritas non Muslim di tengah-tengah mayoritas masyarakat Muslim adalah "amanah risalah". Bukankah Rasul SAW menyebutkan: "*Barangsiapa yang menyakiti minoritas non Muslim, maka saya adalah musuhnya di hari Kiamat kelak.*" (hadits).

Akan tetapi, pujian itu, berbalik ketika pembelaan saya lakukan kepada sesama Muslim. Saya melakukan pembelaan di saat ketidakadilan dilakukan kepada komunitas Muslim, baik di barat maupun di negara-negara mayoritas Muslim itu sendiri. Kenyataan yang terkadang sebagian mereka yang mengaku pahlawan toleransi telah buta mata, bahkan buta mata hati untuk melihat dan mengakuinya.

Dalam beberapa tulisan terdahulu, saya banyak menyinggung ketidakadilan terhadap umat ini dalam banyak hal. Ketidakadilan politik, sosial ekonomi, bahkan hampir saja dalam segala aspek kehidupan manusia.

Tapi yang paling tidak adil adalah pemaksaan persepsi jika umat ini tidak lagi toleran, bahkan radikal di saat umat Islam terlibat dalam kompetisi apa saja dan berada di atas angin. Mungkin pilkada DKI adalah contoh terdekat dari kenyataan ini. Terlepas dari aksi 411, 212, maupun 515 dan lain-lain, kemenangan Anies Sandi di Jakarta secara drastis dan dramatis diubah dari

pertarungan demokrasi ke pertarungan radikal - moderate. Pertarungan antara mereka yang toleran melawan mereka yang intoleran. Ada upaya sistimatis yang ingin membangun persepsi bahwa kemenangan Anies Sandi adalah kemenangan kaum radikal dan intoleran. Bukan kemenangan kandidat melalui proses demokrasi. Dan oleh karenanya, dengan sendirinya mereka yang mendukung Anies Sandi adalah kelompok radikal dan intoleran. Mereka yang mendukung Anies Sandi adalah kelompok yang anti-Pancasila dan kebinnekaan dan NKRI. Kampanye ini kemudian diperluas menjadi seolah-olah Indonesia kini berada di ambang bahaya radikalisme. Diperburuk kemudian dengan ancaman bahwa NKRI kini seolah memasuki keadaan genting seperti Irak dan Suriah.

Bayangkan, dalam beberapa hari terakhir saja, berbagai media di Barat telah menuliskan kemenangan Anies Sandi sebagai kemenangan kelompok Islamis (radikal). Dari Wall Street, New York Times hingga ke Democracy Now semuanya seolah menyimpulkan bahwa Indonesia kini berada diambang bahaya radikalisme.

Lalu bagaimana dengan isu agama dalam kampanye?

Sesungguhnya di mana saja dalam dunia ini, isu agama dalam politik selalu saja terjadi. Sejujurnya, calon Gubernur Ahok dalam pilkada tempo hari juga hampir seratus persen didukung oleh kelompok di mana sang calon menjadi bagian darinya. Dalam poling-poling, semua menunjukkan bahwa dukungan itu nyata. Bahkan jauh-jauh penginjil terkenal Amerika, Franklin Graham, memberikan dukungan dan doa khusus kemenangan Ahok dalam pilkada Jakarta. Di mana-mana saja, saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air yang kebetulan beragama Nasrani pada umumnya mendukung Ahok.

Lalu di mana salahnya jika Anies Sandi memang didukung oleh umat Islam?

Salahnya barangkali adalah bahwa pendukung Anies Sandi memang jujur apa adanya dan menyerukan umat Islam untuk memilih calon Muslim. Atau mungkin dalam bahasa negatifnya terlalu vulgar dalam mengekspresikan apa yang selama ini saya sebut dengan istilah "*solidaritad sosial*" itu. Maka, sejatinya, tidaklah salah jika masing-masing pihak memakai sentimen agama dalam menentukan pilihan. Bahkan, Bung Karno sendiri pernah menyerukan hal itu, asal saja dilakukan dalam kerangka NKRI dan melalui proses demokrasi.

Pada akhirnya, kejujuran toleransi, sekaligus komitmen Pancasila dan NKRI itu, akan terlihat ketika kita teruji. Di saat dalam proses pemilu atau pilkada jagoan kita kalah. Di saat berlomba dalam memperjuangkan apa yang kita anggap benar, tapi kalah. Akankah kita kita legowo dan menerima kekelahan itu seraya tetap memuji proses demokrasi? Dan yang lebih penting adalah tetap mengedepankan kepentingan "*kita*" di atas kepentingan "kami".

Perhatikanlah setelah proses pengadilan Ahok di Jakarta berkhir dengan ketukan palu. Semua dalam proses itu mengatakan, mari kita hormati proses hukum, seraya melakukan pressure publik sebagai bagian proses yang masih

dijamin oleh konstitusi. Kedua pihak pun siap menerima hasil proses hukum itu. Kenyataannya, ketika palu telah dijatuhkan semua menghakimi keputusan hukum. Bahwa keputusan itu tidak adil. Dan tidak lagi canggung menuduh pemerintah yang didukungnya seolah pemerintah yang zalim. Saking kecewanya, sempat menyebutkan jika pemerintahan Jokowi itu lebih buruk dari pemerintahan SBY. Bahkan lebih runyam lagi, mengampanyekan jika negara Indonesia telah berbalik menjadi negara zalim ke pihak tertentu.

Lebih menyedihkan lagi, ada saja pihak-pihak tidak lagi malu-malu bekerja sama dengan pihak NGO-NGO asing, bahkan mungkin saja dengan pemerintah luar, memburuk-burukkan negaranya sendiri. Hal ini bertambah runyam karena pihak luar tidak tanggung-tanggung ikut menyibukkan diri dengan urusan rumah tangga Indonesia. Dengan sikap seperti itu, sesungguhnya siapa yang toleran dan siapa yang intoleran? Siapa yang cinta NKRI dan siapa yang anti-NKRI? Siapa yang sejatinya pancasilais dan siapa yang merusak Pancasila atas namanya?

Ah, saya diingatkan oleh kelompok-kelompok radikal Muslim yang mengatas namakan Islam. Tapi, perilakunya justeru mencoreng wajah Islam itu sendiri. Jangan-jangan sama saja dengan mereka yang mengaku toleran, pancasilais, dan cinta NKRI itu. Tapi kenyataannya?

Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation

REPUBLIKA, 17 Mei 2017

PILKADA
DKI
'II'
HUKUM
TEROR
POLITISASI
SARA
- BAROMETER
DEMOCRAZY
INDONESIA ?

PILKADA DKI
2017
PILPRES 2019
PILKADA 2018